



Membangun Pertumbuhan Melalui Penguatan Bisnis

LAPORAN TAHUNAN 2023

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



➤ **Membangun Pertumbuhan Melalui Penguatan Bisnis**

2023

Laporan Tahunan

Dalam membangun pertumbuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapabilitas seluruh organ dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan bisnis, inovasi teknologi dan efisiensi. Fokus Bank dalam mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan yaitu dengan menerapkan berbagai strategi antara lain perubahan model bisnis, reposisi jaringan, perubahan struktur organisasi, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan *cyber security*. Program transformasi yang dimiliki Bank Jatim telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan yang ditunjukkan dengan peningkatan pada laba dan aset Bank.

Kesinambungan Tema



2022

Laporan Tahunan



2019

Laporan Tahunan



2021

Laporan Tahunan



2020

Laporan Tahunan

2022

Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Inovasi dan investasi yang telah dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan mengembangkan JConnect yang merupakan sebuah Branding Digital Banking di tahun 2021 telah terimplementasi di tahun 2022. Aplikasi JConnect yang telah dikembangkan meliputi JConnect Sipandai, JConnect EKMKG, JConnect Eloan, JConnect Mobile Banking dan Jconnect Internet Banking. Berbagai aplikasi tersebut telah memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang selanjutnya memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis secara signifikan di tahun 2022.

2021

Pengembangan Bisnis yang Konsisten Melalui Sinergi dan Konektivitas Digital

Perubahan pada *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 dan new normal hingga saat ini. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan layanan kepada nasabah, optimize proses bisnis serta penguatan IT Security. Sebagai wujud komitmen Bank Jatim untuk memberikan ketersediaan layanan perbankan, inovasi, dan kemudahan aksesnya bagi nasabah dan masyarakat, Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan “JConnect”, sebuah *Branding Digital Banking* yang mencerminkan transformasi digital Bank Jatim dengan semangat mengkoneksikan semua kebutuhan dan kemudahan akan akses layanan perbankan.

JConnect juga mampu meningkatkan efektivitas sinergi Bank Jatim dengan berbagai mitra melalui aplikasi berbasis digital yaitu dengan berbagai merchant Bank Jatim yang dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan daerah, bantuan sosial dan Rumah Sakit serta dengan berbagai ekosistem digital di Indonesia.

Sinergi dan konektivitas digital tersebut telah mendorong terlaksananya pengembangan bisnis yang konsisten. Pada masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini, transaksi digital perbankan mengalami kenaikan cukup signifikan. Masyarakat lebih memilih melakukan transaksi perbankan melalui gadget mereka masing-masing, tanpa harus datang ke kantor layanan Bank dan dapat dilakukan kapan saja serta dimana saja secara realtime online.

2020

Menghadapi Tantangan, Menciptakan Peluang

Tahun 2020 menjadi tantangan berat bagi dunia. Mewabahnya COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan pengendalian wabah melalui pembatasan pergerakan orang dan barang yang diterapkan oleh berbagai negara. Selaras dengan perekonomian global, dinamika perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Aktivitas industri perbankan sepanjang tahun 2020 tergolong cukup tertahan akibat lemahnya permintaan kredit sebagaimana tercermin dari kinerja pertumbuhan kredit sektor perbankan yang masih mengalami perlambatan, dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun DPK tumbuh signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat kinerja intermediasi perbankan menurun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut telah menjadi tantangan bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Ketahanan dan kecukupan modal Bank yang relatif tinggi serta kepemilikan captive market dan aksesibilitas belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah mampu menangkap berbagai peluang yang ada. Berbagai peluang tersebut di antaranya besarnya pangsa pasar Bank Jatim terutama PNS, tingginya populasi penduduk milenial yang merupakan pengguna internet dan e-commerce, serta pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi fokus utama. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki Perseroan telah mampu menghasilkan kinerja sesuai yang ditargetkan. Pada tahun 2020, Perseroan telah mampu meningkatkan laba dan aset di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2020.

2019

Modernisasi Layanan untuk Peningkatan Pertumbuhan Bisnis

Setelah Bank Jatim mampu memaksimalkan kinerja dan meningkatkan Sinergi Berkelanjutan menuju Transformasi Digital pada 2018, kini Bank Jatim mengangkat tema “Menjaring Peluang untuk Memberikan Nilai Tambah Menuju Kinerja Terbaik yang Berkelanjutan” Tema tersebut dianalogikan dengan garis yang saling terhubung, hal ini menggambarkan proses digitalisasi bank di setiap operasionalisasi perbankan.

Sementara blok merah berbentuk panah merepresentasikan komitmen Bank Jatim mewujudkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Daftar Isi



Kilas Kinerja

Tema dan Arti Tema	1
Kesinambungan Tema	2
Daftar Isi	4
Sekilas Tentang Bank Jatim	8
Jejak Langkah	10
Kontribusi Terbaik Kami	12

Kilas Kinerja

Capaian Penting 2023	18
Ikhtisar Data Keuangan Penting	20
Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan	20
Ikhtisar Operasional	25
Informasi Harga Saham	25
Aksi Korporasi	27
Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)	27
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi	27
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya	28
Laporan Analisis Perusahaan	28
Peristiwa Penting Tahun 2023	29



Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Direksi	36
Laporan Dewan Komisaris	52
Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2023	64

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	68
Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah	69
Brand Perusahaan	71
Riwayat Singkat Perusahaan	72
Keterangan Perubahan Nama	73
Visi, Misi & Budaya Perusahaan	74
Visi	74
Misi	74
Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	75
Budaya Perusahaan	76
Kegiatan Usaha	79
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan	79
Produk dan Jasa	80
Wilayah Operasional	94
Daftar Keanggotaan Asosiasi	97
Struktur Organisasi	98



Profil Perusahaan

Profil Direksi	100
Profil Dewan Komisaris	109
Profil Dewan Pengawas Syariah	117
Profil Pejabat Eksekutif	121
Profil Pegawai	141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan	141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	141
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	142
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	142
Komposisi Pemegang Saham	143
Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar	144
Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih	145
Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%	146
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	147
Kepemilikan Saham Senior Manajemen	148
Klasifikasi Pemegang Saham	148
Pemegang Saham Utama dan Pengendali	148
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama	148
Struktur Grup Perusahaan	149
Informasi Kelompok Usaha Bank	149
Kronologi Penerbitan Saham	149
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi	151



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya	151
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	152
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	152
Penghargaan dan Sertifikasi	154
Informasi yang Tersedia di Website	161

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

Tinjauan Perekonomian	164
Analisis Perekonomian Global	164
Analisis Perekonomian Nasional	166
Analisis Industri Perbankan	168
Analisis Posisi Bank Jatim Dalam Industri Perbankan	170
Tinjauan Operasional	171
Strategi Bank	171
Aspek Pemasaran	174
Strategi Pemasaran Tahun 2023	174
Pangsa Pasar	174
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	177
Segmen Operasi	177
Segmen Geografis	209
Tinjauan Keuangan	211
Kinerja Keuangan	211



Human Capital

Laporan Posisi Keuangan	211
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	227
Laporan Arus Kas	233
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	235
Suku Bunga Dana	239
Analisis Kualitas Aset Produktif	242
Suku Bunga Dasar Kredit	243
Struktur Permodalan Bank	250
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan	251
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	264
Investasi Barang Modal	264
Komitmen dan Kontinjensi	265
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan	266
Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2024	266
Pencapaian Target dan Target Ke Depan	269
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	274
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	275
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/ Modal	275
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	275
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank	279
Perubahan Kebijakan Akuntansi	280
Tingkat Kesehatan Bank	281
Informasi Kelangsungan Usaha	281
Aspek Perpajakan	282
Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter	283



Teknologi Informasi

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar	284
Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif	287

Human Capital

Strategi Manajemen Human Capital	288
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Human Capital	290
Rekrutmen	290
Pengembangan Kompetensi	292
Pengembangan Karir	296
Penilaian Kinerja	297
Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang	297
Program Pensiun	299
Survei Kepuasan Pegawai	299
Human Capital Information System	300
Internalisasi Budaya	302
Struktur Pengelola Human Capital	303
Rencana Kerja Human Capital 2024	304

Teknologi Informasi

Strategi Teknologi Informasi	308
Inovasi Teknologi Informasi	309
Infrastruktur Teknologi Informasi	310
Tata Kelola Teknologi Informasi	311
Struktur Pengelola Teknologi Informasi	314
Rencana Kerja Teknologi Informasi	315



Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan	320
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	320
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	322
Struktur Organ Perusahaan	322
Governance Soft Structure	322
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	324
Pemegang Saham	324
Rapat Umum Pemegang Saham	324
Direksi	334
Dewan Komisaris	348
Dewan Pengawas Syariah	382
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	386
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	388
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	390
Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	392
Organ dan Komite di Bawah Direksi	415
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	444
Akuntan Publik	448
Sistem Pengendalian Internal	449
Manajemen Risiko	453
Fungsi Kepatuhan	464
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	466
Perkara Hukum	467
Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya	468



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Akses Informasi dan Data Perusahaan	469
Kode Etik	476
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	479
Whistleblowing System	481
Program Anti Korupsi	484
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	487
Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian	488
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	489
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	489
Rencana Strategis Bank	489
Buyback Saham dan Buyback Obligasi	489
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	489
Perselisihan Internal	490
Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)	490
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	491
Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	491
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	491
Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision	499
Good Corporate Governance Assessment	500

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Indeks OJK	505
Laporan Keuangan	526

Sekilas Tentang Bank Jatim



Total Aset

Rp103,85
Triliun



Tanggal Berdiri
17 Agustus 1961



Bidang Usaha
Jasa Perbankan



Jumlah Kantor
1 Kantor Pusat &
1.819 Jaringan Kantor

Produk & Jasa



Simpanan



Kredit Konsumer



Kredit Menengah dan Korporasi

ALAMAT KANTOR PUSAT

JALAN BASUKI RACHMAD 98 – 104,
SURABAYA 60271



Kepemilikan Saham

51,13%	Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Timur
28,35%	38 Pemda Kabupaten/Kota
20,52%	Masyarakat



Jumlah Karyawan
4.544 Orang



Produk Tresuri



Jasa Bisnis



Jasa Kelembagaan



Produk Pembiayaan Syariah

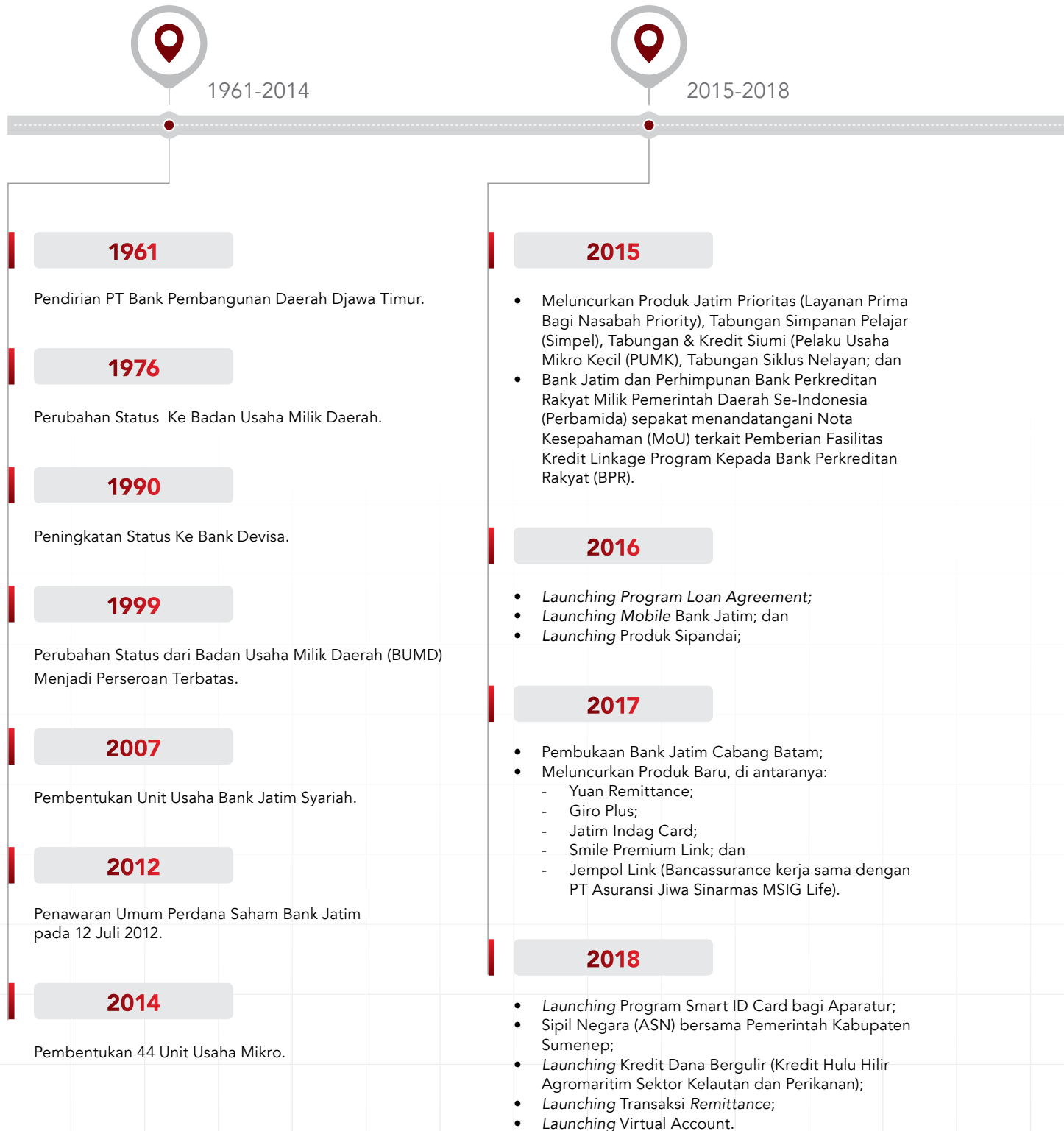


Produk Dana & Jasa Syariah



E-Channel dan Jasa Lainnya

Jejak Langkah





2019-2021



2022

2019

- Peresmian dan *Launching* BJTM Connect;
- *Launching* jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim mobile banking melalui scan QR code);
- *Launching* Portal e-form Kredit;
- Bankjatim dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening Efek 5000 civitas akademika bersama);
- Kerja sama dengan GoPay dan Grab; dan
- Tim Bola Voli Putri mencetak hat-trick Juara Livoli Divisi Utama.

2020

- *Launching* Jatim Code QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai pengembangan fitur pembayaran Mobile Banking;
- *Launching* produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro;
- Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya *Top of The Top* BUMD 2020 dan *The Most Profitable Regional Bank*.

2021

- *Launching* E-Jatim Prioritas.
- Pengembangan digital banking yang berkelanjutan melalui J-Connect.



- Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui *marketplace*.

2022

- Peluncuran aplikasi JConnect Invest dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022.
- *Launching* JConnect Remittance yaitu transaksi pengiriman uang dari Malaysia melalui channel (Agen atau aplikasi) milik mitra Bank Jatim yaitu MTA – Merchantrade Asia.

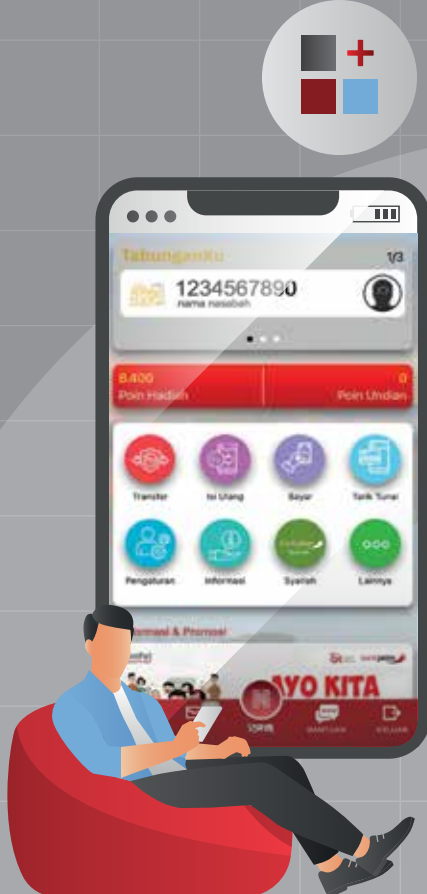
Kontribusi Terbaik Kami



Memiliki Infrastruktur Teknologi Perbankan Digital yang Cukup Memadai untuk Bersaing dengan Industri

Di tengah berbagai tantangan persaingan industri perbankan, seperti perubahan pola kehidupan masyarakat, hingga kebutuhan pelanggan yang makin beragam, pelaku industri perbankan terus berlomba-lomba memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan atau nasabahnya. Demikian halnya dengan Bank Jatim yang seiring waktu terus berusaha mempertahankan eksistensi di industri perbankan di Indonesia. Salah satu syarat mutlak untuk tetap eksis dan unggul dalam iklim kompetisi yang sedemikian ketat adalah peningkatan kualitas layanan. Karena hanya dengan layanan yang *excellent*, kepuasan nasabah, *image* bank hingga kinerja keuangan yang positif dapat diraih. Untuk itu, Bank Jatim terus berinovasi guna memperkuat posisi bank ini sebagai salah satu pemain terkemuka di industri perbankan nasional.

Untuk itu, Bank Jatim terus menghadirkan layanan-layanan prima khususnya digitalisasi melalui layanan JConnect yang terus mendapatkan penambahan fitur. Pada tahun 2023, Bank Jatim meluncurkan JConnect Pro. Melalui JConnect Pro, masyarakat kini dapat membuka rekening Bank Jatim lewat *online* kapanpun dan di manapun tanpa harus datang langsung ke kantor. Hanya dengan mengisi data diri dan verifikasi data dengan video banking, maka nasabah sudah bisa memiliki rekening Bank Jatim.





Sinergi dengan Berbagai Pihak

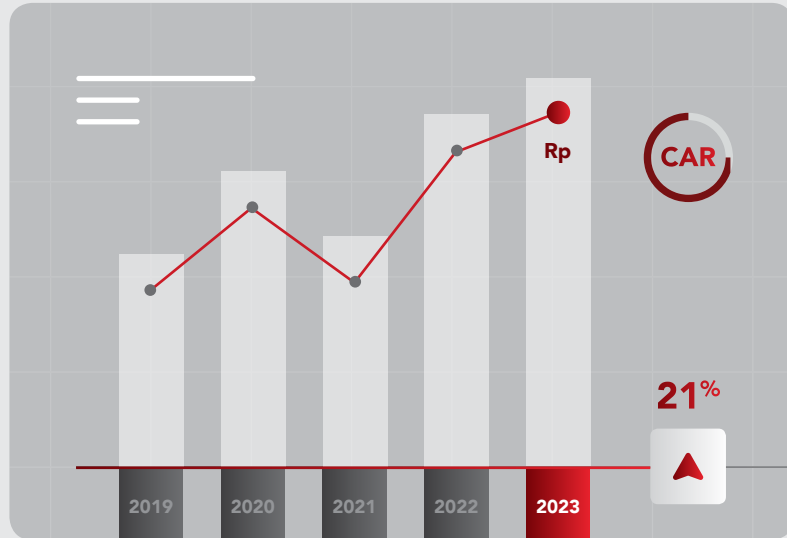
Bank Jatim berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah melalui sinergitas dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung program dan proyek-proyek strategis pembangunan ekonomi daerah. Bank Jatim telah mendorong kinerja pencapaian bisnis dengan mendukung pelaksanaan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dilaksanakan melalui beberapa program di antaranya Jatim Sejahtera, Jatim Harmoni, Jatim Berdaya, Jatim Agro, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat dan Jatim Amanah.

Selain mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank juga turut menjalin konglomerasi bisnis terintegrasi dengan *sister company*/Bank UMKM Jawa Timur dan BPR Perbamida. Bank Jatim juga memperkuat jalinan sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain itu, Bank Jatim juga telah menjalin sinergi dengan berbagai pihak antara lain, RSU Brimadika untuk Layanan Kesehatan Pegawai, Bank NTB Syariah sebagai langkah untuk memperkuat Layanan Syariah, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Bidang Bisnis dan Akademis serta sinergi dengan Bank Lampung.



Tingkat Permodalan Bank yang Relatif Tinggi

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama 5 (lima) tahun berturut-turut berada pada level yang aman yaitu berkisar di atas 21%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK yang sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.



Peresmian Desa Pendulum Devisa

Pada tahun 2023, Gubernur Jawa Timur meresmikan Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim. Definisi program ini yaitu untuk membentuk suatu desa yang telah memiliki komoditas unggulan tertentu, berkualitas ekspor, mampu menggerakkan sebagai pendulum terciptanya kegiatan ekspor di Jawa Timur, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan *offtaker* yang juga berada di wilayah Jawa Timur. Dalam menentukan pembentukan Desa Pendulum Devisa ada beberapa kriteria yaitu:

1. Memiliki Produk Unggulan.
2. Desa mempunyai keunikan.
3. Terdapat komunitas penghasil produk unggulan daerah setempat yang berorientasi ekspor.

Sedangkan tujuan dari Desa Pendulum Devisa yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan ekspor di Jawa Timur dalam rangka Jatim berdaya, sekaligus memperbaiki kualitas neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur.
2. Menaikkan *brand image* dengan *system branding* dan menciptakan ekosistem yang mendukung dalam proses bisnis UKM yang berorientasi ekspor (dari hulu ke hilir).

Desa yang terpilih sebagai Desa Pendulum Devisa tahun 2023 yaitu:

1. Desa Ngindeng, Ponorogo (PT Enha Sentosa Indonesia).
2. Desa Trayang, Nganjuk (PT Astana Shoga Asia).
3. Desa Plosorejo, Blitar (Kampung Cokelat).
4. Desa Wates, Kediri (PT Tropikal Jaya Sukma – P. Sumali).
5. Desa Kedunggalar, Ngawi (UD Simple Wood - KUPS MJS)
6. Desa Wonorejo, Malang (PT Pameling Agro Nusantara – Koperasi Konsumen Pameling Makmur Mandiri).
7. Desa Mujing, Pacitan (PT Indo Bumi Lavanaa - Bumdes Manunggal)
8. Desa Tegalrejo, Probolinggo (CV Dua Putri Sholehah)

Tabel Permodalan Bank Jatim

(Dalam Jutaan Rupiah)

Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2023	2022	2021
Modal inti utama (CET 1)	11.025.184	10.346.392	9.297.192
Modal pelengkap (Tier 2)	516.010	437.563	415.071
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	11.541.194	10.783.955	9.712.263
Aset Tertimbang Menurut Risiko kredit	40.764.771	34.567.488	32.790.641
Aset Tertimbang Menurut Risiko operasional	4.083.746	8.917.841	8.397.351
Aset Tertimbang Menurut Risiko pasar	49.106	108.144	98.936
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	44.897.623	43.593.473	41.286.928
RASIO KECUKUPAN MODAL (%)			
Rasio CET 1	24,56%	23,73%	22,52%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	25,73%	24,80%	23,58%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	25,71%	24,74%	23,52%

DESA PENDULUM DEVISA

Membentuk suatu desa yang telah memiliki komoditas unggulan tertentu, berkualitas ekspor, mampu menggerakkan sebagai pendulum terciptanya kegiatan ekspor di Jawa Timur, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan offtaker yang juga berada di wilayah Jawa Timur.



Mei 2023

Terdapat 3 Desa pada *Launching* tahap I Desa Ngindeng (Ponorogo), Desa Trayang (Nganjuk), dan Desa Plosorejo (Blitar)



Desember 2023

Apresiasi dan Branding diberikan kepada Desa Pendulum Devisa



September 2023

Terdapat 1 Desa pada *Launching* tahap III Desa Tegalrejo (Probolinggo)

03

04



Agustus 2023

Terdapat 4 Desa pada *Launching* tahap II Desa Wates (Kediri), Desa Kedunggalar (Ngawi), Desa Wonorejo (Malang), dan Desa Mujing (Pacitan)





KILAS Kinerja





Capaian Penting 2023



KREDIT KOMERSIAL DAN KORPORASI TAHUN 2023

Rp7,06

triliun

Meningkat Sebesar



6,80%

dibandingkan 2022



KREDIT KONSUMER TAHUN 2023

Rp30,26

triliun

Meningkat Sebesar



9,23%

dibandingkan 2022



KREDIT MIKRO TAHUN 2023

Rp7,62

triliun

Meningkat Sebesar



44,02%

dibandingkan 2022



KREDIT RITEL DAN MENENGAH TAHUN 2023

Rp6,64

triliun

Meningkat Sebesar



41,32%

dibandingkan 2022



PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2023

Rp2,19

triliun

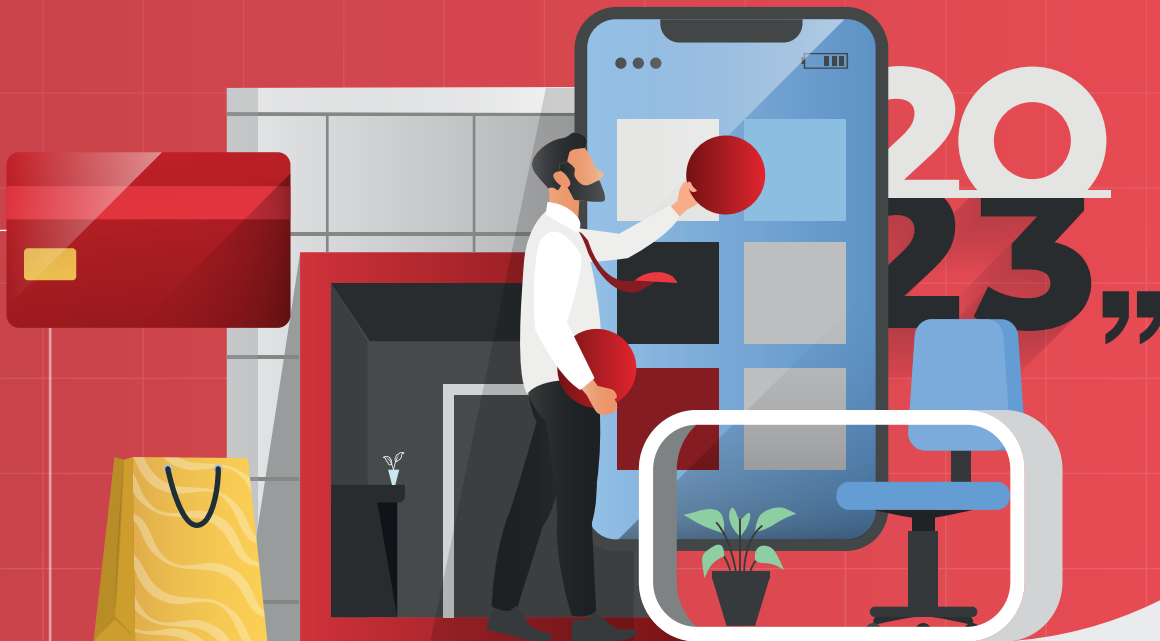
Meningkat Sebesar



14,94%

dibandingkan 2022





**PENDAPATAN BUNGA SYARIAH
TAHUN 2023**

Rp7,36
triliun

Meningkat Sebesar



6,90%

dibandingkan 2022



**JUMLAH ASET
TAHUN 2023**

Rp103,85
triliun

Meningkat Sebesar



0,80%

dibandingkan 2022



Ikhtisar Data

Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
Kas	2.652.775	1.988.262	2.023.077	2.511.548	2.729.776
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	8.805.300	3.659.968	5.734.527
Giro pada bank lain	491.330	303.129	211.681	237.715	111.479
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(441)	(238)	(53)	(25)
Giro pada bank lain - neto	490.253	302.688	211.443	237.662	111.454
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	6.916.329	9.917.695	6.884.658	11.989.584
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	(3.154)	(1.763)	(795)	(2.357)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	5.229.695	6.913.175	9.915.932	6.883.863	11.987.227
Tagihan spot dan derivatif	-	361	-	-	-
Surat berharga	16.323.831	23.217.671	32.388.966	14.666.737	9.568.245
Cadangan kerugian penurunan nilai	(511)	(400)	(5.943)	(8.118)	(5.174)
Surat-surat berharga - neto	16.323.320	23.217.271	32.383.023	14.658.619	9.563.071
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	4.095.066	-	-	1.038.432
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	7.822.847	3.420.685	12.573.044	5.837.520
Tagihan lainnya	223.138	286.147	230.019	131.932	81.265
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Pihak berelasi	184.848	134.871	182.889	285.595	320.896
Pihak ketiga	54.576.055	46.061.786	42.566.670	41.195.171	38.031.404
Jumlah kredit yang diberikan	54.760.903	46.196.657	42.749.559	41.480.766	38.352.300
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(1.318.612)	(1.831.417)	(1.454.721)	(980.134)
Kredit yang diberikan - neto	53.395.998	44.878.045	40.918.142	40.026.045	37.372.166
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	646.125	793.900	555.020	416.420
Biaya dibayar dimuka	207.452	166.661	134.200	227.932	285.522
Aset tetap					
Biaya perolehan	2.230.878	2.109.260	1.906.263	1.882.572	1.595.455
Akumulasi penyusutan	(953.165)	(825.010)	(762.052)	(676.592)	(572.026)
Nilai buku	1.277.713	1.284.250	1.144.211	1.205.980	1.023.429
Aset pajak tangguhan, neto	472.123	502.238	627.211	591.676	522.638
Piutang pajak	777	493	412	65	-
Aset lain-lain, neto	373.402	140.998	115.775	356.098	52.866
JUMLAH ASET	103.854.773	103.031.367	100.723.330	83.619.452	76.756.313

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas segera	987.604	872.514	593.875	484.834	357.565
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	12.644.538	15.295.405	17.719.735	14.373.446	14.940.917
Pihak ketiga	63.205.317	64.630.285	63.668.950	52.412.975	45.604.955
Jumlah simpanan dari nasabah	75.849.855	79.925.690	81.388.685	66.786.421	60.545.872
Simpanan dari bank lain					
Pihak berelasi	56.694	141.996	360.169	238.860	137.819
Pihak ketiga	2.503.627	3.168.842	3.756.367	2.576.134	2.750.611
Jumlah simpanan dari bank lain	2.560.321	3.310.838	4.116.536	2.814.994	2.888.430
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.915.163	3.891.346	-	-	1.037.094
Pinjaman yang diterima	596.977	631.464	655.288	631.355	1.870.246
Utang pajak	143.245	90.783	165.476	93.135	63.766
Beban yang masih harus dibayar	504.748	520.840	478.647	484.666	433.507
Liabilitas lain-lain	779.314	472.054	529.738	596.630	538.275
JUMLAH LIABILITAS	89.337.227	89.715.529	87.928.245	71.892.035	67.734.755
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Simpanan dari nasabah					
Pihak berelasi	3.764	2.302	3.021	1.686	-
Pihak ketiga	2.343.291	1.839.390	1.810.161	1.680.173	-
Jumlah simpanan dari nasabah	2.347.055	1.841.692	1.813.182	1.681.859	-
Simpanan dari bank lain					
Pihak ketiga	19.422	28.285	71.364	40.610	-
Jumlah simpanan dari bank lain	19.422	28.285	71.364	40.610	-
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	2.366.477	1.869.977	1.884.546	1.722.469	-
EKUITAS					
Modal saham:					
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					
Modal dasar:					
Seri A: 24.000.000.000 saham					
Seri B: 12.000.000.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
Seri A: 11.934.147.982 saham					
Seri B: 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.753.875	3.750.593
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	532.734	532.734	528.753
Surplus revaluasi aset tetap	788.049	789.998	749.717	754.382	748.183
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(117.777)	(100.912)	(163.811)	(197.081)	(276.061)



Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(63.958)	(115.048)	213.177	125.753	20
Saldo laba					
Cadangan umum	5.788.041	5.042.390	4.301.777	3.546.323	2.893.565
Belum ditentukan penggunaannya	1.470.105	1.542.824	1.523.070	1.488.962	1.376.505
JUMLAH EKUITAS	12.151.069	11.445.861	10.910.539	10.004.948	9.021.558
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	103.854.773	103.031.367	100.723.330	83.619.452	76.756.313
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pendapatan bunga dan syariah	7.357.284	6.882.651	6.655.168	6.088.742	5.839.016
Beban bunga dan syariah	(2.316.184)	(1.965.595)	(1.977.487)	(2.031.472)	(1.839.415)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	5.041.100	4.917.056	4.677.681	4.057.270	3.999.601
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA					
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	-	361.666	-	-
Administrasi giro, tabungan dan deposito	193.996	184.480	172.779	162.607	155.360
Penerimaan kembali kredit hapus buku	127.264	56.653	55.003	55.055	77.973
Administrasi kredit	30.880	42.511	34.055	41.357	45.993
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	22.093	11.105	5.225	5.613	14.795
Lainnya	274.187	238.820	177.629	153.239	179.859
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	648.420	533.569	806.357	417.871	473.980
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA					
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.762.643)	(1.674.698)	(1.644.897)	(1.544.532)	(1.459.394)
Umum dan administrasi	(1.182.987)	(1.229.388)	(1.078.820)	(684.216)	(683.957)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(694.136)	(404.659)	(819.201)	(567.751)	(370.265)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar Efek-Efek, neto	-	-	-	-	-
Beban lainnya	(194.713)	(201.054)	(150.020)	(162.365)	(163.386)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.834.479)	(3.509.799)	(3.692.938)	(2.958.864)	(2.677.002)
LABA OPERASIONAL	1.855.041	1.940.826	1.791.100	1.516.277	1.796.579
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL					
Fee jasa pelayanan pajak	6.444	6.084	4.684	10.063	12.796
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.608	5.274	3.952	2.670	393
Keuntungan penjualan Efek-Efek neto	8.698	2.757	131	-	-
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	2.390	-	3.497	2.255	2.440
Pendapatan non-operasional lainnya	33.901	158.513	404.119	16.688	58.490
Beban non-operasional	(19.339)	(83.405)	(269.509)	(40.586)	(6.565)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar Efek-Efek, Neto	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL / TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)	37.702	89.223	146.874	(8.910)	67.554
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.892.743	2.030.049	1.937.974	1.507.367	1.864.133
BEBAN PAJAK - NETO	(422.638)	(487.225)	(414.904)	(18.405)	(487.628)
LABA TAHUN BERJALAN	1.470.105	1.542.824	1.523.070	1.488.962	1.376.505
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Surplus revaluasi aset tetap	(1.949)	40.281	(4.665)	6.199	74.239
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	(21.898)	100.163	41.074	100.536	(289.357)
Penyesuaian Saldo Awal	-	(19.678)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	5.033	(17.586)	(7.804)	(21.556)	57.871
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	63.074	(400.611)	103.326	155.226	25
Penyesuaian Saldo Awal	-	(3.730)	-	-	-
Pajak penghasilan terkait	(11.984)	76.116	(15.902)	(29.493)	(5)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	32.276	(225.045)	116.029	240.405	(157.222)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.502.381	1.317.779	1.639.099	1.729.367	1.219.283
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	97,91	102,75	101,43	99,16	91,80
LAPORAN ARUS KAS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	7.324.150	7.030.426	6.421.514	5.950.142	5.793.913
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	521.156	476.364	384.463	153.239	396.007
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	127.264	56.653	55.003	55.055	77.973
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	60.386	172.136	416.380	29.007	74.120
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(19.337)	(82.913)	(269.509)	(40.586)	(6.565)
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(2.310.264)	(1.931.344)	(1.983.506)	(1.799.442)	(1.832.032)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.763.167)	(1.659.597)	(1.644.897)	(1.490.765)	(1.427.754)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.283.327)	(1.296.665)	(1.211.045)	(544.941)	(777.253)
Pembayaran pajak	(368.455)	(389.372)	(378.098)	(378.774)	(581.512)
Kas netto diterima sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	2.288.406	2.375.688	1.790.305	1.932.935	1.716.897
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1.500)	(7.000)	-	112.000	(112.000)
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	(9.193.797)	(4.347.656)	(1.268.793)	(3.128.466)	(5.038.885)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(4.208.597)	(4.095.066)	-	1.038.432	(471.540)
Tagihan reverse repo	1.575.529	(4.402.162)	9.152.359	(6.735.524)	(5.837.520)
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(166.678)	(117.044)	235.620	(282.585)	(53.071)
Liabilitas segera	115.091	278.638	109.040	127.269	(146.873)
Simpanan dari nasabah	(3.570.473)	(1.434.484)	14.733.587	7.922.408	9.629.941
Simpanan dari bank lain	(759.380)	(848.777)	1.332.296	(32.826)	2.153.322
Liabilitas Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.023.817	3.891.346	-	(1.037.094)	470.394
Liabilitas lain-lain	200.981	(39.476)	77.535	(146.658)	27.092
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	(9.696.601)	(8.745.993)	26.161.949	(230.109)	2.337.757
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian surat berharga	6.948.323	8.846.760	(17.722.229)	(4.943.265)	(1.774.238)



Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Perolehan aset tetap	(149.298)	(248.269)	(70.838)	(32.487)	(22.126)
Penjualan aset tetap	5.608	5.274	4.556	2.671	393
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	6.804.633	8.603.765	(17.788.511)	(4.973.081)	(1.795.971)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	43.578	(23.825)	23.933	(1.238.891)	1.144.682
Penambahan Pinjaman	-	-	-	-	-
Penerimaan dari penambahan modal saham	-	-	-	7.263	14.209
Pembayaran liabilitas sewa	6.316	(21.111)	-	(886)	-
Pembayaran dividen kas	(797.173)	(782.457)	(733.508)	(723.747)	(683.865)
Kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(747.279)	(827.393)	(709.575)	(1.956.261)	475.026
Kenaikan netto kas dan setara kas	(3.639.247)	(969.621)	7.663.863	(7.159.451)	1.016.812
Kas dan setara kas pada awal tahun	19.988.131	20.957.752	13.293.890	20.453.366	19.437.785
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	-	(25)	(1.231)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	16.348.884	19.988.131	20.957.753	13.293.890	20.453.366
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	2.652.775	1.988.262	2.023.077	2.511.548	2.729.776
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	8.805.300	3.659.969	5.734.527
Giro pada bank lain	491.330	303.129	211.681	237.715	111.479
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.233.367	6.910.000	9.917.695	6.884.658	11.877.584
Jumlah kas dan setara kas	16.348.884	19.988.131	20.957.753	13.293.890	20.453.366
RASIO KEUANGAN (%)					
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	25,71%	24,74%	23,52%	21,64%	21,23%
Kualitas Aset Produktif	4,31%	2,55%	3,31%	3,48%	2,83%
Kredit Bermasalah (NPL-Gross)	2,49%	2,83%	4,48%	4,00%	2,77%
CKPN Terhadap Aset Produktif	1,72%	1,62%	2,10%	1,93%	1,50%
Pemenuhan PPAP/CKPN	71,72%	73,04%	67,93%	59,48%	52,84%
Laba Terhadap Pendapatan	18,32%	18,92%	20,40%	21,70%	21,76%
Liabilitas Terhadap Ekuitas	735,22%	800,16%	823,17%	735,78%	750,81%
Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	86,02%	88,89%	89,17%	88,04%	88,25%
Margin Bunga Bersih	5,57%	5,11%	5,11%	5,55%	6,11%
Rasio Fee Based Income Terhadap Total Pendapatan Operasional	6,10%	6,32%	5,50%	12,37%	8,86%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	77,27%	76,15%	75,95%	77,76%	71,40%
Return on Asset (ROA)	1,87%	1,95%	2,05%	1,95%	2,73%
Return on Equity (ROE)	13,96%	16,24%	17,26%	18,77%	18,00%
Cost to Income Ratio (CIR)	39,56%	38,41%	38,83%	36,91%	33,52%
Net Interest Margin (NIM)	5,57%	5,11%	5,11%	5,55%	6,11%
Rasio Efisiensi Biaya	52,53%	50,64%	52,82%	50,93%	52,65%
Kredit Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	70,03%	56,50%	51,38%	60,58%	63,34%
BMPK	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	8,85%	4,75%	5,73%	0,00%	9,63%
Giro Wajib Minimum (Valuta Asing)	6,62%	7,39%	7,36%	8,22%	9,21%
Posisi Devisa Netto (PDN)	0,43%	3,26%	0,84%	0,90%	1,37%

Ikhtisar Operasional

Tabel Ikhtisar Operasional Bank Jatim

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
KONVENSIONAL					
KREDIT/PINJAMAN					
Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi*	-	10.320.231	9.691.297	9.748.903	8.711.965
Kredit Mikro Ritel dan Program*	-	6.272.869	4.981.888	4.173.152	3.578.740
Kredit Konsumer	30.256.043	27.698.345	26.313.613	25.989.907	24.659.762
Kredit Mikro**	7.617.655	5.289.479	-	-	-
Kredit Ritel dan Menengah**	6.635.264	4.695.043	-	-	-
Kredit Komersial dan Korporasi**	7.064.083	6.614.321	-	-	-
DANA PIHAK KETIGA/SIMPANAN					
Giro	20.750.151	23.477.047	25.862.874	21.039.158	23.721.437
Tabungan	28.016.300	23.118.307	24.264.622	22.285.619	21.669.322
Deposito	26.827.854	30.543.334	31.088.576	23.316.556	13.509.606
JASA LAINNYA					
Tresuri	36.430.876	43.251.010	45.281.074	33.911.368	29.707.332
SYARIAH					
Funding	2.602.606	2.065.118	1.985.795	1.826.436	1.645.508
Pembiayaan Syariah	2.187.858	1.903.471	1.762.368	1.607.359	1.401.833
Jasa Lainnya Syariah	1.216.406	998.163	1.964.752	1.378.999	875.545

* Pada tahun 2023 disesuaikan dengan struktur organisasi dan menjadi bagian dari Kredit Mikro, Kredit Ritel dan Menengah serta Kredit Komersial dan Korporasi.

**Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih menjadi bagian dari Kredit Menengah Korporasi dan Sindikasi serta Kredit Mikro Ritel dan Program

Informasi
Saham

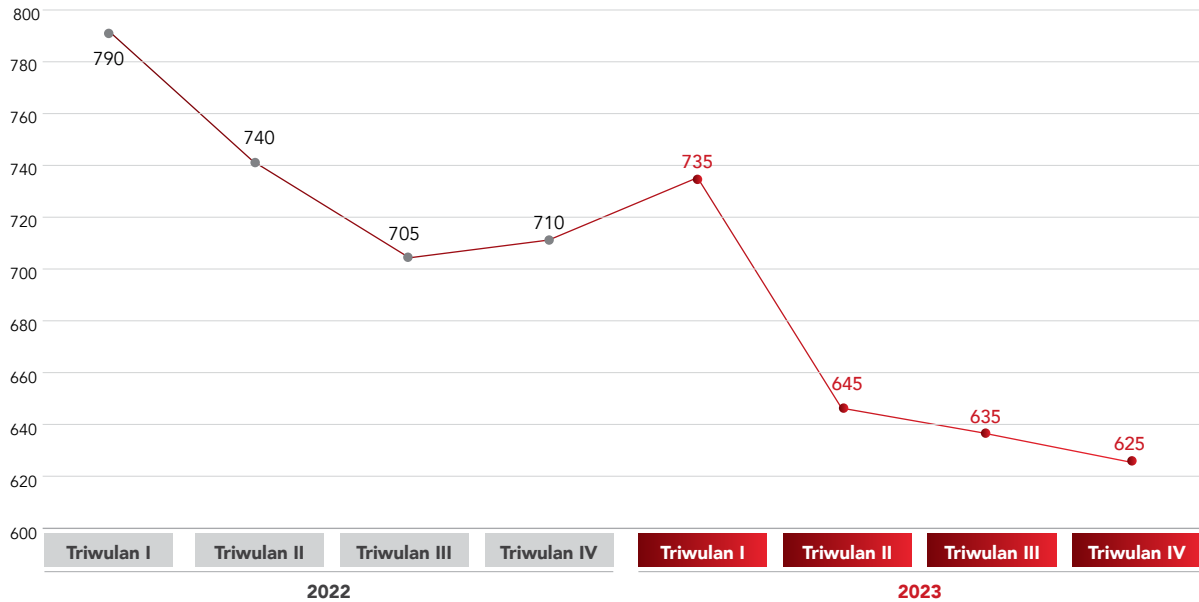
Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank Jatim 2022-2023

Tahun	Harga per lembar saham				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Miliar)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2023							
Triwulan I	710	755	685	735	15.015.498.082	139.115	11.036
Triwulan II	735	745	740	645	15.015.498.082	104.445	9.684
Triwulan III	650	660	635	635	15.015.498.082	113.499	9.534
Triwulan IV	640	640	600	625	15.015.498.082	224.325	9.384
2022							
Triwulan I	750	830	735	790	15.015.498.082	250.951	11.862
Triwulan II	785	800	735	740	15.015.498.082	230.962	11.111
Triwulan III	740	740	705	705	15.015.498.082	114.949	10.586
Triwulan IV	710	730	675	710	15.015.498.082	78.922	10.661

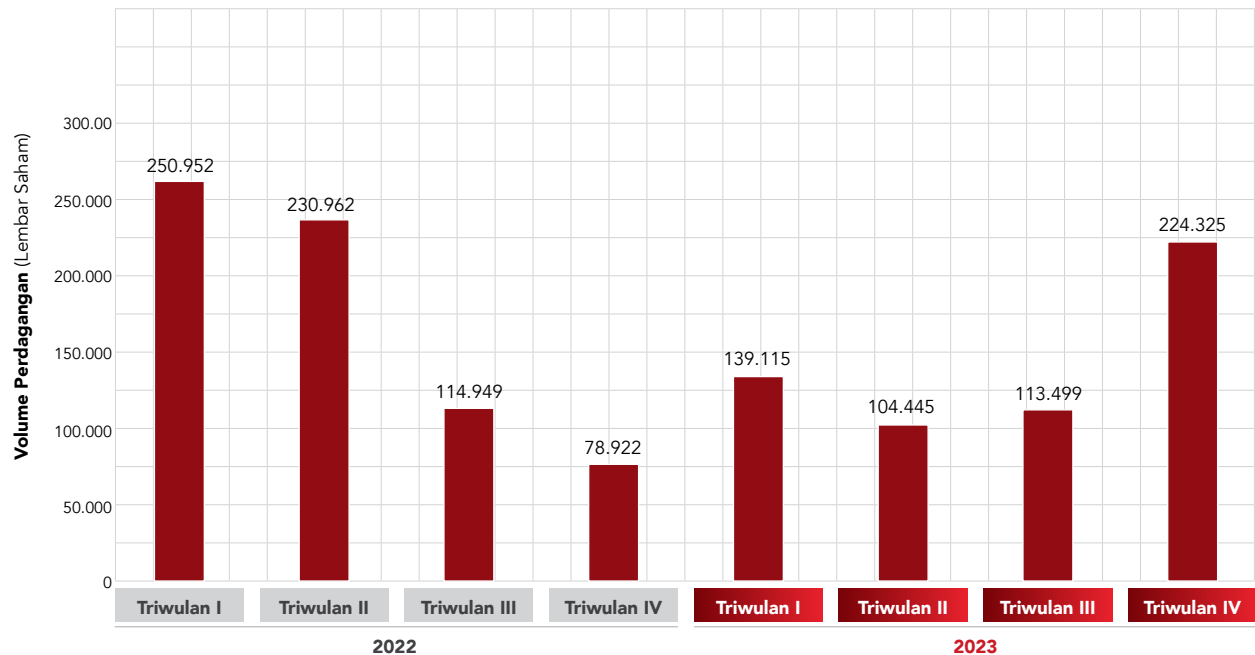


Grafik Harga Penutupan Saham Bank Jatim Tahun 2022 - 2023

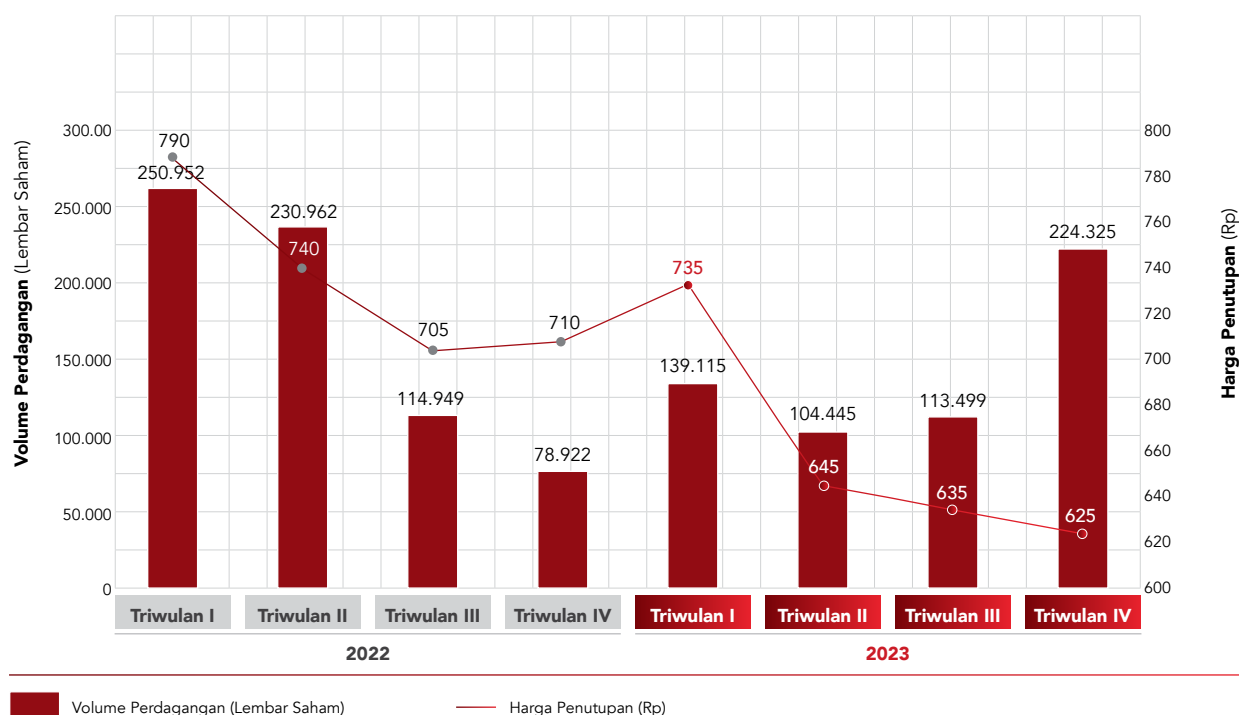
Harga Penutupan Saham (Rp)



Grafik Volume Perdagangan Saham Bank Jatim Tahun 2022-2023



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank Jatim Tahun 2022 – 2023



Aksi Korporasi

Pada tahun 2023, Bank Jatim tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi. Dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi Konversi.



Informasi

Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim tidak menerbitkan Efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan Efek lainnya.

Laporan

Analisis Perusahaan

No	Nama	Rekomendasi	Target Price	Tanggal
1.	Panin Sekuritas	Neutral	-	20 Februari 2023
2.	Sadif Investment	Buy	693	18 Agustus 2023
3.	Sinarmas Sekuritas	Buy	725	28 Juli 2023
4.	BRI Danareksa	Buy	850	5 Juli 2023
5.	Mandiri Sekuritas	Neutral	800	17 Februari 2022
6.	RHB Research	Buy	1000	9 Desember 2022
7.	Binaartha Sekuritas	Hold	740	23 Desember 2022

RESUME

Per Desember 2023, Bank Jatim terus menunjukkan pertumbuhan baik dari aset yang tumbuh 0,80% yoy dan aset produktif yang tumbuh 18,54% yoy. Untuk *Income Statement* pada *Net Interest Income* mengalami penurunan -1,13%. Hal tersebut dikarenakan hasil pendapatan bunga yang tidak sejalan dengan pertumbuhan kredit ditambah beban bunga yang naik sebesar 26,97%. Untuk pencadangan naik 71,54 % yoy serta rasio *Non Performing Loan* (NPL) turun dari 2,83% menjadi 2,49% karena penyelesaian kredit bermasalah serta adanya kredit hapus buku.

- Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan -4,37 % yoy. Penurunan simpanan dari Giro yang turun -11,46%, Deposito mengalami penurunan -10,49 %. Dari sisi tabungan mengalami kenaikan 9,38%. Tabungan mengalami kenaikan karena merupakan refleksi dari tumbuhnya pengguna aplikasi *mobile banking* JConnect yang telah diunduh sebanyak 606 ribu naik 30% dengan total volume transaksi sebesar 3,3 triliun di tahun 2023. Bank Jatim mencatatkan laba bersih sebesar 1,47 triliun atau turun - 4,71% yoy.
- Posisi Rasio Bank Jatim untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2023 naik dari 56,50 % menjadi 70,03% karena sejalan dengan pertumbuhan kredit. Untuk RoE turun menjadi -2,28 %, RoA turun menjadi -0,08%, hal tersebut dikarenakan pada sisi aset naik dengan tidak diiringi oleh pertumbuhan laba. Sedangkan Net Interest Margin (NIM) mengalami kenaikan di posisi 5,11% dari 5,57%. Rasio BOPO terdapat kenaikan menjadi 77,27% karena beban bunga yang tinggi dan penambahan pegawai baru.
- Target Bank Jatim tahun 2024 yaitu, aset tumbuh 9,29% dan DPK tumbuh 13,02%. Dalam rangka melakukan optimalisasi pertumbuhan kredit, Bank Jatim berinisiatif melakukan pergeseran dari treasury placement ke kredit sehingga kredit ditargetkan tumbuh 23,66%, karena didukung dengan penambahan jumlah Account Officer (AO). Dengan demikian, karena loan yield yang lebih tinggi daripada *treasury yield* akan berdampak pada rasio LDR dan NIM yang meningkat sehingga laba bersih sebelum pajak akan ditargetkan tumbuh sebesar 15,82% yoy.

Peristiwa Penting di Tahun 2023

19 Januari



Bank Jatim dan RSU Brimadika menjalin kerja sama Layanan Kesehatan Pegawai

02 Februari



Bank Jatim mendukung Program Kementerian Keuangan melalui bantuan UMKM dan KUR.

17 Maret



Bank Jatim meluncurkan Tabungan Santri untuk menggarap potensi ekonomi syariah.

20 Januari



Bank Jatim mengawali tahun 2023 dengan melaksanakan penyerahan CSR Bank Jatim peduli.

08 Maret



Bank Jatim menandatangani perjanjian kerja sama sinergi bisnis dengan Bank NTB Syariah sebagai langkah untuk memperkuat Layanan Syariah.

20 Maret



Bank Jatim mendukung misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kalimantan Timur.

01 Februari



Bank Jatim meraih penghargaan Asean Asset Class PLCs atas konsistensi Bank dalam menerapkan GCG.

13 Maret



Bank Jatim meraih Peringkat A dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2023.

07 April



Bank Jatim menggelar JConnect Ramadhan Festival bersama pelaku UMKM untuk mendorong literasi keuangan digital.

12 April



Bank Jatim Bagikan Dividen sebesar Rp797 Miliar meningkatnya kinerja Bank.

25 Mei



Bank Jatim menerangkan Pulau Kangean lewat CSR PJU Solar Cell.

23 Juni



Bank Jatim telah membuktikan kontribusinya untuk Negeri sehingga menerima Apresiasi High Dividen.

15 Mei



Bank Jatim memperkenalkan JConnect Remittance di Hongkong dalam mendukung misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur.

30 Mei



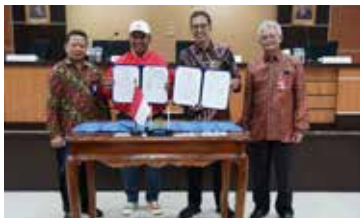
Gubernur Jawa Timur meresmikan Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim.

27 Juni



Bank Jatim menjadi bank pertama dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) For Banking di Indonesia.

17 Mei



Bank Jatim dan UNESA Tanda Tangan MoU di Bidang Bisnis dan Akademis.

9 Juni



Bank Jatim meraih penghargaan dalam Ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2023.

15 Juli



Bank Jatim menyelenggarakan Town Hall Meeting Syariah 2023 untuk memperkuat Kinerja Syariah.

21 Mei



PT Enha Sentosa Indonesia Sukses Ekspor Jahe ke Empat Negara setelah mendapat dukungan penuh dari Bank Jatim.

12 Juni



Bank Jatim memberikan fasilitas promosi dan akses pasar untuk UMKM Binaannya dalam rangka mengikuti Misi Dagang.

31 Juli



Bank Jatim dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan kerja sama dalam Asean SOMRDPE Indonesia 2023 untuk mendukung kemajuan desa dan pedesaan.

10 Agustus



Bank Jatim menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur.

20 September



Bank Jatim meraih Penghargaan ICAI 2023 atas penerapan Lima Pilar Transformasi.

18 Oktober



Bank Jatim Raih Piagam Apresiasi atas peresmian Trans Jatim Koridor III.

20 Agustus



Bank Jatim meluncurkan JConnect Pro dalam semarak ulang tahun Ke 62.

29 September



Bank Jatim meraih Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

18 Oktober



Bank Jatim menerima Penghargaan Jatim Bangkit Awards atas dukungan Bank Jatim dalam pemulihan dampak pandemi.

25 Agustus



Bank Jatim meraih penghargaan Infobank Award 2023 atas kinerja yang terus positif.

06 Oktober



Bank Jatim meluncurkan Dual Banking Leveraging Model untuk meningkatkan kinerja Unit Usaha Syariah.

06 November



Bank Jatim Berhasil meraih Gold Rank ASRRAT 2023.

18 September



Bank Jatim meraih Top 50 Emiten Terbaik.

17 Oktober



Bank Jatim menyerahkan CSR dan Branding Pasar Induk Among Tani untuk memperingati Hari Jadi Kota Batu ke-22 Tahun.

10 November



Bank Jatim meraih Penghargaan Road To CNBC Indonesia Awards 2023 Best Regional Banks atas kinerja Bank.

21 November



Bank Jatim memberikan bantuan Ambulans sampai dengan fasilitas transaksi keuangan di luar negeri untuk mendukung Pekerja Migran Jawa Timur.

27 November



Bank Jatim meraih Juara Satu Annual Report Awards 2022.

30 November



Bank Jatim menjalin kerja sama dengan Bank Lampung.

12 Desember



Bank Jatim memecahkan Rekor MURI pertama di Indonesia dengan 2.312 Debitur menandatangani Akad Massal Kredit Konsumer. Acara akad massal ini bertujuan untuk menginformasikan ke masyarakat terkait kesiapan Bank Jatim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melalui sektor Kredit Konsumer.

14 Desember



Jokowi meriahkan peresmian Pasar Induk Among Tani dengan Dukungan Optimal dari Bank Jatim.

15 Desember



Bank Jatim pimpin inovasi dengan menjadi pionir di Indonesia dalam Penerapan IKD dan juga dikunjungi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia.

15 Desember



Unit Usaha Syariah Bank Jatim memperoleh 3 (tiga) penghargaan sekaligus dalam BPKH Award 2023.



LAPORAN DIREKSI dan Dewan Komisaris







Laporan Direksi

**BUSRUL
IMAN**

Direktur Utama





Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya, Bank Jatim mampu melalui tantangan besar di tahun 2023 dan mencatatkan kinerja yang baik.

Program Transformasi Bank Jatim merupakan pilar utama dalam mendukung pencapaian target Bank dan merupakan salah satu upaya mencapai visi dan misi Bank Jatim yaitu menjadi BPD No. 1 yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank selama tahun 2023 yang meliputi kinerja Bank, analisis prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis Atas Kinerja Bank

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, maksud dan tujuan Bank Jatim adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan visi dan misi, Bank Jatim melakukan pengembangan produk dan jasa yang kompetitif serta dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Bank memiliki produk dan jasa baik konvensional maupun syariah sebagai berikut:

1. Produk simpanan meliputi, Rekening Giro Rupiah, Rekening Giro Valas, Deposito Rupiah, Deposito Valas, Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, Tabungan Haji, TabunganKu, Simpanan Pelajar (SIMPEL), Simpanan Laku Pandai (SiPandai) dan Tabungan Siklus Pensiun.
2. Produk Kredit Konsumer meliputi, Kredit Multiguna, Kredit Pegawai & Personal Loan Car Allowance Program Kredit Kendaraan Bermotor, Cash Collateral Credit, Kredit Jaminan Emas dan Kredit Properti.
3. Produk Komersial, Korporasi dan Sindikasi meliputi, Kredit Kontraktor Pola Transaksional, Kredit Kontraktor Pola Standby Loan, Kredit Modal Kerja Umum Angsuran, Kredit Modal Kerja Rekening Koran, Kredit Investasi, Kredit Konstruksi Properti, Kredit Sindikasi, Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kredit Pembiayaan Piutang, Kredit Pemerintah Daerah serta Kredit Trade Finance.
4. Produk Kredit Mikro, Ritel dan Program meliputi, Kredit Jatim Ritel, Kredit Mikro Laguna, Kredit Linkage BPR, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Jatim Mikro, Kredit Linkage Fintech, Kredit SiUMI, dan Kredit BPR RC (Rekening Koran).
5. Produk Tresuri meliputi, Devisa Umum (Telegraphic Transfer), Bank Notes dan Deposit on Call.
6. Produk Trade Finance meliputi, Ekspor, Impor dan Transaksi Domestik (SKBDN).
7. Jasa bisnis meliputi Referensi Bank, Kliring Nasional, Real Time Gross Settlement (RTGS), Inkaso Rupiah, Inkaso Valas, Giralisasi, BPD Net Online, Jatim Electronic Transfer System (JETS), Jconnect Invest, dan Transaksi Remittance.
8. Jasa Kelembagaan meliputi Layanan Pajak, Pembayaran Tagihan, Payroll Gaji dan Pelayanan Transaksi Perdagangan.
9. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan umum, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Multiguna Syariah, Emas iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas, Linkage Program, Pembiayaan Linkage Fintech, Umroh iB Maqbullah, Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah, Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah, Pembiayaan Kontraktor iB Barokah, Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah, Pembiayaan Sindikasi, Pembiayaan Pegawai dan Personal, Bank Garansi, Pembiayaan Kawasan Industri Halal, serta Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
10. Produk dana dan jasa syariah meliputi, Giro iB Barokah, Tabungan Sempel iB, Tabunganku iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan Sipandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah, Deposito Barokah, *Virtual Account*, *Payment Point*, *E-Channel* (SMS Banking, J-Connect Mobile dan JConnect Internet Banking) serta Wakaf iB Barokah.



11. *E-channel* dan jasa lainnya meliputi, SMS Banking (3366), JConnect *Internet Banking*, JConnect *Mobile Banking*, JConnect *E-Kmg*, JConnect *E-Loan*, Layanan Laku Pandai (Sipandai Bank Jatim), Info Bank Jatim (14044), Kartu ATM Debit Bank Jatim, Kartu Bank Jatim Flazz (*Co-Branding*), *Safe Deposit Box*, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), *Virtual Account*, E-Samsat Jatim, Samsat Digital Nasional (Signal), Jatim Code QRIS dan BJTM *Connect*.

Sebagai perusahaan bidang perbankan tentunya tidak terlepas dengan nasabah atau pasar yang dilayani. Bank Jatim menyasar seluruh kelompok usia tanpa terkecuali, mencakup usia produktif (termasuk milenial) maupun non produktif (pensiunan) di seluruh wilayah kerja Bank, termasuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Batam. Dalam upaya untuk melayani dan menjalin hubungan dengan pasar yang begitu luas dan beragam serta berdimensi jangka panjang, maka Bank Jatim menciptakan akses yang lebih mudah kepada nasabahnya. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas jaringan kantor dan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk-produk perbankan yang dapat mendukung perkembangan usahanya. Per Desember 2023, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.819 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Bank Jatim juga memiliki jaringan usaha di wilayah kota besar seperti Jakarta dan Batam.

Penguatan Struktur Organisasi yang Efektif

Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank Jatim yang terbagi menjadi 6 (enam) Direktorat di bawah Direktur Utama yaitu Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah, Direktorat Keuangan, Treasury dan Global Services, Direktorat Manajemen Risiko, Direktorat IT dan Digital, Direktorat Operasi serta Direktorat Kepatuhan. Tiap-tiap Direktorat terbagi menjadi beberapa Divisi yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi terkait. Direktur Utama didukung oleh Corporate Secretary dan Divisi Audit Internal. Direktur Utama juga didukung oleh beberapa SEVP di antaranya SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan, SEVP Consumer Banking, SEVP Usaha Syariah, SEVP Corporate Transformation, dan SEVP Network and Services. Direktorat Mikro, Ritel dan Menengah di dukung oleh Divisi Kredit Ritel dan Menengah serta Divisi Kredit Mikro. Direktorat Keuangan, Treasury dan Global Services didukung oleh Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Tresuri serta Divisi International Banking. Direktorat Manajemen Risiko didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Analis Risiko Kredit, serta Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit. Direktorat IT dan Digital didukung oleh Divisi Teknologi Informasi, Divisi Digital Banking dan Unit Security TI. Direktorat Operasi di dukung oleh Divisi Operasi, Divisi Umum, Divisi Pengembangan Produk dan Unit Administrasi Kredit. Direktorat Kepatuhan didukung oleh Divisi Kepatuhan & APU

PPT, Divisi Hukum serta Divisi Kebijakan dan Prosedur. Seluruh Divisi telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Direktorat masing-masing dan kinerja Bank secara keseluruhan.

Human Capital dan Pengelolaannya

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Jatim memiliki sebanyak 4.544 orang pegawai dengan rincian tingkat pendidikan yaitu 342 orang berjenjang pendidikan non strata, 3.872 orang berjenjang pendidikan S1, 325 orang berjenjang pendidikan S2 serta 5 (lima) orang berjenjang pendidikan S3. Pada tahun 2023, Bank Jatim telah memberikan pendidikan kepada 4.999 orang pegawai dari 5.242 orang pegawai atau telah dilaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepada 95,38% dari pegawai. Hal ini dapat terpenuhi dengan bantuan teknologi *e-Learning* dan konten yang mudah diakses secara fleksibel baik dari tempat dan waktu. Secara komposisi, 60,5% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang kompetensi bisnis dan 39,5% adalah penunjang kompetensi *supporting* bisnis. Kegiatan pengembangan kompetensi mencatatkan 1.576 orang pegawai telah mengikuti program sertifikasi dan 4.913 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi non sertifikasi.

Selain pengembangan kompetensi, Bank Jatim juga melaksanakan pengembangan karir yang diterapkan dengan tujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Saat ini Bank memiliki program pengembangan karir berjenjang atau program promosi bagi pegawai dari pejabat tingkat pertama sampai dengan pejabat eksekutif yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang kosong.

Inovasi Teknologi Informasi

Bank Jatim menyadari bahwa kebutuhan akan layanan digitalisasi semakin meningkat. Bank Jatim telah berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat bersaing dalam perkembangan teknologi *digital banking*. Saat ini beberapa produk dan layanan yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu antara lain, menjadi Bank pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), SIPD yaitu aplikasi SP2D yang terintegrasi untuk Belanja Pemerintah Daerah, JConnect Pro, CMS yaitu aplikasi untuk belanja Pemerintah Desa yang memudahkan pencairan dana kepada mitra desa, *Customer Self Service*, Siskeudes Link dan E-Bansos.



Analisis Perekonomian

Keseluruhan infrastruktur yang dimiliki Bank Jatim berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi khususnya pada kondisi perekonomian di tahun 2023 yang masih mengalami ketidakpastian. Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi telah mampu menjalankan bisnis Bank dengan baik. Kinerja Bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kondisi perekonomian makro.

Dari sisi perekonomian global, data resmi tentang besarnya pertumbuhan perekonomian dunia hingga Januari 2024 masih belum secara pasti disampaikan oleh berbagai sumber. Namun, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III-2023 memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 2,9%. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III-2023 oleh Bappenas menyatakan bahwa pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada Triwulan III-2023 dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9% (yoy), Tiongkok tumbuh 4,9% (yoy), ekonomi Jepang melambat 1,2% (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4% (yoy), serta Singapura tumbuh 1,1% (yoy). Bank sentral sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan redanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Bank sentral di sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya seiring dengan redanya inflasi. Federal Reserve menahan laju kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) pada rentang 5,25%-5,50% sepanjang Triwulan III-2023 yang merupakan tingkat tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan lonjakan inflasi sejak *lockdown* Covid-19 telah turun tajam dari tingkat tahunan sebesar 9,1% pada bulan Juni 2023, lalu menjadi 3,7% pada September 2023. Namun, tingkat inflasi ini masih berada di atas target The Fed sebesar 2% di tengah sinyal masih adanya kenaikan harga.

Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia Triwulan III-2023 tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan II-2022 yang sebesar 5,73% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman, sedikitnya momen hari besar keagamaan dan tidak adanya momen hari raya pada sepanjang Triwulan III-2023 yang dapat mendorong aktivitas konsumsi.

Dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen PDB tetap tumbuh, namun sebagian lagi berkontraksi yaitu konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh 6,2% meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,8%. Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh 5,1%, sejalan dengan tetap kuatnya daya beli masyarakat seiring dengan terkendalinya inflasi.

Dari sisi lapangan usaha (produksi), hampir seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif, kecuali Jasa Pendidikan dan Administrasi Pemerintahan yang masing-masing berkontraksi 2,1% dan 6,2%. Administrasi pemerintahan merupakan salah satu sektor yang mengalami kontraksi pada Triwulan III-2023, menurunnya kinerja sektor ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja pegawai pada APBN, daya serap belanja pegawai Triwulan III-2023 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III-2022.

Secara umum, kinerja perbankan nasional masih cukup baik yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja perbankan yang tetap baik dan berada di level aman. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga *deposit facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 6,75%. Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga ditopang dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,54% (yoy) pada September 2023. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 25,83%. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan, suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 (satu) bulan dan suku bunga kredit pada September 2023 masing-masing terjaga pada 4,28% dan 9,36%. Hasil *stress-test* Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Penetapan Suku Bunga Kredit dan Simpanan dan Kompetitif

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank Jatim menetapkan target pasar berupa peningkatan DPK dan Kredit. Target DPK dan Penyaluran Kredit di tahun 2023 masing-masing sebesar Rp78,20 triliun dan Rp54,76 triliun. Peningkatan ini dilakukan antara lain dengan dilakukannya kerja sama *Sponsorship Event* di wilayah kerja Bank Jatim, pembukaan rekening pada sekolah dan satu rekening satu



pelajar, kerja sama dengan lembaga perbankan/ entitas/perusahaan lainnya, serta implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD untuk Perbankan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mencapai target pasar, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Jatim Per Desember 2023 Berdasarkan Segmen Bisnis				
Kredit Korporasi	Kredit Retail	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
7,68%	8,21%	13,40%	8,22%	9,58%

Selain itu, Bank Jatim juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2023

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS MIKRO KECIL (SIUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%

Catatan:

- Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan tiering yang berlaku
- Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran

Tier	Suku Bunga
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,50%
≥ Rp100 juta	1,75%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD100	0,00%
> USD100 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,25%
SGD	
< USD100	0,00%
> USD100 - ≤ USD10.000	0,05%
> USD10.000 - ≤ USD100.000	0,15%
> USD100.000	0,20%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%

Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2023

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa



Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2023

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000 - ≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

Keterangan: Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2023

Tier	Suku Bunga
Deposito On Call (Rupiah)	0,75% di bawah suku bungan pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBU atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2023

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro Escrow Account	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)
VALUTA ASING	
Giro Valas USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00 - ≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00 - ≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%



Tier	Suku Bunga
GIRO VALAS SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00 - ≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00 - ≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
GIRO VALAS EUR	
EUR	0,10%
GIRO VALAS JPY	
JPY	0,00%
GIRO VALAS AUD	
AUD 15.000 - < AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
GIRO VALAS HKD	
HKD 78.000 - < HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
GIRO VALAS CNY	
CNY 72.000 - < CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Swasta	0,00%	0,00%
Giro Mudharabah Umum Pemerintah	5,00%	0,51%
TabunganKu iB	0,00%	0,00%
Tabungan Laku Pandai	0,00%	0,00%
Tabungan Simpel	0,00%	0,00%
Tabungan Santri	0,00%	0,00%
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	1,02%
Tabungan Barokah	12,50%	1,27%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,41%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,54%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,52%
Deposit 1 Bulan	36,00%	3,66%
Deposit 3 Bulan	38,00%	3,86%
Deposit 6 Bulan	41,00%	4,16%
Deposit 12 Bulan	42,50%	4,32%



Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Bank melalui berbagai rapat antara Direksi dengan pada manajemen kunci dan tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Direksi senantiasa memastikan bahwa strategi telah dilaksanakan dengan efektif melalui berbagai Rapat Koordinasi, pemberian arahan dan mekanisme pelaporan.

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini, Bank berfokus pada penerapan strategi sebagai berikut:

1. Perubahan model bisnis dari per skim kredit menjadi segmentasi berdasarkan *plafond*.
2. Reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan Cabang Kelas 1.
3. Perubahan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut.
4. Meningkatkan aset non organik dengan aksi korporasi melakukan penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah yang dilanjutkan ke tahapan Kelompok Usaha Bank (KUB).
5. Meningkatkan *fee based income* dengan menambah fitur *e-channel* Bank Jatim.
6. Meningkatkan penghimpunan Dana Non Pemerintah Daerah (Pemda) dengan meningkatkan *Current Account Saving Account* (CASA).
7. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain mengevaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
8. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan melakukan *workload analysis* dan *mapping* kebutuhan SDM, menyusun mekanisme *talent pool* dan *career path* bagi SDM dengan memperhatikan misi menjadi bank berbasis TI dan Digital, serta menyusun program peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan secara bagi nasabah dengan meluncurkan J-Connect sebagai *branding digital* banking Bank Jatim.
9. Meningkatkan *cyber security* antara lain dengan pengelolaan keamanan *cyber*, kewajiban penilaian risiko *cyber*, kewajiban pengujian kerentanan teknologi informasi Bank, penilaian tingkat maturitas *cyber*, serta pelaksanaan pengujian keamanan *cyber* Bank.
10. Implementasi secara berkelanjutan pada *Corporate Culture*, pembangunan budaya risiko (*risk culture*), budaya kepatuhan, budaya layanan, serta budaya pemasaran.

Untuk mendukung fokus strategi tersebut, Bank Jatim juga merumuskan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan Cabang Kelas 1.
2. Perubahan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut.

3. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain dengan mengevaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
4. Evaluasi kinerja divisi agar lebih efektif dan efisien.
5. Perbaikan *Service Level Agreement* (SLA).
6. Evaluasi implementasi struktur organisasi baru.
7. Peningkatan kualitas SDM melalui aktivitas pelatihan.
8. Perbaikan remunerasi.
9. Evaluasi dan implementasi *reward and punishment*.
10. Memperbaiki sistem *recruitment* pegawai baru.
11. Penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.
12. Menetapkan budaya kerja dalam KPI di tahun 2023.
13. *Roadmap* Perbaikan GCG agar berada di Peringkat 2 di tahun 2023.
14. Menjaga rata-rata peringkat profil risiko agar berada pada skor 2.
15. Perbaikan kualitas standar layanan menjadi peringkat ke -2 di antara BPD Seluruh Indonesia di tahun 2023.

Strategi Bank untuk Unit Usaha Syariah meliputi strategi DPK dan Pembiayaan. Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dilakukan dengan melakukan dua pendekatan strategi, yaitu *maintenance* nasabah existing serta akuisisi nasabah baru. Langkah-Langkah strategis pembiayaan dilakukan dengan optimalisasi pencairan pembiayaan sindikasi, percepatan proses usulan pembiayaan, optimalisasi tenaga analis, pendekatan dengan komunitas UMKM, optimalisasi penyaluran pembiayaan BMT/BPRS dan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi.

Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2023 Bank Jatim telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Dari sisi operasional, total penyaluran Kredit Mikro tahun 2023 sebesar Rp7,62 triliun, meningkat 44,02% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5,29 triliun. Total peyaluran Kredit Ritel dan Menengah tahun 2023 sebesar Rp6,64 triliun, meningkat 41,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,70 triliun. Total penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi tahun 2023 sebesar Rp7,06 triliun, meningkat 6,80% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp6,61 triliun. Total Kredit Konsumer tahun 2023 mencapai Rp30,26 triliun, meningkat 9,23% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp27,70 triliun.

Pada segmen Syariah, realisasi DPK Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp2,60 triliun, meningkat sebesar Rp537,49 miliar atau 26,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,07 triliun. Peningkatan DPK Syariah terutama berasal dari pertumbuhan Deposito Barokah sebesar Rp381,34 miliar. Selain DPK, pada segmen syariah juga terdapat peningkatan pada pembiayaan syariah. Jumlah Pembiayaan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2,18 triliun naik sebesar Rp284,39 miliar atau 14,94% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,90 triliun.



Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pada tahun 2023 jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp7.357.284 juta, meningkat sebesar 6,90% dari tahun lalu sebesar Rp6.882.651 juta. Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.854.773 juta, meningkat sebesar 0,80% dari tahun lalu sebesar Rp103.031.367 juta. Ekuitas di tahun 2022 mencapai Rp12.151.069 juta, meningkat sebesar 6,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11.445.861 juta.

Secara umum Bank Jatim telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2023. Kredit yang diberikan mencapai 100,04% dengan realisasi sebesar Rp54,76 triliun pada tahun 2023. Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga yaitu sebesar 104,44% dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7,36 triliun. Rasio CAR pada tahun 2023 sebesar 25,71%, dengan capaian target sebesar 118,26%.

Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam program transformasi BPD yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai *agent of development* di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kendala yang Dihadapi Bank dan Upaya untuk Mengatasinya

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, namun Bank juga menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain, Digitalisasi proses bisnis yang belum optimal serta keamanan sistem teknologi informasi yang harus ditingkatkan terus menerus. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki strategi yaitu dengan meningkatkan *cyber security* antara lain dengan pengelolaan keamanan *cyber*, kewajiban penilaian risiko *cyber*, kewajiban pengujian kerentanan teknologi informasi Bank, penilaian tingkat maturitas *cyber*, serta pelaksanaan pengujian keamanan *cyber* Bank.

Selain itu, kualitas SDM Bank juga masih belum memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank melakukan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilaksanakan antara lain dengan melakukan *workload analysis* dan *mapping* kebutuhan SDM, menyusun mekanisme *talent pool* dan *career path* bagi SDM dengan memperhatikan misi menjadi bank berbasis TI dan Digital, serta menyusun program peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan secara bagi nasabah dengan meluncurkan J-Connect sebagai *branding digital banking* Bank Jatim.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Menurut World Economic Outlook (IMF, Oktober 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,9%, Amerika Latin sebesar 2,3%, Eropa sebesar 1,2%, Afrika Timur Tengah 3,4%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 4,8% pada tahun 2024. Prospek ekonomi Asia yang solid antara lain ditunjukkan oleh Indonesia yang kembali naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income country*), yang menunjukkan besarnya potensi konsumsi maupun investasi. Tingginya komitmen reformasi struktural yang ditunjukkan sejumlah negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga diharapkan dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan kawasan Asia, dan pada gilirannya ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di antara negara G20. India sebagai penyumbang tiga-perempat *output* perekonomian kawasan Asia Selatan, diperkirakan IMF akan dapat tumbuh sebesar 6,1% pada tahun ini dan meningkat di tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah tantangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan akan terjaga di 5,2%. Stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong konsumsi di tahun 2024. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh relatif tinggi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 merupakan salah satu penopang tumbuhnya konsumsi Pemerintah tahun 2024.

Kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2024 masih dipengaruhi oleh sentimen perekonomian global dan nasional. Pengembangan industri perbankan di masa depan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang dapat membentuk transformasi mendalam dalam cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Salah satu tren utama adalah pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang, seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), analitika data, dan teknologi *blockchain*. Bank-bank berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih personal dan mudah dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut. Contoh konkret dari pengembangan ini dapat dilihat dalam



penerapan kecerdasan buatan dalam analisis risiko kredit. Bank-bank menggunakan algoritma AI untuk mengevaluasi profil kredit nasabah dengan lebih akurat dan cepat, memungkinkan mereka membuat keputusan kredit yang lebih cerdas. Hal ini tidak hanya meningkatkan proses persetujuan kredit, tetapi juga mengurangi risiko bagi bank.

Selain itu, perkembangan *fintech* dan integrasi keuangan *digital* menjadi faktor penting dalam merumuskan masa depan industri perbankan. Adopsi pembayaran *digital*, *platform peer-to-peer lending*, dan layanan keuangan berbasis aplikasi menjadi lebih umum. Bank-bank berupaya untuk beradaptasi dengan tren ini dengan menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah diakses secara *digital*, termasuk pembukaan rekening *online*, transfer uang instan, dan manajemen keuangan melalui aplikasi *mobile*.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan dan langkah strategis Bank Jatim akan berfokus pada keunggulan internal berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan *digital* yang cukup memadai untuk bersaing dengan industri.
2. Sinergi dengan berbagai pihak, seperti *fintech*, Pemerintah Daerah, serta pihak terkait lainnya.
3. Penawaran produk dan layanan keuangan yang beragam untuk berbagai macam segmen pelanggan.
4. Mempunyai hubungan dan sinergi yang baik dengan *shareholders*, terutama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Adapun peluang Bank Jatim di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Shifting* perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. *Landscape* demografi penduduk usia *millennial* yang merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce*, serta potensi ekonomi dan keuangan *digital*.
3. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.
4. Masih banyaknya peluang pasar yang berasal dari ekosistem pemerintah daerah maupun swasta.
5. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Program-program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
7. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan teknologi baru dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.

Berdasarkan analisis keunggulan dan peluang yang dimiliki, rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2024 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Aktivitas penyaluran kredit/pembiayaan khususnya kepada sektor-sektor ekonomi produktif dan potensial yang diimbangi pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bisnis (penyempurnaan ketentuan maupun teknologi pendukung) dengan tetap memperhatikan prinsip *prudential banking*.
2. Pemanfaatan proyek-proyek strategis, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja bisnis melalui penyaluran kredit produktif pada sektor-sektor strategis dan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur.
3. Optimalisasi dan peningkatan produk dan layanan berbasis teknologi informasi dengan tetap memperhatikan asas *prudential banking* dan keamanan.
4. Perluasan dan pendalaman pasar dalam rangka peningkatan bisnis dan pencapaian inklusi keuangan melalui peningkatan pelayanan dan optimalisasi peran jaringan termasuk agen laku pandai.
5. Peningkatan profitabilitas melalui peningkatan rasio CASA, perbaikan kualitas kredit, layanan keuangan berkelanjutan devisa, dan pengembangan produk lain berbasis *digital* serta *customer oriented*.
6. Perluasan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka peningkatan bisnis bidang dana maupun kredit/pembiayaan.
7. Menjaga hubungan baik dengan nasabah khususnya *shareholders*, di antaranya dengan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah serta berperan aktif dalam proyek-proyek strategis khususnya di Provinsi Jawa Timur.
8. Peningkatan pelayanan berbasis *digital* dan membangun ekosistem serta sarana penunjangnya baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta yang bertujuan dalam akselerasi kinerja Bank Jatim.

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik/*good corporate governance* (GCG) dapat mendorong kinerja yang baik dalam kegiatan bisnis Bank. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Jatim secara berkelanjutan, Bank Jatim senantiasa menerapkan kelima asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Kelima asas tersebut diimplementasikan melalui pemenuhan kepentingan pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham; keberlanjutan dan daya tahan; melaksanakan pengungkapan dan transparansi; serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.



Dalam pelaksanaan pemenuhan kepentingan pemegang saham, Bank telah memenuhi hak-hak pemegang saham di antaranya membayar dividen secara adil dan tepat waktu. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Bank untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Selain pembagian dividen, Bank juga telah memenuhi hak-hak pemegang saham sebagai berikut:

1. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS untuk:
 - a. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - c. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - d. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.
2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Bank telah menyelenggarakan RUPS Tahunan secara tepat waktu. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023. RUPS Tahunan telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Bank Jatim telah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Dalam memastikan penerapan keberlanjutan dan daya tahan, Bank Jatim telah melakukan pengukuran kinerja keberlanjutan dan melaporkannya dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya. Bank Jatim senantiasa melaksanakan pelibatan *stakeholder* dalam penentuan isu-isu keberlanjutan material

yang dihadapi oleh Bank dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris. Bank mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan, produk, dan jasa Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Bank dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Pelibatan pemangku kepentingan diarahkan pada kepentingan usaha Bank dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan berbagai mitra strategis. Proses pelibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Bank Jatim untuk memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemajuan dan perkembangan Bank Jatim sangat dipengaruhi oleh seberapa besar nasabah menerima dan menjadikan produk/jasa yang ditawarkan Bank sebagai pilihan. Semakin banyak nasabah yang berhasil diraih dan terpenuhi harapannya, sekaligus mendapatkan kepuasan, maka keberlangsungan usaha Bank Jatim akan terjamin, begitu pula sebaliknya. Oleh karena posisi nasabah yang sangat strategis, maka Bank berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada seluruh nasabah. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya kepuasan nasabah yang selama ini menjadi prioritas layanan Bank Jatim.

Salah satu harapan nasabah yang secara kontinu direalisasikan Bank Jatim adalah hadirnya layanan yang setara untuk semua, tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya. Tak hanya itu, kesetaraan juga diberikan kepada nasabah yang masuk kategori berkebutuhan khusus, di antaranya para penyandang disabilitas, yaitu mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan/atau sensorik. Komitmen Bank Jatim memberikan produk dan layanan terbaik, termasuk memberikan perlakuan setara, didorong oleh kesadaran bahwa nasabah memiliki hak tersebut.

Bank Jatim menjalin kerja sama dengan pemasok/*vendor*/mitra kerja untuk memenuhi barang dan jasa yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Kebijakan itu diambil karena Bank tidak bisa memenuhi semua kebutuhan barang dan jasanya secara mandiri. Untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik dan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diperlukan, seluruh pemasok yang menjadi rekanan Bank Jatim harus memenuhi prasyarat dan kebijakan umum seperti diatur dalam SK Direksi No. 060/03/34/DIR/UMM/KEP, tanggal 4 Oktober 2021 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengadaan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Secara spesifik, SOP tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang di dalamnya terdapat pengelolaan data penyedia melalui *Vendor Management System* (VMS).



Keberadaan Bank Jatim memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai produk dan layanan jasa perbankan hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Selain manfaat langsung berupa layanan jasa perbankan, keberadaan Bank Jatim juga memberikan sejumlah manfaat tidak langsung bagi masyarakat. Manfaat tersebut antara lain diwujudkan dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). TJSL adalah komitmen Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Operasional usaha industri perbankan tidak berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan. Namun demikian, sebagai lembaga penyalur kredit, perbankan memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dengan mencermati proyek-proyek yang dibiayai oleh debiturnya. Dalam hal ini, perbankan harus memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan debitur tidak berpotensi apalagi secara factual berdampak negatif terhadap lingkungan.

Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tujuan ini hanya bisa diwujudkan melalui proses-proses pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keselarasan menjadi kunci penting karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya.

Implementasi keuangan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan diwujudkan Bank Jatim dengan merujuk berbagai regulasi yang berlaku. Salah satunya adalah POJK Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan Bank menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) sejak POJK Keuangan Berkelanjutan berlaku, yaitu 1 Januari 2019. Seiring dengan itu, berpedoman pada Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK No.51/POJK/03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang diterbitkan OJK, Bank Jatim juga melanjutkan pemberian kredit ke sektor-sektor usaha yang memenuhi prinsip Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), antara lain, dalam prosesnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain memiliki kebijakan pembiayaan sesuai dengan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), kontribusi Bank Jatim terhadap kelestarian lingkungan juga diwujudkan melalui operasional kantor yang ramah lingkungan dengan memegang prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*). Prinsip ini diwujudkan

melalui pengelolaan yang baik terkait penggunaan bahan baku/material kertas, energi (bahan bakar minyak dan listrik), dan air.

Bank Jatim menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan antar manusia, baik dari segi jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, status sosial, pandangan politik, kondisi fisik, dan sebagainya. Bagi Bank, keberagaman merupakan keniscayaan dan menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih berwarna. Selaras dengan prinsip itu, maka Bank Jatim berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara setara dalam kesempatan bekerja, mendapatkan penilaian kinerja, termasuk untuk mendapatkan kenaikan jenjang karier, pengembangan kompetensi, remunerasi dan lain-lain. Berdasarkan komitmen itu, Bank memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi pos-pos, posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan. Kesamaan kesempatan dalam bekerja juga dipegang oleh Bank Jatim dalam proses rekrutmen karyawan.

Bank telah memberikan rincian kontak melalui situs web Bank atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Dalam meningkatkan implementasi penerapan GCG di Bank Jatim, manajemen Bank berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System*.

Terkait dengan daya tahan Bank, Dewan Komisaris sangat menekankan pada efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa manajemen risiko dan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

Bank senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Terkait kepemilikan saham, Bank telah mengungkapkan informasi antara lain pemegang saham 5% atau lebih, kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar, serta kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris baik langsung dan tidak langsung. Bank juga melaksanakan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan. Laporan tahunan Perseroan telah memuat antara lain, visi, misi, tujuan dan sasaran Bank, kinerja keuangan dan non keuangan, kebijakan dividen, detail biografi dari semua Direksi dan Dewan Komisaris, rincian kehadiran masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun, jumlah remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, transaksi pihak terkait, serta kantor Akuntan Publik beserta biaya audit dan non auditnya.



Selain melalui laporan tahunan, Bank juga telah mengungkapkan informasi perusahaan melalui laporan triwulanan, laporan keuangan yang dapat dilihat pada *website* Bank. Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Pengungkapan informasi Bank dilakukan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi internal antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Investor Relation Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta pemegang saham untuk memaparkan kinerja Bank. Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidental kepada regulator sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

Terkait tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Bank yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain, Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Terkait komposisi Dewan Komisaris, saat ini Bank memiliki 75% Komisaris Independen dari jumlah Dewan Komisaris yang ada di Bank. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang Komposisi Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Terkait perkembangan penerapan tata kelola perusahaan di tahun 2023, Bank melaksanakan GCG *Assessment* secara periodik sesuai ketentuan SEOJK 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pada tahun 2023, Bank melaksanakan asesmen pada semester I. Skor yang di peroleh pada semester I yaitu 2,14. Hasil asesmen ditindaklanjuti guna peningkatan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerja sama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2023 berjalan ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2023 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.



KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2023 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2023 berjalan Komite TI telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2023 berjalan Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

Komite Pembiayaan

komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Kredit
Selama tahun 2023 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali rapat.
- Komite Restrukturisasi Kredit
Selama tahun 2023 berjalan komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.
- Komite Term Loan Facility (TLF)
Selama tahun 2023 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- Komite Implementasi Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.
- Komite Restrukturisasi Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan Komite Restrukturisasi Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat
- Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

KOMITE PRODUK DAN JARINGAN

Komite Produk

Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik digital maupun non digital dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup. Sepanjang tahun 2023 belum terdapat pelaksanaan rapat komite produk dan berproses dalam pengkinian ketentuan internal atas perubahan Struktur Organisasi grand design. Pengkinian SOP Komite Produk telah dilakukan dan diterbitkan SOP Komite Produk dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/03/80/DIR/PGP/KEP Tanggal 29 Desember 2023.

Komite Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentuan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2023 berjalan Komite Jaringan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:



Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

Busrul Iman	: Direktur Utama
Tonny Prasetyo *)	: Direktur Operasi
Edi Masrianto	: Direktur Keuangan, Treasury dan Global Services
R. Arief Wicaksono	: Direktur Mikro, Ritel & Menengah
Zulhelfi Abidin **)	: Direktur IT dan Digital
Eko Susetyono	: Direktur Manajemen Risiko

*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

**) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.

Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 menyetujui dan mengangkat Tonny Prasetyo sebagai Direktur Kepatuhan dan Arif Suhirman sebagai Direktur Operasi. Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur sebagai berikut:

Busrul Iman	: Direktur Utama
Tonny Prasetyo *)	: Direktur Kepatuhan
Edi Masrianto	: Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
R. Arief Wicaksono	: Direktur Mikro, Ritel & Menengah
Zulhelfi Abidin	: Direktur IT & Digital
Eko Susetyono	: Direktur Manajemen Risiko
Arif Suhirman **)	: Direktur Operasi

*) Efektif lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-38/D.03/2023 tanggal 26 Mei 2023.

**) Efektif lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-132/D.03/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Penutup

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan usaha Bank Jatim pada Tahun Buku 2023. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris ikut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh manajemen. Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada *stakeholder* dan *shareholder*.

Bank Jatim terus melakukan pembenahan di segala lini sebagai komitmen untuk memperbesar kontribusi dalam membangun perekonomian daerah, yang pada akhirnya akan berimbas pada geliat perekonomian nasional. Ke depannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam program transformasi BPD yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi.

Surabaya, Januari 2024

Atas Nama Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama

Laporan Dewan Komisaris





Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Bank Jatim dapat mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu mempertahankan dan memberikan kinerja yang baik di tengah kondisi belum selesainya pemulihan ekonomi pasca pandemi serta ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris melaksanakan mandat perseroan akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2023. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola (governansi korporat) Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2023.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan alternative dan implementasi strategi. Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui rapat online maupun offline, serta secara tertulis. Pemberian nasihat secara formal dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Sedangkan pemberian nasihat secara informal dilakukan melalui kunjungan kerja (on site visit) maupun sharing session. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) Divisi Audit Internal Periode 2023;
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
3. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2023;
4. Penyampaian Data *Key Performance Indicator* (KPI) Pengurus Bank Jatim Tahun 2022;
5. Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Audit Laporan Keuangan Bank Jatim sebagai bagian dari Proses *Due Diligence* Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah;
6. Revisi Rencana Bisnis Bank Bank Jatim Tahun 2023;
7. Penggantian Vice President Audit Internal;
8. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (PDPS) untuk Calon Dewan Pengawas Syariah
9. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS);
10. Perubahan Kebijakan Produk dan Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP);
11. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2023;
12. Proses Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait;
13. Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2024;
14. Usulan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan & Prosedur Kegiatan Penyertaan Modal; dan
15. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perumusan alternative, penetapan dan implementasi strategi Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Pengawasan terhadap perumusan strategi Bank dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta memberikan persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana



Bisnis. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi dilakukan melalui pengawasan dan pemberian nasihat serta arahan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaian. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja operasional, serta tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

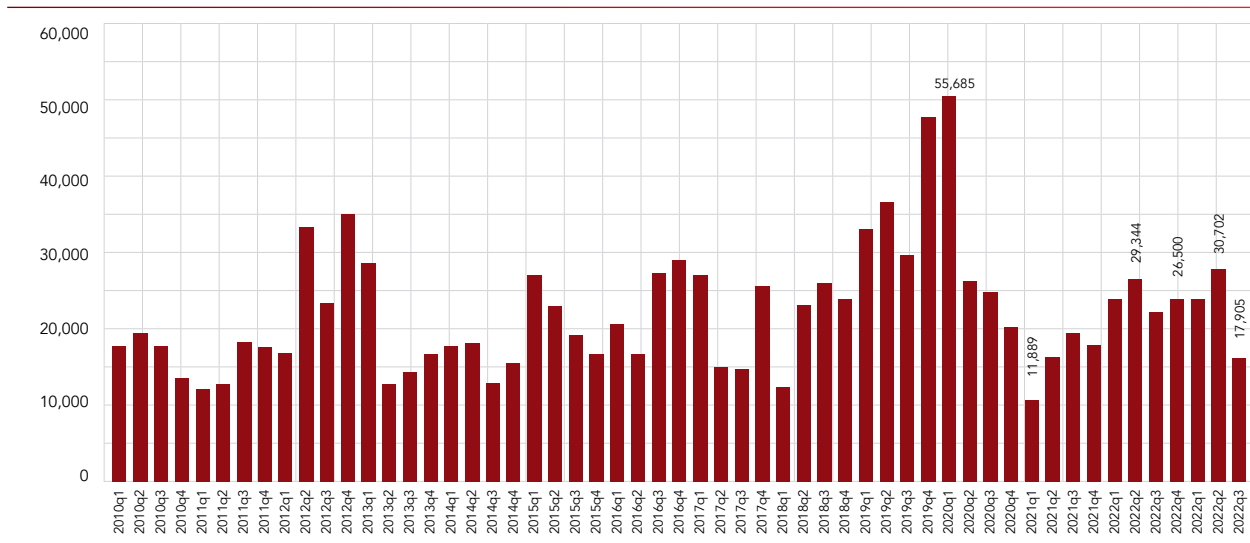
Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian global ditandai dengan adanya pergeseran besar yang mengguncang dunia kita yang terasa saat ini paska pandemi Covid-19. Hal ini meliputi, meningkatnya ketimpangan pendapatan, teknologi mendorong perubahan dalam pekerjaan, meningkatnya proteksionisme, meningkatkan migrasi, dan meningkatnya pengaruh media sosial dan dunia *post-truth*. Pada gilirannya menciptakan 10 (sepuluh) tantangan global teratas yang dapat diidentifikasi berupa, 1)

keamanan energy dan lingkungan, 2) konflik dan kemiskinan, 3) bersaing di era baru globalisasi, 4) ketidakseimbangan global, 5) munculnya kekuatan baru, 6) eksklusivitas ekonomi di timur tengah, 7) perusahaan global, dampak global, 8) krisis kesehatan global, 9) kebuntuan tata kelola global, dan 10) kemiskinan global.

Berdasarkan proyeksi IMF pada World Economic Outlook Update Januari 2023 dan *previous editions*, memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pemulihan membentuk kurva V paska pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDB dunia mencapai 2,8% di tahun 2019, -3,1% di tahun 2020, meningkat menjadi 6,2% di tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 3,5% pada tahun 2022 turun kembali menjadi 3,0% di tahun 2023, dan diproyeksikan akan turun kembali menjadi 2,9% di tahun 2024. Sedangkan kurva V Indonesia nampak lebih datar dimana pada tahun 2019 tumbuh 5,0%, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,1%, tahun 2021 tumbuh kembali 3,7%, tahun 2022 meningkat menjadi 5,3%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5%, semetara itu pada tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai 5%.

Indeks ketidakpastian dunia (*World Uncertainty Index*) sebelum perang Gaza pada 7 Oktober 2023 nampak dalam diagram sebagai berikut:

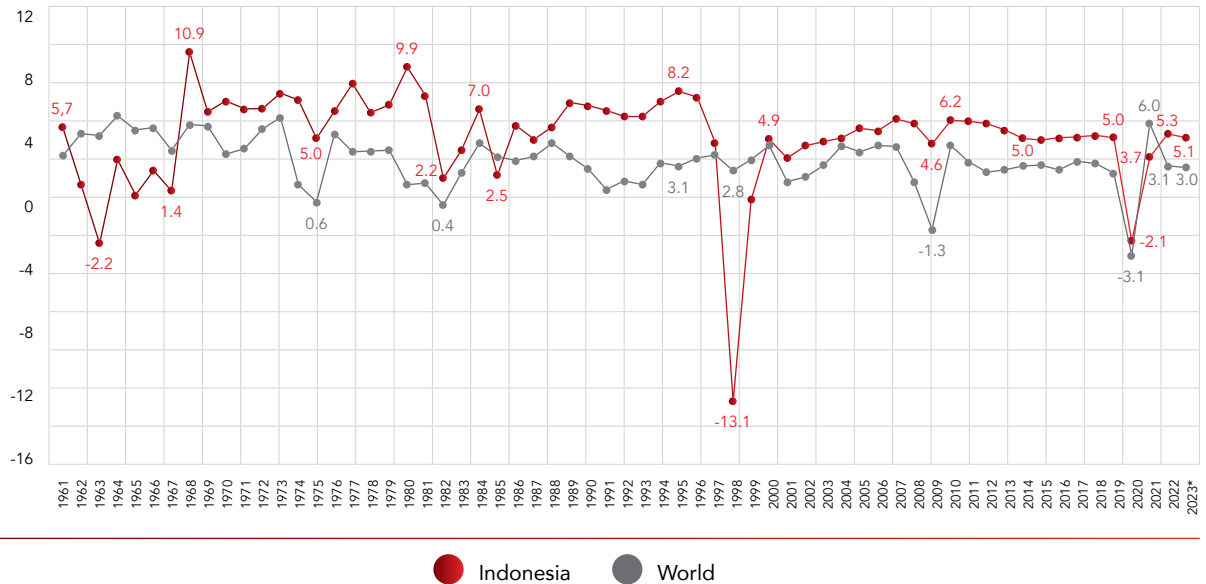


Source: <https://worlduncertaintyindex.com> | World Uncertainty Index-221229

Di sisi perekonomian nasional, tantangan Indonesia dari faktor eksternal meliputi, kebijakan moneter AS (taper tantrum) untuk mengendalikan inflasi, perang Ukraina-Rusia, berupa kenaikan harga minyak dan komoditas pertanian/pangan serta peningkatan biaya logistik, serangan Israel yang tidak pandang bulu ke Gaza, konflik AS-Tiongkok, dan perlambatan ekonomi

Tiongkok. Sedangkan tantangan dari faktor domestik meliputi meningkatnya subsidi (pertalite, solar, pertamax, biodiesel, LPG), bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya, ketegangan politik meningkat, begitu pula ketegangan sosial, pengangguran kaum muda yang tinggi, pemulihan berjalan lambat, pertumbuhan masih di kisaran 5% hingga tahun 2024, serta institusi politik dan ekonomi melemah.

Naik turunnya perekonomian Indonesia dibanding perekonomian dunia pada pertumbuhan PDB, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia rerata berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Ketika perekonomian dunia merosot tajam atau mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sedikit melambat, namun ketika perekonomian dunia pulih, perekonomian Indonesia memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor internal, nampak dalam diagram sebagai berikut:



* Q1-Q3.

Sources : World Bank; and BPS-Statistics Indonesia | GDP_GROWTH_INA_WORLD-1961-2023-230808

Dari sisi industri perbankan, transformasi digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang dimulai pada pertengahan abad ke-21, berupa sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet, *internet of things*, dan kecerdasan buatan (*artificial intellegency*). Semuanya guna mendorong peningkatan fungsi secara bertahap dalam proses bisnis di seluruh rantai nilai organisasi. Transformasi digital memungkinkan organisasi meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan bisnis, menurunkan biaya, meningkatkan profitabilitas, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan nilai ekonomi dan sosial yang lebih besar kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian transformasi *digital* mengacu pada penerapan teknologi digital untuk mentransformasikan layanan atau bisnis. Hal ini dicapai dengan mengganti proses manual (*non digital*) dengan proses digital atau mengganti teknologi *digital* yang sudah ketinggalan zaman dengan teknologi *digital* yang lebih mutakhir.

Capaian Kinerja

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023. Dari sisi operasional, Total penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi tahun 2023 sebesar Rp7,06 triliun, meningkat 6,80% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp6,61 triliun. Total Kredit Konsumer tahun 2023 mencapai Rp30,26 triliun, meningkat 9,27 % dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp27,69 triliun. Dari Kredit Mikro, Ritel dan Program, pada tahun 2023 telah menyalurkan kredit sebesar Rp14,25 triliun, meningkat sebesar Rp7,98 triliun atau sebesar 127,32% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,27 triliun.



Pada segmen Syariah, realisasi DPK Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp2,60 triliun, meningkat sebesar Rp 537 miliar atau 20,65 % dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,06 triliun. Jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim pada tahun 2023 sebesar 297.498 nasabah meningkat sebesar 32,828 nasabah atau 12,40 % dibandingkan tahun 2022. Jumlah Pembiayaan Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp2.18 triliun naik sebesar Rp284 miliar atau 14,94 % dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,90 triliun. Pencapaian yang baik juga terlihat dari sisi keuangan. Pada tahun 2023 jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp140.126 juta, meningkat sebesar 16,04% dari tahun 2022 yang sebesar Rp120.756 juta.

Laba tahun berjalan di tahun 2023 mencapai Rp1.470.105 juta, mengalami penurunan sebesar -4,71% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.542.824 juta. Penurunan laba tahun berjalan tidak berpengaruh pada peningkatan total aset dan total ekuitas. Pada tahun 2023, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.854.773 juta, meningkat sebesar 0,80% dari tahun 2022 yang sebesar Rp103.031.367 juta. Ekuitas di tahun 2023 mencapai Rp12.151.069 juta, meningkat sebesar 6,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11.445.861 juta.

Tingkat Kesehatan Bank

Selain kinerja operasional dan keuangan, Tingkat Kesehatan Bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Bank melakukan self assessment Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan Risiko (*risk based bank rating*) dengan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian (Peringkat Komposit). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko. Faktor tersebut yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Jatim secara individu posisi 31 Desember 2023 berada pada Peringkat Komposit 2 (Sehat). Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Tantangan ekonomi global diwarnai dengan kredendo kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan, meningkatnya beban utang, ancaman inflasi dan ketegangan geopolitik. *International Monetary Fund* (IMF) mengidentifikasi terdapat 7 (tujuh) faktor yang melemahkan pertumbuhan dunia, meliputi perang di Ukraina, inflasi, resesi, kesulitan hutang, Cina, ketidakstabilan sosial dan fragmentasi. Sedangkan *World Economic Forum* (WEF) mengidentifikasi konteks global yang penuh gejolak (turbulensi) meliputi; dampak pandemi Covid-19 masih berlanjut, risiko terhadap pemulihan ekonomi, divergensi ekonomi, erosi kohesi sosial, ketegangan geopolitik, risiko kegagalan aksi iklim serta digitalisasi yang aman.

Proyeksi pertumbuhan PDB dunia tahun 2024 pasca pemulihan setelah COVID-19, secara berturut-turut PDB dunia dari 3,0% tahun 2023 menurun menjadi 2,9% di 2024, AS dari 2,1% diproyeksikan turun menjadi 1,5% dan China dari 5,0% diproyeksikan menurun menjadi 4,2% di tahun 2024, sedang Indonesia diproyeksikan lebih datar di 5,0% di 2023 dan 2024. Release <https://worlduncertaintyindex.com> menyatakan Index Ketidakpastian Dunia (*World Uncertainty Index*) yang pada Q4 2022 sebesar 26,50, maka sebelum perang Gaza 7 Oktober 2023, mengalami penurunan menjadi 17,90 pada Q3 2023. Di sisi lain tantangan domestik perekonomian Indonesia meliputi meningkatnya subsidi (pertalite, solar, pertamax, biodiesel, LPG), bantuan langsung tunai dan bantuan sosial lainnya, ketegangan politik meningkat, begitu pula ketegangan sosial, pengangguran usia muda yang tinggi, pemulihan berjalan lambat, pertumbuhan masih di kisaran 5% hingga tahun 2024, serta institusi politik dan ekonomi melemah.

Arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan masih akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Sedangkan dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direspon dengan mulai bermunculannya Bank Digital.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Bank Jatim akan dapat memanfaatkan peluang yang ada yaitu, perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupti teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan. Hal ini di dukung juga dengan jumlah penduduk usia *millennial* dan Generasi Z (Gen-Z) di Jawa Timur yang notabene merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce* serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi.



Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun industri keuangan/non keuangan serta masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMKM yang semakin berkembang juga merupakan peluang bagi Bank Jatim.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menurunkan biaya modal, memperkuat pasar modal dan sektor jasa keuangan, memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik diharapkan Bank Jatim dapat meningkatkan daya saing dalam persaingan perbankan serta berkontribusi positif atas pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Penerapan Tata Kelola yang baik dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pengurus dan karyawan Bank Jatim untuk menjalankan praktik Tata Kelola yang mengutamakan kelangsungan hidup Bank dalam jangka panjang, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) mengatur Bank untuk patuh menjalankan praktik tata kelola yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk berkontribusi menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat.

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen GCG sebagai berikut

Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Jatim senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan risiko Bank Jatim diatur dalam suatu Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan *Basel* serta *banking best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal bank. Bank Jatim juga telah

melakukan pengkinian rencana aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha bank apabila terjadi financial stress, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/ POJK.03/2017 tentang rencana aksi bagi bank sistemik.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Jatim terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit dan Komite Pemantau risiko, serta Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko melalui Komite terkait; dan di tingkat operasional terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama unit bisnis dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko, antara lain mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menilai Bank Jatim telah secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian (*self assessment*), dan untuk mendukung proses pelaksanaan *self assessment* dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR), yang meliputi penilaian terhadap profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan. Selama tahun 2023, bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Jatim periode semester I dan semester II tahun 2023 kepada regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko meliputi pengelolaan 8 jenis risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan, dan selama tahun 2023, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self assessment* profil risiko periode Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023 kepada regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko konsolidasi Unit Usaha Syariah yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko, selama tahun 2023 Bank Jatim telah melaporkan Profil Risiko konsolidasi periode Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2023 kepada regulator dengan tepat waktu.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam



kerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyesuaian *risk appetite* dengan strategi Bisnis. Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Kerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, Bank juga membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2023 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko *inherent low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Satisfactory*. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko yang efektif yang memuat antara lain; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan dan penetapan limit risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), dan Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker* unit, unit pendukung, serta Satuan Kerja Audit Intern. Sistem pengendalian internal untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian internal secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Intern, Direktur Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Satuan Kerja Audit Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Satuan Kerja Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.



2. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Setiap pejabat dan pegawai memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, mendorong budaya risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak ekstern bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor ekstern, dan nasabah bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Direksi secara berkala melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Cabang (Pemimpin Cabang) dalam hal ini yaitu melakukan evaluasi atas hasil kinerja maupun terhadap hasil pemeriksaan audit seperti adanya permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, kesalahan Laporan keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas kecukupan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Whistleblowing System

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi *Anti Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank. Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* (EWS) terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi *anti fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanan oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari pemecatan, demosi, diskriminatif, intimidasi dan perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.



Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank Jatim telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2023, terdapat 777 laporan melalui sarana *whistleblower*. Dari 777 laporan tersebut, 776 di antaranya belum dilakukan penyelesaian lebih lanjut, karena laporan tidak termasuk dalam *fraud*/memenuhi unsur *fraud*, dalam kategori pengaduan layanan nasabah serta terkait pertanyaan operasional bank. Terdapat 1 (satu) laporan melalui sarana *whistleblower* yang telah ditindaklanjuti dan berstatus "Selesai".

Tata Kelola Keberlanjutan

Hal yang tak kalah penting, implementasi GCG sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, serta merujuk pada standar *best practice* dari korporasi-korporasi unggulan, akan membuat Bank Jatim mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*). Berbekal semua itu, maka Bank optimistis mampu mencatatkan kinerja terbaik secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia, Bank Jatim menerapkan GCG dengan mengacu pada pedoman tata kelola yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Bank juga mengadopsi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Markets Forum.

Struktur tata kelola Bank Jatim merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Selaras dengan itu, sistem kepengurusan Bank menganut model 2 (dua) badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris sebagai

organ perusahaan yang melakukan pengawasan (*supervisory organ*) dan Direksi sebagai organ perusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan (*management organ*), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung berupa tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan, Bank Jatim memberikan perhatian yang sama antara aspek atau topik ekonomi, lingkungan dan sosial dalam menjalankan usaha. Pembahasan topik-topik tersebut disampaikan melalui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dimana keduanya memuat rencana dan strategi Bank Jatim jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mendapatkan rencana dan strategi terbaik, Bank Jatim yang berada di wilayah OJK Kantor Regional IV Surabaya, perlu berkonsultasi guna mendapatkan arahan dan persetujuan dari OJK selaku regulator.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris. Ketiga Komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Sejak tahun 2021, Bank Jatim telah menyempurnakan dan mempublikasikan Piagam Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Piagam Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 061/04/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022;
2. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 061/05/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022.

Secara umum seluruh program kerja ketiga Komite dibawah Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan ketiga Komite selama tahun 2023, Dewan Komisaris menilai telah melaksanakan fungsinya masing-masing dan terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh telaah, pendapat dan rekomendasi masing-masing Komite juga telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Demikian pula dari sisi aspek komunikasi dan hubungan kerja ketiga Komite selama tahun 2023 telah terjalin dengan baik dan intens serta saling melengkapi untuk membahas isu-isu di Bank Jatim dan memantau progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, yang menjalankan fungsi utamanya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, proses audit internal, sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan sistem kepatuhan terhadap regulasi internal dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat Komite Audit;
2. Melaksanakan 5 (lima) kali kunjungan kerja dalam rangka pengawasan aktif ke jaringan Kantor Cabang Bojonegoro, Lamongan, Blitar, Kepanjen serta Sumenep yang memiliki profil risiko kredit dan operasional tingkat komposit moderat kebawah;
3. Melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali kunjungan kerja dalam rangka pengawasan aktif ke unit kerja dikantor pusat yang memiliki profil risiko moderat kebawah dan kontribusi signifikan pada pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2023;
4. Melaksanakan 96 (sembilan puluh enam) kali diskusi internal dengan unit kerja terkait, maupun diskusi gabungan dengan Komite Pemantau Risiko;
5. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *in-house/ unaudited* maupun *audited* yang akan dipublikasikan;
6. Menyusun 3 (tiga) laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa audit atas informasi Keuangan historis tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2022 oleh KAP PKF (Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pailangan & Rekan);
8. Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan *key performance indicator* (KPI) Komite Audit tahun 2024; dan
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal satu kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan perbankan/audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, yang menjalankan fungsi utamanya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab terkait pencalonan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, serta penetapan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi;
2. Melakukan *review* kebijakan remunerasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris;
4. Menelaah, memberikan pendapat dan rekomendasi terkait usulan pemberian remunerasi Pengurus yang bersifat *variable* dari Direksi kepada Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai;
5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
7. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal satu kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan perbankan/audit.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dengan tujuan agar memperoleh keyakinan yang memadai, bahwa *second line* pada *three line of defence* telah menjalankan fungsinya dalam penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal serta sistem kepatuhan dalam praktek tata lola yang terintegrasi dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Disamping itu juga memastikan agar penerapan manajemen risiko bank tetap memenuhi unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank pada seluruh jenjang organisasi tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan dapat meminimalisir potensi kerugian serta menguntungkan bank. Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat Komite Pemantau Risiko;
2. Melaksanakan 6 (enam) kali kunjungan kerja dalam rangka pengawasan aktif ke jaringan Kantor Cabang Ponorogo, Bojonegoro, Lamongan, Blitar dan Kepanjen serta Sumenep yang memiliki profil risiko kredit, operasional serta risiko hukum dengan tingkat komposit moderat kebawah;
3. Melaksanakan 18 (delapan belas) kali kunjungan kerja dalam rangka pengawasan aktif ke unit kerja dikantor pusat yang memiliki profil risiko moderat kebawah dan kontribusi signifikan pada pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2023;



4. Melaksanakan 96 (Sembilan puluh enam) kali diskusi internal dengan unit kerja terkait, maupun diskusi gabungan dengan Komite Audit;
5. Menelaah 3 (tiga) draft pembuatan dan atau pengkinian Buku Pedoman Perusaan (BPP) usulan Direksi yang secara mandatory membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris berikut menyusun rekomendasinya, meliputi:
 - a. BPP Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan;
 - b. BPP Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyertaan Modal; dan
 - c. Pakta Integritas pengurus perseroan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
6. Menelaah laporan triwulanan kegiatan Direktorat Kepatuhan dan profil risiko triwulanan untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun program kerja dilengkapi dengan *time line*, termasuk menyusun *key performance indicator* (KPI) Komite Pemantau Risiko untuk periode tahun 2024;
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal satu kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan perbankan, tata kelola atau manajemen risiko.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Suprajarto	:	Komisaris Utama
Candra Fajri Ananda	:	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Heru Tjahjono	:	Komisaris
Sumaryono	:	Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 menyetujui memberhentikan Heru Tjahjono selaku Komisaris dan mengangkat Muhammad Mas'ud sebagai Komisaris Independen dan Adhy Karyono sebagai Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris sebagai berikut:

Suprajarto*	:	Komisaris Utama
Adhy Karyono**	:	Komisaris
Candra Fajri Ananda	:	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	:	Komisaris Independen
Sumaryono	:	Komisaris Independen

* Berhenti menjabat sejak 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

** Efektif lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-151/D.03/2023 tanggal 24 November 2023.

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh Pegawai. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2023. Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Bank Jatim. Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Bank dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Bank menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Surabaya, Januari 2024
Atas Nama Dewan Komisaris



Adhy Karyono
Komisaris



Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Sumaryono
Komisaris Independen

Tanggung Jawab

Laporan Tahunan 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Direksi



Busrul Iman
Direktur Utama



Tonny Prasetyo
Direktur Kepatuhan



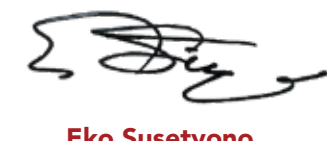
Edi Masrianto
Direktur Keuangan, Treasury
& Global Services



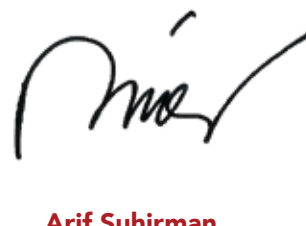
R. Arief Wicaksono
Direktur Mikro, Ritel & Menengah



Zulhelfi Abidin
Direktur IT & Digital



Eko Susetyono
Direktur Manajemen Risiko



Arif Suhirman
Direktur Operasi

Dewan Komisaris



Adhy Karyono
Komisaris



Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen



Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen



Sumaryono
Komisaris Independen



PROFIL Perusahaan







Identitas Perusahaan



Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk.

Contact Address

Call Center : 14044

SMS

Banking : 3366

Telp : (031) 5310090-5310099

Faks. : (031) 5310838

Email : info@bankjatim.co.id

Situs Web : www.bankjatim.co.id,
www.bankjatim.id



Data Jaringan Kantor

- 1 Kantor Pusat
- 48 Kantor Cabang
- 173 Kantor Cabang Pembantu
- 216 Kantor Fungsional
- 199 Payment Point
- 854 ATM
- 94 CRM
- 39 Kas Mobil/Kas Mobil ATM
- 196 Kantor Layanan Syariah



Bidang Usaha

Jasa Perbankan



Nama Panggilan

Bank Jatim



Tanggal Pendirian

17 Agustus 1961



Dasar Hukum Pendirian

Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 serta diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.



Kode Saham

BJTM



Modal Dasar

Rp9.000.000.000.000



Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

12 Juli 2012



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sebanyak 15.015.498.082 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.753.874.520.500



Call Center

14044



SMS Banking

3366



Situs Web

www.bankjatim.co.id
www.bankjatim.id



Jumlah Pegawai

Per Desember 2023 sebanyak 4.544 Orang (termasuk Tenaga Alih Daya)

Alamat Perusahaan



Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmad
98 – 104, Surabaya 60271



Sekretaris Perusahaan

Wioga Adhiarma Aji
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
no. 98-104 Surabaya
Email: corsec@bankjatim.co.id



Kepemilikan

Pemda Tingkat I
Provinsi Jawa Timur **(51,13%)**
38 Pemda Kabupaten/Kota
(28,35%)
Masyarakat **(20,52%)**



Investor Relation

Derry Widya Ariyanta
Corporate Secretary
Kantor Pusat Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat
no. 98-104 Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id



@bankjatim



bankjatim



@bank_jatim



bank jatim



Nama dan Alamat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah

KANTOR CABANG				
NAMA	ALAMAT	TELEPON	FAKSIMILI	EMAIL DAN WEB
Cabang Utama Surabaya	Jl. Basuki Rakhmad 98-104, Surabaya	(031) 5310090-99	(031) 5470159	Bankjatim.cabut@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Banyuwangi	Jl. Basuki Rahmat no. 156 Banyuwangi	(0333) 421755/ 426755	(0333) 421555	umumsdbmbanyuwangi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jember	Jl. A. Yani no. 3A RT 01 RW 03 Patrang Jember 68137	(0331) 484605-07	(0331) 428376/ 481502	akuntansi.bpdjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Malang	Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang	(0341) 321961	(0341) 325085/ 365212	bankjatim_malang@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Madiun	Jl. Jawa No. 43 Madiun	(0351) 464432/ 459202/476328/ 476315	(0351) 463665/ 491499	bankjatim_madiun@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kediri	Jl. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kediri	(0354) 680270	(0354) 682924	bankjatimkediri@gmail.com umum.bjkediri@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pamekasan	Jl. Panglima Sudirman No. 5 Pamekasan	(0324) 322451/ 322923	(0324) 322932	bankjatim.pamekasan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bojonegoro	Jl. Mastrip 70 Bojonegoro	(0353) 882137/ 889753	(0353) 881028/ 891772	bankjatim_bojonegoro2004@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lumajang	Jl. Alun-alun Barat 4 Lumajang	(0334) 881683/ 882111	(0334) 882830	bankjatimlmj@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ngawi	Jl. Yos Sudarso 32 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.ngawi@gmail.com umum.bankjatimngawi@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Jombang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36, Kec. Jombang, Kab. Jombang	(0321) 862217	(0321) 861952	bankjatim.jombang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kraksaan	Jl. Raya PB. Sudirman 144, Kraksaan	(0335) 841382/ 843184	(0335) 841124/ 842451	bankjatim_kraksaan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Probolinggo	Jl. Soekarno-Hatta 311 Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	(0335) 422552/ 421879	(0335) 422314	bjprob@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Blitar	Jl. HOS Cokroaminoto 36-38, Blitar	(0342) 801462/ 806089/807333	(0342) 802262/ 801353	bankjatimblitar@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tulungagung	Jl. I Gusti Ngurah Rai 1, Tulungagung	(0355) 321105/ 321106/327581	(0355) 321104/ 320407	bankjatim.tulungagung@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Tuban	Jl. Basuki Rakhmad 13 Tuban	(0356) 322725	(0356) 321169	bankjatimtuban017@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Mojokerto	Jl. A. Yani No. 20, Mojokerto	(0321) 321261/ 323002	(0321) 396112/ 395950/ 395501	umum.mojokerto@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sumenep	Jl. Trunojoyo 49 Sumenep	(0328) 662557/ 662487	(0328) 665780	bjsumenep018@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sampang	Jl. K.H. Wakhid Hasyim 111, Sampang	(0323) 321226/ 323400/325004	(0323) 321493/ 325006	bankjatim_sampang@yahoo.com bjtmsampang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bangkalan	Jl. K.H. Moh. Kholil 38 Demangan Bangkalan	(031) 3095502/ 3093416/3099085	(031) 3095722	bankjatim_bangkalan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 18 Pasuruan	(0343)421061/ 411609/426086/ 431957	(0343) 426085/ 432797	bankjatim_pasuruan@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Nganjuk	Jl. Gatot Subroto 8 Nganjuk	(0358) 325100/ 325101/323910	(0358) 324420	bankjatim_nganjuk@yahoo.com www.bankjatim.co.id



KANTOR CABANG				
Cabang Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman No. 145 Trenggalek	(0355) 791676/ 791675	(0355) 792945	bankjatim_trenggalek@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Ponorogo	Jl. Diponegoro No. 42-44 Ponorogo	(0352) 461157/ 461158/ 484222	(0352) 484260/ 485485	bankjatim020@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pacitan	Jl. A. Yani No. 82 Pacitan	(0357) 881320/ 881321	(0357) 882889/ 886456	cabang_pacitan@bankjatim.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Gresik	Jl. Dr. Sutomo 181, Gresik	(031) 3982311/3982313/ 3980580	(031) 3973976/ 3990937	bankjatim_gresik@yahoo.com bankjatim.gresik@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Sidoarjo	Jl. Jend. A. Yani 29 Sidoarjo	(031) 8956108/ 8956109	(031) 8921631	bankjatim_sidoarjo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Lamongan	Ruko Permata Lamongan Jl. PB Sudirman No 72 Lamongan	(0322) 321810/ 322769/311633/ 318508	(0322) 321494	bankjatimlamongan28@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Situbondo	Jl. Basuki Rahmat 235 Situbondo	(0338) 674982/ 672123/ 674983	(0338) 672017	bankjatim_situbondo@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bondowoso	Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso	(0332) 427456/ 427447	(0332) 423524	bankjatim_bondowoso@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Magetan	Jl. Pahlawan No. 2 Magetan	(0351) 895378/ 891441/ 895333	(0351) 894715/ 895384	bankjatim.magetan@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Dr. Soetomo Surabaya	Jl. Airlangga No. 1-9 Surabaya	(031) 99453111/ 5012107	(031) 5020121	bj.sutomo@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Perak Surabaya	Jl. Perak Timur 262-264 Surabaya	(031) 3282635-37	(031) 3282508/ 3299063	bankjatim_perak@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kangean	Jl. Sriwijaya No. 431 Kec. Arjasa Kep. Kangean Sumenep	(0327) 312200/ 312030/ 312161	(0327) 312040	bankjatim034@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Jakarta	Jl. Thamrin Boulevard CT.LD1 No.1 CT.LD02 Jakarta Pusat	(021) 29625615-17	(021) 29625618	cabangjakarta.umum@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Batu	Jl. Panglima Sudirman No. 88 Kel. Pesanggrahan Kec. Batu Batu	(0341) 511205/ 511206	(0341) 590522 /598550	bankjatimbatu@gmail.com umumbankjatimbatu@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Bawean	Jl. Kawedanan No. 3, Sangkapura Bawean	(0325) 422470/ 422770/423801/ 421558	(0325) 422471	bpdjatim.bawean@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Pare	Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare	(0354) 397850/ 397851	(0354) 392799	bankjatimpare042@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang HR. Muhammad Surabaya	Jl. HR. Muhammad No. 29 Surabaya	(031) 99147557/ 99141887	(031) 99147868/ 99147763	bjtm.hrm@gmail.com www.bankjatim.co.id
Cabang Kepanjen	Jl. Kawi No. 28, Kepanjen	(0341) 398140	(0341) 398141	bankjatim_kepanjen@yahoo.co.id www.bankjatim.co.id
Cabang Batam	Jl. Pembangunan Komplek Ruko Citra Mas Penuin Blok A-05 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam	(0778) 8071030	(0778) 7602059	bankjatimcabangbatam@gmail.com www.bankjatim.co.id
KANTOR CABANG SYARIAH				
Syariah Surabaya	Jl. Dr. Soetomo No. 37 Surabaya	(031) 99543971	(031) 99543971	umum.kcssurabaya@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Kediri	Jl. Diponegoro No. 50B Kediri	(0354) 7418278/7418279	7418277/7418424	bankjatimsyariah_kediri@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Malang	Jl. Soekarno Hatta Grand Ruko Kav. 13-14 Malang	(0341) 491333/492333	(0341) 2996502/2996503	bankjatimsyariamalang@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 220 – 222 Gresik	(031) 3982011	(031) 3982027	bankjatimsyariah_gresik@yahoo.com www.bankjatim.co.id
Syariah Madiun	Jl. Hos Cokroaminoto No. 128 Kota Madiun	(0351) 476677	(0351) 476666	jatimsyariamadiun@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Jember	Jl. Gajah Mada 278 Jember	(0331) 410614	(0331) 410613	bjsyariahjember@gmail.com www.bankjatim.co.id
Syariah Sidoarjo	Jl. Sunanjar Priyo Sudarmo No. 138-148 Blok A-B Sidokare Sidoarjo	(031) 8924148/8925898	(031) 99704074/99704084	bankjatimsyariah.cabangsidoarjo@gmail.com www.bankjatim.co.id

Brand Perusahaan

MAKNA LOGO:



5
HELAI BULU



Inspirasi bentukan dari logo Bank Jatim merupakan sayap Burung Garuda yang mengepak ke atas sebagai tanda siap terbang. Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam mitologi Jawa, Burung Garuda adalah "Bird of Life" atau burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo Bank Jatim dengan harapan Bank Jatim dapat terbang tinggi menuju *goal* yang diinginkan, serta terjadi keseimbangan antara dana yang diperoleh dari masyarakat/pemerintah dan disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan sehingga tercipta perekonomian berasaskan kerakyatan.

The First merupakan *Brand Personality* Bank Jatim yang tercermin dalam 5 (lima) Helai Sayap pada logo Bank Jatim. Lima Helai Sayap menggambarkan 3 (tiga) Pilar serta 2 (dua) landasan utama perbankan. Tiga Pilar perbankan antara lain adalah *Agent of Development*, *Institutional Endurance* dan *Services*. Dua landasan utama perbankan antara lain adalah *good Corporate Governance* dan *Risk Management*.



5 Semangat Baru Bank Jatim

PRO **F** ESIONAL
PARTNERSH **I** P
CA **R** E
S ERVICE
TRUS **T** WORTHY



3 Pilar Serta 2 Landasan Utama Perbankan

3 PILAR

- *Agent of Development*
- *Institutional Endurance*
- *Services*

2 LANDASAN UTAMA PERBANKAN

- *Good Corporate Governance*
- *Risk Management*

Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dengan landasan hukum pendirian berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dilengkapi landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, status Bank Pembangunan Daerah dari Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dan perubahan nama PT Bank

Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tanggal 29 Desember 1994 dilakukan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 26 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan mengubah struktur permodalan/ kepemilikan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang pada tanggal 19 Agustus 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999, maka selanjutnya secara resmi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No. 89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.

Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank Jatim telah melakukan beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Akta No. 25 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto SH. Perubahan Anggaran Dasar tersebut tertuang berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 15 Tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026675.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023.

Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Bank Jatim pernah melakukan pergantian nama sebanyak 3 (tiga) kali sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 1976 atas dasar Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976 tanggal 10 Juli 1976. Kemudian berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8827.HT.01.01. Th.99 tanggal 5 Mei 1999 dan Berita Negara RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara RI Nomor 3008/1999. Terakhir berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01.10-31887 tanggal 31 Agustus 2012 dan menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan 20% saham di Bursa Efek Indonesia dengan Ticker Code atau Kode Saham BJTM.



Visi, Misi & Budaya Perusahaan



VISI

Menjadi "BPD No. **1**"
di Indonesia



MISI

- Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju *digital bank* dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;
- Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

bankjatim

OOOOO



Reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Bank Jatim yang selama ini berjalan, Bank Jatim senantiasa melakukan reviu terhadap Visi dan Misi secara berkala. Pada tahun 2023, Visi dan Misi Bank Jatim telah dibahas oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada saat presentasi akhir penyusunan *Corporate Plan* 2024-2028 dan diputuskan masih tetap relevan untuk kondisi saat ini.

Penjelasan Visi

Menjadi Bank BPD yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan serta menjadi BPD yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sehingga mampu bersaing dan bahkan mengungguli bank-bank lain khususnya Bank Pembangunan Daerah.

Penjelasan Misi

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya difokuskan meningkatkan percepatan pertumbuhan kinerja dan Bank terus bertransformasi agar tetap relevan dalam upaya untuk tumbuh di atas rata-rata industri perbankan. Dalam upaya percepatan pertumbuhan kinerja didukung Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) yang merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki Bank secara terus menerus untuk dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam bersaing khususnya terhadap Bank Pembangunan Daerah.

Bank terus melakukan inovasi produk dan jasa perbankan digital yang lebih beragam sehingga produk-produknya mudah diakses dan dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya di regional Jawa Timur.

Guna memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Bank mempunyai tugas untuk terus berupaya berperan serta mengembangkan UMKM dan berkontribusi pada proyek-proyek strategis pemerintah maupun kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berusaha mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan dan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan.

Adapun keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



BUDAYA PERUSAHAAN

Exellence

Selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Dengan arti lain, senantiasa mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus.

Perilaku utama:

Fast & Simplicity

Senantiasa tanggap dan sigap dalam dinamika perubahan dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah digunakan oleh *customer*. Panduan Perilaku:

- Senantiasa berinisiatif secara konsisten untuk menawarkan dan memberikan solusi terbaik dengan cepat, tepat dan mudah.
- Senantiasa memberikan kepastian produk dan layanan yang akurat, aman, nyaman, bernilai tambah dan memenuhi standar tinggi yang melampaui harapan *customer*.
- Senantiasa menyederhanakan masalah yang ada untuk memberikan solusi terbaik, cepat dan tepat bagi *customer*.

Agile & Business Savvy

Bekerja dengan cepat, gesit, cekatan, *responsive* dan proaktif dalam menangkap peluang bisnis, yang diterapkan oleh seluruh insan perusahaan dengan perbaikan berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Senantiasa melihat dan menangkap peluang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
- Senantiasa bekerja dengan cekatan dalam melaksanakan tugas dan pro aktif dalam mendapatkan peluang yang ada.
- Senantiasa fokus dan disiplin mengeksekusi prioritas.
- Senantiasa melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin baik terhadap proses kerja maupun hasil kinerja untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan.
- Senantiasa patriotis dan memiliki mental juara serta berani melakukan terobosan.
- Luwes (tidak kaku) dan memiliki jiwa yang fleksibel sesuai situasi bisnis dan kebutuhan *customer*.

Professional

Melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal.

Perilaku utama:

Execution & Risk Taker

Melaksanakan keputusan manajemen dengan keberanian mengambil risiko yang diperlukan. Panduan Perilaku:

- Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, akurat dan tepat waktu.
- Bekerja secara cerdas, yaitu efisien dan efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Mengelola pekerjaan secara sistematis melalui proses perencanaan, pengorganisasian serta evaluasi dan pemantauan secara berkesinambungan.
- Dalam upaya memberikan hasil yang terbaik, memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan secara cermat sehingga tidak akan merugikan kepentingan perusahaan.
- Percaya diri atas hasil usaha dan peluang yang ada.

Proactive & Accountable

Mengambil inisiatif tinggi dengan melaksanakan pilihan berdasarkan prinsip dan nilai secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Panduan Perilaku:

- Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dan dengan penuh tanggung jawab berusaha mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan.
- Senantiasa memelihara gairah dan semangat yang tinggi dalam bekerja.
- Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan berani bertanggung jawab untuk setiap tindakan dan keputusan yang kita buat.
- Bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya visi dan misi Bank Jatim.

Integrity

Sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Perilaku utama:

Honesty

Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Panduan Perilaku:

- Senantiasa berkata dan bertindak berdasarkan kebenaran, sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi.
- Bertindak jujur, ikhlas, terbuka, rendah hati, sederhana, beretika, menepati janji dan komitmen yang telah disepakati serta bertindak dengan tepat pada situasi yang tepat.
- Memelihara niat yang murni dan penuh kerelaan, bertindak semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Bank Jatim tanpa pamrih, dan tanpa ada maksud tersembunyi.
- Memelihara transparansi dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang relevan secara benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
- Berani mengakui keterbatasan dan kesalahan, serta bersedia untuk melakukan perbaikan.
- Menjadi teladan dalam segala situasi, melayani, menerima kritik, banyak mendengar.
- Mematuhi aturan, kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
- Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku.
- Memegang teguh prinsip dan pendirian yang diyakini benar dan tidak mudah berubah meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.
- Bekerja dengan penuh dedikasi, melindungi kepentingan dan kehormatan pribadi dan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Menghindari peluang yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- Menjadi panutan dan teladan bagi orang lain dengan menjalankan apa yang diucapkan secara konsisten.
- Menggunakan aset perusahaan dengan penuh tanggung Jawab.
- Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun.
- Berani mengemukakan saran, pendapat dan kritik secara objektif dan terbuka.

Trust

Sikap saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan, kejujuran dan iktikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan.

Panduan Perilaku:

- Memperlakukan rekan kerja, pelanggan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan penuh hormat dan santun.
- Menjaga komunikasi yang penuh empati diantara sesama rekan kerja sehingga tercipta saling pengertian dalam hubungan interpersonal kerja.
- Menciptakan dan memelihara iklim lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman.
- Menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sehingga tumbuh suatu kepercayaan yang langgeng. Menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
- Menjalin kerja sama antar individu dan antar unit kerja untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.
- Saling memberikan bantuan dan dukungan yang positif terhadap sesama rekan kerja dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
- Menghormati perbedaan diantara para pegawai dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik awal untuk mencapai sinergi.



Synergy

Kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Perilaku utama:

Respect

Menerapkan sikap saling menghargai, menghormati dan membimbing dengan tulus ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Panduan Perilaku:

- Berbuat kepada orang lain sebagaimana harapan bagaimana diperlakukan orang lain.
- Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain.
- Menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.
- Menghindari perilaku yang merusak diri.
- Menghargai keunikan diri sendiri, mengembangkan diri dan atasi kelemahan.

Collaboration

Bersama menciptakan nilai tambah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Panduan Perilaku:

- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan atau Kesepakatan.
- Sangat suka berdiskusi dan menjaga efektivitasnya.
- Rasa memiliki yang tinggi.
- Menghargai dan memberikan pengakuan serta memiliki standar etos kerja yang tinggi.

Innovation

Kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus menerus sesuai kebutuhan customer. Perilaku utama:

Eager to Learn

Perilaku pegawai yang senantiasa meningkatkan pengetahuan diri agar perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Panduan Perilaku:

- Rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, ikhlas, konsisten dan visioner.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan dan proaktif untuk mengidentifikasi.
- Senantiasa mengembangkan tingkat kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan sesuai tuntutan profesi.
- Memiliki etos kerja yang baik untuk menjadi pembelajar sejati.
- Memiliki semangat terus belajar sebagai bagian dari kehidupan, dan berproses mengubah tingkah laku menjadi lebih baik.
- Suka bertemu orang baru, berdiskusi, berefleksi dan melakukan perubahan.

Creativity

Senantiasa menciptakan sesuatu yang baru dan mengembangkan ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Panduan Perilaku:

- Inovatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja melampaui ekspektasi.
- Kreatif, inovatif, proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan solusi terbaik.
- Selalu fokus untuk memberikan layanan dengan nilai tambah spesifik yang dibutuhkan pelanggan.
- Selalu inovatif dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Bersikap empatik terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan dan cepat tanggap untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk setiap keluhan nasabah.
- Teguh dalam pendirian dan intuitif.
- Fleksibel, elaboratif, imajinatif, inisiatif, percaya diri.
- Minat yang luas dan tidak pernah bosan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Bank Jatim melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 15 Tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026675. AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Maksud dan Tujuan Bank adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan, khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kegiatan Usaha Utama

Untuk mencapai maksud dan tujuan Bank Jatim, Perseroan melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga;
- j. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.



Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama bank, Bank Jatim juga melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Produk dan Jasa

Kegiatan usaha Bank Jatim meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan konvensional dan syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

Produk Simpanan

Rekening Giro Rupiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Rupiah.

Rekening Giro Valas

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*) dengan mata uang Valas (USD).

Deposito Rupiah

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito Valas

Deposito valas hanya menerima dana dalam bentuk mata uang asing, seperti USD sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang ditawarkan oleh deposito valas umumnya lebih rendah daripada deposito rupiah.

Tabungan Simpeda

Simpeda adalah Simpanan Pembangunan Daerah yang sudah *online* di seluruh Cabang Bank Jatim, tabungan yang bunganya dihitung harian memberi banyak kemudahan dan manfaat dengan biaya ringan. Nilai total hadiah Rp12,5 miliar Rupiah per tahun yang diundi tiga kali dalam setahun, yaitu dua kali untuk tingkat nasional dan satu kali untuk tingkat regional.

Tabungan Siklus

Dengan tabungan ini Bank Jatim ingin turut serta menumbuhkan kembangkan tradisi menabung sebagai wujud awal menuju keluarga sejahtera. Tabungan ini disediakan bagi nasabah yang tidak menginginkan hadiah namun mengharapkan bunga yang kompetitif.

Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SiUMI)

Untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif khususnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bank Jatim meluncurkan Program SiUMI (Siklus Mikro Kecil). Program ini merupakan *bundling* dari Tabungan SiUMI dan Kredit SiUMI.

Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)

Sejalan dengan visi Pemerintah Pusat menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program JARING (Jangkau, Sinergi dan *Guideline*) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada dunia kemaritiman. Sejalan dengan peran Bank Jatim dalam mendukung program pemerintah, maka diperlukan pengembangan produk yang ada untuk merealisasikan terwujudnya simpanan (tabungan) bagi para pelaku dunia kemaritiman khususnya nelayan.

Tabungan Siklus Prioritas

Tabungan Siklus Prioritas ditujukan bagi nasabah Jatim Prioritas atau bagi nasabah yang memiliki dana minimal Rp250 juta rupiah dengan bunga yang relatif tinggi. Berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan eksklusif bagi pemegang kartu debit Jatim Prioritas antara lain layanan kesehatan, diskon di berbagai *merchant*, majalah Jatim Prioritas, undangan event eksklusif dan lain-lain.

Siklus Valas

Salah satu strategi yang ditempuh Bank Jatim adalah menciptakan Tabungan Siklus Valas dengan mata uang asing yang berlaku (USD dan SGD). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dana pihak ketiga dan/atau *outstanding* dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Siklus Bunga Plus

Program Marketing Tabungan Siklus yang memberikan *benefit* berupa barang (tanpa diundi) dimana Nasabah masih tetap dapat menikmati bunga tabungan diakhir periode *lock up*. Cukup dengan menempatkan dana sebesar nominal tertentu Nasabah bisa langsung memilih barang yang diinginkan tanpa diundi. Untuk jangka waktu penempatan (*lock up/holding period*) dimulai dari 1 sampai dengan 60 bulan (sesuai pilihan nasabah).

Tabungan Haji

Tabungan Haji Bank Jatim adalah salah satu jenis produk tabungan Bank Jatim yang merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima.

TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.

Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Tabungan khusus bagi Pelajar/ Siswa Sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA dengan nama Simpanan Pelajar (SIMPEL). Dengan setoran awal yang murah dan setoran selanjutnya yang ringan, SIMPEL dikemas untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. SIMPEL merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong budaya menabung sejak dini.

Simpanan Laku Pandai (Sipandai)

Simpanan Laku Pandai merupakan produk tabungan Bank Jatim yang memungkinkan nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke Bank, cukup melalui agen SiPandai Bank Jatim. Sehingga, memudahkan masyarakat dalam berhubungan dengan Bank untuk memperoleh Layanan Keuangan.

Tabungan Siklus Pensiun

Tabungan Siklus Pensiun merupakan tabungan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang Rupiah yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun (PT Taspen, PT Asabri, Perusahaan Dana Pensiun dan Lembaga Pensiun lainnya yang sudah bekerjasama dengan Bank Jatim) yang dapat dibuka di seluruh Jaringan Kantor Bank Jatim yaitu Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Kantor Fungsional.

Produk Kredit Konsumer

Kredit Multiguna

Fasilitas kredit sektor konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya, yang dapat digunakan untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan fasilitas Kredit Multiguna bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite Bank Jatim dengan prosedur sesuai ketentuan regulator dan suku bunga di atas cost of fund (COF). Adapun fitur produk kredit multiguna antara lain:

- a. Kredit Multiguna – Pegawai
- b. Kredit Multiguna – Pensiunan
- c. Kredit Multiguna – Pra Pensiun Pegawai
- d. Kredit Multiguna – Pra Pensiun THT
- e. Kredit Multiguna – Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
- f. Kredit Multiguna – Pensiun Janda/Duda
- g. Kredit Multiguna – Pendidikan
- h. Kredit Multiguna – Tunjangan Profesi Pegawai/Tunjangan Kinerja/Remunerasi
- i. Kredit Multiguna – Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
- j. Kredit Multiguna – Pensiunan Pegawai Bank Jatim

Kredit Pegawai & Personal Loan Car Allowance Program

Kredit Pegawai

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai Bank untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Personal Loan Car Allowance Program (CAP)

Fasilitas kredit yang penggunaannya untuk pengadaan kendaraan dinas bagi pegawai Bank dengan jabatan tertentu, diberikan sesuai dengan ketentuan *Car Allowance Program* Bank.

Kredit Kendaraan Bermotor

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas yang digunakan baik untuk tujuan konsumtif maupun menunjang operasional usaha ataupun *refinancing*.

Cash Collateral Credit

Cash Collateral Credit (CCC) adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito/Giro/Tabungan Bank.

Kredit Jaminan Emas

Kredit Jaminan Emas (KJE) adalah kredit yang dijamin dengan agunan tunai berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas dan koin emas atau dalam bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai agunan.

Kredit Properti

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur atau debitur untuk pembelian atau pemilikan properti termasuk kredit konsumsi beragun properti (Rumah Tapak/Rumah Susun/Apartemen/Rumah Toko/Rumah Kantor) baik pembelian baru dan bekas dari pengembang ataupun non pengembang. Fasilitas Kredit Properti antara lain:

- a. Pembelian atau pemilikan properti.
- b. Renovasi ataupun pembangunan properti di atas tanah sendiri.
- c. Untuk konsumsi lainnya, merupakan fasilitas kredit dana tunai untuk keperluan konsumtif lainnya seperti pembelian kendaraan, biaya pendidikan, dan lainnya.
- d. *Take Over, Take Over plus Top Up*.
- e. Pembelian atau pemilikan properti lelang Bank, merupakan fasilitas kredit untuk pembelian atau pemilikan properti hasil lelang di Bank.
- f. Pembelian atau pemilikan properti keluarga, fasilitas kredit yang mengakomodir pembelian atau pemilikan properti yang dipersembahkan untuk keluarga tercinta.

Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi KKS

Kredit Kontraktor Pola Transaksional

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola transaksional adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termyn Proyek yang bersangkutan.

Kredit Kontraktor Pola Standby Loan

Kredit Modal Kerja Kontraktor pola Standby Loan adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per proyek atau kontrak kerja dan pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termyn Proyek yang bersangkutan.

Kredit Modal Kerja Umum Angsuran

Kredit Modal Kerja Angsuran fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana pencairannya dapat dilakukan secara sekaligus dan bersifat *non revolving* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Kredit Modal Kerja Rekening Koran

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang dan modal jasa guna rehabilitasi, pendirian usaha baru, yang pelunasan dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Kredit Konstruksi Properti

Kredit Modal Kerja Konstruksi Properti adalah fasilitas kredit modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/Developer) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti.

Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih Bank/lembaga keuangan Non-Bank kepada debitur, dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, diperjanjikan dalam dokumentasi, dan diadministrasikan oleh lembaga yang disebut agen.

Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pinjaman yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Kredit Pembiayaan Piutang

Kredit Pembayaran Piutang adalah kredit yang diberikan kepada pemilik piutang/tagihan yang pengembaliannya jelas dan dapat dipastikan. Fasilitas Kredit Pembayaran Piutang diberikan dengan tujuan untuk membantu nasabah/calon nasabah yang membutuhkan modal kerja karena piutang/tagihannya masih belum waktunya untuk ditagihkan/dicairkan. Keunggulan: Proses cepat.

Kredit Pemerintah Daerah

Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemda di Wilayah Jawa Timur maupun diluar Wilayah Jawa Timur yang berupa kredit investasi yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan/atau kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan *cash flow* daerah dalam anggaran tahun yang sama dengan *plafond* tertentu yang dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Keunggulan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Kredit Trade Finance

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang ekspor dan impor dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat.

Kredit Mikro, Ritel dan Program

Kredit Jatim Ritel

Kredit Jatim Ritel merupakan salah satu skim kredit produktif yang dimiliki Bank Jatim untuk menunjang calon debitur dalam mendapatkan bantuan permodalan khususnya debitur UMKM dengan *plafond* kredit maksimal Rp1 Miliar.

Kredit Mikro Laguna

Adalah kredit yang diberikan kepada usaha mikro guna pengembangan usahanya sehingga dapat meningkat menjadi usaha kecil dan menengah secara langsung kepada perorangan atau kelompok usaha.



Kredit Linkage BPR

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Jatim kepada pengusaha mikro dan kecil melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perbamida dan Perbarindo, baik yang sudah menjadi anggota APEX maupun belum menjadi anggota APEX.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* kredit sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan dan kriteria calon debitur penerima KUR sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA)

Adalah kredit modal kerja yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk disalurkan kepada anggotanya. Selain itu Bank Jatim juga bekerjasama dengan PTPN X dan PTPN XI Terkait penyaluran kredit KKPA Sektor Tebu.

Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

Adalah kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang diberikan Bank kepada Koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder untuk memenuhi kebutuhan Koperasi sebagai lembaga.

KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)

Adalah kredit/pembiayaan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian produksi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil.

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah. Yang dimaksud Pelaku Usaha Pembibitan Sapi adalah perusahaan peternakan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan Usaha Pembibitan Sapi.

Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE)

Adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Energi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan dan perikanan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

Kredit Jatim Mikro

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi disektor produktif yang diberikan untuk pembinaan usaha kepada pengusaha mikro dan kecil.

Kredit Linkage Fintech

Adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada suatu kelompok Ibu-Ibu pengusaha mikro untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktifitas usaha.

Kredit SiUMI

Adalah kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Bank untuk pelaku usaha produktif skala mikro dan kecil yang memiliki Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan kartu ATM tabungan SIKLUS yang didalamnya terdapat data-data calon debitur.

Kredit BPR RC (Rekening Koran)

Adalah fasilitas kredit kepada BPR yang diberikan untuk keperluan modal kerja dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui rekening korannya hingga *plafond* tertentu dengan menggunakan cek/bilyet giro.

Produk Tresuri

Devisa Umum (Telegraphic Transfer)

Telegraphic Transfer merupakan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk devisa umum (*non tunai*). Bank Jatim melayani transaksi *Telegraphic Transfer* untuk mata uang asing USD, GBP, SGD, JPY, HKD, EUR, CNY dan AUD. Jenis instrumen transaksi *Telegraphic Transfer* yang menjadi layanan Bank Jatim di antaranya:

Fx Today (Foreign Exchange Today)

Transaksi *FX Today* yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada tanggal transaksi.

Fx Tom (Foreign Exchange Tomorrow)

Transaksi FX Tom yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Fx Spot (Foreign Exchange Spot)

Transaksi FX Spot yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Fx Forward (Foreign Exchange Forward)

Transaksi FX Forward yaitu transaksi jual atau beli mata uang asing dengan waktu penyerahan dana dilakukan pada lebih dari 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.

Bank Notes

Bank Notes adalah layanan transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas. Mata uang asing yang dapat ditransaksikan yaitu:

- USD
- GBP
- EUR
- SGD
- JPY
- HKD
- CNY
- SAR
- AUD
- MYR

Deposit On Call

Deposit on Call adalah simpanan dana nasabah kepada Bank dengan nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Produk Trade Finance

Ekspor

Bank Jatim dapat memberikan pembiayaan atas transaksi ekspor nasabah baik dari sebelum pengiriman barang (*Pre Shipment Financing*) sampai dengan setelah pengiriman barang (*Post Shipment Financing*).

Bank to Customer Transaction Ekspor

1. *Documentary Collection*
 - a. D/A: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan

pembayarannya kepada bank Importir/Pembeli melalui akseptasi sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- b. D/P: yaitu layanan meneruskan dokumen atas perintah dari Eksportir/Penjual kepada bank untuk ditagihkan pembayarannya kepada bank Importir / Pembeli secara atas unjuk.
2. *Letter of Credit (LC) Advising*
Penerusan penerimaan LC Master atau Amendment LC kepada penerima LC Eksportir/penjual.
3. *Transferable Letter of Credit*
Melakukan transfer atas LC yang sifatnya *Transferable* atas permohonan Eksportir nasabah Bank Jatim sebagai *Beneficiary* pertama.
4. Pengambilalihan Wesel Ekspor (Diskonto).
Layanan pembiayaan *post shipment financing* yang diberikan Bank Jatim atas dasar dokumen ekspor yang dipresentasikan dan telah memenuhi ketentuan LC (*Complete and Comply with*).
5. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Ekspor

1. *Forfaiting*
Yaitu layanan transaksi penjualan piutang ekspor antara Bank Jatim dengan Bank Lain.

Impor

Bank Jatim memberikan solusi atas transaksi impor kepada nasabah agar dapat melakukan pembelian barang dengan lebih aman, karena pembayaran akan dilakukan setelah barang tiba dipelabuhan atau dokumen penagihan atas pembelian barang tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Bank to Customer Transaction Impor

1. *Letter of Credit Issuing*
Penerbitan LC Master atau Amendment LC untuk kepentingan Importir/Pembeli kepada *Advising Bank*/Bank Eksportir.
2. *Shipping Guarantee*
Layanan impor dalam percepatan proses pengeluaran barang/*cargo release* di pelabuhan sehingga barang yang diimpor dapat segera digunakan, berdasarkan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Jatim. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi Importir yaitu mengurangi atau menekan beban biaya sewa gudang/*demurrage* yang harus ditanggung.



3. Layanan *Assistance* dan *Advisory* kepada nasabah atas transaksi perdagangan internasional yang akan dijalankan agar aman bagi nasabah dan Bank Jatim.

Bank to Bank Transaction Impor

1. UPAS *Financing*

Yaitu layanan transaksi pembelian Hutang impor oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dimana Bank Jatim sebagai *Funding Bank* atas transaksi *Usance Payable at Sight*.

Transaksi Domestik (SKBDN)

Dalam transaksi perdagangan barang dan jasa domestik tentunya juga membutuhkan kepastian penerimaan pembayaran bahkan ataupun percepatan penerimaan pembayaran. Seluruh solusi ekspor dan impor diatas dapat diterapkan untuk transaksi domestik (dalam negeri).

Term Loan Facility (TLF)

Term Loan Facility (TLF) adalah fasilitas pinjaman bersifat committed yang diberikan kepada bank umum dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk upaya diversifikasi produk sekaligus untuk menambah potensi pendapatan bunga Bank Jatim.

Jasa Bisnis

Referensi Bank

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang/perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

Kliring Nasional

Transfer dana kredit antar Bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*) yang dapat digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana berbasis RTGS yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/*online* dan penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

Inkaso Rupiah

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Inkaso Valas

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring) dengan menggunakan mata uang Valas (USD).

Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

BPD Net Online

Fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

Jatim Electronic Transfer System (JETS)

Dengan adanya Jatim Elektronik Transfer Sistem (JETS) maka semuanya akan terhubung secara *online*, misalnya transfer antar BPR atau ke bank umum.

JConnect Invest

JConnect Invest adalah *platform* investasi surat berharga *online* berbasis *mobile* yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore dan terintegrasi dengan mitra distribusi dan Kementerian Keuangan. Aplikasi JConnect Invest terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menyediakan produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan penawaran di pasar perdana. Produk yang bisa dipesan melalui aplikasi Jconnect Invest, antara lain:

1. ORI (Obligasi Ritel Indonesia)

Salah satu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana dengan *volume* minimum yang telah ditentukan.



2. SBR (Saving Bond Ritel)

Salah satu jenis Surat Utang Negara (SUN) atau SBN yang khusus ditawarkan untuk individu atau perseorangan yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

3. SR (Sukuk Ritel)

Produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

4. ST (Sukuk Tabungan)

Produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai syariah yang sifatnya mirip dengan tabungan atau deposito bank, karena tidak dapat diperjualbelikan kembali di pasar sekunder.

Transaksi Remittance

Merupakan layanan dari Bank Jatim untuk pengiriman dana dalam mata uang asing di dalam dan luar negeri. Layanan ini memudahkan Nasabah untuk bertransaksi dengan rekan bisnis dan keluarga di luar negeri. Transaksi *Remittance* memberikan kemudahan dan kelancaran transaksi yang dapat dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim di seluruh Jawa Timur, Jakarta dan Batam. Transaksi ini juga melayani transfer valas dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD, JPY, HKD, AUD, dan CNY.

Jasa Kelembagaan

Layanan Pajak

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan *online* telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya. Jenis layanan pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Daerah Lain (PDL)
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pembayaran Tagihan

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan pembayaran ini dapat melalui Teller Bank Jatim maupun melalui seluruh *E-Channel* Bank Jatim dan sudah *online* diseluruh Cabang Bank Jatim. Berbagai jenis pembayaran antara lain:

- Pembayaran Tagihan Air/PDAM
- Pembayaran Tagihan Listrik/PLN
- Pembayaran Tagihan Telepon
- Pembayaran Biaya Pendidikan
- Pembayaran Tagihan Internet
- Pembayaran Tagihan TV Berlangganan
- Pembayaran Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS)
- Pembayaran Tagihan *Multi Finance*
- Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
- Pembayaran Tiket Pesawat/Tiket Kereta Api
- Pembayaran Transaksi *E-Commerce*

Payroll Gaji

Merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Sistem pembayaran gaji ini dengan memindahkan dari rekening penampungan atas nama lembaga atau perusahaan ke rekening tabungan pegawai penerima gaji.

Pelayanan Transaksi Perdagangan

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri. Bank Jatim dapat melayani kebutuhan, baik dari sisi pemohon maupun penerima SKBDN.

Letter of Credit (L/C)

Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima *instrument* tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

Transfer Valas (Remittance)

Bank Jatim menyediakan Jasa transfer Valuta Asing untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. Transfer Valuta Asing merupakan perintah bayar tak bersyarat yang dikirim dari Bank pengirim di dalam atau di luar negeri kepada Bank penerima



dalam bentuk Valuta Asing atas permintaan dan untuk kepentingan pengamanat dengan menggunakan sarana yang *authenticated* (SWIFT, *Tested Telex* dan *Tested Facsimile*).

Penerimaan Pajak Ekspor/Impor (Edi System)

EDI System akan membantu dalam hal pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan dan ditransmit secara elektronik, sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*.

Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Umum

Pembiayaan Investasi adalah fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu siklus usaha. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus produksi, seperti untuk pengadaan bahan baku atau untuk membiayai kekurangan biaya operasional lainnya.

KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:

- Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak.
- Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun.
- Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor.
- Pembelian bahan bangunan dan bahan pendukung lainnya dalam rangka renovasi/perbaikan rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko.
- Pembelian tanah berikut bahan bangunan untuk dibangun sebagai rumah tapak, rumah susun, rumah kantor atau rumah toko (*inden*).
- Take over* dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan penambahan dan/atau tanpa penambahan (*Top Up*).
- Top up* untuk renovasi properti atau kebutuhan konsumsi lainnya bagi nasabah eksisting.

KPR Sejahtera

Pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank dengan menggunakan akad *murabahah*.

Multiguna Syariah

Pemberian pembiayaan di sektor konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*. Fitur produk pembiayaan multiguna antara lain:

- Pembiayaan Multiguna - Pegawai
- Pembiayaan Multiguna - Pensiunan
- Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun Pegawai
- Pembiayaan Multiguna - Pra Pensiun THT
- Pembiayaan Multiguna - Tenaga Kerja Kontrak, P3K, Tenaga Honorer dan Perangkat Desa
- Pembiayaan Multiguna - Pensiun Janda/Duda
- Pembiayaan Multiguna - Pendidikan
- Pembiayaan Multiguna - Tunjangan Profesi Pegawai/ Tunjangan Kinerja/Remunerasi
- Pembiayaan Multiguna - Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Anggota Komite BankJatim
- Pembiayaan Multiguna - Pensiunan Pegawai Bank Jatim

Emas iB Barokah

Pembiayaan kepada nasabah dengan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang Nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*).

Kepemilikan Logam Emas

Pembiayaan yang diberikan untuk kepemilikan emas dengan prinsip *murabahah*.

Linkage Program

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)/Pembiayaan Koperasi (PKOP) adalah Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dan/atau anggotanya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan untuk pola *channeling* menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan Linkage Fintech

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui perusahaan *fintech* berdasarkan prinsip syariah.

Umroh iB Maqbullah

Pembiayaan yang diberikan untuk Pembiayaan *Multijasa* Umroh dengan prinsip *Ijarah*.

Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah

Fasilitas pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (Pengembang/*Developer*) yang sedang atau akan mengerjakan proyek properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah

Fasilitas pembiayaan untuk membeli tanah perumahan sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Pembiayaan Konstruksi Properti berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan Kontraktor iB Barokah

Jenis dan bentuk pembiayaan:

- a. Pembiayaan transaksional adalah fasilitas pembiayaan modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu proyek berdasarkan Kontrak Kerja dengan *Plafond* tertentu yang pelunasan pembiayaan bersumber dari pembayaran termin Proyek yang bersangkutan berdasarkan prinsip syariah.
- b. *Line Facility* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada kontraktor dapat dicairkan secara *revolving* per *project* apabila nasabah/calon nasabah memperoleh *project* berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran pembiayaannya terutama berasal dari termin *project* yang bersangkutan.

Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat iB Barokah (ITIB)

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh Bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah

Jasa pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari korporat/*seller* (nasabah) kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Mitra Korporasi/*Buyer*) yang dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat/*Seller* (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat/*seller* (nasabah) senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah.

Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan atas suatu obyek pembiayaan dari nasabah baik berupa investasi maupun modal kerja, di mana kondisi ini mengharuskan salah satu peserta sindikasi berperan sebagai *Lead Manager* (*Imamus Syarik*) dalam menangani dan mengelola pembiayaan sindikasi tersebut.

Pembiayaan Pegawai dan Personal

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Non Karir, MLE, Calon Pegawai, Anggota Komite, Pensiunan Pegawai dan *Personal Loan Car Allowance Program* (CAP) yang penggunaannya untuk konsumtif dan untuk keperluan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Garansi

Jasa Penjaminan yang diberikan kepada pihak terjamin (nasabah) yang berisi kewajiban Bank untuk membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila nasabah cidera janji berdasarkan akad kafalah.

Pembiayaan Kawasan Industri Halal

Pembiayaan kawasan industri halal merupakan pembiayaan dalam rangka pembelian aset gudang baru atau pabrik baru bagi nasabah perorangan dan/atau UMKM yang berada di Kawasan Industri Halal (KIH).



Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dan dilaksanakan sesuai dengan akad syariah.

Produk Dana dan Jasa Syariah

Giro iB Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, Giro iB Barokah ditatausahakan oleh Bank Jatim Syariah dalam suatu rekening yang lazim disebut Rekening Koran.

Tabungan Sempel iB

"Simpanan Pelajar" atau SIMPEL merupakan produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang dipertukkan bagi siswa dengan usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia. Persyaratan pembukaan rekening yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, sebagai upaya mengedukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Adapun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

Tabunganku iB

Produk Simpanan dengan prinsip *Wadiah* yang diterbitkan secara bersama-sama oleh perbankan di Indonesia dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Umroh iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah umroh dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan SiPandai iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya khususnya di Jawa Timur.

Tabungan Santri

Produk simpanan dengan prinsip *Wadi'ah* yang ditujukan kepada santri/pengurus di lingkungan pondok pesantren yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu - waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Barokah Sejahtera

Program yang digabungkan dengan produk Tabungan Barokah dengan *benefit* barang sebagai bentuk *reward* dan/atau *souvenir* atas pembukaan rekening Tabungan Barokah Sejahtera dengan tetap mendapatkan bagi hasil tabungan di akhir periode.

Tabungan Haji iB Amanah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Rencana iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dananya dalam rangka mewujudkan segala rencana masa depan dan penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Pensiun iB Barokah

Produk simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai sarana penerimaan untuk pembayaran pensiunan lembaga penyalur dana pensiun.

Deposito Barokah

Produk Simpanan dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Penyimpan dengan Bank berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Virtual Account

Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah.

Payment Point

Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun *non* tunai, antara lain untuk pembayaran tagihan telepon, listrik, pendidikan.

E-Channel (SMS Banking, J-Connect Mobile dan J-Connect Internet Banking)

Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler atau jaringan internet.

Wakaf iB Barokah

Layanan wakaf yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang ingin berwakaf melalui project yang telah disediakan oleh mitra nashir Bank Jatim Syariah. Layanan tersebut dapat diakses oleh nasabah melalui aplikasi android maupun iOS dimana pembayaran wakaf dilakukan melalui *virtual account* yang terhubung ke rekening Giro iB Barokah mitra nashir Bank Jatim Syariah.

E-Channel & Jasa Lainnya

SMS Banking (3366)

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-Channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *plain-text mode* maupun *mobile application mode*.

JConnect Internet Banking

Merupakan salah satu layanan *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui media internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan nyaman dan aman karena menggunakan teknologi Token PIN yang dinamis (selalu berganti untuk setiap transaksi).

JConnect Mobile Banking

Merupakan salah satu inovasi produk dan layanan Bank Jatim berbasis *e-channel*, yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada nasabahnya melalui *mobile phone* dengan menggunakan *mobile application* pada platform android dan iOS yang menggunakan paket data internet dalam bertransaksi.

Jconnect e-KMG

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit multiguna / konsumtif secara online untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan yang *payroll*-nya ada di Bank Jatim. Pengajuan kredit multiguna dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

JConnect e-Loan

Merupakan salah satu inovasi Layanan pengajuan kredit produktif secara online untuk masyarakat umum. Pengajuan kredit produktif dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis android maupun iOS.

Layanan Laku Pandai (SiPandai Bank Jatim)

Merupakan Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked people*). Bank Jatim bekerjasama dengan para agen SiPandai untuk melayani nasabah/masyarakat di daerah yang tidak terjangkau kantor layanan bank untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, setor tunai, dan lainnya. Agen SiPandai menggunakan aplikasi berbasis android untuk melayani nasabah/masyarakat tersebut.

Info Bank Jatim (14044)

Merupakan *Call Center* Bank Jatim dengan nomor/shortcode 14044. Dapat menggunakan sarana telepon rumah atau dengan menggunakan *handphone*, bias memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun layanan informasi lainnya.



Kartu ATM Debit Bank Jatim

Kartu ATM Bank Jatim dapat digunakan untuk transaksi penarikan tunai, pembayaran telepon, air, PBB, listrik, pendaftaran SMS Banking dan transfer antar rekening Bank Jatim, antar rekening sesama anggota ATM Bersama dan ATM Prima, serta cek saldo dan dapat digunakan untuk berbelanja di *merchant-merchant* yang berlogo GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

Kartu Bank Jatim Flazz (Co-Branding)

Uang Elektronik *Card Based/Chip Based* multifungsi yang menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan nyaman. Hasil kerjasama *Co-Branding* Bank Jatim dengan BCA.

Safe Deposit Box

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta/Surat Berharga dengan tipe ukuran kecil, sedang, dan besar.

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan. KPE juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Jatim yang memiliki layanan yang sama dengan nasabah Bank Jatim.

Virtual Account

Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuka ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor dan Nama Rekening *Virtual*.

E-Samsat Jatim

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) wilayah propinsi Jawa Timur melalui *e-Channel* Bank Jatim yaitu: ATM, Teller, PPOB, Agen SiPANDAI, SAMSAT OPOP, SAMSAT KAMPUS, JConnect Mobile dan JConnect Internet Banking, serta di *channel collecting agent* lainnya seperti *marketplace Tokopedia*, aplikasi online transportation GoJEK, serta retail modern *channel* Indomaret.

Samsat Digital Nasional (Signal)

Layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) seluruh wilayah Indonesia melalui *e-Channel* Bank Jatim dan bank lainnya yang tergabung dalam SIGNAL yaitu: ATM, Teller, *Mobile Banking* dan *Internet Banking* dengan terlebih dahulu mengakses aplikasi SIGNAL terlebih dahulu yang berbasis android maupun iOS.

Jatim Code QRIS

Aplikasi JConnect Mobile dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembelian/pembayaran dengan melakukan *scanning QRIS* yang terpasang di *merchant-merchant* atau toko yang telah terpasang QRIS, baik Jatim Code QRIS maupun QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) lainnya. Jatim Code QRIS juga dapat di scan oleh aplikasi dari PJSP lainnya juga seperti OVO, Shoope Pay, Dana, Gopay, dan lainnya.

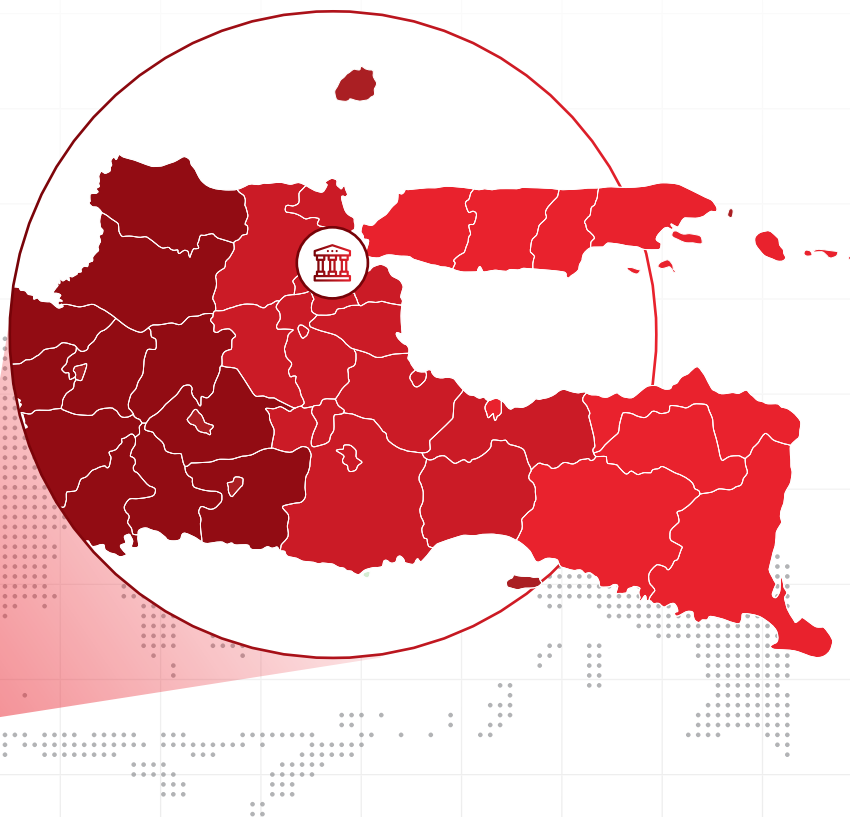
BJTM Connect

Teknologi terdepan yang memudahkan Nasabah dalam setiap transaksi perbankan dengan lokasi strategis, waktu operasional yang panjang dan lebih fleksibel dengan adanya layanan di hari libur.



Wilayah Operasional

Per 31 Desember 2023, Bank Jatim memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.819 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Payment Point, Kas Mobil/Counter dan ATM/CRM.



Tabel Kantor Bank Jatim per Wilayah Tahun 2023

Jenis Kantor	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Surabaya	4	24	28	15	2	1	3	1	28	2	1	103	5	12	2
Banyuwangi	1	6	11	4	2	-	1	-	7	-	-	28	1	4	-
Jember	1	6	6	5	-	1	-	-	7	-	1	24	1	2	1
Malang	1	5	9	14	2	1	-	1	6	1	1	30	3	2	2
Madiun	1	5	9	7	1	1	-	-	6	-	1	34	1	3	1
Kediri	1	7	9	9	2	1	-	1	8	1	1	30	2	1	2
Pamekasan	1	2	2	3	-	-	-	-	3	-	-	14	-	1	-
Bojonegoro	1	4	7	9	-	-	-	-	5	-	-	27	-	3	-
Lumajang	1	4	6	2	1	-	-	-	5	-	-	22	-	3	-
Ngawi	1	8	4	3	2	-	-	-	9	-	-	20	-	1	-
Jombang	1	3	7	7	1	-	1	-	4	-	-	18	1	3	-
Kraksaan	1	2	5	2	1	-	-	-	3	-	-	10	-	1	-
Probolinggo	1	3	3	2	2	-	1	-	4	-	-	20	1	1	-
Blitar	1	5	7	13	1	-	1	1	6	-	-	21	2	3	-
Tulungagung	1	4	5	5	1	-	-	-	5	-	-	16	-	5	-
Tuban	1	5	4	3	-	-	-	-	6	-	-	24	-	1	-
Mojokerto	1	3	4	4	1	-	1	-	4	-	-	24	1	1	-
Sumenep	1	2	4	4	-	-	-	-	3	-	-	20	-	1	-

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun terakhir

Jenis Kantor	2023	2022	2021	2020	2019
Kantor Pusat (KP)	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Konvensional (KC)	41	41	41	41	41
Kantor Cabang Syariah (KCS)	7	7	7	7	7
Kantor Cabang Pembantu Konvensional (KCP)	163	162	182	162	162
Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)	10	10	10	10	10
Kantor Fungsional (KK)	212	212	211	209	209
Kantor Fungsional Syariah (KKS)	4	3	2	-	-
Kantor Layanan Syariah (KLS)	196	195	195	195	191
Payment Point (PP)	191	196	248	247	249
Payment Point Syariah (PPS)	8	8	8	9	10
Kas mobil (KM)	32	36	97	92	92
Kas Mobil Syariah (KMS)	7	7	7	6	6
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*	828	815	780	753	742
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Syariah	26	26	25	24	23
Cash Recycle Machine (CRM)	84	58	51	25	-
Cash Recycle Machine (CRM) Syariah	10	7	7	2	-
Cash Deposit Machine (CDM)	-	-	-	-	2
Total	1.820	1.784	1.852	1.783	1.745

*Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Jatim bergabung dengan 81.569 terminal jaringan ATM BERSAMA, 101.313 terminal ATM PRIMA, 695.971 Electronic Data Capture

Jenis Kantor	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Sampang	1	1	4	2	1	-	1	-	2	-	-	13	1	1	-
Bangkalan	1	3	4	6	-	-	-	-	4	-	-	11	-	3	-
Pasuruan	1	7	5	7	1	-	-	-	8	-	-	30	-	1	-
Nganjuk	1	4	5	14	1	-	-	-	5	-	-	19	-	2	-
Trenggalek	1	3	6	3	-	-	-	-	4	-	-	19	-	1	-
Ponorogo	1	4	6	4	1	-	-	-	5	-	-	21	-	2	-
Pacitan	1	3	2	3	1	-	-	-	4	-	-	20	-	4	-
Gresik	1	5	6	3	1	1	-	-	6	2	1	22	3	1	1
Sidoarjo	1	8	11	6	1	1	-	-	9	2	1	43	3	1	1
Lamongan	1	5	5	7	2	-	1	-	6	-	-	27	1	1	-
Situbondo	1	2	4	4	1	-	-	-	3	-	-	20	-	4	-
Bondowoso	1	3	3	2	1	-	-	-	4	-	-	17	-	4	-
Magetan	1	4	5	2	-	-	-	-	5	-	-	22	-	2	-
Kangean	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	1	-
Jakarta	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-
Batu	1	1	4	1	1	-	-	-	2	-	-	11	-	2	-
Bawean	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	1	-
Pare	1	2	2	-	-	-	-	-	3	-	-	13	-	2	-



Jenis Kantor	KC	KCP	KK	PP	KM	KCS	KCPS	KKS	KLS	PPS	KMS	ATM	ATMS	CRM	CRMS
Kepanjen	1	4	8	1	1	-	-	-	5	-	-	14	-	1	-
Batam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Grand Total	41	163	212	191	32	7	10	4	196	8	7	828	26	84	10

Per 31 Desember 2023, Bank Jatim memiliki 7.128 Agen Jatim yang tersebar di seluruh Jawa Timur yang terdiri dari Agen Badan Hukum dan Agen Perorangan.

Tabel Jaringan Agen Jatim Konvensional Tahun selama 3 tahun terakhir

Nama Cabang	2023	2022	2021
Cabang Bangkalan	166	90	13
Cabang Banyuwangi	224	31	23
Cabang Batu	57	24	18
Cabang Bawean	55	17	7
Cabang Blitar	289	143	19
Cabang Bojonegoro	166	55	24
Cabang Bondowoso	254	160	33
Cabang Dr. Soetomo	201	25	4
Cabang Gresik	157	73	27
Cabang HR Muhammad	195	32	7
Cabang Jember	195	61	10
Cabang Jombang	103	46	20
Cabang Kangean	42	6	2
Cabang Kediri	362	97	17
Cabang Kepanjen	98	31	13
Cabang Kraksaan	111	70	21
Cabang Lamongan	228	99	20
Cabang Lumajang	118	69	38
Cabang Madiun	352	159	37
Cabang Magetan	243	95	15
Cabang Malang	133	49	33
Cabang Mojokerto	132	101	22
Cabang Nganjuk	195	90	32
Cabang Ngawi	447	301	216
Cabang Pacitan	181	98	27
Cabang Pamekasan	46	40	16
Cabang Pare	73	22	8
Cabang Pasuruan	165	111	47
Cabang Perak	165	51	23
Cabang Ponorogo	192	38	15
Cabang Probolinggo	123	29	12
Cabang Sampang	86	34	24
Cabang Sidoarjo	292	112	12
Cabang Situbondo	99	19	11

Nama Cabang	2023	2022	2021
Cabang Sumenep	58	42	12
Cabang Trenggalek	183	41	15
Cabang Tuban	379	141	16
Cabang Tulungagung	254	118	35
Cabang Utama	128	92	34
Grand Total	6.948	2912	978

Tabel Jaringan Agen Jatim Syariah Tahun 2023

Cabang Syariah	Total Agen
Cabang Syariah Surabaya	44
Cabang Syariah Kediri	24
Cabang Syariah Madiun	10
Cabang Syariah Jember	6
Cabang Syariah Malang	39
Cabang Syariah Sidoarjo	12
Cabang Syariah Gresik	51
Total	186

Daftar Keanggotaan Asosiasi

Sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Jatim bergabung dan aktif di berbagai asosiasi atau lembaga yang relevan dengan bisnis utama Bank. Dengan demikian, Bank bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2023, Bank Jatim bergabung di asosiasi/perhimpunan/lembaga nasional berikut:

Nama Asosiasi	Tahun Bergabung	Status Keanggotaan
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)	1993	Anggota
Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Se-Indonesia (FKDK-BPDSI)	2002	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	2012	Anggota
FCSR Social Ministry	2016	Anggota
Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FK-LJKD)	2016	Anggota
Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2019	Anggota

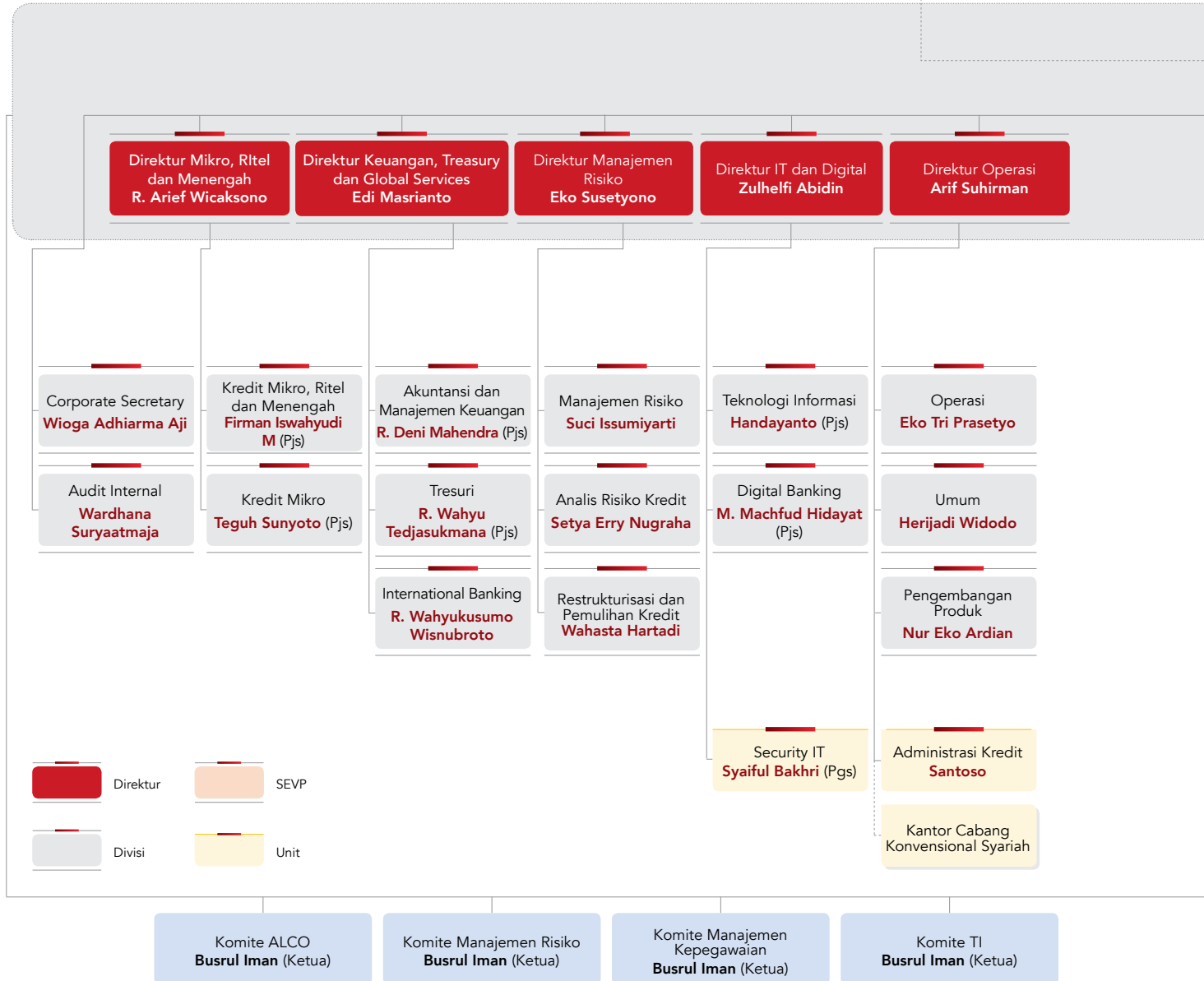
Keanggotaan Bank Jatim pada organisasi/asosiasi mempunyai arti strategis. Perseroan menyelaraskan perkembangan dunia perbankan terkini serta turut berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi/ asosiasi. Bank Jatim tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin, termasuk tidak berkontribusi pada politik maupun politisi.

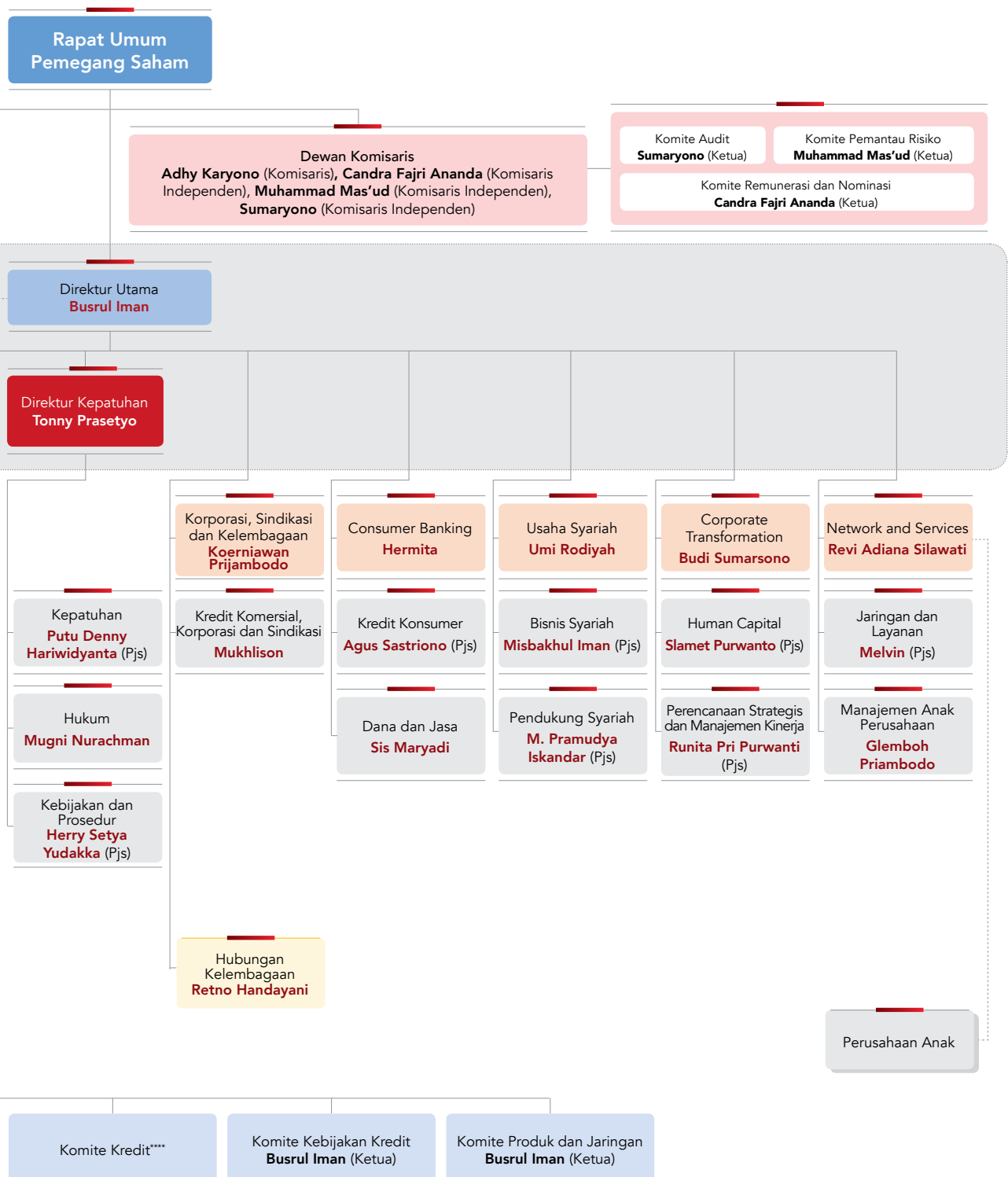


Struktur Organisasi

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, Struktur Organisasi Bank Jatim telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 dan Surat Edaran Direksi No. 062/003/DIR/PRS/SE tanggal 24 Februari 2023, berikut adalah struktur organisasi Bank Jatim per 31 Desember 2023.

Dewan Pengawas Syariah
Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
 (Ketua), **Dr. M. Saad IH, MA**
Dr. dr. Sukadiono, MM (Anggota)***





Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit: Sumaryono (Ketua), **Muhammad Mas'ud** (Anggota), **Kusnadi** (Anggota), dan **Moch. Arifin** (Anggota).
2. Komite Remunerasi dan Nominasi: **Muhammad Mas'ud** (Ketua), **Suprajarto** (Anggota), **Candra Fajri Ananda** (Anggota), **Sumaryono** (Anggota), **Adhy Karyono*** (Anggota) dan **Slamet Purwanto**** (Anggota).
3. Komite Pemantau Risiko: **Sumaryono** (Ketua), **Muhammad Mas'ud** (Anggota) dan **Sulam Andjar Rochim** (Anggota).

* Masa jabatan berlaku efektif sejak ditetapkan lulus UKK OJK pada tanggal 24 November 2023

** Masa jabatan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Belum ada pengumuman kelulusan *fit and proper test*

**** Nama Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.



Profil Direksi

Busrul Iman

Direktur Utama



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Surabaya pada tahun 1964, usia 59 tahun per Desember 2023.



Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari STIE Indonesia (1986).
- Master bidang Manajemen Strategi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2005).
- Profesi Akuntan dari Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (2007).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2015).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2023).
- Sertifikasi *Training Executive Sharia Banking* oleh Muamalat Institute (2023).

Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Meulaboh, Kantor Wilayah Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1995-1998).
- Kepala Cabang Rantau Prapat, Kantor Wilayah Medan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1998-2001).
- Kepala Cabang Tuban Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2004).
- Kepala Cabang Banjarnegara, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2004-2007).
- Kepala Cabang Solo, Kantor Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009).
- Kepala Cabang Madiun Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010).
- Kepala Cabang Malang Kawi, Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Palembang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Lampung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bidang Pengendalian Risiko Kredit Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- Kepala Kantor Wilayah Malang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Kepala Kantor Wilayah Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2020).
- Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk pertama kalinya pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 19 Juni 2019. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-191/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019.

Diangkat sebagai Direktur Utama Pada RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Juli 2020. Lulus *Fit and Proper Test* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-44/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020.

Ditunjuk sebagai Pgs Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Sejak diterbitkan Surat Keputusan pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris No. 059/008/DK/KEP/2020.

Periode Jabatan

- 2019 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).
- 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

- Ketua *Asset Liabilities Committee* (ALCO) Bank Jatim
- Ketua Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Ketua *Information Technology Steering Committee* (ITSC) Bank Jatim
- Ketua Komite Kebijakan Perkreditan Bank Jatim
- Ketua Komite Produk Bank Jatim
- Ketua Komite Jaringan Bank Jatim
- Ketua Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Risiko pada Komite Kredit kecuali Credit Line kepada Korporasi (sebagai Kelompok Fungsi Bisnis) Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

2.958.900 lembar saham

Tonny Prasetyo

Direktur Kepatuhan



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Malang pada tahun 1969, usia 54 tahun per Desember 2023.



Domisili : Mojokerto



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Pertanian dari Universitas Darul Ulum, Jombang (1995).
- Master bidang Manajemen dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (2019).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2022).
- *Refreshment* General Banking Level III oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2022).

Pengalaman Kerja

- Pjs Pimpinan Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2012).
- Pimpinan Cabang Situbondo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2013).
- Pimpinan Cabang Blitar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014).
- Pimpinan Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014).
- Pimpinan Bidang Kredit Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pimpinan Bidang Kredit Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015).
- Pimpinan Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016).
- Direktur TI dan Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019 – 2022).
- Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Pgs Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – 2023).
- Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023 – sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur TI dan Operasi untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 19 Juni 2019, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11 Oktober 2019. Kemudian terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur Operasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 7 Desember 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023 diangkat menjadi Direktur Kepatuhan, dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 062/02/DKM/KEP tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Pengganti Sementara dan Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Mei 2023.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Anggota Tidak Tetap *Asset Liabilities Committee* (ALCO) Bank Jatim
- Anggota Tetap *Information Technology Steering Committee* (ITSC) Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Anggota Tidak Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

1.067.400 lembar saham

Edi Masrianto

Direktur Keuangan, Treasury & Global Services



-  **Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia
-  **Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 59 tahun per Desember 2023.
-  **Domisili** : Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Jember (1989).
- Magister bidang Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada (2004).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2009).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2013).
- Sertifikasi Asesor Manajemen Risiko oleh BARA (2014).
- Sertifikasi Dasar Pembiayaan oleh SPPI (2015).
- Sertifikasi Treasury Advance oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2020).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Global Association of Risk Professionals (GARP) (2021).
- Sertifikasi Treasury Dealer oleh BNSP (2022).
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Strategic Risk Management for Banking (SDG) (2023).

Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Pengembangan Produk & Pemasaran Trade Finance - Divisi Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010).
- Kepala Bagian Divisi Treasury (Chief Global Market) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- Wakil Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Kepala Divisi Bisnis Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018).
- Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020).
- Direktur Keuangan dan SDM PT Garam Persero (2020-2021).
- Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko PT Garam Persero (2021-2022).
- Plt. Direktur Utama PT Garam Persero (2021-2022).
- Direktur Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Direktur Keuangan, Treasury & Global Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – Sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Komersial dan Korporasi untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022, Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Komersial dan Korporasi berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-4/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Desember 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Komersial dan Korporasi menjadi Direktur Keuangan, Treasury & Global Services.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Ketua Pengganti Komite ALCO Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

327.600 lembar saham

R. Arief Wicaksono

Direktur Mikro, Ritel & Menengah



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Banyuwangi pada tahun 1970, usia 53 tahun per Desember 2023.



Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (1996).
- Magister bidang Manajemen Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2020).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2010).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2021).
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Basic) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018).
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Intermediate) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018).
- Sertifikasi Kompetensi Treasury Dealer (Advance) oleh Association Cambiste International ACI FMA (2018).

Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Bondowoso PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015 - 2017).
- Pemimpin Cabang Banyuwangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017 - 2018).
- Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018).
- Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018 - 2021).
- Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021 - 2022).
- Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022).
- Direktur Mikro, Ritel dan Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Maret 2022, Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-3/D.03/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Desember 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direksi yang semula Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah menjadi Direktur Mikro, Ritel dan Menengah.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Anggota Tetap Komite ALCO Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Bisnis Komite Kredit Bank Jatim
- Ketua Pengganti Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

728.200 lembar saham



Eko Susetyono

Direktur Manajemen Risiko



-  **Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia
-  **Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Jakarta pada tahun 1965, usia 58 tahun per Desember 2023.
-  **Domisili** : Surabaya

Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknologi Pangan dan Gizi dari Institut Pertanian Bogor (1985).
- Master bidang Corporate Finance and Investment dari Washington University (2000).
- Doktor bidang Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2019-sekarang).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II (Dua) (2006).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3 (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko: Icaap Program (2012).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (2014).
- Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), ERMA Professional Provisions Program (2016).
- Intl CWM Program : In-house BRI Batch 1 (2019).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (2022).
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR Level 5) oleh Strategic Development Group (2023).

Pengalaman Kerja

- AVP Project Office Base II - Credit Risk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2009).
- AVP Operasional Risk Management Dept, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2012).
- AVP Market, Liquidity and Enterprise Risks PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2017).
- VP Operational, Market and Liquidity Risk Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019).
- SEVP Direktorat Manajemen Risiko PT Pegadaian (Persero) (2019 - 2022).
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 – sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 Desember 2022, Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-184/D.03/2022 Tanggal 30 November 2022.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Anggota Tetap Komite ALCO Bank Jatim
- Ketua Pengganti Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim
- Anggota Tidak Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Produk Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

124.100 lembar saham

Zulhelfi Abidin

Direktur IT & Digital



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Bukittinggi pada tahun 1962, usia 61 tahun per Desember 2023.



Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung (1987).
- Master bidang Computer Science dari University of Wollongong Australia (1996).

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006).
- Executive Overview of Islamic Banking oleh LPPI (2011).
- Banking Risk Management Certification 4th level oleh LSPP (2012).
- Banking Risk Management Certification 5th level oleh LSPP (2015).
- Swift International Banking Operation Seminar oleh Swift International Banking Operation Seminar (2016).
- Executive Leadership Program oleh Kementrian BUMN (2017).
- Executive Education C-Level Data Analytic - Kellogg School Of Management (2019).
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Strategic Development Group (2023).

Pengalaman Kerja

- Asisten Dosen dan Peneliti pada laboratorium Computer Assisted Instruction Pusat Ilmu Universitas Indonesia (1987 - 1990).
- Kepala Bagian Pengembangan IT PT Bank Bukopin (1990 - 1992).
- System Analyst Bank Pembangunan Indonesia (1992 - 1997).
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Bukopin (1997 - 2007).
- Komisaris Utama PT Bringin Gigantara (2006 - 2012).
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 - 2014).
- Komisaris BRI Syariah (2012 - 2015).
- Senior Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014 - 2015).
- Direktur IT & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015 - 2017).
- Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (2017 - 2020).
- Komisaris Utama PT Sigma Cipta Caraka (2018 - 2019).
- Komisaris Utama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (2019 - 2020).
- Senior IT System Advisor PT R17 (2021 - 2022).
- Komisaris Utama PT Digital Prima Sejahtera (2021 - 2022).
- Direktur IT & Digital PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022 - sekarang).
- Pgs Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-2023).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur IT & Digital untuk Pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 7 Desember 2022. Lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 062/02/DKM/KEP tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Pengganti Sementara dan Pembagian Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ditunjuk merangkap sebagai pengganti sementara Direktur Operasi.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2026 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Anggota tetap Komite ALCO Bank Jatim
- Anggota tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Ketua Pengganti Komite TI Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Ketua Pengganti Komite Produk Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

24.200 lembar saham



Arif Suhirman

Direktur Operasi



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Kediri pada tahun 1966, usia 57 tahun per Desember 2023.



Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (1991).
- Master bidang Manajemen dan Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2007).

Sertifikasi

- Qualified Internal Audit (2000)
- Certified Wealth Manager oleh Certified Wealth Managers Association (2015).
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Professional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi - Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) (2020).

Pengalaman Kerja

- Kepala Cabang Rantau, Kantor Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009).
- Kepala Cabang Bandung Setiabudi, Kantor Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010).
- Kepala Cabang Jakarta Cempaka Mas, Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2010-2011).
- Kepala Cabang Krekot Wilayah Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2012).
- Kepala Cabang Bandung Asia Afrika PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2013).
- Kepala Cabang Jakarta Veteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Dana dan Operasional Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2017).
- Pj. Kepala Divisi Social Entrepreneurship PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).
- Pj. Kepala Divisi Institution 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Kepala Cabang Khusus, Kantor Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020).
- Direktur Bisnis PT BRI Asuransi Indonesia (2020-2021).
- Audit Head Audit Intern Kantor Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022).
- Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Operasi untuk Pertama kalinya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-132/D.03/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Periode Jabatan

2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2027 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Anggota tetap Komite ALCO Bank Jatim
- Anggota tetap Komite Manajemen Risiko Bank Jatim
- Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite TI Bank Jatim
- Kelompok Fungsi Risiko Komite Kredit Bank Jatim
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Kredit Bank Jatim
- Ketua Pengganti Komite Produk Bank Jatim
- Ketua I Komite Jaringan Bank Jatim

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Busrul Iman	Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	√		√		√		√		√		√		√	
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	√		√		√		√		√		√		√	
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	√		√		√		√		√		√		√	
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	√		√		√		√		√		√		√	
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	√		√		√		√		√		√		√	
Arif Suhirman	Direktur Operasi	√		√		√		√		√		√		√	

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Komposisi Direksi Bank Jatim sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Tonny Prasetyo*)	Direktur Operasi	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2019 dan perubahan nomenklatur berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	11 Oktober 2019
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022 dan perubahan nomenklatur berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	19 Januari 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022 dan perubahan nomenklatur berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	19 Januari 2022



Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Zulhelfi Abidin**)	Direktur IT & Digital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022

*) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

**) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022.

Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Pada tanggal 12 April 2023, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 menyetujui dan mengangkat Tonny Prasetyo sebagai Direktur Kepatuhan dan Arif Suhirman sebagai Direktur Operasi. Sehingga komposisi Direksi Bank Jatim setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur. Seluruh Direksi berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Busrul Iman	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 23 Juli 2020	23 Juli 2020
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	26 Mei 2023
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022 dan perubahan nomenklatur berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	19 Januari 2022
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	OJK	RUPS Tahunan Tanggal 17 Maret 2022 dan perubahan nomenklatur berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	19 Januari 2022
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Desember 2022	30 November 2022
Arif Suhirman	Direktur Operasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2023

Profil

Dewan Komisaris

Suprajarto*

Komisaris Utama



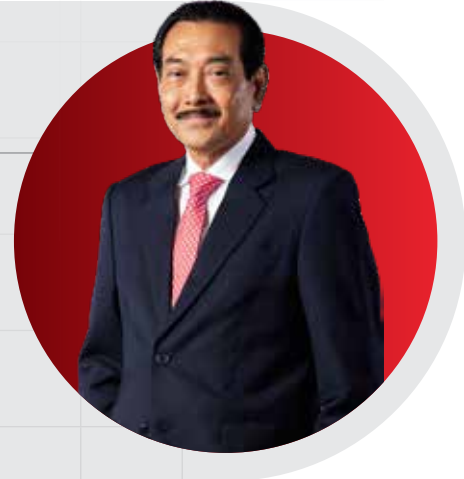
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Yogyakarta pada tahun 1956, usia 67 tahun per Desember 2023.



Domisili : Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1982).
- Magister bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran (2001).
- Doktor bidang Ilmu Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (2014).

Sertifikasi

Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

Pengalaman Kerja

- Branch Manager Bank Rakyat Indonesia (1999-2001).
- Vice Regional Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2005).
- Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006).
- Regional Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2007).
- Network and Service Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2015).
- Vice President Director PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- President Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019).
- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-2023).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Utama untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tahun buku 2021 tanggal 17 Maret 2022. Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/D.03/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan 19 Desember 2023 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – Sampai dengan 19 Desember 2023).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

191.000

*Bpk. Suprajarto (Komisaris Utama) sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia). Saat ini, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama di jalankan oleh anggota Dewan Komisaris

Candra Fajri Ananda

Komisaris Independen

-  **Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia
-  **Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Lumajang pada tahun 1964, usia 59 tahun per Desember 2023.
-  **Domisili** : Batu, Malang



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1988).
- Master (MSc.) Institute of Rural Development dari University of Gottingen, Jerman (1994).
- Doctor (Ph.D) Institute of Rural Development dari University of Göttingen, Jerman (1998).

Sertifikasi

- Pembekalan dan pemantapan persiapan Fit and Proper Test calon Komisaris Independen yang diadakan oleh Sustainable Development Goals (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Komisaris yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2018).
- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

Pengalaman Kerja

- Konsultan Pengembangan Sektor Publik di Area Pasca Konflik, Bank Dunia (2003-2004).
- Dewan Penasehat Perencanaan Regional, Provinsi Jawa Timur (2003-2012).
- Anggota TADF (Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal Kemenkeu), Kementerian Keuangan (2008-2014).
- Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang (2010-sekarang).
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013–2017).
- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2017 pada tanggal 20 Februari 2018. Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-153/D.03/2018 tanggal 18 September 2018, sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Diangkat untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada Tanggal 03 Mei 2021 (Periode Kedua).

Periode Jabatan

- 2018 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (Periode Pertama).
- 2021 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

- Dosen KPS S2, KPS S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (1989 - sekarang).
- Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2019- sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023)
- Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Muhammad Mas'ud

Komisaris Independen



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Sidoarjo pada tahun 1964, usia 59 tahun per Desember 2023.



Domisili : Malang



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Muhammadiyah, Malang (1997).
- Doktor bidang Politik Internasional dari Flinders University, Adelaide Australia (2005).

Sertifikasi

- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 1 (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level - 2 (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

Pengalaman Kerja

- Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (2011–2014).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang (2013-2016).
- Anggota Tim Ahli Walikota Batu (2015-2016).
- Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian (2015–2018).
- Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Riset Daerah Kab. Bojonegoro (Tahun 2019 - sekarang)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2022).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-187/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Periode Jabatan

- 2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (Periode Pertama).
- 2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2026 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

- Dosen Kopertis Wil VII, DPK Universitas Islam Malang (2018 - sekarang).
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (2018-sekarang).
- Ketua Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Sumaryono

Komisaris Independen

-  **Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia
-  **Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Blitar pada tahun 1960, usia 63 tahun per Desember 2023.
-  **Domisili** : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya (1979).

Sertifikasi

- Program *refreshment*/penyegaran sertifikasi manajemen risiko (2022).

Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang BRI Gunungsitoli (2005-2007).
- Pemimpin Cabang BRI Kelapa Gading (2007-2009).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2009-2012).
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran (2012-2013).
- Wakil Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 1 (2013-2016).
- Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Pekanbaru (2016).
- Direktur Utama PT BSM Broker Asuransi (2018-2019).
- Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tahun buku 2021 tanggal 17 Maret 2022. Lulus Fit and Proper Test serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-6/D.03/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Periode Jabatan

2022 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2025 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Pemantau Risiko (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).
- Anggota Komite Audit (2022 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2023).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Adhy Karyono

Komisaris



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Cirebon pada tahun 1971, usia 52 tahun per Desember 2023.



Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Garut (1996).
- Magister bidang Administrasi Publik Politeknik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (2012).

Sertifikasi

Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris, LPPI (2023).

Pengalaman Kerja

- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Subdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2006-2007)
- Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2007-2008)
- Kepala Seksi Standardisasi dan Bimbingan Teknis pada Sub Direktorat Tanggap Darurat Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2008-2009).
- Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial RI (2009-2010).
- Kabag Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2010-2011).
- Kabag Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2011-2016).
- Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI (2016-2017).
- Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial RI (2017-2020)
- Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kepresidenan RI (2020-2022).
- Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2022-sekarang).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-151/D.03/2023 tanggal 24 November 2023.

Periode Jabatan

2023 – Sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan tahun buku 2026 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2022-sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2023 – ditutupnya RUPS tahunan tahun 2024).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim



Heru Tjahjono*

Komisaris



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Yogyakarta pada tahun 1961, usia 62 tahun per Desember 2023.



Domisili : Malang



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Teknik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1988).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Merdeka, Malang (1999).
- Doktor bidang Lingkungan dan Pembangunan dari Universitas Brawijaya, Malang (2014).

Sertifikasi

- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 1 (2019).
- Ujian Level - 1 Program Sertifikasi Manajemen Risiko (2019).
- Ujian Level - 2 Program Sertifikasi manajemen Risiko (2019).
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level – 2 (2019).

Pengalaman Kerja

- Pj. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tulungagung (1997).
- Pj. Kepala DPUD Kabupaten Tulungagung (1997–2001).
- Pj. Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung (2001–2003).
- Bupati Kabupaten Tulungagung (2003–2013).
- Staf Gubernur Provinsi Jawa Timur (2013–2014).
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2014–2016).
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (2016–2018).
- Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur (2018–2021).
- Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada tanggal 19 Juni 2019, Lulus *Fit and Proper Test* serta dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-186/D.03/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan Penutupan RUPS tahunan 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun Buku 2022 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (2022 – 12 April 2023).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

400.600 lembar saham

* Bpk. Heru Tjahjono (Komisaris) sudah tidak menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Suprajarto*	Komisaris Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Adhy Karyono	Komisaris	√		√		√		√		√		√		√	
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	
Sumaryono	Komisaris Independen	√		√		√		√		√		√		√	

*Berhenti menjabat sejak 19 Desember 2023

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Suprajarto	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Heru Tjahjono	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022



Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 menyetujui dan mengangkat Muhammad Mas'ud sebagai Komisaris Independen dan Adhy Karyono sebagai Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Suprajarto*	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022
Adhy Karyono	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	24 November 2023
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2018	21 September 2018
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juli 2019 RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023	11 Oktober 2019
Sumaryono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2022	19 Januari 2022

*Berhenti menjabat sejak 19 Desember 2023 (meninggal dunia)

Profil

Dewan Pengawas Syariah

Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Sampang pada tahun 1955, usia 68 tahun per Desember 2023.



Domisili : Situbondo



Riwayat Pendidikan

- Sarjana bidang Tafsir Hadits Universitas Ibrahimy (UNIB) (1980).
- Magister bidang Ilmu Hukum Islam UNISMA Malang (2001).
- Doctor Honoris Causa (Dr.HC) bidang Fiqh/Ushul Fiqh UIN Walisongo Semarang (2021).

Sertifikasi

- Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah LSP oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2022).

Pengalaman Kerja

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).
- Naib Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2016-2021).
- Dewan Masyayikh Ma'had Aly (2018-2022).
- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2019-2020).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-sekarang).
- Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2022 – sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019. Kemudian diangkat kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 12 April 2023.

Periode Jabatan

- 2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2023 (Periode Pertama).
- 2023 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2027 (Periode Kedua).

Rangkap Jabatan

- Dosen Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy (UNIB) (1985-sekarang).
- Dosen Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1990-sekarang).
- Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (2010-sekarang).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Dr. dr. Sukadiono, MM

Anggota Dewan Pengawas Syariah



-  **Kewarganegaraan** : Warga Negara Indonesia
-  **Tempat dan Tanggal Lahir/Usia** : Lahir di Jombang pada tahun 1968, usia 55 tahun per Desember 2023.
-  **Domisili** : Surabaya

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Bidang Kedokteran dari Universitas Airlangga Surabaya (1995). • Magister Bidang Manajemen dari Universitas Narotama Surabaya (2007). • Doktor Bidang Ilmu Keolahragaan dari Universitas Negeri Surabaya (2012).
Sertifikasi	-
Pengalaman Kerja	• Bendahara PWM Jatim periode (2015-2022). • Ketua PWM Jatim periode (2022-sekarang). • Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (2020-sekarang). • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 12 April 2023.
Periode Jabatan	2023 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2027 (Periode Pertama).
Rangkap Jabatan	• Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (2020-sekarang). • Ketua PWM Jatim periode (2022-sekarang).
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)*

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Mojokerto pada tahun 1954, usia 69 tahun per Desember 2023.



Domisili : Malang



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Magister Pendidikan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).
- Doktor Ulumul Qur'an IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).

Sertifikasi

Pelatihan Pengawas Syariah LKS oleh DSN-MUI Institute Jakarta (2019).

Pengalaman Kerja

- Ketua Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF) (1994-1999).
- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (1998-1999).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang).
- Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Ketua Program Pembelajaran Bahasa Arab UIN Malang (2000-2003).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).
- Direktur Pasca Sarjana UIN Malang (2005-2007), Wakil Rektor IV UIN Malang (2007-2009).
- Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2015-2020).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2023).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022 – sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 26 April 2019.

Periode Jabatan

2019 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Rangkap Jabatan

- Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (1998-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (1999-sekarang).
- Dosen UIN Malang (2000-sekarang), Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (2000-sekarang).
- Asisten Direktur I Pascasarjana UIN Malang (2003-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2004-sekarang).
- Dosen Pascasarjana Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang (2004-sekarang).

Kepemilikan Saham Bank Jatim

Tidak memiliki saham pada Bank Jatim

* Berhenti menjabat sejak 12 April 2023



Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Dr. dr. Sukadiono, MM	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Dr. M. Saad IH, MA (Muhammad Sa'ad Ibrahim)*	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√

*Berhenti menjabat sejak 12 April 2023

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023, RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 menyetujui dan mengangkat KH Affifudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Sukadiono sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili pada Provinsi Jawa Timur. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. dr. Sukadiono, MM	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	Masih dalam proses Fit & Proper Test

Profil Pejabat Eksekutif

Profil Senior Executive Vice President (SEVP)



Budi Sumarsono

SEVP Corporate Transformation

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Madiun pada tahun 1966, usia 57 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (1992). • Sarjana bidang Hukum dari Universitas Merdeka (1999). • Magister bidang Manajemen dari Universitas Widya Jayakarta (2000).
Sertifikasi	: • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2011). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2017). • Sertifikasi Kepatuhan Level 1 oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (2018). • Sertifikasi General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2019). • Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (2020).
Pengalaman Kerja	: • Pemimpin Cabang Probolinggo PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2014-2015). • Pemimpin Cabang Gresik PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2017). • Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama Surabaya PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017-2018). • Pjs Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018). • Pemimpin Divisi International Banking PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-2019). • Pemimpin Divisi Human Capital PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2019-2021). • Pemimpin Divisi Perencanaan & Strategis PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021-2022). • Pemimpin Divisi Corporate Secretary PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-2023). • SEVP Corporate Transformation PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Diangkat sebagai SEVP Corporate Transformation PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/017/DIR/HCP/KEP tanggal 23 Februari 2023.
Periode Jabatan	: 23 Februari 2023 - 02 September 2024
Kepemilikan Saham Bank Jatim	: 20.000 lembar saham



Umi Rodiyah

SEVP Usaha Syariah

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Probolinggo pada 1966, usia 57 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: Sarjana bidang Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya (1991)
Sertifikasi	: • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2008). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2017). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2022). • Sertifikasi General Banking Level 3 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2019).
Pengalaman Kerja	: • Pemimpin Cabang Perak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2010-2015). • Pemimpin Sub Divisi Operasional Luar Negeri Divisi Dana Jasa dan LN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2015-2016). • Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2016-2017). • Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017). • Pjs Pemimpin Divisi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2017). • Pjs Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018). • Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2018-2020). • Pemimpin Divisi Dana Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020-2021). • Pemimpin Divisi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2021-2022). • Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2022-2023). • Pjs SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023). • SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Diangkat sebagai SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Periode Jabatan	: 31 Mei 2023 - 02 Maret 2024
Kepemilikan Saham Bank Jatim	: 226.500 lembar saham



Revi Adiana Silawati

SEVP Network And Services

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Solo pada tahun 1966, usia 57 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Ekonomi Universitas Wijaya Putra (1996). • Master in Management Program Universitas Airlangga (Beasiswa Bank Jatim) (1998).
Sertifikasi	: • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2006). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Profesi (2011). • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2013).
Pengalaman Kerja	: • Pemimpin Bidang Operasional Cab. DR. Soetomo (2001-2003). • Pemimpin Cabang Perak (2003-2006). • Pemimpin Cabang Bojonegoro (2006-2009). • Pemimpin Cabang Kediri (2009-2011). • Pemimpin Cabang Malang (2011-2012). • Pemimpin Corporate Secretary (2012-2013). • Pemimpin Divisi Dana Jasa dan LN (2013-2015). • Pemimpin Divisi Tresuri (2015-2018). • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja (2018-2021). • Pemimpin Divisi Human Capital (2021-2023). • SEVP Network & Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Diangkat sebagai SEVP Network & Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/017/DIR/HCP/KEP tanggal 23 Februari 2023.
Periode Jabatan	: 23 Februari 2023 - 01 Juni 2024
Kepemilikan Saham Bank Jatim	: 800 lembar saham



Hermita

SEVP Consumer Banking

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Padang pada tahun 1968, usia 55 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Hukum dari Universitas Andalas (1992). • Magister Management Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (2003).
Sertifikasi	: • Sertifikasi WAPERD, BNI • Management Risk Level 4, BSMR • Assessment Center Assessor Certification, PPM
Pengalaman Kerja	: • Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Selatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2014). • Pemimpin Kantor Wilayah Sulawesi Utara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015). • Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Selatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016) • Pemimpin Divisi Produk Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018). • Senior Vice President Divisi Penjualan Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020). • Senior Vice President of Align Corporate & Consumer Businesses Divisi Hubungan Lembaga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2021). • Pgs. Pemimpin Kantor Wilayah Kantor Wilayah Palembang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022-2023). • Senior Vice President of Smart City, Optimalisasi Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-2023). • SEVP Consumer Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023-Sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Diangkat sebagai SEVP Consumer Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/22/HCP/PK tanggal 29 Mei 2023.
Periode Jabatan	: 01 Juni 2023 - 31 Mei 2025
Kepemilikan Saham Bank Jatim	: Tidak ada lembar saham



Koerniawan Prijambodo

SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Lumajang pada tahun 1967, usia 56 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana bidang Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991). • Finance & Banking Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (1993).
Sertifikasi	: BSMR Level 4 (Desember 2021).
Pengalaman Kerja	: • Enginer PT Bukaka Teknik Utama (1991-1992). • Program Pendidikan Eksekutif PT Bank CIMB Niaga Tbk (1993-1995). • Relationship Manager (RM) & Brach Manager Commersial Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk di Kediri dan Surabaya (1995-2010). • Kepala Kantor Wilayah Komersial Banking Jawa Barat PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2012); • Kepala Kantor Wilayah Komersial Banking Jawa Timur Bali Nusra PT Bank CIMB Niaga Tbk (2012-2019). • Kepala Kantor Wilayah III (Jawa Timur, Bali Nusra dan Indonesia Timur) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia EXIMBANK (2020-2023). • SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2023 – Sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Diangkat sebagai SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/23/HCP/PK tanggal 29 Mei 2023.
Periode Jabatan	: 01 Juli 2023 - 30 Juni 2025
Kepemilikan Saham Bank Jatim	: Tidak ada lembar saham

Profil Vice President (VP)



Wioga Adhiarma Aji

VP Corporate Secretary

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1978. Usia 45 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/057/DIR/HCP/KEP tanggal 20 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020). Pjs. Pemimpin Divisi Umum (2022).



Wardhana Suryaاتمaja

VP Audit Internal

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1967. Usia 56 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995). • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat Vice President Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/061/DIR/HCP/KEP tanggal 08 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Cabang Syariah Madiun (2015), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2015), Pjs Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2016), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2017), Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Kebijakan (2018), Pemimpin Divisi Umum (2019), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2022).



Sis Maryadi

VP Dana dan Jasa

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Boyolali pada tahun 1966. Usia 57 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: - Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Boedi Iswara Surabaya (2001). - Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Imni Jakarta (2005).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai <i>Vice President</i> Dana dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1986. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Gresik (2013), Pemimpin Cabang Trenggalek (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Agrobisnis dan Ritel (2017), Pemimpin Divisi Kredit Konsumer (2018), Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (2022).



Mugni Nurachman

VP Hukum

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Nganjuk
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Jakarta pada tahun 1971. Usia 52 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: - Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1995). - Magister Manajemen Program Universitas Wijaya Putra (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai <i>Vice President</i> Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/057/DIR/HCP/KEP tanggal 20 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Merican Cabang Kediri (2014), Senior Analist Grup Legal Litigasi Divisi Hukum (2016), Pjs. Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2018), Pemimpin Cabang Jombang (2020), Pemimpin Sub Divisi Legal Litigasi Divisi Hukum (2021), Pjs. Pemimpin Divisi Hukum (2022).



R. Wahyukusumo Wisnubroto

VP International Banking

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Yogyakarta pada tahun 1972. Usia 51 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1998). • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President International Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2013), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2014), Pemimpin Sub Divisi Dealingroom Divisi Tresuri (2015), Pemimpin Divisi International Banking (2017), Pemimpin Divisi Tresuri (2018), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (2022).



Mukhlison

VP Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Jombang pada tahun 1974. Usia 49 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/050/DIR/HCP/KEP tanggal 22 Juni 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Pacitan (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jombang (2013), Pemimpin Cabang Probolinggo (2015), Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Kredit Menengah Korporasi Dan Sindikasi (2018), Pgs Pemimpin Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi (2021), Pjs Pemimpin Divisi Kredit Komersial Korporasi dan Sindikasi (2022).



Suci Issumiyarti

VP Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Semarang pada tahun 1966. Usia 57 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Bahasa Prancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pemimpin Cabang Kepanjen (2012), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021), Pemimpin Divisi Operasi (2022).



Glembogh Priambodo

VP Manajemen Anak Perusahaan

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Malang pada tahun 1970. Usia 53 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Surabaya (1997). • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (2001). • Magister Manajemen dari STIE ABI Surabaya (2003). • Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (2022).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Manajemen Anak Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Sub Divisi Komunikasi Eksternal (2015), Senior Analyst Sub Divisi Priority Banking (2015), Pjs Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2016), Pemimpin Cabang Dr. Soetomo (2017), Pemimpin Corporate Secretary (2018), Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama (2021), Pemimpin Divisi Kepatuhan & Tata Kelola (2022).



Herijadi Widodo

VP Umum

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 52 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Hukum dari Universitas Sunan Bonang Tuban (1999). • Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2008)
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai <i>Vice President</i> Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/057/DIR/HCP/KEP tanggal 20 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1993. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang (2013), Pemimpin Cabang Bawean (2014), Pemimpin Cabang Bangkalan (2014), Pemimpin Cabang Jombang (2015), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2017), Pemimpin Cabang Jakarta (2020), Pjs. Pemimpin Cabang Utama (2022).



Nur Eko Ardian

VP Pengembangan Produk

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1980. Usia 43 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2003). • Magister Administrasi Publik dari Universitas Wijaya Putra (2005).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai <i>Vice President</i> Pengembangan Produk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2004. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Senior Analis pada Corporate Secretary (2015), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Tuban (2015), Pemimpin Cabang Kepanjen (2015), Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (2018), Pemimpin Divisi Human Capital (2018), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2019), Pemimpin Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan (2022).



Eko Tri Prasetyo

VP Operasi

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1981. Usia 42 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sekolah Tinggi Telkom jurusan Sarjana Teknik Informatika (2003). • Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia (2006).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Operasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 6 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Audit Intern (2012), Pemimpin Divisi Audit Internal (2018), Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (2021).



Setya Erry Nugraha

VP Analis Risiko Kredit

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Serang pada tahun 1978. Usia 45 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Analis Risiko Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/050/DIR/HCP/KEP tanggal 22 Juni 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2015. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Perak (2015), Pemimpin Cabang HR. Muhammad (2015), Pemimpin Cabang Pare (2017), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi Sindikasi (2019), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2020), Pjs. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2022).



Slamet Purwanto

Pjs VP Human Capital

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 44 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya (2004). • Magister Manajemen dari UPN Veteran Jatim (2016).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Divisi Human Capital (2020), Pemimpin Sub Divisi Learning Center (2021).



Firman Iswahyudi M

Pjs VP Kredit Ritel dan Menengah

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Purworejo pada tahun 1968. Usia 55 tahun per 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Ekonomi dari Universitas Putra Bangsa Surabaya (1996). • Magister Manajemen dari Universitas STIESIA Surabaya (2002). • Doktor Ilmu Ekonomi – Manajemen Strategik dari Universitas STIESIA Surabaya (2018).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Ritel dan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Kredit Korporasi (2014), Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi Divisi Kredit Korporasi (2015), Pemimpin Sub Divisi Trinisat (2015), Pemimpin Sub Divisi Kredit Properti Divisi Kredit Konsumer (2017), Pemimpin Cabang HR Muhammad (2019), Pemimpin Cabang Pamekasan (2020), Pemimpin Cabang Gresik (2021), Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Mikro, Ritel dan Program (2022).



Wahasta Hartadi

TKK VP Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Madiun pada tahun 1967. Usia 56 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Ekonomi dari UNPAD Bandung (1991). • Magister Manajemen UNHAS Makasar (2003).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai TKK Vice President Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit sesuai dengan Perjanjian Kerja Bank Jatim No. 062/29/HCP/PK tanggal 24 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2023. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Head Of Remedial & Recovery BNI Kanwil Makasar (2012), Head Of Remedial & Recovery BNI Kanwil Padang (2016), Head Of Remedial & Recovery BNI Kanwil Bandung (2017), Sub Project Management BNI Divisi Perencanaan Jakarta (2019).



Putu Denny Hariwidyanta

Pjs VP Kepatuhan dan APU PPT

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Denpasar pada tahun 1977. Usia 46 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (2001)
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kepatuhan & APU PPT berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2003. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi pada Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Dana Jasa (2018), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2022).



Agus Sastriono

Pjs VP Kredit Konsumer

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1971. Usia 52 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Akuntansi dari Universitas IKIP Negeri Surabaya (1990). • Magister Manajemen dari Universitas STIE-ABI Surabaya (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Konsumer berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sumenep (2013), Pemimpin Cabang Bawean (2013), Pemimpin Cabang Mojokerto (2014), Pemimpin Cabang Jember (2019), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama Surabaya (2019), Pemimpin Cabang Jember (2019), Pemimpin Cabang Banyuwangi (2020), Pemimpin Cabang Jakarta (2022), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2023).



R. Deni Mahendra

Pjs VP Akuntansi dan Manajemen Keuangan

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Situbondo pada tahun 1973. Usia 50 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Akuntansi & Manajemen Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Divisi Akuntansi (2015), Pjs Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2016), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi (2017), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi & Anggaran (2017), Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2018), Pemimpin Cabang Tuban (2020), Pemimpin Cabang Mojokerto (2022).



Teguh Sunyoto

Pjs VP Mikro

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Madiun pada tahun 1966. Usia 57 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: - Sarjana ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (1999). - Magister Manajemen dari Universitas Gajayana Malang (2004).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kredit Mikro berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Lamongan (2015), Pemimpin Sub Divisi Management Kinerja (2017), Pemimpin Cabang Nganjuk (2021), Pemimpin Cabang Kediri (2022).



Runita Pri Purwanti

Pjs VP Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Malang pada tahun 1967. Usia 56 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya (1991).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Gresik (2017), Pemimpin Bidang Dana Jasa & Priority Banking Cabang Utama (2021), Pemimpin Cabang Sidoarjo (2022).



Handayanto

Pjs VP Teknologi Informasi

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1975. Usia 48 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Komputer dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan TI Divisi Teknologi Informasi (2015), Pemimpin Sub Divisi Dukungan & Operasional Divisi Teknologi Informasi (2016), Pemimpin Sub Divisi Pengadaan Barang & Jasa Divisi Umum (2020).



R. Wahyu Tedjasukmana

Pjs VP Tresuri

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Banyuwangi pada tahun 1972. Usia 51 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (2000).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Treasury berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Syariah Kediri (2019), Pemimpin Cabang Syariah Jember (2016), Senior Dealer di Divisi Treasury (2014).



Herry Setya Yudakka

Pjs VP Kebijakan & Prosedur

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Gresik pada tahun 1977. Usia 46 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Teknik Industri dari Universitas Veteran Surabaya, Jawa Timur (1995).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Kebijakan dan Prosedur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2002. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional Cabang Trenggalek (2012), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Lumajang (2014), Pjs Pemimpin Cabang Lumajang (2014), Pemimpin Cabang Jombang (2017), Pemimpin Cabang Malang (2020), Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022), Pjs Pemimpin Divisi Pengembangan Produk (2023).



M. Machfud Hidayat

Pjs VP Digital Banking

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1969. Usia 54 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ekonomi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Digital Banking berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1991. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional pada Divisi DJL (2014), Pemimpin Sub Divisi Perpajakan (2015), Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Keuangan & Perpajakan (2017) Pemimpin Sub Unit Pengembangan Digital (2022).



Melvin

Pjs VP Manajemen Jaringan dan Layanan

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Padang pada tahun 1976. Usia 47 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Teknik Informatika Institut Teknologi Indonesia (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Manajemen Jaringan & Layanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 05 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2010. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pjs Pemimpin Bidang Operasional ditempatkan pada Divisi Teknologi Informasi (2014), Pjs Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi (2016), Pemimpin Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan Keuangan (2018).



Misbakhul Iman

Pjs VP Bisnis Syariah

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Sidoarjo pada tahun 1969. Usia 54 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang (1998).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Bisnis Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2012. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cab. Syariah Surabaya (2012), Pemimpin Cabang Syariah Kediri (2014), Pemimpin Cabang Syariah Surabaya (2019).



M. Pramudya Iskandar

Pjs VP Pendukung Bisnis Syariah

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Sukabumi pada tahun 1968. Usia 55 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1992). • Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (1999).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pjs Vice President Pendukung Bisnis Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2009. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Syariah Surabaya (2009) dan Pemimpin Sub Divisi Pembiayaan Unit Usaha Syariah (2016), Pgs Pemimpin Divisi Bisnis Syariah (2022).



Syaiful Bakhri

Pgs Pemimpin Unit Security

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Bojonegoro pada tahun 1978. Usia 45 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Budi Luhur (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pgs Pemimpin Unit Security TI berdasarkan Surat Penunjukan No. 062/2002/HCP/HOHC/SRT tanggal 18 Oktober 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2001. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Tata Kelola & Keamanan TI Divisi Teknologi Informasi (2018), AVP Infrastruktur & Operasi Divisi Teknologi Informasi (2023).



Santoso

Pemimpin Unit Administrasi Kredit

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Jember pada tahun 1970. Usia 53 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2001).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Unit Administrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan No. 062/218/HCP/KPH/KEP tanggal 30 Desember 2022.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1995. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Maron (2017), Pemimpin Sub Divisi Kredit Mikro Divisi Kredit Mikro & Program (2021, Pemimpin Sub Divisi Operasional Kredit Divisi Operasi (2022).



Retno Handayani

Pemimpin Unit Hubungan Kelembagaan

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Usia 49 tahun per Desember 2023.
Riwayat Pendidikan	: - Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiraswasta Indonesia (2002). - Magister Manajemen Universitas Trisakti (2013).
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Unit Hubungan Kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/041/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2016. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jakarta (2017), Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Jakarta (2020), Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa Institusi & Korporasi Divisi Dana dan Jasa (2021).

Profil Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2023	2022
Pria	2.512	2.436
Wanita	2.032	1.932
Jumlah	4.544	4.368

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
NO	244	-	244	260	3	263
S, C & T	1.507	1.420	2.927	1.491	1.332	2.823
PII, Pngl, PK, Au, ARM dan An	491	435	926	445	433	878
PBO, PCP, S.Au & RM	176	139	315	150	128	278
AVP, PC & PB	64	33	97	74	32	106
VP & PCU	28	2	30	16	4	20
SEVP	2	3	5	-	-	-
Jumlah	2.512	2.032	4.544	2.370	1.896	4.368

Keterangan:

NO	Non Administrasi
S, C, & T	Staf, Calon Pegawai & Tenaga Kontrak Ikatan Kerja
PII	Penyelia
PK	Pemimpin Kantor Fungsional
Au	Auditor
ARM	Assistant Relation Manager
An	Analisis
PBO	Pemimpin Bidang Operasional
Pngl	Pengelola

PCP	Pemimpin Cabang Pembantu
S.Au	Senior Auditor
RM	Relationship Manager
AVP	Assistance Vice President
PC	Pemimpin Cabang
PB	Pemimpin Bidang
VP	Vice President
PCU	Pemimpin Cabang Utama
SEVP	Senior Executive Vice President

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 30 Tahun	248	331	579	215	300	515
30-54 Tahun	2.162	1.637	3.799	2.119	1.578	3.697
> 54 Tahun	102	64	166	102	54	156
Jumlah	2.512	2.032	4.544	2.436	1.932	4.368



Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Non Strata	233	109	342	266	144	410
S1	2.076	1.796	3.872	1.984	1.672	3.656
S2	198	127	325	183	116	299
S3	5	-	5	3	-	3
Jumlah	2.512	2.032	4.544	2.436	1.932	4.368

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian (dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	2.347	1.878	4.225	2.370	1.896	4.266
Pegawai Tidak Tetap	165	154	319	66	36	102
Outsourcing	1.765	256	2.021	1.815	380	2.195
Jumlah	4.277	2.288	6.565	4.251	2.312	6.563

Komposisi Pemegang Saham

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Jatim per 1 Januari 2023

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
SAHAM SERI A			
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,13%
Kota Surabaya	319.243.457	79.810.864.250	2,13%
Kota Malang	108.635.999	27.158.999.750	0,72%
Kota Madiun	134.064.427	33.516.106.750	0,89%
Kota Mojokerto	72.091.751	18.022.937.750	0,48%
Kota Kediri	14.208.273	3.552.068.250	0,09%
Kota Probolinggo	17.397.927	4.349.481.750	0,12%
Kota Blitar	16.987.084	4.246.771.000	0,11%
Kota Pasuruan	100.075.767	25.018.941.750	0,67%
Kota Batu	38.236.741	9.559.185.250	0,25%
Kabupaten Gresik	220.213.170	55.053.292.500	1,47%
Kabupaten Malang	253.635.445	63.408.861.250	1,69%
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	19.593.450.250	0,52%
Kabupaten Madiun	32.660.478	8.165.119.500	0,22%
Kabupaten Kediri	144.925.510	36.231.377.500	0,97%
Kabupaten Probolinggo	125.931.454	31.482.863.500	0,84%
Kabupaten Blitar	39.496.395	9.874.098.750	0,26%
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	11.152.625.000	0,30%
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	75.072.158.000	2,00%
Kabupaten Magetan	19.594.792	4.898.698.000	0,13%
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	17.674.493.750	0,47%
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	21.160.133.000	0,56%
Kabupaten Pacitan	53.520.271	13.380.067.750	0,36%
Kabupaten Lamongan	101.318.315	25.329.578.750	0,67%
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	5.888.899.000	0,16%
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	67.509.029.250	1,80%
Kabupaten Tuban	217.418.404	54.354.601.000	1,45%
Kabupaten Jember	111.866.875	27.966.718.750	0,75%
Kabupaten Ngawi	215.763.995	53.940.998.750	1,44%
Kabupaten Jombang	26.792.899	6.698.224.750	0,18%
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	21.801.839.250	0,58%
Kabupaten Lumajang	67.206.045	16.801.511.250	0,45%
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	92.538.962.500	2,47%
Kabupaten Situbondo	76.374.593	19.093.648.250	0,51%
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	19.304.463.500	0,51%



Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp)	Kepemilikan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	10.148.232.000	0,27%
Kabupaten Sumenep	144.228.431	36.057.107.750	0,96%
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	9.198.364.750	0,25%
Kabupaten Sampang	101.175.235	25.293.808.750	0,67%
Saham Seri B			
Masyarakat	3.081.350.100	770.337.525.000	20,52%
TOTAL	15.015.498.082	3.753.874.520.500	100%

Untuk komposisi pemegang saham per tanggal 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2023.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 1 Januari 2023

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	305.061.900	Badan Usaha Tetap	9,90%
2	PT MNC SEKURITAS	134.810.700	Perorangan Indonesia	4,38%
3	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQEMERGING DIVIDEND (UCITS)	130.000.000	Institution - Foreign	4,22%
4	PT TASPEN	109.442.800	Badan Usaha Tetap	3,55%
5	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK	103.283.026	Broker	3,35%
6	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FUNDS, SICAV-INDONESIA FD	73.442.300	Institution - Foreign	2,38%
7	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	63.786.500	Institution - Foreign	2,07%
8	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	57.573.900	Perorangan Indonesia	1,87%
9	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	49.000.000	Norway - Tax Treaty	1,59%
10	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND,INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	47.991.500	Institution - Foreign	1,56%
11	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	44.014.890	Institution - Foreign	1,43%
12	PT INDO PREMIER SEKURITAS	42.574.100	Perorangan Indonesia	1,38%
13	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	39.513.600	Institution - Foreign	1,28%
14	PT MIRAE ASSET SEKURITAS	35.881.800	Perorangan Indonesia	1,16%
15	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	31.858.200	United States of America - Tax Treaty	1,03%
16	STATE STREET BANK-ISHARES MSCI INDONESIA ETF	30.746.400	United States of America - Tax Treaty	1,00%
17	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	28.898.900	Institution - Foreign	0,94%
18	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.-2039925380	26.737.100	United States of America - Tax Treaty	0,87%
19	STATE STREET BANK-CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	24.239.300	United States of America - Tax Treaty	0,79%
20	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	23.523.900	Institution - Foreign	0,76%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Jatim per 31 Desember 2023

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Status	Kepemilikan
1	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	305.061.900	Perseroan Terbatas	9,90%
2	CITIBANK LONDON S/A MUTUAL FUND EQ EMERGING DIVIDEND (UCITS)	130.000.000	Institution - Foreign	4,22%
3	PT MNC SEKURITAS	116.000.000	Perorangan Indonesia	3,76%
4	PT Taspen	109.442.800	Perseroan Terbatas	3,55%
5	BNYM RE ACADIAN EM MKTS SM ALL CAP EQ FD LLC-2039925167	44.014.890	Institution - Foreign	1,43%
6	STATE STREET BANK-BERNSTEIN FUND,INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	43.073.500	Institution - Foreign	1,40%
7	STATE STREET BANK-GOLDMAN SACHS FUNDS	38.700.300	Institution - Foreign	1,26%
8	PT INDO PREMIER SEKURITAS	35.281.800	Perorangan Indonesia	1,15%
9	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA	32.306.900	Perorangan Indonesia	1,05%
10	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.	31.858.200	Perorangan Indonesia	1,03%
11	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC LIMITED-SIERRA DORADA FUND SP	31.386.200	Institution - Foreign	1,02%
12	PANIN SEKURITAS, PT	31.023.500	Institution - Foreign	1,01%
13	DZ PRIVATBANK S/A CH GALILEO ASIA FUND	28.898.900	Perseroan Terbatas	0,94%
14	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	27.000.000	Institution - Foreign	0,88%
15	BNYM RE ENSIGN PEAK ADV, INC.	26.737.100	Institution - Foreign	0,87%
16	STATE STREET BANK-ISHARES MSCI INDONESIA ETF	25.583.100	Institution - Foreign	0,83%
17	PT CEALMI KHIEZT INDONESIA	25.170.400	Institution - Foreign	0,82%
18	BNYM RE GOLDMAN SACHS TRUST-GS EM MAR EQ INS FD-2039927833	22.175.900	Perseroan Terbatas	0,72%
19	JPMCB NA RE - BLACKROCK INST TR CO N A INVESTMENT FDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	20.382.800	Institution - Foreign	0,66%
20	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	20.000.000	Institution - Foreign	0,65%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank Jatim per 1 Januari 2023

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%

Untuk komposisi pemegang saham 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dengan komposisi yang sama dengan per tanggal 1 Januari 2023.



Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim Per 1 Januari 2023

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
LOKAL			
Perorangan	54.693	1.404.961.407	9,357%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,479%
Yayasan	2	1.257.900	0,008%
Dana Pensiun	13	422.439.100	2,813%
Asuransi	3	16.139.100	0,107%
Bank	1	727.500	0,005%
Perseroan Terbatas	53	186.270.109	1,241%
Reksadana	6	16.125.996	0,107%
Sub Total	54.810	13.982.069.094	93,118%
ASING			
Perorangan	14	1.051.100	0,007%
Badan Usaha Asing	161	1.032.377.888	6,875%
Sub Total	175	1.033.428.988	6,882%
TOTAL	54.985	15.015.498.082	100%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% Bank Jatim per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
LOKAL			
Perorangan	59.761	1.684613.407	11,219%
Pemerintah Daerah	39	11.934.147.982	79,479%
Yayasan	1	1.360.500	0,009%
Dana Pensiun	11	7.993.200	0,053%
Asuransi	3	11.987.400	0,080%
Bank	1	23.000	0%
Perseroan Terbatas	56	523.468.596	3,486%
Reksadana	5	18.864.411	0,126%
Sub Total	59.844	2.248.336.514	94,452%
ASING			
Perorangan	37	1.843.900	0,012%
Badan Usaha Asing	151	831.195.686	5,535%
Sub Total	188	833.039.586	5,547%
TOTAL	60.065	15.015.498.082	100%

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	1.946.500	0,0129633%
2.	Tonny Prasetyo	Direktur Operasi	628.500	0,0041857%
4.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	-	-
5.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	126.300	0,0008411%
6.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	-	-
7.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	-	-
DEWAN KOMISARIS				
1.	Suprajarto*	Komisaris Utama	-	-
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
5.	Heru Tjahjono**	Komisaris	274.200	0,0018261%
TOTAL			2.975.500	0,0198162 %

* Berhenti menjabat sejak 19 Desember 2023

** Berhenti menjabat sejak 12 April 2023

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham	Kepemilikan
DIREKSI				
1.	Busrul Iman	Direktur Utama	2.958.900	0,0197056%
2.	Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	1.067.400	0,0071087%
3.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury Global Services	327.600	0,0021817%
4.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	728.200	0,0048497%
5.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	24.200	0,0001612%
6.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	124.100	0,0008265%
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-
DEWAN KOMISARIS				
1.	Suprajarto*	Komisaris Utama	191.000	0,0012722%
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
5.	Adhy Karyono	Komisaris	-	-
TOTAL			5.421.400	0,0361054%

* Berhenti menjabat sejak 19 Desember 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank tidak langsung.



Kepemilikan Saham Senior Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2023, Senior Manajemen Bank Jatim tidak memiliki kepemilikan saham Bank langsung dan tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank Jatim Per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Institusi Lokal	116	12.497.845.089	83,233%
Institusi Asing	151	831.195.686	5,536%
Individu Lokal	59.767	1.684.639.407	11,22%
Individu Asing	32	1.817.900	0,012%
Total	60.065	15.015.498.082	100%

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Bank Jatim dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 51,13%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali tidak memiliki kepemilikan saham secara tidak langsung.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(51,13%)

bankjatim

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2023, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi serta perusahaan ventura bersama sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak, asosiasi serta perusahaan ventura bersama, Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha dan Keterangan status operasi entitas anak, entitas asosiasi serta perusahaan ventura bersama (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Struktur Grup Perusahaan



Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Informasi Kelompok Usaha Bank

Per 31 Desember 2023, Bank Jatim belum merupakan Kelompok Usaha Bank, sehingga tidak terdapat informasi struktur Kelompok Usaha Bank, struktur keterkaitan kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Kronologi Penerbitan Saham

Bank Jatim mengeluarkan saham yang terdiri dari Saham Seri A yang mana dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Saham Seri B yang ditawarkan kepada publik.

PENAWARAN UMUM PERDANA

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank Jatim melakukan *Initial Publik Offering* (IPO) dengan menawarkan saham baru sebanyak

2.983.537.000 lembar saham biasa (Seri B) dengan harga penawaran Rp430 per lembar saham, sehingga jumlah seluruh



saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dari jumlah saham yang ditawarkan sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan Bank Jatim telah melaksanakan program MESOP (*Management Employee Stock Option Plans*) dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan penambahan saham baru (Seri B) sebesar 13.127.500 lembar saham. Sehingga total Modal Disetor pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

NAMA BURSA TEMPAT SAHAM PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh saham Bank Jatim telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	
1	Sebelum IPO	-	-	-	-	
2	2012	Penawaran Umum Perdana	Saham Seri B	250	430	
3	2016	MESOP Exercise II 2016	Saham Seri B	250	409	
4	2017	MESOP Exercise I 2017	Saham Seri B	250	450	
5		MESOP Exercise II 2017	Saham Seri B	250	450	
					409	
6	2018	MESOP Exercise I 2018	Saham Seri B	250	450	
					409	
7		MESOP Exercise II 2018	Saham Seri B	250	409	
					599	
8	2019	MESOP Exercise I 2019	Saham Seri B	250	409	
					599	
9		MESOP Exercise II 2019	Saham Seri B	250	450	
					409	
					599	
10	2020	MESOP Exercise I 2020	Saham Seri B	250	409	
					599	

Kronologi Penerbitan dan/atau Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank Jatim belum menerbitkan Efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan Efek lainnya.

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar saham)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
-	-	-	-	-
2.983.537.000	14.917.684.982	3.729.421.245.500	1.282.920.910.000	
27.372.600	14.945.057.582	3.736.264.395.500	11.195.393.400	
1.241.600	14.946.299.182	3.736.574.795.500	558.720.000	
1.800.500	14.974.591.382	3.743.647.845.500	810.225.000	
26.491.700			10.835.105.300	
297.700	14.975.852.582	3.743.963.145.500	133.965.000	
963.500			394.071.500	
365.400	14.978.134.982	3.744.533.745.500	149.448.600	
1.917.000			1.148.283.000	
48.500	14.993.772.982	3.748.443.245.500	19.836.500	
15.589.500			9.338.110.500	
1.062.100	15.002.370.582	3.750.592.645.500	477.945.000	
741.500			303.273.500	
6.794.000			4.069.606.000	
3.163.900	15.015.498.082	3.753.874.520.500	1.294.035.100	
9.963.600			5.968.196.400	



Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Nama KAP	Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Jaringan Asosiasi	PKF International
Alamat KAP	UOB Plaza Lantai 30 dan 42 Jl. M.H. Thamrin Lot 8 -10, Jakarta Pusat Tel : (021) 29932121 (hunting) Fax : (021) 29932113 Email : jkt-office@pkfhadiwinata.com
Nama AP	Ary Daniel Hartanto
Periode Penugasan KAP	Periode ke 5
Periode Penugasan AP	Periode ke 3
Jasa Audit	Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Unit Usaha Syariah. Meliputi Audit Umum atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, dan Review atas Laporan.
Jasa Non Audit	Tidak terdapat jasa non audit
Fee Audit	Rp1.175.000.000
Fee Non Audit	-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

PEMERINGKAT EFEK	PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) Panin Tower-Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 12170 Telp : (021) 727 82380 Fax : (021) 727 82370 Web : www.pefindo.com Jasa yang diberikan : Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang Periode Penugasan : Tahun Buku 2022
	KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN Menara Batavia, lantai 28 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 120, Jakarta 10220 Telp: (021) 5795 0155 Jasa yang diberikan: Menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang Periode Penugasan: Tahun Buku 2022

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT DATINDO ENTRYCOM

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp: (021) 3508077
Fax: (021) 3508078

Jasa yang diberikan : Mencatat kepemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek
Periode Penugasan : Tahun Buku 2023

PENJAMIN PELAKSANA EFEK

PT BAHANA SEKURITAS

Graha Niaga, Lantai 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5678
Fax : (021) 250 5087

Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan Efek dan pembayaran keseluruhan nilai Efek yang diemisikan kepada emiten
Periode Penugasan : Tahun Buku 2022

PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri, Lantai 28-29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Indonesia
Telp : (021) 526 5678
Fax : (021) 526 505

Jasa yang diberikan : Menjamin penjualan Efek dan pembayaran keseluruhan nilai Efek yang diemisikan kepada emiten
Periode Penugasan : Tahun Buku 2023

KUSTODIAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190
Telp : (021) 515 2855
Fax : (021) 5299 1199
Web : www.ksei.co.id

Jasa yang diberikan: Tempat penitipan kolektif aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi kliennya
Periode Penugasan: Tahun Buku 2023

NOTARIS

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.

Jl. Kebon rojo No. 2 CC, Surabaya 60175, Indonesia
Telp : (031) 351 1282, 352 1285, 353 2822
Fax : (031) 352 2311

Jasa yang diberikan : Membuat Akta Ringkasan Risalah RUPS dan Akta Risalah RUPS.
Periode Penugasan : Tahun Buku 2022

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN



Nama Penghargaan:
Peringkat I Engagement Index 2023

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2023

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2023
Customer Service

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2023 Teller

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2023 ATM

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction Index 2023
Mobile Banking

Acara:
6th Infobank MRI Satisfaction, Loyalty,
Engagement and Corporate Reputation
Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Indonesia Best BUMD Award 2023 in
Business Strategy to Optimizing Banking
Services category BPD

Acara:
Indonesia Best BUMD Awards 2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
31 Januari 2023



Nama Penghargaan:
Best Public Relation in Company
Strategy on Improving Banking Services
and Supporting Local Government
Program kategori Regional Bank

Acara:
Indonesia Public Relation Awards (IPRA)
2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
24 Februari 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat A Laporan Keberlanjutan
Tahun 2021

Acara:
Hasil Studi Laporan Keberlanjutan Tahun
2021 Perusahaan Publik di Indonesia

Penyelenggara:
Foundation For International Human
Rights Reporting Standards (FIHRRST)

Tanggal:
6 Maret 2023



Nama Penghargaan:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk Category Best Companies

Acara:
Obsession Awards 2023
Penyelenggara:
Obsession Media Group (OMG)

Tanggal:
8 Maret 2023



Nama Penghargaan:
The Best Digital Transformation (Local
Banking Industries)

Acara:
Digital Technology & Innovation Awards
2023

Penyelenggara:
Itech

Tanggal:
29 Maret 2023



Nama Penghargaan:
The Best Digital Technology Project
(Local Banking Industries)

Acara:
Digital Technology & Innovation Awards
2023

Penyelenggara:
Itech

Tanggal:
29 Maret 2023



Nama Penghargaan:

The Best Chief Information & Digital
Officer Of The Year
(Local Banking Industries)

Acara:

Digital Technology & Innovation Awards
2023

Penyelenggara:

Itech

Tanggal:

29 Maret 2023



Nama Penghargaan:

TOP BUMD 2023 #BPD - Bintang 5

Acara:

Top BUMD Award 2023

Penyelenggara:

Top Business

Tanggal:

5 April 2023



Nama Penghargaan:

TOP CEO BUMD 2023 - Busrul Iman -
Direktur Utama

Acara:

Top BUMD Award 2023

Penyelenggara:

Top Business

Tanggal:

05 April 2023



Nama Penghargaan:

BUMD Pendukung Ekspor

Acara:

East Java International Trade Festival

Penyelenggara:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur

Tanggal:

30 Mei 2023



Nama Penghargaan:

Best Leader for Sustainability
Acceleration Through Synergy and
Expansion of Regional Digitalization

Acara:

Indonesia Financial Top Leader Awards
2023

Penyelenggara:

Warta Ekonomi

Tanggal:

31 Mei 2023



Nama Penghargaan:

Emiten Kategori High Dividen

Acara:

Launching Indeks Tempo-IDN
Financials 52

Penyelenggara:

Tempo

Tanggal:

23 Juni 2023



Nama Penghargaan:
Best Bank 2023 For the Provision of
Facilities and Market Access for MSME's

Acara:
Best Bank Awards 2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
24 Juli 2023



Nama Penghargaan:
The Best Financial Performance Bank in
2022 (KBMI 2)

Acara:
28th Infobank Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Agustus 2023



Nama Penghargaan:
Excellent Financial Performance Bank
in 2022

Acara:
28th Infobank Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
25 Agustus 2023



Nama Penghargaan:
Best BUMD Digital Innovation
"Excellent Award for Strategic Initiative
Jconnect Pro"

Acara:
Indonesia Awards 2023

Penyelenggara:
Inews

Tanggal:
31 Agustus 2023



Nama Penghargaan:
The Most Comitted GRC Leader 2023
"Busrul Iman Direktur Utama"

Acara:
TOP GRC Awards 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
6 September 2023



Nama Penghargaan:
TOP GRC Awards #star 5

Acara:
TOP GRC Awards 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
6 September 2023



Nama Penghargaan:
Top 50 Emiten Terbaik dengan
Kapitalisasi Menengah (MidCap PLCs)
Kategori The Best Financial Sector

Acara:
Corporate Governance Conference
Award 2023

Penyelenggara:
Indonesia Institute for Corporate
Directorship (IICD)

Tanggal:
18 September 2023



Nama Penghargaan:
ICAI Bank Jatim kategori Inovasi Produk
& Model Bisnis 5 pilar Transformasi

Acara:
IDX Channel nuergerah Inovasi Indonesia
(ICAI)

Penyelenggara:
IDX Channel

Tanggal:
20 September 2023



Nama Penghargaan:
Peringkat III BPD Kategori Besar

Acara:
BUMD Awards 2023

Penyelenggara:
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Tanggal:
29 September 2023



Nama Penghargaan:
Best Chief Financial Officer (CFO) 2023

Acara:
Orchestrating Financial Resources &
Strategy to achieve top performance

Penyelenggara:
SWA Media

Tanggal:
4 Oktober 2023



Nama Penghargaan:
Gold Rank

Acara:
The Asia Sustainability Reporting Rating
(ASRRAT)

Penyelenggara:
National Center for Corporate Reporting
(NCCR)

Tanggal:
6 November 2023



Nama Penghargaan:
Most Expansive Regional Bank in Micro
& SME Lending

Acara:
Road to CNBC Indonesia Awards 2023

Penyelenggara:
CNBC Awards

Tanggal:
10 November 2023



Nama Penghargaan:
The Best Innovation in Regional Banking

Acara:
CSA Awards 2023

Penyelenggara:
Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan
CSA Community

Tanggal:
23 November 2023



Nama Penghargaan:
Juara 1 kategori Perusahaan BUMD
Keuangan

Acara:
Annual Report Awards (ARA) 2022

Penyelenggara:
Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tanggal:
27 November 2023



Nama Penghargaan:
Komiten Pembinaan UMKM Terbaik

Acara:
Anugerah Syariah Republika 2023

Penyelenggara:
Republika Group

Tanggal:
30 November 2023



Nama Penghargaan:
Top Leader on Digital Implementation
2023 "Busrul Iman"

Acara:
TOP Digital Awards 2023

Penyelenggara:
Majalah IT Works

Tanggal:
4 Desember 2023

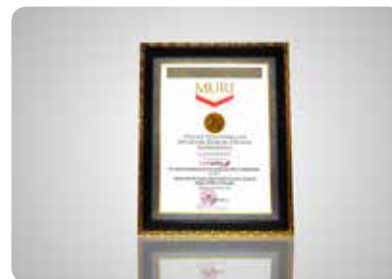


Nama Penghargaan:
Top Digital Implementation 2023 #star5

Acara:
TOP Digital Awards 2023

Penyelenggara:
Majalah IT Works

Tanggal:
4 Desember 2023



Nama Penghargaan:
Bank Daerah dengan Akad Kredit
Konsumer Serentak dengan Debitur
Terbanyak

Acara:
Akad Massal Kredit Konsumer
Bank Jatim

Penyelenggara:
MURI Indonesia

Tanggal:
12 Desember 2023



Nama Penghargaan:

Umrah Reward BPKH kategori BPD
terbaik ke 5

Acara:

BPKH Awards 2023

Penyelenggara:

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Tanggal:

15 Desember 2023



Nama Penghargaan:

BPS BPIH Pendaftar Haji terbaik 2023
terbaik ke 2

Acara:

BPKH Awards 2023

Penyelenggara:

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Tanggal:

15 Desember 2023



Nama Penghargaan:

BPS BPIH Sustainable Finance 2023
terbaik ke 3

Acara:

BPKH Awards 2023

Penyelenggara:

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Tanggal:

15 Desember 2023

SERTIFIKASI



Jenis Sertifikasi:

Sertifikat ISO/IEC 27001:2022
(Standar Internasional Sistem Manajemen Keamanan
Informasi)

Validasi:

21 Oktober 2022 – 20 Oktober 2025

Penerima Sertifikasi:

Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:

Lembaga Sertifikasi Bureau Veritas Indonesia



Jenis Sertifikasi:

ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Validasi:

18 Desember 2023 – 17 Desember 2026

Penerima Sertifikasi:

Bank Jatim

Dikeluarkan Oleh:

PT TUV Nord Indonesia

Informasi yang Tersedia di Website



Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, maka Bank Jatim telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi mengenai pemegang saham, struktur organisasi perusahaan, analisis kinerja keuangan serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, *website* Bank Jatim juga menyediakan informasi sebagai berikut;

KEBUTUHAN ANDA

Berisi tentang segala informasi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang meliputi Simpanan, Pembiayaan, Bisnis, Syariah, Layanan, Hubungan Investor, Tata Kelola Perusahaan, Bank Jatim Peduli, Suku Bunga dan Informasi.

PROFIL

Berisi tentang Profil Perusahaan, Manajemen, dan Penghargaan yang telah diraih.

KARIR

Berisi informasi mengenai Manajemen Karir dan Info Rekrutmen Bank Jatim.

MITRA UMKM

Berisi informasi tentang UMKM binaan Bank Jatim yang dapat diakses oleh masyarakat dan nasabah Bank Jatim.

INTERNET BANKING

Berisi panduan penggunaan internet banking Bank Jatim dan Portal *Internet Banking*.

DAFTAR ONLINE

Berisi tentang pilihan *e-form* kredit yang memberikan kemudahan calon nasabah dalam melakukan pengajuan kredit.

Kriteria ARA	Keterangan
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	Telah Tersedia
Isi Kode Etik	Telah Tersedia
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	Telah Tersedia
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)	Telah Tersedia
Profil Dewan Komisaris dan Direksi	Telah Tersedia
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	Telah Tersedia

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Atas Kinerja Bank





Tinjauan Perekonomian



Analisis Perekonomian Global

Data resmi tentang besarnya pertumbuhan perekonomian dunia hingga Januari 2024 masih belum secara pasti disampaikan oleh berbagai sumber. Namun, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III-2023 memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 2,9%. Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III-2023 oleh Bappenas menyatakan bahwa pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada Triwulan III-2023 dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9% (yoy), Tiongkok tumbuh 4,9% (yoy), ekonomi Jepang melambat 1,2% (yoy), Korea Selatan tumbuh 1,4% (yoy), serta Singapura tumbuh 1,1% (yoy). Bank sentral sebagian besar

negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan redanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Bank sentral di sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya seiring dengan redanya inflasi. *Federal Reserve* menahan laju kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) pada rentang 5,25%-5,50% sepanjang Triwulan III-2023 yang merupakan tingkat tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan lonjakan inflasi sejak *lockdown* Covid-19 telah turun tajam dari tingkat tahunan sebesar 9,1% pada bulan Juni 2023, lalu menjadi 3,7% pada September 2023. Namun, tingkat inflasi ini masih berada di atas target *The Fed* sebesar 2% di tengah sinyal masih adanya kenaikan harga.

Berikut informasi suku bunga acuan di beberapa negara BRICS, ASEAN-5 dan negara maju.

Tabel Suku Bunga Acuan Beberapa Negara

(dalam %)

Negara	Juli	Agustus	September
BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA, SOUTH AFRICA (BRICS)			
Brazil	13,75	13,25	12,75
Rusia	8,50	12,00	13,00
India	6,50	6,50	6,50
China/Tiongkok	3,55	3,45	3,45
Afrika Selatan	8,25	8,25	8,25
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) 5			
Indonesia	5,75	5,75	5,75
Thailand	2,00	2,25	2,50
Filipina	6,25	6,25	6,25
Malaysia	3,00	3,00	3,00
Vietnam	4,50	4,00	4,50
NEGARA MAJU			
Amerika Serikat	5,25-5,50	5,25-5,50	5,25-5,50
Jepang	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Korea Selatan	3,50	3,50	3,50

Sumber: CEIC, People's Bank of China (PBoC)

Jepang mempertahankan kebijakan moneter yang longgar dengan tingkat suku bunga negatif tidak berubah pada level -0,1% mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap prospek pertumbuhan di dalam negeri dan global. Hal yang sama dilakukan oleh Bank of Korea yang mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil pada tingkat 3,5% karena berupaya membatasi inflasi konsumen dan utang rumah tangga sambil mempertimbangkan peningkatan risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi.

Rusia menaikkan suku bunganya dengan agresif pada Triwulan III-2023. Kenaikan pada bulan Agustus mencapai 350 bps dari 8,5% menjadi 12,0%. Keputusan bank sentral Rusia ini diambil untuk mempertahankan nilai Rubel yang jatuh dan juga sebagai upaya membentuk kondisi moneter dan dinamika permintaan domestik untuk mengembalikan inflasi ke 4% pada tahun 2024. Lebih lanjut, bank sentral Rusia kembali menaikkan suku bunganya sebanyak 100 bps pada Triwulan III-2023 menjadi 13%.

Brasil menetapkan pemotongan tingkat suku bunga Selic-nya sebanyak dua kali pada Triwulan III-2023 dengan penurunan masing-masing sebesar 50 bps. Lingkungan global menjadi semakin tidak menentu, dengan terus berlanjutnya proses inflasi yang semakin melandai, meskipun terdapat kondisi inflasi

inti yang tinggi dan ketahanan pasar tenaga kerja di banyak negara menjadi alasan Banco Central do Brasil menurunkan suku bunganya. Suku bunga Brasil berada pada level 12,75% pada akhir Triwulan III-2023.

Tiongkok memangkas suku bunga satu tahunnya menjadi 3,45% pada Triwulan III-2023 di tengah hambatan sektor properti yang semakin dalam meskipun banyak langkah stimulus yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Negara-negara ASEAN-5 cenderung mempertahankan tingkat suku bunga acuannya tidak berubah sepanjang Triwulan III-2023, kecuali Thailand. Thailand menaikkan suku bunga sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 bps dan berada pada level 2,50% pada Triwulan III-2023. Bank sentral menilai bahwa tingkat suku bunga kini telah mencapai tingkat netral dan sesuai untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara.

Sumber:

- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III-2023, Bank Indonesia, Oktober 2023
- *World Economic Outlook*, International Monetary Fund (IMF), Oktober 2023
- Global Economic Data, Indicators, Charts and Forecasts, CEIC, 2023
- Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III-2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, November 2023



Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia Triwulan III-2023 tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan II-2022 yang sebesar 5,73% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman, sedikitnya momen hari besar keagamaan dan tidak adanya momen hari raya pada sepanjang Triwulan III-2023 yang dapat mendorong aktivitas konsumsi.

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

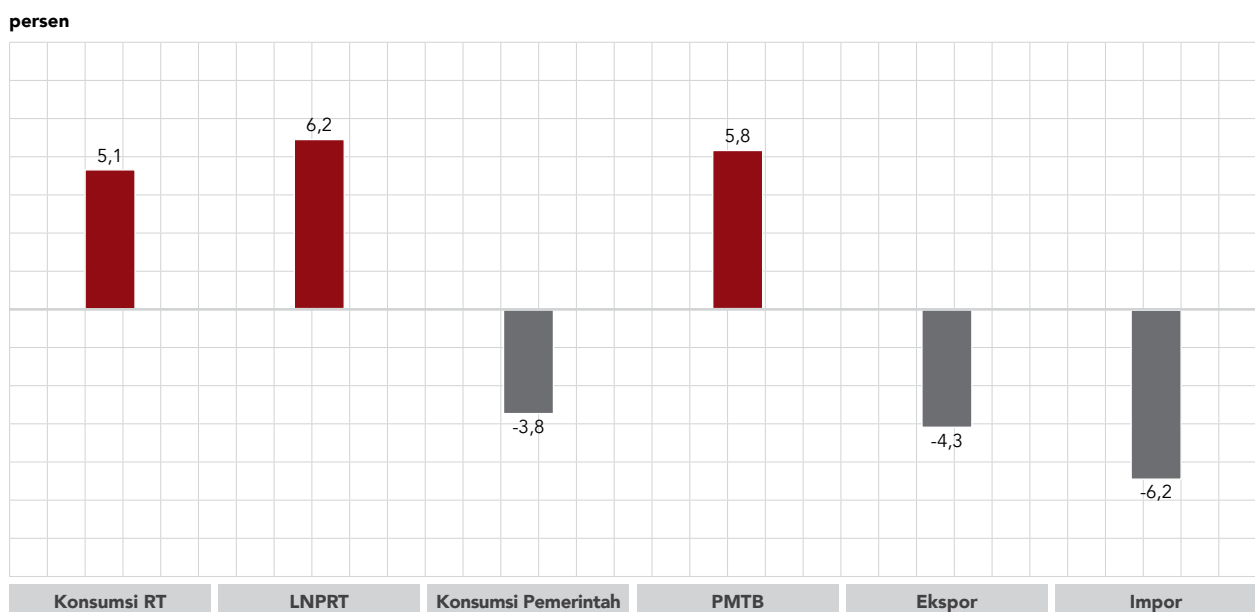
(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2023

Gambar Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sisi Pengeluaran Triwulan III-2023

(dalam %)



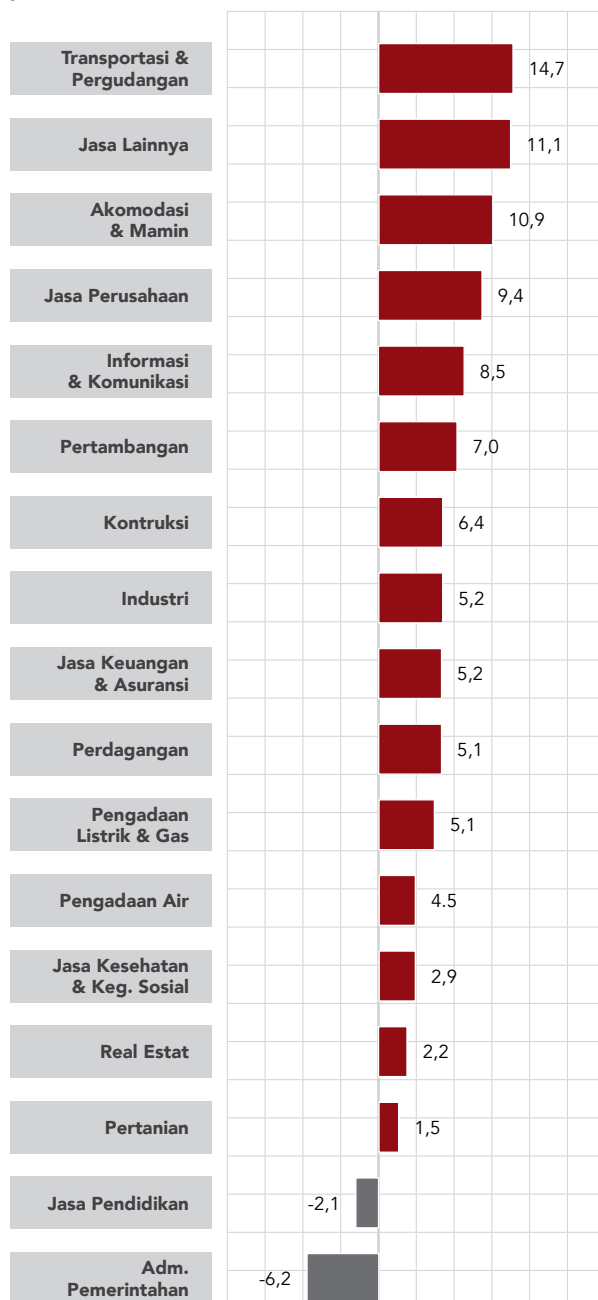
Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2023



Dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen PDB tetap tumbuh, namun sebagian lagi berkontraksi yaitu konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh 6,2% meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,8%. Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh 5,1%, sejalan dengan tetap kuatnya daya beli masyarakat seiring dengan terkendalinya inflasi.

Gambar Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sisi Produksi Triwulan III-2023

persen



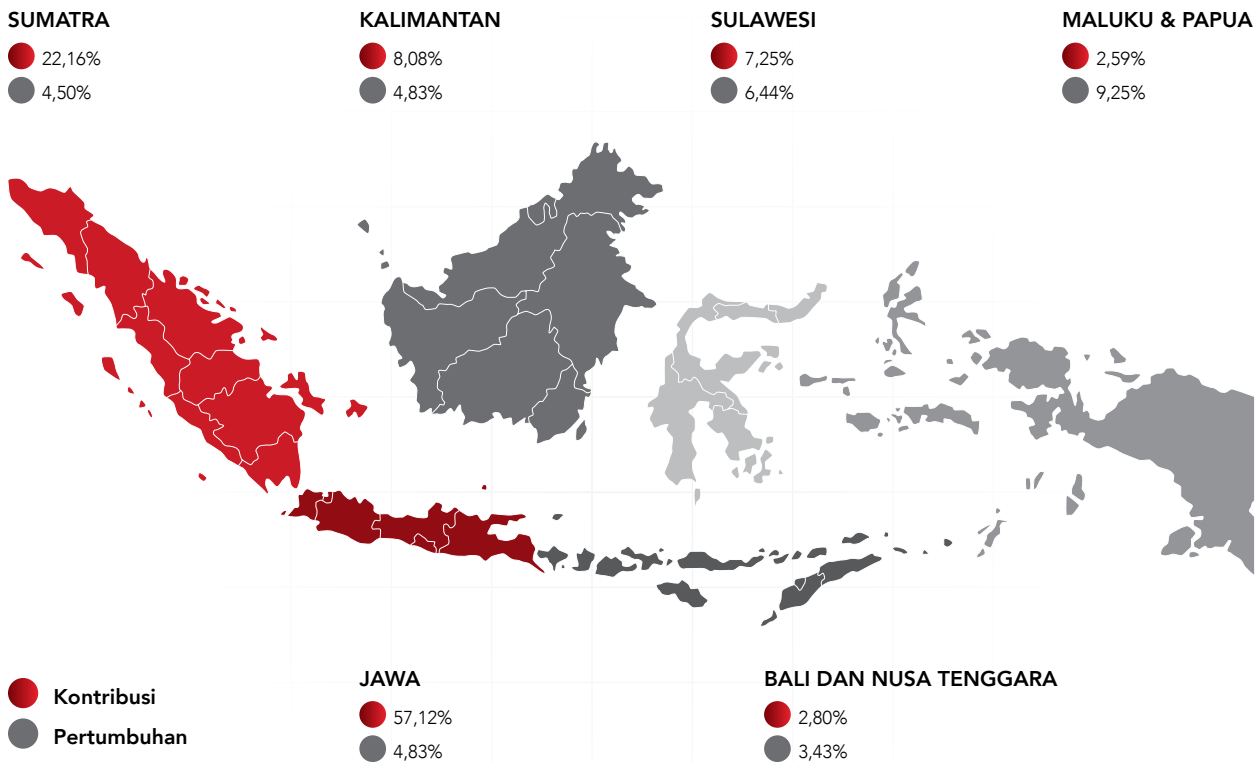
Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2023

Dari sisi lapangan usaha (produksi), hampir seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif, kecuali Jasa Pendidikan dan Administrasi Pemerintahan yang masing-masing berkontraksi 2,1% dan 6,2%. Administrasi pemerintahan merupakan salah satu sektor yang mengalami kontraksi pada Triwulan III-2023, menurunnya kinerja sektor ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja pegawai pada APBN, daya serap belanja pegawai Triwulan III-2023 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III-2022.

Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,7%, Jasa Lainnya sebesar 11,1%, serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,9%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni Transportasi dan Pergudangan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2023 masih disumbangkan oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan peranan terhadap PDB sebesar 57,12%, diikuti Pulau Sumatra sebesar 22,16%, Pulau Kalimantan sebesar 8,08%, Pulau Sulawesi sebesar 7,25%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,80%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,59%. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2023 dibanding Triwulan III-2022 (yoy) mengalami pertumbuhan yang melambat di hampir seluruh wilayah Indonesia, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 9,25%, diikuti Pulau Sulawesi sebesar 6,44%, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa sebesar 4,83%, Pulau Sumatera sebesar 4,50%, dan pertumbuhan terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang tumbuh sebesar 3,43%.

Gambar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2023

Meski mengalami tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, nilai tukar Rupiah tetap stabil pada Triwulan III-2023. Rata-rata nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.216 per USD pada Triwulan III-2023, melemah sebesar 1,95% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan III-2022.

Inflasi domestik pada Triwulan III-2023 mengalami tren penurunan, secara berturut-turut inflasi tahunan (yoy) pada bulan Juli hingga September sebesar 3,08%, 3,27%, dan 2,28%. Terjaganya inflasi dalam rentang sasaran tidak terlepas

dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) diantaranya melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Sumber:

- Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III-2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, November 2023
- Badan Pusat Statistik, November 2023

Analisis Industri Perbankan

Secara umum kinerja perbankan nasional masih cukup baik yang tercermin dari sejumlah indikator kinerja perbankan yang tetap baik dan berada di level aman. Kinerja perbankan nasional secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel Kinerja Perbankan Nasional

Uraian	September 2023	2022	2021	2020	2019
INTERMEDIASI					
Kredit Perbankan	Rp6.907,5 triliun	Rp6.498,6 triliun	Rp5.820,6 triliun	Rp5.547,6 triliun	Rp5.683,8 triliun
	8,99% (yoy)	11,6% (yoy)	4,92% (yoy)	(2,40%) (yoy)	6,08% (yoy)
DPK Perbankan	Rp8.147,1 triliun	Rp8.153,6 triliun	Rp7.479,4 triliun	Rp6.665,4 triliun	Rp5.998,6 triliun
	6,54% (yoy)	9,01% (yoy)	12,21% (yoy)	11,11% (yoy)	6,54% (yoy)



Uraian	September 2023	2022	2021	2020	2019
PERMODALAN					
CAR Perbankan	27,43%	25,62%	25,66%	23,89%	23,40%
SUKU BUNGA PERBANKAN					
BI Rate	5,75%	5,60%	3,50%	3,75%	5,00%
RASIO LJK					
Risiko Kredit					
NPL Gross Perbankan	2,43%	2,44%	3,00%	3,06%	2,53%
Risiko Likuiditas					
LDR Perbankan	84,00%	78,98%	77,49%	82,54%	94,43%

Keterangan dan Sumber:

- Angka kredit termasuk kepada pihak ketiga bukan bank bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)
- Kinerja perbankan syariah bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)
- BI Rate menggunakan BI – 7 DRR bersumber dari Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga *deposit facility* sebesar 5,00%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 6,50%. Keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.

Intermediasi perbankan terus melanjutkan perbaikan. Kredit perbankan pada September 2023 tumbuh 8,99% (yoy), didukung oleh *appetite* bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,69% (yoy) pada September 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusif, dan ekonomi hijau. Ketahanan stabilitas sistem keuangan juga dipengaruhi oleh permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,43% pada September 2023. Sementara itu, risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang rendah yakni sebesar 2,43% (*gross*).

Ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga ditopang dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,54% (yoy) pada September 2023. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 25,83%. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap

perkembangan suku bunga perbankan, suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 (satu) bulan dan suku bunga kredit pada September 2023 masing-masing terjaga pada 4,28% dan 9,36%. Hasil *stress-test* Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada Triwulan III-2023, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 10,34% (yoy) sehingga mencapai Rp116,54 triliun, sementara nilai transaksi *digital banking* tercatat Rp15.148,71 triliun atau tumbuh sebesar 12,83% (yoy). Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 87,90% (yoy) dan mencapai Rp56,92 triliun, dengan jumlah pengguna 41,84 juta dan jumlah *merchant* 29,04 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp2.041,72 triliun atau turun sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Triwulan III-2023 meningkat 6,16% (yoy) sehingga menjadi Rp961,59 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang Rupiah ke daerah Terluar, Terdepan, Terpencil (3T) serta kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

Sumber:

- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III-2023, Bank Indonesia, Oktober 2023
- Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, September 2023



Analisis Posisi Bank Jatim dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja Bank Jatim terhadap Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) dan Industri Perbankan, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan dan perbandingan rasio Bank Jatim dengan rata-rata BPD SI dan Industri Perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Jatim Dibanding Rata-Rata KBMI dan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Kinerja	Bank Jatim			Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)			Industri Perbankan		
	September 2023	September 2022	Pertumbuhan (yoy)	September 2023	September 2022	Pertumbuhan (yoy)	September 2023	September 2022	Pertumbuhan (yoy)
Aset	107.038	98.477	8,69%	945.728	904.090	4,61%	4.668.797	4.323.082	8,00%
Kredit	51.773	45.976	12,61%	605.595	556.395	8,84%	6.907.547	6.337.684	8,99%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	84.191	82.982	1,46%	735.657	712.809	3,21%	8.147.169	7.647.334	6,54%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan September 2023; Data Internal Bank Jatim

Secara umum, komponen kinerja utama Bank Jatim periode September (% yoy) mengalami peningkatan pada komponen aset, kredit dan total DPK. Kenaikan signifikan terjadi pada komponen kredit yang tumbuh positif sebesar 12,61% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan dan BPD SI. Selain kredit, komponen aset juga mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan

dan BPD SI. Sementara itu, komponen total DPK juga mengalami peningkatan tetapi masih di bawah pertumbuhan industri perbankan dan BPD SI. Peningkatan pertumbuhan komponen kredit yang cukup signifikan merupakan salah satu indikator peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang telah dilakukan oleh Bank Jatim.

Tabel Perbandingan Rasio Bank Dibanding Rata-Rata Industri

(dalam %)

Rasio	September 2023			September 2022		
	Bank Jatim	Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)	Industri Perbankan	Bank Jatim	Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI)	Industri Perbankan
Net Interest Margin (NIM)	5,38	5,46	4,96	5,17	5,80	4,86
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,74	2,32	2,43	3,72	2,33	2,44
Return on Assets (ROA)	1,87	1,98	2,76	2,02	2,21	2,53
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,80	24,61	27,43	22,65	22,49	25,62
Loan to Deposit Ratio (LDR)	61,49	81,09	84,00	55,40	77,26	78,98
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	76,23	78,64	76,34	74,24	75,19	77,18

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan September 2023; Data Internal Bank Jatim

Rasio kinerja Bank Jatim periode September 2023 terdapat komponen yang tergolong lebih baik dibandingkan rasio kinerja industri perbankan maupun kelompok BPD SI, yaitu pada kinerja BOPO sebesar 76,23% yang menunjukkan bahwa aktivitas operasional Bank Jatim tergolong lebih efisien dibandingkan industri perbankan maupun BPD SI. Sedangkan pada rasio yang lainnya yaitu NIM sebesar 5,38% lebih baik dibandingkan industri perbankan yang sebesar 4,96%. Sedangkan dari komponen rasio modal yaitu CAR periode September 2023, Bank Jatim lebih baik dibandingkan BPD

SI dimana rasio CAR Bank Jatim sebesar 25,80% sedangkan BPD SI sebesar 24,61%. Dari sisi NPL gross, dibandingkan dengan kelompok industri perbankan maupun BPD SI, NPL gross Bank Jatim periode September 2023 merupakan yang tertinggi mencapai 2,74%, namun mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan periode September tahun 2022 yang sebesar 3,72%. Sementara itu, sejalan dengan NPL, rasio LDR Bank Jatim periode September 2023 juga merupakan yang terendah di antara BPD SI dan Industri Perbankan yaitu di angka 61,49%.



Tinjauan Operasional

Strategi Bank

Strategi Jangka Pendek

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini. Manajemen Bank Jatim telah merumuskan fokus strategis yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Perubahan model bisnis dari per *skim* kredit menjadi segmentasi berdasarkan *plafond*
 - a. Kredit Konsumer
 - b. Kredit Mikro Ritel dan Menengah
 - c. Kredit Komersial dan Korporasi
2. Reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan Cabang Kelas 1.
3. Perubahan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut.
4. Meningkatkan aset non organik dengan aksi korporasi melakukan penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah yang dilanjutkan ke tahapan Kelompok Usaha Bank (KUB).
5. Meningkatkan *fee based income* dengan menambah fitur *e-channel* Bank Jatim.
6. Meningkatkan penghimpunan Dana Non Pemerintah Daerah (Pemda) dengan meningkatkan *Current Account Saving Account* (CASA).
7. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain mengevaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
8. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain:
 - a. Melakukan *workload analysis* dan *mapping* kebutuhan SDM.
 - b. Menyusun mekanisme *talent pool* dan *career path* bagi SDM dengan memperhatikan misi menjadi bank berbasis TI dan Digital.
 - c. Menyusun program peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan secara bagi nasabah dengan meluncurkan J-Connect sebagai *branding digital banking* Bank Jatim
9. Meningkatkan *cyber security* antara lain:
 - a. Pengelolaan keamanan *cyber*.
 - b. Kewajiban penilaian risiko *cyber*.
 - c. Kewajiban pengujian kerentanan teknologi informasi Bank.
 - d. Penilaian tingkat maturitas *cyber*.
 - e. Pelaksanaan pengujian keamanan *cyber* Bank.

10. Implementasi secara berkelanjutan untuk:

- a. *Corporate Culture* sebagai upaya Bank agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dan memiliki pegawai yang berintegritas.
- b. Pembangunan budaya risiko (*risk culture*) secara berkelanjutan melalui perbaikan profil risiko terutama yang memiliki kelemahan minor.
- c. Budaya Kepatuhan, melalui *road map* perbaikan *Good Corporate Governance* (GCG) agar berada di peringkat 2.
- d. Budaya Layanan, melalui program yang terukur agar dapat mencapai peringkat ke 1 (satu) kategori BPD versi *Marketing Research Indonesia* (MRI). Budaya layanan ditujukan untuk melebihi harapan pelanggan dengan menciptakan layanan yang unggul.
- e. Budaya Pemasaran, dimana setiap pegawai adalah pemasar khususnya yang berada di *front liner* perlu senantiasa dibekali oleh pengetahuan yang cukup mengenai produk dan juga target yang terukur.

Untuk mendukung fokus strategi tersebut, Bank Jatim juga merumuskan fokus strategi pendukung bisnis tahun 2023 sebagai berikut:

1. Reposisi jaringan khususnya wilayah Surabaya dan Cabang Kelas 1.
2. Perubahan struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan bisnis tersebut.
3. Memperkuat proses *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelesaian kredit bermasalah antara lain dengan mengevaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah.
4. Evaluasi kinerja divisi agar lebih efektif dan efisien.
5. Perbaikan *Service Level Agreement* (SLA).
6. Evaluasi implementasi struktur organisasi baru.
7. Peningkatan kualitas SDM melalui aktivitas pelatihan.
8. Perbaikan remunerasi.
9. Evaluasi dan implementasi *reward and punishment*.
10. Memperbaiki sistem *recruitment* pegawai baru.
11. Penguatan budaya kerja perusahaan melalui *training change agent*.
12. Menetapkan budaya kerja dalam KPI di tahun 2023.
13. *Roadmap* Perbaikan GCG agar berada di Peringkat 2 di tahun 2023.
14. Menjaga rata-rata peringkat profil risiko agar berada pada skor 2.
15. Perbaikan kualitas standar layanan menjadi peringkat ke -2 di antara BPD Seluruh Indonesia di tahun 2023.



Strategi Jangka Menengah

Dalam jangka menengah tahun 2023 - 2024, *road map grand strategy* berada pada fase penyempurnaan (*fine tuning*) perangkat bisnis dan pendukungnya. Pada fase ini ekspansi usaha dilakukan dengan memanfaatkan kapabilitas yang telah ditingkatkan pada tahun pertama. Target jangka menengah meliputi:

1. Pengembangan digitalisasi bisnis dan *supporting*.
2. Evaluasi dan penyempurnaan *competitive advantage* dan *value proposition* seluruh produk kredit, dana dan jasa.

Sedangkan target kualitatif jangka menengah meliputi:

1. Standard Layanan mencapai posisi ke-2 (dua) *Best Overall Performance Service Excellent* dari penilaian *Marketing Research Indonesia (MRI)* pada tahun 2023 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.
2. Prediksi profil risiko jangka menengah di tahun 2023 berada pada tren 'Stabil' untuk semua jenis risiko.
3. Peningkatan *human capital* yang unggul, berdaya saing dan profesional.
4. Tumbuh di atas rata-rata penghimpunan DPK industri perbankan.
5. Meningkatkan porsi dana murah dengan rasio CASA $\geq 59,81\%$.

6. Digitalisasi produk dana dan kredit.
7. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak.
8. Memperkecil *gap* kredit dengan Bank BJB dan Bank Jateng.
9. Berkontribusi terhadap proyek-proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Timur.
10. Perbaikan *business process*.
11. Manajemen produk yang baik.
12. Tumbuh di atas rata-rata industri perbankan nasional.
13. Strategi pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan, serta pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan dan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah yang dilanjutkan ke tahapan Kelompok Usaha Bank (KUB).
14. Optimalisasi peran treasury.
15. Peningkatan *fee based income*.
16. Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp10 triliun dapat direncanakan kembali dalam RBB tahun 2023 sebagai alternatif rencana pendanaan jangka panjang bank dengan menyesuaikan kondisi likuiditas pasar pada tahun 2023.





Strategi Jangka Panjang

Bank Jatim memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) 2022-2026. Visi antara periode *Corporate Plan* 2022-2026 Bank Jatim yaitu “Menjadi BPD No.1 di Indonesia”. Strategi utama *Corporate Plan* 2022-2026 adalah:

1. *Selective Competency Enhancement*
Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya dengan konsentrasi pada area-area terseleksi.
2. *Selective Market Capture*
Memaksimalkan kemampuan dan akselerasi akuisisi bisnis serta eksploitasi potensi pasar perbankan dengan konsentrasi pada area-area terseleksi.

Strategi utama dikonsentrasikan pada 21 (dua puluh satu) inisiatif strategis penguatan dan pengembangan yang mencakup seluruh perspektif *balance scorecard* yang mencakup 8 (delapan) bidang dan dieksekusi dalam 3 (tiga) fase.

1. Peningkatan Kapabilitas dan Kapasitas
2. Penyempurnaan (*Fine Tuning*).
3. Percepatan Pertumbuhan dan Akuisisi Bisnis.

Selective Market Capture	 Keuangan	21. Intensifikasi <i>recovery</i> NPL dan kredit hapus buku (penyelesaian secara anorganik bersifat optional) 20. Intensifikasi sales produk kredit konsumen non-ASN (KPR, KKB), ritel UKM ¹⁾ dan korporasi sektor terseleksi, termasuk keikutsertaan dalam sindikasi terutama sindikasi berbasis keuangan berkelanjutan (pengembangan <i>asset</i> secara anorganik ^{2)/akuisisi/asset buy} bersifat opsional) 19. Intensifikasi sales produk dana dan jasa (termasuk layanan <i>retail digital payment</i> dan <i>cash management</i> Pemda dan <i>private</i>) 18. Pengembangan aliansi <i>fintech/e-commerce</i> dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas di wilayah Jawa Timur 17. Percepatan pengembangan <i>branchless banking</i> (berbasis kartu dan gadget/ <i>cardless</i>) 16. Intensifikasi aktivitas bisnis <i>trading</i> <i>trasury</i> 15. Intensifikasi sales produk <i>international banking/trade service</i>
	 Costumer	14. Penyempurnaan <i>competitive advantage</i> dan <i>value proposition</i> (kecepatan, kemudahan, keamanan dan benefit keuangan) termasuk digitalisasi produk/layanan 13. Perluasan dan intensifikasi program pemasaran dana dan kredit (<i>below and above the line</i> , kanal konvensional dan kanal digital) 12. Penyempurnaan produk dan standar layanan (kredit ritel UKM dan konsumen, produk <i>green financing</i> , DPK ritel dengan konsentrasi <i>priority banking</i>) termasuk pengembangan produk <i>green loans</i>
Selective Competency Enhancement	 Perbaikan Proses Internal	11. Penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional • Bisnis pengembangan (<i>trading treasury, trade service</i>, kredit konsumtif non ASN/ <i>fixed income</i>) • Produk <i>green financing</i> (kebijakan, tata laksana, insentif) 10. Pengembangan digitalisasi bisnis dan <i>supporting</i> 9. Penataan ulang fungsi cabang (konsentrasi pada sentra kredit dan <i>priority banking</i>) 8. Penyempurnaan manajemen risiko: • Penguatan fungsi kepatuhan (<i>internal control anti fraud</i>) • <i>Early warning system</i> risiko utama (<i>credit, market operasional</i>) 7. Penyempurnaan kebijakan risiko LST (<i>sustainable finance</i>) pada ERM dan kebijakan perkreditan 6. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efekifitas KPI) 5. Penyempurnaan kebijakan dan manajemen HC dan sistem kompensasi <i>benefit</i> (bidang bisnis dan penyelesaian kredit)
	 Pengembangan Individu dan Organisasi	4. Penyesuaian struktur organisasi: • Penguatan/pemekaran unit kerja penyelamatan dan penyelesaian kredit (<i>temporer/kondisional</i>) • Penguatan kompetensi unit IT terkait digitalisasi bisnis dan <i>supporting</i> • Pembentukan unit <i>Distribution Network</i>, CMO (<i>temporer</i>) dan <i>Learning Center</i> 3. Pemenuhan kecukupan HC: • <i>Experienced specialist</i> (<i>Treasury, Trade Service, Sales, Credit Recovery</i>) • <i>Credit</i> dan <i>funding officer</i> (RM/AO/PBO) 2. Peningkatan kompetensi individu: • <i>Credit analyst</i> (komersial, ritel UKM, termasuk <i>green financing</i>) • <i>Trade service officer</i> • <i>Sales credit</i> dan <i>funding</i> (RM/AO) 1. Intensifikasi internalisasi <i>corporate culture</i> dan turunannya (<i>sales, credit, risk and compliance</i> , digital, dan <i>performance based culture</i>)

1) Tanpa mengubah kapasitas dan kapasitas bisnis kredit konsumen berbasis penhasilan tetap

2) Kajian penyelesaian kredit NPL dan hapus buku secara anorganik (*asset sale*, sekuritisasi) dan eksekusinya menjadi bagian inisiatif strategi laver Divisi PPK pemekaran. Dimasukkan pada inisiatif strategi bankwide pada penyesuaian *corporate plan* (optional).



Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2023

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan Program Pemerintah, Bank Jatim senantiasa meningkatkan strategi pemasarannya melalui kegiatan promo yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan tema Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada nasabah kategori/kelompok tertentu.

Bank Jatim sebagai salah satu BPD yang mengelola dana pihak ketiga (DPK) dan *Number of Account* (NoA) dalam jumlah besar turut mengapresiasi nasabah dengan mengadakan kegiatan undian berhadiah pada tabungan SIKLUS dan SIMPEDA.

Bank Jatim juga konsisten di dalam kegiatan *sponsorship* yang bekerjasama dengan Pemerintah maupun swasta, melakukan promosi melalui media luar ruang terbuka seperti *videotron* dan *billboard* yang bertujuan membangun *corporate image*, *product image* dan *awareness* nasabah untuk pertumbuhan DPK dan NoA Bank Jatim.

Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan Dinas baik di level Kementerian, Provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan layanan jasa keuangan baik kepada ASN dan Non ASN, serta melakukan pengembangan produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Jatim terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur. Kolaborasi tersebut di antaranya mengakselerasi penggiatan transaksi non tunai khususnya penggunaan fasilitas *Cash Management System* (CMS) oleh Satuan Kerja (Satker) pengelola APBN, Pengembangan *dashboard* VA, Penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* pada aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPD), Bank Jatim pun telah menjadi BPD Pionir Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Strategi lainnya dilakukan di antaranya peningkatan fitur *mobile banking* dan *internet banking* korporat, khususnya transaksi *payment*. Pengembangan digitalisasi lainnya interkoneksi dengan memanfaatkan *Application Programming Interface/API* (*Open Banking*) untuk pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan memperbanyak sinergi ekosistem bekerjasama dengan perbankan/*fintech*, dalam upaya meningkatkan volume kerjasama dengan Mitra Kelembagaan.

Pangsa Pasar

Bank Jatim sebagai Bank Konvensional, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia dan industri perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank.

Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	September 2023	September 2022	Kenaikan/Penurunan
Jumlah Aset	BPD SI	945.728	904.090	41.638
	Bank Jatim	107.038	98.477	8.561
	Pangsa Pasar (%)	11,32%	10,89%	0,43%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	BPD SI	735.657	712.809	22.848
	Bank Jatim	84.191	82.982	1.209
	Pangsa Pasar (%)	11,44%	11,64%	(0,20%)
Jumlah Kredit yang diberikan	BPD SI	605.595	556.395	49.200
	Bank Jatim	51.773	45.976	5.797
	Pangsa Pasar (%)	8,55%	8,26%	0,29%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan September 2023; Data Internal Bank Jatim

Pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan BPD SI periode September 2023 baik dari segi aset dan penyaluran kredit yang diberikan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,43% dan 0,29%. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya peningkatan tersebut salah satunya dikarenakan adanya kenaikan dalam penyaluran kredit. Penyaluran kredit di Bank Jatim mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dibandingkan periode tahun lalu yaitu sebesar 12,61%. Pangsa pasar dari sisi dana pihak ketiga pada periode September 2023 mengalami penurunan 0,20% menjadi 11,44%. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan giro dikarenakan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dan Dinas, suku bunga dari kompetitor yang bersaing, dan terjadi banyak penarikan tabungan oleh nasabah.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI September Tahun 2023

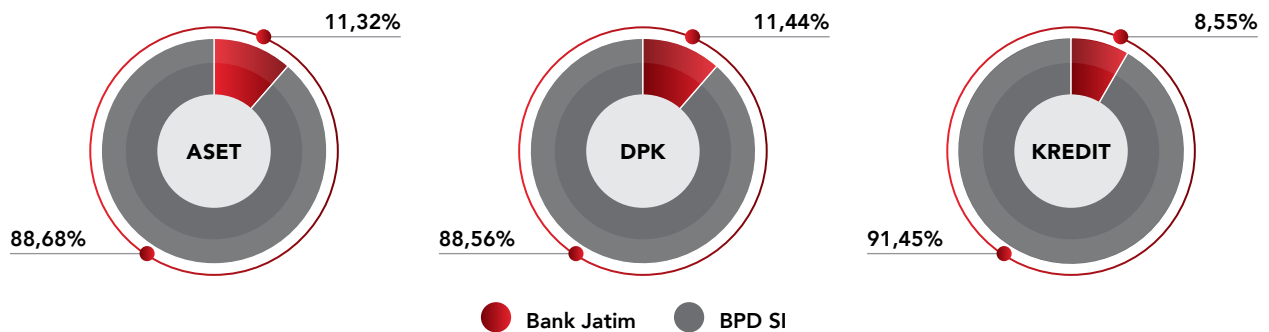
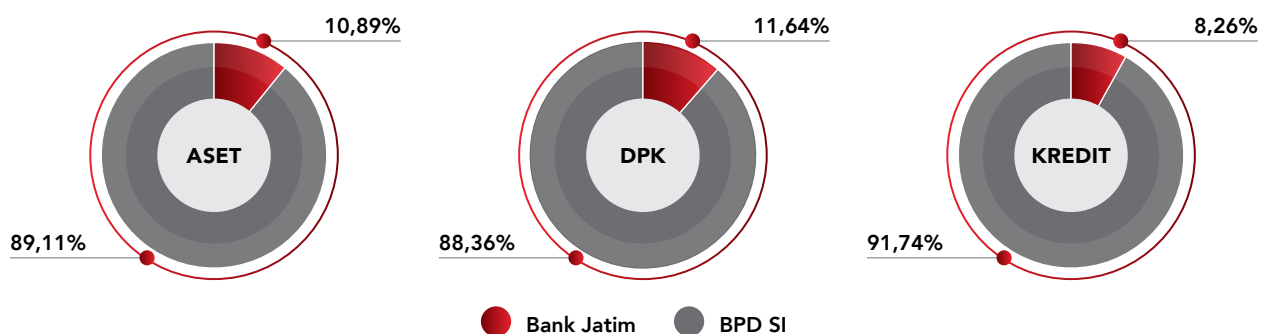
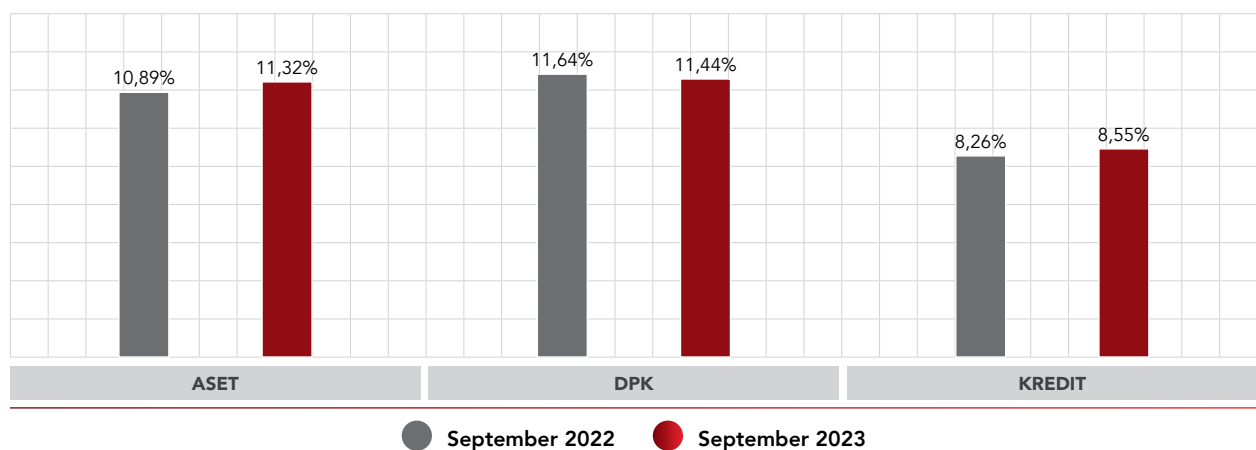


Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI September Tahun 2022



Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI September Tahun 2022-2023



Tabel Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	September 2023	September 2022	Kenaikan/Penurunan
Jumlah Aset	Industri Perbankan	4.668.797	4.323.082	345.714
	Bank Jatim	107.038	98.477	8.561
	Pangsa Pasar (%)	2,29%	2,28%	0,01%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	8.147.169	7.647.334	499.835
	Bank Jatim	84.191	82.982	1.209
	Pangsa Pasar (%)	1,03%	1,09%	(0,06%)
Jumlah Kredit yang diberikan	Industri Perbankan	6.907.547	6.337.684	569.863
	Bank Jatim	51.773	45.976	5.797
	Pangsa Pasar (%)	0,75%	0,73%	0,02%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan September 2023; Data Internal Bank Jatim

Selaras dengan pangsa pasar BPD SI, pangsa pasar Bank Jatim dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia periode September 2023 dari sisi aset dan penyaluran kredit mengalami kenaikan *market share*. Pangsa pasar berdasarkan aset periode September 2023 mencapai 2,29% dan pangsa pasar berdasarkan jumlah kredit mencapai 0,75%. Kenaikan tersebut menandakan bahwa pertumbuhan kinerja dua komponen tersebut melebihi dari pertumbuhan kinerja industri perbankan seluruh Indonesia. Perekonomian nasional dan regional yang positif turut pula menjadi salah satu faktor kenaikan pangsa

pasar tersebut. Hal ini menjadi modal baik bagi Bank Jatim untuk menyongsong kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2024.

Di sisi lain pangsa pasar berdasarkan jumlah dana pihak ketiga sedikit mengalami penurunan 0,06% dari 1,09% di periode September 2022 menjadi 1,03% di periode September 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan giro dikarenakan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dan Dinas, suku bunga dari kompetitor yang bersaing, dan terjadi banyak penarikan tabungan oleh nasabah.

Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan September Tahun 2023

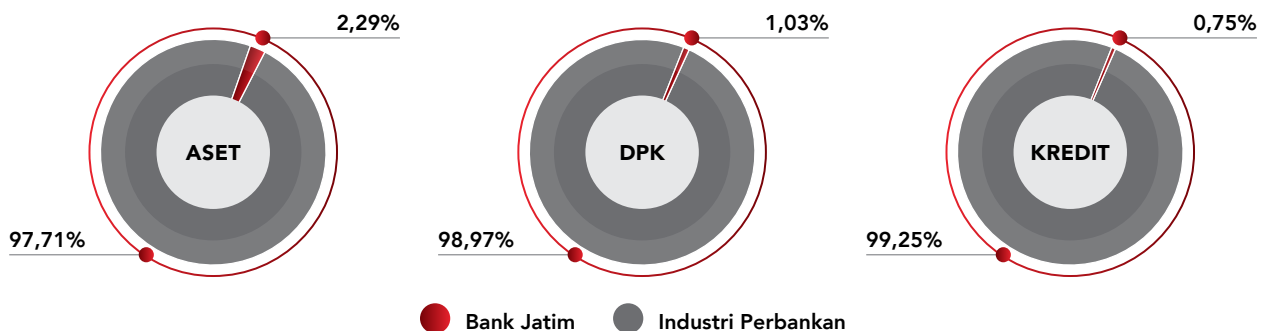
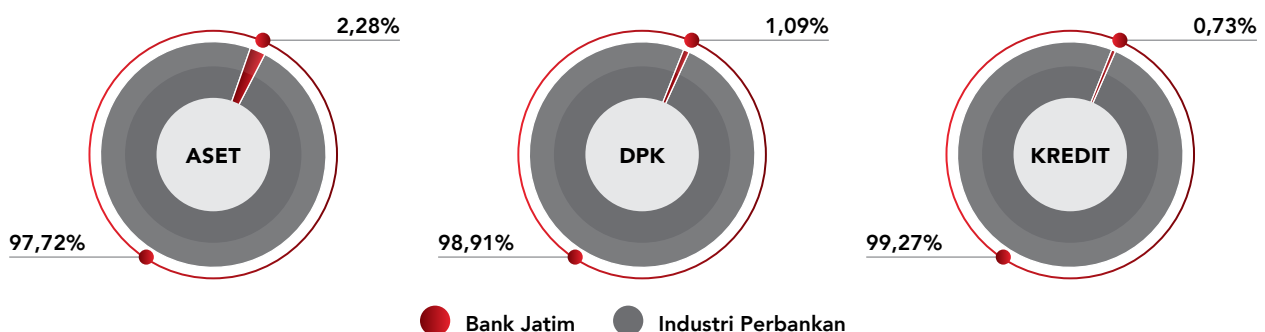
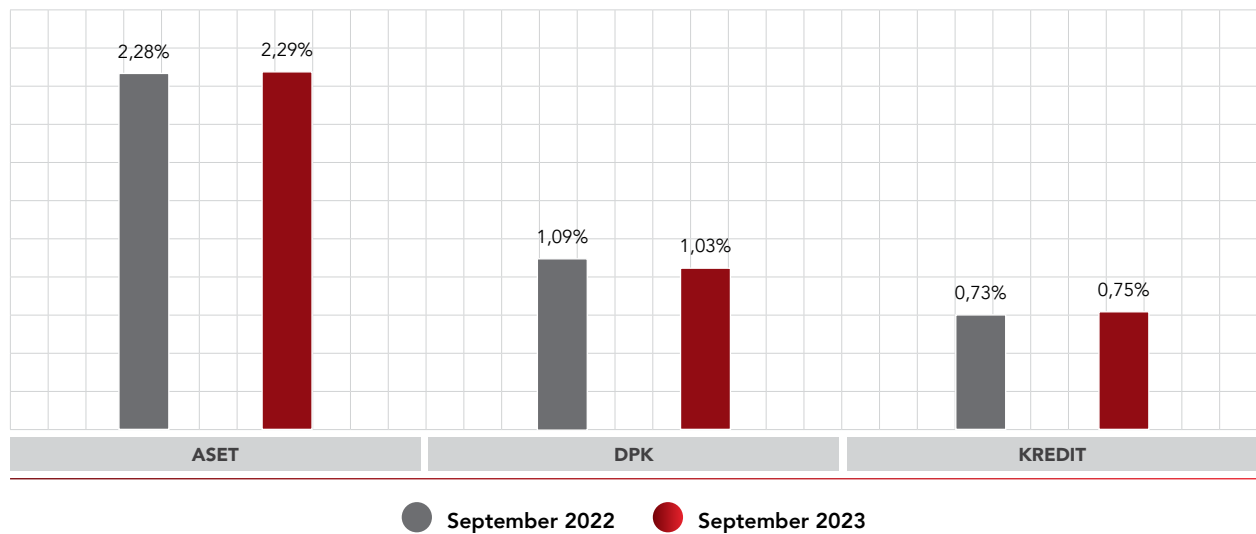


Diagram Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan Industri Perbankan September Tahun 2022



**Grafik Pangsa Pasar Bank Jatim dibandingkan BPD SI September Tahun 2022-2023**

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen Usaha Bank Jatim meliputi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Segmen Operasi meliputi Segmen Konvensional (Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Jasa Lainnya) dan Segmen Syariah (Dana Pihak Ketiga Syariah, Pembiayaan Syariah dan Jasa Lainnya Syariah).

Segmen Operasi

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen Konvensional

Segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas produk Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Jasa Layanan.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional

Uraian penjelasan dan produktivitas Segmen Konvensional Bank Jatim disajikan sebagai berikut.

KREDIT

Kredit Bank Jatim terdiri atas Kredit Mikro, Kredit Ritel dan Menengah, Kredit Komersial dan Korporasi, dan Kredit Konsumer. Penjelasan masing-masing produk kredit telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

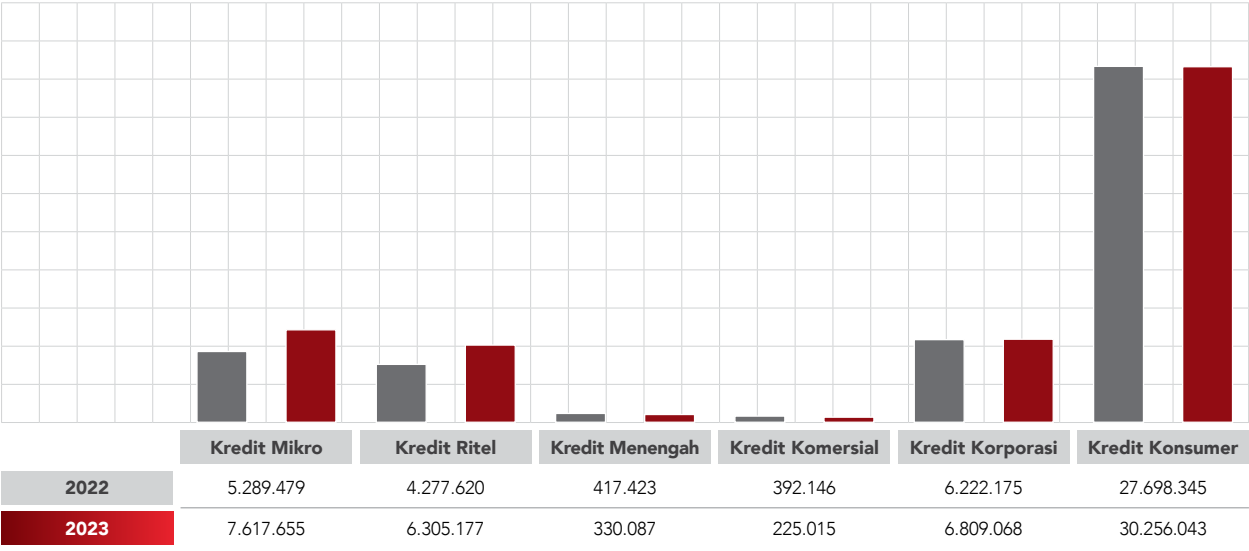
Pada tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan mengenai kelolaan debitur kredit produktif yang awalnya berdasarkan *skim* kredit menjadi berdasarkan fasilitas *plafond*. Pembagian segmentasi berdasarkan fasilitas *plafond* sebagai berikut:

- Segmen Mikro : sampai dengan Rp500 juta
- Segmen Kecil (Ritel) : > Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar
- Segmen Menengah : > Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar
- Segmen Komersial : > Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar
- Segmen Korporasi : > Rp50 miliar



Grafik Produktivitas Kredit

(dalam jutaan Rupiah)



Kredit Mikro

Kredit Mikro Bank Jatim adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun untuk kebutuhan modal kerja dengan *plafond* maksimal Rp500 juta.

Produktivitas Kredit Mikro diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Kredit Mikro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kepres	47.571	59.382	(11.811)	(19,89%)
Kredit <i>Financial Technology</i> (Amartha)	687.209	469.889	217.320	46,25%
Kredit Investasi Umum	11.498	16.225	(4.727)	(29,13%)
Kredit Jatim Mikro	2.059.514	749.308	1.310.206	174,86%
Kredit Jatim Ritel	734.348	1.239.238	(504.890)	(40,74%)
Kredit Kepada Koperasi	5.011	5.624	(613)	(10,90%)
Kredit Restrukturisasi	16.970	6.143	10.827	176,25%
Kredit SiUMI (Siklus Mikro Kecil)	29.445	76.840	(47.395)	(61,68%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3.836.075	2.384.043	1.452.032	60,91%
KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	556	1.585	(1.029)	(64,92%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	641	641	0	0,00%
Laguna	118	399	(281)	(70,43%)
Modal Kerja Umum (PRK)	186.594	277.786	(91.192)	(32,83%)
<i>Standby Loan</i>	1.105	2.059	(954)	(46,33%)
Subsidi Resi Gudang (SSRG)	1.000	0	1.000	100,00%
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	0	317	(317)	(100,00%)
Total Penyaluran Kredit Mikro	7.617.655	5.289.479	2.328.176	44,02%



Total penyaluran Kredit Mikro tahun 2023 sebesar Rp7,62 triliun, meningkat 44,02% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,45 triliun, Kredit Jatim Mikro sebesar Rp1,31 triliun dan Kredit *Financial Technology* (Amartha) sebesar Rp217,32 miliar.

Pertumbuhan *skim* Kredit KUR dan Jatim Mikro dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu

pengembangan aplikasi proses kredit mikro, *upgrading* kualitas *account officer*, *monitoring* dan evaluasi kinerja, pemberlakuan *reward* dan *punishment* atas kinerja, penyempurnaan produk segmen mikro serta *refocusing target market*. Sedangkan faktor eksternal meliputi mulai pulihnya kondisi usaha pelaku UMKM, kerjasama dengan *off take*, sinergitas dengan instansi Pemerintah dan penyaluran kepada *cluster* usaha mikro.

Tabel Jumlah NoA Kredit Mikro

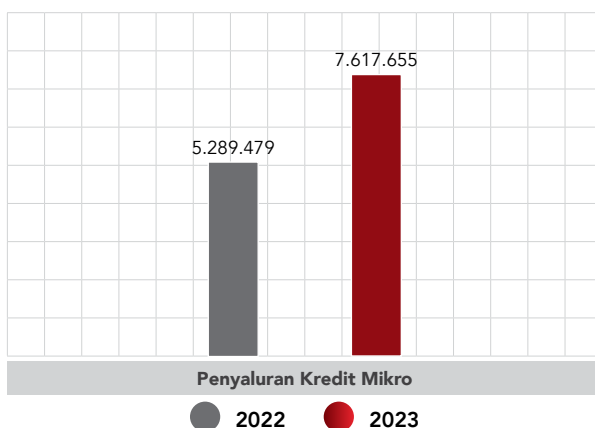
(dalam NoA)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kepres	235	1.043	(808)	(77,47%)
Kredit <i>Financial Technology</i> (Amartha)	195.102	125.440	69.662	55,53%
Kredit Investasi Umum	61	72	(11)	(15,28%)
Kredit Jatim Mikro	18.281	8.637	9.644	111,66%
Kredit Jatim Ritel	10.324	17.318	(6.994)	(40,39%)
Kredit Kepada Koperasi	189	225	(36)	(16,00%)
Kredit Restrukturisasi	108	54	54	100,00%
Kredit SiUMI (Siklus Mikro Kecil)	548	1.050	(502)	(47,81%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	39.381	23.122	16.259	70,32%
KUMK SU-005/Kredit Investasi Pemerintah (KIP)	4	17	(13)	(76,47%)
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	2	2	0	0,00%
Laguna	11	108	(97)	(89,81%)
Modal Kerja Umum (PRK)	583	875	(292)	(33,37%)
<i>Standby Loan</i>	14	34	(20)	(58,82%)
Subsidi Resi Gudang (SSRG)	2	0	2	100,00%
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)	0	59	(59)	(100,00%)
Total NoA Kredit Mikro	264.845	178.056	86.789	48,74%

Total NoA Kredit Mikro tahun 2023 sebanyak 264.845 NoA, meningkat 48,74% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 178.056 NoA. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan NoA Kredit *Financial Technology* (Amartha) sebanyak 69.662 NoA, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 16.259 NoA dan Kredit Jatim Mikro sebanyak 9.644 NoA.

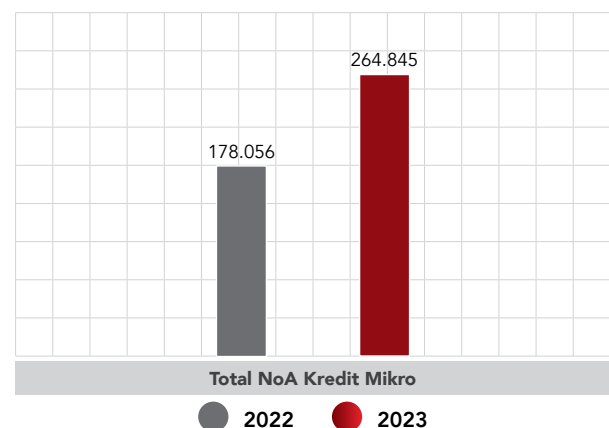
Grafik Penyaluran Kredit Mikro

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik NoA Kredit Mikro

(dalam NoA)





Strategi Kredit Mikro Tahun 2023

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang dilakukan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyaluran KUR.
2. Optimalisasi kerjasama dengan *fintech*.
3. pemberian *reward* kepada *account officer*.
4. Optimalisasi Agen Laku Pandai (Agen Jatim).
5. Digitalisasi proses kredit.
6. *Weekend banking*.
7. Pemberian *reward referral*

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Mikro

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Mikro adalah sebagai berikut:

1. Proses cepat.
2. Persyaratan mudah.
3. Suku bunga bersaing.
4. *Paperless*.
5. Digitalisasi proses kredit.

Prospek Usaha Kredit Mikro Tahun 2024

Dengan jumlah UMKM di Jawa Timur berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur saat ini sekitar 9 juta UMKM, *market share* Bank Jatim untuk pembiayaan UMKM Segmen Mikro baru dikisaran angka 0,7% atau sekitar 69.743 debitur yang dibiayai Kredit Mikro sehingga ke depannya prospek usaha Kredit Mikro Bank Jatim semakin akan baik.

Strategi Kredit Mikro Tahun 2024

Uraian mengenai strategi Kredit Mikro yang akan dilakukan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Diversifikasi *target market*.
2. Optimalisasi penyaluran KUR.
3. Digitalisasi proses kredit.
4. Kerjasama dengan *off taker* untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
5. Sinergisitas dengan instansi pemerintah.
6. Pemberian *reward referral*.

Kredit Ritel dan Menengah

Kredit Ritel dan Menengah Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafond* > Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar untuk Segmen Ritel dan > Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar untuk Segmen Menengah. Kredit Ritel dan Menengah Bank Jatim dikelola oleh Divisi Kredit Ritel dan Menengah.

Produktivitas Kredit Ritel dan Menengah disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Ritel dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	6.305.177	4.277.620	2.027.557	47,40%
Segmen Menengah	330.087	417.423	(87.336)	(20,92%)
Total Penyaluran Kredit Ritel dan Menengah	6.635.264	4.695.043	1.940.221	41,32%

Total peyaluran Kredit Ritel dan Menengah tahun 2023 sebesar Rp6,64 triliun, meningkat 41,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan peyaluran Kredit Ritel sebesar 47,40% atau Rp2,03 triliun.

Kredit Segmen Ritel pada tahun 2023 sebesar Rp6.305.177 juta, mengalami kenaikan sebesar 47,40% dibandingkan dengan posisi pada saat *cut off* segmentasi tahun 2022 yang sebesar Rp4,28 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari realisasi kredit

Jatim Ritel sebesar Rp2,23 triliun atau mengalami kenaikan 518,44% dari perolehan Kredit Jatim Ritel tahun sebelumnya.

Kredit Segmen Menengah pada tahun 2023 sebesar Rp330,09 miliar, mengalami penurunan sebesar 20,92% dibandingkan dengan posisi pada saat *cut off* segmentasi tahun 2022 yang sebesar Rp417,42 miliar. Penurunan tersebut berasal dari realisasi Kredit Investasi Umum sebesar Rp1,87 miliar atau mengalami penurunan 50,98% dari perolehan Kredit Investasi Umum tahun sebelumnya.



Tabel NoA Kredit Ritel dan Menengah

(dalam NoA)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Ritel	13.483	11.315	2.168	19,16%
Segmen Menengah	3.719	5.481	(1.762)	(32,15%)
Total NoA Kredit Ritel dan Menengah	17.202	16.796	406	2,42%

Total NoA Kredit Ritel dan Menengah tahun 2023 sebanyak 17.202 NoA, meningkat 2,42% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 16.796 NoA. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan NoA Segmen Ritel yang sebanyak 19,16% atau 2.168 NoA.

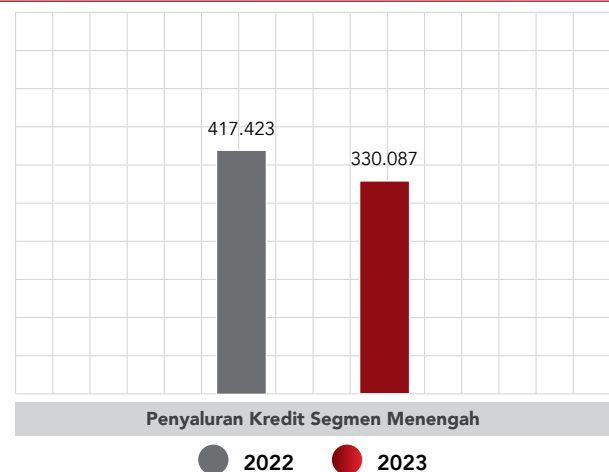
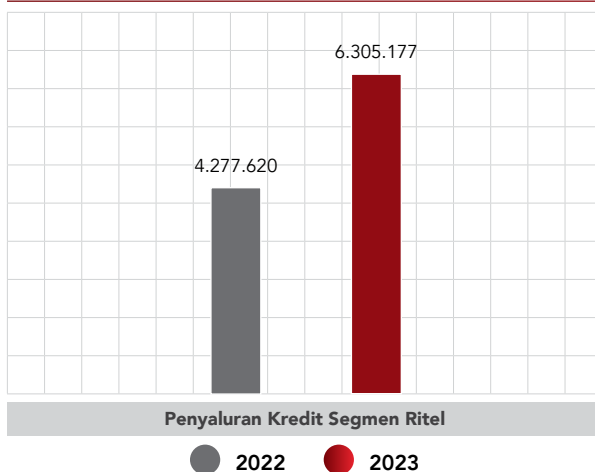
NoA Kredit Segmen Ritel pada tahun 2023 sebanyak 13.483 NoA, mengalami kenaikan sebesar 19,16% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 11.315 NoA. Kenaikan tersebut berasal dari NoA realisasi Kredit Jatim Ritel sebanyak

2.704 atau mengalami kenaikan 232,60% dari perolehan NoA Kredit Jatim Ritel tahun sebelumnya.

NoA Kredit Segmen Menengah pada tahun 2023 sebanyak 3.719 NoA, mengalami penurunan sebesar 32,15% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 5.481 NoA. Penurunan tersebut berasal dari NoA realisasi Kredit Kepres sebanyak 2 NoA atau mengalami penurunan 81,82% dari perolehan NoA kredit Kepres tahun sebelumnya.

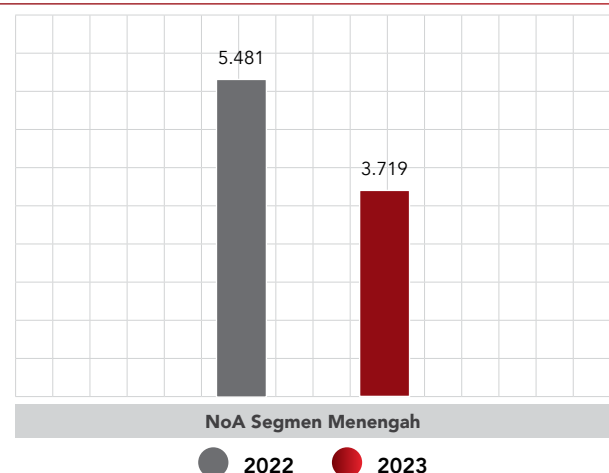
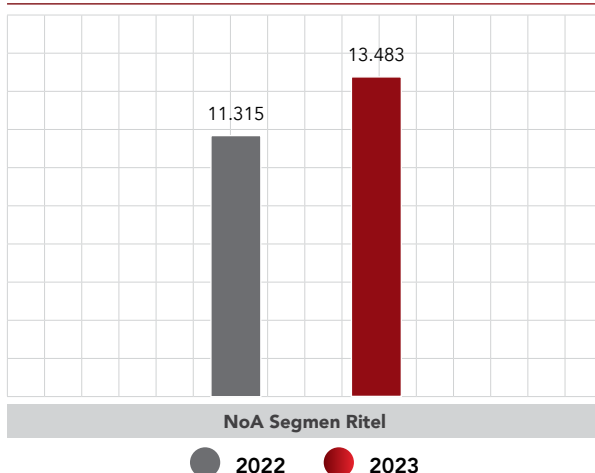
Grafik Penyaluran Kredit Ritel dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik NoA Kredit Ritel dan Menengah

(dalam NoA)





Strategi Kredit Ritel dan Menengah Tahun 2023

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel dan Menengah yang dilakukan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan ekspansi kredit agar tetap terjaga kolektibilitas kredit lancar.
2. Melakukan penetrasi pasar guna memaksimalkan penyaluran kredit kepada UMKM.
3. Melakukan pengembangan pada Aplikasi *Jconnect E-Loan* dan *Jatim Kilat* secara *mobile* sebagai salah satu cara untuk percepatan dalam proses permohonan kredit calon debitur UMKM.
4. Melakukan perbaikan ketentuan (SOP) untuk mendukung pencapaian target Divisi Kredit Ritel dan Menengah.
5. Melakukan perluasan target pasar UMKM dengan bekerjasama dengan asosiasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh BUMDES di Jawa Timur.
6. Melakukan perluasan kerjasama pembiayaan dan dana dengan BPR Perbamida dan Perbarindo.
7. Memberikan promosi produk kredit melalui media cetak/elektronik/sosial dan membuat video produk.
8. Meningkatkan *brand image* dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi atau pameran baik yang diadakan oleh Bank, Pemerintah daerah setempat, maupun kerjasama dengan berbagai instansi terkait.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Ritel dan Menengah

Keunggulan kompetitif dan inovasi Kredit Ritel dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Untuk *skim* kredit kepada koperasi untuk anggotanya (KKPA) jangka waktu kredit bisa sampai 15 tahun.
2. Untuk *skim linkage* BPR jangka waktu kreditnya bisa sampai 15 tahun.
3. Percepatan proses kredit melalui pengembangan aplikasi.
4. Suku bunga bersaing dengan bank kompetitor.
5. Skema angsuran kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

Prospek Usaha Kredit Ritel dan Menengah Tahun 2024

Divisi Kredit Ritel dan Menengah pada tahun 2024 fokus untuk memaksimalkan potensi seluruh *skim* kredit yang berada di Segmen Ritel dan Menengah. Salah satunya pembiayaan kepada kontraktor melalui *skim* kredit Kontraktor khususnya proyek yang bersumber dari dana APBD/APBN. Di sisi lain tanpa mengesampingkan pemberian kredit kepada para pelaku UMKM melalui *skim* kredit *Jatim Ritel dan Menengah*.

Strategi Kredit Ritel dan Menengah Tahun 2024

Uraian mengenai strategi Kredit Ritel dan Menengah yang akan dilakukan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pabrik Gula baik BUMN maupun Swasta.
2. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi pelaku UMKM di Jawa Timur.
3. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pameran produk UMKM.
4. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya melakukan pelatihan dan literasi keuangan kepada UMKM.
5. Bersama dengan Kementerian, Dinas dan Instansi lainnya membuat kegiatan *business matching* produk UMKM.
6. Mengikutsertakan UMKM dalam Program Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Membuat program UMKM Award.
8. Membuat *company branding* dengan produk UMKM.
9. Melakukan *gathering* dengan Asosiasi Perumahan/Developer.
10. Melakukan *gathering* dengan asosiasi pelaku usaha lainnya.
11. Melakukan evaluasi kinerja penyaluran kredit.
12. Mempromosikan aplikasi pengajuan kredit secara *online* (*Jconnect E-Loan*).
13. Mempromosikan produk kredit melalui pameran UMKM.
14. Mempromosikan produk kredit melalui media sosial Bank.
15. Melakukan pelatihan pemasaran kredit, analisa kredit dan *monitoring* kredit.
16. Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi kredit.
17. Melakukan pelatihan *trade finance*.
18. Melakukan pelatihan aspek hukum perkreditan.
19. Melakukan evaluasi pricing (*rate* dan *tarif*).
20. Melakukan evaluasi SOP Perkreditan.
21. Melakukan evaluasi aplikasi analisa kredit *E-Loan*.

Kredit Komersial dan Korporasi

Kredit Komersial dan Koperasi Bank Jatim merupakan kredit produktif dengan *plafond* > Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar untuk Segmen Komersial dan > Rp50 miliar untuk Segmen Korporasi. Kredit Komersial dan Koperasi Bank Jatim dikelola oleh Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi.



Produktivitas Kredit Komersial dan Korporasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Kredit Komersial dan Korporasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Komersial	255.015	392.146	(137.131)	(34,97%)
Segmen Korporasi *)	6.809.068	6.222.175	586.893	9,43%
Total Penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi	7.064.083	6.614.321	449.762	6,80%

*) termasuk Kredit Sindikasi

Total penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi tahun 2023 sebesar Rp7,06 triliun, meningkat 6,80% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp6,61 triliun. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan pada penyaluran kredit investasi tumbuh sebesar 2%, kredit modal kerja angsuran sebesar 96,01% dan kredit sindikasi tumbuh sebesar 12,43%.

Kredit Segmen Komersial pada tahun 2023 sebesar Rp255,02 miliar, mengalami penurunan sebesar 34,97% dibandingkan dengan posisi pada saat cut off segmentasi tahun 2022 yang

sebesar Rp392,15 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan adanya beberapa debitur bermutasi pada segmen menengah dan beberapa debitur yang dilakukan pelunasan pada tahun 2023.

Kredit Segmen Korporasi tahun 2023 sebesar Rp6,81 triliun, mengalami kenaikan sebesar 9,43% dibandingkan dengan posisi pada saat cut off segmentasi tahun 2022 yang sebesar Rp6,22 triliun. Kenaikan tersebut karena penyaluran pada investasi umum, kredit modal kerja dan sindikasi.

Tabel NoA Kredit Komersial dan Korporasi

(dalam NoA)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			NoA	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Segmen Komersial	1.234	1.538	(304)	(19,77%)
Segmen Korporasi *)	594	768	(174)	(22,66%)
Total NoA Kredit Komersial dan Korporasi	1.828	2.306	(478)	(20,73%)

*) termasuk Kredit Sindikasi

Total NoA Kredit Komersial dan Korporasi tahun 2023 sebanyak 1.828 NoA, menurun 20,73% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 2.306 NoA. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya NoA Segmen Komersial yang sebanyak 304 NoA.

NoA Kredit Segmen Komersial pada tahun 2023 sebanyak 1.234 NoA, mengalami penurunan sebesar 19,77% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 1.538 NoA. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa NoA kredit yang

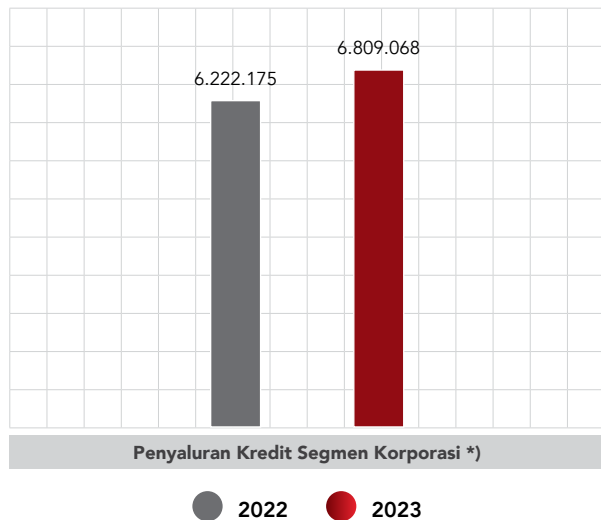
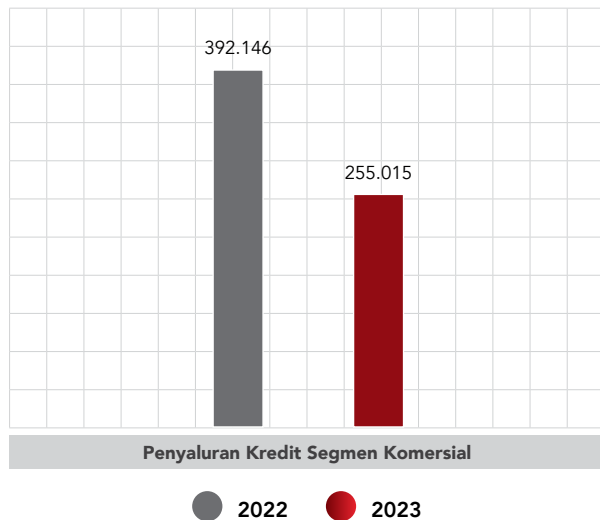
disalurkan untuk KKPA mengalami pelunasan sehingga secara signifikan NoA Segmen Komersial mengalami penurunan.

NoA Kredit Segmen Korporasi tahun 2023 sebanyak 594 NoA, mengalami penurunan sebesar 26,22% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 768 NoA. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa NoA kredit yang disalurkan untuk KKPA mengalami pelunasan sehingga secara signifikan NoA Segmen Korporasi mengalami penurunan.



Grafik Penyaluran Kredit Komersial dan Korporasi

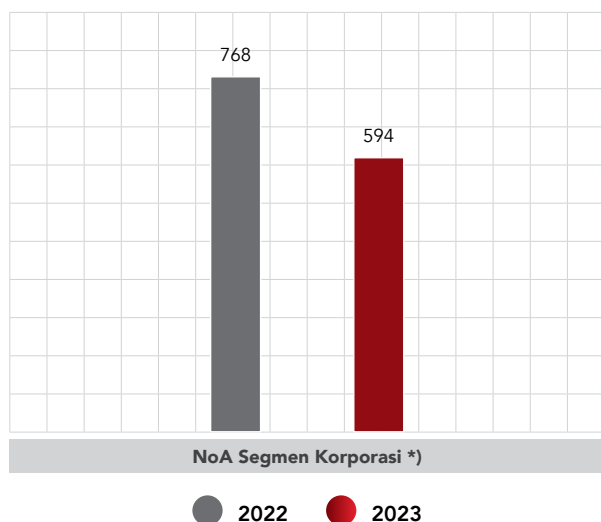
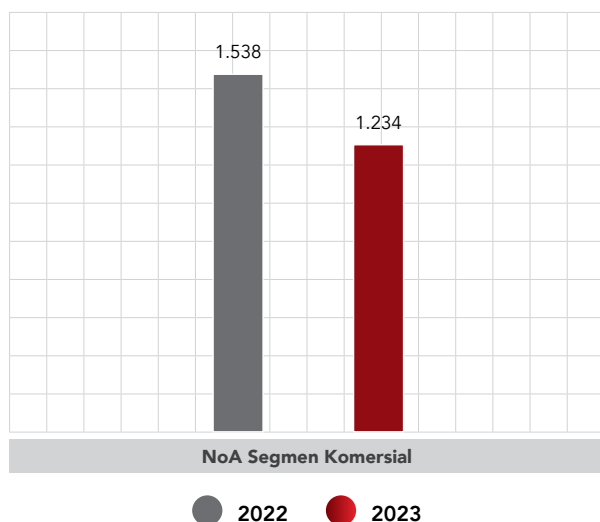
(dalam jutaan Rupiah)



*) termasuk Kredit Sindikasi

Grafik NoA Kredit Komersial dan Korporasi

(dalam NoA)



*) termasuk Kredit Sindikasi

Strategi Kredit Komersial dan Korporasi Tahun 2023

Uraian mengenai strategi yang dilakukan oleh Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* debitur atas debitur yang terganggu perputaran usahanya.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
 - a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
 - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
 - c. Penawaran kepada BUMN/BUMD dan perusahaan Swasta.
6. Melakukan sosialisasi tentang *update* SOP Divisi KKS dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas yang membidangi.



Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Komersial dan Korporasi

Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi membuka kerjasama sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan perusahaan terkait kredit piutang dengan mekanisme *Supply Chain Finance* (SCF) kepada para vendor atau *supplier*.
2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan lainnya untuk pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan sektor komoditas ekspor.

Prospek Usaha Komersial dan Korporasi Tahun 2024

Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi pada tahun 2024 fokus melakukan *prospecting* pada BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Jawa Timur atas *pipeline* yang telah dibangun baik penyaluran pembiayaan berupa bilateral maupun sindikasi.

Strategi Komersial dan Korporasi Tahun 2024

Uraian mengenai strategi yang akan dilakukan tahun 2024 oleh Divisi Kredit Komersial, Korporasi dan Sindikasi disajikan sebagai berikut:

1. Membangun *pipeline sales* secara terorganisir dan tervisualisasi.
2. Pemberian stimulus restrukturisasi kredit dan *monitoring* debitur atas debitur yang terganggu perputaran usahanya.
3. Berkolaborasi dengan bank lain untuk memberikan pembiayaan sindikasi terhadap proyek Pemerintah maupun usaha prospektif swasta.
4. Ikut berperan dalam pembiayaan hijau (berbasis ramah lingkungan)
5. Peningkatan prospek *Number of Account* (NoA) sektor-sektor potensial dengan cara:
 - a. *Mapping* sektor potensial dengan karakteristik sektor dimana terdapat potensial dan lancar.
 - b. Pendekatan kepada debitur untuk masuk ke asosiasi usaha debitur dan memperoleh *list* calon debitur.
6. Penawaran kepada BUMN/BUMD dan perusahaan Swasta.

Kredit Konsumer

Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Multiguna, Kredit Pegawai, Kredit Deposito, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Properti dan Kredit Beragun Emas. Penjelasan masing-masing produk Kredit Konsumer telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Produktivitas Kredit Konsumer diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	25.193.188	23.801.592	1.391.596	5,85%
Kredit Pegawai	2.023.504	2.077.126	(53.622)	(2,58%)
Kredit Deposito (<i>Cash Collateral Credit</i>)	773.812	75.728	698.084	921,83%
Kredit Kendaraan Bermotor	330.692	64.774	265.918	410,53%
Kredit Jaminan Emas	6.828	8.857	(2.029)	(22,91%)
Kredit Properti	1.928.019	1.666.269	261.750	15,71%
Total Penyaluran Kredit Konsumer	30.256.043	27.694.345	2.561.698	9,25%

Total Kredit Konsumer tahun 2023 mencapai Rp30,26 triliun, meningkat 9,25% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp27,70 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Kredit Multiguna sebesar Rp5,85% atau Rp1,39 triliun.

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan, *cash collateral credit* mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 921,83% yang disebabkan adanya pengajuan *cash collateral credit* dari korporasi. Pertumbuhan terbesar kedua yaitu Kredit Kendaraan Bermotor sebesar 410,53%, diikuti Kredit Properti sebesar 15,71%, dan Kredit Multiguna sebesar 5,85%, sedangkan Kredit Pegawai mengalami penurunan sebesar 2,58% dan Kredit Jaminan Emas juga menurun sebesar 22,91%.



Tabel Jumlah Debitur Kredit Konsumer

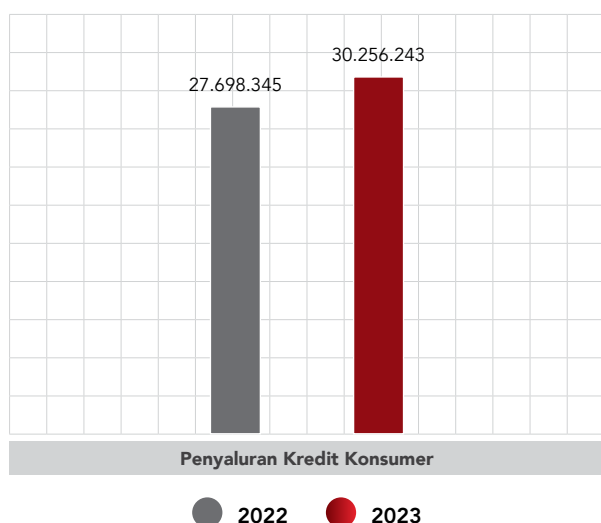
(dalam Debitur)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Debitur	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit Multiguna	269.038	245.870	23.168	9,42%
Kredit Pegawai	6.931	5.653	1.278	22,61%
Kredit Deposito (<i>Cash Collateral Credit</i>)	1.166	274	892	325,55%
Kredit Kendaraan Bermotor	2.784	991	1.793	180,93%
Kredit Jaminan Emas	202	279	(77)	(27,60%)
Kredit Properti	8.713	8.373	340	4,06%
Total Debitur Kredit Konsumer	288.834	261.441	27.393	10,48%

Sejalan dengan pertumbuhan nominal Kredit Konsumer, jumlah debitur Kredit Konsumer Bank Jatim tahun 2023 tercatat sebanyak 288.834 debitur, naik 27.393 debitur atau 10,48% dibanding dengan tahun 2022 yang sebanyak 261.441 debitur. Peningkatan jumlah debitur terutama berasal dari pertumbuhan debitur dari Kredit Multiguna yang sebanyak 23.168 debitur.

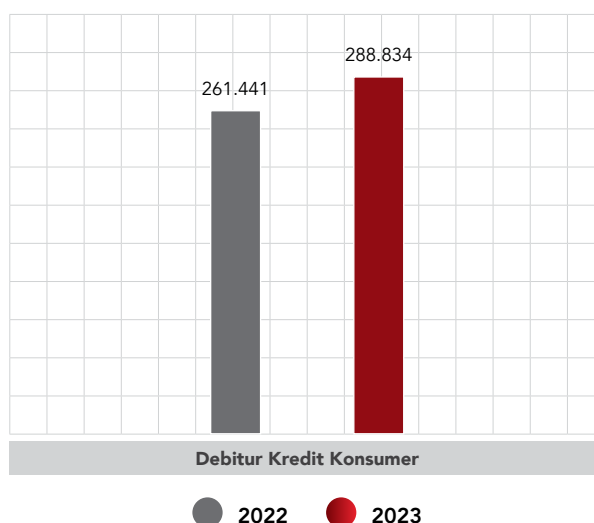
Grafik Penyaluran Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Debitur Kredit Konsumer

(dalam Debitur)



Uraian masing-masing produktivitas kredit konsumen dijabarkan sebagai berikut:

- **Kredit Multiguna**

Kredit Multiguna tahun 2023 sebesar Rp25,19 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,39 triliun atau 5,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp23,80 miliar. Jumlah debitur Kredit Multiguna mengalami kenaikan debitur atau 9,42% dari 245.870 debitur pada 2022 menjadi 269.038 debitur pada 2023.

- **Kredit Pegawai**

Kredit Pegawai tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp53 miliar atau 2,58% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,08 triliun. Penurunan *outstanding* dikarenakan tidak adanya stimulus penurunan suku bunga sejak tahun 2020, mengingat *skim* tersebut bersifat natura berupa fasilitas karyawan yang cenderung

tidak *profit oriented*. Jumlah debitur Kredit Pegawai mengalami kenaikan sebesar 1.278 debitur atau 22,61% dari 5.653 debitur pada tahun 2022 menjadi 6.931 debitur pada tahun 2023.

- **Kredit Deposito (*Cash Collateral Credit*)**

Cash collateral credit tahun 2023 sebesar Rp773,81 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp698,08 miliar atau 921,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp75,73 miliar. Jumlah debitur *cash collateral credit* mengalami kenaikan sebesar 892 debitur atau 325,55% dari 274 debitur pada tahun 2022 menjadi 1.166 debitur pada tahun 2023.

- **Kredit Kendaraan Bermotor**

Kredit Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar Rp330,69 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp265,92 miliar atau



410,53% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64,77 miliar. Jumlah debitur Kredit Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1.793 debitur atau 180,93% dari 991 debitur pada tahun 2022 menjadi 2.784 debitur pada tahun 2023.

- **Kredit Jaminan Emas**

Kredit Jaminan Emas tahun 2023 sebesar Rp6,83 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2,03 miliar atau 22,91% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8,86 miliar. Jumlah debitur Kredit Jaminan Emas mengalami penurunan sebesar 77 debitur atau 27,60% dari 279 debitur pada tahun 2022 menjadi 202 debitur pada tahun 2023. *Skim* tersebut secara *de jure* dapat di implementasikan di seluruh wilayah kerja Bank Jatim, akan tetapi pada faktanya, *skim* tersebut hanya memiliki 2 (dua) wilayah pangsa pasar di cabang Kangean dan Bawean. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan *outstanding* Kredit Jaminan Emas.

- **Kredit Properti**

Kredit Properti tahun 2023 sebesar Rp1,93 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp261,75 miliar atau 15,71% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,67 triliun. Jumlah debitur Kredit Properti mengalami kenaikan sebesar 340 debitur atau 4,06% dari 8.373 debitur pada tahun 2022 menjadi 8.713 debitur pada tahun 2023.

Strategi Kredit Konsumer Tahun 2023

Uraian mengenai strategi Kredit Konsumer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. *Mapping* dan pengolahan data potensi nasabah
Melakukan *mapping* data potensi berdasarkan data internal maupun eksternal sebagai database bagi *Account Officer* (AO) untuk memasarkan kredit disertai penyempurnaan aplikasi *Marketing Application* (MAP) sebagai alat *monitoring* kinerja pemasaran.
2. Program *Referral* untuk *Member Get Member*
Merupakan program pemberian insentif bagi nasabah yang dapat me-*referral* calon debitur di Bank.
3. Penyempurnaan aplikasi E-KMG Versi 2 dan aplikasi *Marketing* (*Marketing Application*) (MAP) bagi AO Kredit Konsumer dan Properti.
4. Promosi Kredit Multiguna
Program promosi suku bunga atau biaya untuk penyaluran KMG Prapensiun, Pensiunan, *take over*, penambahan NoA baru dan *top up* (segmen debitur loyall)
5. Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Bank melakukan kerjasama dengan PTN/PTS dalam penyaluran Kredit Multiguna Pendidikan.
6. Penyaluran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Pengembangan dari KKPD *Virtual* yang sudah menjadi target dari Bank Indonesia untuk memaksimalkan transaksi anggaran dan belanja Pemerintah Daerah.
7. Optimalisasi pemasaran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Melaksanakan pemasaran melalui KKB *Expo* di seluruh cabang

8. Optimalisasi pemasaran *cash collateral credit*
Pemasaran bersama yang dilakukan seluruh cabang untuk *cash collateral credit* dengan mentargetkan deposan/ penabung > Rp500 juta.
9. Optimalisasi pemasaran Kredit Jaminan Emas
Pemasaran bersama yang dilakukan seluruh cabang untuk Kredit Jaminan Emas

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Kredit Konsumer

Keunggulan produk-produk Kredit Konsumer antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Multiguna
 - a. *Market share* luas meliputi perorangan yang berpenghasilan tetap.
 - b. Suku bunga kompetitif, suku bunga hingga *single rate*.
 - c. Persyaratan mudah, sederhana.
 - d. Mayoritas *payroll* penerima kredit di Bank Jatim.
 - e. Proses cepat dan tepat sesuai kebutuhan calon debitur.
 - f. Diversifikasi *skim* KMG untuk mengakomodir berbagai jenis sumber angsuran debitur.
 - g. Skema KMG *combo* agar debitur memperoleh *plafond* besar.
2. Kredit Kendaraan Bermotor
 - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
 - b. Uang Muka mulai 0%.
 - c. Suku bunga murah, menarik, kompetitif.
 - d. Biaya kredit murah, untuk kendaraan bermotor roda dua *free* biaya.
 - e. Persyaratan mudah.
 - f. Proses cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan kendaaran calon debitur.
 - g. Kerjasama dengan banyak *dealer*.
 - h. Adanya fitur *on loan* biaya realisasi kredit kedalam *plafond*.
 - i. Adanya Insentif keringanan SB KKB khusus kendaraan berwawasan lingkungan sebesar 0,25%-0,50%.
 - j. Pemberian *reward* kepada *referral* kendaraan roda 4 (empat).
 - k. Kendaraan dapat di atas namakan orang lain dalam lingkup keluarga.
3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
 - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
 - b. Uang muka mulai 5%.
 - c. Suku bunga bervariasi sesuai kebutuhan calon debitur.
 - d. Persyaratan mudah dan kompetitif.
 - e. Kerjasama dengan banyak *developer*.
 - f. Terdapat *fee* untuk bendahara.
 - g. Kredit dapat dilunasi sebelum jatuh tempo maupun pelunasan sebagian.



4. Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP)
 - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
 - b. Tujuan untuk segala kebutuhan konsumtif calon debitur.
 - c. Uang muka mulai 5%.
 - d. Suku bunga kompetitif.
 - e. Persyaratan mudah dan kompetitif.
 - f. Kredit dapat dilunasi sebelum jatuh tempo maupun pelunasan sebagian.
5. *Cash Collateral Credit*
 - a. *Market share* luas meliputi perorangan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap serta non perorangan (badan usaha dan badan usaha berbadan hukum).
 - b. Nilai kredit besar.
 - c. Suku bunga murah dan kompetitif.
 - d. Persyaratan sederhana.
 - e. Proses cepat.
 - f. Biaya murah.
 - g. Agunan tunai dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
 - h. Agunan dapat menggunakan agunan atas nama orang lain.
6. KPR Sejahtera dengan dukungan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
 - a. Penerima kredit dapat memiliki rumah idaman dengan suku bunga sangat murah dan bersifat tetap selama jangka waktu kredit.

- b. Dapat mengajukan subsidi uang muka.
- c. Uang muka minimal 1%.
- d. Persyaratan mudah.
- e. Proses kredit cepat.
- f. Biaya murah.

Inovasi kredit konsumen yang dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

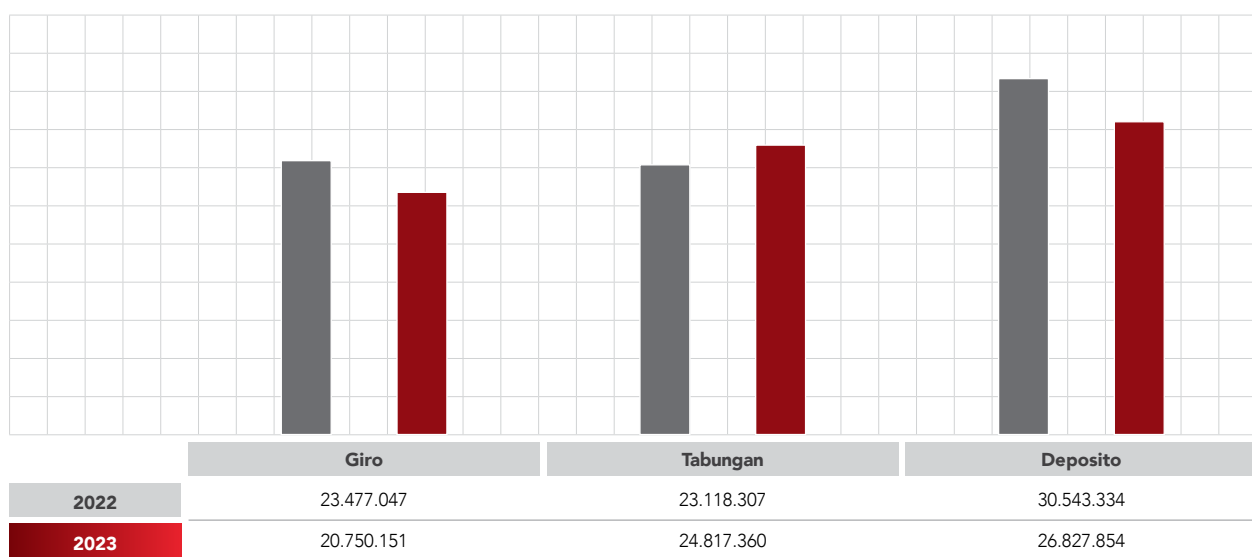
1. *Gatherings*, evaluasi dan *monitoring* bersama Tabungan Asuransi Pegawai (Taspen) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
2. *Gatherings*, evaluasi dan *monitoring* Cabang.
3. Program stimulus optimalisasi KMG yang berupa program *marketing* eksternal.
4. Program subsidi premi asuransi.
5. Ngopi Bareng bersama *developer*, agen properti dan asosiasi properti.
6. *Sponsorship* dengan menjalin komunikasi dan menciptakan peluang dengan pihak terkait.
7. Expo Jatim melalui semua produk Bank Jatim.
8. Promosi melalui *branch image* produk kredit properti.
9. *Reward* dengan memberikan stimulus/untuk *account officer* properti.
10. *Fee referral* kredit properti dengan memberikan stimulus untuk *developer*, *marketing*, agen properti, dan komunitas.
11. *Monitoring* dan kunjungan ke Cabang dengan *maintenance* debitur dan *developer*.

DANA PIHAK KETIGA

Dana pihak ketiga segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan deposito.

Grafik Produktivitas Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)





Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro Bank Jatim sudah *online* di seluruh cabang Bank Jatim, sehingga penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Jatim dan cek/bilyet giro Bank Jatim

dapat dikliringkan dimanapun (*Intercity Kliring*). Giro Bank Jatim juga dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (EUR, JPY, SGD, dan USD). Giro Bank Jatim tersedia untuk Umum (perorangan dan perusahaan), serta untuk Pemerintah Daerah.

Produktivitas Giro Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Giro

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro Pemda	11.971.999	17.766.614	(5.794.615)	(32,62%)
Giro Umum	8.778.152	5.710.433	3.067.719	53,72%
Total	20.750.151	23.477.047	(2.726.896)	(11,62%)

Giro tahun 2023 mencapai Rp20,75 triliun, turun 11,62% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp23,48 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari Giro Pemda sebesar Rp5,79 triliun. Giro Pemda adalah giro milik Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II. Giro Pemda tahun 2023 sebesar

Rp11,97 triliun, menurun 32,62% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp17,77 triliun. Sedangkan dengan Giro Umum meningkat sebesar 53,72%, dari Rp5,71 triliun di tahun 2022 menjadi Rp8,77 triliun di tahun 2023.

Tabungan

Tabungan Bank Jatim terdiri dari Tabungan Simpeda, Tabungan Haji, Tabungan Siklus, Tabunganku, Simpanan Pelajar (Simpel) dan Siklus Nelayan (Sinyal).

Produktivitas Tabungan Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpeda	16.537.443	16.468.555	68.888	0,42%
Siklus	3.919.452	2.655.680	1.263.772	47,59%
Tabungan Haji	17.161	18.428	(1.267)	(6,88%)
Tabunganku	4.240.335	3.904.028	336.307	8,61%
Tabungan Simpel	102.555	71.322	31.233	43,79%
Tabungan Sinyal	414	294	120	40,82%
TOTAL	24.817.360	23.118.307	1.699.053	7,35%

Total Tabungan tahun 2023 mencapai Rp24,82 triliun, meningkat 7,35% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp23,12 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari naiknya pertumbuhan Tabungan Siklus yang mencapai Rp1,26 triliun.



Uraian kinerja tabungan disajikan sebagai berikut:

- Simpeda**
 Pada tahun 2023, jumlah Tabungan Simpeda sebesar Rp16,53 triliun, meningkat Rp68,88 miliar atau 0,42% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp16,46 triliun. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpeda juga mengalami peningkatan 2,86% dikarenakan pertumbuhan literasi keuangan di lingkungan daerah-daerah.
- Siklus**
 Jumlah penghimpunan dana dari Tabungan Siklus pada 2023 sebesar Rp3,92 triliun meningkat Rp1,26 triliun atau 47,59% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,66 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya jumlah nasabah Tabungan Siklus mengingatnya menurunnya aktivitas keuangan masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.
- Tabungan Haji**
 Jumlah Tabungan Haji pada 2023 sebesar Rp17,16 miliar turun Rp1,26 miliar atau 6,88% dibanding tahun 2022 sebesar Rp18,43 miliar. Selanjutnya, jumlah nasabah Tabungan Haji mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya kuota haji di tahun 2022.
- Tabunganku**
 Jumlah penghimpunan dana dari produk Tabunganku pada tahun 2023 sebesar Rp4,24 triliun, meningkat Rp336,31 miliar atau 8,61% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,90 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan jumlah nasabah produk Tabunganku dikarenakan banyak peminat literasi keuangan di lingkungan sekolah.
- Simpanan Pelajar (Simpel)**
 Jumlah Simpanan Pelajar (SIMPEL) pada tahun 2023 sebesar Rp102,56 miliar, meningkat Rp31,23 miliar atau 43,79% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp71,32 miliar. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah nasabah Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dikarenakan meningkatnya program promosi di lingkungan pelajar.
- Simpanan Nelayan (Sinyal)**
 Jumlah Simpanan Nelayan (Sinyal) pada tahun 2023 sebesar Rp414 juta, meningkat Rp120 juta atau 40,82% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp294 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan jumlah nasabah Tabungan Sinyal mengingat populasi nelayan lebih sedikit dan masyarakat lebih tertarik pada Tabungan Simpeda dikarenakan adanya program promo hadiah maupun undian.

Deposito

Deposito berjangka merupakan pilihan terbaik bagi perorangan maupun perusahaan yang ingin menginvestasikan dana di tempat yang aman dan terpercaya. Dana dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Deposito Berjangka dapat dibuka dengan mata uang Rupiah dan Valas (USD dan SGD).

Produktivitas Deposito Bank Jatim diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Deposito	26.827.854	30.543.334	(3.715.480)	(12,16%)

Deposito Bank Jatim dapat dijadikan jaminan kredit dengan suku bunga yang diberikan kompetitif dan dapat dilakukan negosiasi. Deposito tahun 2023 mencapai Rp26,83 triliun, menurun 12,16% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp30,54 triliun. Hal tersebut seiring dengan penurunan nasabah dikarenakan di tahun 2023 banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk proyek Pemerintah Daerah.

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2023

Uraian strategi peningkatan dana pihak ketiga yang dilakukan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Penyaluran Program Bantuan dengan Sistem Non Tunai.
- Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembukaan rekening tabungan bagi setiap siswa di Jawa timur (KEJAR).
- Optimalisasi Implementasi QRIS melalui program Promo MDR 0% dan bebas setoran awal pembukaan QRIS baru, *branding merchant* QRIS, promo transaksi pada *merchant* QRIS dan *event sponsorship*.
- Program Promo DPK seperti Siklus Suka – suka Gen 1, Siklus Suka – suka Gen 2, *Cash Pro*, Siklus Cinta, Siklus Ramadhan, Promo Yes Fresh Fund dan *Top Up*.



5. Program Undian Tabungan Simpeda dan Undian Tabungan Siklus.
6. Partisipasi pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan OJK.
7. Partisipasi *sponsorship event* di wilayah kerja Bank Jatim.
8. Pendampingan cabang dalam rangka melakukan pendekatan kepada nasabah korporasi.
9. Optimalisasi *support* kepada cabang dengan berperan aktif dalam percepatan proses pengajuan permohonan negosiasi deposito.
10. Program promo untuk Giro Korporasi (Go-Speed).
11. Optimalisasi kerjasama nasabah kelembagaan atas peluang kerjasama dana seperti pembayaran iuran kepesertaan, pembayaran klaim, penyaluran gaji pensiun TNI/Polri dan ASN.
12. *Gathering* dengan prospek nasabah di sektor swasta dengan komunitas CEO Jatim.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Dana Pihak Ketiga

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan edukasi dan literasi keuangan dalam lingkup pendidikan Jawa Timur.
2. Program promo transaksi pada *merchant QRIS* Bank Jatim.
3. Memberikan *value added* kepada nasabah dengan pemberian undian dan promo kepada seluruh jenis nasabah.
4. Kolaborasi dengan cabang dalam pendekatan hingga *closing* serta melakukan *maintenance* nasabah korporasi.
5. Meningkatkan *bounding* antara nasabah dengan Bank Jatim sehingga akan membentuk pelayanan dari hati ke hati terhadap nasabah.

Prospek Usaha Dana Pihak Ketiga Tahun 2024

Uraian prospek usaha dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Program promo tematik.
2. KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
3. Optimalisasi implementasi QRIS.
4. Program Undian Tabungan.
5. Pendekatan kerjasama baru dan *maintenance* kerjasama *existing* nasabah ritel dan perorangan.
6. Program Promo untuk Giro Spesial (Go-Speed)
7. Optimalisasi nasabah korporasi yang telah menjadi nasabah dengan memperluas cakupan dari hulu hingga hilir ekosistem nasabah.

JASA LAINNYA

Jasa lainnya terdiri atas *Tresuri*, *International Banking* dan Bank Jatim Kustodian.

Tresuri

Sejalan dengan peran *Tresuri* sebagai salah satu pilar pertumbuhan laba Bank Jatim yang didukung oleh tenaga profesional dan handal, Divisi *Tresuri* senantiasa terus meningkatkan aktivitas bisnis *Tresuri*. Peran utama *Tresuri* dalam perbankan adalah menjaga kecukupan likuiditas bank dan bertanggung jawab untuk mengelola *asset* dan *liabilities* bank serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap

Strategi Dana Pihak Ketiga Tahun 2024

Uraian strategi dana pihak ketiga yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Layanan Jasa Keuangan pada segmen ritel dan perorangan melalui QRIS.
2. Melaksanakan Komitmen Bersama antara Gubernur Jatim, OJK dan Bank Jatim terkait program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
3. Pembukaan rekening tabungan bagi siswa di Jawa Timur dengan stimulasi setoran awal target kurang lebih 50.000 rekening.
4. Kegiatan Simpel Day, literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi dengan program pemerintah dan OJK, kolaborasi dengan program sekolah antara lain Bank Mini.
5. Program akuisisi *merchant QRIS*, dengan cara menargetkan pedagang pasar modern, *mall* serta pedagang tradisional.
6. Program branding dan promo *merchant QRIS* Bank Jatim.
7. Program promo DPK tematik (Giro, Tabungan dan Deposito)
8. Partisipasi pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan OJK.
9. Partisipasi *sponsorship event* di wilayah kerja Bank Jatim.
10. Program Undian Tabungan Bank Jatim.
11. Melakukan pendekatan dengan berupa perkumpulan, asosiasi, serta *market-market* potensial untuk menggali potensi DPK khususnya di korporasi.
12. Pengembangan layanan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Kementerian, Dinas baik pada lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan, serta sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Jatim terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur.
13. Kolaborasi dengan Divisi Bisnis/Non Bisnis serta cabang terkait *mapping* nasabah korporasi potensial.
14. Pengembangan dan pemanfaatan ekosistem pembayaran pada *platform e-commerce* rekanan Bank Jatim (Kompas Gramedia Group, Blibli.Com, JatimBejo).
15. Pengembangan Elektronifikasi Keuangan Daerah berbasis *web* sebagai upaya *monitoring* bagi seluruh perangkat daerah dan Bank Jatim pada khususnya.
16. Menginisiasi sentralisasi kesepakatan pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dengan fasilitas layanan jasa keuangan milik Bank Jatim (baik berupa *offline service* dan program digitalisasi milik Bank Jatim).

laba Bank Jatim baik berupa pendapatan bunga maupun non bunga (*fee base income*). Di dalam pengelolaannya, bank menghadapi pasar global maupun domestik yang bergerak sangat dinamis sehingga harus senantiasa berjalan beriringan dengan perkembangan pasar terbaru terutama dari segi regulasi maupun dari segi bisnis.



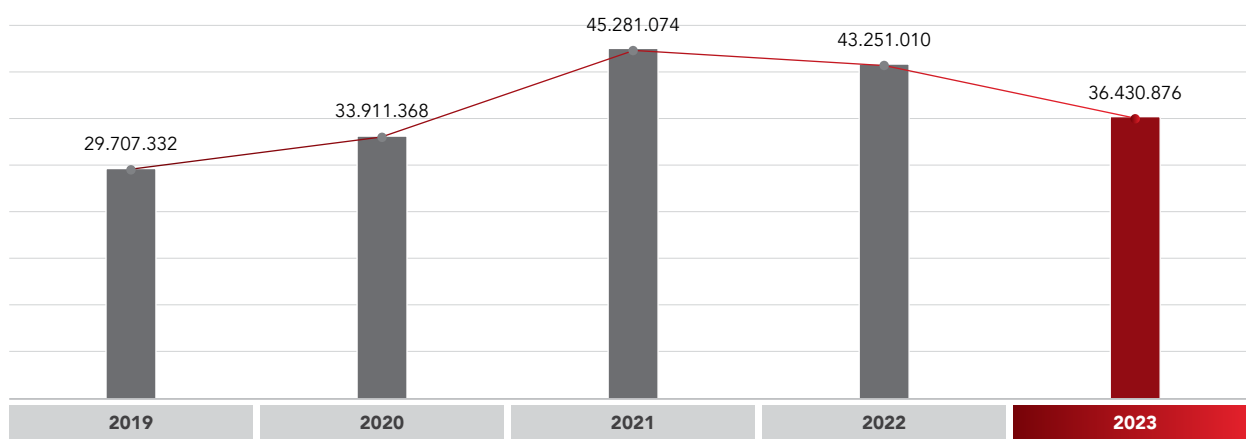
Bisnis Tresuri, pada dasarnya sebagai pelengkap dan penyeimbang bisnis utama bank di bidang penghimpunan dana dan penyaluran kredit sebagai Lembaga *Intermediary*. Tresuri berfungsi untuk mengoptimalkan akses dana yang ada pada berbagai instrumen Tresuri baik pada pasar uang maupun pasar modal dengan motif *yield enhancement*. Sebaliknya jika dibutuhkan dana diluar dana pihak ketiga, maka Tresuri berperan untuk mencari dana ke pasar baik melalui pinjaman antar bank, *repo* maupun penerbitan surat hutang. Bisnis Tresuri Bank Jatim mencakup transaksi pasar uang (*money market*), transaksi surat berharga (*fixed income*) dan transaksi

valuta asing (*foreign exchange*) yang dilaksanakan oleh Unit Global Market di bawah Divisi Tresuri. Transaksi tersebut bersifat *interbank* yang dilakukan dengan *counterpart* Bank maupun Non Bank (sekuritas).

Bisnis Tresuri Bank Jatim terdiri dari pengelolaan portofolio penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Lain, surat berharga dan *reverse repo*. Per Desember 2023, secara yoy terdapat penurunan pengelolaan portofolio sebesar 15,77% dari RpRp43.281 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp36.431 miliar pada tahun 2023.

Grafik Total Aset Kelolaan Tresuri

(dalam jutaan Rupiah)



Tabel Posisi Total Aset Kelolaan Tresuri per Desember 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Aset Kelolaan Tresuri	36.430.876	43.251.010	(6.820.134)	(15,77%)

Penurunan jumlah kelolaan Tresuri mengakibatkan penurunan secara yoy dari sisi pendapatan bunga atas hasil investasi seluruh portofolio yang dikelola oleh Tresuri pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tren kenaikan suku bunga yang terjadi selama tahun 2023, masih dimanfaatkan dengan baik meskipun dana kelolaan Tresuri mengalami penurunan. Atas penurunan tersebut, Bank masih mencatatkan

kinerja yang cukup baik atas bisnis Tresuri dengan pendapatan bunga sebesar Rp2.160 miliar di tahun 2023. Pendapatan tersebut juga masih ditambah *fee based income* yang berasal dari transaksi valas sebesar Rp18,33 miliar, naik 132% dari tahun 2022 sebesar Rp13,85 miliar sehingga total pendapatan yang dibukukan oleh Tresuri sebesar Rp2.179,27 miliar.

Tabel Produktivitas Tresuri 2022-2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penempatan pada Bank Indonesia	16.392	64.104	(47.712)	(74,43%)
Penempatan pada Bank Lain	184.249	87.834	96.414	109,77%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Surat Berharga	1.547.907	1.693.451	(145.544)	(8,59%)
Tagihan Reverse Repo	412.391	459.760	(47.369)	(10,30%)
Total	2.160.938	2.305.149	(144.211)	(6,25%)

Gejolak perekonomian yang di antaranya masih dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang menyebabkan tekanan inflasi global dan respon Negara dengan meningkatkan suku bunga menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Divisi Tresuri. Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 50 bps dari 5,50% menjadi 6,00%. Sebagian besar aktivitas Tresuri berdampak langsung atas perubahan tren yang terjadi pada beberapa indikator ekonomi, baik global maupun domestik. Penurunan tahunan pendapatan Tresuri disebabkan penurunan total aset kelolaan Tresuri yang pada tahun 2023 banyak dialihkan untuk penyaluran kredit yang menghasilkan *yield* lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tresuri *yield*. Selain itu, pengelolaan risiko pasar atas portofolio kelolaan Tresuri juga menjadi fokus aktivitas utama di tahun 2023 seiring dengan tren kenaikan suku bunga yang sangat mempengaruhi tingkat imbal hasil dan harga surat berharga. Menghadapi hal tersebut, Bank melakukan langkah-langkah *reprofiling* atas portofolio yang dimiliki dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko.

Kondisi likuiditas Bank Jatim selama tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun dinilai masih cukup *ample*, karena pertumbuhan kredit dan pembiayaan bank tumbuh cukup signifikan. Dalam rangka optimalisasi pendapatan atas *idle fund*, bank masih memberikan porsi terbesar pada pengelolaan Surat Berharga di pasar modal pada tahun 2023, mengingat portofolio ini yang memberikan *imbal hasil* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen lainnya. Pembelian Surat Berharga utamanya dimaksudkan dalam rangka pemenuhan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) juga digunakan sebagai instrumen investasi yang dapat menambah pendapatan bunga bagi Bank.

Bank Jatim juga mampu mengelola likuiditas secara efisien dengan tetap menerapkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum dan Posisi Devisa Neto (PDN) sepanjang tahun 2023. Realisasi GWM Rupiah pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 8,85% yang di dalamnya termasuk insentif GWM sebesar 2,80%. Adapun ketentuan GWM Rupiah Bank Indonesia sebesar 9%. Sedangkan realisasi GWM Valas pada 31 Desember 2023 adalah 6,62% di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 4%. Untuk PDN Bank, realisasi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 0,44% masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Tresuri

Seiring bergeliatnya sektor usaha mulai dari skala besar, menengah hingga skala UMKM yang mendorong pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 turut membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Tresuri terutama untuk segmen ritel. Persaingan layanan digital dunia perbankan menuntut setiap perbankan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap nasabah. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kontribusi yang berkelanjutan bagi kinerja Bank secara umum, selama tahun 2023, Tresuri melakukan ekspansi transaksi valuta asing baik *telegraphic transfer* maupun *banknotes* dengan strategi konkret yakni melakukan penyesuaian kebijakan terkait minimal transaksi sehingga nasabah dapat melakukan negosiasi untuk transaksi jual beli valas (*special rate*), bersama Cabang melakukan *join marketing/canvassing* kepada nasabah potensial serta melanjutkan serangkaian proses *development* fitur konversi valas pada aplikasi *mobile banking bank* yang memasuki tahap *user acceptance test*. Selain itu, Tresuri berkolaborasi bersama Divisi *International Banking* juga menjalankan kerjasama bisnis dengan Perusahaan *Money Transfer Operator* yang berada di negara Malaysia untuk memberikan kemudahan layanan dalam hal remitansi kepada para pekerja migran Indonesia yang berada di negara setempat sehingga dapat memudahkan kegiatan pengiriman uang ke sanak saudara yang berada di Indonesia melalui layanan *JConnect Remittance*. Bisnis ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak antara bank dan Perusahaan *Money Transfer Operator*.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Tresuri Tahun 2024

Tahun 2024, Bank Jatim masih akan menghadapi tahun yang menantang bagi bisnis Tresuri akibat ketidakpastian yang disebabkan meningkatnya risiko resesi di berbagai negara serta tekanan global akibat krisis geopolitik. Tresuri akan terus berupaya meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pertumbuhan bisnis bank baik dari sisi pengelolaan likuiditas, penghimpunan dana, peningkatan laba maupun peningkatan transaksi sesuai dengan komitmen Tresuri untuk terus meningkatkan kontribusi positif bagi Bank Jatim. Dalam pengelolaan *idle fund*, Tresuri masih akan melakukan optimalisasi melalui investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pada instrumen-instrumen yang menghasilkan imbal hasil yang cukup tinggi bagi Bank terutama dengan mempertahankan besaran portofolio surat berharga yang ada. Selain itu, akan dilakukan peningkatan sinergi dan *partnership* dengan pihak *counterparties* dalam mengembangkan bisnis Tresuri dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.



Dalam rangka peningkatan transaksi dan memperoleh *fee based income* serta memperluas *market share* bank, maka peningkatan *client flow* melalui optimalisasi produk dan layanan Tresuri akan menjadi fokus utama bisnis Tresuri Bank Jatim yang diharapkan dapat menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan. Pemasaran pada nasabah pinjaman dan simpanan valas serta yang memiliki kebutuhan valas untuk transaksi ekspor impor di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah Jawa Timur pada khususnya akan menjadi fokus strategi peningkatan aktivitas transaksi valas di segmen ritel. Tresuri bersama Divisi International Banking sebagai *leader* dan unit terkait lainnya

akan menambah kerjasama bisnis dengan erusahaan *Money Transfer Operator* diluar negeri lainnya. Hal ini berkaitan dengan layanan *Jconnect Remittance* yang bertujuan memberikan kemudahan layanan pengiriman uang dari luar negeri bagi para pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mengirim dana kepada keluarga di Indonesia secara *real time* dengan biaya yang terjangkau. Volume transaksi yang tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp2,2 triliun, menciptakan beberapa peluang seperti penambahan dana pihak ketiga dan penambahan *fee based income* secara signifikan yang didapat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pekerja migran.

International Banking

Produk *International Banking* antara lain meliputi transaksi *remittance*, transaksi ekspor impor dan Transaksi Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penjelasan masing-masing produk telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Segmen *International Banking* dikelola oleh Divisi International Banking. Divisi International Banking terbentuk pada bulan Juli tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Divisi International Banking memiliki tugas dan tanggungjawab untuk pengelolaan bisnis berupa *remittance*, *trade finance*, dan *bank to bank business*. Untuk bisnis *Remittance and Trade Finance*, Divisi International Banking memiliki tanggung jawab pengelolaan secara *end to end process*, sejak pemasaran hingga proses operasionalnya. Untuk mendukung kontribusi terhadap pendapatan perusahaan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan, yaitu:

Visi : 1. Menjadikan Bank Jatim sebagai BPD Devisa No. 1 dan terkemuka melalui upaya-upaya pengembangan produk *trade finance (product re-engineering)* dan strategi pemasaran yang komprehensif.

2. Terciptanya layanan *Remittance* Bank Jatim yang komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan transaksi.

- Misi :
1. Menciptakan, mengembangkan serta memelihara produk dan jasa *trade finance and remittance* Bank Jatim sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta *market acceptance*.
 2. Membangun sistem pemasaran yang mampu menggerakkan aktivitas pemasaran *Trade Finance* dan seluruh unit kerja Bank Jatim sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi bisnis *trade finance and remittance* Bank Jatim.
 3. Memberikan pelayanan yang memadai dalam melakukan pembayaran dari dan ke luar negeri dengan cepat, aman, dan biaya kompetitif
 4. Memberikan layanan *remittance* terbaik didukung dengan sistem terpercaya.

Produktivitas *International Banking* diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas International Banking

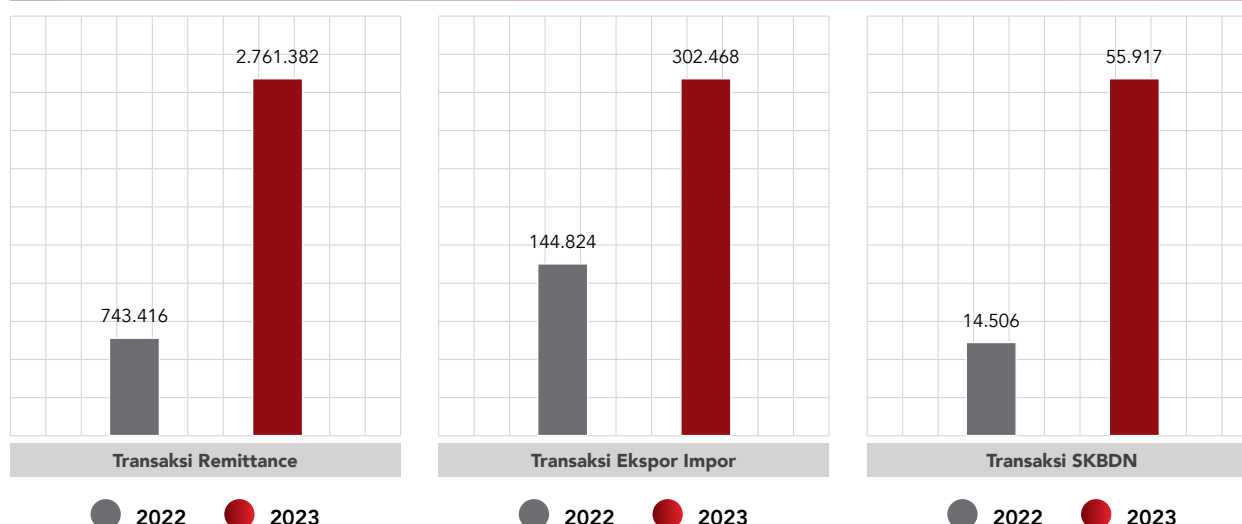
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transaksi <i>Remittance</i>	2.761.382	743.416	2.017.966	271,45%
Transaksi Ekspor Impor	302.468	144.824	157.644	108,85%
Transaksi Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	55.917	14.506	41.411	285,47%



Grafik Produktivitas *International Banking*

(dalam jutaan Rupiah)



Pada tahun 2023, kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim mengalami kenaikan yang signifikan (>200%). Hal ini mencerminkan kiprah Bank Jatim sebagai Bank Devisa di pasar domestik maupun pasar internasional di tengah keadaan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi global. Program-program Bank Jatim dalam mempersiapkan SDM dan strategi untuk menyikapi hal tersebut membuahkan hasil yang baik, dibuktikan dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2023. Berikut adalah detail analisa kenaikan kinerja produk *trade finance and remittance* di Bank Jatim:

- Transaksi Remittance

Transaksi *remittance* Bank Jatim tahun 2023 sebesar Rp2,76 triliun, meningkat 271,45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp743,42 miliar. Pengembangan produk *remittance* kerjasama yang dilakukan Bank Jatim sebagai salah satu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja transaksi *Remittance*. Strategi membuka koridor dan kerjasama dengan *remittance counterparts* yang baru, menyebabkan bertambahnya transaksi *Remittance* Bank Jatim. Di samping itu, para tenaga pemasar baik Cabang, Cabang Pembantu maupun Divisi Bisnis Kantor Pusat telah berkontribusi untuk upaya pemasaran produk devisa Bank Jatim. Selanjutnya juga peran Divisi Tresuri Bank Jatim yang mana dapat memberikan *competitive rate*, sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2023 ini.

- Transaksi Ekspor Impor

Transaksi ekspor impor Bank Jatim tahun 2023 sebesar Rp302,47 miliar, meningkat 108,85% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp144,83 miliar. SDM Bank Jatim baik pemasar maupun operasional telah siap dan cakap dalam memasarkan dan mengeksekusi transaksi ekspor impor, baik *under letter of credit* maupun *non letter of credit*. Tenaga pemasar yang bertindak secara *customer centric* mampu memberikan *advise* yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah, sehingga nasabah merasa terdampingi, dan proses *maintenance* maupun akuisisi

nasabah relatif lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya juga peran Divisi Tresuri Bank Jatim yang dapat memberikan *competitive rate*, sehingga banyak nasabah dapat terakuisisi di tahun 2023 ini.

- Transaksi SKBDN

Transaksi SKBDN Bank Jatim tahun 2023 sebesar Rp55,92 miliar, meningkat 285,47% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp14,51 miliar. SDM Bank Jatim baik pemasar maupun operasional telah siap dan cakap dalam memasarkan dan mengeksekusi transaksi SKBDN. Tenaga pemasar yang bertindak secara *customer centric* mampu memberikan *advise* yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah, sehingga nasabah merasa terdampingi, dan proses *maintenance* maupun akuisisi nasabah relatif lebih mudah dilaksanakan.

Strategi *International Banking* Tahun 2023

Strategi yang dilakukan Divisi *International Banking* sebagai salah satu divisi bisnis Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Market Intelligence

Dengan melakukan pengembangan proses bisnis melalui *benchmark* pada bank lain dan melakukan survei kepuasan pelanggan.

2. Product and Services Development Proposal

Melakukan inovasi-inovasi produk, pengkinian ketentuan internal serta penetrasi pasar luar negeri (pembukaan koridor baru dan kerjasama dengan *remittance counterpart* baru).

3. Third Parties Reciprocal Relation

Bekerjasama dengan pihak ketiga di antaranya *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO), sinergi dengan Departemen Tenaga Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sinergi dengan asosiasi ataupun komunitas ekspor impor misalnya GPEI, ECS, ICC, serta Asosiasi Ekspor Impor lainnya.



4. Marketing Action

Melakukan *marketing communication* yang tepat untuk meningkatkan *brand awareness* baik melalui *marketing tools* tertentu ataupun program promo serta *sponsorship event*, aktif melaksanakan internal maupun eksternal *marketing* (kepada *business unit* di Kantor Pusat, Cabang, cabang Pembantu ataupun calon nasabah), mengadakan *gathering* dengan para pemangku kepentingan (dalam hal ini adalah dengan Dinas Pemerintahan, komunitas Pekerja Migran Indonesia, MTO, dan instansi swasta maupun UMKM yang memiliki aktivitas transaksi valuta asing).

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi International Banking

Sejalan dengan visi dan misi BPD Jatim, Divisi International Banking berupaya melakukan terobosan-terobosan yaitu melalui program Desa Pendulum Devisa dan J-Export and Trade Assistance (JXTA), serta kerjasama dengan *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO) sebagai langkah untuk mengembangkan UMKM Jawa Timur dan membantu para Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri

untuk transaksi mengirim/menerima dana dari/ke Indonesia. Diharapkan pada tahun yang akan datang semakin meningkat transaksi valuta asing yang melalui Bank Jatim.

Prospek Usaha International Banking Tahun 2024

Sampai dengan akhir bulan Desember 2023 jumlah volume transaksi valuta asing di Bank Jatim mencapai setara Rp3,12 triliun (transaksi *remittance*, *letter of credit* dan SKBDN) atau mencapai $\pm 175,28\%$ dari target volume transaksi yang ditetapkan untuk tahun 2023. Pencapaian tersebut memberikan gambaran peluang penerimaan dari transaksi valuta asing salah satunya dengan pengembangan UMKM di wilayah-wilayah Jawa Timur untuk menjadi desa pendulum devisa dan dengan menjadi desa pendulum devisa maka UMKM dapat mengeksport hasil usahanya keluar negeri sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut. Kemudian meningkatkan jumlah kerjasama dengan *Remittance Counterparts/Money Transfer Operator* (MTO) untuk membuka koridor-koridor transaksi *remittance* baru di luar negeri sebagai salah satu bentuk penerimaan Bank Jatim dalam bentuk valuta asing.

Bank Jatim Kustodian

Jasa Kustodian Bank Jatim mendapatkan ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK nomor: S4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Jatim Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana dan Jasa, Sub Divisi Dana dan Jasa Retail dan Perorangan, adapun jasa-jasa yang diberikan di antaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek (*corporate bond*, *medium term notes*, *negotiable certificate of deposit*, sukuk, dan lain-lain) berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*)
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek.
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan Efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*).
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek.
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

Produktivitas Bank Jatim Kustodian diuraikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASSET UNDER CUSTODY				
Januari	1.891.700	1.877.900	13.800	0,73%
Februari	2.128.700	1.737.900	390.800	22,49%
Maret	2.063.700	1.815.900	247.800	13,65%
April	2.030.700	1.805.900	224.800	12,45%
Mei	1.873.144	1.761.400	111.744	6,34%
Juni	1.918.089	1.730.100	187.989	10,87%
Juli	2.065.102	1.821.600	243.502	13,37%

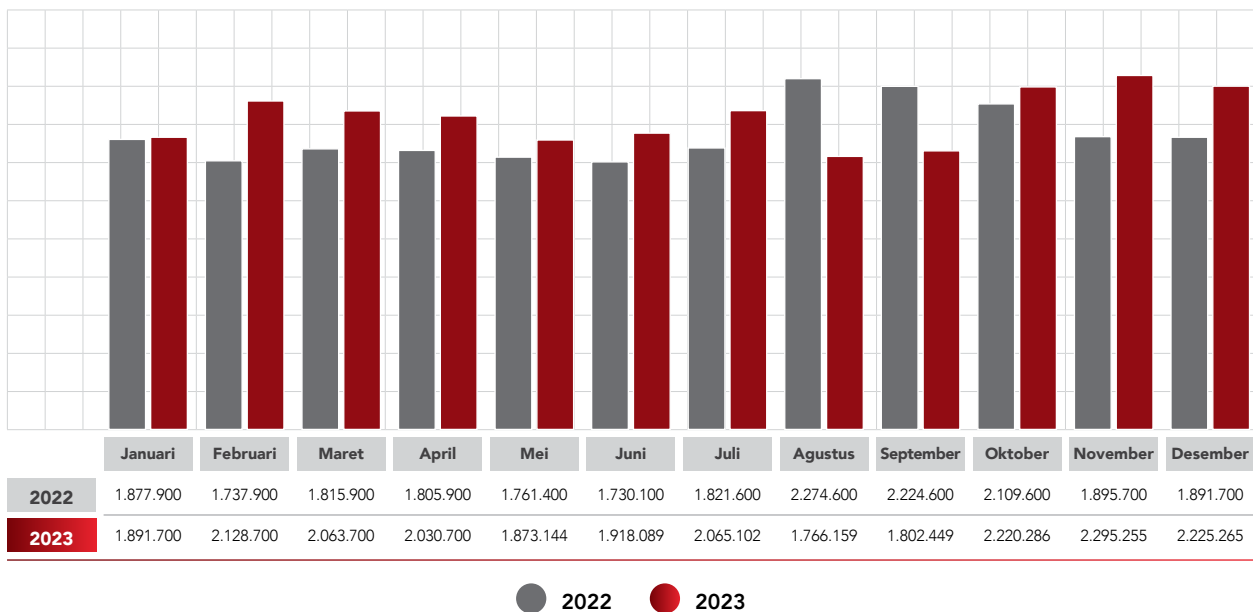


Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agustus	1.766.159	2.274.600	(508.441)	(22,35%)
September	1.802.449	2.224.600	(422.151)	(18,98%)
Oktober	2.220.286	2.109.600	110.686	5,25%
November	2.295.255	1.895.700	399.555	21,08%
Desember	2.225.265	1.891.700	333.565	17,63%
Efek Mature	878.000	1.291.900	(413.900)	(32,04%)
Efek Terjual	20.000	0	20.000	-

Jumlah *asset under custody* tahun 2023 mencapai Rp2,22 triliun, meningkat sebesar 17,63 % dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,89 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan bertambahnya jumlah nasabah kustodian dan kelolaan instrument Efek.

Grafik Dana Kelolaan Efek Bank Jatim Kustodian

(dalam jutaan Rupiah)



● 2022 ● 2023

Nasabah jasa kustodian terdiri dari nasabah internal Bank Jatim dan eksternal. Nasabah internal tidak secara langsung memberikan pendapatan dan profit, namun terdapat efisiensi biaya atas Efek yang sebelumnya oleh Divisi Tresuri disimpan di bank kustodian lain.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2023

Strategi yang telah dilakukan oleh Bank Jatim Kustodian sepanjang tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur
2. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur
3. Memasarkan jasa kustodian ke sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan biaya penyimpanan lebih kompetitif.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bank Jatim Kustodian

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh Bank Jatim Kustodian adalah sebagai berikut:

1. Biaya *safe keeping* yang kompetitif.
2. Memberikan layanan tambahan terkait pelaporan secara *free*.



Prospek Usaha Bank Jatim Kustodian Tahun 2024

Prospek usaha Bank Jatim Kustodian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur.
2. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan perusahaan BUMD dan perusahaan swasta di wilayah Jawa Timur.
3. Kerjasama layanan jasa kustodian dengan BPD di Indonesia.

Strategi Bank Jatim Kustodian Tahun 2024

Strategi yang akan dilakukan oleh Bank Jatim Kustodian untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Update system core kustodian yang dapat mengakomodir rekonsiliasi, penyampaian proxy secara elektronik dan penyesuaian dengan C-Best Next G.
2. Pengembangan system core kustodian terkait fasilitas menu inquiry portofolio nasabah kustodian.
3. Memasarkan jasa kustodian ke sesama BPD dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.
4. Memasarkan jasa kustodian ke Yayasan Dana Pensiun di wilayah Jawa Timur dengan biaya penyimpanan yang lebih kompetitif.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

Pendapatan operasional segmen konvensional tahun 2023 mencapai Rp5.458.757 juta, menurun sebesar 8,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.975.236 juta. Penurunan tersebut berasal dari penurunan pendapatan operasional lainnya.

Laba operasional segmen konvensional tahun 2023 mencapai Rp1.821.231 juta, menurun sebesar 4,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.902.035 juta. Penurunan tersebut berasal dari turunnya laba operasional dan pendapatan operasional lainnya.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konvensional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	100.234.184	99.959.909	274.275	0,27%
Liabilitas	88.117.360	88.554.718	(437.358)	(0,49%)
Pendapatan operasional	5.458.757	5.975.236	(516.480)	(8,64%)
Laba operasional	1.821.231	1.902.035	(80.805)	(4,25%)

Segmen Syariah

Segmen Syariah Bank Jatim, terdiri atas dana pihak ketiga/ simpanan, pembiayaan dan jasa layanan. Perluasan jaringan menjadi faktor pendukung berkembangnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui jaringan UUS yang meliputi 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 4 (Empat) Kantor Fungsional Syariah, 8 (delapan) Payment Point Syariah, 217 Agen Laku Pandai Syariah, 196 Kantor Layanan Syariah (KLS), 26 (dua puluh enam) Mesin ATM, 10 (sepuluh) Mesin ATM CRM dan 7 (tujuh) Mobil Kas Keliling.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

DANA PIHAK KETIGA SYARIAH

Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah terdiri dari Giro iB Barokah (Wadiah), Giro iB Barokah (Mudharabah), Tabungan Simpel iB, TabunganKu iB, Tabungan Umroh iB Amanah, Tabungan SiPandai iB Barokah, Tabungan Santri, Tabungan Barokah, Tabungan Barokah Sejahtera, Tabungan Haji iB Amanah, Tabungan Rencana iB Barokah, Tabungan Pensiun iB Barokah serta Deposito Barokah. Penjelasan masing-masing produk DPK Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.



Uraian Produktivitas DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (Wadiah)	174.426	156.090	18.336	11,75%
Giro iB Barokah (Mudharabah)	1.786	1.636	150	9,17%
Tabungan Simpel iB	10.255	7.083	3.172	44,78%
TabunganKu iB	63.673	56.222	7.451	13,25%
Tabungan Umroh iB Amanah	5.304	4.004	1.300	32,47%
Tabungan SiPandai iB Barokah	16	15	1	6,67%
Tabungan Santri	1.877	13	1.864	14.338,46%
Tabungan Barokah	354.156	297.416	56.740	19,08%
Tabungan Barokah Sejahtera	7.917	7.374	543	7,36%
Tabungan Haji iB Amanah	354.921	288.567	66.354	22,99%
Tabungan Rencana iB Barokah	1.440	1.217	223	18,32%
Tabungan Pensiun iB Barokah	37	23	14	60,87%
Deposito Barokah	1.626.798	1.245.458	381.340	30,62%
Total	2.602.606	2.065.118	537.488	26,03%

Realisasi DPK Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp2,60 triliun, meningkat sebesar Rp537,49 miliar atau 26,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,07 triliun. Peningkatan DPK Syariah terutama berasal dari pertumbuhan Deposito Barokah sebesar Rp381,34 miliar. Sedangkan CASA meningkat sebesar Rp156,15 miliar atau 19,05% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp819,66 miliar yang dipengaruhi pertumbuhan Tabungan Haji iB Amanah.

Berdasarkan pencapaian DPK tahun 2023, terdapat tiga produk yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan komposisi DPK tahun 2022 yaitu Deposito Barokah sebesar Rp381,34 miliar, Tabungan Haji iB Amanah sebesar Rp66,35 miliar serta Tabungan Barokah sebesar Rp56,74 miliar.

Uraian nasabah DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah DPK Syariah

(dalam jumlah nasabah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Giro iB Barokah (Wadiah)	1.689	1.467	222	15,13%
Giro iB Barokah (Mudharabah)	8	6	2	33,33%
Tabungan Simpel iB	53.480	45.989	7.491	16,29%
TabunganKu iB	41.567	36.918	4.649	12,59%
Tabungan Umroh iB Amanah	2.076	1.693	383	22,62%
Tabungan SiPandai iB Barokah	403	388	15	3,87%
Tabungan Santri	14.997	1.338	13.659	1.020,85%
Tabungan Barokah	50.478	46.057	4.421	9,60%

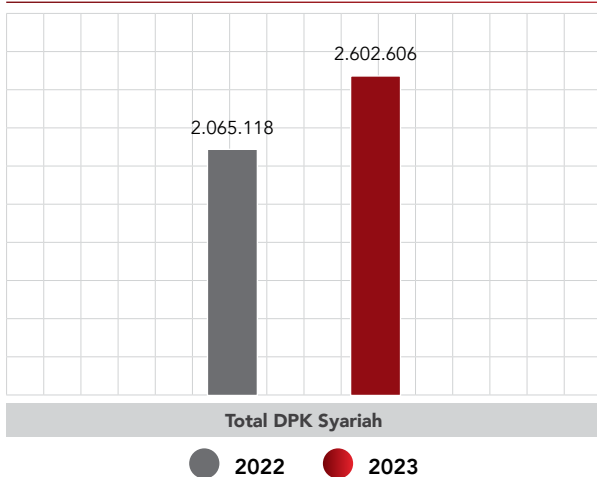
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tabungan Barokah Sejahtera	69	77	(8)	(10,39%)
Tabungan Haji iB Amanah	129.284	127.671	1.613	1,26%
Tabungan Rencana iB Barokah	355	305	50	16,39%
Tabungan Pensiun iB Barokah	115	9	106	1.177,78%
Deposito Barokah	2.977	2.752	225	8,18%
Total	297.498	264.670	32.828	12,40%

Pertumbuhan jumlah DPK diikuti dengan bertambahnya jumlah nasabah. Tahun 2023, jumlah nasabah DPK UUS Bank Jatim sebesar 297.498 nasabah, meningkat sebesar 32.828 nasabah atau 12,40% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan jumlah nasabah dari Tabungan Santri.

Secara umum, jumlah nasabah di sebagian produk DPK UUS Bank Jatim mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 namun hanya satu produk yang mengalami penurunan yaitu Tabungan Barokah Sejahtera sebesar 8 nasabah atau 10,39%.

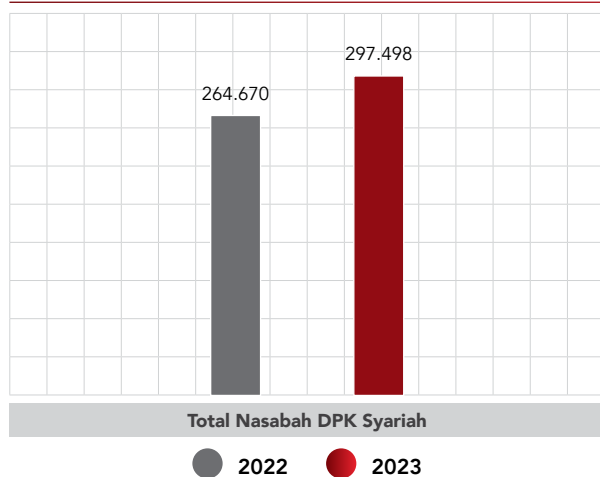
Grafik Pertumbuhan DPK Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Pertumbuhan Nasabah DPK Syariah

(dalam Nasabah)



Uraian kinerja masing-masing produk DPK Syariah disajikan sebagai berikut:

- Giro iB Barokah (Wadiah)**
 Giro iB Barokah (Wadiah) mengalami peningkatan sebesar Rp18,34 miliar atau 11,75% dari sebesar Rp156,09 miliar menjadi Rp174,43 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (Wadiah) mengalami peningkatan sebanyak 222 nasabah atau 15,13% dibanding tahun 2022.
- Giro iB Barokah (Mudharabah)**
 Giro iB Barokah (Mudharabah) mengalami peningkatan sebesar Rp150 juta atau 9,17% dari sebesar Rp1,64 miliar menjadi Rp1,79 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Giro iB Barokah (Mudharabah) mengalami peningkatan sebanyak 2 nasabah atau 33,33% dibanding tahun 2022.
- Tabungan Simpel iB**
 Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebesar Rp3,17 miliar atau 44,78% dari sebesar Rp7,08 miliar menjadi Rp10,26 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Simpel iB mengalami peningkatan sebanyak 7.491 nasabah atau 16,29% dibanding tahun 2022.
- TabunganKu iB**
 TabunganKu iB mengalami peningkatan sebesar Rp7,451 miliar atau 13,25% dari sebesar Rp56,222 miliar menjadi Rp63,673 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, TabunganKu iB mengalami peningkatan sebanyak 4,649 nasabah atau 12,59% dibanding tahun 2022.
- Tabungan Umroh iB Amanah**
 Tabungan Umroh iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp1,30 miliar atau 32,47% dari sebesar Rp4,00 miliar menjadi Rp5,30 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Umroh iB Amanah mengalami peningkatan sebanyak 383 nasabah atau 22,62% dibanding tahun 2022.



- **Tabungan SiPandai iB Barokah**

Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp1 juta atau 6,67% dari sebesar Rp15 juta menjadi Rp16 juta pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan SiPandai iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 15 nasabah atau 3,87% dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Santri**

Tabungan Santri mengalami peningkatan sebesar Rp1,86 miliar atau 14.338,46% dari sebesar Rp13 miliar menjadi Rp1,88 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Santri mengalami peningkatan sebanyak 13.659 nasabah atau 1.020,85% dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Barokah**

Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp56,74 miliar atau 19,08% dari sebesar Rp297,42 miliar menjadi Rp354,16 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah mengalami peningkatan sebanyak 4.421 nasabah atau 9,60% dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Barokah Sejahtera**

Tabungan Barokah Sejahtera mengalami peningkatan sebesar Rp543 juta atau 7,36% dari sebesar Rp7,37 miliar menjadi Rp7,92 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Barokah Sejahtera mengalami penurunan sebanyak 8 nasabah atau (10,39%) dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Haji iB Amanah**

Tabungan Haji iB Amanah mengalami peningkatan sebesar Rp66,35 miliar atau 22,99% dari sebesar Rp288,57 miliar menjadi Rp354,92 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, mengalami peningkatan sebanyak 1.613 nasabah atau 1,26% dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Rencana iB Barokah**

Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp223 juta atau 18,32% dari sebesar Rp1,22 miliar menjadi Rp1,44 miliar pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Rencana iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 50 nasabah atau 16,39% dibanding tahun 2022.

- **Tabungan Pensiun iB Barokah**

Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp14 juta atau 60,87% dari sebesar Rp23 juta menjadi Rp37 juta pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Tabungan Pensiun iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 106 nasabah atau 1.177,78% dibanding tahun 2022.

- **Deposito Barokah**

Deposito Barokah mengalami peningkatan sebesar Rp381,34 miliar atau 30,62% dari sebesar Rp1,25 triliun menjadi Rp1,63 triliun pada tahun 2023. Dari sisi jumlah nasabah, Deposito Barokah mengalami peningkatan sebanyak 225 nasabah atau 8,18% dibanding tahun 2022.

PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan Syariah terdiri atas Pembiayaan Konsumer, Ritel dan Komersial. Pembiayaan Konsumer meliputi Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas iB Barokah, Umroh iB Maqbullah, Talangan Haji Al Maburur. Pembiayaan Mikro meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

Pembiayaan Mikro Kecil. Pembiayaan Ritel meliputi Linkage Program serta Pembiayaan Komersial meliputi Pembiayaan Umum dan Pembiayaan Modal Kerja Keppres/Kontraktor. Penjelasan masing-masing produk Pembiayaan Syariah telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

Uraian Produktivitas Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PEMBIAYAAN KONSUMER				
Gadai Emas iB Barokah	24.304	22.568	1.736	7,69%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Barokah	735.342	726.913	8.429	1,16%
KPR Komersil	265.936	269.441	(3.505)	(1,30%)
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	469.406	457.473	11.933	2,61%
Pembiayaan Pegawai	141.989	144.281	(2.292)	(1,59%)
Multiguna iB Barokah	47.338	65.248	(17.910)	(27,45%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	1.412	1.443	(31)	(2,15%)
Talangan Umroh iB Maqbullah	239	276	(37)	(13,41%)



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Talangan Haji Al Mabzur	45	90	(45)	(50,00%)
Sub Total Konsumer	950.669	960.819	(10.150)	(1,06%)
PEMBIAYAAN MIKRO, RITEL, DAN KOMERSIAL				
Linkage	69.754	69.233	521	0,75%
a. Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	61.692	49.796	11.896	23,89%
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	8.062	19.437	(11.375)	(58,52%)
Umum	1.053.351	794.949	258.402	32,51%
a. Investasi	715.899	484.098	231.801	47,88%
b. Modal Kerja	312.739	297.087	15.652	5,27%
c. Anjak Piutang	24.713	13.765	10.948	79,54%
Keppres/Kontraktor	102.279	78.470	23.809	30,34%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	11.805	0	11.805	100,00%
Mikro Kecil	0	0	0	0
Sub Total Mikro, Ritel, dan Komersial	1.237.189	942.652	294.537	31,25%
Total	2.187.858	1.903.471	284.387	14,94%

Jumlah Pembiayaan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2,18 triliun naik sebesar Rp284,39 miliar atau 14,94% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,90 triliun yang terdiri dari *Skim* Pembiayaan yang ada antara lain Gadai Emas iB Barokah, KPR iB Griya Barokah, KPR Sejahtera, Pembiayaan Pegawai, Multiguna iB Barokah, Kepemilikan Logam Emas (KLE), Talangan Haji Al Mabzur, Umroh iB Maqbulah, Pembiayaan *Linkage* Program, Pembiayaan Umum, dan Pembiayaan KEPPRES/Kontraktor. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beberapa *Skim* Pembiayaan di antaranya pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11,93 miliar atau 2,61%, Pembiayaan *Linkage* Program sebesar Rp521 juta atau 0,75%, Pembiayaan Investasi sebesar Rp231,80 miliar atau 47,88%, Pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp15,65 miliar atau 5,27% dan Pembiayaan Anjak Piutang sebesar Rp10,95 miliar atau sebesar 79,54% serta Pembiayaan Keppres sebesar Rp23,81 miliar atau sebesar 30,34% .

Uraian nasabah Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam jumlah nasabah)

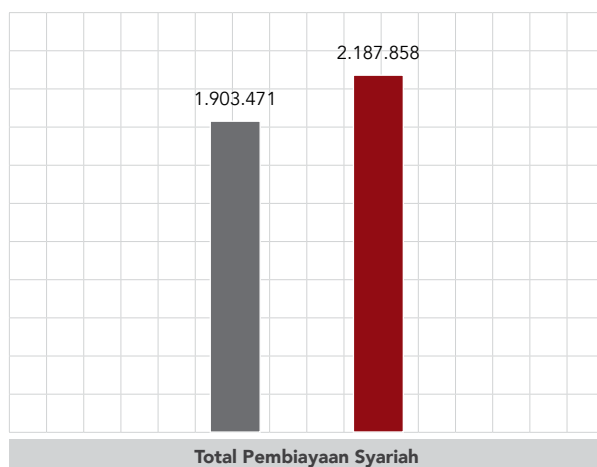
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PEMBIAYAAN KONSUMER				
Gadai Emas iB Barokah	1.379	1.195	184	15,40%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Griya Barokah	5.314	5.135	179	3,49%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KPR Komersil	1.250	1.346	(96)	(7,13%)
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	4.064	3.789	275	7,26%
Pembiayaan Pegawai	513	406	107	26,35%
Multiguna iB Barokah	667	858	(191)	(22,26%)
Kepemilikan Logam Emas (KLE) iB Barokah	146	113	33	29,20%
Talangan Umroh iB Maqbullah	9	7	2	28,57%
Talangan Haji Al Maburr	2	4	(2)	(50,00%)
Sub Total Konsumer	8.030	7.718	312	4,04%
PEMBIAYAAN MIKRO, RITEL, DAN KOMERSIAL				
Linkage	185	223	(38)	(17,04%)
Pembiayaan Koperasi (PKOP)/Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA)	182	216	(34)	(15,74%)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	3	7	(4)	(57,14%)
Umum	750	504	246	48,81%
Investasi	287	183	104	56,83%
Modal Kerja	448	312	136	43,59%
Anjak Piutang	15	9	6	66,67%
Keppres/Kontraktor	109	63	46	73,02%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	97	0	97	100,00%
Mikro Kecil	0	0	0	0,00%
Sub Total Mikro, Ritel, dan Komersial	1.141	790	351	44,43%
Total	9.171	8.508	663	7,79%

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Syariah

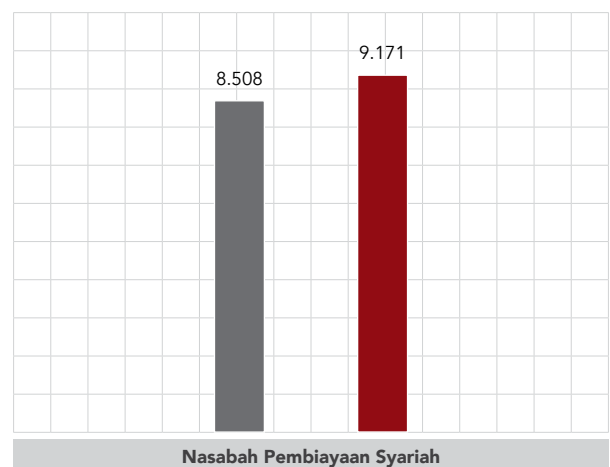
(dalam jutaan Rupiah)



● 2022 ● 2023

Grafik Pertumbuhan Nasabah Pembiayaan Syariah

(dalam Nasabah)



● 2022 ● 2023



Uraian kinerja masing-masing produk Pembiayaan Syariah disajikan sebagai berikut:

1. Segmen Konsumer

a. Emas iB Barokah (Gadai)

Selama tahun 2023, terdapat kenaikan penyaluran pembiayaan melalui Emas iB Barokah mencapai Rp1,74 miliar atau 7,69% dari sebesar Rp22,57 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp24,30 miliar pada tahun 2023. Adapun untuk nasabah Pembiayaan Gadai mengalami peningkatan sebanyak 184 nasabah yang semula dari 1.195 nasabah pada tahun 2022 menjadi 1.379 nasabah pada tahun 2023.

b. KPR iB Griya Barokah

Komposisi KPR Bank Jatim UUS adalah KPR Komersil dan KPR FLPP. Total *outstanding* KPR Griya Barokah pada tahun 2023 adalah Rp735,34 miliar mengalami peningkatan sebesar 1,16% dari pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp726,91 miliar. Pada tahun 2023, penyaluran KPR Komersil mengalami penurunan sebesar 1,30% atau secara nominal sebesar Rp3,51 miliar dari tahun 2022, namun untuk penyaluran KPR FLPP mengalami peningkatan sebesar 2,61% atau secara nominal sebesar Rp11,93 miliar dari tahun 2022. Adapun untuk nasabah dalam penyaluran Pembiayaan KPR mengalami peningkatan untuk KPR Griya Barokah sebanyak 179 nasabah, KPR FLPP meningkat sebanyak 275 nasabah, namun untuk KPR Komersil mengalami penurunan pada sebanyak 96 nasabah.

c. Multiguna iB Barokah

Selama tahun 2023, UUS Bank Jatim mencatatkan penurunan penyaluran pembiayaan Multiguna iB Barokah sebesar Rp17,91 miliar atau 27,45% yakni dari nominal sebesar Rp65,25 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp47,34 miliar pada tahun 2023. Adapun untuk nasabah dalam penyaluran Pembiayaan Multiguna juga mengalami penurunan sebanyak 191 nasabah, yang semula di tahun 2022 sebanyak 858 nasabah, menjadi 667 nasabah di tahun 2023.

d. Kepemilikan Logam Emas iB Barokah

Selama tahun 2023, terdapat penurunan penyaluran pembiayaan melalui Kepemilikan Logam Emas (KLE) sebesar Rp31 juta atau 2,15% dari nominal sebesar Rp1,43 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1,41 miliar pada tahun 2023. Adapun untuk jumlah nasabah pembiayaan Kepemilikan Logam Emas iB Barokah mengalami peningkatan sebanyak 33 nasabah yang semula dari 113 nasabah pada tahun 2022 menjadi 146 nasabah pada tahun 2023.

e. Umroh iB Maqbullah

Penyaluran produk Talangan Umroh iB Maqbullah mengalami penurunan sebesar 13,41% atau sebesar Rp37 juta dari nominal sebesar Rp276 juta pada tahun 2022 menjadi Rp239 juta pada tahun 2023. Dari segi jumlah nasabah, penyaluran pembiayaan Umroh iB Maqbullah mengalami kenaikan sebanyak 2 nasabah di tahun 2023.

f. Talangan Haji

Penyaluran produk Talangan Haji mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 50,00% atau sebesar Rp45 juta dari sebesar Rp90 juta pada tahun 2022 menjadi Rp45 juta di tahun 2023. Khusus untuk pembiayaan Talangan Haji, memang sudah tidak melakukan ekspansi pembiayaan karena adanya regulasi dari Pemerintah sehingga tidak ada peningkatan dalam penyaluran pembiayaan di tahun 2023.

2. Segmen Mikro

a. Pembiayaan KUR

Selama tahun 2023, UUS Bank Jatim meluncurkan produk baru KUR Syariah dan pencapaian atas produk tersebut sebesar Rp11.81 miliar. Adapun untuk jumlah nasabah Pembiayaan KUR Syariah sebanyak 97 nasabah pada tahun 2023.

3. Segmen Ritel

a. Linkage Program

Selama tahun 2023, UUS Bank Jatim telah mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan dengan pola *Linkage Program* mencapai Rp521 juta atau 0,75% dari sebesar Rp 69,233 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp69,754 miliar pada tahun 2023.

Dari segi jumlah nasabah, penyaluran pembiayaan *Linkage Program* mengalami penurunan sebanyak 38 nasabah, yang semula di tahun 2022 sebanyak 216 nasabah, menjadi 185 nasabah di tahun 2023.

4. Segmen Komersial

a. Pembiayaan Umum

Pembiayaan Umum adalah pembiayaan bagi usaha baik individu maupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi. Selama tahun 2023, UUS Bank Jatim telah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan umum sebesar Rp258,40 miliar atau 32,51% dari sebesar Rp794,95 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1,05 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan umum dari segi jumlah nasabah mengalami kenaikan sebanyak 246 nasabah, yakni berasal dari kenaikan nasabah pembiayaan investasi sebanyak 104 nasabah, pembiayaan modal kerja sebanyak 136 nasabah, dan anjak piutang sebanyak 6 nasabah.

b. Pembiayaan Modal Kerja Keppres/Kontraktor

Selama tahun 2023, UUS Bank Jatim mengalami kenaikan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Keppres/Kontraktor mencapai Rp23,81 miliar atau 30,34% dari sebesar Rp78,47 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp102,30 miliar pada tahun 2023. Adapun untuk jumlah nasabah Pembiayaan Modal Kerja Keppres/Kontraktor mengalami peningkatan sebanyak 46 nasabah yang semula dari 63 nasabah pada tahun 2022 menjadi 109 nasabah pada tahun 2023.



JASA LAINNYA - SYARIAH

Bisnis Tresuri Syariah mencakup transaksi pasar uang dan surat berharga yang dilaksanakan oleh Divisi Tresuri. Portofolio Tresuri Syariah meliputi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Sertifikat

Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

Uraian Produktivitas Tresuri Syariah disajikan sebagai berikut:

Tabel Produktivitas Tresuri Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	150.000	145.000	5.000	3,45%
Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	450.000	400.000	50.000	12,50%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA)	450.000	325.000	125.000	38,46%
Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT)	25.000	25.000	0	0,00%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	141.406	102.935	38.471	37,37%
Jumlah	1.216.406	998.163	218.243	21,86%

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah instrumen operasi moneter syariah melalui *standing facilities* di mana Bank melakukan penempatan dana Rupiah di Bank Indonesia yang bertujuan untuk penyerapan likuiditas Bank. Pada tahun 2023, FASBIS Unit Usaha Bank Jatim tercatat sebesar Rp150 miliar, naik sebesar Rp5 miliar atau 3,45% dari Desember 2022. Kenaikan tersebut sebagai akibat kurangnya penyerapan di pasar uang, sehingga sisa dana *idle* ditempatkan pada instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) Absorpsi Bank Indonesia.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah salah satu instrumen Operasi Moneter Syariah Bank Indonesia lainnya yang berfungsi sebagai alat kontraksi untuk menyerap likuiditas berlebih (*absorb*). Instrumen ini memiliki pilihan tenor 7 (tujuh) hari hingga 12 (dua belas) bulan. Selama tahun 2023, Unit Usaha Syariah Bank Jatim aktif dalam keikutsertaan lelang SUKBI dan menjadi alternatif penempatan untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek (di bawah 1 tahun). Pada Bulan Desember 2023, SUKBI Unit Usaha Syariah Bank Jatim tercatat sebesar Rp450 miliar yaitu naik Rp50 miliar dibanding bulan Desember 2022. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan strategi peningkatan rasio likuiditas, dimana perlu meningkatkan portofolio *High Quality Liquid Assets* (HQLA).

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Posisi penempatan SIMA Unit Usaha Syariah Bank Jatim per 31 Desember 2023

sebesar Rp450 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp125 miliar atau 38,46% dibanding Desember 2022. Kenaikan instrumen ini merupakan akibat dari strategi untuk optimalisasi pendapatan sekaligus menjaga likuiditas jangka pendek.

Sertifikat Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim pada Desember 2023 adalah total sebesar Rp25 miliar. Nominal portofolio tersebut tidak berubah dibanding dengan Desember 2022.

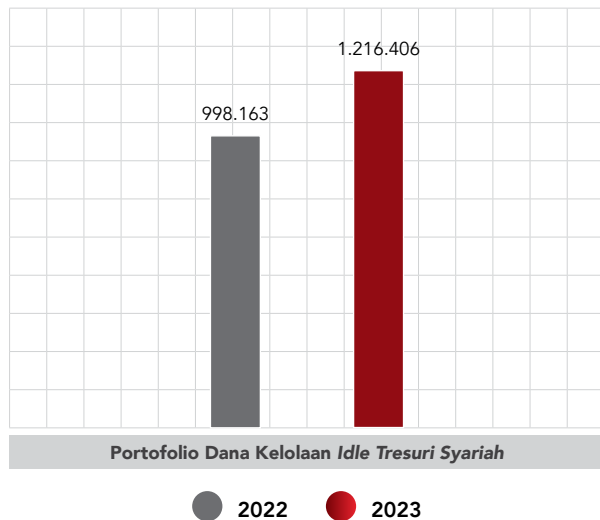
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atas bagian penyertaan terhadap aset dengan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Pada posisi Desember 2023, jenis SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah Sukuk Ritel dengan akad *Ijarah Asset to be Leased* dan *Project Based Sukuk* dengan akad yang sama. Secara keseluruhan, SBSN yang dimiliki Unit Usaha Syariah Bank Jatim mengalami kenaikan sebesar Rp38 miliar atau 36,89% dari Rp103 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp141 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya strategi diversifikasi portofolio Tresuri Syariah, optimalisasi pendapatan dan upaya untuk meningkatkan portofolio HQLA.

Secara keseluruhan pada bulan Desember 2023, dana kelolaan Tresuri Syariah mencapai Rp1.216 miliar atau naik 21,84% dari Desember 2022. Dari jumlah pencapaian tersebut, 86,32% merupakan penempatan dengan jangka waktu pendek, dan hanya 13,68% penempatan berjangka waktu panjang.



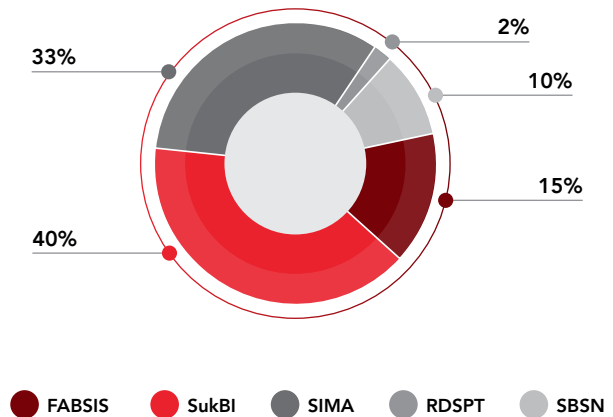
Grafik Portofolio Dana Kelolaan *Idle* Tresuri Syariah

(dalam jutaan Rupiah)



Grafik Komposisi Pengelolaan Dana *Idle* Tresuri Syariah Tahun 2023

(dalam %)



Adapun 3 (tiga) komposisi terbesar yaitu 36,99% penempatan pada SUKBI dengan portofolio Rp450 miliar, 36,99% pada investasi SIMA dengan portofolio sebesar Rp450 miliar, dan 12,33% FABSIS dengan portofolio Rp150 miliar.

Strategi Segmen Syariah Tahun 2023

Strategi DPK dan Pembiayaan Segmen Syariah yang dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

• Strategi DPK Syariah Tahun 2023

Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dimana menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Maintenance* Nasabah *Existing*

a. *Recall* Nasabah *Dormant*/Tidak Aktif (*Giro*/Tabungan/Deposito)

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crossselling*.

b. Pelaksanaan Program Tebar Barokah Periode 1 Tahun 2023

Program Tebar Barokah ini bertujuan agar nasabah pemilik rekening Tabungan Barokah dapat meningkatkan saldo di rekeningnya. Pemberian hadiah dilakukan melalui sistem *redeem poin* dimana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata diakhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan *redeem poin* adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.

c. *Gathering* dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala

Gathering akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah dalam

rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah. Salah satu *gathering* yang akan dilakukan di triwulan pertama tahun 2023 adalah *campaign* haji muda kepada seluruh pondok pesantren anggota *One Pesantren One Product* (OPOP) Jatim bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan OPOP Jatim yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah dan nominal Tabungan Haji iB Amanah.

2. Akuisisi Nasabah Baru

a. Pelaksanaan Program Haji Barokah

Program Haji Barokah ini dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2023, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2023. Hadiah diberikan bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB Amanah sekaligus melakukan pendaftaran porsi haji. Adapun hadiah yang diberikan kepada nasabah berupa logam emas seberat 0,05 gram serta hadiah menarik lainnya (*cluth/sajadah/tumbler*).

b. Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS) Batch 6

Program TBS *Batch 6* merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu. Program ini berlaku sejak tanggal 1 September 2022 hingga 1 Maret 2023 dan akan dilanjutkan ke *Batch 7* yang



berlaku sejak 2 Maret hingga 2 September 2023. Program tersebut juga dapat diimplementasikan di Kantor Layanan Syariah.

c. Berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam peningkatan pendaftaran Haji

Sebagai upaya dalam peningkatan pendaftar haji melalui Tabungan Haji iB Amanah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan BPKH untuk memberikan *referral fee* sebesar Rp100 ribu bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang membawa jemaahnya untuk membuka rekening Tabungan Haji iB Amanah sekaligus melakukan pendaftaran setoran awal haji di Bank Jatim Syariah. Mekanisme pemberian *referral* tersebut menggunakan mekanisme *reimburse* ke BPKH.

d. Berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) dalam meningkatkan jumlah Nazhir dan Wakif

Untuk meningkatkan penghimpunan dana di rekening Giro iB Barokah melalui layanan Wakaf iB Barokah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan BWI dan GWI untuk melakukan sosialisasi kepada Nazhir yang ada di Jawa Timur terkait pengembangan wakaf uang produktif. Kegiatan tersebut dilakukan setiap triwulan ke beberapa daerah dengan potensi wakaf yang besar.

e. Pelaksanaan Lomba Santri Sholawat Virtual Serta Lomba Adzan

Berkolaborasi dengan Rumah Sedekah NU Jatim, Bank Jatim Syariah mengadakan lomba Santri sholawat *virtual* serta lomba adzan. Adapun peserta berasal dari Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah dan nominal Tabungan Santri dimana peserta lomba wajib membuka rekening Tabungan Santri sebagai syarat administrasi serta menampilkan produk atau layanan Bank Jatim Syariah di video yang dikirimkan ke panitia lomba. Pemenang akan diberikan uang pembinaan yang akan ditransfer ke rekening Tabungan Santri.

f. Pemberian Sponsorship dalam Podcast Rumah Sedekah NU Jatim

Kolaborasi dengan Rumah Sedekah NU Jatim dalam program *podcast* tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang perolehan Deposito Barokah dikarenakan sebagian besar narasumber *podcast* yang diadakan oleh Rumah Sedekah NU Jatim berasal dari wirausaha di Jawa Timur.

• **Strategi Pembiayaan Syariah Tahun 2023**

Langkah-langkah strategis pembiayaan yang merupakan agenda prioritas yang ditempuh pada periode tahun 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan rencana pencairan pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui yang belum terealisasi di tahun 2022.
2. Percepatan proses untuk usulan pembiayaan yang sudah masuk proses di Kantor Pusat UUS Bank Jatim.
3. Fokus penyaluran pembiayaan di Kantor Cabang Syariah sesuai dengan segmentasi pembiayaan, yakni: segmen mikro, segmen ritel, segmen menengah, serta segmen konsumtif dan properti. Untuk segmen korporasi dikelola oleh Kantor Pusat.
4. Optimalisasi Tenaga Analis
 - a. Target ekspansi pembiayaan *gross* masing-masing analis di setiap cabang adalah sebesar Rp2 miliar untuk segmen mikro dan ritel, sedangkan untuk segmen konsumtif dan properti sebesar Rp3 miliar setiap bulan.
 - b. Pemberian *reward/insentif* didasarkan atas pencapaian kinerja masing-masing analis.
5. Kerjasama dengan PT Makmur Berkas Amanda (MBA) dalam mensukseskan program Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan Jatim Bangkit sejak tahun 2021, yang merupakan potensi pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian gudang untuk investasi.
6. Pendekatan Ke *Developer/Pengembang*
 - a. Target *closing* pembiayaan KPR minimal 3 (tiga) *user* per bulan untuk masing-masing *developer* yang sudah PKS dengan cabang syariah.
 - b. Kerjasama dengan komunitas-komunitas *developer* seperti Himpera, Apersi, Apernas, REI, dan lain-lain.
7. Rencana kerjasama dengan Pemerintah untuk mendapatkan kuota penyaluran pembiayaan KUR dan mendukung program kerja Bank Jatim pada tahun 2023 sebagai Bank yang memiliki *background* pembiayaan berbasis UMKM.
8. Pendekatan dengan Komunitas UMKM
 - a. Kerjasama dengan Muslimat NU seluruh Jawa Timur untuk penyaluran pembiayaan mikro.
 - b. Kerjasama dengan Kopontren di seluruh Jawa Timur dalam Program *One Pesantren One Product* (OPOP).
9. Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan *Linkage* Baitul Maal wa Tamwil (BMT)/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
 - a. Penyaluran kepada BPRS milik pemda ataupun swasta yang memiliki bonafiditas dan kredibilitas yang tinggi.
 - b. Mengaktifkan kembali penyaluran pembiayaan kepada koperasi, baik penyaluran dengan pola eksekuting maupun pola *chanelling*



Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Syariah

Keunggulan kompetitif diperoleh melalui akad syariah yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dan terhindar dari transaksi ribawi. Namun demikian inovasi perlu diciptakan untuk menjaga kenyamanan nasabah yang memilih transaksi secara syariah, di antaranya adalah inovasi *digital* syariah. Melalui produk dan akad yang berbeda, produk syariah dapat menjadi alternatif untuk nasabah dalam rangka meningkatkan investasi yang berkeadilan dengan bagi hasil yang menarik melalui akad bagi hasil ataupun akad murabahah dengan produk pembelian logam mulia. Serta dapat juga membantu meringankan beban likuiditas nasabah sementara waktu melalui produk Emas iB Barokah (gadai emas). Diharapkan dengan keunggulan dan inovasi ini, segmen syariah dapat meningkatkan pangsa pasar Bank Jatim secara keseluruhan dan *entry barrier* bagi kompetitor bank syariah lainnya.

Prospek dan Strategi Segmen Syariah Tahun 2024

Strategi DPK Syariah melalui peningkatan CASA dan *fee based income* dengan menggunakan dua pendekatan strategi yaitu *maintenance* nasabah *existing* serta akuisisi nasabah baru yang diuraikan sebagai berikut:

• Prospek dan Strategi DPK Syariah Tahun 2024

1. *Maintenance* Nasabah *Existing*

a. *Recall* Nasabah *Dormant/Tidak Aktif (Giro/Tabungan/Deposito)*

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh *funding officer* untuk melakukan komunikasi kembali dengan nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi namun masih memiliki saldo. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan saldo DPK sekaligus *crossselling*.

b. Pelaksanaan Program Tebar Barokah 2024

Program Tebar Barokah ini bertujuan agar nasabah pemilik rekening Tabungan Barokah dapat meningkatkan saldo di rekeningnya. Pemberian hadiah dilakukan melalui sistem redeem poin dimana nasabah yang berhak mendapatkan poin adalah nasabah dengan saldo rata-rata diakhir bulan sebesar 1 (satu) juta rupiah. Sedangkan yang berhak melakukan redeem poin adalah nasabah yang telah memperoleh 500 poin.

c. *Gathering* dengan Mitra dan Nasabah potensial secara berkala

Gathering akan dilakukan secara berkala dengan mitra dan Nasabah Bank Jatim Syariah dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pelayanan kepada nasabah sehingga akan meningkatkan jumlah transaksi nasabah di Bank Jatim Syariah.

2. Akuisisi Nasabah Baru

a. Program Haji Barokah

Pemberian *reward* kepada nasabah yang melakukan pendaftaran porsi haji berupa hadiah khusus serta pemberian *reward* kepada Kantor

layanan Syariah dengan nasabah yang mendaftar porsi haji terbanyak di setiap semester di tahun 2024.

b. Program Tabungan Barokah Sejahtera (TBS)

Program TBS merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan nasabah Tabungan Barokah dimana nasabah akan dapat menerima hadiah secara langsung dengan pengendapan saldo dalam jangka waktu tertentu. Program yang sedang berjalan yaitu TBS *Batch 8* yang dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai 30 Maret 2024 dan akan dilanjutkan ke *Batch 9*.

c. Program Barokah Madani Festival (BaniFest) 2024

Sebagai upaya dalam peningkatan pendaftar haji melalui Tabungan Haji iB Amanah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengadakan program bersama (*joint program*) terkait campaign Haji Muda. Tabungan Haji Muda 2024 selain bagi segmen pelajar dan mahasiswa, juga bisa ditujukan bagi segmentasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

d. Program Cinta Wakaf

Untuk meningkatkan penghimpunan dana di rekening Giro iB Barokah melalui layanan Wakaf iB Barokah, maka Bank Jatim Syariah berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan sosialisasi kepada nazhir yang ada di Jawa Timur terkait pengembangan wakaf uang produktif. Kegiatan tersebut dilakukan setiap triwulan ke beberapa daerah dengan potensi wakaf yang besar.

e. Program BJS Vaganza 2024

Berkolaborasi dengan Masjid Raya Islamic Center dan Masjid Al Akbar Surabaya untuk mengadakan kegiatan Lomba Banjari, Lomba Tahfidz, Lomba Adzan dan Literasi Keuangan Syaria pada momen hari besar Agama Islam. Pemenang akan diberikan uang pembinaan yang akan ditransfer ke rekening Tabungan Santri.

Prospek Usaha dan Strategi Pembiayaan Syariah Tahun 2024

Uraian prospek usaha dan strategi Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan percepatan proses *Service Level Agreement* (SLA) terhadap usulan pembiayaan yang diproses di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.
2. Fokus penyaluran pembiayaan kepada sektor pendidikan/pesantren, kesehatan, usaha UMKM, koperasi yang akan menjadi Customer Based dalam penguasaan ekosistem pasar di UUS Bank Jatim.
3. Turut serta mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pembangunan 1 juta rumah dengan berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi (KPR FLPP).



4. Mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah di antaranya adalah turut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan Jalan Tol maupun pembiayaan sindikasi lainnya. Selain itu untuk pembiayaan sindikasi ini kita dapat mengoptimalkan rencana pencairan sisa fasilitas tarik pembiayaan sindikasi maupun pembiayaan lain yang sudah disetujui.
5. Optimalisasi penyaluran pembiayaan KUR Syariah pada tahun 2024.
6. Usulan penyesuaian margin sesuai rate yang berlaku dan bisa bersaing di pasaran.
7. Melakukan diversifikasi produk pembiayaan dengan penyaluran *Cash Collateral Financing* (CCF) pada tahun 2024.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

Pendapatan operasional segmen syariah tahun 2023 sebesar Rp230.764 juta, naik sebesar 17,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp196.878 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga.

Laba operasional segmen syariah tahun 2023 sebesar Rp33.812 juta, menurun sebesar 12,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp38.791 juta. Hal tersebut dipengaruhi kenaikan biaya tenaga kerja.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset	3.620.590	3.071.458	549.132	17,88%
Liabilitas	3.586.345	3.030.788	555.557	18,33%
Pendapatan operasional	230.764	196.878	33.887	17,21%
Laba operasional	33.812	38.791	(4.978)	(12,83%)

Segmen Geografis

Selain dari segmen operasi, dalam menjalankan kegiatannya Bank Jatim dapat ditinjau dari segmen geografis.

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan Jawa selain Jawa Timur.

Produktivitas Geografis

Informasi mengenai produktivitas segmen geografis Jawa Timur dan Jawa selain Jawa Timur telah disajikan dalam bagian penjelasan dan produktivitas segmen konvensional.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Pendapatan operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2023 mencapai Rp4.567.696 juta, menurun sebesar 13,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5.292.622 juta. Laba operasional segmen geografis Jawa Timur tahun 2023 mencapai Rp1.913.098 juta, menurun sebesar 2,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.956.365 juta. Penurunan tersebut berasal dari penurunan pendapatan operasional lainnya.

Sedangkan untuk pendapatan operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2023 mencapai Rp1.121.825 juta, meningkat sebesar 27,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp879.492 juta. Rugi operasional segmen geografis Jawa selain Jawa Timur tahun 2023 mencapai Rp58.055 juta, menurun sebesar 273,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp15.539 juta. Penurunan tersebut berasal dari turunnya laba operasional dan pendapatan operasional lainnya.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jawa Timur	Jawa Selain Jawa Timur	Eliminasi	Total
2023				
Aset	85.572.614	18.809.015	526.855	103.854.774
Liabilitas	73.363.489	18.867.071	526.855	91.703.705
Pendapatan operasional	4.567.696	1.121.825	-	5.689.521
Laba operasional	1.913.098	(58.055)	-	1.855.043
2022				
Aset	81.433.044	22.109.020	510.697	103.031.367
Liabilitas	69.971.644	22.124.559	510.697	91.585.506
Pendapatan operasional	5.292.622	879.492	-	6.172.114
Laba operasional	1.956.365	(15.539)	-	1.940.826
Pertumbuhan 2022-2023 (%)				
Aset	5,08%	(14,93%)	3,16%	0,80%
Liabilitas	4,85%	(14,72%)	3,16%	0,13%
Pendapatan operasional	(13,70%)	27,55%	-	(7,82%)
Laba operasional	(2,21%)	273,61%	-	(4,42%)





Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan mendapat opini menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Jatim terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	2.652.775	1.988.262	664.513	33,42%
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	(2.815.328)	(26,10%)
Giro pada bank lain	491.330	303.129	188.201	62,09%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(441)	(636)	144,22%
Giro pada bank lain - neto	490.253	302.688	187.565	61,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	6.916.329	(1.681.608)	(24,31%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	(3.154)	(1.872)	59,35%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	5.229.695	6.913.175	(1.683.480)	(24,35%)
Tagihan spot dan derivatif	-	361	(361)	(100,00%)
Surat berharga	16.323.831	23.217.671	(6.893.840)	(29,69%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(511)	(400)	(111)	27,75%
Surat-surat berharga - neto	16.323.320	23.217.271	(6.893.951)	(29,69%)
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	4.095.066	4.208.597	102,77%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	7.822.847	(1.575.529)	(20,14%)
Tagihan lainnya	223.138	286.147	(63.009)	(22,02%)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	184.848	134.871	49.977	37,06%
- Pihak ketiga	54.576.055	46.061.786	8.514.269	18,48%
Jumlah kredit yang diberikan	54.760.903	46.196.657	8.564.246	18,54%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(1.318.612)	(46.293)	3,51%
Kredit yang diberikan - neto	53.395.998	44.878.045	8.517.953	18,98%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	646.125	39.609	6,13%
Biaya dibayar dimuka	207.452	166.661	40.791	24,48%
Aset tetap				
Biaya perolehan	2.230.878	2.109.260	121.618	5,77%
Akumulasi penyusutan	(953.165)	(825.010)	(128.155)	15,53%
Nilai buku	1.277.713	1.284.250	(6.537)	(0,51%)
Aset pajak tangguhan, neto	472.123	502.238	(30.115)	(6,00%)
Piutang pajak	777	493	284	57,61%
Aset lain-lain, neto	373.402	140.998	232.404	164,83%
JUMLAH ASET	103.854.773	103.031.367	823.406	0,80%

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITAS				
Liabilitas segera	987.604	872.514	115.090	13,19%
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	12.644.538	15.295.405	(2.650.867)	(17,33%)
- Pihak ketiga	63.205.317	64.630.285	(1.424.968)	(2,20%)
Jumlah simpanan dari nasabah	75.849.855	79.925.690	(4.075.835)	(5,10%)
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	56.694	141.996	(85.302)	(60,07%)
- Pihak ketiga	2.503.627	3.168.842	(665.215)	(20,99%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.560.321	3.310.838	(750.517)	(22,67%)
Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	0,00%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.915.163	3.891.346	4.023.817	103,40%
Pinjaman yang diterima	596.977	631.464	(34.487)	(5,46%)
Utang pajak	143.245	90.783	52.462	57,79%
Beban yang masih harus dibayar	504.748	520.840	(16.092)	(3,09%)
Liabilitas lain-lain	779.314	472.054	307.260	65,09%
JUMLAH LIABILITAS	89.337.227	89.715.529	(378.302)	(0,42%)

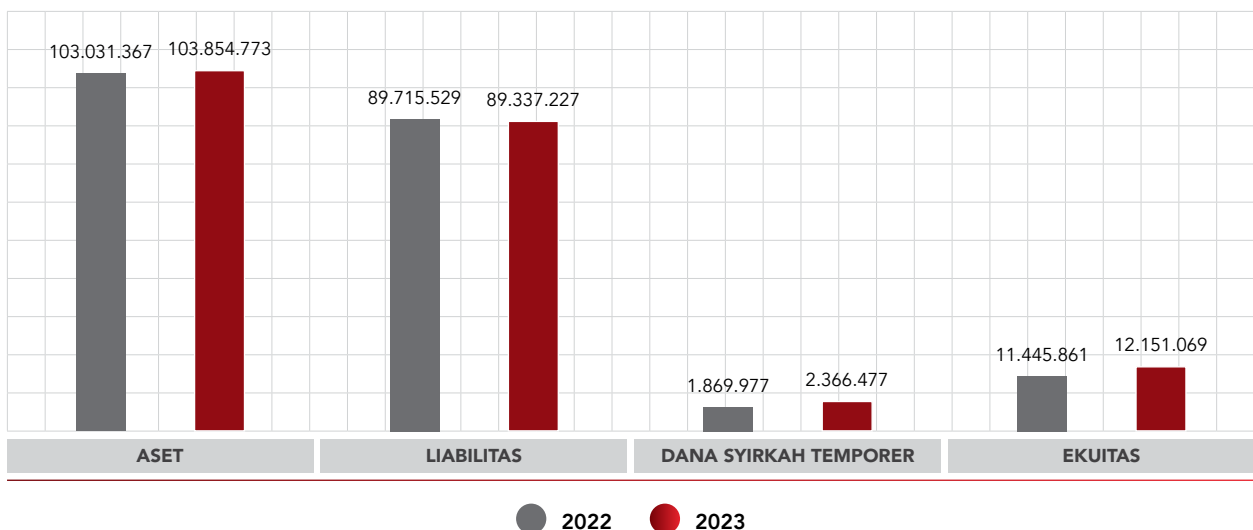
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan dari nasabah				
- Pihak berelasi	3.764	2.302	1.462	63,51%
- Pihak ketiga	2.343.291	1.839.390	503.901	27,40%
Jumlah simpanan dari nasabah	2.347.055	1.841.692	505.363	27,44%
Simpanan dari bank lain				
- Pihak berelasi	-	-	-	0,00%
- Pihak ketiga	19.422	28.285	(8.863)	(31,33%)



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Jumlah simpanan dari bank lain	19.422	28.285	(8.863)	(31,33%)
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	2.366.477	1.869.977	496.500	26,55%
EKUITAS				
Modal saham:				
- Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
- Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
- Seri A: 24.000.000.000 saham				
- Seri B: 12.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
- Seri A - 11.934.147.982 saham				
- Seri B - 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor – neto	532.734	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	788.049	789.998	(1.949)	(0,25%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(117.777)	(100.912)	(16.865)	16,71%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(63.958)	(115.048)	51.090	(44,41%)
Saldo laba				
Cadangan umum	5.788.041	5.042.390	745.651	14,79%
Belum ditentukan penggunaannya	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
JUMLAH EKUITAS	12.151.069	11.445.861	705.208	6,16%
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	103.854.773	103.031.367	823.406	0,80%

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)





Aset

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, jumlah aset Bank Jatim sebesar Rp103.854.773 juta, meningkat sebesar 0,80% dari tahun lalu sebesar Rp103.031.367 juta. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh meningkatnya giro pada

bank lain - neto, kredit yang diberikan - neto, surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali (reverse repo) dan aset lain - neto.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kas	2.652.775	1.988.262	664.513	33,42%
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	(2.815.328)	(26,10%)
Giro pada bank lain	491.330	303.129	188.201	62,09%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(441)	(636)	144,22%
Giro pada bank lain - neto	490.253	302.688	187.565	61,97%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	6.916.329	(1.681.608)	(24,31%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	(3.154)	(1.872)	59,35%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	5.229.695	6.913.175	(1.683.480)	(24,35%)
Tagihan spot dan derivatif	-	361	(361)	(100,00%)
Surat berharga	16.323.831	23.217.671	(6.893.840)	(29,69%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(511)	(400)	(111)	27,75%
Surat-surat berharga - neto	16.323.320	23.217.271	(6.893.951)	(29,69%)
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	4.095.066	4.208.597	102,77%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	7.822.847	(1.575.529)	(20,14%)
Tagihan lainnya	223.138	286.147	(63.009)	(22,02%)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				
- Pihak berelasi	184.848	134.871	49.977	37,06%
- Pihak ketiga	54.576.055	46.061.786	8.514.269	18,48%
Jumlah kredit yang diberikan	54.760.903	46.196.657	8.564.246	18,54%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(1.318.612)	(46.293)	3,51%
Kredit yang diberikan - neto	53.395.998	44.878.045	8.517.953	18,98%
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	646.125	39.609	6,13%
Biaya dibayar dimuka	207.452	166.661	40.791	24,48%
Aset tetap				
Biaya perolehan	2.230.878	2.109.260	121.618	5,77%
Akumulasi penyusutan	(953.165)	(825.010)	(128.155)	15,53%
Nilai buku neto	1.277.713	1.284.250	(6.537)	(0,51%)
Aset pajak tangguhan, neto	472.123	502.238	(30.115)	(6,00%)
Piutang pajak	777	493	284	57,61%
Aset lain-lain, neto	373.402	140.998	232.404	164,83%
JUMLAH ASET	103.854.773	103.031.367	823.406	0,80%



Kas

Kas yang tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp2.652.775 juta, meningkat sebesar 33,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.988.262 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah kas dengan mata uang rupiah yang jauh meningkat jumlahnya dan dari jumlah kas dengan mata uang asing juga meningkat jumlahnya.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	2.593.983	1.946.513	647.470	33,26%
Mata uang asing	58.792	41.749	17.043	40,82%
Jumlah kas	2.652.775	1.988.262	664.513	33,42%

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2023 mencapai Rp7.971.412 juta, menurun sebesar 26,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp10.786.740 juta. Penurunan tersebut berasal dari jumlah giro pada Bank Indonesia di Indonesia sektor rupiah banyak mengalami penurunan.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	7.940.618	10.774.286	(2.833.668)	(26,30%)
Dolar Amerika Serikat	30.794	12.454	18.340	147,26%
Jumlah giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	(2.815.328)	(26,10%)

Giro Pada Bank Lain - Neto

Giro pada Bank lain tahun 2023 mencapai Rp490.253 juta, meningkat sebesar 61,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp302.688 juta. Kenaikan tersebut berasal dari jumlah giro pada bank lain meningkat dan giro pada bank lain mata uang asing meningkat.

Tabel Giro Pada Bank Lain - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	336.488	190.457	146.031	76,67%
Mata Uang Asing	154.842	112.672	42.170	37,43%
Jumlah	491.330	303.129	188.201	62,09%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(441)	(636)	144,22%
Neto	490.253	302.688	187.565	61,97%



Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Neto

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain tahun 2023 mencapai Rp5.229.695 juta, menurun sebesar 24,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.913.175 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penempatan baik pada Bank Indonesia maupun bank lain di jenis interbank *call money*.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Deposito berjangka:	1.500	7.000	(5.500)	(78,57%)
Pasar Uang Antar Bank:	4.083.367	4.165.000	(81.633)	(1,96%)
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Term Deposit Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	1.149.854	2.744.329	(1.594.475)	(58,10%)
Jumlah	5.234.721	6.916.329	(1.681.608)	(24,31%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	(3.154)	(1.872)	59,35%
Neto	5.229.695	6.913.175	(1.683.480)	(24,35%)

Surat-Surat Berharga - Neto

Surat-surat berharga yang dimiliki Bank Jatim tahun 2023 mencapai Rp16.323.320 juta, menurun sebesar 29,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp23.217.271 juta. Penurunan ini disebabkan atas pembelian surat berharga 1-5 tahun yang menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel Surat-Surat Berharga Berdasarkan Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kurang dari 1 tahun	11.668.277	986.769	10.681.508	1.082,47%
1 - 5 tahun	4.655.554	22.230.902	(17.575.348)	(79,06%)
Dikurangi: Penyisihan kerugian kerugian penurunan nilai	(511)	(400)	(111)	27,75%
Jumlah surat-surat berharga	16.323.320	23.217.271	(6.893.951)	(29,69%)

Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat-surat yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan nilai bersih yang dimiliki Bank Jatim tahun 2023 sebesar Rp6.247.318 juta, menurun sebesar 20,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.822.847 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pembelian kembali surat berharga.



Tabel Surat-Surat Yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (Reverse Repo) Berdasarkan Nilai Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Surat Utang Negara				
FR0088	-	42.540	(42.540)	(100,00%)
FR0065	-	116.204	(116.204)	(100,00%)
VR0078	-	286.561	(286.561)	(100,00%)
VR0037	-	139.793	(139.793)	(100,00%)
FR0096	-	28.674	(28.674)	(100,00%)
VR0053	-	116.820	(116.820)	(100,00%)
VR0037	-	931.787	(931.787)	(100,00%)
VR0046	-	192.171	(192.171)	(100,00%)
VR0050	-	1.004.871	(1.004.871)	(100,00%)
VR0062	-	906.872	(906.872)	(100,00%)
VR0075	-	234.413	(234.413)	(100,00%)
VR0045	-	924.708	(924.708)	(100,00%)
VR0034	-	382.733	(382.733)	(100,00%)
VR0036	-	574.107	(574.107)	(100,00%)
VR0065	-	370.747	(370.747)	(100,00%)
FR0091	418.067	-	418.067	0,00%
FR0084	347.529	99.964	247.565	247,65%
FR0068	108.098	-	108.098	0,00%
VR0068	24.823	381.593	(356.770)	(93,49%)
VR0073	71.732	-	71.732	0,00%
VR0070	25.358	-	25.358	0,00%
VR0083	49.706	-	49.706	0,00%
VR0063	380.789	-	380.789	0,00%
VR0044	290.042	189.961	100.080	52,68%
VR0045	48.340	-	48.340	0,00%
VR0093	48.295	-	48.295	0,00%
VR0072	75.325	46.900	28.425	60,61%
FR0059	584.743	-	584.743	0,00%
FR0082	483.626	-	483.626	0,00%
FR0087	946.562	368.983	577.579	156,53%
FR0076	592.686	-	592.686	0,00%
FR0080	495.055	-	495.055	0,00%
FR0083	201.649	192.726	8.924	4,63%
FR0085	200.538	-	200.538	0,00%
FR0098	194.769	-	194.769	0,00%
FR0081	286.191	149.068	137.122	91,99%
FR0090	185.319	-	185.319	0,00%
VR0077	188.074	140.651	47.423	33,72%
Jumlah	6.247.318	7.822.847	(1.575.529)	(20,14%)



Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya tahun 2023 mencapai Rp223.138 juta, menurun sebesar 22,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp286.147 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya tagihan transfer dan ATM.

Tabel Tagihan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tagihan transfer dan ATM	122.780	194.150	(71.370)	(36,76%)
Lainnya	100.358	91.997	8.361	9,09%
Jumlah tagihan lainnya - Neto	223.138	286.147	(63.009)	(22,02%)

Kredit Yang Diberikan - Neto

Kredit yang diberikan tahun 2023 mencapai Rp53.395.998 juta, meningkat sebesar 18,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp44.878.045 juta. Peningkatan ini didominasi oleh naiknya kredit pihak ketiga.

Tabel Kredit Yang Diberikan - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kredit yang diberikan				
Pihak berelasi (catatan 40)	184.848	134.871	49.977	37,06%
Pihak ketiga	54.576.055	46.061.786	8.514.269	18,48%
Jumlah kredit yang diberikan	54.760.903	46.196.657	8.564.246	18,54%
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(1.318.612)	(46.293)	3,51%
Kredit yang diberikan - neto	53.395.998	44.878.045	8.517.953	18,98%

Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima

Pendapatan bunga yang masih akan diterima tahun 2023 mencapai Rp685.734 juta, Meningkat sebesar 6,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp646.125 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan di sektor lain-lain.

Tabel Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah:				
Kredit yang diberikan	377.219	340.021	37.198	10,94%
Lain-lain	308.346	306.091	2.255	0,74%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Mata uang asing:				
Dolar Amerika Serikat	169	13	156	1.200,00%
Jumlah Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	646.125	39.609	6,13%

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka tahun 2023 mencapai Rp207.452 juta, meningkat sebesar 24,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp166.661 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan asuransi tunjangan hari tua, asuransi lainnya, sewa dibayar dimuka dan lainnya.

Tabel Biaya Dibayar Dimuka

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi tunjangan hari tua	97.840	88.765	9.075	10,22%
Sewa dibayar dimuka	50.048	37.924	12.124	31,97%
Asuransi lainnya	22.372	6.216	16.156	259,91%
Lainnya	37.192	33.756	3.436	10,18%
Jumlah biaya dibayar dimuka	207.452	166.661	40.791	24,48%

Aset Tetap

Aset tetap di tahun 2023 mencapai Rp1.277.713 juta, menurun sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.284.250 juta. Penurunan tersebut yang terbesar berasal dari biaya perolehan tanah.

Tabel Aset Tetap

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Biaya perolehan				
Tanah	943.060	945.010	(1.950)	(0,21%)
Bangunan	203.722	203.402	320	0,16%
Peralatan kantor	736.757	678.419	58.338	8,60%
Kendaraan bermotor	51.710	50.516	1.194	2,36%
	1.935.249	1.877.347	57.902	3,08%
Aset dalam penyelesaian	796	681	115	16,89%
Aset Hak Guna	294.833	231.232	63.601	27,51%
Total biaya Perolehan	2.230.878	2.109.260	121.618	5,77%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	125.475	116.296	9.179	7,89%
Peralatan kantor	642.566	574.638	67.928	11,82%
Kendaraan bermotor	19.490	24.616	(5.126)	(20,82%)
Aset Hak Guna	165.634	109.460	56.174	51,32%
Total akumulasi penyusutan	953.165	825.010	128.155	15,53%
Nilai buku neto	1.277.713	1.284.250	(6.537)	(0,51%)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan di tahun 2023 mencapai Rp472.123 juta, menurun sebesar 6,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp502.238 juta. Penurunan tersebut rata-rata berasal dari cadangan jasa produksi, penyisihan kerugian aset produktif, cadangan lainnya, dan laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Aset Pajak Tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	69.830	73.284	(3.454)	(4,71%)
Penyisihan kerugian aset produktif	328.215	340.736	(12.521)	(3,67%)
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.002	26.986	(11.984)	(44,41%)
Cadangan lainnya	7.758	13.381	(5.623)	(42,02%)
Sewa	(995)	(1.014)	19	(1,78%)
Cadangan imbalan kerja	52.313	48.865	3.448	7,06%
Aset pajak tangguhan	472.123	502.238	(30.115)	(6,00%)

Aset Lain-Lain - Neto

Aset lain-lain di tahun 2023 mencapai Rp373.402 juta, meningkat sebesar 164,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp140.998 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan beban yang ditangguhkan, persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta aset lainnya, neto.

Tabel Aset Lain-Lain - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban yang ditangguhkan	126.337	110.112	16.225	14,73%
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	22.263	19.812	2.451	12,37%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Surat ketetapan pajak lebih bayar	-	-	-	0,00%
Lainnya, neto	283.458	54.486	228.972	420,24%
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(58.656)	(43.412)	(15.244)	35,11%
Jumlah aset lain-lain - Neto	373.402	140.998	232.404	164,83%

Liabilitas

Liabilitas di tahun 2023 mencapai Rp89.337.227 juta, turun sebesar 0,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp89.715.529. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas segera	987.604	872.514	115.090	13,19%
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	12.644.538	15.295.405	(2.650.867)	(17,33%)
Pihak ketiga	63.205.317	64.630.285	(1.424.968)	(2,20%)
Jumlah simpanan dari nasabah	75.849.855	79.925.690	(4.075.835)	(5,10%)
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	56.694	141.996	(85.302)	(60,07%)
Pihak ketiga	2.503.627	3.168.842	(665.215)	(20,99%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.560.321	3.310.838	(750.517)	(22,67%)
Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	0,00%
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	7.915.163	3.891.346	4.023.817	103,40%
Pinjaman yang diterima	596.977	631.464	(34.487)	(5,46%)
Utang pajak	143.245	90.783	52.462	57,79%
Beban yang masih harus dibayar	504.748	520.840	(16.092)	(3,09%)
Liabilitas lain-lain	779.314	472.054	307.260	65,09%
JUMLAH LIABILITAS	89.337.227	89.715.529	(378.302)	(0,42%)

Liabilitas Segera

Liabilitas segera di tahun 2023 mencapai Rp987.604 juta, meningkat sebesar 13,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp872.514 juta. Peningkatan tersebut rata - rata berasal dari penerimaan dana yang akan diperhitungkan, ATM Bersama dan lain-lain.



Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Transfer, inkaso dan kliring	308.136	319.871	(11.735)	(3,67%)
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan	150.838	122.431	28.407	23,20%
Beban sudah efektif harus dibayar	73.803	91.760	(17.957)	(19,57%)
ATM Bersama	21.013	12.779	8.234	64,43%
Lain-lain	433.814	325.673	108.141	33,21%
Liabilitas segera	987.604	872.514	115.090	13,19%

Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah di tahun 2023 mencapai Rp75.849.855 Juta, menurun sebesar 5,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp79.925.690 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi dan simpanan dari nasabah pihak ketiga.

Tabel Simpanan dari Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	12.644.538	15.295.405	(2.650.867)	(17,33%)
Pihak ketiga	63.205.317	64.630.285	(1.424.968)	(2,20%)
Jumlah simpanan dari nasabah	75.849.855	79.925.690	(4.075.835)	(5,10%)

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain di tahun 2023 mencapai Rp2.560.321 juta, menurun sebesar 22,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.310.838 juta. Penurunan tersebut berasal dari simpanan dari bank lain pihak ketiga dan pihak berelasi.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	56.694	141.996	(85.302)	(60,07%)
Pihak ketiga	2.503.627	3.168.842	(665.215)	(20,99%)
Jumlah simpanan dari bank lain	2.560.321	3.310.838	(750.517)	(22,67%)

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima di tahun 2023 mencapai Rp596.977 juta, menurun sebesar 5,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp631.464 juta. Penurunan tersebut berasal dari turunnya pinjaman yang diterima dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi) dan PT Sarana Multigriya Financial.



Tabel Pinjaman Yang Diterima

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	490.810	481.532	9.278	1,93%
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	39.253	76.698	(37.445)	(48,82%)
PT Sarana Multigriya Financial	66.821	71.867	(5.046)	(7,02%)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)	93	1.367	(1.274)	(93,20%)
Jumlah pinjaman yang diterima	596.977	631.464	(34.487)	(5,46%)

Utang Pajak

Utang pajak di tahun 2023 mencapai Rp143.245 juta, meningkat sebesar 57,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp90.783 juta. Kenaikan tersebut berasal dari pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29 (catatan 22f) dan pajak penghasilan pasal 23/4 (2).

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pajak penghasilan pasal 25	59.450	43.577	15.873	36,43%
Pajak penghasilan pasal 21	48.108	30.453	17.655	57,97%
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	14.321	10.489	3.832	36,53%
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 22f)	20.951	5.803	15.148	261,04%
Lain-lain	415	461	(46)	(9,98%)
Utang pajak	143.245	90.783	52.462	57,79%

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar di tahun 2023 mencapai Rp504.748 juta, menurun sebesar 3,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp520.840 juta. Penurunan tersebut berasal dari cadangan jasa produksi.

Tabel Beban Yang Masih Harus Dibayar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Cadangan jasa produksi	367.526	385.706	(18.180)	(4,71%)
Bunga	137.222	135.134	2.088	1,55%
Jumlah beban yang masih harus dibayar	504.748	520.840	(16.092)	(3,09%)



Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain di tahun 2023 mencapai Rp779.314 juta, meningkat sebesar 65,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp472.054 juta. Kenaikan tersebut rata - rata berasal dari cadangan imbalan kerja, liabilitas sewa, pokok kredit penerusan yang diterima, provisi dan administrasi kredit dan lainnya.

Tabel Liabilitas Lain-Lain Berdasarkan Ekuivalen Rupiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
RUPIAH				
Cadangan imbalan kerja	275.328	257.184	18.144	7,05%
Setoran jaminan	119.135	132.236	(13.101)	(9,91%)
Liabilitas sewa	29.538	23.322	6.216	26,65%
Pokok kredit penerusan yang diterima	8.303	7.683	620	8,07%
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.582	3.592	(10)	(0,28%)
Provisi dan administrasi kredit	15	-	15	0,00%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3.450	3.020	430	14,24%
Lainnya	2.173	1.390	783	56,33%
	441.524	428.427	13.097	3,06%
MATA UANG ASING				
Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	274.271	39.325	234.946	597,45%
Dolar Singapore	62.209	3.538	58.671	1.658,31%
Dolar Hong Kong	-	20	(20)	(100,00%)
Yen Jepang	1.310	-	1.310	0,00%
Euro	-	744	(744)	(100,00%)
Jumlah liabilitas lain-lain	337.790	43.627	294.163	674,27%
Jumlah	779.314	472.054	307.260	65,09%

Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer di tahun 2023 mencapai Rp2.366.477 juta, meningkat sebesar 26,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.869.977. Kenaikan tersebut berasal dari simpanan dari nasabah pihak berelasi dan pihak ketiga.

Tabel Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpanan dari nasabah				
Pihak berelasi	3.764	2.302	1.462	63,51%
Pihak ketiga	2.343.291	1.839.390	503.901	27,40%
Jumlah simpanan dari nasabah	2.347.055	1.841.692	505.363	27,44%



Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Simpanan dari bank lain				
Pihak berelasi	-	-	-	0,00%
Pihak ketiga	19.422	28.285	(8.863)	(31,33%)
Jumlah simpanan dari bank lain	19.422	28.285	(8.863)	(31,33%)
Total Dana Syirkah Temporer	2.366.477	1.869.977	496.500	26,55%

Ekuitas

Ekuitas di Tahun 2023 mencapai Rp12.151.069 juta, meningkat sebesar 6,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp11.445.861 juta. Peningkatan tersebut berasal dari cadangan umum.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal saham:				
Seri A: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Seri B: nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar:				
Seri A: 24.000.000.000 saham				
Seri: 12.000.00.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				
Seri A - 11.934.147.982 saham				
Seri B - 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	-	0,00%
Tambahan modal disetor - neto	532.734	532.734	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	788.049	789.998	(1.949)	(0,25%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(117.777)	(100.912)	(16.865)	16,71%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(63.958)	(115.048)	51.090	(44,41%)
Saldo laba				
Cadangan umum	5.788.041	5.042.390	745.651	14,79%
Belum ditentukan penggunaannya	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
JUMLAH EKUITAS	12.151.069	11.445.861	705.208	6,16%

Modal Saham

Modal saham di tahun 2023 mencapai Rp3.753.875 juta, stabil sebesar 0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.753.875 juta. Tidak berubah, hal ini karena berasal dari saham seri B.



Tambahan Modal Disetor - Neto

Tambahan modal disetor pada tahun 2023 mencapai Rp532.734 juta, stabil sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp532.734 juta. Tidak ada perubahan tersebut karena dari opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tabel Tambahan Modal Disetor - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369	509.369	-	0,00%
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	23.365	23.365	-	0,00%
Jumlah	532.734	532.734	-	0,00%

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap di tahun 2023 mencapai Rp788.049 juta, menurun sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp789.998 juta. Penurunan ini berasal dari revaluasi aset tetap.

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan di tahun 2023 mencapai (Rp117.777) juta, meningkat sebesar 16,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai (Rp100.912) juta.

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan

Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan di tahun 2023 mencapai Rp63.958 juta, turun sebesar 44,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp115.048 juta.

Saldo Laba

Saldo laba di tahun 2023 mencapai Rp1.470.105 juta, menurun sebesar 4,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.542.824 juta. Penurunan tersebut berasal dari pendapatan bunga kredit dan belum ditentukan penggunaannya.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Belum ditentukan penggunaannya	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
Saldo Laba	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

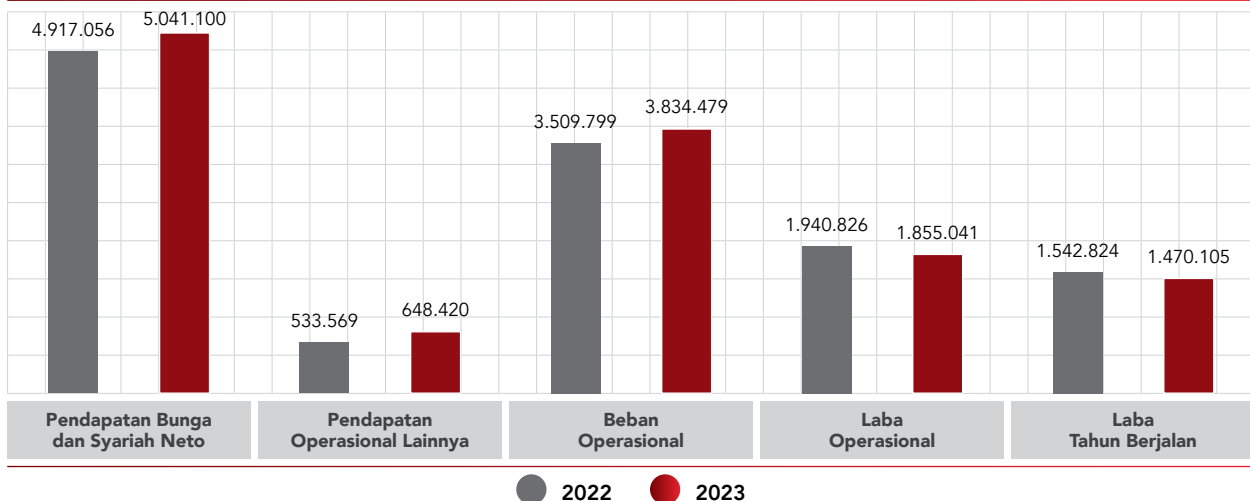
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	7.357.284	6.882.651	474.633	6,90%
Beban bunga dan syariah	(2.316.184)	(1.965.595)	(350.589)	17,84%
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO	5.041.100	4.917.056	124.044	2,52%
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	-	-	0,00%
Administrasi giro, tabungan dan deposito	193.996	184.480	9.516	5,16%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	127.264	56.653	70.611	124,64%
Administrasi kredit	30.880	42.511	(11.631)	(27,36%)
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	22.093	11.105	10.988	98,95%
Lainnya	274.187	238.820	35.367	14,81%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	648.420	533.569	114.851	21,53%
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.762.643)	(1.674.698)	(87.945)	5,25%
Umum dan administrasi	(1.182.987)	(1.229.388)	46.401	(3,77%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(694.136)	(404.659)	(289.477)	71,54%
Beban lainnya	(194.713)	(201.054)	6.341	(3,15%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(3.834.479)	(3.509.799)	(324.680)	9,25%
LABA OPERASIONAL	1.855.041	1.940.826	(85.785)	(4,42%)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Fee jasa pelayanan pajak	6.444	6.084	360	5,92%
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.608	5.274	334	6,33%
Keuntungan penjualan Efek-Efek neto	8.698	2.757	5.941	215,49%
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	2.390	-	2.390	0,00%
Pendapatan non-operasional lainnya	33.901	158.513	(124.612)	(78,61%)
Beban non-operasional	(19.339)	(83.405)	64.066	(76,81%)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	37.702	89.223	(51.521)	(57,74%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.892.743	2.030.049	(137.306)	(6,76%)
BEBAN PAJAK - NETO	(422.638)	(487.225)	64.587	(13,26%)
LABA TAHUN BERJALAN	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	(1.949)	40.281	(42.230)	(104,84%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(21.898)	100.163	(122.061)	(121,86%)
Penyesuaian saldo awal	-	(19.678)	19.678	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait	5.033	(17.586)	22.619	(128,62%)
	(18.814)	103.180	(121.994)	(118,23%)



Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	63.074	(400.611)	463.685	(115,74%)
Penyesuaian saldo awal	-	(3.730)	3.730	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait	(11.984)	76.116	(88.100)	(115,74%)
	51.090	(328.225)	379.315	(115,57%)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK	32.276	(225.045)	257.321	(114,34%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.502.381	1.317.779	184.602	14,01%
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	97,91	102,75	(4,84)	(4,71%)

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pada tahun 2023 jumlah pendapatan bunga dan syariah bersih Bank Jatim tercatat sebesar Rp7.357.284juta, meningkat sebesar 6,90% dari tahun lalu sebesar Rp6.882.651 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh naiknya pendapatan

berelasi, pendapatan dari pihak ketiga yaitu penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga margin dan pendapatan bagi hasil dan Sertifikat Bank Indonesia.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi (Catatan 40)				
Kredit yang diberikan	13.961	7.926	6.035	76,14%
Margin dan pendapatan bagi hasil	7	126	(119)	(94,44%)
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	4.837.915	4.261.412	576.503	13,53%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.806.519	932.818	873.701	93,66%



Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	423.992	1.392.992	(969.000)	(69,56%)
Margin dan pendapatan bagi hasil	157.455	135.829	21.626	15,92%
Provisi	90.157	110.971	(20.814)	(18,76%)
Sertifikat Bank Indonesia	23.226	17.442	5.784	33,16%
Lainnya	4.052	23.135	(19.083)	(82,49%)
Jumlah pendapatan bunga dan syariah	7.357.284	6.882.651	474.633	6,90%

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah di tahun 2023 mencapai Rp2.316.184 juta, meningkat sebesar 17,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.965.595 juta. Kenaikan tersebut berasal dari deposito berjangka, tabungan, *repo*, dan simpanan dari bank lain.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Deposito berjangka	1.669.282	1.432.248	237.034	16,55%
Tabungan	280.153	264.782	15.371	5,81%
Giro	200.924	221.779	(20.855)	(9,40%)
Repo	117.839	30.291	87.548	289,02%
Pinjaman yang diterima	8.543	10.357	(1.814)	(17,51%)
Bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	-	-	0,00%
Beban bunga kredit	763	1.549	(786)	(50,74%)
Simpanan dari bank lain	38.680	4.589	34.091	742,89%
Premi asuransi lainnya	-	-	-	0,00%
Premium surat berharga	-	-	-	0,00%
Jumlah beban bunga dan syariah	2.316.184	1.965.595	350.589	17,84%

Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

Pendapatan bunga dan syariah, neto di tahun 2023 mencapai Rp5.041.100 juta, meningkat sebesar 2,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.917.056 juta. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bunga syariah.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2023 (2)	2022 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah	7.357.284	6.882.651	474.633	6,90%
Beban bunga dan syariah	(2.316.184)	(1.965.595)	(350.589)	17,84%
Pendapatan bunga dan syariah - neto	5.041.100	4.917.056	124.044	2,52%



Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2023 mencapai Rp648.420 juta, meningkat sebesar 21,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp533.569 juta. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah administrasi giro, tabungan, deposito, penerimaan kembali kredit hapus buku, provisi komisi selain dari kredit yang diberikan dan lainnya.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemulihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	-	-	-	0,00%
Administrasi giro, tabungan dan deposito	193.996	184.480	9.516	5,16%
Penerimaan kembali kredit hapus buku	127.264	56.653	70.611	124,64%
Administrasi kredit	30.880	42.511	(11.631)	(27,36%)
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	22.093	11.105	10.988	98,95%
Lainnya	274.187	238.820	35.367	14,81%
Jumlah pendapatan operasional lainnya	648.420	533.569	114.851	21,53%

Beban Operasional

Beban operasional di tahun 2023 mencapai Rp3.834.479 juta, meningkat sebesar 9,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.509.799 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan, tenaga kerja tunjangan karyawan.

Tabel Beban Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.762.643)	(1.674.698)	(87.945)	5,25%
Umum dan administrasi	(1.182.987)	(1.229.388)	46.401	(3,77%)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(694.136)	(404.659)	(289.477)	71,54%
Beban lainnya	(194.713)	(201.054)	6.341	(3,15%)
Jumlah beban operasional	(3.834.479)	(3.509.799)	(324.680)	9,25%

Laba Operasional

Laba operasional di tahun 2023 mencapai Rp1.855.041 juta, menurun sebesar 4,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.940.826 juta. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah beban operasional.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	5.041.100	4.917.056	124.044	2,52%
Jumlah Pendapatan operasional lainnya	648.420	533.569	114.851	21,53%
Jumlah Beban operasional	(3.834.479)	(3.509.799)	(324.680)	9,25%
Laba operasional	1.855.041	1.940.826	(85.785)	(4,42%)



Pendapatan (Beban) Non-Operasional

Pendapatan (beban) operasional di tahun 2023 mencapai Rp37.702 juta, menurun sebesar 57,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp89.223 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan non - operasional lainnya.

Tabel Pendapatan (Beban) Non-Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Fee jasa pelayanan pajak	6.444	6.084	360	5,92%
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.608	5.274	334	6,33%
Keuntungan penjualan Efek-Efek neto	8.698	2.757	5.941	215,49%
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	2.390	-	2.390	0,00%
Pendapatan non-operasional lainnya	33.901	158.513	(124.612)	(78,61%)
Beban non-operasional	(19.339)	(83.405)	64.066	(76,81%)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	37.702	89.223	(51.521)	(57,74%)

Laba Sebelum Beban Pajak

Laba sebelum beban pajak di tahun 2023 mencapai Rp1.892.743 juta, menurun sebesar 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.030.049 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya laba operasional.

Tabel Laba Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba operasional	1.855.041	1.940.826	(85.785)	(4,42%)
Jumlah Pendapatan non-operasional - neto	37.702	89.223	(51.521)	(57,74%)
Laba sebelum beban pajak	1.892.743	2.030.049	(137.306)	(6,76%)

Beban Pajak – Neto

Beban pajak neto di tahun 2023 mencapai Rp422.638 juta, menurun sebesar 13,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp487.225 juta. Penurunan beban pajak - neto tersebut dipengaruhi oleh penurunan Laba.

Tabel Beban Pajak - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban pajak - neto	(422.638)	(487.225)	64.587	(13,26%)



Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan di tahun 2023 mencapai Rp1.470.105 juta, menurun sebesar 4,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.542.824 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba sebelum beban pajak.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum beban pajak	1.892.743	2.030.049	(137.306)	(6,76%)
Beban pajak - neto	(422.638)	(487.225)	64.587	(13,26%)
Laba tahun berjalan	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain di tahun 2023 mencapai Rp32.276 juta, meningkat sebesar 114,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp225.045 juta. Kenaikan ini berasal dari keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	(1.949)	40.281	(42.230)	(104,84%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(21.898)	100.163	(122.061)	(121,86%)
Penyesuaian saldo awal	-	(19.678)	19.678	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait	5.033	(17.586)	22.619	(128,62%)
	(18.814)	103.180	(121.994)	(118,23%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	63.074	(400.611)	463.685	(115,74%)
Penyesuaian saldo awal	-	(3.730)	3.730	(100,00%)
Pajak penghasilan terkait	(11.984)	76.116	(88.100)	(115,74%)
	51.090	(328.225)	379.315	(115,57%)
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	32.276	(225.045)	257.321	(114,34%)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 mencapai Rp1.502.381 juta, meningkat sebesar 14,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.317.779 juta. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya penghasilan komprehensif lain.

**Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
Penghasilan komprehensif lain neto setelah pajak	32.276	(225.045)	257.321	(114,34%)
Laba komprehensif tahun berjalan	1.502.381	1.317.779	184.602	14,01%

Labas Per Saham Dasar

Labas per saham dasar di tahun 2023 mencapai labas per saham dasar Rp97,91, menurun sebesar 4,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai labas per saham dasar Rp102,75. Penurunan ini dipicu oleh penurunan labas untuk perhitungan labas per saham dasar.

Tabel Labas Per Saham Dasar

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Labas untuk perhitungan labas per saham dasar (dalam jutaan Rupiah)	1.470.105	1.542.824	(72.719)	(4,71%)
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082	15.015.498.082	-	0,00%
Labas per saham dasar (dalam Rupiah Penuh)	97,91	102,75	(4,84)	(4,71%)

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi	7.324.150	7.030.426	293.724	4,18%
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi	(2.310.264)	(1.931.344)	(378.920)	19,62%
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	521.156	476.364	44.792	9,40%
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku	127.264	56.653	70.611	124,64%
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	60.386	172.136	(111.750)	(64,92%)
Pembayaran untuk biaya non-operasional	(19.337)	(82.913)	63.576	(76,68%)
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan	(1.763.167)	(1.659.597)	(103.570)	6,24%
Pembayaran beban umum dan administrasi	(1.283.327)	(1.296.665)	13.338	(1,03%)
Pembayaran pajak	(368.455)	(389.372)	20.917	(5,37%)
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	2.288.406	2.375.688	(87.282)	(3,67%)

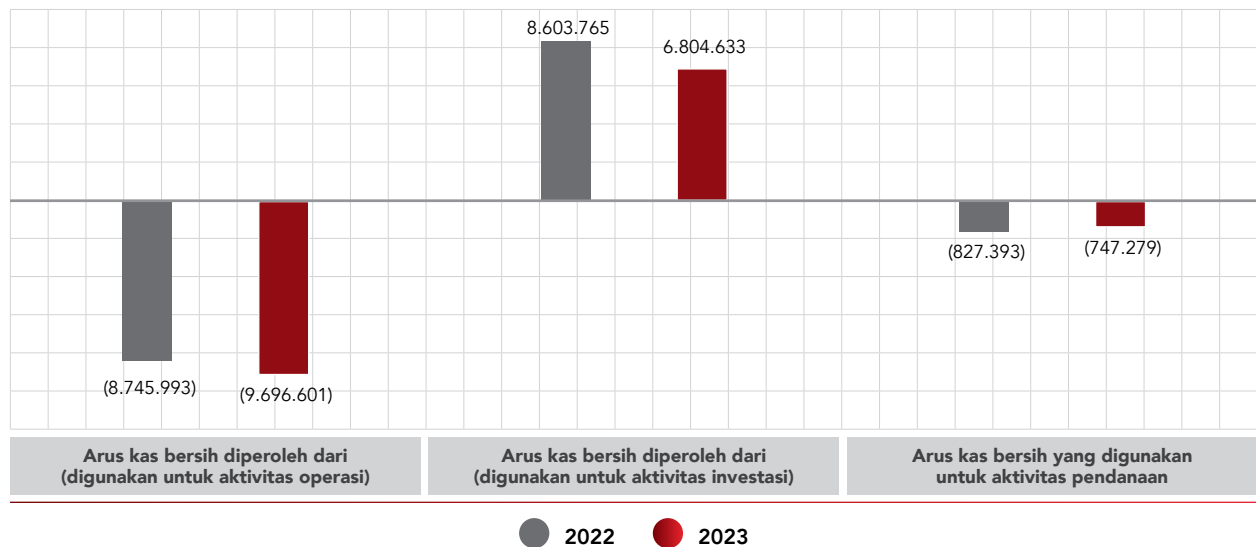


Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1.500)	(7.000)	5.500	-78,57%
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	(9.193.797)	(4.347.656)	(4.846.141)	111,47%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(4.208.597)	(4.095.066)	(113.531)	2,77%
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.575.529	(4.402.162)	5.977.691	(135,79%)
Aset lain-lain dan tagihan lainnya	(166.678)	(117.044)	(49.634)	42,41%
Liabilitas segera	115.091	278.638	(163.547)	(58,70%)
Simpanan dari nasabah	(3.570.473)	(1.434.484)	(2.135.989)	148,90%
Simpanan dari bank lain	(759.380)	(848.777)	89.397	(10,53%)
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.023.817	3.891.346	132.471	3,40%
Liabilitas lain-lain	200.981	(39.476)	240.457	(609,12%)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(9.696.601)	(8.745.993)	(950.608)	10,87%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan (pembelian) surat berharga	6.948.323	8.846.760	(1.898.437)	(21,46%)
Perolehan aset tetap	(149.298)	(248.269)	98.971	(39,86%)
Penjualan aset tetap	5.608	5.274	334	6,33%
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	6.804.633	8.603.765	(1.799.132)	(20,91%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	43.578	(23.825)	67.403	(282,91%)
Penambahan pinjaman	-	-	-	0,00%
Pembayaran dividen kas	(797.173)	(782.457)	(14.716)	1,88%
Pembayaran liabilitas sewa	6.316	(21.111)	27.427	(129,92%)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(747.279)	(827.393)	12.712	(1,54%)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(3.639.247)	(969.621)	(2.669.626)	275,33%
Kas dan setara kas pada awal tahun	19.988.131	20.957.752	(969.621)	(4,63%)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	-	0,00%
Kas dan setara kas pada akhir tahun	16.348.884	19.988.131	(3.639.247)	(18,21%)
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	2.652.775	1.988.262	664.513	33,42%
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	10.786.740	(2.815.328)	(26,10%)
Giro pada bank lain	491.330	303.129	188.201	62,09%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	5.233.367	6.910.000	(1.676.633,00)	(24,26%)
Jumlah kas dan setara kas	16.348.884	19.988.131	(3.639.247)	(18,21%)



Grafik Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)



Pada akhir tahun 2023, Bank Jatim membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp16.348.884 juta, menurun sebesar 18,21% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp19.988.131 juta. Penurunan saldo kas ini terutama akibat turunnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2023, sebesar Rp9.696.601 juta, meningkat sebesar 10,87% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8.745.993 juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2023, sebesar Rp6.804.633 juta, menurun sebesar 20,91% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8.603.765 juta. Arus kas bersih merupakan pengurangan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari peningkatan pendapatan bunga, investasi dan syariah, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, pendapatan non operasional, kenaikan simpanan nasabah, dan kenaikan simpanan dari bank lain. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari penyaluran pinjaman, pembayaran bunga, serta beban operasional lainnya. Hal ini berarti Bank Jatim mampu untuk melakukan proses bisnis yang baik dengan memanfaatkan sumber operasionalnya seperti kredit yang

diberikan, simpanan nasabah, dan pembayaran pajak menjadi kas yang sudah di akui dan diperoleh.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023, sebesar Rp747.279 juta, menurun sebesar 1,54% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp827.393 juta. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman yang diterima. Arus kas masuk tertinggi antara lain berasal dari kenaikan pinjaman yang diterima. Arus kas keluar tertinggi antara lain berasal dari pembayaran dividen dan penurunan Efek-Efek yang diterbitkan. Hal ini memiliki arti bahwa Bank Jatim masih mampu mendapatkan kas dalam bentuk pendanaan dari pinjaman yang diterima yang mampu menutup kas keluar dalam bentuk dividen dan lain-lain.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar hutang Bank Jatim diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi tolok ukur bagi bank dalam mengukur kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional bank.

Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga



kepercayaan kreditur terhadap Bank Jatim. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah;

1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati.
2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman.
3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati.
4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya.

Tabel Rasio Likuiditas

(dalam %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,03%	56,50%	13,53%

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tahun 2023 berada pada level yang aman sebesar 25,71% sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,97% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat pada level sebesar 24,74%. Level rasio CAR Bank Jatim tersebut menunjukkan struktur permodalan bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. LDR tahun 2023 sebesar 70,03%. meningkat 13,53% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 56,50%. Hal tersebut berarti likuiditas Bank Jatim mengalami perbaikan dan dalam kondisi baik sehingga mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI/OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI/OJK yang sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Tabel Rasio Solvabilitas

(dalam %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
CAR-TIER I	24,56%	23,73%	0,82%
CAR-TIER II	1,15%	1,00%	0,15%
CAR (Risiko Kredit, Pasar dan Operasional)	25,71%	24,74%	0,97%

Rasio Keuangan Lain

Rasio keuangan lain Bank Jatim antara lain meliputi rasio rentabilitas, rasio efisiensi dan rasio kepatuhan disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio-Rasio Keuangan Lainnya

(dalam %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
RASIO RENTABILITAS			
Return on Assets (ROA)	1,87%	1,95%	(0,08%)
Return on Equity (ROE)	13,96%	16,24%	(2,28%)



Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Net Interest Margin (NIM)	5,57%	5,11%	0,45%
RASIO EFISIENSI			
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,27%	76,15%	1,12%
RASIO KEPATUHAN			
Giro Wajib Minimum Rupiah	8,85%	4,75%	4,10%
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	6,62%	7,39%	(0,77%)

Return on Assets (ROA)

ROA tahun 2023 sebesar 1,87% atau mengalami penurunan sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,95%. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan peningkatan total aset.

Return on Equity (ROE)

ROE Tahun 2023 sebesar 13,96% atau mengalami penurunan sebesar 2,28% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 16,24%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan laba.

Net Interest Margin (NIM)

NIM mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari sebesar 5,11% pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,57% pada akhir tahun 2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena pertumbuhan penyaluran kredit dan pembiayaan pada tahun 2023.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO mengalami kenaikan sebesar 1,12% dari sebesar 76,15% pada tahun 2022, meningkat menjadi sebesar 77,27% di tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya beban bunga dana yang terjadi pada tahun 2023.

Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM Rupiah Bank Jatim tahun 2023 sebesar 8,85% dan GWM Valuta Asing sebesar 6,62%. Posisi likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang perubahan ke-5 atas Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang Bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari

seluruh kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* Bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Rasio Non Performing Loan

(dalam %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(2)-(3)
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,49%	2,83%	(0,34%)
Non Performing Loan (NPL) Nett	1,21%	1,01%	0,20%

NPL gross tahun 2023 sebesar 2,49% atau mengalami penurunan 0,34% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 2,83%. Sedangkan untuk NPL nett tahun 2023 sebesar 1,21% atau meningkat 0,20% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,01%. Peningkatan nilai NPL nett dikarenakan kredit bermasalah sepanjang tahun 2023.



Kualitas kredit Bank dibagi berdasarkan tingkat kolektibilitasnya. yaitu ke dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, tujuan dari pengklasifikasian kredit tersebut adalah agar Bank dapat secara rutin melakukan *monitoring* terhadap kredit-kredit yang telah disalurkan.

Tabel Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Jenis dan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2023						
Modal kerja	15.550.351	13.946.393	924.261	59.999	88.048	531.650
Investasi	8.002.279	6.786.068	1.060.393	6.918	13.921	134.979
Konsumsi	31.208.273	30.301.188	378.777	30.496	36.134	461.678
Jumlah	54.760.903	51.033.649	2.363.431	97.413	138.103	1.128.307
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)
Jumlah kredit yang diberikan - neto	53.395.998	50.606.098	2.126.448	69.573	89.060	504.819
2022						
Modal kerja	10.968.010	9.802.144	457.228	20.906	37.479	650.253
Investasi	6.570.658	6.296.351	151.931	3.855	3.343	115.178
Konsumsi	28.657.989	27.883.864	295.970	26.323	37.043	414.789
Jumlah	46.196.657	43.982.359	905.129	51.084	77.865	1.180.220
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)
Jumlah kredit yang diberikan - neto	44.878.045	43.586.406	826.579	32.105	49.370	383.585
Pertumbuhan 2022-2023 (Rp)						
Modal kerja	4.582.341	4.144.249	467.033	39.093	50.569	(118.603)
Investasi	1.431.621	489.717	908.462	3.063	10.578	19.801
Konsumsi	2.550.284	2.417.324	82.807	4.173	(909)	46.889
Jumlah	8.564.246	7.051.290	1.458.302	46.329	60.238	(51.913)
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(46.293)	(31.598)	(158.433)	(8.861)	(20.548)	173.147
Jumlah kredit yang diberikan - neto	8.517.953	7.019.692	1.299.869	37.468	39.690	121.234

Kredit yang diberikan neto tahun 2023 sebesar Rp53.395.998 juta, meningkat sebesar 18,98% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp44.878.045 juta dengan klasifikasi kredit lancar tahun 2023 sebesar Rp50.606.098 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp2.126.448 juta, kurang lancar sebesar Rp69.573 juta, diragukan sebesar Rp89.060 juta dan macet sebesar Rp504.819 juta.



Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga tabungan, deposito dan giro Bank Jatim yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2023

Tier	Suku Bunga
SIMPEDA	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,50%
Rp10 juta - < Rp50 juta	0,75%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS	
0 - < Rp1 juta	0,00%
Rp1 juta - < Rp10 juta	0,75%
Rp10 juta - < Rp50 juta	1,00%
Rp50 juta - < Rp500 juta	1,25%
≥ Rp500 juta	1,50%
SIKLUS MIKRO KECIL (SiUMI)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	1,50%
SIKLUS NELAYAN (SiNyal)	
0 - Rp500 ribu	0,00%
> Rp500 ribu	0,50%
HAJI	
Seluruh Nominal	1,00%
TABUNGANKU	
0 - Rp500 ribu	0,00%
>Rp500 ribu - Rp1 juta	0,25%
>Rp1 juta	1,00%
	Catatan: • Bunga Dihitung secara harian dan sesuai dengan <i>tiering</i> yang berlaku • Bunga dibayarkan menurut periode pembayaran
SIKLUS PRIORITAS	
0 - < Rp500 ribu	0,00%
Rp500 ribu - < Rp7,5 juta	1,50%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,75%
Rp100 juta - < Rp1 miliar	2,00%
≥Rp1 miliar	2,25%

Tier	Suku Bunga
SIMPANAN LAKU PANDAI	
Seluruh Nominal	0,50%
SIKLUS PENSIUN	
0 - < Rp250 ribu	0,00%
Rp250 ribu - < Rp7,5 juta	1,25%
Rp7,5 juta - < Rp100 juta	1,50%
≥Rp100 juta	1,75%
SIKLUS VALAS	
USD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00 - ≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00 - ≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
SGD	
< USD 100	0,00%
> USD100,00 - ≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00 - ≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,20%
EUR	
0 - EUR300	0,00%
> EUR300	0,10%
JPY	
Seluruh Nominal	0,00%
HKD	
Seluruh Nominal	0,00%



Tabel Suku Bunga Deposito Berjangka Per Desember 2023

Tier	Tenor (bulan)						
	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
≥Rp2,5 juta - Rp1 miliar	2,70% pa	2,80% pa	2,90% pa	3,00% pa	3,10% pa	3,15% pa	3,15% pa
>Rp1 miliar	2,75% pa	2,85% pa	2,95% pa	3,05% pa	3,15% pa	3,15% pa	3,15% pa

Tabel Suku Bunga Valuta Asing Per Desember 2023

Tier	Tenor (Bulan)			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
USD				
≥ USD 1.000 - ≤ USD 100.000	0,75% pa			
> USD 100.000	1,00% pa			
SGD				
≥ SGD1.000	0,10% pa			
EUR				
≥ EUR750	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
JPY				
≥ JPY100.000	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
HKD				
≥ HKD7.500	Setiap penempatan harus mendapat persetujuan Divisi yang membidangi			
AUD				
≥ AUD2.000	0,50% pa			
CNY				
≥ CNY7.000	0,70% pa			

*) Di atas counter rate, cabang meminta persetujuan Kantor Pusat

Tabel Suku Bunga Deposito On Call Desember 2023

Tier	Suku Bunga
Deposito On Call (Rupiah)	0,75% di bawah suku bunga pasar Bank Pemerintah, BPD atau Bank Swasta yang diperoleh dari LHBH atau Reuters

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2023

Tier	Suku Bunga
RUPIAH	
Perhitungan Jasa Giro Harian Progresif	
Rp0 - Rp5 juta	0,00%
> Rp5 juta - Rp100 juta	0,50%
> Rp100 juta - Rp1 miliar	0,75%
> Rp1 miliar - Rp500 miliar	0,90%



Tier	Suku Bunga
> Rp500 miliar - Rp750 miliar	1,25%
> Rp750 miliar	1,75%
Rekening Giro Escrow Account	Sama dengan giro Rupiah, dan harus dicantumkan pada Perjanjian Kerjasama (PK)

VALUTA ASING

GIRO VALAS USD	
≤ USD1.000,00	0,00%
> USD1.000,00 - ≤ USD10.000,00	0,05%
> USD10.000,00 - ≤ USD100.000,00	0,15%
> USD100.000,00	0,25%
GIRO VALAS SGD	
≤ SGD1.000,00	0,00%
> SGD1.000,00 - ≤ SGD10.000,00	0,05%
> SGD10.000,00 - ≤ SGD100.000,00	0,15%
> SGD100.000,00	0,20%
GIRO VALAS EUR	
EUR	0,10%
GIRO VALAS JPY	
JPY	0,00%
GIRO VALAS AUD	
AUD 15.000 - < AUD 150.000	0,20%
≥ AUD 150.000	0,50%
GIRO VALAS HKD	
HKD 78.000 - < HKD 780.000	0,20%
≥ HKD 780.000	0,50%
GIRO VALAS CNY	
CNY 72.000 - < CNY 720.000	0,20%
≥ CNY 720.000	0,50%

Tabel Nisbah Bagi Hasil

Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Giro Wadiah Perorangan	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Dinas/Pemerintah	0,00%	0,00%
Giro Wadiah Umum Swasta	0,00%	0,00%
Giro Mudharabah Umum Pemerintah	0,00%	0,51%
TabunganKu iB	0,00%	0,00%
Tabungan Laku Pandai	0,00%	0,00%
Tabungan Simpel	0,00%	0,00%
Tabungan Santri	0,00%	0,00%



Produk	Nisbah Bagi Hasil	Realisasi Bagi Hasil
Tabungan Umroh iB Amanah	0,00%	0,00%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	1,02%
Tabungan Barokah	12,50%	1,27%
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,41%
Tabungan Rencana iB Barokah	25,00%	2,54%
Tabungan Pensiun iB Barokah	15,00%	1,52%
Depositi 1 Bulan	36,00%	3,66%
Depositi 3 Bulan	38,00%	3,86%
Depositi 6 Bulan	41,00%	4,16%
Depositi 12 Bulan	42,50%	4,32%

Analisis Kualitas Aset Produktif

Aset produktif tahun 2023 sebesar Rp98.580.598 juta, meningkat sebesar 4,69% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp94.164.611 juta. Kualitas aset produktif tahun 2023 kategori lancar sebesar Rp93.737.202 juta, dalam perhatian khusus sebesar Rp3.369.357 juta, kurang lancar sebesar Rp116.199 juta, diragukan sebesar Rp140.542 juta dan macet sebesar Rp1.217.298 juta.

Tabel Kualitas Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2023						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
I PIHAK TERKAIT								
1	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing							
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing							
3	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing							



No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2023						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)							
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)							
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
i.	Rupiah	1.263	-	-	41	-	1.304	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
b.	Bukan debitur UMKM						-	
i.	Rupiah	106.108	77.134	-	302	-	183.544	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
c.	Kredit yang direstrukturisasi **)							
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	
9	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
11	Komitmen dan kontinjensi							
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		107.371	77.134	-	343	-	184.848	



No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2023						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
II PIHAK TIDAK TERKAIT								
1	Penempatan pada bank lain							
a.	Rupiah	4.251.988	-	-	-	-	4.251.988	
b.	Valuta asing	324.209	-	-	-	-	324.209	
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i>							
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	Surat berharga yang dimiliki							
a.	Rupiah	16.323.719	-	-	-	-	16.323.719	
b.	Valuta asing	112	-	-	-	-	112	
4	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)							
a.	Rupiah	8.303.663	-	-	-	-	8.303.663	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)							
a.	Rupiah	6.247.318	-	-	-	-	6.247.318	
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan akseptasi							
7	Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan							
a.	Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)							
i.	Rupiah	13.056.992	1.013.811	54.947	100.919	552.665	14.779.334	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
b.	Bukan debitur UMKM							
i.	Rupiah	37.869.286	1.272.486	42.466	36.841	575.642	39.796.721	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
c.	Kredit yang direstrukturisasi							
i.	Rupiah	2.782.704	1.005.926	18.786	2.439	88.991	3.898.846	
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
iii	Kredit properti	-	-	-	-	-	-	
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	



No	POS-POS	INDIVIDUAL						
		31 Desember 2023						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
11	Komitmen dan kontinjensi							
a.	Rupiah	4.423.649	-	-	-	-	4.423.649	
b.	Valuta asing	46.191	-	-	-	-	46.191	
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		93.629.831	3.292.223	116.199	140.199	1.217.298	98.395.750	
		93.737.202	3.369.357	116.199	140.542	1.217.298	98.580.598	
III INFORMASI LAIN								
1	Total aset bank yang dijaminakan:							
a.	Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
b.	Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	
2	Total CKPN aset keuangan atas aset produktif	-	-	-	-	-	1.430.174	
3	Total PPA yang wajib dibentuk atas aset	-	-	-	-	-	1.994.025	
4	Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit	-	-	-	-	-	26,99%	
5	Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit	-	-	-	-	-	20,37%	
6	Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	-	-	-	-	-	50,97%	
7	Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur	-	-	-	-	-	49,00%	
8	Lainnya							
a.	Penerusan kredit	-	-	-	-	-	640.415	
b.	Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah	-	-	-	-	-	-	
c.	Aset produktif yang dihapus buku	-	-	-	-	-	4.292.820	
d.	Aset produktif dihapusbuku yg dipulihkan/berhasil ditagih	-	-	-	-	-	1.228.552	
e.	Aset produktif yang dihapus tagih	-	-	-	-	-	-	



	INDIVIDUAL					
	31 Desember 2022					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.372.576	-	-	-	-	4.372.576
	46.703	-	-	-	-	46.703
	-	-	-	-	-	-
	91.758.484	910.239	51.408	77.939	1.231.670	94.029.740
	91.890.509	913.085	51.408	77.939	1.231.670	94.164.611
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1.366.019
	-	-	-	-	-	1.870.191
	-	-	-	-	-	2,63%
	-	-	-	-	-	17,61%
	-	-	-	-	-	43,49%
	-	-	-	-	-	40,90%
	-	-	-	-	-	648.319
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3.728.649
	-	-	-	-	-	1.059.644
	-	-	-	-	-	-



Struktur Permodalan Bank

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Permodalan

Kebijakan manajemen permodalan digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi sumber - sumber permodalan baik internal maupun eksternal. Selain itu kebijakan permodalan diterapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien. Bank dalam memperhitungkan kecukupan Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengacu pada kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut. Bank memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Kebijakan manajemen modal Bank di *review* oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat dalam mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Sepanjang 2023, Bank Jatim telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rincian Struktur Permodalan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas

Tabel Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)				
Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2023	2022	Pertumbuhan 2022-2023	
			Nominal	%
Modal Inti	11.025.184	10.346.392	678.792	6,56%
Modal Pelengkap	516.010	437.563	78.447	17,93%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	11.541.194	10.783.955	757.239	7,02%

Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum. Modal Bank terdiri dari Modal Inti (*Tier-1*) dan Modal Pelengkap (*Tier-2*).

1. Modal Inti

Modal Inti merupakan modal bank yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1- CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserved*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (selisih lebih penjabaran laporan keuangan, potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, saldo *surplus* revaluasi aset tetap, agio, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, dana setoran modal dan cadangan tambahan modal lainnya) dan faktor pengurang (selisih lebih penjabaran laporan keuangan, potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif, selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*, Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung dan cadangan tambahan modal lainnya). Modal Inti Bank Jatim di tahun 2023 mencapai Rp11.025.184 juta, meningkat 6,56% atau Rp678.792 juta dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp10.346.392 juta karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.

2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti)

Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) meliputi instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap dan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan. Total modal pelengkap Bank Jatim di tahun 2023 sebesar Rp516.010 juta meningkat 17,93% atau Rp78.447 juta dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp437.563 juta.



Posisi Kecukupan Modal Bank Jatim	2023	2022	Pertumbuhan 2022-2023	
			Nominal	%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit	40.764.771	34.567.488	6.197.283	17,93%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional	4.083.746	8.917.841	(4.834.095)	(54,21%)
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar	49.106	108.144	(59.038)	(54,59%)
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	44.897.623	43.593.473	1.304.150	2,99%
RASIO KECEKUPAN MODAL (%)				
Rasio CET 1	24,56%	23,73%	0,82%	0,83%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	25,73%	24,80%	0,93%	0,93%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	25,71%	24,74%	0,97%	0,97%

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Kuantitatif Eksposure Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan yang disempurnakan secara berkala. dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	7.971.412	-	-	-	7.971.412
Giro pada bank lain	-	490.253	-	-	-	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	842.093	2.281.988	1.000.000	290.000	815.614	5.229.695



Uraian	31 Desember 2023					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
Surat berharga	-	-	-	-	-	-
Biaya perolehan diamortisasi	-	8.560.761	-	-	-	8.560.761
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	7.762.560	-	-	-	7.762.560
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	8.560.761	-	-	-	8.560.761
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	6.247.318	-	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
Modal kerja	11.440.125	2.842.481	604.895	-	2.973	14.890.474
Investasi	4.236.832	2.670.923	282.259	472.895	-	7.662.909
Konsumsi	30.059.320	734.680	48.538	-	77	30.842.615
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	665.717	16.610	2.458	730	219	685.734
Total	47.467.225	47.882.649	1.938.150	763.625	818.883	98.870.532

REKENING ADMINISTRATIF

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.875.686	872.815	6.195	15.569	-	3.770.265
Bank garansi yang diterbitkan	699.574	-	-	-	-	699.574
Total	3.575.260	872.815	6.195	15.569	-	4.469.839

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Geografis Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	-	10.786.740	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	-	302.688	-	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.702.379	538.000	449.000	2.071.796	6.913.175
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	-	-	361
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.740.662	-	-	-	14.740.662
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	8.476.609	-	-	-	8.476.609
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.095.066	-	-	-	4.095.066
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	7.822.847	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	8.483.137	1.014.245	677.316	-	-	10.174.698
Investasi	3.359.791	2.161.406	370.368	479.607	-	6.371.172
Konsumsi	28.151.362	143.306	37.289	70	148	28.332.175



Uraian	31 Desember 2022					
	Jawa Timur	Jawa selain Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Lain-lain	Total
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	629.389	13.694	2.288	752	2	646.125
Total	42.062.187	52.259.642	1.625.261	929.429	2.071.946	98.948.465
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.412.262	971.071	610	15.569	-	3.399.512
Bank garansi yang diterbitkan	1.019.766	-	-	-	-	1.019.766
Total	3.432.028	971.071	610	15.569	-	4.419.278

Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri

Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412
Giro pada bank lain	-	490.253	-	-	-	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga	-	-	-	-	-	-
Biaya perolehan diamortisasi	5.890.446	463.025	2.207.290	-	-	8.560.761
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	-	-	-	-	8.303.663
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	6.247.318	-	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	-	-	-	-	223.138	223.138
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
Modal kerja	105.418	1.219.950	351.676	3.516.283	9.697.147	14.890.474
Investasi	1.111	-	6.137	5.088.634	2.567.027	7.662.909
Konsumsi	-	7.376	2.671	608.137	30.224.431	30.842.615
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	275	2.281	2.389	33.110	647.679	685.734
Total	35.264.580	8.430.203	362.873	11.453.454	43.359.422	98.870.532
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	65.971	-	-	3.704.294	3.770.265
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	699.574	699.574
Total	-	65.971	-	-	4.403.868	4.469.839



Tabel Konsentrasi Risiko Kredit Berdasarkan Sektor Industri Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Pemerintah dan Bank Indonesia	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Total
POSISI KEUANGAN						
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	-	-	302.688	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175
Tagihan <i>spot derivatif</i>	-	-	361	-	-	361
Surat berharga	-	-	-	-	-	-
Biaya perolehan diamortisasi	12.425.335	-	327.018	1.988.309	-	14.740.662
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	7.822.847	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	-	-	-	-	286.147	286.147
Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
Modal kerja	177.813	327.211	315.826	2.937.209	6.416.639	10.174.698
Investasi	5.662	1.436	-	4.828.916	1.535.158	6.371.172
Konsumsi	-	1.000	3.897	14.773	28.312.505	28.332.175
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433	2.025	535	41.024	602.108	646.125
Total	42.880.833	331.672	8.773.172	9.810.231	37.152.557	98.948.465
REKENING ADMINISTRATIF						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	132.932	-	3.266.580	3.399.512
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.019.766	1.019.766
Total	-	-	132.932	-	4.286.346	4.419.278

Pengukuran Risiko Kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default (PD)*, *Exposure*

at *Default (EAD)* dan *Loss Given Default (LGD)*. Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

Evaluasi Penurunan Nilai

Berikut ini adalah risiko aset keuangan berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah	336.488	-	-	336.488	190.456	-	-	190.456
Mata uang asing	154.842	-	-	154.842	112.673	-	-	112.673



Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Total	491.330	-	-	491.330	303.129	-	-	303.129
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	-	-	(1.077)	(441)	-	-	(441)
Neto	490.253	-	-	490.253	302.688	-	-	302.688

Tabel Evaluasi Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Penempatan pada Bank Indonesia	1.149.854	-	-	1.149.854	2.744.329	-	-	2.744.329
Interbank call money	4.083.367	-	-	4.083.367	4.165.000	-	-	4.165.000
Deposito berjangka	1.500	-	-	1.500	7.000	-	-	7.000
Total	5.234.721	-	-	5.234.721	6.916.329	-	-	6.916.329
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	-	-	(5.026)	(3.154)	-	-	(3.154)
Neto	5.229.695	-	-	5.229.695	6.913.175	-	-	6.913.175

Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Rupiah:								
Surat Utang Negara	12.610.606	-	-	12.610.606	20.501.941	-	-	20.501.941
Obligasi	2.089.300	-	-	2.089.300	1.851.074	-	-	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	-	-	-	-	400.000	-	-	400.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	450.000	-	-	450.000	325.000	-	-	325.000
Reksadana	450.000	-	-	450.000	90.000	-	-	90.000
Negotiable Certificate of Deposit	450.000	-	-	450.000	47.237	-	-	47.237
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	90.000	-	-	90.000	-	-	-	-
Surat Berharga Jangka Menengah	28.500	-	-	28.500	2.056	-	-	2.056
Mata uang asing:	12.913	-	-	12.913	-	-	-	-
Wesel	112	-	-	112	362	-	-	362
Total	16.323.831	-	-	16.323.831	23.217.671	-	-	23.217.671
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(511)	-	-	(511)	(400)	-	-	(400)
Neto	16.323.320	-	-	16.323.320	23.217.271	-	-	23.217.271

Tabel Evaluasi Penurunan Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Kredit multiguna	24.949.921	48.361	192.741	25.191.023	23.578.636	37.542	181.718	23.797.896
Kredit modal kerja	3.178.492	121.848	177.899	3.478.239	2.400.068	104.398	293.573	2.798.039



Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Total
Restrukturisasi COVID-19	-	-	-	-	3.160.896	33.974	337.404	3.532.274
Perdagangan besar dan eceran	2.729.943	148.116	437.951	3.316.010	1.654.813	91.337	200.612	1.946.762
Kredit pegawai	2.005.146	2.612	15.745	2.023.503	2.050.789	3.144	23.193	2.077.126
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	2.723.010	25.530	558.974	3.307.514	1.220.386	11.991	119.168	1.351.545
Kredit kepemilikan rumah	1.496.088	125.008	231.420	852.516	1.222.011	116.132	241.184	1.579.327
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.719.947	15.764	48.080	1.783.791	747.574	8.375	25.022	780.971
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.510.630	42.059	203.509	1.756.198	748.259	117.445	67.375	933.079
Industri pengolahan	2.343.498	22.053	103.913	2.469.464	1.614.145	20.003	51.057	1.685.205
Kredit usaha rakyat	3.709.273	90.788	54.695	3.854.756	2.393.551	29.099	12.857	2.435.507
Perantara keuangan	1.631.661	10.586	32.259	1.674.506	604.442	18.758	24.849	648.049
Linkage program	173.634	-	-	173.634	216.994	-	-	216.994
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	185.464	5.604	48.670	239.738	129.987	4.617	8.080	142.684
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	1.231.176	9.719	63.579	1.304.474	147.980	914	328	149.222
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	36.424	1.649	15.294	53.367	18.096	635	10.566	29.297
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	641	641	-	-	2.142	2.142
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	15.744	263	528	16.535	8.773	294	499	9.566
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	-	-	-	-	317	317
Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	2.989	-	-	2.989
Lain-lain	77.134	-	-	77.134	174.194	-	-	174.194
	49.717.185	669.960	2.185.898	52.573.043	42.094.583	598.658	1.599.944	44.293.185
Cadangan kerugian penurunan nilai	(367.710)	(74.071)	(869.732)	(1.311.513)	(263.059)	(61.303)	(911.041)	(1.235.403)
Konvensional - Neto	49.349.475	595.889	1.316.166	51.261.530	41.831.524	537.355	688.903	43.057.782

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai		Total
		Individu	Kolektif			Individu	Kolektif	
Syariah	1.986.968	200.892	-	2.187.860	1.802.438	101.034	-	1.903.472
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.395)	(35.997)	-	(53.392)	(33.308)	(49.901)	-	(83.209)
Syariah - Neto	1.969.573	164.895	-	2.134.468	1.769.130	51.133	-	1.820.263
Total - neto	51.319.048	760.784	1.316.167	53.395.998	43.600.654	588.488	688.903	44.878.045

Tabel Mutasi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total
Saldo awal tahun	793.315	199.485	325.812	1.318.612	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417
Penyisihan tahun berjalan	349.480	144.856	181.587	675.923	267.676	52.363	67.715	387.754



Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total	Modal kerja	Investasi	Konsumsi	Total
Penghapusan tahun berjalan	(482.918)	(4.969)	(141.743)	(629.630)	(666.582)	(110.757)	(123.220)	(900.559)
Saldo 31 Desember	659.877	339.372	365.656	1.364.905	793.315	199.485	325.812	1.318.612
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	411.873	90.939	230.012	732.824	570.537	92.889	203.467	866.893
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	248.004	248.43	135.644	632.081	222.778	106.596	122.345	451.719
Saldo 31 Desember	659.877	339.372	365.656	1.364.905	793.315	199.485	325.812	1.318.612

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat tinggi	Tingkat standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	5.440.446	-	-	-	5.440.446
Obligasi	2.089.300	-	-	-	2.089.300
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	450.000	-	-	-	450.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	450.000	-	-	-	450.000
Negotiable Certificate of Deposit	28.500	-	-	-	28.500
Reksadana	90.000	-	-	-	90.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	12.913	-	-	-	12.913
Wesel	112	-	-	-	112
	8.561.271	-	-	-	8.561.271
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	7.762.560	-	-	-	7.762.560
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	7.971.412
Giro pada Bank lain	491.330	-	-	-	491.330
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	-	-	-	5.234.721
Tagihan reverse repo	6.247.318	-	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	223.138
Kredit yang diberikan					
Modal kerja	-	14.870.654	-	679.697	15.550.351
Investasi	-	7.846.461	-	155.818	8.002.279
Konsumsi	-	30.679.965	-	528.308	31.208.273



Uraian	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat tinggi	Tingkat standar			
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	685.734	-	-	685.734
Total	36.491.750	54.082.814	-	1.363.823	91.938.387
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(697.350)	-	(674.168)	(1.371.518)
Neto	36.491.750	53.385.464	-	689.655	90.566.869

Tabel Kualitas Kredit Per Jenis Instrumen Keuangan Yang Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	Tingkat Tinggi	Tingkat Standar			
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Surat Utang Negara	12.025.332	-	-	-	12.025.332
Reksadana	90.000	-	-	-	90.000
Obligasi	1.851.074	-	-	-	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	-	400.000
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	-	47.237
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	-	325.000
Wesel	2.418	-	-	-	2.418
	14.741.062	-	-	-	14.741.062
NILAI WAJAR MELALUI PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Surat Utang Negara	8.476.609	-	-	-	8.476.609
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI					
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	10.786.740
Giro pada Bank lain	303.129	-	-	-	303.129
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	-	-	-	6.916.329
Tagihan Spot dan derivative	361	-	-	-	361
Tagihan reverse repo	7.822.847	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan Syariah					
Modal kerja	-	10.259.372	-	708.638	10.968.010
Investasi	-	6.448.282	-	122.376	6.570.658
Konsumsi	-	28.179.834	-	478.155	28.657.989
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	646.125	-	-	646.125
Total	49.333.224	45.533.613	-	1.309.169	96.176.006
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(499.126)	-	(823.481)	(1.322.607)
Neto	49.333.224	45.034.487	-	485.688	94.853.399



Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar, variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas Tresuri dan risiko yang melekat pada bisnis. Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen

keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga. Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Rata-Rata Tingkat Suku Bunga Kontraktual Per Tahun Untuk Aset dan Liabilitas Keuangan Yang Signifikan

(dalam %)

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Dolar Amerika Serikat
ASET				
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro pada bank lain	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,06%	0,00%	1,33%	0,47%
Surat-surat berharga	5,63%	0,00%	7,99%	0,00%
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,46%	0,00%	5,38%	0,00%
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,32%	0,00%	5,80%	0,00%
Kredit yang diberikan	10,50%-12,75%	0,00%	10,50%-12,75%	0,00%
LIABILITAS				
Simpanan dari nasabah	0,00% - 3,51%	0,00% - 1,65%	0,00% - 2,74%	0,00% - 0,16%
Simpanan dari bank lain	0,00% - 3,43%	-	0,00% - 2,27%	-

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN						
Kas	2.652.775	-	-	-	-	2.652.775
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412
Giro pada bank lain	490.253	-	-	-	-	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695



Uraian	31 Desember 2023					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	2.334.459	1.481.901	4.744.401	-	-	8.560.761
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	-	-	-	-	6.948.304
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	-	-	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	-	-	-	15.550.351	-	15.550.351
Investasi	-	-	-	8.002.279	-	8.002.279
Konsumsi	-	-	-	31.208.273	-	31.208.273
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	287.221	14.280	384.233	-	-	685.734
Total aset keuangan	40.147.135	1.496.181	5.128.634	54.760.903	-	101.532.853
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	987.605	-	-	-	-	987.605
Simpanan dari nasabah						
Giro	20.926.363	-	-	-	-	20.926.363
Tabungan	28.815.896	-	-	-	-	28.815.896
Deposito berjangka	-	-	-	28.454.651	-	28.454.651
Simpanan dari bank lain	2.570.985	8.260	500	-	-	2.579.745
Kewajiban spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	-	530.156	-	-	66.821	596.977
Beban yang masih harus dibayar	504.748	-	-	-	-	504.748
Liabilitas lain-lain	779.314	-	-	-	-	779.314
Total liabilitas keuangan	54.584.911	538.416	500	28.454.651	66.821	83.645.299
Gap repricing suku bunga - neto	(14.437.776)	957.765	5.128.134	26.306.252	(66.821)	17.887.554

Tabel Eksposur Bank Terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga (Gross) Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
ASET KEUANGAN						
Kas	1.988.262	-	-	-	-	1.988.262
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	302.688	-	-	-	-	302.688



Uraian	31 Desember 2022					
	Suku Bunga Mengambang					
	Tidak Lebih Dari 3 Bulan	3 Bulan Tetapi Tidak Lebih dari 1 Tahun	1 Tahun dan Lebih	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Total
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	1.578.463	4.995.096	8.167.102	-	-	14.740.661
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	8.476.609	-	-	8.476.609
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	-	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	-	-	-	10.968.010	-	10.968.010
Investasi	-	-	-	6.570.658	-	6.570.658
Konsumsi	-	-	-	28.657.989	-	28.657.989
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74.213	14.396	557.516	-	-	646.125
Total aset keuangan	33.847.601	5.009.492	17.201.227	46.196.657	-	102.254.977
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	916.091	-	-	-	-	916.091
Simpanan dari nasabah						
Giro	23.634.773	-	-	-	-	23.634.773
Tabungan	26.343.817	-	-	-	-	26.343.817
Deposito berjangka	-	-	-	31.788.793	-	31.788.793
Simpanan dari bank lain	3.334.563	4.560	-	-	-	3.339.123
Pinjaman yang diterima	-	481.532	-	-	71.867	553.399
Beban yang masih harus dibayar	520.840	-	-	-	-	520.840
Liabilitas lain-lain	550.119	-	-	-	-	550.119
Total liabilitas keuangan	55.300.203	486.092	-	31.788.793	71.867	87.646.955
Gap repricing suku bunga - Neto	(21.452.602)	4.523.400	17.201.227	14.407.864	(71.867)	14.608.022

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin prosentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

Tabel Sensitivitas Terhadap Kemungkinan Perubahan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	
	Kenaikan	Penurunan
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	62.414	(62.414)



Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing. Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit Tresuri dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel Rasio dari Aset Likuid Neto Terhadap Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas dan setara kas	16.350.238	19.994.460
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	4.095.066
Tagihan reverse repo	6.247.318	7.822.847
Simpanan dari bank lain	2.560.321	3.339.123
Total	33.461.540	35.251.496
Simpanan dari nasabah	75.849.855	81.767.383
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	44,12%	43,11%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	2.652.775	2.652.775	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	7.073.597	-	-	-	897.815
Giro pada bank lain	490.253	490.253	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	5.228.200	1.495	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	8.560.761	830.243	1.504.216	783.350	698.551	4.744.401
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	7.732.011	30.549	-	-	-



Uraian	31 Desember 2023					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	6.948.304	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	6.197.612	49.706	-	-	-
Tagihan lainnya	223.138	223.138	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Modal kerja	14.890.474	271.543	832.593	2.530.760	2.766.875	8.488.703
Investasi	7.662.909	30.414	7.589	15.135	225.659	7.384.112
Konsumsi	30.842.615	17.031	144.205	119.894	513.914	30.047.571
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	251.395	35.826	8.246	6.034	384.233
Total	100.167.948	37.946.516	2.606.179	3.457.385	4.211.033	51.946.835

LIABILITAS KEUANGAN

Liabilitas segera	987.605	987.605	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	78.196.910	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350
Simpanan dari bank lain	2.579.744	2.541.704	29.280	60	8.200	500
Pinjaman yang diterima	557.632	150.638	-	-	-	406.994
Beban yang masih harus dibayar	504.748	504.748	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	779.314	779.314	-	-	-	-
Total	83.605.953	27.421.984	5.491.393	2.436.795	7.352.937	40.902.844
Perbedaan jatuh tempo	16.561.995	10.524.532	(2.885.214)	1.020.590	(3.141.904)	11.043.991

Tabel Informasi Perkiraan Sisa Jatuh Tempo dari Aset dan Liabilitas Keuangan (Pokok Saja) Tahun 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
ASET KEUANGAN						
Kas	1.988.262	1.988.262	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	230.541	-	-	-	10.556.199
Giro pada bank lain	302.688	302.688	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	6.306.518	606.657	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	14.740.661	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	4.095.066	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	7.440.160	-	-	192.726	189.961



Uraian	31 Desember 2022					
	Nilai tercatat	Kurang dari 1 bulan	1- 3 bulan	3 - 6 bulan	6 - 12 bulan	Lebih dari 12 bulan
Tagihan lainnya	286.147	286.147	-	-	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	10.174.698	474.092	591.709	1.027.046	1.904.233	6.177.618
Investasi	6.371.172	35.082	2.414	7.284	32.541	6.293.851
Konsumsi	28.332.175	16.380	25.106	68.179	320.447	27.902.063
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516
Total	100.936.365	21.926.246	2.127.252	3.480.204	5.081.744	68.320.919
LIABILITAS KEUANGAN						
Liabilitas segera	916.091	916.091	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	81.767.383	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905
Simpanan dari bank lain	3.339.123	3.287.933	46.630	60	4.500	-
Pinjaman yang diterima	553.399	150.517	-	-	-	402.882
Beban yang masih harus dibayar	520.840	520.840	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	550.119	550.119	-	-	-	-
Total	87.646.955	16.639.972	16.247.508	1.699.848	10.882.840	42.176.787
Perbedaan jatuh tempo	13.289.410	5.286.274	(14.120.256)	1.780.356	(5.801.096)	26.144.132

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Selama tahun 2023 Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2022
Tanah, bangunan, dan sarana pelengkap	1.124.400	1.124.105
Inventaris	710.310	621.891
Kendaraan Bermotor	46.202	45.543
Total	1.880.912	1.791.539



Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal

dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Pembelian spot dan derivatif	-	156.070
Lainnya	-	1.974.389
	-	2.130.459
Mata uang asing:		
Pembelian spot dan derivatif	-	-
	-	-
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.770.265	3.399.512
Total liabilitas komitmen, neto	3.770.265	1.269.053
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	82.966	119.108
Lainnya	13	13
Jumlah tagihan kontinjensi	82.979	119.121
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	653.383	973.063
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan	46.191	46.703
Jumlah liabilitas kontinjensi	699.574	1.019.766
Total liabilitas kontinjensi, neto	616.595	900.645
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	4.386.860	2.169.698

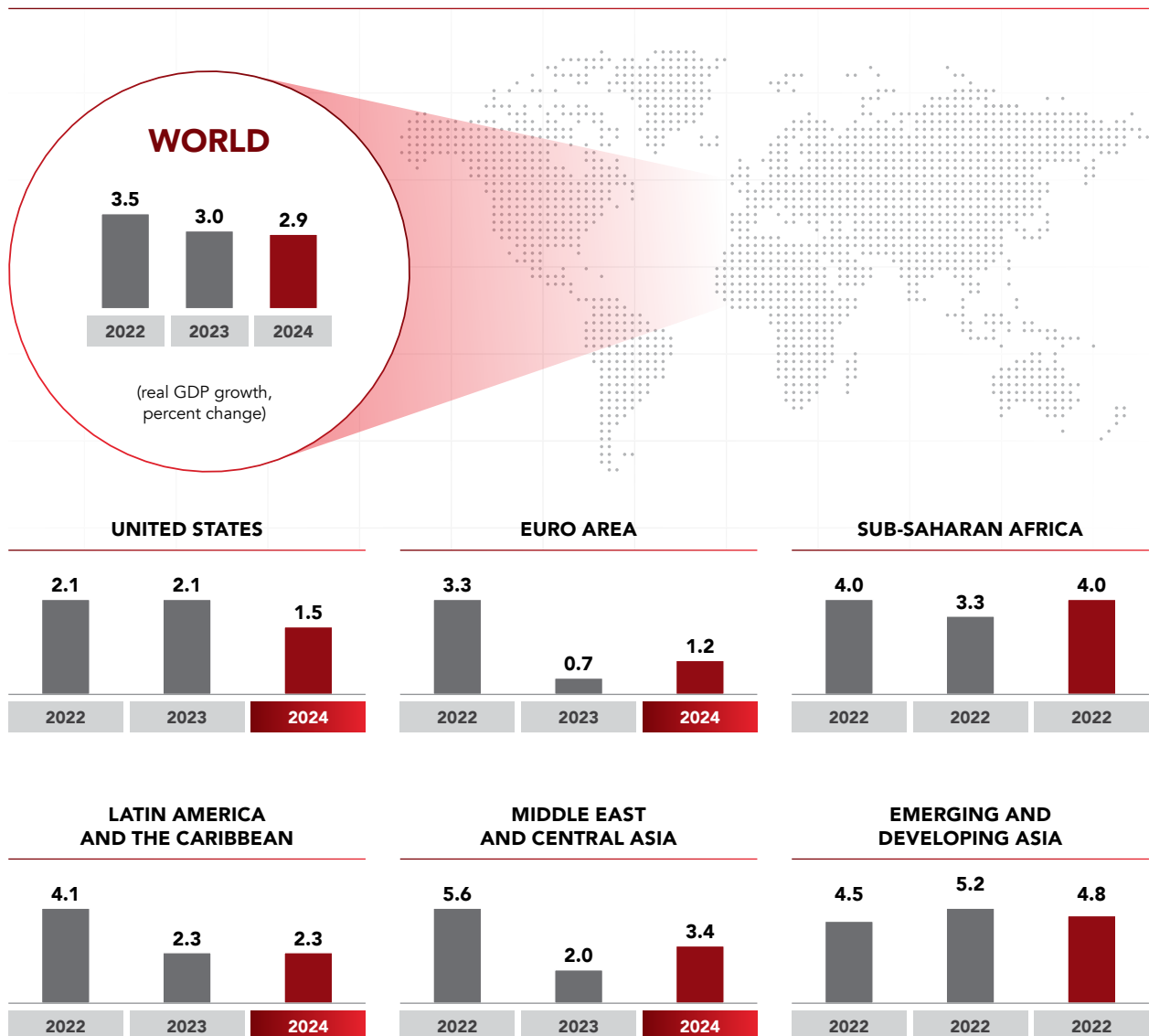


Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2024

World Economic Outlook October 2023 Growth Projection by Region



Source : IMF, World Economic Outlook, October 2023.

Note : Order of bars for each group indicates (left to right): 2022, 2023 projections, and 2024 projections.

IMF. #WEO

Menurut World Economic Outlook (IMF, Oktober 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,9%, Amerika Latin sebesar 2,3%, Eropa sebesar 1,2%, Afrika Timur Tengah 3,4%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 4,8% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 diprediksi akan ditopang oleh perekonomian Asia yang masih solid. Prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat, namun India dan sejumlah negara ASEAN diprediksi terus menguat.



Prospek ekonomi Asia yang solid antara lain ditunjukkan oleh Indonesia yang kembali naik menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income country*), yang menunjukkan besarnya potensi konsumsi maupun investasi. Tingginya komitmen reformasi struktural yang ditunjukkan sejumlah negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga diharapkan dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan kawasan Asia, dan pada gilirannya ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di antara negara G20. India sebagai penyumbang tiga-perempat *output* perekonomian kawasan Asia Selatan, diperkirakan IMF akan dapat tumbuh sebesar 6,1% pada tahun ini dan meningkat di tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat di tengah tantangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan akan terjaga di 5,2%. Stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong konsumsi di tahun 2024. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh relatif tinggi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 merupakan salah satu penopang tumbuhnya konsumsi Pemerintah tahun 2024. Berdasarkan optimisme tersebut pemerintah mengeluarkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2024-2027 di dalam RAPBN tahun 2024 yang dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2027

Indikator	2027	2026	2025	2024
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,7-6,4	5,6-6,3	5,5-6,0	5,2
Inflasi (% yoy)	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	2,8
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.600-15.000	14.700-15.100	14.800-15.200	15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,73-7,5	6,73-7,5	6,3-7,5	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	70-90	70-90	70-90	80
Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	618-756	624-731	606-684	625
Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.151-1.340	1.175-1.307	1.052-1.147	1.033

Sumber: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Kementerian Keuangan

Kapasitas dan perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2024 masih dipengaruhi oleh sentimen perekonomian global dan nasional. Perkiraan pertumbuhan kinerja kredit sektor jasa keuangan dan perbankan di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Kinerja Kredit

Lembaga	Proyeksi Kredit
Bank Indonesia	10% - 12%

Sumber: Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Tanggal 22 Agustus 2023

Pengembangan industri perbankan di masa depan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang dapat membentuk transformasi mendalam dalam cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Salah satu tren utama adalah pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang, seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), analitika data, dan teknologi *blockchain*. Bank-bank berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih personal dan mudah dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut. Contoh konkret dari pengembangan ini dapat dilihat dalam penerapan kecerdasan buatan dalam analisis risiko kredit. Bank-bank menggunakan algoritma AI untuk mengevaluasi profil kredit nasabah dengan lebih akurat dan cepat, memungkinkan mereka membuat keputusan kredit yang lebih

cerdas. Hal ini tidak hanya meningkatkan proses persetujuan kredit, tetapi juga mengurangi risiko bagi bank.

Selain itu, perkembangan *fintech* dan integrasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam merumuskan masa depan industri perbankan. Adopsi pembayaran digital, *platform peer-to-peer lending*, dan layanan keuangan berbasis aplikasi menjadi lebih umum. Bank-bank berupaya untuk beradaptasi dengan tren ini dengan menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah diakses secara digital, termasuk pembukaan rekening *online*, *transfer* uang instan, dan manajemen keuangan melalui aplikasi mobile.

Salah satu wujud dukungan pemerintah terhadap transformasi perbankan adalah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang



mengakomodir Bank Digital. Dalam POJK tersebut, Bank Digital diartikan sebagai bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha utamanya melalui saluran elektronik dengan kantor fisik yang terbatas atau tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Salah satu contoh Bank Digital yang sudah ada yaitu DBS Bank, yang berbasis di Singapura, telah menjadi pemimpin dalam transformasi digital perbankan di Asia. Mereka menawarkan berbagai layanan digital, termasuk pembukaan rekening *online*, layanan perbankan berbasis aplikasi, dan teknologi keamanan terkini. DBS juga aktif dalam mengembangkan inovasi finansial, seperti penggunaan teknologi *blockchain*. Selain itu Ally Bank di Amerika Serikat merupakan contoh bank digital internasional yang sukses. Ally Bank sepenuhnya beroperasi secara *online* tanpa cabang fisik. Mereka menawarkan berbagai produk perbankan, seperti tabungan, deposito, dan pinjaman, dengan fokus pada pengalaman nasabah yang mudah, suku bunga yang bersaing, dan tanpa biaya-biaya tambahan.

Pentingnya keberlanjutan juga menjadi aspek kunci dalam pengembangan industri perbankan di masa depan. Bank-bank semakin berfokus pada inisiatif keuangan berkelanjutan, termasuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan pengembangan produk keuangan yang mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara keseluruhan, pengembangan industri perbankan di masa depan mencerminkan perubahan mendalam dalam paradigma bisnis. Teknologi dan inovasi memainkan peran sentral dalam memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan relevan untuk nasabah, sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Jatim melakukan analisa daya saing melalui *Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Challenges* (SWOC) Analysis. Faktor-faktor yang menjadi keunggulan Internal Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur teknologi perbankan digital yang cukup memadai untuk bersaing dengan industri.
2. Sinergi dengan berbagai pihak, seperti *fintech*, Pemerintah Daerah, serta pihak terkait lainnya.
3. Penawaran produk dan layanan keuangan yang beragam untuk berbagai macam segmen pelanggan.
4. Mempunyai hubungan dan sinergi yang baik dengan *shareholders*, terutama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Bank Jatim optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Adapun peluang Bank Jatim di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Shifting* perilaku masyarakat dalam pemanfaatan teknologi perbankan.
2. *Landscape* demografi penduduk usia *millennial* yang merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce*, serta potensi ekonomi dan keuangan digital.

3. Iklim positif dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.
4. Masih banyaknya peluang pasar yang berasal dari ekosistem pemerintah daerah maupun swasta.
5. Masih besarnya potensi pangsa pasar Bank Jatim, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Program-program pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
7. Pemanfaatan *Artificial Intelegence* (AI) dan teknologi baru dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan.

Selain melakukan SWOC Analysis, Bank Jatim juga melakukan Analisa Matriks *Internal Factors Analysis Strategy* (IFAS) dan *External Factors Analysis Strategy* (EFAS) dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis. Uraian rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas penyaluran kredit/pembiayaan khususnya kepada sektor-sektor ekonomi produktif dan potensial yang diimbangi pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bisnis (penyempurnaan ketentuan maupun teknologi pendukung) dengan tetap memperhatikan prinsip *prudential banking*.
2. Pemanfaatan proyek-proyek strategis, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kinerja bisnis melalui penyaluran kredit produktif pada sektor-sektor strategis dan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur.
3. Optimalisasi dan peningkatan produk dan layanan berbasis teknologi informasi dengan tetap memperhatikan asas *prudential banking* dan keamanan.
4. Perluasan dan pendalaman pasar dalam rangka peningkatan bisnis dan pencapaian inklusi keuangan melalui peningkatan pelayanan dan optimalisasi peran jaringan termasuk agen laku pandai.
5. Peningkatan profitabilitas melalui peningkatan rasio CASA, perbaikan kualitas kredit, layanan keuangan berkelanjutan devisa, dan pengembangan produk lain berbasis digital serta *customer oriented*.
6. Perluasan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam rangka peningkatan bisnis bidang dana maupun kredit/pembiayaan.
7. Menjaga hubungan baik dengan nasabah khususnya *shareholders*, di antaranya dengan memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah serta berperan aktif dalam proyek-proyek strategis khususnya di Provinsi Jawa Timur.
8. Peningkatan pelayanan berbasis digital dan membangun ekosistem serta sarana penunjangnya baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta yang bertujuan dalam akselerasi kinerja Bank Jatim.



Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target

Secara umum, pencapaian target Bank Jatim di 2023 telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian terkait perbandingan target dan realisasi keuangan, struktur modal, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Perbandingan target dan realisasi keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 1	Realisasi 2023 2	Target 2023 3	Pencapaian 4=2/3
POSISI KEUANGAN			
Aset	103.854.773	106.827.245	97,22%
Kredit Yang Diberikan	54.760.903	54.738.950	100,04%
Dana Pihak Ketiga	78.196.910	90.406.639	86,49%
Giro	20.926.362	25.606.820	81,72%
Tabungan	28.815.896	28.460.999	101,25%
Deposito berjangka	28.454.652	36.338.820	78,30%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pendapatan bunga	7.357.284	7.044.434	104,44%
Pendapatan operasional lainnya	648.420	1.786.030	36,31%
Laba tahun berjalan	1.470.105	1.648.908	89,16%
RASIO KEUANGAN (%)			
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,71	21,74	118,26%
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,49	2,50	99,60%
Return on Assets (ROA)	1,87	2,19	85,39%
Return on Equity (ROE)	13,96	15,91	87,74%
Net Interest Margin (NIM)	5,57	5,74	97,04%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	77,27	72	107,32%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,03	60,55	115,66%

Total aset tercapai sebesar 97,22% dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp103,85 triliun, sedikit berada di bawah target yang disebabkan penurunan deposito. Kredit yang diberikan mencapai 100,04% dengan realisasi sebesar Rp54,76 triliun pada tahun 2023. Dana pihak ketiga dengan pada tahun 2023 terealisasi Rp78,19 triliun dengan pencapaian 86,49%, hal tersebut selaras dengan penurunan deposito. Meskipun demikian, dana pihak ketiga dari tabungan berhasil melampaui target yang mencapai 101,25%.

Dari sisi pendapatan, pencapaian pendapatan bunga yaitu sebesar 104,44% dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7,36 triliun. Capaian laba tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar 89,16% dengan realisasi Rp1,45 triliun yang berada di bawah target, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan beban bunga yang diakibatkan peningkatan CASA.

Rasio CAR pada tahun 2023 sebesar 25,71%, dengan capaian target sebesar 118,26%. Dengan melakukan penyaluran kredit yang berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) serta penguatan manajemen risiko dan penerapan strategi penurunan NPL di tahun 2023. NPL gross Bank Jatim dapat terjaga di level 2,49% atau lebih rendah dari target sebesar 2,50%.

Kedepannya, Bank Jatim akan senantiasa melakukan pelaksanaan strategi-strategi yang telah ditetapkan, serta berkomitmen untuk dapat berperan aktif dalam program transformasi BPD yang mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan tetap berperan sebagai *agent of development* di daerah melalui pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.



Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Permodalan Bak Jatim memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis pada tahun 2023, hal ini ditandai dengan pencapaian target total modal inti dan modal pelengkap yang tercapai sebesar 106,21% dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp11,54 triliun. Dalam rangka menjaga dan

memperkuat permodalan, strategi pengelolaan permodalan bank yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu penambahan modal Bank melalui laba Bank, peningkatan modal melalui cadangan umum dari laba yang tidak dibagi, penambahan modal melalui revaluasi aset dan optimalisasi ATMR.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal inti utama (CET 1)	11.025.184	10.361.423	106,41%
Modal pelengkap (Tier 2)	516.010	504.996	102,18%
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	11.541.194	10.866.419	106,21%

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2023

Uraian Target	Realisasi Tahun 2023
Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar).	Telah dilakukan pembukaan rekening pelajar sejumlah 51.402 rekening SimPel dan SimPel iB.
Program Promo DPK Tematik.	Telah diadakan program promo DPK seperti Siklus Suka – suka Gen 1, Siklus Suka – suka Gen 2, Cash Pro, Siklus Cinta, Siklus Ramadhan, Promo Yes Fresh Fund dan Top Up.
Undian Tabungan Simpeda dan Siklus.	Telah dilakukan Undian Tabungan Siklus di bulan Agustus dan Undian Tabungan Simpeda di bulan Desember.
Kerjasama <i>Sponsorship Event</i> di wilayah kerja Bank Jatim.	Telah dilakukan kerjasama <i>sponsorship event</i> beberapa di antaranya: - <i>Sponsorship</i> pada kegiatan Blissfull Ramadhan untuk meningkatkan <i>brand awareness</i> Bank Jatim - Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait branding Bank Jatim pada armada bus TransJatim (10 unit bus) rute Sidoarjo > Gresik > Surabaya - <i>Sponsorship</i> pada kegiatan Ramadhan Megilan Vol 2 Tahun 2023 untuk meningkatkan <i>brand awareness</i> Bank Jatim - <i>Sponsorship</i> pada kegiatan Silaturahmi dan Golf Bersama BMPD Se Jawa untuk meningkatkan <i>brand awareness</i> Bank Jatim - <i>Sponsorship</i> pada kegiatan Festival Budaya Maddendang untuk meningkatkan <i>brand awareness</i> Bank Jatim
Optimalisasi implementasi QRIS.	- Program Promo Transaksi pada <i>merchant</i> QRIS Bank Jatim yaitu pada hotel di wilayah Surabaya (The Alana, Kampi, dan Deka Hotel) serta <i>sponsorship event</i> - <i>Branding</i> Kuliner pada Sentra Wisata Kuliner Jl Karang Bulak/Pinghay (Samping BRI Tower)
Program promo Bulan Inklusi Keuangan.	Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 dilaksanakan serentak oleh OJK pada Triwulan IV tepatnya pada bulan Oktober 2023. Selain itu juga dilakukan promosi program BIK pada setiap kegiatan Bank Jatim (<i>road to BIK</i>).
Program Promo Giro Go-Speed.	Telah dilakukan program promo Giro yang dimulai dari Bulan November 2023 dan telah terhimpun dana sebanyak Rp128.500 miliar pada sektor korporasi yang dihold dalam bentuk simpanan Giro dalam periode 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan.
Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/ entitas/perusahaan lainnya.	Telah melakukan beberapa MOU dan kerjasama dengan rekanan/entitas/perusahaan lainnya, dimana selama tahun 2023 telah menghasilkan 28 MOU dan 92 PKS Kantor Pusat dan 79 PKS Cabang.



Uraian Target	Realisasi Tahun 2023
Pengembangan Sistem Penerimaan Negara pada <i>Collecting Agent</i> (Bank Jatim) versi 3.0 sehubungan dengan implementasi CTAS.	Persiapan sumber daya internal maupun eksternal serta integrasi sistem dalam rangka Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) dan mekanisme cek status transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN).
Integrasi System Keuangan Desa Siskeudes dengan dengan Kementerian Dalam Negeri	Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di beberapa desa di Jawa Timur.
Akselerasi penggiatan transaksi non tunai melalui penggunaan fasilitas <i>Cash management System</i> (CMS) oleh Satker Pengelola APBN.	Optimalisasi penggunaan CMS dan pengembangan <i>Dashboard Virtual Account</i> (VA) dalam rangka kemudahan dan kecepatan <i>monitoring</i> penggunaan CMS baik oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), maupun kantor Pusat Kementerian /Lembaga.
Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Perbankan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan	Bank Jatim perdana di Republik Indonesia (RI), sebagai BPD pertama yang menerapkan penggunaan KTP Digital .

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Capaian biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat) terealisasi 54,33%, berada di bawah target. Meskipun demikian jika dilihat dari realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat sebesar 63,06% dari Rp23,834 miliar di tahun 2022 menjadi Rp38,865 miliar di tahun 2023. Peningkatan tersebut

juga tercermin dari penyerapan anggaran yang mencapai 54,33% pada tahun 2023. Hal tersebut salah satunya didorong dengan meningkatnya pelaksanaan aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline* dalam menunjang kegiatan bisnis Bank.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2023

(dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya pendidikan dan pelatihan (Diklat)	38.865.797.580	71.535.425.000	54,33%

Target Ke Depan (Proyeksi)

Manajemen Bank Jatim telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2024, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2
Inflasi (% yoy)	2,8
Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	80
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	625
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033

Sumber: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Kementerian Keuangan



Proyeksi Keuangan

Uraian proyeksi keuangan di tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2024
1	2
POSISI KEUANGAN	
Aset	117.292.667
Kredit Yang Diberikan	66.831.046
Dana Pihak Ketiga	100.308.905
Giro	29.431.571
Tabungan	33.872.755
Deposito berjangka	37.004.578
Pinjaman Yang diterima	536.020
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pendapatan bunga	7.814.118
Pendapatan operasional lainnya	1.682.001
Laba Tahun berjalan	2.241.019
RASIO KEUANGAN (%)	
Capital Adequacy Ratio (CAR)	23,54
Non Performing Loan (NPL) Gross	2,40
Return on Assets (ROA)	1,99
Return on Equity (ROE)	14,70
Net Interest Margin (NIM)	5,79
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	75,82
Loan to Deposit Ratio (LDR)	66,63

Proyeksi Struktur Modal

Uraian proyeksi struktur modal di tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2024
1	2
Modal inti utama (CET 1)	11.243.084
Modal pelengkap (Tier 2)	557.711
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	11.800.795



Proyeksi Kebijakan Dividen

Uraian proyeksi kebijakan dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Kebijakan Dividen

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi
1	2
Estimasi Laba Bersih Tahun 2023	1.470.105
Estimasi Jumlah Dividen yang dibagi	816.693
Estimasi Dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim	417.547
Dividen Payout Ratio (%)	54,39%

***Catatan:**

Untuk estimasi pembagian dividen tahun buku 2023 yang dibagi tahun 2024, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Proyeksi Pemasaran

Di tahun 2024 Bank menyusun proyeksi pemasaran sebagai berikut:

1. Program Promo Event (Jatim Prioritas Community, Anniversary).
2. Siklus Suka-suka.
3. Kerjasama Layanan Jasa Keuangan pada Segmen Ritel dan Perorangan melalui QRIS.
4. Melaksanakan Komitmen Bersama antara Gubernur Jatim, OJK dan Bank Jatim terkait program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
5. Pembukaan Rekening Tabungan bagi siswa di Jawa Timur dengan stimulasi setoran awal target kurang lebih 50.000 rekening.
6. Kegiatan Sempel Day, literasi dan inklusi keuangan, Kolaborasi dengan program Pemerintah dan OJK, kolaborasi dengan program sekolah antara lain Bank Mini.
7. Program akuisisi *merchant* QRIS, dengan cara menargetkan pedagang pasar modern, *mall* serta pedagang tradisional.
8. Program *branding* dan promo *merchant* QRIS Bank Jatim.
9. Program promo DPK tematik.
10. Partisipasi pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan OJK.
11. Partisipasi *sponsorship event* di wilayah kerja Bank Jatim.
12. Program Undian Tabungan Bank Jatim.

13. Pengembangan dan pemanfaatan ekosistem pembayaran.
14. Pengembangan Elektronifikasi Keuangan Daerah berbasis web.
15. Inisiasi sentralisasi kesepakatan pengelolaan dana Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dengan fasilitas layanan jasa keuangan milik Bank Jatim (baik berupa *offline service* dan program digitalisasi milik Bank Jatim).

Proyeksi Pengembangan SDM

Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya. Strategi pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan program pengembangan SDM yang direncanakan dengan matang. Sehingga diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Salah satu program pengembangan SDM adalah mengadakan program pelatihan kepada pegawai.

Bank Jatim mengembangkan SDM yang berkualitas di tahun 2023 melalui program-program pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan SDM yang dapat dilakukan, di antaranya adalah *skill training*, *retraining* atau pelatihan ulang, *team training*, *creativity training* dan lain-lain. Di tahun 2024 proyeksi pengembangan SDM untuk seluruh pegawai sebanyak 5.242 orang.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2024

(dalam Orang)

Uraian	Proyeksi 2024
1	2
Pelatihan untuk pegawai organik	5.242



Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen disusun untuk memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh Bank sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Berdasarkan mekanisme pembagiannya, dividen dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dividen final dan dividen interim. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan/laba Bank pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Bank dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen minimal 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai, dengan memperhatikan:

- Pencapaian kinerja keuangan Bank.
- Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang membutuhkan permodalan secara signifikan, tidak kurang dari ketentuan rasio yang ditetapkan oleh Bank dan/ atau ketentuan regulator dari waktu ke waktu.
- Tingkat Kesehatan Bank.

- Kondisi keuangan Bank.
- Ekspektasi pertumbuhan laba;
- Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank dimasa depan.
- Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
- Keberlanjutan usaha Bank.
- Kondisi pasar.
- Kepentingan Pemegang Saham.
- Ketaatan pada peraturan yang terkait dan berlaku
- Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU Perseroan Terbatas.

Dalam hal Bank mengalami kendala sebagaimana dijelaskan pada poin tersebut di atas dan/atau mengalami kondisi kinerja keuangan yang membutuhkan perlakuan khusus maka Bank dimungkinkan:

- Mengusulkan kepada RUPS untuk menunda melakukan pembayaran dividen;
- Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui;
- Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/ atau
- Menarik kembali pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kinerja keuangan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melaksanakan pengumuman dan pembayaran dividen sebagaimana tabel berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba Bersih (Rp)	1.542.824.394.640	1.523.069.838.418	1.488.961.630.120	1.376.505.140.913	1.260.308.411.500
Dividen (Rp)	797.172.793.173,38	782.457.605.053,02	733.507.081.305,70	723.747.007.552,40	683.865.985.709,02
Dividen Non Kas ^{*)}	-	-	-	-	-
Dividen Per Saham (Rp)	53,09	52,11	48,85	48,20	45,61
Dividen Non Kas Per Saham ^{*)}	-	-	-	-	-
Jumlah Lembar Saham	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	14.978.134.982
Dividen Payout Ratio (%)	51,67%	51,37%	49,26%	52,58%	54,26%
Tanggal Pengumuman	03 Maret 2023	29 Maret 2022	5 Mei 2021	05 Mei 2020	09 Mei 2019
Tanggal Pembayaran	12 Mei 2023	14 April 2022	28 Mei 2021	20 Mei 2020	29 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas ^{*)}	-	-	-	-	-

^{*)} Bank Jatim Tidak memiliki Dividen Non Kas



Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022

Pada tanggal 12 April 2023 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.542.824.394.640,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp797.172.793.173,38 atau 51,67% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2023 yang akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023.
2. Sebesar Rp745.651.601.466,62 jumlah 48,33% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2022 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Pada tanggal 17 Maret 2022 Bank Jatim melaksanakan RUPST yang menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Bank Jatim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.523.069.838.418,00 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp782.457.605.053,02 atau 51,37% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2021 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Maret 2022 yang akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2022.
2. Sebesar Rp740.612.233.364,98 jumlah 48,63% dari laba bersih Bank Jatim tahun buku 2021 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penawaran umum terakhir dilakukan pada 2012 dan penggunaan dana hasil penawaran umum telah sesuai dengan rencana. Sehingga pada tahun 2023 bukan merupakan periode pelaporan untuk penggunaan dana hasil penawaran umum, Bank Jatim tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2023, Bank Jatim tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi dan restrukturisasi utang/modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.



Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi dengan pihak terafiliasi memiliki potensi risiko yaitu risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang dimungkinkan merugikan Bank. Oleh karena itu, Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

- b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Uraian nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan disajikan sebagai berikut:

Tabel Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham	Penempatan dana



Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham	Penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham	Penempatan dana
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan Penempatan dana
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif	Karyawan kunci	Simpanan nasabah, Beban tenaga kerja
RKUD Kabupaten Lamongan	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan, Penempatan dana
Pemda Kabupaten Lamongan	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Kredit yang diberikan, Penempatan dana

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jatim melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Bank Jatim.



Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 12)		
Pinjaman manajemen kunci	100.611	104.192
PT BPR Jawa Timur	30.914	24.851
RSUD Dr. Soedono Madiun	46.220	-
Lain-lain	7.103	5.828
Jumlah	184.848	134.871
Persentase terhadap jumlah aset	0,18%	0,13%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18)	12.644.538	15.295.405
Persentase terhadap jumlah liabilitas	14,15%	17,05%
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)	-	-
PT BPR Jawa Timur	12.648.302	141.996
Total	12.648.302	141.996
Persentase terhadap jumlah liabilitas	14,16%	0,16%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga (Catatan 30)	13.968	8.052
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,19%	0,12%
Beban bunga dan syariah	459.124	471.882
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	19,82%	24,01%
KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	-	-
KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI		
Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (diluar Komisaris dan Direksi)		
Gaji	17.656	22.995
Jasa produksi	12.009	12.053
Tunjangan	7.458	10.520
Jumlah	37.123	45.569

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan No. 40 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kebijakan Mekanisme Review Atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus di review Komite Pemantau Risiko dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Seluruh transaksi telah melalui mekanisme review sesuai dengan jenis transaksi dan dilakukan analisis kelayakan transaksi. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi. Jika transaksi dengan pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham maka persetujuan dilakukan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan dengan transaksi tersebut.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan sepanjang tahun 2023 dan dampaknya bagi Bank Jatim diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: a. Kelembagaan; b. Perbankan; c. Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; d. Perasuransian dan penjaminan; e. Asuransi Usaha Bersama; f. Program penjaminan polis; g. Usaha Jasa Pembiayaan; h. kegiatan usaha bulion (bullion); i. Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; j. Kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; k. Lembaga keuangan mikro; l. Konglomerasi Keuangan; m. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); n. Penerapan Keuangan Berkelanjutan; o. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; p. Akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; q. Sumber daya manusia; r. Stabilitas Sistem Keuangan; s. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan t. Penegakan hukum di sektor keuangan. Khusus dalam bidang Perbankan, terdapat ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja di antaranya perubahan ketentuan terkait Kegiatan Usaha Bank Umum, penerapan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, ketentuan Rahasia Bank.	Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 khususnya perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, Bank melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Khusus untuk sektor Perbankan, terdapat Perubahan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja di antaranya perubahan ketentuan terkait persyaratan pendirian Bank Umum.	Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 khususnya perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bank melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 09 Mei 2023.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	POJK Nomor 17 Tahun 2023 mengatur beberapa hal yang menjadi pokok pengaturan sebagai berikut: a. Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, yang paling sedikit mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, dan paling sedikit diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud, penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank. b. Dalam POJK tersebut, selain dibahas cakupan Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, diatur pula terkait Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Benturan Kepentingan, Implementasi Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern, Penerapan Manajemen Risiko, Pemberian Remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, Aspek Pemegang Saham, Penerapan Strategi Anti Fraud, Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Penerapan Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola Yang Baik pada Bank bagi KCBLN.	Dengan terbitnya ketentuan POJK tersebut, secara bertahap Bank melakukan review terhadap ketentuan internal Bank yang berhubungan dengan penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank di antaranya <i>progress</i> yang telah dilakukan salah satunya melakukan <i>review</i> terhadap ketentuan kerja Direksi.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.
4.	POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.	Dalam POJK ini diatur tentang kewajiban PJK dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pengaturan pengenaan sanksi yang efektif, proporsional dan disuasif, kewajiban PJK dalam menyampaikan <i>Individual Risk Assessment</i> secara periodik kepada OJK, persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (<i>face to face</i>) dan tidak tatap muka (<i>non-face to face</i>) melalui sarana elektronik, penyempurnaan ketentuan fungsi manajemen kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara independen, prosedur <i>pre-employee screening</i> , kewajiban PJK menyampaikan data untuk kebutuhan pengawasan, serta pengaturan dokumen pendukung bagi Diaspora Indonesia. Selain hal tersebut diatur pula kewajiban <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) sederhana, CDD terhadap Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) terhadap seluruh jenis nasabah termasuk perusahaan publik/emiten dan lembaga negara, larangan outsourcing atau hubungan keagenan dalam CDD Pihak Ketiga, penambahan cakupan Pihak Pelapor yang diawasi OJK yaitu Wali Amanat, Penyelenggara LPBBTI, Penyelenggara SCF, dan Penyelenggara IKD serta menambahkan Perseroan Perorangan sebagai entitas baru dalam Korporasi.	Dengan terbitnya ketentuan POJK tersebut, secara bertahap Bank melakukan review terhadap ketentuan internal Bank yang berhubungan dengan kebijakan implementasi APU, PPT dan PPPSPM.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Jatim.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar

yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 25 memberi definisi baru dari estimasi akuntansi dan penjelasannya.



- Amendemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal, penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 46 ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank dinilai berdasarkan POJK. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor risiko yaitu:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan Bank Jatim Posisi 31 Desember 2022-2023 (self assessment)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2023	Penilaian Per 31 Desember 2022
Profil Risiko	Peringkat 2	Peringkat 2
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Peringkat 3	Peringkat 3
Rentabilitas	Peringkat 2	Peringkat 2
Permodalan	Peringkat 2	Peringkat 2
Peringkat Komposit	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Tensi geopolitik yang tinggi menjadi sumber utama ketidakpastian yang diperkirakan akan bertahan dan meningkat dalam jangka menengah dan panjang. Risiko yang kedua adalah potensi datangnya pandemi berikutnya yang diprediksi semakin meningkat frekuensi kemunculannya dan berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang mendalam. Risiko ketiga adalah isu perubahan iklim yang dapat memberikan ancaman pada kesehatan, keselamatan jiwa, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Risiko lainnya yang tak kalah penting juga berasal dari digitalisasi teknologi yang selain menjadi faktor pendorong kemajuan namun juga memiliki risiko disruptif yang dapat mengancam perekonomian dunia. Namun demikian, keunggulan kompetitif, transformasi dan inovasi berkelanjutan, serta implementasi kebijakan strategis yang adaptif mampu mengurangi dampak pandemi lebih lanjut bagi kinerja usaha Bank. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan yang masih mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2023.

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank secara berkala melakukan evaluasi atas hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha Bank dimasa yang akan datang. Evaluasi tersebut di antaranya tercermin melalui skor komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang tergolong sehat bahkan dimasa pandemi. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun terdapat beberapa komponen kinerja yang belum tercapai secara optimal, namun dengan adanya kebijakan stargetis akomodatif yang ditempuh oleh manajemen, bank dapat memitigasi risiko yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sepanjang tahun 2023.

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan usahanya.



Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assesment

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan Bank dalam melakukan assesment terhadap kelangsungan usaha Bank antara lain adalah hal-hal berikut:

1. Tingkat kesehatan Bank yang meliputi penilaian terhadap profil risiko, kinerja rentabilitas/*earning*, kapitalisasi permodalan serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Analisis kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional.
3. Analisis daya saing yang meliputi matriks *Strenght, Weakness, Opportunities and Challenges* (SWOC), analisis *Segmentation, Targeting and Positioning* (STP), serta analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha.

Aspek Perpajakan

Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Sebagai wajib pajak badan dalam negeri, Bank Jatim berhak mendapatkan insentif dari pemerintah berupa keringanan pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak badan dalam negeri dapat mendapatkan penurunan tarif sebesar 3% dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 (tiga):

1. Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40%; dan
3. Memenuhi persyaratan tertentu:
 - a. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
 - Tiga ratus pihak yang memiliki saham kurang dari 5% tidak termasuk;
 - Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/ atau
 - Yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
 - b. Hubungan istimewa bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi:
 - Pemegang saham pengendali; dan/ atau
 - Pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal.
 - c. Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;

- d. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
- e. Pemenuhan persyaratan dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai ketentuan di atas, Bank Jatim dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2023, sehingga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan adalah 19%.

Pendekatan Bank Jatim terhadap pajak didasari oleh kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Bank Jatim telah membangun kebijakan dan strategi pajak yang disetujui dan ditinjau oleh Direktur Keuangan, Treasury and Global Services dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Strategi pajak ini ditinjau setiap tahun oleh Direktur, Treasury and Global Services.

Dalam pelaksanaan tata kelola dan pengontrolan pajak, Bank Jatim telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Badan tata kelola (eksekutif) yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi pajak adalah Direktur Keuangan, Trasury and Global Services.
2. Pendekatan terhadap pajak ditanamkan dalam perusahaan melalui tersedianya Standar Operasioal Prosedur Perpajakan, mengembangkan sistem aplikasi yang mengakomodir proses perpajakan, dan peningkatan kesadaran perpajakan melalui sarana *training* dan sosialisasi.
3. Mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor risiko pajak melalui *monitoring* dan rekonsiliasi berkesinambungan yang dilakukan oleh Grup Perpajakan dan unit kerja terkait.

Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, Bank Jatim senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan. Bank Jatim menerapkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan. Bank Jatim hanya beroperasi di Indonesia, untuk itu laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia.

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank Jatim dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Total pembayaran pajak periode Januari sampai dengan Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Penghasilan Pasal 21	173.259	136.726
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.775	5.144
Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan	368.453	494.250
Pajak Penghasilan Pasal 26	9.611	14.195
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final	135.935	142.884
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.047	2.352
Pajak Bea Meterai	5.793	7.082
Total	699.873	802.634

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Sepanjang tahun 2023, perekonomian global diwarnai dengan tingginya inflasi global, pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju serta masih tingginya tensi geopolitik. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia. Ketidakpastian gejala ekonomi ditambah dengan hutang Amerika Serikat yang menyentuh USD31 triliun dan sudah mencapai batas pada bulan Januari sehingga kenaikan pagu harus segera dicapai membuat ancaman *default* atas hutang Amerika Serikat di depan mata. Gejala tersebut ditambah dengan kabar dari *Silicon Valley Bank* (SVB) yang kolaps pada bulan Maret dan mengguncang pasar global serta membuat miliaran dolar dana perusahaan dan investor terdampak serta menjadi kegagalan perbankan Amerika Serikat terbesar sejak krisis keuangan 2008 dan terbesar kedua yang pernah ada di Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan keyakinan investor terhadap sektor perbankan semakin rentan.

Keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mendorong inflasi tetap tinggi sehingga memaksa bank sentral Amerika Serikat melakukan pengetatan suku bunga pada bulan April dimana The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan ke 5,25% dan memicu perubahan kebijakan suku bunga di negara-negara lain tidak terkecuali di Indonesia. Suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate telah mencapai tingkat tertinggi dalam 4,5 tahun terakhir. Sepanjang 2023, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 50 basis poin hingga ke level 6%. Bank Indonesia menutup tahun 2023 dengan mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat tersebut pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia per 20 dan 21 Desember 2023. Terlepas dari kondisi inflasi Indonesia yang terjaga, kenaikan suku bunga lebih disebabkan untuk menjaga stabilitas moneter dengan menjaga potensi arus modal asing keluar dari dalam negeri.

Namun sejumlah risiko masih tetap harus diwaspadai dalam menyambut tahun 2024, antara lain berlanjutnya ketegangan geopolitik terutama dengan meningkatnya konflik antara Israel dan Palestina di penghujung tahun 2023, pelemahan ekonomi di sejumlah negara terutama di China yang akan berdampak terhadap kinerja ekspor impor dan neraca perdagangan Indonesia serta masih tingginya suku bunga kebijakan moneter dan *yield* obligasi di negara maju. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih optimis terutama didukung dengan konsumsi rumah tangga dan investasi tetap tumbuh sejalan dengan keyakinan masyarakat dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,5%-5,3% di akhir 2023, sejalan dengan laju inflasi yang masih tetap terkendali sesuai dengan target Bank Indonesia di kisaran 2%-4% pada tahun 2023.

Diprediksi pada tahun 2024, The Fed akan membuka ruang untuk penurunan suku bunga pada semester kedua 2024 sebesar 50 basis poin. Bank Indonesia akan merespon dengan memberi sinyal penurunan suku bunga BI Rate pada semester kedua 2024 dengan melihat potensi terjaganya tingkat inflasi Indonesia yang diikuti dengan keputusan penetapan target inflasi Bank Indonesia pada tahun 2024 yang optimis sebesar 1,5%-3,5%.

Kondisi likuiditas perbankan 2023 dinilai masih cukup memadai serta didukung kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sehingga dapat mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan. Pemeliharaan Likuiditas juga didukung oleh keberadaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diperdagangkan di pasar sekunder sehingga meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas dan turut mendukung terjaganya lending capacity perbankan. Indikator likuiditas lain berupa rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio*



(NSFR) termasuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) terjaga di kisaran yang optimal dan sesuai dengan batasan ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Bank Jatim turut merespon tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, dengan melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dan tetap memperhatikan target kinerja bank 2023 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan komposisi dana dan *Cost of Fund* (COF), peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi *fee based income* serta efisiensi biaya *overhead* secara keseluruhan.

Meskipun Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Bank bergerak naik hingga Triwulan IV-2023, Suku Bunga Dasar Kredit Bank adalah 7,68% untuk Kredit Korporasi, Kredit Ritel 8,21%, Kredit Mikro 13,40%, Kredit Konsumer-KPR 8,22% dan Kredit Konsumer-Non KPR sebesar 9,58%, namun peran Bank sebagai lembaga intermediasi kepada masyarakat terus dioptimalkan sehingga pertumbuhan kredit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Inovasi bisnis terus ditingkatkan diiringi perbaikan sistem dan prosedur demi peningkatan kualitas bisnis proses kinerja kredit/pembiayaan.

Sesuai dengan arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 tentang kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas, khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, maka Bank akan turut mendukung kebijakan terkait makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif yang diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar

Bank Jatim sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki *guidance* dalam menjalankan usahanya, salah satunya terkait pemberian dana kepada pihak terkait. Bank Jatim dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait maupun terhadap modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Adapun porsi Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan sesuai aturan OJK ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Bank dimana yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
2. Badan Hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
 - a. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - b. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/atau poin 3;
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
9. Perusahaan yang:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - b. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, dan/ atau poin 3 bertindak sebagai pengendali;
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 10;
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan Bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11;



14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 kepada Bank lain tersebut; dan
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara mandiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Sesuai dengan penjabaran mengenai pihak terkait di atas, maka dari ini pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris juga termasuk kedalam penyediaan kepada Pihak Terkait dimana pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit Bank Jatim. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank Jatim pada umumnya dan diberikan secara wajar dan sesuai bunga pasar (*at arm's length basis and at market rates*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Diluar daripada itu, terdapat pula ketentuan tentang pihak lainnya yang diatur, yaitu:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli asset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
 - a. Pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
 - b. Melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.
5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
 - a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank; dan
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2 dan 3.

Penyediaan Dana Kepada Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.
2. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan,
3. Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - a. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - b. 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
 - c. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
4. Penggolongan kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
 - a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah Negara lain.
 - c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan;
 - d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma;
 - e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi. Adapun penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:

- a. Penempatan;
- b. Transaksi *derivative*;
- c. Surat berharga;
- d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);



- e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- f. Tagihan akseptasi;
- g. Kredit;
- h. Penyertaan modal;
- i. Penyertaan modal sementara;
- j. Transaksi rekening *administrative*; dan
- k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.

Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Bank Jatim wajib menerapkan Teknik MRK (Mitigasi Risiko Kredit) yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank Jatim mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud berlaku dalam hal Peminjam dan Penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait.

Perlakuan BMPK Tertentu

Adakalanya perhitungan BMPK dapat dilakukan, di antaranya adalah:

1. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;

4. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia;
5. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
6. Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu;
8. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan;
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi *factor* pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum.

Pelampauan BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank;
2. Perubahan nilai tukar;
3. Perubahan nilai wajar;
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/atau
5. Perubahan ketentuan Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana dan dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Tabel Total Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyediaan Dana	Jumlah 2023		Jumlah 2022	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan rupiah)	Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	198	189.479	155	107.944
2	Kepada 50 Debitur Inti				
	Individu	50	8.721.806	50	6.771.487
	Group	0	0	0	0
	Total Debitur Inti	50	8.721.806	50	6.771.487

Tabel Total Penyediaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait

Uraian	2023	2022
	Nominal (dalam jutaan rupiah)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Modal Pada Tanggal Laporan	11.451.665	10.610.256
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	0	0
Outstanding Pihak Terkait	189.479	107.944



Uraian	2023	2022
	Nominal (dalam jutaan rupiah)	Nominal (dalam jutaan rupiah)
Kelonggaran BMPK	0	0
Pelampauan BMPK	0	0

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) disajikan berdasarkan nilai wajarnya yang ditentukan berdasarkan harga pasar dengan

menggunakan kurs *Reuters* pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas dan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasi dari kontrak derivatif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas derivatif disajikan sebesar kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif.

Tabel Laporan Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	BANK					BANK				
		2023					2022				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban		Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A. TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR											
1.	Spot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Future	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Swap	-	-	-	-	-	-	-	361.029.411,80	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TERKAIT DENGAN SUKU BUNGA											
1.	Forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Future	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Swap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. LAINNYA											
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	361.029.411,80	-	-

HUMAN *Capital*







Strategi Manajemen *Human Capital*

Dalam rangka mewujudkan strategi manajemen *human capital* (HC) yang unggul, mandiri, berdaya saing dan profesional, Bank mempersiapkan *human capital* yang mampu melihat peluang dan mengeksekusi sehingga menghasilkan *return* yang maksimal bagi Bank. HC di masa mendatang harus memiliki kriteria yang sesuai dengan visi dan misi serta budaya perusahaan. HC diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mendukung perkembangan digitalisasi sehingga dapat melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggungjawabnya dengan komitmen untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap berdasarkan budaya perusahaan, nilai-nilai etika, dan aturan.

Mengakomodir rencana manajemen untuk implementasi segmentasi kredit dan penguatan pada Teknologi Informasi terutama dalam hal digitalisasi perbankan, diperlukan pengembangan organisasi yang selaras dengan percepatan bisnis Bank Jatim. Untuk itu, dalam rangka menjadi pusat pengembangan HC yang adaptif, berwawasan global dan menginspirasi perubahan, terdapat 4 (empat) pilar misi utama HC yaitu:

- Mengembangkan standarisasi kompetensi HC.
- Mengembangkan metode peningkatan kompetensi HC.
- Mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan HC.
- Mengembangkan HC yang memiliki kompetensi Digital.

Strategi pencapaian yang ada dalam 4 (empat) pilar tersebut akan digunakan dalam peningkatan layanan pengelolaan *human capital* sesuai dengan siklus *human capital* dengan strategi utama sebagai berikut:

1. Pemenuhan kuantitas pekerja untuk mendukung transformasi organisasi melalui rekrutmen Jatimers Internship Program (JIP), rekrutmen regular, rekrutmen *prohire*, rekrutmen *Officer Development Program* (ODP), Program Karir Jatimers Leadership Development Program (JLDP) 1-4, dan Pemenuhan kebutuhan Account Officer (AO).
2. Peningkatan Kualitas pekerja untuk memperkecil *gap* kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung proses bisnis, meliputi:
 - a. Pendidikan yang berfokus pada lini bisnis.
 - b. Penyusunan kurikulum dan silabus pendidikan.
 - c. Pemetaan dan pemenuhan sertifikasi.
 - d. Pendidikan bertaraf internasional.
 - e. Program beasiswa S2.
3. Penyempurnaan kebijakan *human capital* yaitu sebagai berikut:
 - a. Insentif dan tunjangan bagi bisnis unit.
 - b. Profil dan kamus kompetensi.
 - c. Persyaratan jabatan.
 - d. Pendidikan dan pelatihan.
 - e. *Performance management*.
4. Digitalisasi untuk mempercepat proses layanan *Human Capital*.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Kebijakan

Dalam mendukung keberhasilan Bank mencapai kinerja yang positif, merupakan hasil dan kerja keras seluruh insan jatimers. Dukungan Sumber Daya yang berkompeten sangatlah penting dalam upaya mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis perusahaan hingga tercapai visi misi perusahaan. Dalam rangka mendapatkan talent terbaik sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya di Bank maka dalam pelaksanaan rekrutmen Bank lebih selektif dalam melakukan proses rekrutmen. Tujuan dalam pelaksanaan rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan

jabatan kosong dalam struktur organisasi dengan melalui melalui proses perencanaan kebutuhan secara baik dan benar. Sumber rekrutmen yang digunakan oleh Bank Jatim untuk mendapatkan talent terbaik didapat melalui sumber internal dan eksternal. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, Bank tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja, sehingga pada tahun 2023 Bank telah melaksanakan kebijakan reposisi dan rekomposisi tenaga kerja dengan mengutamakan pengisian tenaga di lini bisnis.

Jenis rekrutmen yang ada pada Bank Jatim meliputi:

1. Rekrutmen Pekerja Regular.
2. Rekrutmen Pekerja Berpengalaman (*Pro Hire/ Multilevel Entry*).
3. Program Alih Jalur (*Crash Program*).
4. *Officer Development Program* (ODP).
5. Rekrutmen Pekerja Disabilitas.

Sumber rekrutmen yang digunakan oleh Bank Jatim didapat melalui sumber internal dan eksternal. Sumber internal yaitu individu yang sudah bekerja di Bank baik berstatus pekerja tetap Bank maupun berstatus sebagai tenaga alih daya maupun tenaga magang. Sedangkan sumber eksternal yaitu tenaga kerja dari luar yang tidak atau belum bekerja di Bank yang didapat dengan merekrut pegawai yang berprestasi khusus yang akan menunjang *corporate image* Bank.

Kriteria dalam proses seleksi secara garis besar meliputi:

1. Pendidikan dengan kriteria S1/S2 untuk posisi jabatan struktural dengan keahlian tertentu. S1 untuk posisi tenaga administrasi dengan prospek karir dan SMU/SMK untuk posisi non administratif.
2. Pengalaman kerja yang menunjang penmabahan nilai dalam proses seleksi.
3. Kondisi kesehatan dengan kriteria sehat secara fisik dan kejiwaan dan tidak pernah tersangkut narkoba.

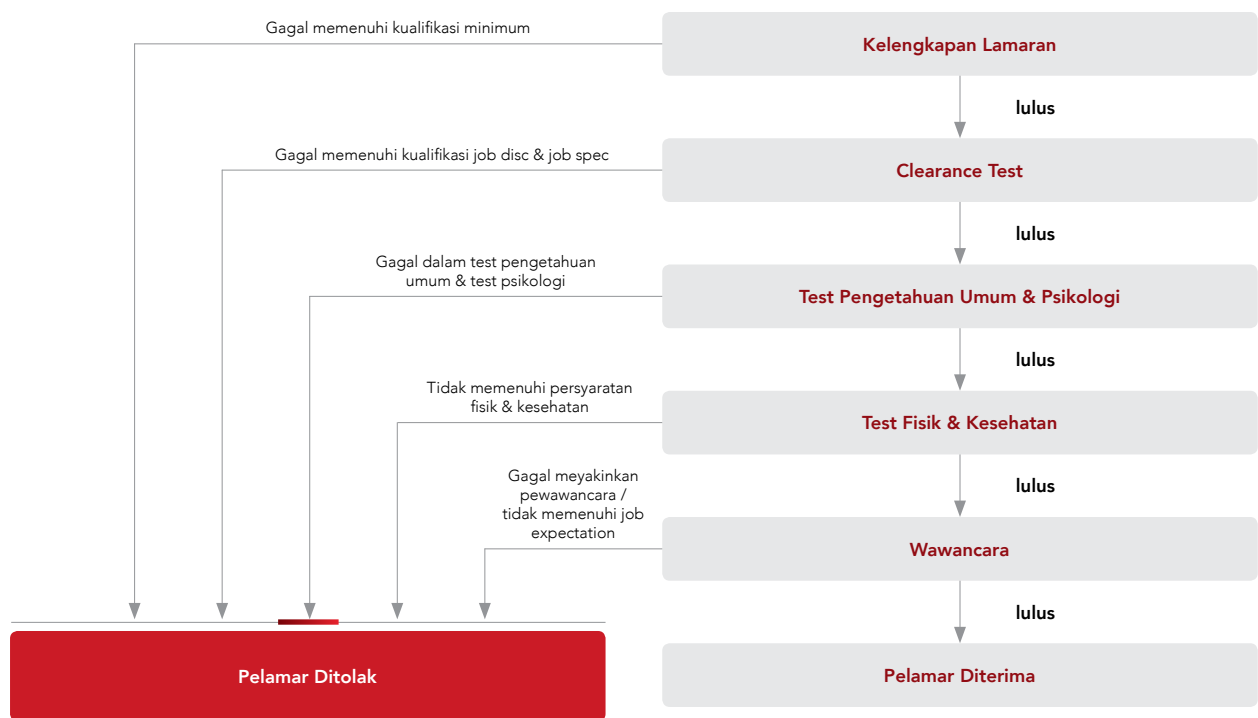
4. Kepribadian meliputi karakteristik pribadi di antaranya usia, gender dan status perkawinan tergantung pada lowongan formasi yang tersedia.
5. Kompetensi yang dilihat melalui proses *assessment* sesuai dengan kamus kompetensi bank.

Proses Pelaksanaan rekrutmen dapat dilakukan secara mandiri oleh Bank maupun bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang *human capital* atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) baik *online* maupun *offline* atau menggunakan *platform* media penyedia tenaga kerja. Setelah itu, dilakukan *open recruitment* menyaring lamaran yang masuk dan memilih pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk diikutkan dalam proses seleksi. Lamaran yang masuk verifikasi dapat bekerja sama dengan Lembaga/institusi jasa konsultan di bidang *human capital* atau jasa pencari kerja (*Head Hunters*) yang dicocokkan dengan kualifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Setelah verifikasi, maka pelamar yang memenuhi kualifikasi dilakukan pemanggilan untuk dilakukan seleksi.

Proses seleksi calon pegawai mengikuti pola standar yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi:

1. Seleksi administrasi/*clearance test*.
2. Tes pengetahuan umum/*product knowledge Bank*.
3. Asesmen melalui *psikotest* dan/atau wawancara berbasis kompetensi.
4. Wawancara *user*.
5. Tes kesehatan

Untuk mekanisme pengambilan keputusan penerimaan dengan memakai pendekatan *multiple hardless model* atau sistem gugur. Selain itu, penerimaan juga dapat menggunakan sistem lainnya sesuai dengan kebutuhan dan menjadi kewenangan Vice President Human Capital serta mempertimbangkan status kolektibilitas pinjaman individu pelamar sebagaimana contoh:





Setelah menjalani rangkaian proses seleksi dan penerimaan, pengikatan tenaga kerja dilakukan dengan kontrak kerja sebagai masa percobaan sehingga statusnya adalah tenaga kontrak ikatan kerja (TKIK). Kontrak kerja berisi hak dan kewajiban Bank dan pekerja yang mengikat masing-masing pihak sampai dengan kontrak kerja berakhir atau telah dikeluarkannya keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap.

Kewenangan menandatangani kontrak kerja diatur sebagai berikut:

Posisi Entry Level	Pejabat Penandatanganan Kontrak
SEVP, ESELON 1 -2	Direktur yang membawahi fungsi <i>Human Capital</i> /Direktur Bidang yang membawahi pekerja.
ESELON 3	SEVP yang membawahi <i>Human Capital</i>
ESELON 4 DAN PELAKSANA	Vice President <i>Human Capital</i>

Jangka waktu kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dilakukan perpanjangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Terhadap tenaga kerja yang telah menandatangani kontrak kerja maka wajib mengikuti dan lulus pada seluruh program Pendidikan dan pelatihan yang telah disiapkan oleh Bank. Bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan program Pendidikan dan pelatihan maka dilakukan pemutusan kontrak kerja. Khusus untuk rekrutmen pegawai berpengalaman, maka dapat langsung ditempatkan di unit kerja sesuai kebutuhan, sedangkan program pendidikan dan pelatihan dijalankan secara paralel di antara waktu bekerja.

Untuk mekanisme pengangkatan pekerja regular, pekerja yang telah melakukan tanda tangan dengan status TKIK selanjutnya akan dilakukan evaluasi kinerja selama 6 (enam) bulan sebagai syarat pengangkatan menjadi calon pegawai. Calon pegawai nantinya akan menjalani evaluasi kinerja pula selama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai tetap. Mekanisme pengangkatan bagi selain pekerja regular diatur tersendiri dan disesuaikan dengan jabatan atau posisi yang ditempati.

Pelaksanaan Rekrutmen

Pada tahun 2023, terdapat 42 Pegawai yang mengundurkan diri. Sedangkan untuk perekrutan, sepanjang tahun 2023 Bank

Jatim telah merekrut 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) pegawai baru dengan kompetensi di bidang admin kredit, *general banking*, *funding officer*, teknologi informasi, dan *Officer Development Program* (ODP).

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Dalam meningkatkan kompetensi *human capital* Bank Jatim, Divisi *Human Capital* telah mengatur dalam Prosedur Standar Operasi Pendidikan dan Pelatihan. Dalam ketentuan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat *public training*.
2. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat *in-house training*.
3. Pendidikan dan pelatihan non *degree* luar negeri.
4. Pelaksanaan sertifikasi dan program pemeliharaan sertifikasi profesi.
5. Evaluasi dan prosedur pengarsipan dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Divisi *Human Capital* juga telah membuat Silabus Pembelajaran berdasar pada *Training Need Analysis* yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun berjalan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Pelaksana (Staf Setingkat) Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Lending	3.090	Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai Bank Jatim dalam hal perkreditan.
2.	Perencanaan	141	Meningkatkan kompetensi bidang perencanaan perusahaan, pemahaman tugas pokok dan seksi pada sebuah struktur organisasi di Bank Jatim.
3.	Kepatuhan	1.389	Meningkatkan budaya patuh dengan penyegaran kembali tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan dari regulator dan ketentuan Bank Jatim.
4.	Marketing	406	Meningkatkan kompetensi bidang pemasaran kepada frontliner dan account officer Bank Jatim.
5.	Human Capital	744	Penyegaran kembali tentang ketentuan internal Bank Jatim dan meningkatkan budaya perusahaan.

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
6.	Audit Intern	149	Meningkatkan kompetensi bidang auditing kepada Auditor dan pemahaman tentang Strategi Anti Fraud.
7.	Funding	2.005	Meningkatkan kompetensi bidang pemasaran kepada frontliner dalam meningkatkan kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat.
8.	Teknologi Informasi	191	Meningkatkan kompetensi bidang teknologi informasi dan membekali informasi tentang IT Awareness.
9.	Hukum	238	Meningkatkan kompetensi bidang hukum dalam kegiatan operasional Bank Jatim.
10.	Treasury	583	Meningkatkan kompetensi bidang treasury dan pembekalan tentang prosedur telegraphic transfer kepada frontliner Bank Jatim.
11.	Manajemen Risiko	390	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko perbankan dan sosialisasi pasar sasaran kepada account officer Bank Jatim.
12.	Corporate Secretary	135	Membekali pegawai baru dengan pengetahuan struktur manajemen dan pengelolaan Bank Jatim.
13.	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	234	Meningkatkan pengetahuan penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada pejabat tingkat eselon 3 dan eselon 4.
14.	Operasi (Supporting)	11	Meningkatkan kompetensi tugas pokok dan seksi dalam kegiatan pendukung operasional Bank.
15.	Operasi (Business)	1.007	Meningkatkan kompetensi tugas pokok dan seksi dalam kegiatan operasional Bank.
16.	Akuntansi	340	Meningkatkan kompetensi akuntansi dan sosialisasi ketentuan e-Materai, perpajakan dan lainnya kepada petugas akuntansi.
17.	Risiko Bisnis	23	Meningkatkan kompetensi risiko bisnis kepada petugas Divisi Risiko Bisnis.
18.	Usaha Syariah	34	Meningkatkan kompetensi perbankan syariah.
19.	Umum	20	Meningkatkan kompetensi bidang pekerjaan umum dalam hal prosedur menentukan harga perkiraan saat melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 4 (Penyelia Setingkat) Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Human Capital	770	Meningkatkan kompetensi bidang human capital khususnya tentang corporate value internalization, culture transformation, leadership and problem solving.
2.	Lending	955	Meningkatkan kompetensi bidang lending khususnya analisa pemberian kredit sektor agroindustri, green portfolio untuk mendukung keuangan berkelanjutan, analisa kredit sektoral dan segmentasi kredit.
3.	Kepatuhan	547	Meningkatkan kompetensi bidang kepatuhan khususnya APU PPT, anti gratifikasi dan budaya patuh.
4.	Marketing	260	Meningkatkan kompetensi bidang marketing khususnya business model canvas, effective marketing management, strategic selling skills, marketing dan selling.
5.	Audit Intern	140	Meningkatkan kompetensi bidang audit khususnya critical point dan strategi anti fraud.
6.	Funding	243	Meningkatkan kompetensi dalam menghimpun dana dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
7.	Teknologi Informasi	148	Meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi khususnya tentang machine learning, data analytics dan IT awareness.
8.	Hukum	287	Meningkatkan kompetensi bidang hukum khususnya hukum perbankan dan hukum perkreditan.
9.	Treasury	508	Meningkatkan kompetensi bidang treasury khususnya tentang trade finance dan banknotes.
10.	Manajemen Risiko	1027	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko dengan sertifikasi dan program penyegaran manajemen risiko perbankan.
11.	Corporate Secretary	3	Meningkatkan kompetensi bidang corporate secretary terutama dalam hal peningkatan kemampuan dalam mengintegrasikan CSR dan investor relation unit.
12.	Perencanaan	153	Meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan sosialisasi tentang grand design struktur.
13.	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	163	Meningkatkan kompetensi bidang penyelamatan penyelesaian kredit khususnya dalam hal gugatan sederhana dan eksekusi kredit bermasalah.



No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
14.	Umum	15	Meningkatkan kompetensi bidang pekerjaan umum dalam hal prosedur menentukan harga perkiraan saat melakukan proses pengadaan barang/jasa.
15.	Operasi	170	Meningkatkan kompetensi bidang operasional khususnya dalam hal standar layanan dan administrasi kredit.
16.	Akuntansi	35	Meningkatkan kompetensi bidang akuntansi khususnya tentang perpajakan, e-materai dan integrasi pelaporan perbankan berbasis metadata.
17.	Usaha Syariah	317	Meningkatkan kompetensi bidang usaha syariah khususnya pendidikan dasar perbankan syariah dan taksatur gadai.
18.	Risiko Bisnis	18	Meningkatkan kompetensi bidang audit khususnya <i>early warning signal</i> dan pengurusan perijinan usaha penanaman modal.
19.	Operasi (Supporting)	257	Meningkatkan kompetensi bidang operasional khususnya tentang <i>banknotes</i> , ATM, EDC dan EPTD.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 3 (Pimcapem Setingkat) Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Akuntansi	3	Meningkatkan kompetensi bidang akuntansi khususnya tentang perpajakan dan pernyataan standar akuntansi keuangan.
2.	Audit Intern	8	Meningkatkan kompetensi bidang audit intern khususnya sertifikasi profesi internal auditor.
3.	Funding	17	Meningkatkan kompetensi bidang <i>funding</i> khususnya tentang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan valuta asing.
4.	Hukum	150	Meningkatkan kompetensi bidang hukum khususnya tentang hukum perkreditan dan kepailitan.
5.	Human Capital	248	Meningkatkan kompetensi bidang <i>human capital</i> khususnya tentang <i>culture transformation with growth mindset</i> , <i>corporate value internalization</i> dan wawancara berbasis kompetensi.
6.	Kepatuhan	39	Meningkatkan kompetensi bidang kepatuhan khususnya tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7.	Lending	165	Meningkatkan kompetensi bidang <i>lending</i> khususnya tentang keterampilan keuangan dan analisis kredit, <i>supply chain financing</i> dan analisa kredit sektoral.
8.	Manajemen Risiko	362	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko khususnya sertifikasi dan program penyegaran sertifikasi manajemen risiko perbankan.
9.	Marketing	1	Meningkatkan kompetensi bidang marketing khususnya tentang <i>effective marketing management</i> .
10.	Operasi	2	Meningkatkan kompetensi bidang operasional khususnya tentang admin dan legal bisnis.
11.	Operasi (Supporting)	1	Meningkatkan kompetensi bidang pendukung operasional khususnya tentang strategi dan implementasi penguatan industri perbankan.
12.	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	1	Meningkatkan kompetensi bidang penyelamatan penyelesaian kredit khususnya kredit bermasalah.
13.	Perencanaan	2	Meningkatkan kompetensi bidang perencanaan khususnya tentang <i>workload analysis</i> dan <i>organization development</i> .
14.	Risiko Bisnis	10	Meningkatkan kompetensi bidang audit khususnya <i>early warning signal</i> dan pengurusan perijinan usaha penanaman modal.
15.	Teknologi Informasi	10	Meningkatkan kompetensi bidang teknologi informasi khususnya tentang <i>enterprise resource planning</i> , <i>data science specialist</i> dan <i>information technology infrastructure library</i> .
16.	Treasury	177	Meningkatkan kompetensi bidang treasuri khususnya tentang <i>banknotes</i> , <i>telegraphic transfer</i> dan <i>trade finance</i> .
17.	Umum	1	Meningkatkan kompetensi bidang umum khususnya tentang penyusunan harga perkiraan sendiri.
18.	Usaha Syariah	2	Meningkatkan kompetensi bidang usaha syariah khususnya pendidikan perbankan syariah.

Tabel Pengembangan Kompetensi Eselon 2 (Pemimpin Cabang Setingkat) Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Akuntansi	1	Meningkatkan kompetensi bidang akuntansi khususnya tentang bervet A dan B.
2.	Audit Intern	2	Meningkatkan kompetensi bidang audit intern khususnya tentang sertifikasi audit level 3.
3.	Corporate Secretary	2	Meningkatkan kompetensi bidang <i>corporate secretary</i> khususnya tentang program <i>investor relation</i> dan <i>integrated excelent CSR</i> .
4.	Funding	71	Meningkatkan kompetensi bidang <i>funding</i> khususnya tentang <i>fund administration</i> , sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan valuta asing.
5.	Hukum	3	Meningkatkan kompetensi bidang hukum khususnya tentang aspek hukum hak atas tanah, <i>corporate law</i> dan <i>legal contract drafting</i> .
6.	Human Capital	157	Meningkatkan kompetensi bidang <i>human capital</i> khususnya tentang <i>corporate value internalization</i> , <i>culture transformation</i> , <i>program branch manager</i> dan wawancara berbasis kompetensi.
7.	Lending	6	Meningkatkan kompetensi bidang <i>lending</i> khususnya tentang analisa kredit sektor agribisnis, analisa kredit sektor ekonomi, dan <i>international standard banking procedure 821</i> .
8.	Manajemen Risiko	112	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko khususnya tentang implementasi <i>basel III</i> , <i>stress testing on market risk and liquidity risk</i> , dan program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko.
9.	Operasi	2	Meningkatkan kompetensi bidang operasi khususnya tentang administrasi dan legal bisnis.
10.	Operasi (Business)	1	Meningkatkan kompetensi bidang operasional bisnis khususnya tentang <i>asset liability management</i> .
11.	Operasi (Supporting)	2	Meningkatkan kompetensi bidang operasional <i>supporting</i> khususnya tentang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sub bidang pembayaran, strategi dan implementasi penguatan industri perbankan.
12.	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	7	Meningkatkan kompetensi bidang penyelamatan penyelesaian kredit khususnya tentang program penyelamatan dan penyelesaian kredit.
13.	Risiko Bisnis	4	Meningkatkan kompetensi bidang audit knusunya <i>early warning signal</i> dan pengurusan perijinan usaha penanaman modal.
14.	Teknologi Informasi	2	Meningkatkan kompetensi bidang teknologi informasi khususnya tentang <i>enterprise resource planning</i> dan pengelolaan layanan TI berstandar ISO.
15.	Treasury	59	Meningkatkan kompetensi bidang tresuri khususnya tentang <i>trade finance</i> , <i>yield curve analysis</i> , transaksi DNDF, OIS dan IRS.
16.	Umum	1	Meningkatkan kompetensi bidang umum khususnya tentang harga perkiraan sendiri.
17.	Usaha Syariah	1	Meningkatkan kompetensi bidang usaha syariah khususnya tentang pendidikan perbankan syariah.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Eselon 1 (VP Setingkat) Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Akuntansi	2	Meningkatkan kompetensi bidang akuntansi khususnya tentang perpajakan dan pernyataan standar akuntansi keuangan sesuai IFRS terbaru.
2.	Audit Intern	1	Meningkatkan kompetensi bidang audit intern khususnya program pendidikan bagi kepala sistem pengawas intern.
3.	Corporate Secretary	1	Meningkatkan kompetensi bidang <i>corporate secretary</i> khususnya program pendidikan pemimpin <i>corporate secretary</i> .
4.	Human Capital	50	Meningkatkan kompetensi bidang <i>human capital</i> khususnya tentang <i>culture transformation with growth mindset</i> dan <i>corporate value internalization</i> .
5.	Lending	1	Meningkatkan kompetensi bidang <i>lending</i> khususnya tentang kredit agroindustri.
6.	Manajemen Risiko	30	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko khususnya implementasi <i>basel III</i> dan program penyegaran sertifikasi manajemen risiko perbankan.



No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
7.	Penyelamatan Penyelesaian Kredit	1	Meningkatkan kompetensi bidang penyelamatan penyelesaian kredit khususnya kredit bermasalah.
8.	Risiko Bisnis	2	Meningkatkan kompetensi bidang audit khususnya <i>early warning signal</i> dan pengurusan perijinan usaha penanaman modal.
9.	Teknologi Informasi	1	Meningkatkan kompetensi bidang teknologi informasi khususnya <i>data science and visualization</i> .
10.	Treasury	3	Meningkatkan kompetensi bidang <i>treasury</i> khususnya tentang <i>asset liability management</i> dan <i>trade finance</i> .
11.	Umum	1	Meningkatkan kompetensi bidang umum khususnya tentang program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Tabel Pengembangan Kompetensi Level Direksi/Komisaris Tahun 2023

No.	Bidang Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1.	Human Capital	12	Meningkatkan kompetensi bidang <i>human capital</i> khususnya tentang <i>culture transformation with growth mindset, corporate value internalization</i> .
2.	Kepatuhan	12	Meningkatkan kompetensi bidang kepatuhan khususnya <i>good corporate governance</i> .
3.	Manajemen Risiko	7	Meningkatkan kompetensi bidang manajemen risiko khususnya program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko.
4.	Usaha Syariah	1	Meningkatkan kompetensi bidang usaha syariah khususnya <i>executive sharia banking</i> .

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023, Bank Jatim telah memberikan pendidikan kepada 4.999 orang pegawai dari 5.242 orang pegawai atau telah dilaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepada 95,38% dari pegawai. Hal ini dapat terpenuhi dengan bantuan teknologi *e-Learning* dan konten yang mudah diakses secara fleksibel baik dari tempat dan waktu. Secara komposisi, 60,5% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang kompetensi bisnis dan 39,5% adalah penunjang kompetensi *supporting* bisnis. Kegiatan pengembangan kompetensi mencatatkan 1.576 orang pegawai telah mengikuti program sertifikasi dan 4.913 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi non sertifikasi. Berdasarkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi ini sebanyak 468 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *public training* dan 4.970 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *in-House training*.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023, Bank Jatim telah melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pegawai dengan mengikutsertakan 4.999 pegawai. Biaya yang telah dikeluarkan Bank Jatim pada tahun 2023 dalam rangka pengembangan kompetensi adalah sebesar Rp38.865.797.580 meningkat dari biaya yang dikeluarkan pada 2022 yang sebesar Rp23.834.986.794.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2022-2023

Keterangan	2023	2022
Total Biaya (Rp)	Rp38.865.797.580	Rp23.834.986.794

Pengembangan Karir

Kebijakan

Pengembangan Karir yang diterapkan Bank Jatim bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Saat ini Bank memiliki program pengembangan karir berjenjang atau program promosi bagi pegawai dari pejabat tingkat pertama sampai dengan pejabat eksekutif yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang kosong. Dasar dalam Pengembangan Karir terdiri dari dua aspek yaitu

kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggung jawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan. Pada tahun 2023, terdapat 140 orang Pegawai yang telah menjalankan program pengembangan karir.

Penilaian Kinerja

Untuk memastikan setiap pegawai dapat optimal berkontribusi bagi pencapaian Kinerja Bank, maka Bank memiliki sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Dalam upaya memastikan pencapaian kinerja pegawai yang mampu menunjang pencapaian target perusahaan, target perusahaan akan di-breakdown ke masing-masing unit kerja hingga ke level individu, sehingga kinerja perusahaan akan selaras dengan kinerja individu pegawai. Bank saat ini menerapkan sistem manajemen kinerja menggunakan metode *Balance Scorecard*. Dalam penilaian kinerja individu pegawai digunakan Aplikasi KPI *Scorecard* untuk memudahkan proses *monitoring* dan *reporting* pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) pegawai.

Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem *Grading* yaitu remunerasi akan dibagi sesuai dengan *grade* masing-masing jabatan. Penetapan *grading* masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan *level grading* masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. *Grading* masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Divisi Human Capital menggandeng pihak eksternal dalam menentukan *grade* masing-masing jabatan agar lebih independen dalam melakukan penilaian. Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan *output* yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai termasuk kinerja keberlanjutan. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem *grading* yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan *personal grade* serta jabatan/posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem *grading* dan remunerasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja Bank akhirnya juga dapat tercapai. Sistem *grading* yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

- Tingkatan Eselon
- Personal Grade
- Job Grade

Berikut adalah struktur sistem *grading* yang ada di Bank Jatim:

Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Senior Executive Vice President (SEVP)		18	SEVP	G2
				G1
Vice President (VP)	Eselon 1	17	- Vice President - Pemimpin Cabang Utama	F3
		16		F2
		15		F1
		14		
Assistance Vice President (AVP)	Eselon 2	14	- Pemimpin Cabang Konvensional Kelas 1, 2, 3 - Pemimpin Bidang Cabang Utama - Pemimpin Bidang Stariah - Pemimpin Unit - Assistance Vice President	E3
		13		E2
		12		E1

Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Manager (MGR)	Eselon 3	11	- Pemimpin Bidang Operasional - Pemimpin Bidang Bisnis - Pemimpin Bidang Kredit - Pemimpin Cabang Pembantu - Senior Auditor - Senior Officer	D3
		10		D2
		9		D1
Assistant Manager (AMGR)	Eselon 4	8	- Penyelia - Pemimpin Kantor Fungsional - Auditor - Officer	C3
		7		C2
		6		C1
Corporate Title	Eselon	Personal Grade	Jabatan	Job Grade
Assistant (ASST)	Pelaksana	5	- Staf - Junior Officer - Junior Auditor - Funding Officer - Account Officer - Pegawai Non Karir	B3
		4		B2
		3		B1
		2		
Pegawai Dasar	Pegawai Dasar	1	- Satpam - Pengemudi - Pramubakti	A2
				A1

Sebagai dasar penyusunan pedoman tata kelola pemberian remunerasi yang baik bagi Pengurus, Bank mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah:

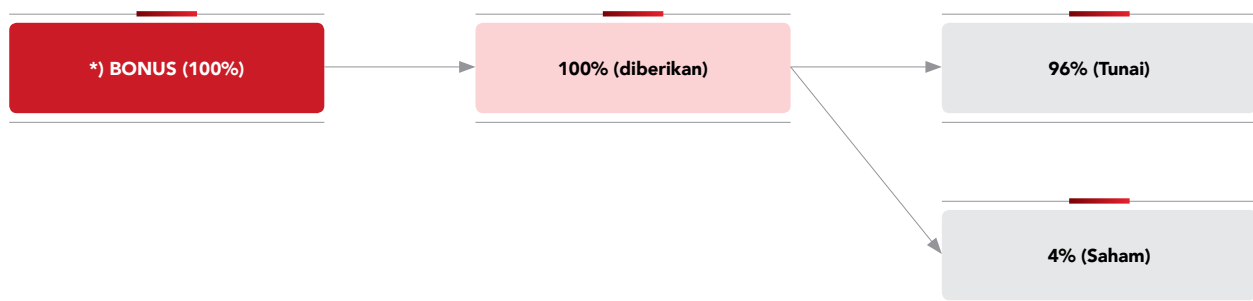
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Pada dasarnya remunerasi dibagi menjadi 2 (dua) remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel. Sebagai penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Bank Jatim menetapkan pihak yang menjadi Material Risk Taker yang terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Bidang dibawah Direktur Utama
- Dewan Komisaris

Prosentase remunerasi yang bersifat variabel bagi Pengurus Bank yang tidak termasuk Material Risk Taker adalah sebagai berikut:



Program Pensiun

Bank Jatim mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang *mandatory* oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Pada tahun 2023, terdapat 48 pegawai yang telah menjalankan program pensiun. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

1. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
Karenan bersifat *mandatory* maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/Personal Grade.
2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
3. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, dimana seluruh iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/Personal Grade pegawai.

Survei Kepuasan Pegawai

Dalam rangka menyempurnakan implementasi strategi maupun kebijakan serta sebagai sarana pegawai menyampaikan aspirasinya, perusahaan melakukan pengukuran survei keterikatan pegawai terhadap perusahaan melalui *employee engagement*. Survei keterikatan pegawai bermanfaat untuk kedua belah pihak, dari pegawai maupun perusahaan. Berikut manfaat yang diberikan:

Manfaat *Employee Engagement* bagi Pegawai

1. Sebagai wadah aspirasi pegawai terhadap perusahaan. Pegawai dapat memberikan kritik kepada perusahaan melalui pengisian *Employee Engagement*. Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi input bagi perusahaan dalam membuat kebijakan.
2. Menciptakan semangat baru bagi pegawai untuk berangkat ke kantor. Pegawai akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta perusahaan.
3. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap pegawainya. Hubungan ini juga akan membuat pegawai untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerja sama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh pegawai dalam kehidupannya. Pendekatan ini dapat membuat pegawai menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di perusahaan.



Manfaat *Employee Engagement* bagi Perusahaan

1. Perusahaan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi pegawai sehingga tingkat keterikatan antara pegawai dan perusahaan semakin meningkat.
 2. Perusahaan akan memiliki pegawai dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
 3. Pegawai akan menjadi loyal kepada perusahaan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.
 4. *Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada perusahaan. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.
 5. *Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari pegawai kepada Bank. Jumlah absen karena pegawai yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktifitas sepanjang tahun.
2. *Potentially Engaged* (Komitmen Tinggi Tetapi Kepuasan Rendah)
Pada level ini, karyawan merasa berkontribusi penting pada perusahaan, namun memiliki rasa keterikatan dan kepuasan terhadap perusahaan rendah. Mereka cenderung menurunkan performa kinerjanya bahkan hingga keluar dari perusahaan apabila karyawan tersebut tidak mendapatkan kepuasan dari perusahaan.
 3. *Passively Engaged* (Kepuasan Tinggi Tetapi Komitmen rendah)
Pada level ini, merasa nyaman dan aman dengan kondisinya saat ini, karyawan merasa terlena oleh fasilitas perusahaan, namun tidak memiliki komitmen untuk menumbuhkan rasa kontributif terhadap perusahaan. Mereka cenderung kurang memiliki rasa kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan bersembunyi dibalik kerja keras orang lain, sehingga dapat merugikan perusahaan.
 4. *Dissengaged* (Komitmen dan Kepuasan Rendah)
Pada level ini, karyawan memiliki rasa terputus dari perusahaan, seringkali mereka merasa kurang merasa terlibat, dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari pekerjaan. Mereka dapat menularkan pemikiran-pemikiran negatif kepada karyawan lainnya.

Engagement Index menunjukkan tingkat kepuasan dan komitmen pegawai Bank Jatim yang diukur melalui rata-rata penilaian dari skala 1-4. Sedangkan untuk tingkatan keterikatan pegawai atau *Employee Engagement* dibagi menjadi 4 (empat) level yaitu:

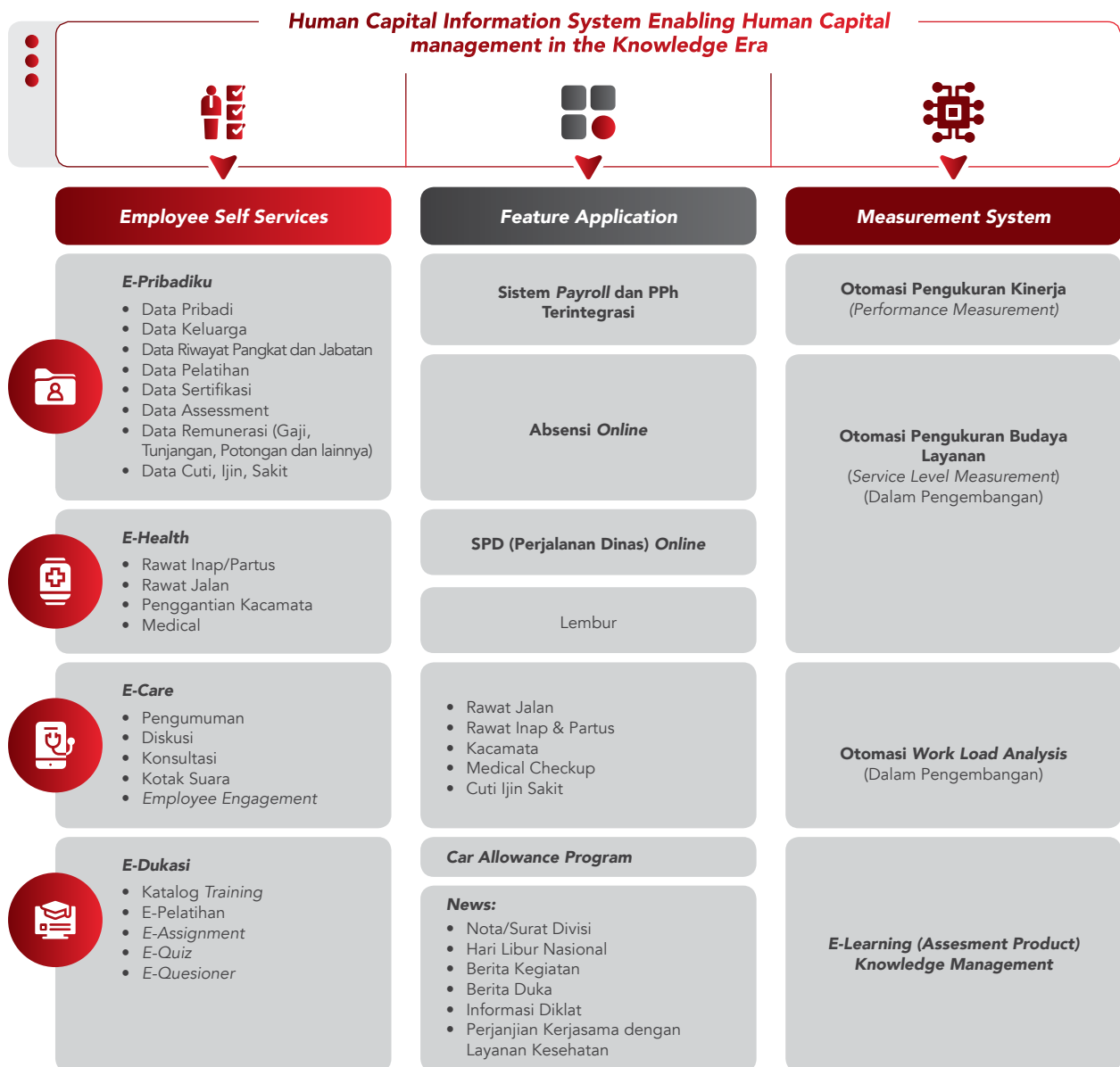
1. *Actively Engaged* (Komitmen & Kepuasan Tinggi)
Pada level ini, karyawan memiliki visi misi yang sama dengan perusahaan, bersikap loyal, dan berkomitmen secara psikologis kepada perusahaan. Mereka cenderung berkontribusi secara konsisten dan produktif untuk keberhasilan perusahaan.

Jumlah responden yang berpartisipasi sejumlah 4.495 pegawai, dan presentase pegawai *engaged* sebesar 83,1%.

Human Capital Information System

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktifitas, melihat berita dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Divisi Human Capital telah meluncurkan produk *Digital* yaitu Portal *Human Capital*. Portal *Human Capital* merupakan media informasi *digital* berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, polling dan ngerbang menuju aplikasi-aplikasi lainnya.

Demi memudahkan Divisi Human Capital dalam mendapatkan informasi yang cepat, tepat, efektif, dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi, pengajuan kompensasi dan *benefit*, serta menampung aspirasi pegawai melalui kotak suara, Divisi Human Capital meluncurkan program *Human Capital* berbasis aplikasi *online* (*web* dan *mobile apps*) disebut sebagai E-Human Capital/e-HC. Aplikasi ini sebagai wujud digitalisasi dalam mendukung program *Green Banking* serta mengurangi penggunaan kertas.



E-Human Capital Mobile

Aplikasi E-Human Capital Mobile diluncurkan pada tahun 2021, aplikasi ini diperuntukkan bagi Pekerja Bank Jatim yang bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi, pengajuan kompensasi dan benefit serta menampung aspirasi pekerja melalui kotak suara. Pada tahun 2023, terdapat penambahan beberapa menu di antaranya:

1. Cuti *Block Leave*
2. Scan *Barcode* untuk proses administrasi pengobatan di Rumah Sakit.

Aplikasi ini sebagai wujud digitalisasi sehingga mengurangi penggunaan kertas dan mendukung program Green Banking.



Internalisasi Budaya

Bank Jatim dalam penguatan budaya dan transformasi memiliki program *Corporate Culture Event* yang bertujuan untuk mendukung implementasi, internalisasi dan transformasi di lingkup pekerja sehingga terciptanya *sense of belonging* terhadap Bank. Adapun penguatan yang dapat mendukung setiap program yang dilakukan oleh *Corporate Culture* antara lain:

- a. *Culture Campaign* merupakan program yang dilakukan secara terorganisir oleh seluruh Tim Budaya (*Culture Leader, Culture Booster, Culture Agent*) untuk menyampaikan nilai-nilai EXPRESI yaitu *Excellence, Professional, Integrity, Synergy, Innovation* kepada seluruh pekerja. Program ini sebagai wujud internalisasi program budaya dan transformasi Bank Jatim. Dalam pelaksanaan *campaign* ini terdapat materi yang berbeda setiap bulannya.
- b. *In House Training* kepada seluruh tim budaya yang terdapat di Kantor Cabang dan Kantor Pusat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan/*soft skill* pekerja di Bank Jatim dan meningkatkan *engagement* terhadap perusahaan. Hal ini selaras dengan transformasi *Human Capital* untuk meningkatkan kualitas pekerja. Materi di dalam *in house training* ini berfokus terhadap peningkatan kemampuan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang terbaik di masa yang akan dan tidak lepas dari nilai-nilai EXPRESI sebagai budaya perusahaan. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara triwulan.
- c. Menyediakan ruang komunikasi antara pekerja dan Top Management melalui program *Greeting and Sharing with Board Of Directors (BOD)*. Ruang ini sebagai media dalam menyampaikan program kerja perusahaan (budaya maupun transformasi) kepada pekerja dan menjadi kesempatan bagi pekerja dalam menyampaikan ide/saran bagi perkembangan perusahaan sehingga mampu mengurangi batasan atau GAP antara pekerja dan *Management*. Dalam program *Greeting and Sharing* ini akan menghadirkan pembicara atau motivator untuk memberikan *booster* kepada tim budaya sehingga diharapkan terus memiliki spirit yang sama sebagai *influencer* dalam menyampaikan transformasi dan internalisasi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara catur wulan.
- d. Kegiatan tahunan bagi Tim Budaya Bank Jatim yaitu EXPRESI Festival (EXPRESITIVAL). Kegiatan ini merupakan apresiasi terhadap Tim Budaya atas dedikasinya sebagai *influencer* yang terus menyampaikan transformasi dan internalisasi budaya perusahaan di lingkungan unit kerja. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- e. *Cultural Identity* adalah program pemberian identitas kepada Tim Budaya yang memiliki tujuan agar *figure* para agen perubahaman mudah untuk dikenali oleh seluruh pekerja. Selain

itu, adanya identitas ini untuk memberikan pemahaman akan kehadiran dan perannya sebagai agen perubahan dan *role model* bagi lingkungan unit kerja. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada Triwulan I-2.

- f. Program *Coaching and Mentoring* pada Tim Budaya, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi program kerja *Corporate Culture* yang ada di seluruh unit kerja (Kantor Pusat dan Cabang). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi budaya dan transformasi bisa tercapai sesuai dengan arahan manajemen. Adapun dalam pelaksanaan program ini, juga dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan/aturan maupun program kerja budaya perusahaan kepada tim budaya. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan setiap triwulan.

Selain *Corporate Culture Event*, terdapat program *Reinforcement of Corporate Culture* yang akan dilakukan Grup Corporate Culture untuk terus memperkuat tim budaya dalam melakukan implementasi budaya perusahaan sebagai berikut:

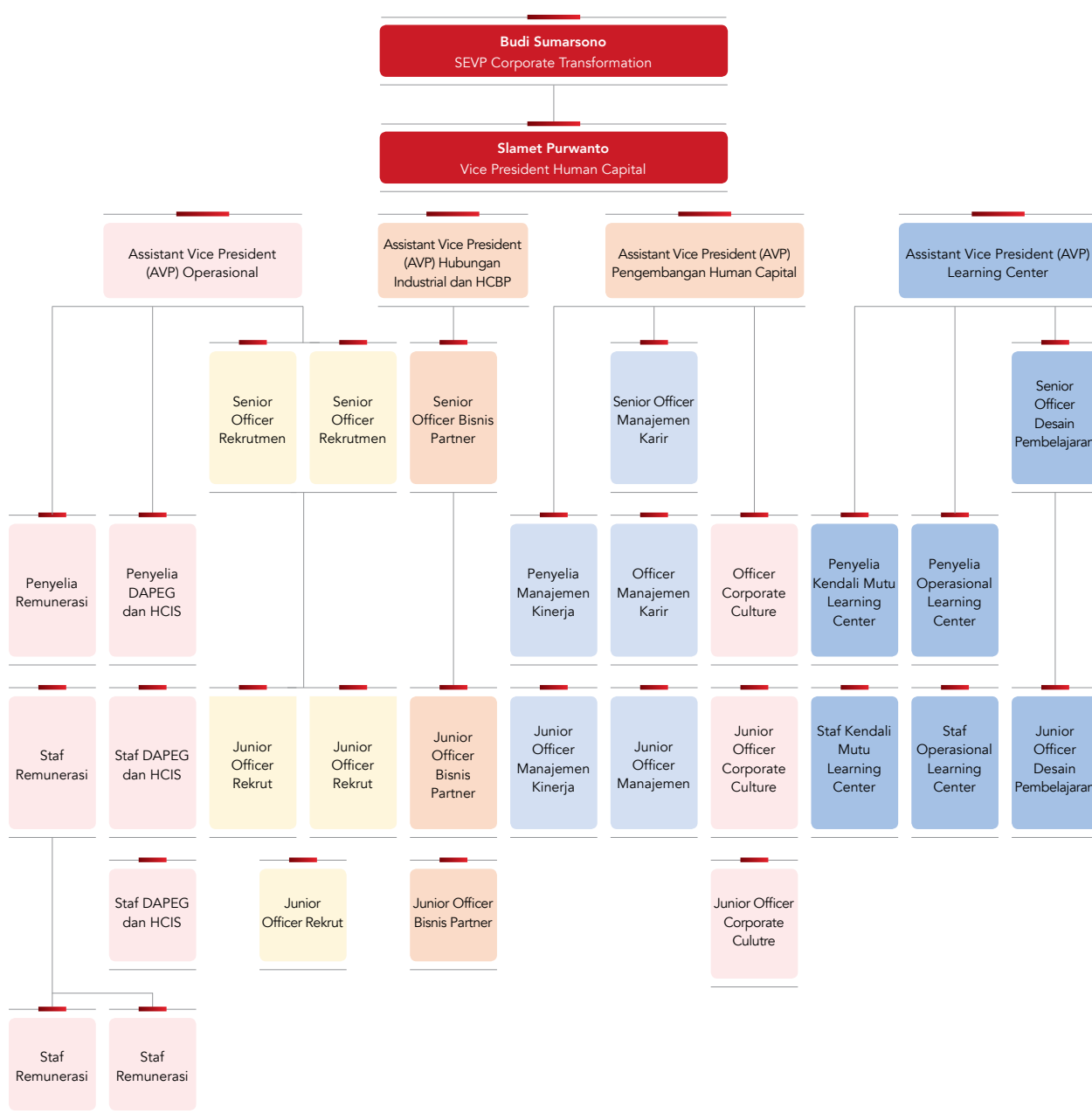
- a. Penguatan (*Up skilling*) kepada tim *Corporate Culture* antara lain memberikan pelatihan *content creator/digital marketing* yang bertujuan untuk menyampaikan program dan produk Bank Jatim serta layanan *financial digital* yang ada di Bank Jatim melalui media digital. Penguatan ini juga untuk membangun dan mempersiapkan *talent pool/ talent management (master of ceremony/MC)* yang akan membantu dalam kegiatan *corporate* Bank Jatim seperti Kegiatan Formal (RUPS, RUPSLB, Sertijab, Bintal, dan kegiatan resmi lainnya) dan Kegiatan Informal. Selain itu, akan mendukung dalam pembuatan konten atau media publikasi yang dimiliki oleh Bank Jatim seperti instagram, *podcast* (youtube), program *leaders talk* dan kegiatan *corporate* lainnya. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada Triwulan I-2.
- b. Program *benchmark* untuk mengetahui, menilai transformasi yang telah dilakukan dan membandingkan implementasi *culture* Bank Jatim dengan perusahaan lain (BPD di seluruh Indonesia, BUMN, Perusahaan Swasta) sehingga dapat melakukan evaluasi dan menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan program transformasi dan internalisasi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaan program ini akan dilaksanakan pada Triwulan 2.
- c. Melakukan *On site Monitoring* terhadap unit kerja dengan tujuan untuk memastikan implementasi program budaya perusahaan yang dilakukan oleh tim budaya dengan menggunakan instrumen penilaian yaitu kuesioner, wawancara dan observasi yang dilakukan secara random kepada pekerja.

Struktur Pengelola

Human Capital

Struktur SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama Bank Jatim guna meraih visi, misi dan kesuksesan usaha. Bank Jatim senantiasa memprioritaskan pengembangan SDM baik individu maupun tim dan pengembangan *Corporate Culture* untuk membangun budaya perusahaan sebagai strategi bisnis demi menjaga kinerja terbaiknya dalam bisnis jasa perbankan.

Human Capital di Bank Jatim berada di bawah SEVP Corporate Transformation yang dipimpin oleh Vice President Human Capital. Divisi ini terdiri dari Sub Divisi Operasional, Sub Divisi Hubungan Industrial dan Human Capital Business Partner, Sub Divisi Pengembangan Human Capital serta Sub Divisi Learning Center. Sub Divisi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.



Rencana Kerja

Human Capital 2024



Rencana Bisnis Divisi Human Capital untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SUB DIVISI OPERASIONAL HUMAN CAPITAL

1. Pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan selaras dengan rencana bisnis Bank, melalui rekrutmen Pegawai, baik regular, ODP maupun *Pro Hire*.
2. Pengembangan Program Pemagangan Jatimers Internship Program (JIP) yang sebelumnya hanya untuk bidang *frontliner* (teller dan *Service Asistant*) ditambahkan untuk bidang administrasi akan dilaksanakan pada Triwulan I.
3. Pembuatan *dashboard monitoring* pemenuhan tenaga JIP di Kantor Cabang sehingga *turn over* peserta JIP dapat termonitor dan menghindari kekosongan formasi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
4. Pembuatan struktur organisasi pada aplikasi EHC untuk memudahkan pemantauan posisi jabatan kosong atau kekurangan pegawai yang terintegrasi pada data pegawai pada Triwulan I.
5. Pembuatan aplikasi untuk menghitung kompensasi variabel pada Triwulan II.
6. Penyempurnaan kebijakan pemanfaatan Tenaga Alih Daya melalui sistem pemborongan yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
7. Melakukan *assessment* kompetensi perilaku dan kompetensi teknis secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada semua pejabat mulai eselon 1 sampai eselon 4, untuk mengukur kesesuaian kompetensi yang dimiliki setiap pejabat dengan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, mengusulkan untuk memberikan pelatihan apabila masih terdapat kekurangan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 4.
8. Meningkatkan kompetensi Assesor dengan mengikuti pelatihan Assesor pada lembaga pelatihan Assesor yang bersertifikat.
9. Penyesuaian *job grading* sesuai dengan hasil *job evaluation* agar kompensasi yang diterima adil bagi pegawai sesuai dengan beban dan tanggungjawab pegawai.
10. Pengembangan program *e-Human Capital* berbasis aplikasi *online* (*web* dan *mobile apps*) yang terintegrasi berfokus pada penyampaian informasi yang cepat, tepat, efektif dan terkontrol yang disesuaikan dengan perkembangan serta mempermudah Divisi Human Capital Bank Jatim dalam melakukan pemantauan terhadap pelayanan yang dilakukan kepada pegawai Bank Jatim.

11. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui perekrutan pegawai baru sesuai kebutuhan.
12. Optimalisasi *benefit* yang menjadi objek pajak natura melalui pihak ketiga agar biaya pajak natura lebih efisien yang akan dilaksanakan pada Triwulan I.
13. Menyempurnakan sistem remunerasi pegawai yang kompetitif dan berdasar kinerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan Bank direncanakan terlaksana pada Triwulan II.
14. Integrasi sistem *payroll* yang akan memudahkan dalam perhitungan kompensasi maupun *benefit* pegawai termasuk perhitungan pajak PPh21 pada Triwulan III.

SUB DIVISI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

1. Program Pengembangan Karir berdasar pada kinerja, kompetensi, pengalaman dan kriteria lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mendapatkan kesempatan yang sama (*fair opportunity*) untuk mengembangkan karirnya.
2. Penyusunan jalur karir untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensinya pada jabatan yang tersedia.
3. Penyusunan kebijakan pengelolaan *talent* untuk mempersiapkan *talent* berkualitas menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarahkan Bank mencapai kinerja yang lebih baik.
4. Implementasi *Performance Management System* pegawai yang lebih *fair* dan objektif untuk seluruh unit kerja.
5. Pelaksanaan *work life balance* sebagai sarana penyaluran minat bakat pegawai di luar rutinitas pegawaian.

SUB DIVISI HUBUNGAN INDUSTRI & HCBP

1. Penerapan *Reward* dan *Punishment* yang tegas bagi seluruh pegawai sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.
2. Pelaksanaan *employee engagement survey* sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat keterikatan emosional pegawai dengan perusahaan yang pengisiannya melalui *mobile apps* e-Human Capital.
3. Pelaksanaan program yang dapat meningkatkan komunikasi Divisi Human Capital dengan seluruh pegawai dan menyalurkan suara pegawai terkait kepegawaian, sehingga diperoleh masukan dan keluhan dari pegawai untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan kebijakan kepegawaian.
4. Memberikan fasilitas kepada pegawai terkait konsultasi dengan psikolog dan/atau psikiater apabila diperlukan, hal ini untuk dapat mengantisipasi dan memelihara kesehatan mental pegawai.

SUB DIVISI LEARNING CENTER

1. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka.
2. Mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai.
3. Peningkatan kompetensi, optimalisasi dan evaluasi peran *lecturer internal* dalam mendorong pencapaian visi-misi Bank melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan.
4. Pengembangan metode *Assessment Center* dan perangkat asesmen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan asesmen pada Triwulan III.

TEKNOLOGI Informasi





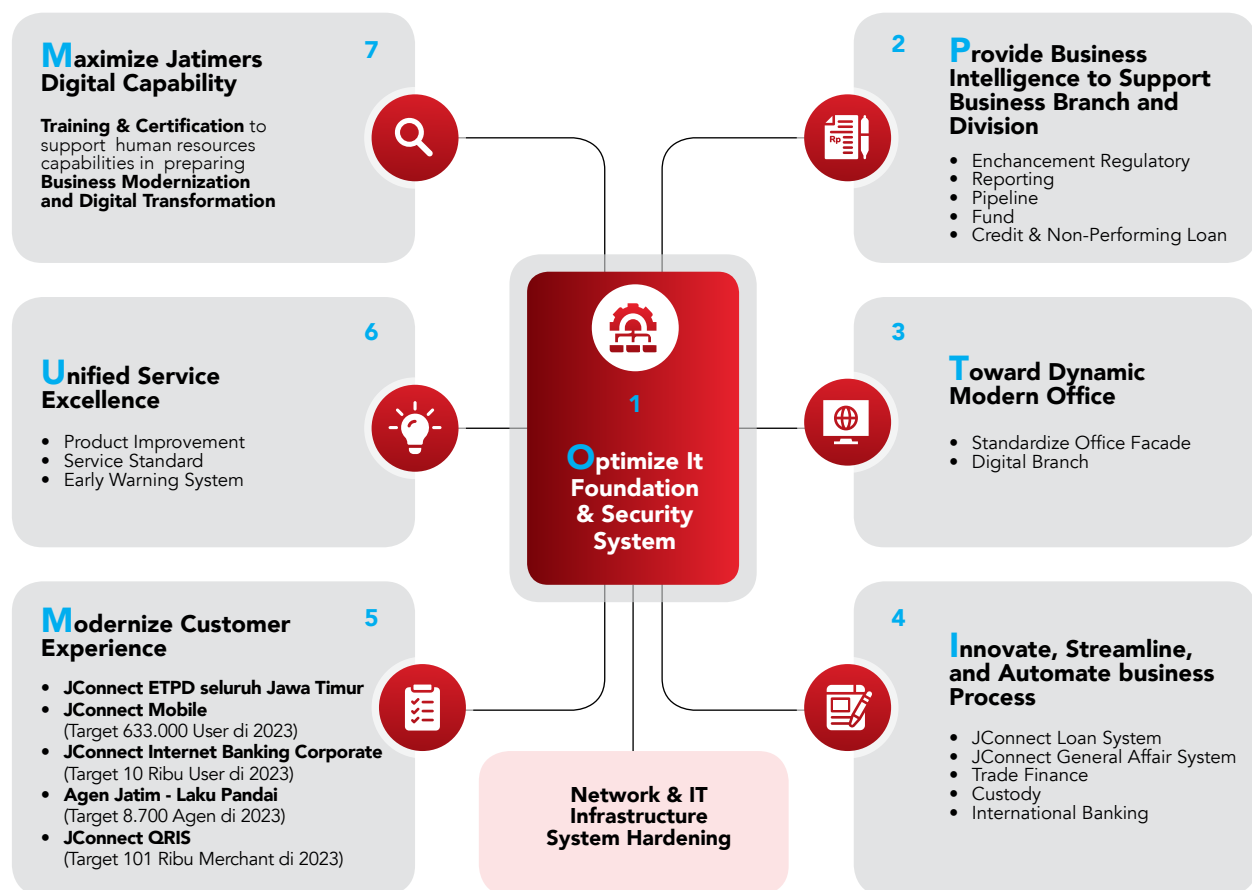


Strategi Teknologi Informasi

Rencana bisnis *Information Technology* (IT) Bank Jatim sejalan dengan penerapan dan pengembangan pengamanan teknologi informasi yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Oleh karena itu, setiap bank umum wajib untuk melaporkan

Rencana Bisnis kepada regulator. Rencana bisnis tersebut juga disesuaikan dengan rencana strategis *Corporate Plan* Bank Jatim pada bagian PILAR 4 (*Digital Banking* dan TI). Strategi *Corporate Plan* teknologi Informasi (TI) menerapkan strategi OPTIMUM 2023-2024. Berikut adalah gambaran dari strategi OPTIMUM.

OPTIMUM STRATEGY 2023-2024



Untuk mendukung strategi OPTIMUM 2023 Bank melakukan penguatan organisasi, kebijakan TI, *Core Banking*, Manajemen Infrastruktur, pengembangan aplikasi bisnis dan penguatan *security* IT.



Inovasi

Teknologi Informasi

Inovasi dalam bidang Teknologi Informasi (TI) merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode, atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja sistem informasi. Inovasi TI dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangan perangkat lunak baru, integrasi teknologi terkini, hingga penerapan konsep baru dalam manajemen data dan keamanan informasi. Tahun 2023 Teknologi Informasi melakukan beberapa inovasi seperti *Business Intelligence* menggunakan Tableau, *Enterprise Resource Planning* (ERP) menggunakan Odoo, dan membangun infrastruktur *Datawarehouse*.

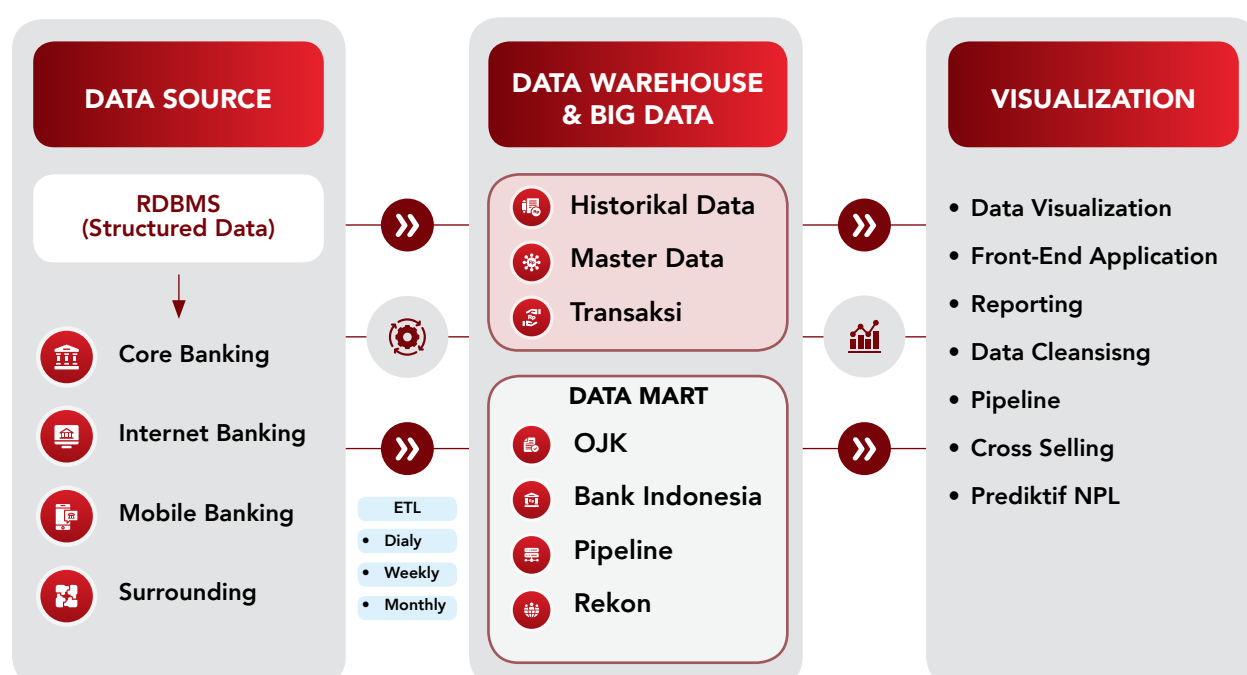
Business Intelligence adalah suatu konsep yang mencakup teknologi, proses, dan alat untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis. Tujuan utama dari *Business Intelligence* adalah memberikan wawasan yang mendalam kepada pengambil keputusan dalam suatu organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi telah mengembangkan *dashboard report* solusi bisnis internal/

operasional Bank sebanyak 229 *Dashboard* yang mencakup 31 Divisi.

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola proses bisnis mereka secara menyeluruh. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam suatu perusahaan ke dalam satu sistem yang koheren dan seragam, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi Informasi telah mengembangkan beberapa modul yang dibutuhkan bisnis internal/operasional Bank sebanyak 6 (enam) modul, yaitu:

1. *Contact*
2. *Customer Relationship Management* (CRM)
3. *Inventory*
4. *Asset Management*
5. Anggaran
6. *Vendor Management System*
7. *Purchase*

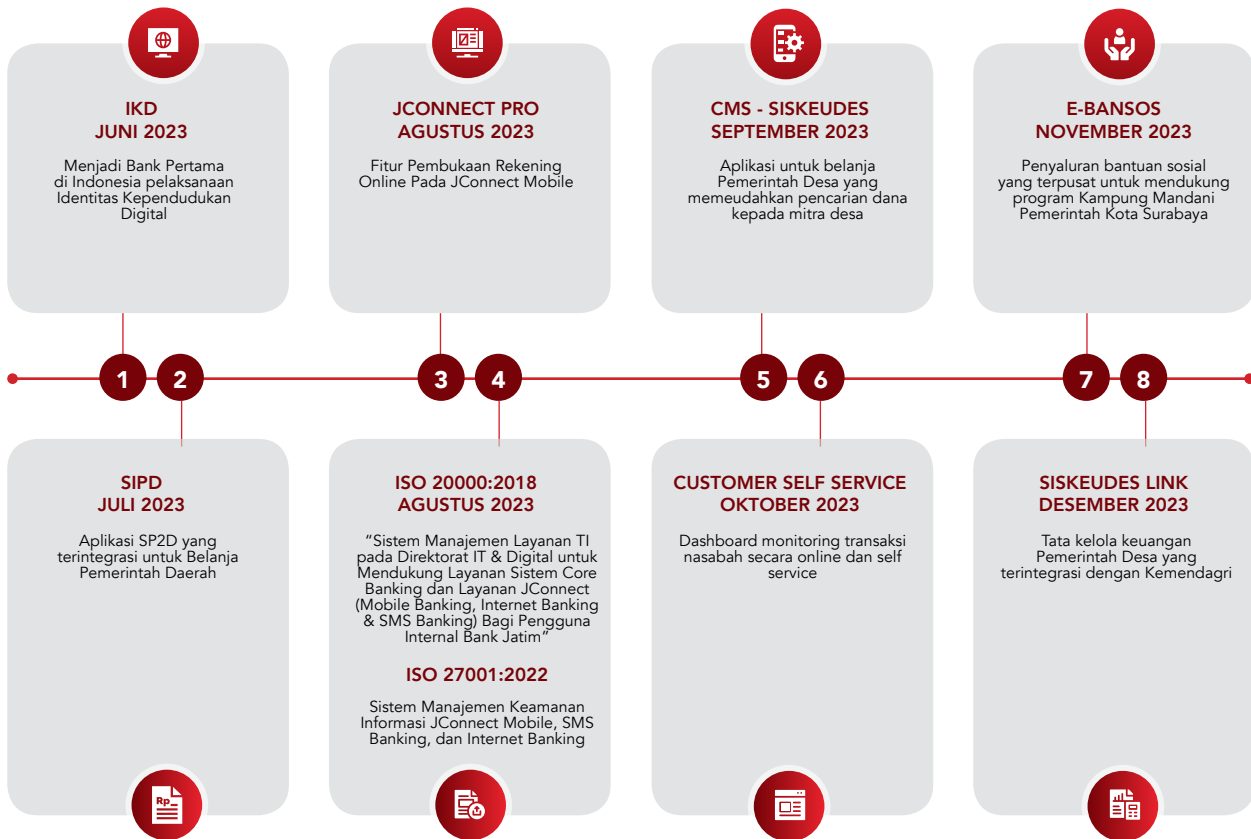
Data Warehouse adalah suatu sistem penyimpanan dan manajemen data yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Ini adalah tempat penyimpanan pusat yang memungkinkan Bank untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk analisis dan pelaporan. *Data Warehouse* menyimpan data historis dan saat ini dalam format yang dapat diakses dan dianalisis dengan mudah oleh pengguna.





Selain inovasi *Business Intelligence* menggunakan Tableau, *Enterprise Resource Planning* (ERP) menggunakan Odoo, dan membangun infrastruktur *Datawarehouse*, Bank Jatim terus berinovasi dan berinvestasi pada teknologi agar tetap dapat

bersaing dalam perkembangan teknologi *digital banking*. Saat ini beberapa produk, layanan, dan sertifikasi yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat, yaitu:



Infrastruktur Teknologi Informasi

Saat ini, Bank Jatim telah memiliki sistem dan perangkat perlindungan tambahan sebagai langkah proteksi keamanan Informasi di Bank Jatim sebagai berikut.

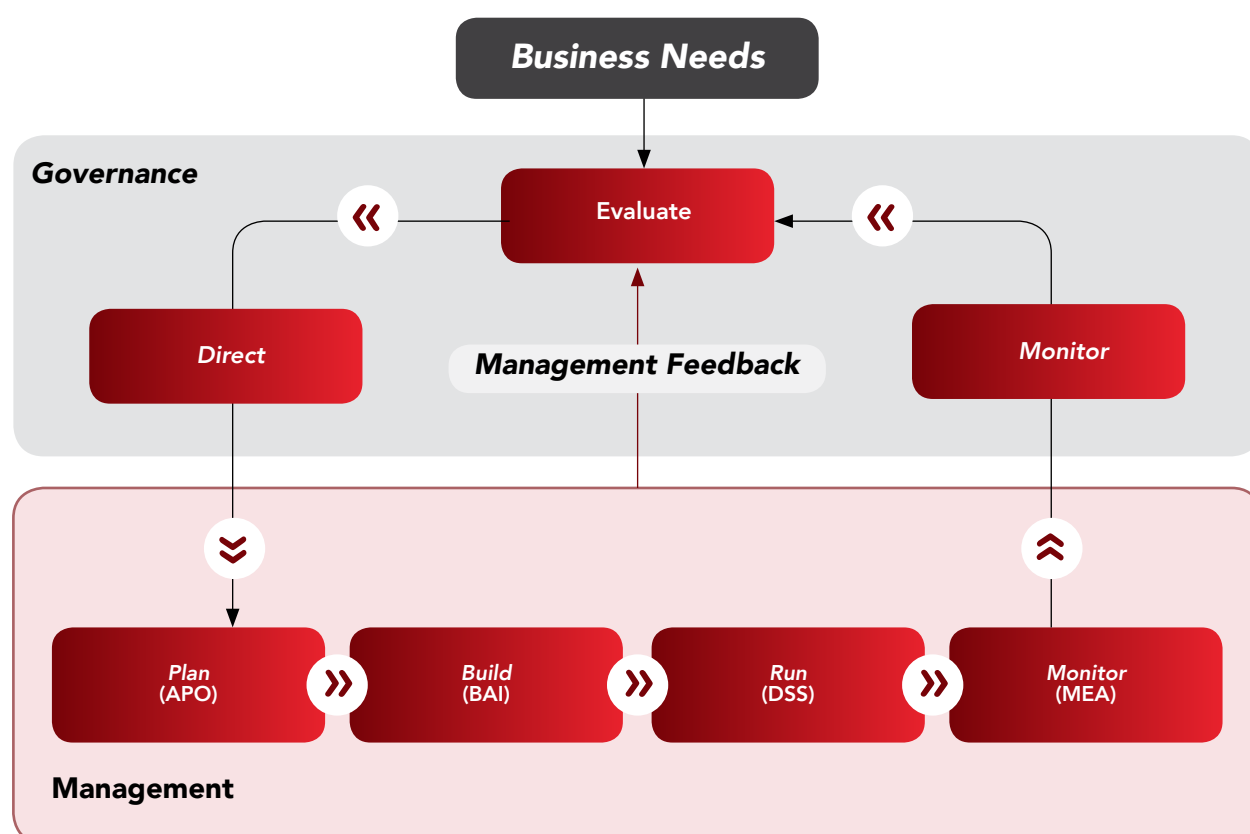
- Endpoint Management
- Endpoint Security
- Mobile Application Security
- Mail Security Gateway
- Load Balancer with WAF (Web Application Firewall)
- Application Security Testing
- Vulnerability Application Scanner



Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan *delivery* dan *value* kepada *stakeholder* Bank. Dengan demikian Tata

Kelola TI sangatlah penting dalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan dalam menyelaraskan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI yang baik membutuhkan keseimbangan antara aspek *People*, *Process* dan *Technology*.



Governance Process of IT merupakan model Tata Kelola TI Bank Jatim yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi pada kondisi saat ini dan masa depan.
2. Melakukan arahan langsung terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana terkait penggunaan Teknologi Informasi serta memastikan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dapat memenuhi tujuan bisnis Bank Jatim.
3. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perencanaan Teknologi Informasi dengan kebijakan dan kinerja Teknologi Informasi.

Terdapat 5 (lima) area yang menjadi fokus area tata Kelola TI, yaitu:

1. *Strategic Alignment*, yaitu Penerapan TI harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan dimana strategi TI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan.
2. *Value Delivery*, yaitu Penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan.
3. *Risk Management*, yaitu Penerapan TI harus disertai dengan identifikasi risiko-risiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani.
4. *Resource Management*, yaitu Penerapan TI harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal.
5. *Performance Management*, yaitu Penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis.



Penentuan karakteristik tata Kelola TI terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

A. Compliances

Bank mengadopsi *regulatory compliance* dan *best practice* dari regulator dan lingkungan bisnis sebagai berikut:

1. SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum. Pada peraturan tersebut membahas pengertian dari ketahanan siber, keamanan siber, laporan insiden siber, dan notifikasi awal insiden siber.
2. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Pada peraturan tersebut POJK mendukung transformasi digital dan resiliensi siber industri perbankan. Pada peraturan tersebut pihak perbankan akan transformasi digital perlu ditingkatkan ketahanan dan keamanan siber.
3. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Pada Peraturan tersebut pihak perbankan diantaranya wajib memiliki Pemulihan Rencana Bencana (BCP) dan penempatan Data Center serta *Disaster Recovery Center* (DRC) di wilayah Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Pada peraturan tersebut Bank diatur untuk Standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran (SP) merupakan salah satu upaya untuk mendukung industri SP yang sehat, kompetitif, dan inovatif.
5. POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Pada peraturan tersebut pihak perbankan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga baik Bank maupun non-Bank dalam hal pelayanan digital kepada nasabah.
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast payment* (BI-FAST). Pada peraturan tersebut Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan BI-FAST diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mendukung terciptanya ekosistem *digital* yang *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected*.
7. POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pada peraturan tersebut mengatur tentang produk Bank termasuk produk Bank baru dikelompokkan menjadi produk Bank Dasar dan produk Bank Lanjutan.
8. *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) sebagai salah satu *framework* IT *Governance* yang memiliki IT *Strategic Plan* yang selaras (*align*) dengan strategi bisnis.
9. *Information Technology Information Library* (ITIL) merupakan kerangka kerja standar untuk IT dalam menyelaraskan layanan pendukung TI kepada bisnis. ITIL berfokus pada proses, prosedur, *task* dan *service level* IT untuk mendukung strategi perusahaan, memberikan nilai tambah, serta menjaga tingkat kompetensi TI.
10. ISO 20000:2018 *the service management system at IT & Digital directoraterovision of core banking system and Jconnect (Mobile Banking, Internet Banking dan SMS Banking) Services to internal Customer Bank Jatim*.
11. ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada layanan Jconnect Mobile, SMS Banking, dan Internet Banking.

B. Tuntutan Customer

Perubahan di *marketplace* dan *society* menuntut perbankan untuk berubah ke arah *digital banking*, atau layanan-layanan yang dijalankan dengan dukungan Teknologi Informasi. Sebagian layanan perbankan sekarang berubah menjadi layanan *selfservice* berbasis TI. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin tingginya tuntutan dukungan Teknologi Informasi dalam menjalankan bisnis perubahan masa depan.

C. Perkembangan Teknologi

Dinamika perkembangan Teknologi yang semakin tinggi dengan adanya revolusi industri 4.0 terutama pada jasa keuangan mengharuskan Bank Jatim senantiasa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan sedang berlangsung. Hal ini dilakukan demi memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam berinteraksi dalam layanan perbankan.

D. Keamanan Teknologi Digital Perbankan

Transaksi secara digital yang semakin tinggi perlu diikuti dengan keamanan transaksi perbankan yang handal seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber perlu dipertimbangkan pada saat menerapkan dan merespon perkembangan teknologi. Bank menjaga ketahanan siber didukung dengan sistem informasi ketahanan siber yang memadai melalui proses yang meliputi:

1. Bank telah melakukan pengendalian sistem keamanan TI menggunakan *framework NIST Cybersecurity Framework* yang meliputi : identifikasi, deteksi, proteksi, respon dan *recovery*.
2. Bank melakukan *awareness* keamanan kepada pengguna setiap tahun.
3. Bank telah melakukan optimalisasi atas keamanan endpoint bank jatim, antara lain melalui otomasi keamanan informasi.
4. Bank secara berkala melakukan *penetration testing* untuk menguji kehandalan aplikasi dalam menunjang kebutuhan Bisnis dan layanan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Bank Jatim telah tersertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada layanan Jconnect Mobile, SMS Banking, dan Internet Banking.

E. **Disaster (Disruption) Recovery Plan**

Bank telah memiliki Pedoman *Business Continuity Information Technology* dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* sebagai dasar atas ketersediaan *data center*, *disaster recovery* dan *dual data center* untuk mengukur/mengidentifikasi proses bisnis kritis terkait dengan pemanfaatan sistem aplikasi, *Response Point Objectives* (RPO), *Response Time Objectives* (RTO) dan *Work Recovery Time* (WRT) secara tegas.

Bank memiliki juga kebijakan terkait Rencana Pemulihan Bencana yang mendukung efektivitas pelaksanaan Rencana Pemulihan Bencana pada saat diperlukan. Timbulnya risiko bencana dapat mengakibatkan terganggunya operasional bisnis, berdampak pada peningkatan biaya, munculnya permasalahan penyediaan layanan ke pengguna, turunnya produktivitas lingkungan kerja, hingga memburuknya citra Bank. Bisnis Bank sangat tergantung pada informasi dan aplikasi yang memprosesnya, sehingga akan menjadi sangat mengkhawatirkan jika terjadi gangguan yang dapat melumpuhkan bisnis Bank.

Pada prinsipnya yang sangat perlu mendapat perhatian adalah terjadinya faktor gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem operasional TI. Pengenalan perangkat dan infrastruktur TI, serta berbagai kemungkinan gangguan dan akibatnya sangat penting karena berisiko terhadap disaster dalam berbagai intensitas dan dengan tingkat gangguan yang berbeda-beda terhadap operasional. Oleh karena itu, Bank harus mempunyai rencana strategi dalam menjamin kelangsungan bisnis pada saat terjadi suatu gangguan yang tidak direncanakan. Rencana atau strategi ini dirumuskan dalam Rencana Pemulihan Bencana.

Rencana pemulihan bencana berfungsi untuk:

- a. Meminimalisasi gangguan pelayanan kepada nasabah.
- b. Menjaga kelangsungan operasional teknologi informasi pada saat terjadi disaster/bencana/gangguan.
- c. Memberikan kepastian bahwa manajemen Bank memenuhi tanggung jawab untuk melindungi sumber informasi dan dokumen informasi para nasabah dan pihak lainnya.
- d. Bank melakukan secara teratur pengukuran kinerja sumber daya IT, aplikasi, jaringan, dan *capacity planning*.

Dalam menjalankan operasional teknologi informasi Bank menjalin kerja sama dengan Penyedia Jasa Data Center untuk menjaga *availability* dan keamanan *server* agar sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang diharapkan.

Pada tahun 2023, Bank Jatim melalui SK No. 062/2076/HCP/HHCD/NOTA telah mengesahkan dan menjalankan Struktur Organisasi Unit Security TI yang berdiri secara Independen terpisah dari Pengelolaan Teknologi Informasi. Unit Security melakukan beberapa hal terkait ranah fungsi organisasi sebagai berikut.

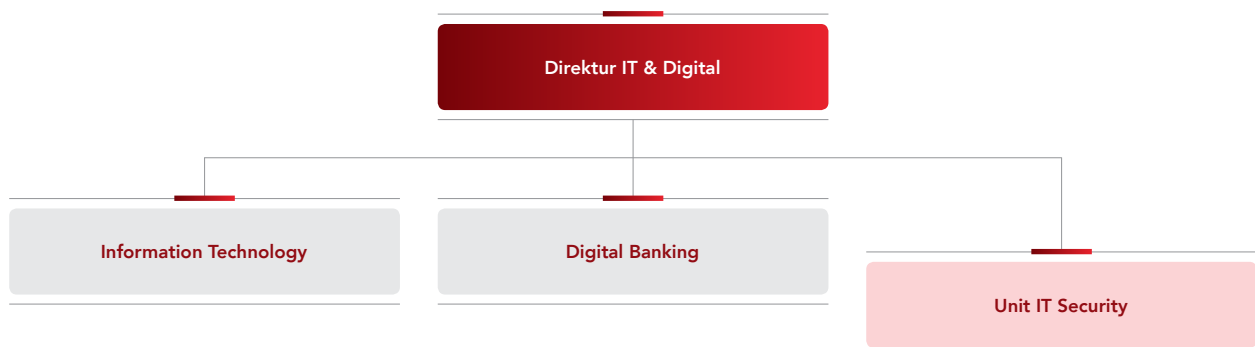
1. *Self Assessment Security TI*
2. Uji Keamanan
3. Uji Ketahanan Siber
4. *IT Security Awareness*
5. *Monitoring Keamanan IT*
6. Standar Keamanan Informasi

Struktur Pengelola Teknologi Informasi



Direktorat IT & Digital Bank Jatim memiliki Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi, Divisi Digital Banking dan Unit Security TI yang berada di bawah tanggung jawab Direktur IT

& Digital. Struktur Organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi, mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

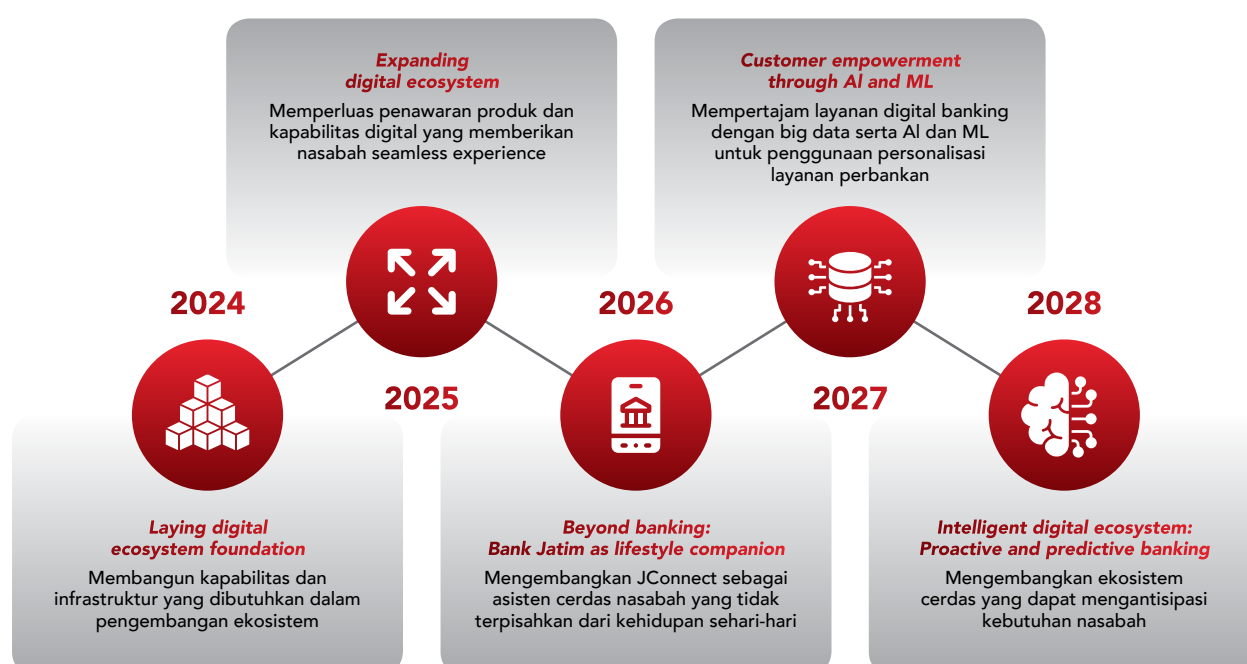


Rencana Kerja Teknologi Informasi 2024

Transformasi adalah suatu proses yang memerlukan sejumlah besar sumber daya dan persiapan yang matang. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, konsistensi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan sehingga tercipta sinergi yang efektif dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini akan

mendukung pencapaian strategi OPTIMUM 2023-2024 yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi sistem *Core Banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif, serta peningkatan keamanan sistem TI.

RINGKASAN EKSEKUTIF REALISASI TRANSFORMASI DIGITAL



Dengan mengacu pada fokus rencana bisnis Divisi Teknologi Informasi, maka pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2024 dapat diuraikan berdasarkan 5 (lima) strategi utama sebagai berikut:

1. OPTIMIZE IT FOUNDATION AND SECURITY SYSTEM

No.	Nama Project	Deskripsi
1.	Virtual Account Bersaldo	Pengembangan <i>Virtual Account</i> untuk kepentingan Rekening Satuan Kerja Pemerintah Pusat dari Kementerian Keuangan, bisa transaksi transfer antar <i>virtual account</i> .
2.	Infrastruktur Digital Banking Microservices	Infrastruktur (OS, Database, Platform Microservices) yang digunakan untuk implementasi aplikasi <i>Digital Banking</i> .
3.	Peremajaan Router dan Switch DC-DRC	Peremajaan perangkat <i>router</i> dan <i>switch</i> untuk DC-DRC.
4.	Penambahan Node HCI Nutanix	Penambahan pada perangkat Node HCI dan Infrastrukturnya DC/DRC di Kantor Pusat).



No.	Nama Project	Deskripsi
5.	Fraud Detection System (FDS) Advanced	Pengembangan FDS tahap <i>Advanced</i> dengan menggunakan <i>machine learning</i> untuk pendeteksi pendeteksi <i>fraud</i> dimana sistem berguna untuk mendeteksi transaksi tidak wajar yang berpotensi ke aksi kejahatan termasuk penipuan.
6.	Infrastruktur Virtual Tape Library (VTL)	Media Eksternal untuk <i>Backup Data Non Core Banking System</i> (CBS) dan <i>Core Banking System</i> (CBS) secara terpusat.
7.	Pengadaan Infrastruktur Untuk Datawarehouse	Pengadaan penambahan <i>storage</i> yang digunakan untuk mendukung pengadaan <i>Data Warehouse (Business Intelligence)</i> .
8.	Upgrade Router, Switch dan Next Generation Firewall Cabang Konvensional dan Syariah	Peningkatan kapasitas <i>hardware</i> dan <i>software firewall</i> cabang untuk mengamankan <i>traffic</i> dan deteksi dini terkait keamanan jaringan.

2. PROVIDE BUSINESS INTELEGEENCE TO SUPPORT BUSINESS BRANCH AND DIVISION

No.	Nama Project	Deskripsi
1.	Data Analytics	Memudahkan Divisi Teknologi Informasi untuk menyajikan pelaporan dengan melakukan transformasi pelaporan data menjadi pelaporan data visualisasi.
2.	Jconnect Branch (CBS New Experience)	Sentralisasi menu operasional <i>funding</i> dan <i>lending</i> .

3. INNOVATE STREAMLINE AND AUTOMATE BUSINESS PROCESS

No.	Nama Project	Deskripsi
1.	Jconnect Loan System Enterprise	Layanan untuk mendukung pemrosesan dan monitoring aplikasi kredit
2.	Jconnect ERP - Automatic Office	Pengadaan <i>Business Intelligence</i> (BI) & <i>Enterprise Resource Planning</i> (ERP) dalam rangka pengembangan solusi BI dan ERP sesuai kebutuhan Bank Jatim & mengintegrasikan solusi yang dikembangkan dengan sistem dan/atau infrastruktur bank saat ini.
3.	Streamlining Business Process (Supporting)	Memberikan reviu pada proses bisnis yang ada Pada Bank Jatim serta memberikan alur proses bisnis dan rekomendasi di seluruh Divisi yang menguntungkan Perusahaan.
4.	Supporting Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan Mobile	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
5.	E-Credit Card (QRIS Payment)	Alat pembayaran secara <i>online</i> atau non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh Bank Jatim, tata kelola kartu kredit ada pada divisi konsumen.
6.	Trade Finance (Supporting)	Fasilitas yang diberikan oleh Bank Jatim untuk membiayai kegiatan perdagangan debitur yang berkaitan dengan transaksi perdagangan Luar Negeri (ekspor-impor) maupun Dalam Negeri (jual beli).
7.	Banking Custody (Supporting)	Pengelolaan dana investasi reksadana yang tugasnya menyimpan portofolio Efek dan berbagai sertifikat berharga lainnya.
8.	Improve core banking system	<i>Assessment Core Banking System</i> oleh konsultan independen.

4. MODERNIZE CUSTOMER EXPERIENCE

No.	Nama Project	Deskripsi
1.	BI-Fast tahap 2	Pengembangan tahap kedua BI-FAST untuk fitur <i>bulk credit</i> , <i>direct debit</i> , <i>e-mandate</i> , dan <i>request for payment</i> .
2.	EDC for Banking	Pengembangan EDC Bank Jatim untuk dapat menerima transaksi kartu debit dari Bank Lain ataupun pengembangan fitur lainnya.

5. UNIFIED SERVICE EXCELLENCE

No.	Nama Project	Deskripsi
1.	Konsultan <i>Project Management</i> dan QA	<i>Me-monitoring</i> , mengawal dan mengawasi serta memberikan rekomendasi atas project Business Intelligent dan JConnect GAS – ERP.
2.	<i>Governance Assesment</i> dengan COBIT 2019	Proses evaluasi dan pengukuran kualitas serta efektivitas tata kelola teknologi informasi (TI) suatu organisasi menggunakan <i>Freamework</i> COBIT 2019.

TATA KELOLA Perusahaan





Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



Bank Jatim memperoleh penghargaan TOP GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) Awards 2023 #stars 5. Bank Jatim dinilai memiliki sistem, infrastruktur, dan implementasi terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan Bank berada di level yang sangat luar biasa. Sehingga hal tersebut sangat mendukung keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan



Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
- Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

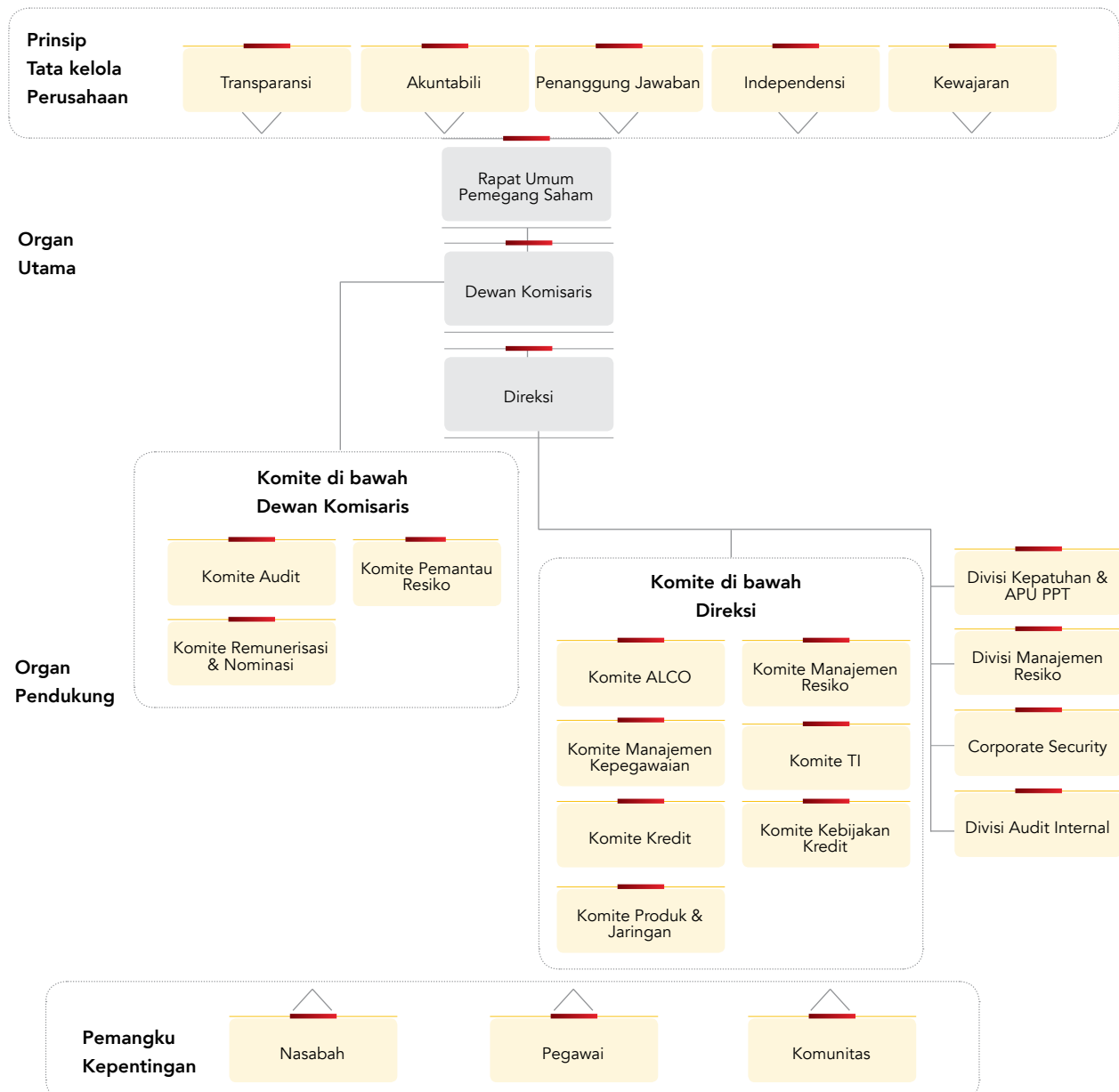
- sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
 23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 27. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.
- Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.
1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
 2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
 3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
 4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
 5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.





Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999	1 Mei 1999
		Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 22 tanggal 13 Juli 2017	13 Juli 2017
		Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 92 tanggal 24 Juli 2018	24 Juli 2018
		Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 55 tanggal 22 April 2020	22 April 2020
		Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020	20 Mei 2020
		Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 15 tanggal 9 Mei 2023	9 Mei 2023
2.	Pedoman Kerja Dewan Komisaris	060/01/DK/KEP	15 Januari 2021
3.	Pedoman Kerja Direksi	056/006/DIR/CSE/KEP	17 Januari 2017
4.	Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris	060/02/DK/KEP	15 Januari 2021
5.	Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan	059/222/DIR/KPT/KEP	18 Agustus 2020
6.	Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan	059/220/DIR/KPT/KEP	14 Agustus 2020
7.	Pedoman Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah	059/299/DIR/SQA/KEP	3 November 2020
8.	Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	059/211/DIR/PRS/KEP	13 Agustus 2020
9.	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud	060/22/DIR/AUI/KEP	28 Januari 2021
10.	Pedoman Pelaksanaan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	058/315/DIR/KPT/KEP	6 November 2019
11.	Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	059/188.3/DIR/CSE/KEP	21 Juli 2020
12.	Komite Direksi	062/056/DIR/CSE/KEP	12 Juli 2023
13.	Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
14.	Kebijakan Produk Aktivitas Manajemen Risiko	060/02/01/DIR/MJR/KEP	4 Mei 2023
15.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	062/02/02/DIR/MJR/KEP	5 Desember 2023
16.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	060/02/02/DIR/TEI/KEP	12 Agustus 2021
17.	Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	062/03/15/DIR/MJR/KEP	5 April 2023
18.	Perubahan Standard Operating Procedure (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
19.	SOP Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
20.	Standard Operating Procedure (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
21.	Standard Operating Procedure Penetapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya	061/03/06/DKM/KEP	25 Agustus 2023
22.	Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
23.	Standard Operating Procedure (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
24.	Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management	062/03/40/DIR/CSE/KEP	21 Juni 2023
25.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank	062/04/29/KPT/SE	17 April 2023
26.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Manajemen Investor	062/04/66/CSE/SE	26 September 2023

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 15 Tanggal 09 Mei 2023, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

- Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 - Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.

- Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS dan mengusulkan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan persyaratan persentase kepemilikan. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

- Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.



3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Bank secara singkat.
 - b. Mata acara rapat.
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode voting.
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan

bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Bank sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dilakukan secara elektronik (poll). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Bank. Risalah RUPS telah menyampaikan bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/056/DIR/CSE/Srt tanggal 24 Februari 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 062/091/DIR/CSE/Srt tanggal 03 Maret 2023. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 062/107/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Maret 2023. Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/149/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2023 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/190/DIR/CSE/Srt tanggal 9 Mei 2023

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.



Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Suprajarto	Komisaris Utama	Hadir
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
4.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Hadir
8.	Tonny Prasetyo	Pgs. Direktur Kepatuhan	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
10.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Mata Acara Rapat Pertama	Status
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 3 (tiga) orang. Hasil Pemungutan Suara Setuju: 12.638.735.377 saham (99,940%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 776.679.146 saham Tidak Setuju: 30.100 saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 7.449.176 saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan: - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2022. - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 13 Februari 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. - Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.	Telah Terealisasi
Mata Acara Rapat Kedua	Status
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang Hasil Pemungutan Suara Setuju: 12.463.237.845 saham (98,553%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 601.181.614 saham Tidak Setuju: 182.845.508 saham (1,445%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B	Telah Terealisasi



Mata Acara Rapat Kedua	Status
Keputusan - Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut: - Sebesar Rp797.793.173,38 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 51,67% (lima puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2022, dengan demikian sejumlah Rp53,09 (lima puluh tiga koma nol Sembilan) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2023 dan akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. - Sebesar Rp745.651.466,62 (tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen) atau 48,33% (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum. - Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 dicadangkan sebesar Rp385.706.139.127,45 (tiga ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut: - Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen). - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.	Telah Terealisasi
Mata Acara Rapat Ketiga	Status
Memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.486.364.745 saham (98,735%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 624.308.514saham Tidak Setuju: 159.719.108 saham (1,262%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 130.800 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.	Telah Terealisasi
Mata Acara Rapat Keempat	Status
Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang. Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.002.342.731 saham (94,908%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.286.500 saham Tidak Setuju: 643.740.622 saham (5,090%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan Menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah maksimal sebesar 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Nusa Tenggara Barat. Penyertaan modal Bank Jatim dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana di maksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum yang saat ini dalam tahap due diligence, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan ini dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima	Status
Perubahan Anggaran Dasar Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.002.543.631 saham (94,910%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.487.400 saham Tidak Setuju: 643.540.122 saham (5,088%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 130.900 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut: a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap: - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Pada pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. b. Penambahan ketentuan terkait "kuorum Keputusan RUPS dalam hal terjadi perubahan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) baik pengangkatan, pemberhentian maupun persetujuan pengunduran diri pada Pasal 14 Ayat (4). c. Perubahan lainnya pada pasal Anggaran Dasar PT Bank Jatim adalah penyesuaian yang bersifat redaksional antara lain: - Penambahan ketentuan istilah "Tata Kelola yang Baik" pada "Good Corporate Governance" Pasal 16 ayat (4). - Penyesuaian terhadap ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi pasal 16 ayat 10.D.1. Frasa "Penghapusan Kredit" menjadi "Penghapusan Bukuan Kredit". - Perubahan Pencantuman "Peraturan Bapepam LK Nomor .X.K.2" menjadi Di Bidang Pasar Modal" Pasal 22 Ayat (6) Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan. - Penyesuaian Penyebutan "Menteri" menjadi "Menteri Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia" Pasal 4 (Modal) ayat (7) dan Pasal 14 (Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib) ayat (3). - Perubahan Pencantuman Istilah "Bank Indonesia" menjadi "Otoritas Jasa Keuangan". - Penyesuaian Pencantuman Istilah "Perusahaan Terbuka" Seharusnya "Perseroan". - Penyesuaian Pencantuman Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" seharusnya "RUPS". - Konsistensi Penggunaan Huruf "P" (Huruf Kapital) pada "Pasal" dan "a" (huruf kecil) pada "ayat". - Penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar Melakukan penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2 dan 3. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang termasuk pihak regulator untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.	Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam	Status
Perubahan susunan Pengurus Perseroan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang. Hasil Pemungutan Suara Setuju : 11.896.417.553 saham (94,070%) terdiri dari Seri A: 11.829.395.753 saham dan Seri B: 67.021.800 saham Tidak Setuju: 748.860.300 saham (5,921%) terdiri dari Seri A: 32.660.478 saham dan Seri B: 716.199.822 saham Abstain: 936.800 saham (0,007%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabarannya, yaitu: Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud Komisaris : Heru Tjahjono Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin Dewan Pengawas Syariah : Saad Ibrahim Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. 2. Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut: a. Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud Komisaris : Adhy Karyono* Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Direktur Kepatuhan : Tonny Prasetyo* Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (satu) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terealisasi



Mata Acara Rapat Keenam	Status
c. Direktur Operasi : Arif Suhirman* Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. d. Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono* Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) *berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Suprajarto Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud Komisaris Independen : Sumaryono Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda Komisaris Independen : Adhy Karyono Direksi Direktur Utama : Busrul Iman Direktur Mikro, Ritel dan Menengah : R. Arief Wicaksono Direktur Kepatuhan : Tonny Prasetyo Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : Edi Masrianto Direktur Operasi : Arif Suhirman Direktur IT & Digital : Zulhelfi Abidin Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyo Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah : KH. Affifudin Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono 4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 061/040/DIR/CSE/SRT	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 08 Februari 2022. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 23 Februari 2022. Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/072/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Maret 2022 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/083/DIR/CSE/Srt tanggal 05 April 2022

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.



Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
4.	Busrul Iman	Direktur Utama, Pgs. Direktur Komersial & Korporasi	Hadir
5.	Erdianto Sigit Cahyono	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Hadir
6.	Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	Hadir
7.	Rizyana Mirda	Direktur Risiko Bisnis	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Mata Acara Rapat Pertama	Status
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Hasil Pemungutan Suara Setuju : 13.076.836.318 saham (99,941%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 saham dan Seri B: 1.142.688.336 saham Tidak Setuju: 7.200 saham (0,0000550%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 7.704.976 saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan: - Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2021; - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. - Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.	Telah Terealisasi
Mata Acara Rapat Kedua	Status
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.887.092.412 saham (98,490%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 saham dan Seri B: 952.944.430 saham Tidak Setuju: 197.062.282 saham (1,506%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 393.800 saham (0,003%) yang seluruhnya merupakan saham seri B	Telah Terealisasi



Mata Acara Rapat Kedua	Status
Keputusan - Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai berikut: - Sebesar Rp. 782.457.605.053,02 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima puluh tiga koma nol dua sen) atau 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2021 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2021, dengan demikian sejumlah Rp 52,11 (lima puluh dua koma sebelas rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2021 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Maret 2022 dan akan dibayarkan pada tanggal 14 April 2022. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. - Sebesar Rp. 740.612.233.364,98 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) atau 48,63% (empat puluh delapan koma enam puluh tiga persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum. - Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021 dicadangkan sebesar Rp 380.767.459.605,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut: - Bonus pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima persen); - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditanggihkan berbentuk tunai dan saham melalui program Long Term Incentive. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.	
Mata Acara Rapat Ketiga	Status
Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.740.945.786 saham (97,373%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 saham dan Seri B: 806.797.804 saham Tidak Setuju: 343.215.408 saham (2,623%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 387.300 saham (0,002%) yang seluruhnya merupakan saham seri B Keputusan Menyetujui Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.	Telah Terealisasi
Mata Acara Rapat Keempat	Status
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang. Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.610.256.158 saham (96,375%) terdiri dari Seri A: 11.893.555.054 saham dan Seri B: 716.701.104 saham Tidak Setuju: 401.695.608 saham (3,069%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 72.596.728 saham (0,554%) terdiri dari 40.592.928 Saham Seri A dan 32.003.800 Saham Seri B	Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat	Status
Keputusan - Menyetujui dan mengangkat anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu: Komisaris Utama : SUPRAJARTO; Komisaris Independen : SUMARYONO; - Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, yaitu: Direktur Komersial dan Korporasi : EDI MASRIANTO; Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah : R. ARIEF WICAKSONO - Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai direksi, yaitu: Direktur Risiko Bisnis : RIZYANA MIRZA ; Direktur Keuangan : FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi : Dewan Komisaris Komisaris Utama : SUPRAJARTO; Komisaris Independen : MHAMMAD MAS'UD; Komisaris Independen : CANDRA FAJRI ANANDA; Komisaris Independen : SUMARYONO; Komisaris : HERU TJAHJONO; Direksi Direktur Utama : BUSRUL IMAN; Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : ERDIANTO SIGIT CAHYONO; Direktur TI dan Operasi : TONNY PRASETYO; Direktur Komersial dan Korporasi : EDI MASRIANTO Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah : R. ARIEF WICAKSONO; Direktur Keuangan : - Direktur Risiko Bisnis : - - Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan. - Terkait pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas kepada Direktur yang ada. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta Tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat: 061/315/DIR/CSE/Srt	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web aweb PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan pada tanggal 15 November 2022. Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2022, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	- Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/408/DIR/CSE/Srt tanggal 08 Desember 2022 - Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 061/432/DIR/CSE/Srt tanggal 27 Desember 2022

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.



Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Suprajarto	Komisaris Utama	Hadir
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Tonny Prasetyo	Direktur TI & Operasi	Hadir
8.	Edi Masrianto	Direktur Komersial & Korporasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Mata Acara Rapat Pertama	Status
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 orang. Hasil Pemungutan Suara Setuju : 12.197.602.356 saham (96,21%) terdiri dari Seri A: 11.651.177.942 saham dan Seri B:546.424.414 saham Tidak Setuju: 263.558.908 saham (2,07%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B Abstain: 215.795.795 saham (1,70%) terdiri dari 215.763.995 Saham Seri A dan 31.800 Saham Seri B Keputusan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan 1. Menyetujui dan mengangkat anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya. yaitu: Direksi: — Saudara ZULHELFI ABIDIN sebagai Direktur IT dan Digital; — Saudara EKO SUSETYONO sebagai Direktur Manajemen Risiko; 2. Memberhentikan dengan hormat Saudara ERDIANTO SIGIT CAHYONO dari jabatannya selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan. Dengan adanya perubahan di atas, maka susunan Direksi disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Direksi pada Struktur Organisasi Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : BUSRUL IMAN; Direktur Mikro, Ritel & Menengah : R. ARIEF WICAKSONO; Direktur Kepatuhan : - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : EDI MASRIANTO; Direktur Operasi : TONNY PRASETYO; Direktur IT & Digital : ZULHELFI ABIDIN; Direktur Manajemen Risiko : EKO SUSETYONO. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan, termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah Terealisasi



Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Buku Pedoman Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, termasuk melakukan review, memonitor dan mengawasi strategi Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode

masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (orang) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paling rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:
 - a. Syarat Formal
Warga Negara Indonesia yang:
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.
Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengelolaan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
 - Perbuatan pidana janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotokopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
- Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
- Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
- Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
- Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.



- c. Syarat Lain
- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
- a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Vice President setingkat).
 - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif (Vice President setingkat) yang berbeda.
- b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank/Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim 5 (lima) tahun terakhir.
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang sampai dengan tahun 2021 diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepemimpinan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

Governance Structure

1. Struktur Organisasi Direksi
2. Fungsi Direksi
3. Masa Jabatan Direksi
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab
5. Independensi dan Kemandirian Direksi

Governance Process

1. Etika Jabatan Direksi
2. Deskripsi Tanggung Jawab Direksi
3. Hak Direksi
4. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan Direksi
5. Pendelegasian Wewenang diantara Direktur Perseroan
6. Pembagian Tugas Direksi
7. Prosedur terkait dengan Pembagian Tugas Direksi
8. Rapat Direksi
9. Komite Direksi
10. Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi
11. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

Governance Outcome

1. Laporan
2. Distribusi Dokumen



Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan - SEVP Consumer Banking - SEVP Usaha Syariah - SEVP Corporate Transformation - SEVP Network and Services - Corporate Secretary - Divisi Audit Internal
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kepatuhan & APU PPT - Divisi Hukum - Divisi Kebijakan dan Prosedur
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Teknologi Informasi - Divisi Digital Banking - Unit Security IT
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan - Divisi Tresuri - Divisi International Banking
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kredit Ritel & Menengah - Divisi Kredit Mikro
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Manajemen Risiko - Divisi Analisis Risiko Kredit - Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit
Arif Suhirman*	Direktur Operasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Operasi - Divisi Umum - Divisi Pengembangan Produk - Unit Administrasi Kredit

*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak tanggal 11 Oktober 2023.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal anggota Direksi:
 - a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;



- b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
- c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
- d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

3. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengaturan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 059/222/DIR/KPT/KEP tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pengaturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan secara *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Direksi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 09 Februari 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP tanggal 17 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.

3. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:
 - a. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No.	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1	Januari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2	Februari	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3	Maret	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4	April	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5	Mei	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6	Juni	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7	Juli	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8	Agustus	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9	September	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10	Oktober	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11	November	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12	Desember	Minggu Ke 3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Rapat Direksi telah diselenggarakan sesuai dengan kebijakan. Materi rapat telah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari. Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
1.	10 Januari 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode 31 Desember 2022; 2. Penyesuaian RBB; 3. KPI Direksi; 4. Audit Plan 2023.	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
2.	25 Januari 2023	1. Hasil Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Periode Desember Tahun 2022; 2. Follow Up Rapat dengan OJK tanggal 24 Januari 2023 (5 Pilar Transformasi dan RBB 2023); 3. Pengadaan Renovasi Facade Gedung Kantor Pusat Bank Jatim.	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Eko Susetyono	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
3.	14 Februari 2023	1. Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite Direksi dan Rencana Penyesuaian Struktur Keanggotaan Komite Direksi; 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi 31 Januari 2023; 3. 5 Pilar Transformasi; 4. Digital Banking & Operasional Fraud; 5. Tindak Lanjut Temuan OJK, BPK RI & KAP; 6. Renovasi Facade Gedung Kantor Pusat Bank Jatim; 7. Progress Pemenuhan Pekerja; 8. Tindak Lanjut Arah Dewan Komisaris Dalam Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris Tanggal 12 & 13 Januari 2023.	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
4.	22 Februari 2023	Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
5.	28 Maret 2023	1. Progress Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2022; 2. Progress 5 Pilar Transformasi; 3. Rekrutmen Prohire untuk Pemenuhan Pegawai di Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
6.	17 April 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim; 2. Program Go Lower Go Better Bank Jatim (Periode Desember 2023); 3. Progress Aksi Korporasi Penyertaan Modal Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	Perjalanan Dinas
7.	5 Mei 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode April 2023 & Persiapan Kaji Ulang (Kinerja Cabang); 2. Progress 5 Pilar Transformasi.	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
8.	14 Juni 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2023; 2. Progress 5 Pilar Transformasi.	Busrul Iman Tonny Prasetyo Zulfelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
9.	13 Juli 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2023; 2. Progress 5 Pilar Transformasi; 3. Tindak Lanjut Temuan BPK RI.	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
10.	1 Agustus 2023	Upaya Dalam Mencapai RBB	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Izin
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
11.	14 Agustus 2023	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2023	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
12.	5 September 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2023; 2. Jaringan Kantor Bank Jatim	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Umrah
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
13.	9 Oktober 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode September 2023; 2. Progress Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
14.	23 Oktober 2023	Progress Kinerja	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
			Arif Suhirman	Hadir	
15.	6 November 2023	1. Pemaparan RBB Tahun 2024; 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Oktober 2023.	Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Tidak Hadir	Sakit
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
16.	5 Desember 2023	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2023; 2. Progress Kelompok Usaha Bank (KUB); 3. SOP Kerja Direksi; 4. AJB Bumiputera.	R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
			Arif Suhirman	Hadir	
			Busrul Iman	Hadir	
			Tonny Prasetyo	Hadir	
			Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Edi Masrianto	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Eko Susetyono	Hadir	
			Arif Suhirman	Tidak Hadir	Cuti

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman	Direktur Utama	16	16	100%	17	17	100%	1	1	100%
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	16	12	75%	17	16	94%	1	1	100%
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	16	16	100%	17	17	100%	1	1	100%
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	16	16	100%	17	16	94%	1	1	100%
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	16	15	94%	17	15	88%	1	1	100%
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	16	16	100%	17	14	82%	1	1	100%
Arif Suhirman*	Direktur Operasi	3	2	67%	2	2	100%	-	-	-

*Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 April 2023, dan efektif sejak tanggal 11 Oktober 2023.



Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Bank Jatim memiliki kebijakan bahwa Direksi senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		Training Executive Sharia Banking	Tuesday, August 8, 2023 / Surabaya	Muamalat Institute
		GCG As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Workshop On Governance For Top Management	Tuesday, February 14, 2023 / Surabaya	PT Synergi Daya Utama
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		Gcg As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		GCG As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		GCG As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat	Penyelenggara
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		GCG As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Saturday, January 14, 2023 / Surabaya	Kubik Leadership
		Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Friday, March 24, 2023 / Online	SDG Consulting
		Gcg As The Key To Healthy And Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim
		Greeting And Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Wednesday, October 18, 2023 / Surabaya	Internal Bank Jatim
		International Conference On ERM: Into The Unknown - Charting The Future Agenda	Thursday, December 7, 2023 / Online	ERM Academy
Arif Suhirman	Direktur Operasi	GCG As The Key To Healthy and Successful Company	Saturday, September 16, 2023 / Yogyakarta	Internal Bank Jatim

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Selama tahun 2023, terdapat Pengangkatan Direksi baru yaitu Arif Suhirman selaku Direktur Operasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan yang diselenggarakan tanggal 12 April 2023. Dilaksanakan program orientasi Direksi baru diantaranya pada tanggal 16 September 2023 berupa Executive Summit Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan mengusung tema "GCG As The Key Healthy & Successful Company" dengan

materi meliputi pelaksanaan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan penerapan Tata Kelola Era 4.0 & 5.0 di Perbankan.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2023 Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan.
2. Pelaksanaan proyek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.

8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim Peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2023, diantaranya yaitu:

1. Tim Pengadaan Tanah dan Bangunan atau Gedung di Lingkungan
2. Hierarki Ketentuan Internal
3. Tim Pengkinian Ketentuan Internal
4. Tim 5 Pilar Transformasi
5. Penanggung Jawab Penerapan APU PPT
6. Tim Kegiatan Penyertaan Modal
7. Tentang Komite Direksi
8. Pencatatan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 059/084/DIR/OJL/KEP Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Agunan Pembayaran
9. Tim Transformasi BPD
10. Limit Kewenangan Settlement Terhadap Transaksi melalui ESTIM
11. Cetak Biru Pengembangan Human Capital
12. Kepengurusan Jatimers Communities
13. Kepengurusan PORSENI BPDSI Tahun 2023
14. Penunjukan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Tim Pendukung Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum Tahun Anggaran 2023
15. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2023
16. Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2023
17. Tim Reviewer Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Proses Tender di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Anggaran 2023
18. Pedoman Portofolio Kredit/Pembiayaan
19. Tim Due Diligence Persiapan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
20. Program Go Lower Go Better
21. Keputusan Rapat ALCO
22. Pembentukan Panitia Penjualan dan Penghapus Bukuan Aktiva tetap Kendaraan Dinas dan Operasional
23. Limit Kewenangan Persetujuan Alih Pos (switching) dan Pelampauan Anggaran
24. Komite Manajemen Risiko
25. Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit Pembiayaan Bermasalah atau Ekstrakomtable
26. Pembentukan Tim Pengendalian Kredit dan Recovery Ekstrakomtable
27. Pembentukan Tim Primary Dealer
28. SOP Komite Manajemen Kepegawaian
29. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan Komite kredit
30. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan Tunai dan Non Tunai
31. Limit Pelaksanaan On The Spot (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan
32. Pembentukan Tim Dashboard Tableau
33. Jatimers Internship Program
34. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2023
35. Tim Penyusun Kebijakan
36. Penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelolaan Aplikasi E-LHKPN
37. Risk Appetite Statement
38. Pencabutan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP)
39. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
40. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
41. Tim Pengembangan Aplikasi JPerform
42. Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2024-2028
43. Tim Pelaksanaan PMK 66 Tahun 2023 Terkait Natura dan/atau Kenikmatan Pegawai yang Menjadi Objek PPh
44. Pedoman Tutup Tahun Buku dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
45. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk
46. Bank Garansi Pembayaran untuk Proyek dengan Anggaran Tahun 2023 di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
47. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan
48. KPA Manajemen Risiko
49. KPA Perkreditan atau Pembiayaan
50. SOP Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
51. SOP Pendidikan dan Pelatihan
52. SOP Giro iB Barokah
53. SOP Pembiayaan Kontraktor
54. SOP Budaya Perusahaan (Corporate Culture)
55. SOP Kredit Mikro, Ritel, dan Menengah
56. SOP Kredit Jatim Ritel dan Menengah
57. SOP Kredit Jatim Mikro
58. SOP Perjalanan Dinas Pegawai
59. SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
60. SOP Kredit Pegawai dan Personal Loan Car Allowance Program (CAP)
61. SOP Kredit Piutang
62. SOP Kredit Kontraktor
63. SOP Kredit BLUD
64. SOP Kredit PEMDA
65. SOP Motorcycle Allowance Program Bagi Account Officer
66. SOP Total Reward
67. Perubahan SOP Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
68. SOP Cash Collateral Credit
69. SOP Kredit Properti
70. SOP Kredit Multiguna
71. SOP Kredit Usaha Rakyat
72. SOP Kredit Jaminan Emas
73. SOP Stimulus Perlakuan Khusus Terhadap Debitur Terdampak Bencana COVID-19 pada Daerah dan Sektor Tertentu



74. SOP Kredit Kendaraan Bermotor
75. SOP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan
76. SOP Punishment Pegawai
77. SOP Kartu Kredit Pemerintah Daerah
78. SOP Sistem Grading dan Remunerasi
79. SOP Program Pengembangan Karir
80. SOP Bank Garansi
81. SOP Investor Management
82. SOP Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
83. OP Car Allowance Program Bagi Pegawai Pemegang Jabatan
84. SOP Mutasi Pekerja
85. SOP Komite Manajemen Kepegawaian
86. SOP Agen Jatim
87. SOP Penyertaan Modal
88. Perubahan SOP Kredit Properti
89. Perubahan SOP Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
90. SOP Manajemen Risiko Kredit
91. SOP Manajemen Risiko Likuiditas
92. Perubahan Pertama SOP Kredit Kontraktor
93. Perubahan Pertama SOP Proses Kredit Komersial dan Korporasi
94. SOP Penyusunan Ketentuan Internal
95. Perubahan Ketiga SOP Kredit Jatim Mikro
96. Perubahan Pertama SOP Kredit Jatim Ritel dan Menengah
97. SOP Cash Management
98. SOP Kredit Kepada Koperasi
99. SOP Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
100. SOP Kredit Sindikasi
101. Perubahan Pertama SOP Kredit Multiguna
102. SOP Pengelolaan Transaksi E-Channel
103. SOP Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
104. SOP Electronic Data Capture (EDC)
105. SOP Keprotokolan
106. SOP Kesekretariatan
107. SOP Pengelolaan Akun
108. SOP Pelaporan Keuangan
109. SOP Pengembangan Produk Non Digital
110. SOP Pengadaan Tanah dan Gedung serta Renovasi Gedung
111. SOP Transaksi Letter of Credit (L/C) Impor
112. SOP Transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
113. SOP Transaksi Documentary Collection
114. SOP Transaksi Letter of Credit (L/C) Ekspor
115. SOP Deposito

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2023.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:

1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan asset dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan

terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2023 berjalan ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2023 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritis di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2023 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali rapat.



Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite IT Steering dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Selama tahun 2023 berjalan Komite TI telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2023 berjalan Komite Kebijakan Kredit atau Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kredit

Komite Kredit Konvensional

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

Komite Pembiayaan

komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan.

- Komite Implementasi Kredit
Selama tahun 2023 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali rapat.
- Komite Restrukturisasi Kredit
Selama tahun 2023 berjalan komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.

- Komite Term Loan Facility (TLF)
Selama tahun 2023 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- Komite Implementasi Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat.
- Komite Restrukturisasi Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan Komite Restrukturisasi Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat
- Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan
Selama tahun 2023 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

Komite Produk dan Jaringan

Komite Produk

Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik digital maupun non digital dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup. Sepanjang tahun 2023 belum terdapat pelaksanaan rapat komite produk dan berproses dalam pengkinian ketentuan internal atas perubahan Struktur Organisasi *grand design*. Pengkinian SOP Komite Produk telah dilakukan dan diterbitkan SOP Komite Produk dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/03/80/DIR/PGP/KEP Tanggal 29 Desember 2023.

Komite Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentuan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Selama tahun 2023 berjalan Komite Jaringan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) masing-masing unit. Pada tahun 2023, pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko mendapatkan predikat *Meet Expectation* atau Baik.



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS antara lain:
 - a. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - b. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
 - g. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *peer review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif melalui Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, terkait pelaksanaan implementasi GCG.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - e. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

8. Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 9. Dewan Komisaris berhak Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 13. Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
 9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance process* tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
 3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
 4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
 5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
 6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
 3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
 5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
 8. Menunjuk dan mengangkat seorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban perusahaan.
 9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 10. Menyelenggarakan rapat bersama Direksi untuk mengevaluasi kinerja Direksi.
 11. Menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (large exposure).



13. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
14. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
15. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
16. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
17. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
18. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
19. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kode Etik (Code of Conduct) bagian Mekanisme Kerja Antara Direksi dengan Dewan Komisaris Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Perubahan Struktur Organisasi.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Korporat Bank.
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan Pihak Terkait.
5. Internal Audit Charter dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala SKAI terkait penerapan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).
6. Laporan Kepada Bank Indonesia terkait dengan Kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Laporan Semester SKAI.
8. Persetujuan Buku Pedoman Pelaksanaan yang harus disahkan Dewan Komisaris antara lain pedoman untuk transaksi *large exposure* seperti Pedoman Pelepasan Aset, Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih dan lain-lain.
9. Lain-lain sesuai ketentuan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Buku Pedoman Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.



Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui 15 Januari 2021. Adapun isi

dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

A. Governance Structure

1. Komposisi Dewan Komisaris
2. Kriteria Dewan Komisaris
3. Masa Jabatan
4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab, Larangan
5. Organisasi
6. Pembagian Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris

B. Governance Process

1. Pembagian Kerja
2. Waktu Kerja
3. Etika Kerja
4. Mekanisme Pengawasan Dewan Komisaris
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Alur dan Mekanisme Kerja

C. Governance Outcome

1. Laporan
2. Sarana Korespondensi
3. Distribusi Surat

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Penyelenggara
Suprajarto*	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Sumaryono	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heru Tjahjono**	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Adhy Karyono***	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Suprajarto*	Komisaris Utama	-	-
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Staf Khusus	Kementrian Keuangan
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
Heru Tjahjono**	Komisaris	-	-
Adhy Karyono***	Komisaris	Sekretaris Daerah	Provinsi Jawa Timur

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk tidak boleh terlibat dalam Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading* atau *self-dealing*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
6. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
7. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Keuangan atau perusahaan Keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan Keuangan atau perusahaan bukan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2023, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota



Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen		
	Candra Fajri Ananda	Muhammad Mas'ud	Sumaryono
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajiban (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.



Pernyataan Komisaris Independen

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Laporan Tahunan 2023

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2023 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2023 Audited.
- Review Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2023.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
- Review program serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Tahunan Tahun Buku 2023.

Triwulan II

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2023.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta review atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktorat Kepatuhan.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- Review Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/SOP).

Triwulan III

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2023.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023.

Triwulan IV

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2023.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2024, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;



- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank;
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2024; dan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola tahun buku 2023.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Rapat Internal Dewan Komisaris telah diselenggarakan sesuai dengan kebijakan. Materi rapat telah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari. Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
1.	12 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Remunerasi Pengurus Bank Jatim 2. Lain-lain	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
2.	12 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Draft Key Performance Indicator (KPI)</i> Direksi 2. Tindak Lanjut <i>Review Standard Operating Procedure (SOP)</i> Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Pengurus 3. Lain-lain	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	
3.	24 Februari 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Overview</i> bersama Direktorat Manajemen Risiko	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
4.	9 Maret 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Overview</i> bersama Direktorat Kredit Mikro Ritel Menengah	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Tidak Hadir	Izin
5.	05 April 2023	Pembahasan meliputi: 1. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
6.	26 April 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Pengurus dan Petunjuk Teknis tentang Perhitungan Tantiem dan Tunjangan Lainnya Pengurus Bank Jatim	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			R. Arief Wicaksono	Hadir	
7.	3 Mei 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Overview</i> Struktur & Lingkup Kerja SEVP Network & Services 2. Pembahasan <i>Progress</i> terkait Rencana Aksi Korporasi KUB dengan Bank NTB Syariah	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
8.	23 Juni 2023	Pembahasan meliputi: 1. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Dewan Pengawas Syariah 2. Revisi RBB Tahun 2023	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Hadir	
9.	20 Juli 2023	Pembahasan meliputi: 1. Rekomendasi Komite Audit terkait Vice President Audit Internal Bank Jatim	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Hadir	
10.	25 Juli 2023	Pembahasan meliputi: 1. Tindak Lanjut Paparan Rencana Bisnis Tahun 2023 oleh SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
11.	29 Juli 2023	Pembahasan meliputi: 1. Koordinasi Dewan Komisaris terkait Penjelasan dan Klarifikasi dari Kuasa Hukum Bapak Suprajarto Komisaris Utama Bank Jatim	Suprajarto	-	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Hadir	
12.	18 Agustus 2023	Pembahasan meliputi: 1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap RBB Semester I Tahun 2023 2. Usulan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan 3. Komite Remunerasi & Nominasi: - Susunan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi - Review KPI Dewan Komisaris	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	Izin
13.	2 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Overview</i> bersama Direktorat Keuangan, Treasury & Global Services	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	



No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan ketidakhadiran
14.	2 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Overview bersama SEVP Usaha Syariah	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
15.	2 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Overview bersama SEVP Consumer Banking	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
16.	2 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Overview bersama SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
17.	10 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Overview Divisi Human Capital	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
18.	27 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Overview dengan Direktorat Operasi	Suprajarto	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Tidak Hadir	
19.	27 Desember 2023	Pembahasan meliputi: 1. Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2023 (dilingkup kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris). 2. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Dewan dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2023. 3. Rencana Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2024. 4. Lain-lain	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
20.	28 Desember 2023	Pembahasan meliputi: 1. Laporan Pelaksanaan RUPS Tahun 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah diselenggarakan sesuai dengan kebijakan. Materi rapat telah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari. Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	12 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Audit Plan</i> 2. Penyesuaian RBB Tahun 2023 3. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak hadir	izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
2.	13 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim posisi Desember 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Tidak Hadir	izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
3	26 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Hasil Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember Tahun 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Sumaryono	Tidak hadir	izin	Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
4.	30 Januari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Kembali Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Tidak hadir	Izin	Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
5	17 Februari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Januari 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin	Tonny Prasetya	Tidak Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Tidak Hadir	
6	20 Maret 2023	Pembahasan meliputi: 1. Penyesuaian RBB Tahun 2023 2. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Februari 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
7	4 April 2023	Pembahasan meliputi: 1. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2022	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Heru Tjahjono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
8	19 Mei 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi April 2023 2. Pembahasan Simulasi Perubahan RBB Tahun 2023 3. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
9	23 Juni 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Mei 2023 2. Pembahasan Revisi RBB Tahun 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Izin
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Adhy Karyono*	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
9	23 Juni 2023					Zulhelfi Abidin	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
10.	20 Juli 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Juni 2023 2. Key Performance Indicator Direksi 3. Kelompok Usaha Bank dengan Bank NTB Syariah 4. Kelompok Usaha Bank dengan Bank Lampung	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
11	27 Juli 2023	Pembahasan meliputi: 1. Hasil Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Periode Juni Tahun 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
12	18 Agustus 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Juli 2023	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
13	22 September 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Agustus 2023 2. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Tidak Hadir	Izin
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
14	22 September 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Permasalahan Hukum Bank Jatim	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin	Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Tidak Hadir	Izin
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
15	11 Oktober 2023	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Perkembangan Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal Kepada Bank NTB Syariah (KUB) 2. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi September 2023 3. Lain-lain	Suprajarto	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
16.	24 November 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Oktober 2023 2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024	Suprajarto	Tidak Hadir	Izin	Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
17.	28 Desember 2023	Pembahasan meliputi: Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi November 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Candra Fajri Ananda	Hadir		Tonny Prasetya	Hadir	
			Summaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	



Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Suprajarto*	Komisaris Utama	18	18	100%	16	15	93%	1	1	100%
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	20	13	65%	17	10	59%	1	1	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	20	13	65%	17	16	94%	1	1	100%
Sumaryono	Komisaris Independen	20	20	100%	17	15	88%	1	1	100%
Heru Tjahjono**	Komisaris	5	3	60%	7	7	100%	-	-	-
Adhy Karyono***	Komisaris	1	1	1	2	2	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman kerja Dewan Komisaris No. 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.

2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan governance perusahaan.

Dewan Komisaris menetapkan untuk program pendidikan/pelatihan ini wajib diikuti oleh Setiap anggota Dewan Komisaris minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Suprajarto*	Komisaris Utama	Seminar Nasional Tantangan, Peluang dan Strategi Perbankan Dalam Penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)	Medan, 11 Mei 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital : Peluang dan Tantangan Terhadap Bank Pembangunan Daerah	Surabaya, 16 November 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BPDSI
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Seminar Nasional Tantangan, Peluang dan Strategi Perbankan Dalam Penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)	Medan, 11 Mei 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital : Peluang dan Tantangan Terhadap Bank Pembangunan Daerah	Surabaya, 16 November 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BPDSI
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Seminar Nasional Tantangan, Peluang dan Strategi Perbankan Dalam Penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)	Medan, 11 Mei 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital : Peluang dan Tantangan Terhadap Bank Pembangunan Daerah	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BDPSI
		Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024	Medan, 7 Desember 2023	FKDK - BPDSI
Sumaryono	Komisaris Independen	Seminar Nasional Tantangan, Peluang dan Strategi Perbankan Dalam Penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)	Medan, 11 Mei 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital : Peluang dan Tantangan Terhadap Bank Pembangunan Daerah	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking	Surabaya, 16 November 2023	FKDK-BDPSI
		Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024	Medan, 7 Desember 2023	FKDK - BPDSI
Heru Tjahjono**	Komisaris	-	-	-
Adhy Karyono***	Komisaris	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris	Surabaya, 4 Juli 2023	LPPI
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital : Peluang dan Tantangan Terhadap Bank Pembangunan Daerah	Surabaya, 16 November 2023	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking	Surabaya, 16 November 2023	FKDK - BPDSI

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023



Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) orang Komisaris baru yang diangkat oleh RUPS yaitu Adhy Karyono (Komisaris). Program pengenalan bagi Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023.

Dalam pelaksanaan program pengenalan Perseroan secara umum kepada Komisaris baru tersebut, telah dilaksanakan program orientasi dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/ bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang. Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) Divisi Audit Internal Periode 2023;
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
3. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2023;
4. Penyampaian Data *Key Performance Indicator* (KPI) Pengurus Bank Jatim Tahun 2022;
5. Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Audit Laporan Keuangan Bank Jatim sebagai bagian dari Proses *Due Diligence* Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah;
6. Revisi Rencana Bisnis Bank Bank Jatim Tahun 2023;
7. Penggantian Vice President Audit Internal;
8. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah (PDPS) untuk Calon Dewan Pengawas Syariah

3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.



9. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS);
10. Perubahan Kebijakan Produk dan Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP);
11. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2023;
12. Proses Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait;
13. Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2024;
14. Usulan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan & Prosedur Kegiatan Penyertaan Modal; dan
15. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi baik kolegal maupun individu yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI

Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Adapun masing-masing KPI Direksi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

KPI DIREKTUR UTAMA

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	CASA	Rasio CASA
	NPL	Rasio NPL
	FBI	<i>Growth Fee Based Income</i> (FBI)

No.	PERSPEKTIF	KPI
2	CUSTOMER	Persetujuan Revisi RBB Bank Jatim Tahun 2023
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (<i>Internal & Eksternal</i>) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4	LEARNING AND GROWTH	
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Penghargaan Perusahaan	Mendapatkan penghargaan untuk perusahaan minimal 5 kali dalam setahun

KPI DIREKTUR MIKRO, RITEL & MENENGAH

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	NPL	Rasio NPL
	FBI	Growth Fee Based Income (FBI)
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (<i>Internal & Eksternal</i>) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Implementasi Digital Banking	Pengajuan aplikasi kredit melalui <i>e-Loan</i>
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)



No.	PERSPEKTIF	KPI
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengendalian PL	Memastikan terselenggaranya pengendalian <i>Performing Loan</i> sesuai target yang ditetapkan
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan timeline
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI DIREKTUR OPERASI

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	<i>Growth Fee Based Income</i> (FBI)
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO <i>Long Term</i> pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Pelaporan	Bertanggung jawab atas pelaporan untuk seluruh kegiatan bisnis
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengawasan Operasional	Melakukan pengawasan di setiap aspek operasional dalam perusahaan baik aspek operasional hingga pelaksanaannya yang bersifat administrasi maupun yang berbasis teknologi di tatanan <i>front office</i> dan <i>back office</i>
	Pelaksanaan Operasional Berbasis TI	Mengoptimalkan operasional yang berbasis IT baik <i>e-channel</i> maupun digital
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan timeline
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja



KPI DIREKTUR IT & DIGITAL

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	Growth Fee Based Income (FBI)
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO Long Term pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (<i>Internal & Eksternal</i>) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Digitalisasi	Penyempurnaan <i>Digitalisasi Banking</i> (Pembukaan Rekening Online, Deposito Online, Login Finger Print, Pinjaman Online Super Mikro,dll)
	ETPD	Penerapan sistem ETPD di Pemkab dan Pemkot
	Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	IT Security dan Operasional IT	Memastikan pelaksanaan jaringan komunikasi data, keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan lunak serta pengendalian, pemanfaatan infrastruktur TI
	Pengembangan IT	Merencanakan dan melaksanakan program IT kedepan untuk pengembangan operasional dan bisnis bank agar tetap kompetitif
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih



No.	PERSPEKTIF	KPI
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	NPL	Rasio NPL
	Perbaikan Kolek 345	Penurunan kolektabilitas 345 YoY
	FBI	<i>Growth Fee Based Income</i> (FBI)
	Extracomtable	Memperoleh ekstrakom
	Restrukturisasi	Melakukan Restrukturisasi (3,4,5)
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO <i>Long Term</i> pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Koordinasi antar Direktorat	Melakukan koordinasi dengan Direktorat lain untuk mengoptimalkan aktivitas bisnis bank
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat "Baik" (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengendalian	Mengendalikan kualitas kredit baik <i>extracomtable</i> maupun <i>intracomtable</i> , mengoptimalkan hasil <i>recovery</i> -nya baik melalui restrukturisasi dan Penyelesaian kredit
	Identifikasi Risiko	Melakukan identifikasi risiko financial, keamanan mitigasi dan keselamatan perusahaan
	Kebijakan	Memastikan kebijakan terkait manajemen risiko
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI DIREKTUR KEPATUHAN

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	<i>Growth Fee Based Income</i> (FBI)

No.	PERSPEKTIF	KPI
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (<i>Internal & Eksternal</i>) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Ketepatan pelaporan	Pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan
	Hukum	Meningkatkan prosentase tentang penyelesaian perkara Monitoring kegiatan pendapat hukum (<i>Legal Opini</i>) dan surat kuasa
	Pengkinian Data Nasabah	Melakukan pengkinian data nasabah
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat " <i>Baik</i> " (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (<i>Konvensional & Syariah</i>) setiap bulan.
	Kebijakan dan Sisdur	Memastikan sistem, kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan internal dan eksternal
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY & GLOBAL SERVICES

No.	PERSPEKTIF	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	CASA	Rasio CASA
	NPL	Rasio NPL
	FBI	<i>Growth Fee Based Income</i> (FBI)
	Pendapatan International Banking	Pendapatan <i>Trade Finance</i>
	Pendapatan Treasury	Memperoleh pendapatan dari transaksi Tresuri

No.	PERSPEKTIF	KPI
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idAA-
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (<i>Internal & Eksternal</i>) terselesaian tepat waktu
	Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Kerjasama Institusi	Menjaga hubungan baik dan menambah kerjasama dengan <i>counterparty</i>
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat " <i>Baik</i> " (peringkat 2)
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi Human Capital	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja



PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2023 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.

2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 059/009/DK/KEP Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP Tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - b. Pelaksanaan *review* Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit (Internal/Eksternal).
 - c. Pelaksanaan Hasil Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
 - d. Pelaksanaan *review* Laporan Profil Risiko, *Review* Laporan Fungsi Kepatuhan, Hasil *Review* Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
 - e. Pelaksanaan *review* kebijakan-kebijakan Direksi (kebijakan perkreditan, permodalan, strategi manajemen risiko, remunerasi, dan lainnya).
2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Jumlah rapat.
 - b. Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank).
 - c. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang dan unit kerja.
 - d. Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Pengawasan Kinerja Perseroan
 - a. Rentabilitas
 - b. Likuiditas
 - c. Perkreditan
4. *Learning and Growth*

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2023 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.



HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (Self Assessment)									
No	Perspektif	Aspek		Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
1	Compliance Perspective	Pengawasan pasif (Mandatory)	a	Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu	5	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	RBB Disahkan sesuai dengan ketentuan.	1	5,0
			b	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	Dilaksanakan setiap semester (paling lambat 2 bulan setelah semester tersebut berakhir)	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target.	1	5,0
			c	Pelaksanaan Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	4	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	4,0
			d	Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Tata Kelola.	4	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target.	Penilaian Self Assessment Tata Kelola dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	4,0
			e	Pelaksanaan review atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank	5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester).	Review Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank dilaksanakan sesuai ketentuan	1	5,0
			f	Review serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dan sebagainya)	5	Dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan review kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	5,0
			g	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	5	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Rekomendasi penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	1	5,0

KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (Self Assessment)

No	Perspektif	Aspek		Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
			h	Review Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	5	Memberikan rekomendasi terkait Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan (minimal setiap semester)	Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan review secara berkala sesuai ketentuan	1	5,0
			i	Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan	5	Tersedianya kebijakan Nominasi Perseroan sesuai ketentuan	Telah terpenuhi, kebijakan terkait Nominasi Perseroan telah tersedia.	1	5,0
SUB TOTAL					43				43,0
2	Internal Procces Perspective	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	5	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	1	5,0
			b	Jumlah Rapat	8	Rapat Internal Dewan Komisaris minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat internal Dewan Komisaris pada semester 1 tahun 2023 terlaksana sesuai target	1	8,0
					8	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada semester I / 2023 Terlaksana sebanyak 9 Kali	1	8,0
			c	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	10	Dilaksanakan pada setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai target yaitu 2 bulan sekali (1 tahun 6x / 3x per semester)	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank pada Semester I / 2023 terlaksana dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 6 kali	1	10,0
			d	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	6	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang / unit kerja atau kunjungan ke cabang minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 5 kali	1	6,0
SUB TOTAL					37				37,00

KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS (Self Assessment)

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
3	Financial Perspective	Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi Juni 2023)	POS NERACA		TARGET	REALISASI		
		a	Rentabilitas				(%)	
			- Laba Bersih	2,5	1.648.909	1.470.105	89,16	2,23
			- Return on Asset (ROA)	2,5	2,19%	1,87%	85,39	2,13
		b	Likuiditas					-
			- Dana Pihak Ketiga (DPK)	2,5	90.406.640	78.196.910	86,49	2,16
			- LDR	2,5	60,55%	70,03%	115,66	2,89
		c	Perkreditan					-
			- Ekspansi Kredit	2,5	54.738.950	54.760.902,00	100,04	2,50
			- NPL	2,5	2,50%	2,49%	100,40	2,51
SUB TOTAL				15				14,43
4.	Learning & Growth Perspective	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	Programpeningkatan/ pengembangan kompetensi (Workshop, seminar, conference, dan sebagainya)	5	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan Workshop/seminar Dewan Komisaris pada semester I / 2023 terlaksana sesuai target	1	5
SUB TOTAL				5				5,00
TOTAL				100				99,43

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Aktif, Pengawasan Pasif dan Pengembangan Kompetensi. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Audit ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Evaluasi/Monitoring Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	7,5	7,5
		Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit & Fraud</i> dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit & Fraud</i> dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	7,5	7,5
		Evaluasi <i>Audit Plan</i> dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan <i>Audit Plan</i>	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target.	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	7,5	7,5
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Pemantauan implementasi Strategi <i>Anti Fraud</i> (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi <i>Anti Fraud</i> (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
		Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
SUB TOTAL						57,50	57,50

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama Tahun 2023 terlaksana sebanyak 8 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Divisi dan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Korrdinasi Komite Audit dengan Divisi Terkait selama Tahun 2023 terlaksana sebanyak 6 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SKAI, SKMR, dan Akuntan terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Kunjungan Pelaksanaan Kunjungan ke Kantor Cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2023 sebanyak 5 kali, melakukan kunjungan serta berkomunikasi dengan Direksi dan Divisi terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Audit berjalan secara efektif.	1	10	10
SUB TOTAL						35	35
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (self competency development) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (3x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Audit pada tahun 2023 belum terlaksana secara maksimal	0,5	2,5	1,25
		Program peningkatan kompetensi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan atau sertifikasi	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan Workshop/ seminar/pelatihan/sertifikasi Komite Audit pada Tahun 2023 terlaksana 2 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						7,50	2,50
TOTAL						100	95,00

TOTAL PENILAIAN	KETERANGAN
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Remunerasi dan Nominasi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Menyusun komposisi dan proses Nominasi Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	Menyusun <i>Time Table</i> dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi)	Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai time table yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan Minimal setahun 1 (satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
Sub Total						60	60
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 4 kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	20	20
		Rapat Koordinasi dengan pihak terkait	Sesuai kebutuhan (minimal 2 kali dalam setahun)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Pembuatan dan penyampaian laporan Komite yang tepat waktu	Menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
Sub Total						40	40
Total						100	100

TOTAL PENILAIAN	KETERANGAN
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik



Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko ditentukan dan disepakati bersama Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Komite. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tata tertib dan program kerja yang telah ditetapkan.

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan sesuai dengan ketentuan	0,5	5	2,5
		Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal hanya terlaksana 2 kali dalam tahun ini	0,5	5	2,5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) terlaksana 1 (satu) kali	0,5	5	2,5
		Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi <i>contingency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Pemantauan dan evaluasi <i>contingency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> di atas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> di atas Rp100 milyar hanya terlaksana 1 kali dalam tahun ini	1	5	1
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan <i>review</i> atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan <i>review</i> atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilaksanakan sesuai ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Evaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	Evaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		<i>Review Corplan</i> , RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	<i>Review Corplan</i> , RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • KPA & SOP Penyertaan Modal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • KPA & SOP Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		<i>Review dan Pengkinian Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Pembiayaan Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan (PAP).	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun).	<i>Review dan Pengkinian Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Pembiayaan Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan (PAP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
Sub Total						60	52,50
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2023 terlaksana sebanyak 8 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan divisi terkait <i>issues</i> strategis Bank	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2023 terlaksana sebanyak 7 kali	1	10	10
		Kunjungan ke unit kerja dan jaringan kantor dalam rangka: • Pemantauan penerapan manajemen risiko pada aktivitas dan produk Bank; • Pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Kunjungan ke kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Tahun 2023 dilakukan sebanyak 6 (enam) kali; dan melakukan kunjungan serta berkomunikasi dengan Direksi dan Divisi terkait dengan tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko	1	10	10
Sub Total						35	35
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 terlaksana secara maksimal	1	2,5	2,5
		Program peningkatan kompetensi dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan atau sertifikasi	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (2x dalam setahun).	Pelaksanaan Workshop/ seminar/pelatihan/sertifikasi Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2023 terlaksana 3 kali	1	2,5	2,5
Sub Total						5,00	5,00
Total						100	92,50

TOTAL PENILAIAN	KETERANGAN
Nilai 80 – 100	Sangat Baik
Nilai 70 - < 80	Baik
Nilai 55 - < 70	Cukup Baik
Nilai < 55	Kurang Baik

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - Meninggal dunia.
 - Masa jabatannya telah berakhir.
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
- Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).



- d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah saat ini masih dalam proses pengesahan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019	28 Februari 2020

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	OJK	— RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 (pertama) — RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 (kedua)	28 Februari 2020
Dr. dr. Sukadiono, MM	Anggota	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	Menunggu Surat Rekomendasi DSN MUI dan Persetujuan Fit and Proper Test OJK

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	-	-	-
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA*	Anggota	-	-	-
Dr. dr. Sukadiono, MM**	Anggota	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa	20 Juni 2023 – 10 Juli 2023, Zoom Meeting	DSN MUI Institute
		Pelatihan Dasar Pengawas Syariah	21 September 2023 – 10 Oktober 2023, Zoom Meeting	DSN MUI Institute

*Berhenti menjabat sejak tanggal 12 April 2023

**Menunggu Surat Rekomendasi DSN MUI dan Persetujuan *Fit and Proper Test* OJK



Program Orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
		Wakil	Wakil Rais Aam PBNU 2022 - 2027
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA*	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
Dr. dr. Sukadiono, MM**	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2022-2027
		Pimpinan	Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya 2020-2024

*Berhenti menjabat sejak tanggal 12 April 2023

**Menunggu Surat Rekomendasi DSN MUI dan Persetujuan Fit and Proper Test OJK

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. dr. Sukadiono, MM**	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Berhenti menjabat sejak tanggal 12 April 2023

**Menunggu Surat Rekomendasi DSN MUI dan Persetujuan Fit and Proper Test OJK

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1.	14 Januari 2023	Pembahasan Opini JConnect Remittance	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA
2.	31 Maret 2023	FGD Rencana Penggunaan Dana Kantor Pusat Untuk Penyaluran Pembiayaan di Unit Usaha Syariah Menggunakan Akad Mudharabah Muqayadah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA
3.	5 April 2023	Pembahasan Opini Akad Mudharabah Muqayadah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
4..	16 Mei 2023	Pembahasan Opini Implementasi New JConnect Mobile	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
5.	21 Juli 2023	Pembahasan Opini Layanan Cardless Transaction	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
6.	31 Juli 2023	Pembahasan Opini Layanan Jatim Syariah Prioritas	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
7.	2 Agustus 2023	— Pembahasan Opini JConnect Remittance Hongkong — Pembahasan Opini Layanan Customer Self Service (CSS)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
8.	4 Oktober 2023	Pembahasan Opini Dual Banking Leveraging Model (DBLM)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
9.	13 Oktober 2023	Pembahasan Opini Penggunaan Asuransi Konvensional	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
10.	7 November 2023	Pembahasan Opini Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
11.	20 November 2023	Pembahasan Opini Layanan Electronic Data Capture (EDC) Acquirer	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
12.	24 November 2023	Notulen Refresh Akad Mu'awadiah, Tabarru, Qardh & Dain Dengan Seluruh Cabang Syariah	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
13.	5 Desember 2023	Pembahasan Opini Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
14.	11 Desember 2023	Pembahasan Opini Pembebanan Biaya Dana Deposito	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
15.	18 Desember 2023	Pembahasan Opini Deposito On Call (DOC)	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
16.	20 Desember 2023	Pembahasan Opini Penggunaan Akad MMQ Dalam Pembiayaan Investasi Sindikasi	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag
17.	22 Desember 2023	Opini Layanan Aplikasi Agen Jatim Gen.2	Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Dr. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag	Ketua	17	17	100%	Nihil
Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA*	Anggota	3	3	100%	Nihil
Dr. dr. Sukadiono, MM**	Anggota	-	-	-	Nihil

*Berhenti menjabat sejak tanggal 12 April 2023

**Menunggu Surat Rekomendasi DSN MUI dan Persetujuan Fit and Proper Test OJK

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2023 DPS telah mengeluarkan sebanyak 16 (enam belas) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini DPS Terkait JConnect Remittance
2. Opini DPS Terkait Akad Mudharabah Muqayadah
3. Opini DPS Terkait Implementasi New JConnect Mobile
4. Opini DPS Terkait Layanan Cardless Transaction
5. Opini DPS Terkait Layanan Jatim Syariah Prioritas
6. Opini DPS Terkait JConnect Remittance Hongkong
7. Opini DPS Terkait Layanan Customer Self Service (CSS)
8. Opini DPS Terkait Dual Banking Leveraging Model (DBLM)



9. Opini DPS Terkait Penggunaan Asuransi Konvensional
10. Opini DPS Terkait Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR)
11. Opini DPS Terkait Layanan Electronic Data Capture (EDC) Acquirer
12. Opini DPS Terkait Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
13. Opini DPS Terkait Pembebanan Biaya Dana Deposito
14. Opini DPS Terkait Deposito On Call (DOC)
15. Opini DPS Terkait Penggunaan Akad MMQ Dalam Pembiayaan Investasi Sindikasi
16. Opini DPS Terkait Layanan Aplikasi Agen Jatim Gen.2

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2023. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 17 (Tujuh Belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

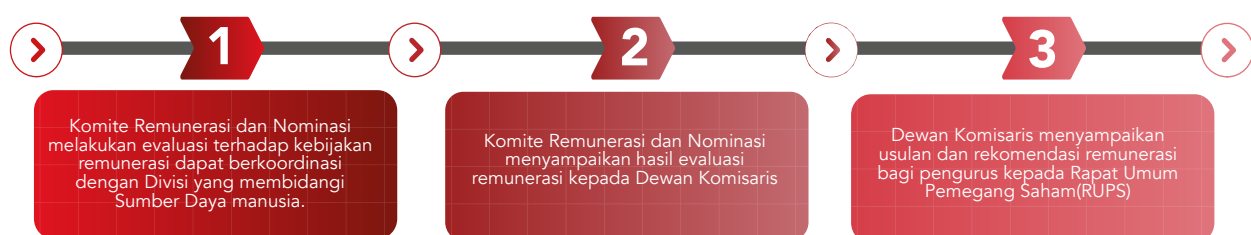
Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:





Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

Indikator Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan antara lain pencapaian kinerja termasuk kinerja keberlanjutan, remunerasi industri sejenis, kompleksitas usaha dan lainnya.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap
Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
 - Skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
 1. Honorarium.
 2. Tunjangan Perumahan.
 3. Tunjangan Komunikasi.
 4. Tunjangan Hari Raya.
 5. Tunjangan Cuti.
 6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.

7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:
 1. Tantiem.
 2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	- Komisaris Utama 55% dari honorarium Direktur Utama - Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	- Direktur Utama 100% - Direktur 80% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	- Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali apabila diputuskan berbeda maka perlu diputus oleh Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.	- Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali apabila diputuskan berbeda maka perlu diputus oleh Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
		- Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas	- Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas
		- Tunjangan Komunikasi diberikan secara lumpsum setiap bulan	- Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium
		- Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium	- Tunjangan Komunikasi diberikan secara lumpsum setiap bulan
			- Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	- Fasilitas kendaraan dinas melalui program Car Ownership Program (COP)	- Fasilitas kendaraan dinas melalui program Car Ownership Program (COP)
		- Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020	- Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020
		- Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan	- Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	- Bonus diberikan secara tunai	- Bonus diberikan secara tunai
		- Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.	- Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Keterangan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah Dalam Jutaan Rupiah
REMUNERASI				
Honorarium	5	4.611	7	10.437
Tunjangan Perumahan	5	1.683	7	2.223
Tunjangan Komunikasi	5	560	7	740
Tantien	5	17.194	6	30.808
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	4	3.700	7	6.400
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	2	212	7	150
JUMLAH REMUNERASI DALAM 1 TAHUN				
Di atas Rp2 miliar	4	23.203	6	42.963
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	0	0	1	1.244
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	1	846	0	0
Rp500 juta ke bawah	0	0	0	0

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

- Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
- Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
- Usia
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
- Independensi
Dewan Komisaris
 - Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.



Direksi

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direksur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman	Direktur Utama	59 tahun	Pria	- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi; - Master bidang Manajemen; - Profesi Akuntan.	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Akuntansi
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	54 tahun	Pria	- Sarjana bidang Pertanian; - - Master bidang Manajemen.	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	61 Tahun	Pria	- Sarjana bidang Teknik Informatika - Master bidang Computer Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Teknik Informatika
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	59 Tahun	Pria	- Sarjana bidang Ekonomi Manajemen Magister bidang Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	53 Tahun	Pria	- Sarjana bidang Teknologi Industri - Magister bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	58 Tahun	Pria	- Sarjana bidang Teknologi Pangan dan Gizi - Master bidang Corporate Finance and Investment - Doktor bidang Manajemen dan Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Finance, Majemen
Arif Suhirman	Direktur Operasi	57 Tahun	Pria	- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi - Master bidang Manajemen dan Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Akuntansi

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Suprajarto*	Komisaris Utama	67 Tahun	Pria	- Sarjana Ilmu Ekonomi - Magister Manajemen - Doktor Ilmu Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Manajemen, Perbankan



Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	59 tahun	Pria	- Sarjana Ekonomi - Master (MSc.) - Doctor (Ph.D)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	59 tahun	Pria	- Sarjana Administrasi Negara - Magister Manajemen - Doktor Politik Internasional	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Sumaryono	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	- Sarjana Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Perbankan
Heru Tjahjono**	Komisaris	62 tahun	Pria	- Sarjana Teknik - Magister Manajemen - Doktor Lingkungan dan Pembangunan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Manajemen, Lingkungan dan Pembangunan
Adhy Karyono***	Komisaris	52 tahun	Pria	- Sarjana bidang Politik - Magister bidang Administrasi Publik Politeknik	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Administrasi, Politik

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi sebesar 5% atau lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	-	-	-	-
Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	-	-	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-	-	-
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	-	-	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	-	-	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-	-	-



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris sebesar 5% atau lebih.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Suprajarto*	Komisaris Utama	-	-	-	
Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	-	-	-	
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-	-	
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-	-	
Heru Tjahjono**	Komisaris	-	-	-	
Adhy Karyono***	Komisaris	-	-	-	

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 19 Desember 2023 (meninggal dunia).

**Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 12 April 2023 (diberhentikan pada RUPS Tahunan 2022).

***Diangkat sebagai Komisaris pada RUPS Tahunan 2022 tanggal 12 April 2023 dan efektif tanggal 24 November 2023.

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Investor Relation Corporate Secretary Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini Corporate Secretary) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai copy surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2023, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi
1	Busrul Iman	1,946,500	2,486,500	540,000	650	17 Mei 2023	Investasi
2	R. Arief Wicaksono	126,300	443,300	317,000	650	19 Mei 2023	Investasi
3	Tonny Prasetyo	628,500	728,500	100,000	650	26 Mei 2023	Investasi
4	Suprajarto	-	191,000	191,000	650	26 Mei 2023	Program LTI

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi
5	Busrul Iman	2,486,500	2,958,900	472,400	650	26 Mei 2023	Program LTI
6	Tonny Prasetyo	728,500	1,067,400	338,900	650	26 Mei 2023	Program LTI
7	R. Arief Wicaksono	443,300	728,200	284,900	650	26 Mei 2023	Program LTI
8	Edi Masrianto	-	227,600	227,600	650	26 Mei 2023	Program LTI
9	Eko Susetyono	-	24,100	24,100	650	26 Mei 2023	Program LTI
10	Zulhelfi Abidin	-	24,200	24,200	650	26 Mei 2023	Program LTI
11	Eko Susetyono	24,100	124,100	100,000	650	5 Juni 2023	Investasi
12	Edi Masrianto	227,600	327,600	100,000	650	7 Juni 2023	Investasi

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Group Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah Corporate Secretary. Group Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan

berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.

5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.W
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
 13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor progres pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum dan telah dikinakan menjadi POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
3. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
4. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan KAP berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan memantau pelaksanaan tindak lanjut.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris yang terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
9. Pemantauan terhadap kecukupan proses pelaporan keuangan seperti laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, laporan publikasi, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang akan disampaikan ke publik, Bank Indonesia serta institusi otoritas lainnya
10. Penelaahan terhadap kecukupan fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan anggarannya serta pekerjaan yang telah dilaksanakan



11. Pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional terkait lainnya
12. Pemantauan dan penilaian terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas fungsi SKAI
13. Evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP meliputi kecukupan program kerja dan penelaahan rencana pemeriksaan (*review audit plan*) KAP termasuk berkaitan dengan struktur pengendalian internal, pos-pos materiil dan manajemen risiko.

Piagam Komite Audit

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, Komite Audit memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/04/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022, yang mengatur tentang:

1. Landasan Hukum
2. Struktur Keanggotaan
3. Persyaratan Keanggotaan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Wewenang
6. Rapat Komite Audit
7. Masa Tugas Anggota Komite Audit
8. Pelaporan
9. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2023 – 28 Desember 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/200/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Administrasi Niaga	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Administrasi Negara	Komisaris Independen
Candra Fajri Ananda*	Anggota		Ekonomi	Komisaris Independen
Kusnadi	Anggota		Ekonomi, Akuntansi	Pihak Independen

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 29 Desember 2023 - 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keahlian	Keterangan
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Administrasi Niaga	Komisaris Independen
Muhammad Mas'ud	Anggota		Administrasi Negara	Komisaris Independen
Kusnadi	Anggota		Ekonomi, Akuntansi	Pihak Independen
Moch. Arifin*	Anggota		Hukum	Pihak Independen

*Masa jabatan sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Sumaryono

Ketua Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud

Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Malang
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Cianjur, 18 Juni 1966 Berusia 57 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang (1990) • Magister Agribisnis UGM Yogyakarta (2004)
Pengalaman Kerja	: • Job Trainer Kanca Muara Bungo (1990-1992) • Staf I Kanca Bitung (1992-1994) • Staff II Kanca Tegal (1994-1997) • MLO Kanca Cilegon (1997-1999) • MLO Kanca Jakarta Roxi (1999-2002) • Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002-2004) • Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004-2006) • Pemimpin Cabang BRI Parepare (2007-2009) • Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009-2011) • Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011-2012) • Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012-2012) • Staf Khusus (2012-2016) • Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016-2019) • GH AIW Bandung (2019-Juni 2022)
Sertifikasi	: • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Tahun 2006. • Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank Dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021
Dasar Hukum Pengangkatan	: Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026
Kepemilikan Saham Bank Jatim	Tidak Ada



Moch. Arifin

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Surabaya, 02 Februari 1971 52 tahun per 31 Desember 2022
Riwayat Pendidikan	: • Universitas Bhayangkara Surabaya
Pengalaman Kerja	: • Advokat (1996 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015) • Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018) • Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – S
Sertifikasi	: • Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) • Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Dasar Hukum Pengangkatan	: Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Jabatan	: Periode I
Masa Jabatan	: Periode 2022-2026
Jabatan Rangkap	: • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Ketua	• Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Candra Fajri Ananda*	Anggota	• Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan • Master Degree (MSc.) di bidang Rural Development • Doctor Degree (DR) di bidang Rural Development	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan.

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Anggota	- Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara - Magister Manajemen - Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Kusnadi	Anggota	- Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara - Magister Manajemen - Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Moch. Arifin**	Anggota	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

*Masa jabatan sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Independensi Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Aspek Independensi	Sumaryono	Muhammad Mas'ud	Candra Fajri Ananda	Kusnadi	Moch. Arifin**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

*Masa jabatan sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.



Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	7 Februari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Progres penyelesaian Komite Bidang Hukuman Jabatan (KBHJ) terhadap kasus fraud yang belum terselesaikan. 2. Perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terkait Pemberian Respon secara Cepat dan Tepat terhadap Penyelesaian Kasus <i>Fraud</i>	Sumaryono Candra Fajri Ananda Kusnadi
2	22 Februari 2023	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester II Tahun 2022	Sumaryono Kusnadi
3.	29 Maret 2023	Mitigasi Risiko Hukum Debitur PT. G.P	Sumaryono Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Kusnadi
4.	2 Mei 2023	Koordinasi Proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Keperluan Audit Laporan Keuangan Per 30 April 2023, sebagai bagian dari Rangkaian Proses <i>Due Dilligence</i> Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah	Sumaryono Kusnadi
5.	11 Juli 2023	Usulan Penggantian Vice President Audit Internal	Sumaryono Kusnadi
6.	21 September 2023	Pembahasan meliputi: 1. Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal 2. Tindak Lanjut Kasus Fraud Periode sejak Tahun 2021	Sumaryono Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Kusnadi
7.	30 Oktober 2023	Hasil Evaluasi Presentasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	Sumaryono Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Kusnadi
8.	28 Desember 2023	Rencana Audit Tahunan Divisi Audit Internal Periode Tahun 2024.	Sumaryono Kusnadi

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sumaryono	Ketua	8	8	100%
Candra Fajri Ananda*	Anggota	8	4	50%
Muhammad Mas'ud	Anggota	8	3	37,5%
Kusnadi	Anggota	8	8	100%
Moch. Arifin**	Anggota	-	-	-

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023
 *Masa jabatan sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Summaryono	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Candra Fajri Ananda*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kusnadi	Anggota	Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking.	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI
Moch. Arifin**	Anggota	Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking.	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

**Masa jabatan sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

PROGAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Komite Audit telah menyusun program kerja pada tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
- Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & Fraud dari Divisi Audit Internal.

- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.



Triwulan II

- Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan *progress report* diterima Komite Audit.

Triwulan III

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
- Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & Fraud dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.

Triwulan IV

- Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
- Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit Plan.
- Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
- Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan *progress report* diterima Komite Audit.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta BPP Komite Dewan Komisaris. Komite Audit selama periode 2023 telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2023, dan beberapa hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain laporan Realisasi Rencana Bisnis (RBB), laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan Perseroan, serta laporan hasil audit internal.
2. Memberikan rekomendasi dan laporan yang berkaitan dengan persetujuan:
 - a. Rencana pemeriksaan audit (Audit Plan) dari Divisi Audit Internal.

- b. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - c. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2022.
 - d. Pemilihan Kepala SKAI.
3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:
 - a. VP Audit Internal:
 - Evaluasi Audit Plan Periode 2023.
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2022.
 - Evaluasi penyusunan perencanaan audit pendahuluan.
 - Pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF.
 - Perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Pemberian Respon secara Cepat dan Tepat terhadap Penyelesaian Kasus Fraud.
 - Strategi dan Program Pencegahan *Internal Fraud* (temuan berulang).
 - Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal.
 - Kualifikasi petugas pada unit *internal control* Kantor Cabang.
 - b. VP Pengendalian Keuangan
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Nexia Kanaka Puradiredja Suhartono (KPS) periode Tahun Buku 2022; dan
 - Koordinasi terkait kinerja keuangan, perhitungan pembentukan CKPN.
 - c. VP Umum
 - Koordinasi proses pengadaan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) periode Tahun Buku 2023.
 - d. VP *Human Capital*
 - *Standard Level Agreement* (SLA) *Process Punishment*.
 - *Matrix Punishment*.
 - Penetapan Punishment sampai dengan Jenjang Organisasi Cabang.
 - Progress penyelesaian Komite Bidang Hukum Jabatan (KBHJ) terhadap kasus *fraud* yang belum terselesaikan.
 - Peralihan komposisi pegawai pada posisi *Account Officer* (AO) dan *Funding Officer* (FO) pada unit kerja yang ada di Kantor Cabang.
 - Job Requirement unit *Quality Assurance* (QA) dan/atau Lini Pertahanan kedua pada Kantor Cabang.



- e. VP Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
 - Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2023.
- f. VP Manajemen Anak Perusahaan
 - Koordinasi Proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Keperluan Audit Laporan Keuangan Per 30 April 2023, sebagai bagian dari Rangkaian Proses *Due Diligence* Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank NTB Syariah.
4. Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka:
 - a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
 - b. Pembahasan *Standard Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment* pelaku *fraud*.
 - c. Evaluasi fungsi dan pelaksanaan tugas pada unit internal kontrol Kantor Cabang.
 - d. Revitalisasi fungsi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF.
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integrasi rencana strategis Bank.

Pernyataan Komite Audit Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Jatim dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor 060/002/DK/Kep tanggal 15 Januari 2021, yang mengatur mengenai:

1. Peran dan Fungsi
2. Tugas Tanggung Jawab
3. Wewenang
4. Struktur Keanggotaan, Kedudukan dan Masa Jabatan
5. Tata cara prosedur kerja

6. penyelenggaraan rapat
7. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pejabat eksekutif dan pegawai.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pejabat eksekutif dan pegawai.
 - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan fungsi Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.



- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko.
- h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
- j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2023 – April 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/036/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2022 - 2023	Komisaris Independen	Economic
Suprajarto	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris	Economic
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Haru Tjahjono*	Anggota		Komisaris	Economic
Revi Adiana S**	Anggota		Anggota Ex- Officio Vice President HC	Economic

* Masa jabatan berakhir terhitung sejak RUPS tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023

** Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode April 2023 - 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/036/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2022 - 2023	Komisaris Independen	Economic
Suprajarto	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Candra Fajri Ananda	Anggota		Komisaris	Economic
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Economic
Adhy Karyono*	Anggota		Komisaris	Economic
Slamet Purwanto**	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Periode 2022 - 2023	Anggota Ex- Officio Vice President (HC)	Economic

* Masa jabatan berlaku efektif sejak ditetapkan lulus UKK OJK pada tanggal 24 November 2023

** Masa jabatan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud**Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Suprajarto**Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Candra Fajri Ananda**Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sumaryono**Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Slamet Purwanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Ex-officio)

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1979 Usia 44 tahun per 2023.
Riwayat Pendidikan	: - Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) (2004) - Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2016)
Pengalaman Kerja	: Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Divisi Human Capital (2015), Pemimpin Sub. Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub. Divisi Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Learning Center (2021), AVP Learning Center (2023).
Sertifikasi	: - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko
Dasar Hukum Pengangkatan	: Sejak Juli 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	5 Juli 2023 – sekarang
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Suprajarto	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana di bidang Manajemen Pemasaran Doctor di bidang Ilmu Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, perbankan
Candra Fajri Ananda	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Master Degree (MSc.) di bidang Rural Development Doctor Degree (DR) di bidang Rural Development	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, hubungan internasional, perekonomian dan pengawasan perbankan
Sumaryono	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, perbankan
Adhy Karyono	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik Magister dibidang Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Slamet Purwanto	Anggota Ex-officio	Sarjana di bidang Ilmu Komputer Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Aspek Independensi	M. Mas'ud	Candra Fajri	Suprajarto	Sumaryono	Heru Tjahjono	Adhy Karyono*	Revi AdianaS**	Slamet Purwanto***	Moch. Arifin**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Masa jabatan berlaku efektif sejak ditetapkan lulus UKK OJK pada tanggal 24 November 2023

** Masa jabatan berakhir sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Masa jabatan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	5 April 2023	Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Remunerasi)	Muhammad Mas'ud Suprajarto Heru Tjahjono Candra Fajri Ananda Sumaryono



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
2	10 April 2023	Rekomendasi Calon Pengurus Bank Jatim (Nominasi)	Muhammad Mas'ud Suprajarto Candra Fajri Ananda Sumaryono
3	26 April 2023	1. Petunjuk Teknis tentang Perhitungan Tantiem dan Tunjangan Lainnya Pengurus Bank Jatim. (Remunerasi) 2. Pembahasan Data Key Performance Indicator (KPI) Pengurus Bank Jatim tahun 2022.	Muhammad Mas'ud Suprajarto Candra Fajri Ananda Sumaryono
4	23 Juni 2023	1. Evaluasi dan Rekomendasi Koreksi untuk Calon Pengurus Bank Jatim yang akan melaksanakan Fit & Proper Test OJK. (Nominasi) 2. Usulan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah; (Remunerasi) 3. Usulan Direksi terkait Penggantian Vice President Audit Internal & Corporate Secretary. (Nominasi)	Muhammad Mas'ud Suprajarto Candra Fajri Ananda Sumaryono
5	18 Agustus 2023	1. Usulan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan. (Nominasi) 2. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. 3. Review KPI Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud Suprajarto Candra Fajri Ananda Sumaryono
6.	28 Desember 2023	1. Pembahasan Pemberian Kompensasi Variabel Akhir Tahun 2023 Bagi Pengurus, Dewan Pengawasan dan Komite (Remunerasi)	Muhammad Mas'ud Candra Fajri Ananda Sumaryono

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Ketua	6	6	100%
Suprajarto	Anggota	6	5	83%
Candra Fajri Ananda	Anggota	6	5	83%
Sumaryono	Anggota	6	6	100%
Adhy Karyono*	Anggota	-	-	-
Revi Adiana S**	Anggota Ex-Officio	-	-	-
Slamet Purwanto***	Anggota Ex-Officio	-	-	-

* Masa jabatan berlaku efektif sejak ditetapkan lulus UKK OJK pada tanggal 24 November 2023

** Masa jabatan berakhir sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Masa jabatan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		



Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Suprajarto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Candra Fajri Ananda	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adhy Karyono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Slamet Purwanto	Anggota <i>Ex-Officio</i>	Corporate Value Internalization for culture Leaders	Surabaya, 14 Januari 2023	Kubik Leadership
		Pelatihan Learning Management System & E-Learning Application	Bandung, 15 Maret 2023	PT Bangun Kapasitas
		Program Refreshment/ Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	Surabaya, 12 Mei 2023	TD Consulting
		Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset " by Ignasius Jonan	Surabaya, 18 Oktober 2023	Internal Bank Jatim

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

PROGRAM KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan Sistem serta Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
- Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan
- Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi).
- Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan proses nominasi beberapa jabatan pengurus yang lowong antara lain untuk jabatan calon anggota Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan proses seleksi penerimaan calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim bersama Panitia Seleksi yang dibentuk melalui seleksi administrasi sampai dengan *assessment* dengan pihak ketiga (*independen*).
3. Komite Remunerasi dan Nominasi juga memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam penentuan pihak ketiga yang akan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana *assessment* dalam proses pemilihan calon anggota Komisaris dan Direksi Bank Jatim.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan penilaian/ evaluasi masing-masing kandidat Direksi yang telah disepakati untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diikutkan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Di samping itu dari sisi kegiatan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga melakukan *review* Pedoman Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi pengurus beserta fasilitasnya yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris.
6. Komite Remunerasi dan Nominasi juga melakukan beberapa rapat koordinasi terkait pelaksanaan tambahan penghasilan selama tahun 2023

Kebijakan Suksesi Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program Suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan. Kebijakan suksesi Direksi telah disajikan pada Sub Judul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) area penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, memastikan kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai serta berjalannya sistem kepatuhan dengan efektif, termasuk mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum dan telah dikinakan menjadi POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.

2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/05/DKM/KEP tanggal 28 Juni 2022, yang mengatur tentang:

1. Landasan Hukum
2. Tujuan Umum
3. Struktur Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Wewenang
7. Rapat Komite Pemantau Risiko
8. Masa Tugas Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan telaah terhadap kecukupan pengendalian intern Bank secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Melakukan pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan isi dan cakupan sekurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen risiko.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nilai komposit dan predikat hasil *self assessment* kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.
6. Menyampaikan revisi hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik Bank secara lengkap kepada regulator.
7. Melakukan telaah atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai Bank, rencana bisnis atau rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya terkait manajemen risiko.



8. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup penugasan Komite, dan melaporkan serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
9. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali, dan membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para Profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite.
4. Bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) serta unit kerja lain terkait tugas Komite.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2023 – 28 Desember 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Candra Fajri Ananda*	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 061/200/DIR/HCP/KEP tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Negara
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Niaga
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin*	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Catatan:

*Masa jabatan berakhir terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2023 – 28 Desember 2023

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Administrasi Negara
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Administrasi Negara
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Sumaryono

Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Muhammad Mas'ud

Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini



Sulam Andjar Rochim

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Malang
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Pasuruan, 03 Oktober 1962 61 tahun per 31 Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: - Universitas Brawijaya Malang Program Diploma Program Pendidikan Ahli Perusahaan (saat ini Program Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (1985) - Universitas Gajayana Malang (1990) - Pusat Pengembangan Manajemen dan Teknologi Terapan (PPMTT) Malang – Program Master Business in Administration (1992)
Pengalaman Kerja	: - Pemimpin Cabang di Bangkalan (2010 - 2011) - Pemimpin Cabang di Jakarta (2011 - 2012) - Pemimpin Sub Divisi Asset Liability Management and Financial Institution di Divisi Treasuri (2012 - 2015) - Pemimpin Sub Divisi di Divisi Perencanaan Strategis (2015 - 2016) - Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2016 - 2017) - Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal di Corporate Secretary (2017 - 2020) - Pemimpin Sub Divisi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola - Ketua Tim Penataan Kembali Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020 - 2021)
Sertifikasi	: - Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Dasar Hukum Pengangkatan	: Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP
Periode Jabatan	: Periode I
Masa Jabatan	: Tahun 2021 – 2025
Jabatan Rangkap	: Komisaris Utama BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) periode (2021-sekarang)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Sarjana di Bidang Ekonomi Akuntansi Master Business in Administration	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung

tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota non Komisaris dari Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Candra Fajri Ananda*	Sumaryono**	Muhammad Mas'ud	Syafruddin	Sulam Andjar Rochim	Moch. Arifin***
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023

** Diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
 - sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
 - dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
 - dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta unit kerja lain dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
- Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
 - musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.



AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	7 Februari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Profil Pegawai yang melakukan <i>fraud</i> periode tahun 2022 2. <i>Progress</i> penyelesaian Komite Bidang Hukuman Jabatan (KBHJ) terhadap kasus <i>fraud</i> yang belum terselesaikan	Candra Fajri Ananda Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
2	24 Februari 2023	Pembahasan meliputi: 1. Perkembangan NPL Bank Jatim 2. Proyeksi NPL Triwulan I 3. Penurunan Kualitas Kredit Periode Januari 2023 4. Data <i>Extracomtable</i> periode Januari 2023	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
3	24 Februari 2023	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham Pengendali periode Tahun 2022	Candra Fajri Ananda Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
4	29 Maret 2023	Pembahasan meliputi: 1. <i>Overview</i> Profil Risiko Periode Desember 2022 2. Profil Risiko Kredit Periode Februari 2023 3. <i>Expected Credit Loss Coverage</i> (ECL) terhadap <i>Non Performing Loan</i> (NPL) periode Februari 2023	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
5	7 Agustus 2023	Rapat Evaluasi Kinerja dengan Direktorat Manajemen Risiko	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
6	7 Agustus 2023	Rapat progres Penyelesaian Beberapa masalah Hukum dengan Direktorat Kepatuhan	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
7	7 November 2023	Pembahasan Profil Risiko dan mitigasi Risiko Hukum terhadap Kasus <i>Fraud</i> dengan Nominal Signifikan yang belum atau sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH)	Candra Fajri Ananda Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin
8	28 Desember 2023	Pembahasan Profil Risiko terkini dan mitigasi Risiko Kredit terhadap Debitur <i>Large Exposure</i>	Candra Fajri Ananda Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim Moch. Arifin

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Candra Fajri Ananda*	Ketua	8	8	100%
Sumaryono**	Ketua	8	7	87,5%
Muhammad Mas'ud	Anggota	8	5	62,5%
Sulam Andjar Rochim	Anggota	8	8	100%
Moch. Arifin***	Anggota	8	8	100%

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023

** Diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023



Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Candra Fajri Ananda*	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono**	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sulam Andjar Rochim	Anggota	The Special Batch of Corporate Governance-Leadership Program Sustainability for Long-Term Value Creation and ASEAN CG Scocard	Yogyakarta, 26 - 28 Juli 2023	Indonesian Institute Corporate Directorship (IICD)
		Seminar Nasional Economy Outlook 2024 Dalam Perkembangan Ekonomi Digital	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI
		Seminar Nasional Waspada Ancaman Cyber Crime di Tengah Upaya Transformasi Digital Banking.	Surabaya, 16 November 2023	FKDK – BPDSI
Moch. Arifin***	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit		

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023

** Diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 28 Desember 2023

*** Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Desember 2023

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2023

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2023, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).

- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola (Governansi Korporat) Perusahaan yang baik (GCG).

Triwulan II

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.



- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* diatas Rp100 milyar.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan III

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* diatas Rp100 milyar.
- Pemantauan dan Evaluasi *contingency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS).
- *Review* dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Produk Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KPA APU-PPT).

Triwulan IV

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- *Review Corplan*, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disetujui Dewan Komisaris.
- *Review* dan Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan (PAP), KPA dan *Standart Operating Procedure* (SOP) Penyertaan Modal.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2023

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada BPP Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Pelaksanaan Program kerja Komite Pemantau Risiko selama periode 2023 dapat dilaporkan secara singkat sebagai berikut:

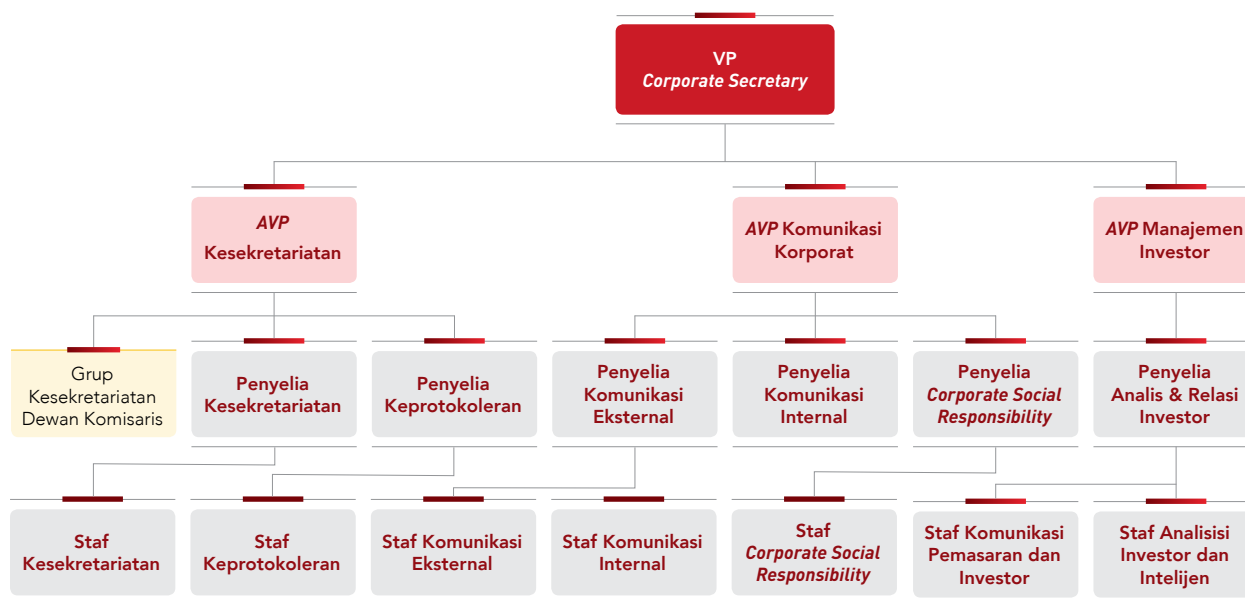
1. Melakukan pembahasan dalam rapat bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), dan unit kerja yang menjalankan fungsi pemberian kredit *large exposure* dengan cakupan meliputi:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank khususnya terhadap profil risiko moderat ke bawah untuk diidentifikasi, diukur potensi kerugian serta menetapkan alternatif mitigasi risikonya.
 - b. Evaluasi Tindak Lanjut putusan Komite Manajemen Risiko, serta pelaksanaan kebijakan manajemen risiko pada seluruh aktifitas dan produk Bank.
 - c. Evaluasi Pemantauan Kendala dan Pencapaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
2. Hubungan kerja Komite Pemantau Risiko dengan Direktorat dan Unit Kerja di Kantor Pusat meliputi sebagai berikut:
 - a. Diskusi interaktif bersama 3 (tiga) Direktorat terkait mitigasi risiko Hukum, Kepatuhan terhadap proses pengadaan dan finalisasi *draft* Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).
 - b. Kunjungan Kerja di 7 (tujuh) unit kerja setingkat Divisi di Kantor Pusat dalam rangka penguatan *second line* di Kantor Pusat serta menetapkan *alternative* mitigasi risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko strategik.
 - c. *Sharing moment* bersama Unit Kerja terkait di Kantor Pusat untuk diskusi dan memberikan pandangan serta mencari alternatif solusi terkait mitigasi risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik.
3. Membantu Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Aktif dengan melakukan Kunjungan ke Kantor Cabang yang teridentifikasi memiliki profil risiko moderat kebawah, sebagai berikut:
 - a. Kunjungan Kerja di 6 (enam) Kantor Cabang yang memiliki Profil Risiko moderat ke bawah meliputi Risiko Kredit, Operasional dan Hukum;
 - b. Melakukan sosialisasi Peningkatan *Security Awareness* dan Penguatan Pengendalian Internal guna penguatan *second line* pada penerapan konsep *three line of defence*, serta membangun budaya risiko di jaringan Kantor Cabang; dan
 - c. Diskusi interaktif bersama pelaku *fraud* dan pejabat cabang terkait pilihan alternatif mitigasi risiko.
4. Melakukan telaah serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait isu-isu penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
5. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
 - a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
 - b. Pembahasan *Standart Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment* pelaku *fraud*.
 - c. Evaluasi fungsi dan pelaksanaan tugas pada unit internal kontrol Kantor Cabang.
 - d. Revitalisasi fungsi Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan pengkinian Standar Operasional dan Prosedur (SOP) SAF.
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integritas rencana strategis Bank.



Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Kesekretariatan, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Vice President Corporate Secretary



Wioga Adhiarma Aji

VP Corporate Secretary

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1978 Usia 45 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002) • Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020)
Sertifikasi	: Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Level 4
Dasar Penunjukan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/057/DIR/HCP/KEP tanggal 20 Juli 2023.
Riwayat Pekerjaan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020), Pemimpin Divisi Umum (2022)

Program Peningkatan Kompetensi Corporate Secretary

Sepanjang tahun 2023, Corporate Secretary Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
In House	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Surabaya, 14 Januari 2023	Kubik <i>Leadership</i>
In House	Greeting And Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset" By Ignasius Jonan	Surabaya, 18 Oktober 2023	Ignasius Jonan
Public	Pelatihan Corporate Secretary	Yogyakarta, 21 Juli 2023	Patrari Jaya <i>Consultant</i>
In House	Program Refreshment /Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	12 Mei 2023 (<i>Online By Zoom Meeting</i>)	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan scan *barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker ber-*barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 4 (empat) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi Asset Management, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Melakukan Keikutsertaan *Public Expose Live* yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 November 2023

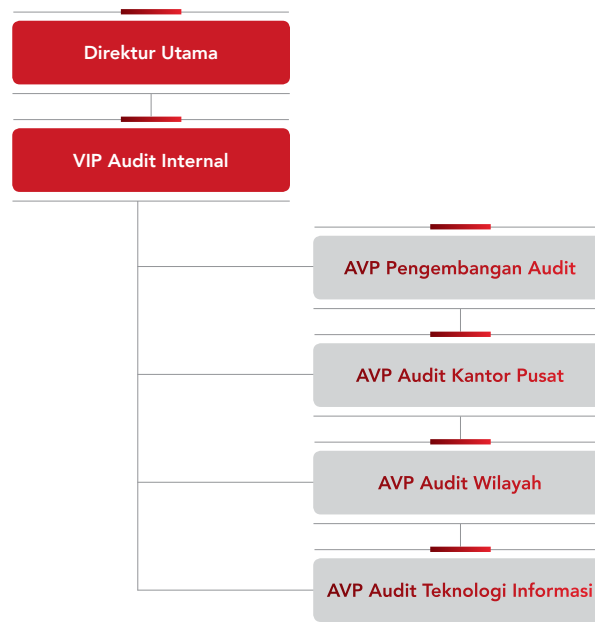


4. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
7. Menyelenggarakan media gathering sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
8. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
10. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
11. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
12. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sesuai dengan SK Direksi No.061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Vice President Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit *Intern* Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil Vice President Divisi Audit Internal



Wardhana Suryaatmaja

Vice President Divisi Audit Internal

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Jl. Sekawan Nyaman IV Blok C No.34A, Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Surabaya pada tahun 1967 Usia 56 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: • Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995). • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).
Dasar Penunjukan	: Sejak tahun 2023 menjabat Vice President Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/061/DIR/HCP/KEP tanggal 08 Agustus 2023.
Riwayat Pekerjaan	: • VP Divisi Audit Internal : 2023 sd. saat ini • VP Divisi Manajemen Risiko : 2020 – 2023 • Pemimpin Divisi Umum : 2019 - 2020 • Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan : 2018 • Pemimpin Divisi Teknologi Informasi : 2016 - 2017 • Pemimpin Sub Divisi Akuntansi : 2015 • Pjs Pemimpin Cabang Syariah Madiun : 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Sidoarjo : 2014 - 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Gresik : 2011 – 2013 • Penyelia Akuntansi Cabang Syariah Surabaya : 2009 – 2011 • Pengelola Teknologi Informasi Sub Divisi Operasional Divisi Pendukung Bisnis Syariah : 2007 – 2009 • Penyelia PN & Teller : 2004 – 2007 • Junior Programmer Divisi Teknologi Informasi : 1998 – 2004 • Staf Si Pengop. PDE Biro Adm. Keuangan : 1995 – 1998 • Staf Si Akuntansi Cabang Kediri : 1993 - 1995
Pelatihan / Sertifikasi	1. Pendidikan Kepala Sistem Pengawasan Internal Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) : 2023 2. Pelatihan dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 BSMR : 2022 3. Sosialisasi APU PPT dan Gratifikasi Direktorat Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Perbankan POLRI : 2019 4. Pelatihan Hukum Kepailitan Universitas Airlangga : 2016
Dasar Pengangkatan	Vice President Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 062/061/DIR/HCP/KEP Tanggal 8 Agustus 2023)

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Vice President Audit Internal

Vice President Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit Charter

Divisi Audit Internal telah memiliki *Internal Audit Charter* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.



- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan Fungsi, Kedudukan dalam Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Persyaratan Auditor Internal, Tanggung Jawab Vice President Audit Internal, Aktivitas Internal Audit dan Investigasi, Hubungan Divisi Audit Internal Dengan Auditor Eksternal atau Ahli Hukum, Kebijakan Pembatasan dan Masa Tunggu, Pelaporan, Pengembangan Audit, Risiko Audit, serta Perlindungan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

- Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
- Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
- Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas internal audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
- Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
- Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

- Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Komposisi personil Divisi Audit Internal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	36
Auditor	20
Pjs Senior Auditor	2
Senior Auditor	6
Pgs AVP Sub Divisi Audit	1
AVP Sub Divisi Audit	1
VP Divisi Audit Internal	1
TOTAL	67

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Tanggal Pelatihan/Sertifikasi	Jenis Pelatihan/Sertifikasi
1	13 – 14 Januari 2023	Pelatihan Taksir Gada
2	4 – 14 Mei 2023	Diklat Auditor Muda Batch 1 (ACCIA)
3	6 – 16 Juni 2023	Diklat Auditor Muda Batch 2 (ACCIA)
4	31 Juli – 10 Agustus 2023	Diklat Auditor Muda Batch 3 (ACCIA)
5	22 Mei – 6 Juni 2023	Diklat QIA Lanjutan
6	12 Juli 2023	Uji Kompetensi Sertifikasi PIA
7	8 – 13 Juli 2023	Pelatihan Perpajakan
8	21 – 23 Agustus 2023	Sertifikasi ITIL

No.	Tanggal Pelatihan/Sertifikasi	Jenis Pelatihan/Sertifikasi
9	23 – 25 Agustus 2023	Pelatihan Web Pentest
10	13 – 18 Oktober 2023	Sertifikasi Kepala SKAI (CPAM)
11	15 – 22 Desember 2023	Diklat Auditor Madya Batch 1 (CCIA)

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2023, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
BSMR 1	39
BSMR 2	19
BSMR 3	7
BSMR 4	1
Web Pen Test	2
QIA Lanjutan	3
CISA	1
ITIL	4
Treasury Dealer	1
Kredit	1
CCNA	1
CFA	3
ACCIA	62
PIA	1
CPAM	1
CEH	1

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Vice President Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).



2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Metode Audit

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode *Judgmental Sampling* dengan memperhatikan populasi dan historis permasalahan.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2023

Kegiatan Audit pada tahun 2023 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Intern (*Audit Plan*) Tahun 2023 No. 062/001/AUI/AUDITPLAN tanggal 24 Januari 2023. Telah dilaksanakan pemeriksaan General Audit di Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah, Audit Tematik, *Surprise Audit*, dan Audit Klarifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian cakupan audit meliputi aspek dan unsur segala kegiatan Bank.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat

yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara. Frekuensi rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Selama tahun 2023, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	Kick Off Audit Plan	1
2.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	4
3.	Rapat bersama Direksi : Exit Meeting Cabang dan Divisi	49

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

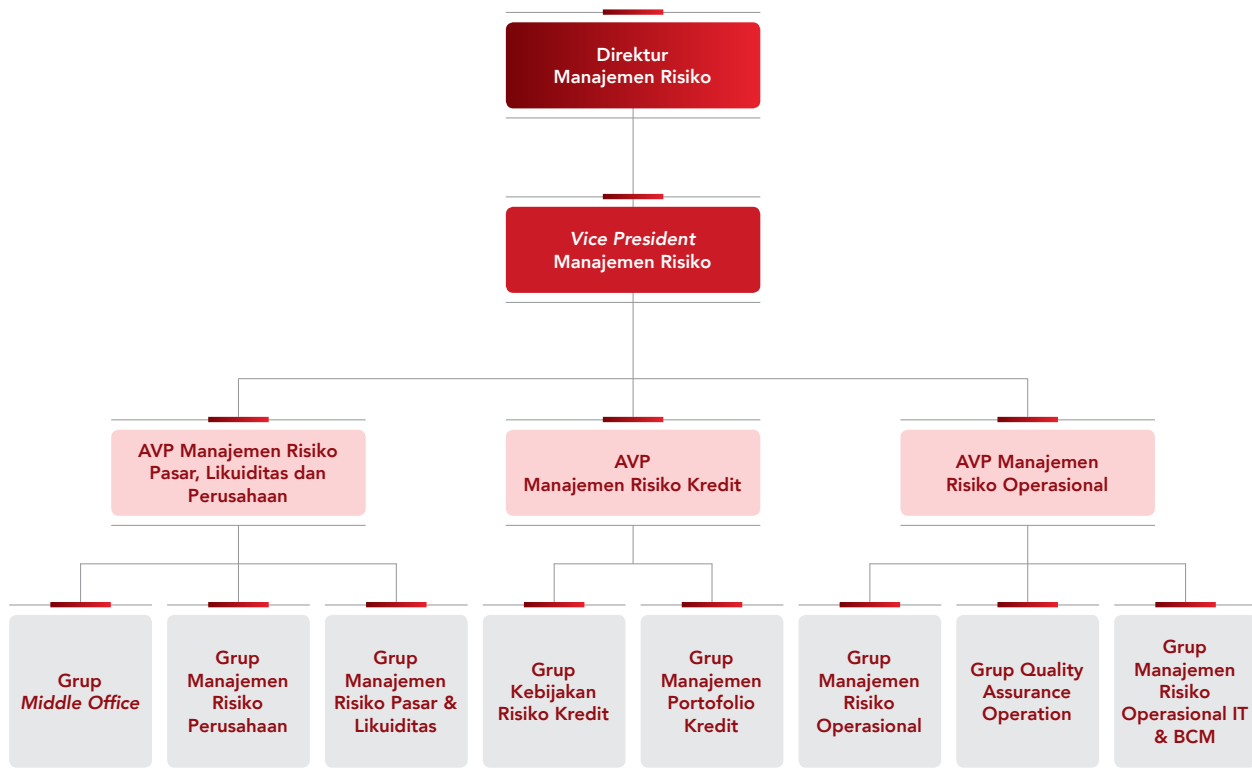
Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.
3. Pelaporan Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Vice President Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindakan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.
4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.
Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Grup Kebijakan Audit dan Quality Control Divisi Audit Internal, dan secara berkala berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut.

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko disajikan sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan
7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari risk taking unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.



Profil Vice President Manajemen Risiko

Vice President Manajemen Risiko pada tahun 2023 dijabat oleh Ibu Suci Isumiyarti.



Suci Isumiyarti

Profil Vice President Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Semarang pada tahun 1966. Usia 57 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: Sarjana Bahasa Perancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Riwayat Jabatan	: Bergabung di Bank Jatim tahun 1994, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pemimpin Cabang Kepanjen (2012), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021), Pemimpin Divisi Operasi (2022).
Sertifikasi	- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - Sekolah Staff dan Pimpinan bank (SESPI) Tahun 2021
Dasar Penunjukan	: Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Corporate Value Internalization For Culture Leaders	Januari 2023
2	Training Transaksi DNDF, OIS dan IRS	Maret 2023
3	Full Stack Data Analytics Program	April 2023
4	Perhitungan ATMR Risiko Pasar Sesuai SEOJK No. 23/Seojk.03/2022	April 2023
5	Value At Risk (Var) Measurement Limit Setting and Portofolio Management	Mei 2023
6	Analisa Pembiayaan, Admin Legal dan Management Collection	Juni 2023
7	Pendidikan dan Pelatihan Pengurusan Perijinan Usaha Penanaman Modal Berbasis Risiko	Juli 2023
8	Trade Finance	Juli 2023
9	Early Warning System	Juli 2023
10	Stress Testing on Market Risk & Liquidity Risk	Agustus 2023
11	Leadership and Problem Solving	Agustus 2023
12	Critical Point dan Strategi Anti Fraud	Agustus 2023
13	Facilitating Techniques and Customer Engagement	September 2023
14	Business Model Canvas	September 2023
15	Communication, Negotiation and Presentation Skills	September 2023

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
16	<i>Supply Chain Concept</i>	September 2023
17	Teknologi, Inovasi Perbankan, Keamanan dan Proteksi Data	September 2023
18	Pemahaman dan Fungsi Produk Dana, Manajemen Dana dan Investasi, Peran <i>Funding Officer</i>	Oktober 2023
19	APU PPT, Gratifikasi & Budaya Kepatuhan	Oktober 2023
20	Pengelolaan Valas dan <i>Banknotes</i> , ATM, EDC, dan ETPD	Oktober 2023
21	<i>Reward Punishment and Corporate Culture</i>	Oktober 2023
22	<i>Culture Transformation with Growth Mindset</i>	Oktober 2023

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Sertifikasi	Jabatan	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Direksi	5
		SEVP	2
		Vice President	9
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	SEVP	1
		Vice President	20
		Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	60
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	2
		Staff Setingkat	1
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	33
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	207
		Officer/Penyelia Setingkat	6
		Staff Setingkat	2
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	Komisaris	2
		Pemimpin Sub Divisi/Pemimpin Cabang Setingkat	2
		Senior/Pemimpin Cabang Pembantu Setingkat	106
		Officer/Penyelia Setingkat	740
		Staff Setingkat	23
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Officer/Penyelia Setingkat	85
		Staff Setingkat	187

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2023

Selama tahun 2023, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Selaras dengan kebijakan *rule making rule*, Divisi Manajemen Risiko berupaya memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku melalui penyusunan dan review kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
- Menyusun Kajian Risiko Produk/Aktivitas Baru maupun *Existing*.
- Melaksanakan Komite Manajemen Risiko.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Pihak Regulator.
- Menyusun *Stress Test*.
- Mereview metodologi dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan Pemantauan Aktivitas Manajemen Risiko.
- Melakukan review dan pengkinian Limit Risiko.
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.

11. Pemenuhan ketentuan regulasi terkait perubahan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional serta melaksanakan Uji Coba Perhitungan ATMR untuk risiko Pasar dengan menggunakan metode *standardized approach*.
12. Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik *Public Training* maupun *In House Training* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
13. Melaksanakan program penguatan budaya risiko dalam rangka meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko yang dihadapi di masing-masing unit kerjanya.
14. Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh *Quality Assurance Operations*.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/056/DIR/CSE/KEP tanggal 12 Juli 2023 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/003/DIR/PRS/SE tanggal 24 Februari 2023 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim-*Grand Design*, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Asset Liability Committee (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Kepegawaian
4. Komite Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee/ITSC)
5. Komite Kredit
 - a. Komite Implementasi Kredit
 - b. Komite Restrukturisasi Kredit
 - c. Komite Penyelesaian Kredit
 - d. Komite *Credit Line* kepada Korporasi
 - e. Komite *Term Loan Facility*
 - f. Komite Implementasi Pembiayaan
 - g. Komite Restrukturisasi Pembiayaan
 - h. Komite Penyelesaian Pembiayaan
 - i. Komite Hapus Buku Kredit
 - j. Komite Hapus Buku Pembiayaan
6. Komite Kebijakan Kredit
7. Komite Produk dan Jaringan:
 - a. Komite PJP Produk
 - b. Komite PJP Jaringan

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah mencabut Surat

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Terdapat pengaturan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 diantaranya bahwa hal-hal yang dilakukan selama masa transisi diantaranya mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia termasuk *transfer of knowledge* dan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Pemenuhan dan pengkinian ketentuan internal (KPA, SOP, Juknis, Uraian Jabatan dan ketentuan lainnya yang terkait).
3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (termasuk sistem informasi dan teknologi).

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Direksi Nomor 062/003/DIR/PRS/SE tanggal 24 Februari 2023 perihal Tahap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim-*Grand Design*, yang mengatur diantaranya:

1. Implementasi Struktur Organisasi *Grand Design* berlaku tanggal 30 April 2023. Dalam hal telah terdapat pemenuhan pegawai sebelum masa berlaku Struktur Organisasi *Grand Design*, maka struktur organisasi unit tersebut dapat dinyatakan berlaku;
2. Atas implemmentasi Struktur Organisasi *Grand Design* yang berdampak pada ketentuan internal untuk dilakukan pengkinian ketentuan internal sejak Surat Edaran Direksi tentang Struktur Organisasi-*Grand Design* ditetapkan sampai dengan tanggal struktur organisasi *grand design* diberlakukan;
3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Divisi pada ketentuan internal (KPA/SOP/Juknis) yang ada dinyatakan tetap berlaku. Apabila terdapat perubahan/perpindahan nomenklatur Divisi untuk disesuaikan dengan Direktur Bidang yang membidangi;
4. Dalam hal posisi SEVP belum terpenuhi sampai dengan berlakunya tanggal struktur organisasi *grand design*, akan mengacu pada SK Direksi No. 061/220/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Kewenangan Sementara dan Pembagian Tugas Senior Executive Vice President (SEVP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
5. Selama masa transisi sejak tahap pra-transisi sampai dengan berlakunya struktur organisasi *grand design*, maka wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Divisi pada ketentuan internal (KPA/SOP/Juknis) yang ada dinyatakan tetap berlaku. Apabila terdapat perubahan/perpindahan nomenklatur Divisi akan disesuaikan dengan Direktur Bidang yang membidangi;
6. Penyusunan dan penyelesaian uraian jabatan seluruh jabatan akan dilaksanakan secara *parallel* dengan penyesuaian ketentuan internal dengan tenggat waktu sampai dengan tanggal struktur organisasi *grand design* diberlakukan.



Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai

Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi asset maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Tresuri	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	- Direktur Selain Ketua & Ketua Pengganti - Seluruh VP selain undangan - Seluruh SEVP (<i>Senior Executive Vice President</i>) - Pemimpin Cabang Utama	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	- Direktur Kepatuhan - VP Divisi <i>Human Capital</i> - VP Divisi Umum - VP Divisi Audit Internal - VP Divisi Kepatuhan & Tata Kelola - VP Divisi Hukum - Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Cabang selain anggota, Konsultan)	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.
- Mereview struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan rencana bisnis bank dan limit risiko yang telah ditetapkan.
- Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- Melakukan kaji ulang/*review* terkait pricing suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan.
- Mengevaluasi, mengembangkan, dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
 - Risiko Likuiditas (*liquidity risk*).
 - Risiko Suku Bunga (*interest risk*).
 - Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).
- Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Nilai Tukar.
- Mereview dan menetapkan suku bunga pinjaman dan dana serta *list & term of condition*-nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi yang membidangi.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi *gap* beserta instrumennya.
- Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang.
- Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang.
- Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
- Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *asset liability management*.



PROFIL ANGGOTA ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Profil Anggota Asset Liability Committee (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (Asset & Liability Committee) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
1	30 Januari 2023	• List of Term & Condition Kredit Multiguna	Divisi Konsumer	3	Disetujui	95%
		• Program Agen Mikro	Divisi Kredit Mikro Ritel & Menengah		Disetujui	
		• List of Term & Condition Transaksi Valas	Divisi Treasury		Disetujui	
2	16 Februari 2023	• Suku bunga kredit Mikro Ritel & Menengah	Divisi Mikro Ritel & Menengah	2	Disetujui	100%
3	21 Maret 2023	• Review Suku Bunga Dasar Kredit	Divisi Treasury	2	Disetujui	95%
4	14 April 2023	• Suku Bunga Kredit Kendaraan Bermotor	Divisi Konsumer	5	Disetujui	91%
		• List of Term & Condition Program Kredit Properti				
		• List of Term & Condition Program Kredit Multiguna	Divisi Konsumer		Tidak Disetujui	
5	30 Mei 2023	• Suku Bunga Deposito (Rupiah & Valas)	Divisi Dana & Jasa	6	Disetujui	71%
		• List of Term & Condition BI Fast	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
		• List of Term & Condition API SNAP	Divisi Teknologi Informasi		Disetujui	
		• Suku Bunga Kredit Multiguna	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		• Penyesuaian Transfer Pricing	Divisi Treasury		Disetujui	
6	22 Juni 2023	• Special Nisbah Deposito Syariah	Divisi Syariah	1	Disetujui	71%
7	14 Juli 2023	• List of Term & Condition DPK Valas	Divisi International Banking	7	Disetujui	83%
		• Suku Bunga Kredit Jatim Ritel	Divisi Kredit Mikro Ritel & Menengah		Disetujui	
		• Suku Bunga Special Rate Deposito	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
		• List of Term & Condition Ketentuan Lain-Lain ALCO	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
		• Suku Bunga Kredit Properti	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
8	9 Agustus 2023	• Suku Bunga Kredit Properti	Divisi Bisnis Syariah	5	Disetujui	71%
		• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Ritel	Divisi Kredit Mikro Ritel & Menengah		Disetujui	
		• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Multiguna	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
9	13 September 2023	• Suku Bunga dan <i>List of Term & Condition</i> Term Loan Facility (TLF)	Divisi International Banking	6	Disetujui	87%
		• <i>List of Term & Condition</i> Trade Finance	Divisi International Banking		Disetujui	
10	10 Oktober 2023	• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Kendaraan Bermotor	Divisi Kredit Konsumer	7	Disetujui	87%
		• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Ritel & Menengah	Divisi Kredit Mikro Ritel & Program		Disetujui	
		• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Korporasi	Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi		Disetujui	
11	13 Oktober 2023	• <i>List of Term & Condition</i> Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer	5	Disetujui	93%
		• <i>List of Term & Condition</i> Dana Jasa	Divisi Dana Jasa		Disetujui	
12	8 November 2023	• <i>List of Term & Condition</i>	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	4	Disetujui	95%
		• Ujroh Pembiayaan emas ib barokah • <i>Margin dan List of Term & Condition</i> KUR	Divisi Bisnis Syariah		Disetujui	
13	14 November 2023	• Suku Bunga Khusus Debitur	Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	71%
14	1 Desember 2023	• Suku Bunga Khusus Deposito	Divisi Dana & Jasa	1	Disetujui	87%
15	7 Desember 2023	• Suku Bunga BPR Apex	Divisi Bisnis Syariah	4	Disetujui	83%
		• Suku Bunga & <i>List of Term & Condition</i> Kredit Cash Collateral	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		• <i>List of Term & Condition</i> DPK	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
		• <i>List of Term & Condition</i> Agen Jatim	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan		Disetujui	

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.



STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Vice President Manajemen Risiko	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Bidang	Mempunyai hak suara
	Direktur Kepatuhan	Tidak mempunyai hak suara
	Seluruh Senior Executive Vice President (SEVP)	Mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko perusahaan.

5. Menetapkan limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional termasuk limit yang berkaitan dengan bisnis maupun operasional lainnya.
6. Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
7. Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis serta tindak lanjut atas isu-isu tersebut yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko sebelumnya dan telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1.	31 Januari 2023	Hasil <i>self – assessment</i> periode Desember 2022: 1. Tingkat Kesehatan Bank 2. Profil Risiko Bank 3. Tata Kelola 4. Rentabilitas, dan Permodalan	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	86%
2.	10 Februari 2023	1. Review Limit Kewenangan <i>Settlement</i> terhadap Transaksi Melalui Estimasi 2. Pedoman Portofolio Kredit atau Pembiayaan: a. Pasar Sasaran; b. <i>Negative List</i> ; c. Rencana Pengembangan Daerah Jawa Timur.	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	71%

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
3.	4 Mei 2023	1. Dinamika Pasar Keuangan Global 2. Profil Risiko Bank Maret 2023 meliputi: a. <i>Progress Tindaklanjuti Komenko #01</i> b. Hasil <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Bank periode Maret 2023 c. <i>Risk Issue</i> tahun 2023 d. Hasil <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Cabang Periode Februari 2023	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	71%
4.	31 Mei 2023	1. <i>Review Limit Kewenangan Persetujuan & Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk</i> 2. <i>Review Limit Alih Pos (Switching) dan Pelampauan Anggaran</i> 3. <i>Risk Appetite Statement</i>	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	71%
5.	24 Oktober 2023	1. Laporan Profil Risiko Bank Periode September 2023 2. <i>Review Limit Kewenangan Settlement terhadap Transaksi Melalui Estimasi</i>	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	92%

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama	Memiliki suara
Anggota	Seluruh Direktur Bidang yang mendapatkan penunjukan dari Direktur Utama dan SEVP yang membawahi Divisi Human Capital	Memiliki suara
Sekretaris	VP Human Capital	Tidak Memiliki suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
 - Bidang Kebijakan
 - Bidang Manajemen Karir
 - Bidang Hukuman disiplin
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
 - Memastikan bahwa kebijakan pokok aktifitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).

- Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang Human Capital
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
 - Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2.
 - Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan SEVP tingkatan eselon 1.
 - Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggaran.



PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
1	03 Januari 2023	SIRKULER - Penyempurnaan Kebijakan Sistem Grading dan Remunerasi	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
2	06 Januari 2023	SIRKULER - Rekrutmen Pegawai Berpengalaman Setingkat Eselon 2	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
3	20 Januari 2023	SIRKULER - Persetujuan Pelaksanaan Rekrutmen Eselon 1	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
4	14 Februari 2023	SIRKULER - Penyempurnaan Kebijakan Perjalanan Dinas	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
5	22 Februari 2023	- Pemindahan Pejabat Eselon 1 & 2 - Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat SEVP	Divisi Human Capital	2	Disetujui	83%
6	24 Februari 2023	Pemindahan Pegawai Eselon 2	Divisi Human Capital	1	Disetujui	83%
7	10 Maret 2023	SIRKULER - Penyempurnaan Sistem Grading dan Remunerasi	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
8	10 Maret 2023	SIRKULER - Penyempurnaan SOP Punishment	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
9	20 Maret 2023	Hukuman Jabatan	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
10	28 Maret 2023	Pembahasan Hasil Wawancara Hasil SEVP	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
11	11 April 2023	KPI Vice President	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
12	31 Mei 2023	- Pemenuhan Jabatan Kosong Eselon 1 & 2 - Pemindahan Tugas	Divisi Human Capital	2	Disetujui	100%
13	14 Juni 2023	- Pemenuhan Jabatan Kosong Eselon 1 & 2 - Pemindahan Tugas	Divisi Human Capital	2	Disetujui	75%
14	04 Juli 2023	- Pemenuhan Jabatan Kosong Eselon 1 dan 2 - Perubahan SOP Mutasi & SOP KMK	Divisi Human Capital	2	Disetujui	75%
15	14 Juli 2023	Penyempurnaan SOP Car Allowance Program	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
16	07 Agustus 2023	Pemenuhan Jabatan Kosong Eselon 1 & 2	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
		Hukuman Jabatan		1	Dilaksanakan komite lanjutan tanggal 06 Oktober 2023	
17	06 Oktober 2023	Hukuman Jabatan	Divisi Human Capital	1	Dilaksanakan komite lanjutan tanggal 21 Desember 2023	75%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
18	01 November 2023	SIRKULER - SOP Total Reward	Divisi Human Capital	1	Disetujui	Sirkuler – 100%
19	21 Desember 2023	Hukuman Jabatan	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
		Hukuman Jabatan			Diagendakan komite lanjutan	
20	29 Desember 2023	- Pemenuhan Jabatan Kosong Eselon 2 - Pemindahan Tugas	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%

Information Technology Steering Committee

Peran dan fungsi *Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah:

- Information Technology Steering Committee* (ITSC) adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
- Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, ITSC berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur IT & Digital	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Vice President Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	1. Direktur Operasi 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. Direktur Mikro, Ritel dan Menengah 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Kepatuhan 6. <i>Corporate Secretary</i> 7. Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i> 8. Seluruh <i>Vice President</i> , Kecuali: a. Vice President Audit Intern b. Vice President Hukum c. Vice President Kepatuhan & APU PPT 9. Seluruh Pemimpin Unit	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	1. Vice President Audit Intern 2. Vice President Hukum 3. Vice President Kepatuhan & APU PPT	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

- Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.



- b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
 3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
 4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 5. Kesesuaian antara penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
 6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi bank pada sektor Teknologi.
 7. Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
 8. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi, pengukuran efektivitas, dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.
 9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

PROFIL ANGGOTA INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Profil Anggota *Information Technology Steering Committee* dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1	4 Agustus 2023	Progress dan Realisasi Rencana Bisnis Bank Direktorat IT dan Digital	Teknologi Informasi	1	Disetujui	81%
2	24 November 2023	a. Progress dan Realisasi Rencana Bisnis Bank Direktorat IT dan Digital. b. Pemaparan <i>RSTI 2024 – 2028 : Simplifying Customer Lives</i> – Ernst & Young (EY).	Teknologi Informasi	2	Disetujui	82%

KOMITE KREDIT

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

1. Struktur Keanggotaan Implementasi Kredit

Kategori	Komite Implementasi Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

Kategori	Komite Implementasi Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services*</i> 2. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)
 **) Apabila direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit A3

2. Struktur Keanggotaan Restrukturisasi Kredit

Kategori	Komite Restrukturisasi Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services*</i> 2. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3) untuk restrukturisasi kredit
 **) Apabila Direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit (A3) untuk restrukturisasi kredit

1) Struktur Keanggotaan Penyelesaian Kredit

Kategori	Komite Penyelesaian Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

Kategori	Komite Penyelesaian Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> * 2. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ SEVP Consumer Banking	4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 6. SEVP Corporate Transformation/ SEVP Network & Services

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, Treasury & Global Services menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)

**) Apabila direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit (A3)

2) Struktur Keanggotaan **Credit Line** kepada Korporasi

Kategori	Komite Credit Line		Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok Fungsi <i>Bussiness Risk</i>
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama (berfungsi pula sebagai Direktur yang membidangi Korporasi) 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Manajemen Risiko
		A2	1. Direktur yang membidangi Korporasi 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Manajemen Risiko
		A3	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	VP Analisis Risiko Kredit

3) Struktur Keanggotaan **Term Loan Facility (TLF)**

Kategori	Komite TLF		Kelompok Fungsi <i>Bussiness</i>	Kelompok Fungsi <i>Bussiness Risk</i>
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Utama (berfungsi pula sebagai Direktur yang membidangi Korporasi) 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Manajemen Risiko
		A2	1. Direktur yang membidangi Korporasi 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Manajemen Risiko
		A3	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	VP Analisis Risiko Kredit

4) Struktur Keanggotaan Implementasi Pembiayaan

Kategori	Komite Implementasi Pembiayaan		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP Corporate Transformation/ SEVP Network & Services
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP Corporate Transformation/ SEVP Network & Services
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> * 2. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP Corporate Transformation/ SEVP Network & Services

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, Treasury & Global Services menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)

**) Apabila Direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit (A3)



5) Struktur Keanggotaan Restrukturisasi Pembiayaan

Kategori	Komite Restrukturisasi Pembiayaan		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation</i> 6. SEVP <i>Network & Services</i>
		A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> * 2. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3) untuk restrukturisasi pembiayaan

**) Apabila Direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit (A3) untuk restrukturisasi pembiayaan

6) Struktur Keanggotaan Penyelesaian Pembiayaan

Kategori	Komite Penyelesaian Pembiayaan		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> * 2. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, *Treasury & Global Services* menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)

**) Apabila Direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit (A3)

7) Struktur Keanggotaan Hapus Buku Kredit

Kategori	Komite Hapus Buku Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/SEVP Network & Services</i>

Kategori	Komite Hapus Buku Kredit		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services*</i> 2. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ SEVP <i>Consumer Banking</i>	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, Treasury & Global Services menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)

**) Apabila Direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit A3

8) Struktur Keanggotaan Hapus Buku Pembiayaan

Kategori	Komite Hapus Buku Pembiayaan		Kelompok Fungsi Bisnis	Kelompok Fungsi Risiko
A	DIREKSI	A1	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan 4. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operasi 4. Direktur IT & Digital 5. SEVP <i>Corporate Transformation/SEVP Network & Services</i>
		A2	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi 3. Direktur IT & Digital 4. SEVP <i>Corporate Transformation/SEVP Network & Services</i>
		A3	1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah/Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services*</i> 2. SEVP Usaha Syariah	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Operasi/Direktur IT & Digital** 3. SEVP <i>Corporate Transformation/ SEVP Network & Services</i>

*) Apabila Direktur Mikro, Ritel & Menengah berhalangan, maka Direktur Keuangan, Treasury & Global Services menjadi pengganti dalam anggota fungsi bisnis Komite Kredit (A3)

**) Apabila direktur Operasi berhalangan, maka Direktur IT & Digital menjadi pengganti dalam anggota fungsi risiko Komite Kredit A3

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT DAN PEMBIAYAAN

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/ pengusul yang terkait namun tidak terbatas pada:
 - Debitur-debitur besar.
 - Industri yang spesifik.
- Melakukan koordinasi dengan *asset & liabilities committee* (ALCO) dalam hal aspek penyediaan dana kredit/ pembiayaan dan penyesuaian suku bunga/margin/bagi hasil kredit/pembiayaan apabila diperlukan;
- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit/ pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan hapus buku kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Memberikan persetujuan atau penolakan *Credit Line* atau *Term Loan Facility* (TLF) sesuai dengan batas wewenang kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan rencana kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tanggung Jawab Komite Kredit dan Pembiayaan meliputi:

- Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama.
- Menolak permintaan dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.



Keabsahan dan Pengambilan Keputusan Komite Kredit:

1. Komite dianggap Sah apabila dihadiri seluruh anggota Komite Kredit sesuai kategori dan jenis Komite Kredit.
2. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui mekanisme yang ditempuh musyawarah untuk mencapai mufakat dari pemilik hak suara (kolektif kolegal).

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT DAN PEMBIAYAAN

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	5 Januari 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
2.	9 Januari 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
3.	8 Februari 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
4.	16 Februari 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
5.	28 Februari 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
6.	8 Maret 2023					
7.	13 Maret 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
8.	21 Maret 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
9.	30 Maret 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
10.	5 April 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	2	Setuju	100%
11.	12 April 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
12.	12 April 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
13.	14 April 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
14.	11 Mei 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
15.	26 Mei 2023	Implementasi Kredit	Kredit Ritel & Menengah	1	Setuju	100%
16.	7 Juni 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
17.	14 Juni 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
18.	26 Juni 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
19.	16 November 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
20.	17 November 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
21.	17 November 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
22.	22 November 2023					
23.	1 Desember 2023	Implementasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
24.	28 Desember 2023	Implementasi Kredit	Kredit Konsumer	1	Setuju	100%

Komite Restrukturisasi Kredit

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	16 Januari 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	2	Setuju	100%
2.	27 Maret 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
3.	14 April 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
4.	14 April 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	1	Setuju	100%
5.	26 September 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	2	Setuju	100%
6.	13 Desember 2023	Restrukturisasi Kredit	Kredit Komersial Korporasi & Sindikasi	2	Setuju	100%

Komite Term Loan Facility (TLF)

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran Komite
1.	21 Desember 2023	Term Loan Facility	International Bankint	1	Setuju	100%

Komite Implementasi Pembiayaan

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran Komite
1	03 Maret 2023	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A1 - Disetujui dengan catatan	100%
2	20 Maret 2023	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A3 - Disetujui dengan catatan	100%
3	02 Agustus 2023	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A3 - Disetujui dengan catatan	100%
4	22 September 2023	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A1 - Disetujui dengan catatan	100%
5	14 Desember 2023	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A1 - Disetujui dengan catatan	100%

Komite Restrukturisasi Pembiayaan

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran Komite
1	14 April 2023	Komite Restrukturisasi Pembiayaan Sindikasi	Divisi Bisnis Syariah	1	Komite A1 - Disetujui dengan catatan	100%

Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran Komite
1	26 Juni 2023	Komite Kredit (A2) untuk Hapus Kredit/ Pembiayaan Periode Bulan Juni 2023	Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit	1	Disetujui	100%
2	27 Desember 2023	Komite Kredit (A2) Untuk Hapus Buku Kredit /Pembiayaan Periode Bulan Desember 2023	Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit	1	Disetujui dengan Catatan	100%



KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Perkreditan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Kebijakan Pembiayaan

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai Hak Suara
Ketua Pengganti	1. Direktur Komersial & Korporasi, atau 2. Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	Divisi Operasi	Tidak Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	1. Direksi - Direktur Konsumer, Ritel & Usaha Syariah - Direktur Keuangan - Direktur TI & Operasi - Direktur Risiko Bisnis 2. Divisi - Divisi Risiko Bisnis - Divisi Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi - Divisi Kredit Konsumer - Divisi Kredit Mikro, Ritel, & Program - Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja - Divisi Tresuri - Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	1. Direksi - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Divisi - Divisi Kepatuhan & Tata Kelola - Divisi Audit Intern - Divisi Hukum - Divisi <i>Human Capital</i> - Divisi Manajemen Risiko Perusahaan	Tidak Mempunyai Hak Suara

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Tugas dari Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan antara lain:

- Membantu penyusunan kebijakan dan strategi perkreditan atau pembiayaan Bank yang diusulkan oleh masing-masing Divisi Kredit atau Pembiayaan, sebelum ditetapkan dalam Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan;
- Membantu proses *review* perubahan pedoman pelaksanaan bidang perkreditan atau pembiayaan dengan berdasarkan pada perubahan regulasi dari pihak eksternal seperti regulator perbankan dan internal;
- Memberikan saran atas hal-hal yang menjadi dasar dalam pengembangan dan perubahan buku pedoman pelaksanaan di bidang perkreditan atau pembiayaan;
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang terkait berikut :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal terkait penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan.

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yaitu:

- Memberikan usulan/masukan kepada Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman;
- Memberikan usulan/masukan kepada Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dalam rangka monitoring, evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan pelaksanaan produk yang telah berjalan;
- Memberikan usulan/masukan kepada Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dalam penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti:
 - Keputusan pengembangan produk perkreditan atau pembiayaan terkait kebutuhan bisnis yang tidak tercantum di dalam rencana bisnis Bank;
 - Pengambilan posisi/eksposur risiko yang diambil akibat pelaksanaan produk perkreditan atau pembiayaan.



PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1.	14 Juni 2023	1. Review Limit Kewenangan Persetujuan kredit atau Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai dengan Komite atau Tanpa Komite 2. Review Limit Kewenangan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai 3. <i>Review Limit on The Spot (OTS)</i> pada Proses Kredit atau Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	3	Setuju	100%

Komite Produk dan Jaringan

KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK

Jabatan	Diisi oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	a. Direktur Operasi; atau b. Direktur IT dan Digital	Mempunyai hak suara
Sekretaris	a. VP Pengembangan Produk; atau b. VP Digital Banking	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	a. Direktur Bidang; b. Direktur Kepatuhan; dan c. SEVP Terkait	a. Mempunyai hak suara b. Tidak mempunyai hak suara c. Mempunyai hak suara
Undangan	a. VP Terkait; dan b. AVP Unit Kerja Terkait	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK

Tugas dan Wewenang

1. Membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik *digital* maupun *non digital* dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan.
2. Melakukan *monitoring*, evaluasi hasil kinerja produk, dan membuat keputusan keberlangsungan produk atas rekomendasi inisiator (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup).
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis terkait pengembangan produk.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk secara profesional, optimal, akurat, aman; dan bersaing.
2. Memastikan bahwa pengembangan produk beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK

Sepanjang tahun 2023 belum terdapat pelaksanaan rapat komite produk dan berproses dalam pengkinian ketentuan internal atas perubahan Struktur Organisasi *grand design*. Pengkinian SOP Komite Produk telah dilakukan dan diterbitkan SOP Komite Produk dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/03/80/DIR/PGP/KEP Tanggal 29 Desember 2023.





KOMITE JARINGAN

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentu kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE JARINGAN

Jabatan	Diisi oleh	Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua 1	Direktur Operasi	Mempunyai hak suara
Ketua 2	SEVP Network & Services	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Manajemen Jaringan & Layanan	Mempunyai hak suara
Wakil Sekretaris	AVP Manajemen Cabang	Mempunyai hak suara
Anggota	1. VP Umum 2. VP Human Capital 3. VP Manajemen Risiko Perusahaan	Mempunyai hak suara dan dapat diwakilkan
Undangan	Pemimpin Cabang terkait (<i>end user</i>)	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE JARINGAN

Tugas Tim Pengembangan Jaringan Kantor meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan dan memberikan arahan untuk melakukan optimalisasi dan efektifitas kinerja jaringan;
- Mengarahkan dan mengevaluasi strategi pengembangan jaringan;
- Memberikan pendapat atau isu-isu terbaru tentang pengembangan jaringan;
- Memantau hasil evaluasi dan usulan perubahan status dan/atau penutupan jaringan kantor;
- Memberikan rekomendasi:
 - jenis jaringan yang layak untuk dibuka;
 - penarikan/pemindahan *human capital* pada rencana penurunan status dan/atau penutupan jaringan kantor;
 - kesiapan/ketersediaan pengisian dan penempatan *human capital* pada rencana pengembangan jaringan kantor;
- Memantau hasil optimalisasi kinerja jaringan;
- Memantau hasil evaluasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan;
- Memberikan rekomendasi perubahan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan.

Wewenang Tim Pengembangan Jaringan Kantor adalah:

- Menetapkan dan memutuskan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan yang disesuaikan kebutuhan;
- Memutus jenis dan jumlah jaringan yang masuk dalam Rencana Bisnis Bank;
- Memutuskan perubahan status/penutupan jaringan kantor berdasarkan evaluasi dari unit terkait;

- Menetapkan jumlah investasi dan anggaran biaya pembukaan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan;
- Menentukan batas pembagian area dan struktur organisasi di jaringan;
- Memutuskan hasil optimalisasi kinerja jaringan;
- Memutuskan kelas cabang dan cabang pembantu hasil klasifikasi jaringan;
- Menentukan sistem klasifikasi dan hasil pemetaan akhir.

Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab atas terlaksananya strategi pengembangan jaringan;
- Bertanggung jawab atas implementasi klasifikasi jaringan.
- Bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan pengembangan jaringan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE JARINGAN

Profil Anggota Komite Produk, Jaringan dan Prosedur Bidang Jaringan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE JARINGAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.



PELAKSANAAN TUGAS KOMITE JARINGAN

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran Komite
1	5 April 2023	Pembukaan dan Relokasi Jaringan	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	10	Disetujui	100%
2	5 Juli 2023	Pembukaan Jaringan	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	1	Disetujui	100%
3	21 Juli 2023	Peningkatan status KF menjadi KCP dan Relokasi Jaringan	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	4	Disetujui	100%

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - Bank Mengalami Kerugian.
Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
 - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.

Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 April 2023 berkaitan dengan kebijakan Total *Reward* bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Perseroan dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. **Remunerasi yang bersifat tetap**
 - Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, Fasilitas/Biaya Kesehatan, Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai Remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.
2. **Remunerasi yang bersifat variabel**

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain *tantiem* dan Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja. Remunerasi berupa *Tantiem* diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan Dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, Tunjangan Lembur, Tunjangan Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Tunjangan *Motor Allowance Program* (MAP), Tunjangan Struktural, Insentif, Bonus Kinerja dan Jasa Produksi. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, *tantiem* dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa *tantiem* dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:



1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif.
 - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
 - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
 - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer groupnya*. Kecukupan permodalan Perseroan meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
 - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
 - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Perseroan jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Wilis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.671 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi Material Risk Takers

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang

Shares Option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,25 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	2,38 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	1,90 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	12,29 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	4 orang	251.100.000,-
Direksi	6 orang	600.000.000,-

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan	Jumlah Pegawai	Pesangon (dalam jutaan Rupiah)
Diberhentikan	26	237.395.805,24
Meninggal	7	1.696.250.978,86
Pensiun	90	33.666.634.657,75
Grand Total	123	35.600.281.441,85

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	505.546.323,79
Direksi	6 orang	887.290.106,65

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Direksi	5 orang	941.116.263,63

Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	15.129.704.673,37
Direksi	7 orang	33.962.469.135,19

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplicit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	1.653.519.230,88	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	1.363.714.404,01	-	-	-
Jumlah	3.017.233.634,89	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT



Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS. Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2023 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 062/137/DIR/AMK/PKS dan Nomor Pihak Kedua E095.XI/ADH/2023 Tanggal 22 November 2023 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar RP. 1.175.000.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Surat Pernyataan Independensi kepada Bank Jatim;
2. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;

3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berupa:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Publikasi;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
 - g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Penyampaian informasi tersebut disajikan Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Bilingual) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) hardcopy termasuk *softcopy*-nya.
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
6. Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
7. KAP KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Ary Daniel H	Periode ke 2	1.175
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485
2019	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Gideon	Periode ke 2	960
2018	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Gideon	Periode ke 1	940
2017	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	570
2016	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 2	Rita Susilowati	Periode ke 2	840
2015	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil	Periode ke 1	Rita Susilowati	Periode ke 1	900
2014	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 5	Sinarta	Periode ke 3	980
2013	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 4	Sinarta	Periode ke 2	900
2012	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 3	Sinarta	Periode ke 1	675
2011	Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Periode ke 2	Drs. Hari Purwantono	Periode ke 2	795

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko



3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian – Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023 (Kaji Ulang Cawu II 2023). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Fungsional berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat General Audit.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations*

Process serta *Security Management*. Selain itu Sebagai kewajiban pemenuhan kepada pihak regulator dan otoritas terhadap sertifikasi dilakukan pemeriksaan tematik Standar Nasional Indonesia ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan *Core Banking System*, Layanan JConnet *Internet Banking*, JConnet *Mobile Banking* dan JConnet *SMS Banking* Bank Jatim dengan ruang lingkup pemeriksaan penilaian (*gap analysis*) terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank dengan Standar Nasional Indonesia ISO.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

- Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan Bank Jatim melalui Portal Kepatuhan.
- Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi analisa kredit dan petugas administrasi dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas analis kredit bawahan dari penyelia kredit sedangkan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan penyelia Administrasi & Legal Bisnis.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). Mekanisme pemeriksaan *pasif/off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.



Kesesuaian dengan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring*

yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.
5. Pihak-pihak Eksternal
Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja

operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2023 cukup memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko

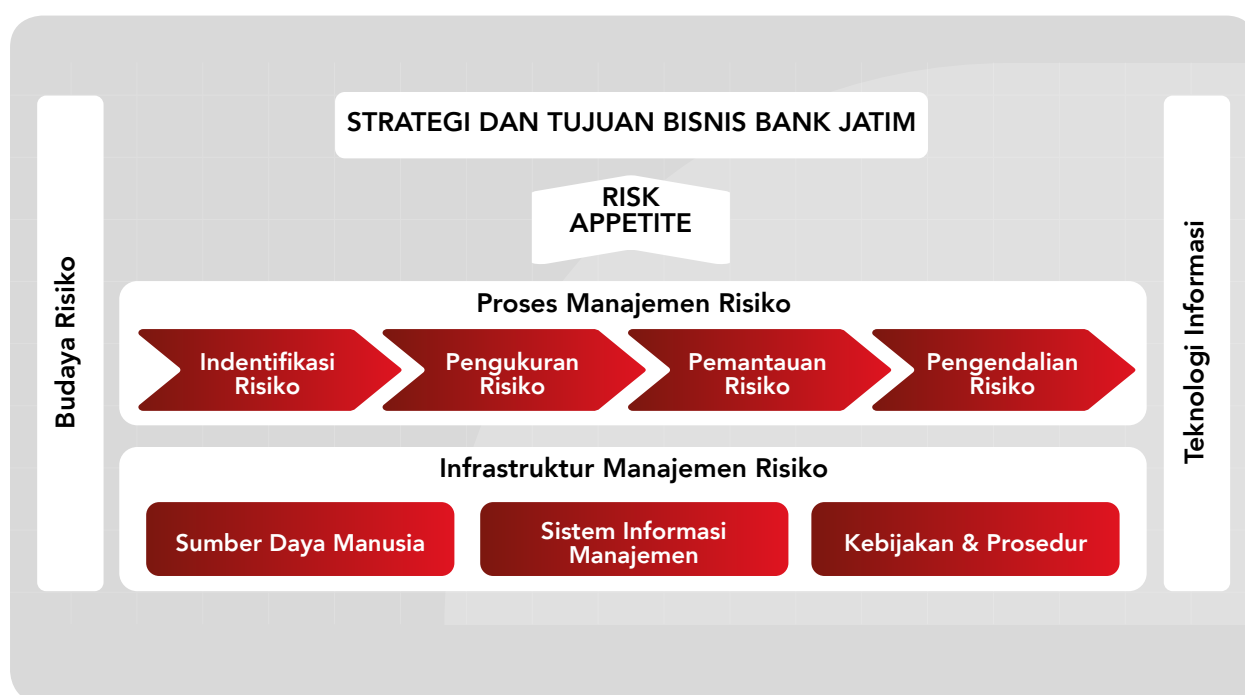
Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan rerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Rerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam rerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam rerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Rerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko "*top down strategic*" dan "*bottom up tactical*" yang saling melengkapi. Komponen utama dalam rerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:





1. Budaya Risiko

Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Filosofi manajemen risiko Bank melekat pada pendekatan *Three Lines of Defense* dimana risiko dikelola pada saat aktivitas pengambilan risiko. Terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas atas kepemilikan risiko antar bagian di Bank.

2. Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.

3. Sumber Daya Manusia

Memiliki SDM dengan kemampuan dan keahlian yang sesuai merupakan kunci untuk memastikan bahwa ERM Framework berfungsi dengan baik.

4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen yang memadai merupakan pendukung aktivitas manajemen risiko. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko, Bank harus memiliki sistem informasi yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen serta dapat menghasilkan laporan yang digunakan untuk pemantauan risiko.

5. Kebijakan dan Prosedur

Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai dasar dari adanya suatu pandangan yang sama di antara seluruh unit organisasi dalam aktivitas pengambilan risiko sehari-hari.

6. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat

a. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.

Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assessment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan

suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktivitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.

c. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko

Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite*.

d. Pemantauan dan pelaporan

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite* Bank.

7. Risk Appetite

Risk Appetite adalah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen Bank dalam rangka mencapai tujuan strategis dan bisnis. *Risk Appetite* bersifat dinamis, berubah sesuai dengan perubahan prioritas bisnis Bank, kemampuan manajemen risiko dan kondisi eksternal.

Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana operasional bisnis Bank serta cukup jelas dan detail untuk menjadi pedoman karyawan manajemen senior dan karyawan *front line* di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Proses penetapan *Risk Appetite* dilakukan secara berkala setiap tahun.

8. Strategi dan Tujuan Bisnis

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, manajemen Bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta risiko yang melekat pada Bank. Dalam pengelolaan manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang kuat yang berfungsi meningkatkan mekanisme *four eyes principle* dan transparansi dalam seluruh proses manajemen risiko, sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan ERM Framework dapat berjalan dengan baik

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Bank Jatim *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko secara periodik. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris digunakan sebagai acuan oleh Direksi untuk menjalankan tujuan Bank dan telah mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap permodalan, menjabarkan serta mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh Satuan Kerja terkait serta melakukan evaluasi implementasinya.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank.
2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan kondisi Bank

serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan.

4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko.
8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
9. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal.
10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada:
 - a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat.
 - b. Dokumen makalah/*handout* atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta.
11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan *risk taker unit*.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional.



Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Penetapan limit tersebut terdiri dari limit secara keseluruhan (*exposure limit*), limit individual (*individual limit*), limit counterparty (*counterparty limit*), limit per jenis risiko dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:

- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - Faktor risiko secara individual.
 - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
 - d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
 - f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan mereview hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
- h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan peningkatan serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk

memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.

- j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.



Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut

Risiko Kredit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Pengelolaan risiko kredit di Bank Jatim sampai bulan Desember 2023 telah diupayakan secara optimal yang tercermin dari peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Desember 2023 adalah *Moderate*. Adapun kualitas penerapan manajemen risiko kredit terkait pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga penilaian umum terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kredit adalah *Fair*, sehingga peringkat komposit untuk risiko kredit adalah peringkat 3.

Dari sisi kebijakan, Bank Jatim selalu melakukan *review* dan memperbaharui penetapan limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Dalam proses limit penyediaan dana mengikuti perkembangan bisnis dan organisasi. Divisi Manajemen Risiko memberikan *review* dan penentuan level risiko dalam penentuan fasilitas transaksi (*Limit Counterparty*), serta pemantauan atas *Risk Appetite* dan Limit Risiko Kredit secara rutin. Dalam hal penguatan manajemen risiko kredit, bank juga membentuk unit/Divisi Analis Risiko Kredit yang secara khusus berkonsentrasi dalam bidang perkreditan.

Potensi Risiko

Potensi Risiko atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit, maupun atas aktivitas *placement* ataupun pembelian surat berharga pada perusahaan yang dinilai kurang bonafide sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian bank karena harus membentuk CKPN, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumber daya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit. Selain itu kerugian atas kredit juga dapat diakibatkan karena kegagalan dalam proses *settlement*.

Mitigasi Risiko Kredit

Dalam upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko kredit adalah meningkatkan pengetahuan analis kredit di bidang perkreditan agar lebih profesional dan menguasai bidang tugasnya dengan baik, perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang perkreditan, pembinaan dan *monitoring* atas kredit yang telah direalisasikan, upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya, peningkatan fungsi supervisi kredit, menerapkan prinsip *Prudential Banking* dalam ekspansi kredit, melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki, dan juga analisa *Counterparty* secara cermat dan baik.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan risiko pasar Bank Jatim yang tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko pasar pada bulan Desember 2023 adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Satisfactory* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit yaitu peringkat 2.

Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko pasar dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya perubahan suku bunga Bank yang berdampak pada portofolio Bank (selisih terhadap portofolio *Rate Sensitif Asset/RSA & Rate Sensitif Liability/RSL*), perubahan nilai tukar atas valuta asing. Bank mengalami kerugian atas selisih nilai tukar yang timbul, perubahan harga atas portofolio Bank, perubahan rating ataupun performa keuangan obligor yaitu turunnya nilai suatu portofolio Bank (atas surat berharga ataupun obligasi), kondisi pasar yang tidak efisien sehingga mempengaruhi akurasi penilaian dalam bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian saat itu (baik pada pasar uang maupun pasar saham), serta kerugian lain yang ditimbulkan oleh situasi politik yang memburuk.

Mitigasi Risiko Pasar

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko pasar adalah penerapan *floating interest rate*, *monitoring* PDN sesuai ketentuan regulator, analisa *counterparty* dengan baik dan akurat, pertimbangan atas rating *counterparty*, penetapan dan *monitoring* atas *Limit Dealer*, *Stop Loss* dan *Cut Loss*, pemantauan atas transaksi *off market*, penyediaan yang baik atas data *historical* dan potensi pasar, penerapan analisis teknikal dan fundamental pada transaksi

yang terekspos risiko pasar, dan juga implementasi atas Limit IRRBB atas *Asset* maupun *Liability* yang sensitif terhadap perubahan suku bunga (RSA & RSL).

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko likuiditas pada bulan Desember 2023 adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Satisfactory* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko likuiditas.

Potensi Risiko

Potensi Risiko yang timbul akibat risiko likuiditas dapat terjadi atas hal-hal yang antara lain adanya penarikan besar-besaran di luar *behavior* perusahaan, adanya *rush* pengaruh faktor eksternal, kegiatan *funding* atas dana pihak ketiga yang mengalami stagnasi, pembayaran angsuran atas debitur kredit yang tidak lancar atau macet, *gap liquidity* dan *maturity profile* yang kurang baik sehingga membawa kecenderungan pada penyediaan dana mahal, terbatas atau berkurangnya potensi untuk ekspansi kredit, ataupun dampak kerugian bank lainnya yang lebih luas, yang timbul akibat risiko reputasi.

Mitigasi Risiko Likuiditas

Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap potensi risiko atas risiko likuiditas adalah melaksanakan antisipasi dan *monitoring* atas penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai atas semua dana masuk baik melalui *incoming* transfer maupun setoran tunai nasabah (*behavior* nasabah), membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana terbesar yang pernah terjadi, meningkatkan akses kepada sumber-sumber pendanaan, meningkatkan dan menjaga stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain menjaga *primary reserves*, Bank Jatim juga menjaga *secondary reserves* dan membuat proyeksi arus kas terinci dalam mata uang rupiah terhadap gejolak tingkat bunga. Melakukan *management gap* sehingga terhindar atau meminimumkan gejolak tingkat bunga sehingga dapat dicapai keuntungan stabil dan berkembang. Bank juga senantiasa meningkatkan jumlah *Counterparty* yang baik dan menjalin hubungan yang baik terutama dalam bidang penyediaan likuiditas serta senantiasa menyusun berbagai bentuk *Contingency Funding Plan* (CFP) pada berbagai situasi baik normal maupun krisis.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional secara inheren/melekat pada setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank. Dalam mengukur risiko operasional, Bank melakukan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (PID). Risiko operasional merupakan kategori risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan Bank yang terus tumbuh dan menjadi lebih kompleks dan beragam. Agar aktivitas fungsional, produk atau layanan Bank dapat berjalan dengan optimal, maka penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara efektif. Selanjutnya Unit Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko operasional adalah melalui penentuan strategi mitigasi yang paling tepat guna mendapatkan keseimbangan yang optimal antara pemaparan risiko operasional, efektivitas dari mekanisme kontrol serta tingkat risiko yang diterima oleh Bank. Adapun pengelolaan risiko operasional didukung dengan keterlibatan:

1. Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)
Direksi menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan risiko antara lain penetapan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko, limit bisnis dan limit operasional dan pemantauan profil risiko.
2. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional
Satuan kerja manajemen risiko operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan perangkat kerja manajemen risiko operasional.
3. Unit Kerja Pemilik Risiko (*Risk Taking Unit*)
Unit kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan risiko operasional dan memastikan kontrol pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan.
4. Unit kerja Kepatuhan
Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan pada aturan internal dan eksternal.
5. Unit Kerja Audit Internal
Unit kerja yang melaksanakan efektivitas internal kontrol pada aktivitas Bank.

Sampai bulan Desember 2023, pengelolaan risiko operasional Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko operasional adalah berpredikat *Moderate* untuk risiko inheren dan *Fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 3 untuk risiko operasional.



Potensi Risiko

Dengan adanya eksposur risiko operasional maka dapat meningkatkan eksposur risiko lainnya diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategik dan risiko reputasi, hal ini dapat mengakibatkan potensi risiko finansial maupun non finansial, dampak lainnya dari risiko operasional Bank adalah turunnya Tingkat Kesehatan Bank sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor serta bank berada dalam status pengawasan insentif dari regulator.

Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka mitigasi risiko operasional bank telah memiliki aplikasi *Operational Risk Self Assessment (ORSA)* dimana di dalamnya juga terdapat aplikasi *Loss Event Database (LED)* yang terkoneksi ke seluruh unit kerja sehingga unit kerja dapat menginput *risk event* yang terjadi secara *online* melalui media *web (web based)*. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dilakukan mitigasi terhadap *risk event* tersebut. Bank juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang muncul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat apapun yang terkait dengan produk dan layanan. Sampai bulan Desember 2023 pengelolaan risiko hukum Bank Jatim tercermin dari penilaian profil risiko hukum adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko hukum.

Potensi Risiko

Potensi Risiko dari risiko hukum yaitu adanya tuntutan hukum sebagai akibat dari kelemahan aspek legal atau yuridis, atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga berdampak pada kerugian finansial maupun non finansial seperti:

1. Pengeluaran biaya atas timbulnya ganti rugi dari Nasabah.
2. Pengenaan denda/sanksi atas terjadinya tuntutan hukum.
3. Kehilangan Jaminan Kredit.
4. Klaim Bank Garansi
5. Tertundanya Jaminan lelang (yang dapat mempengaruhi NPL).

Mitigasi Risiko Hukum

Dengan melakukan review kajian yuridis terhadap segala kemungkinan masalah hukum yang akan timbul antara pihak penjamin, terjamin dan dijamin dapat meminimalisir tuntutan terhadap:

1. Kelengkapan pemenuhan dokumen dan persyaratan Bank Garansi.
2. Prosedur realisasi Bank Garansi
3. Terkait dengan akad/perjanjian yang terdapat dalam Berkas Bank Garansi.

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan dengan melakukan kaji ulang yang diselenggarakan setiap triwulan untuk setiap divisi dan caturwulan untuk kaji ulang masing-masing kantor cabang. Sampai bulan Desember 2023 pengelolaan risiko strategik Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko strategik adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko strategik.

Potensi Risiko

Potensi risiko yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan/ penetapan strategi bisnis, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pendapatan yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan
2. Peluncuran produk baru tanpa dilakukan *Feasibility Study* analisis terhadap rencana penerapan produk baru sebagai pencegahan potensi gagalnya produk baru tersebut sehingga target penjualan produk tidak dapat optimal.
3. Peluncuran produk baru harus ada Izin prinsip, jika tidak dilaksanakan produk tersebut tidak akan dapat dijalankan sehingga akan kehilangan kesempatan menghimpun dana pihak ketiga (DPK).

Mitigasi Risiko Strategik

Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan

pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study (FS)* yang mencakup analisis *Cost and benefit*. Apabila terdapat program atau produk baru, maka sekurang-kurangnya:

1. Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
2. Ada Izin prinsip terhadap Produk yang akan diterbitkan.
3. Melakukan berdasarkan SLA yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait biaya dan risiko apa yang akan terjadi kepada Debitur atau Nasabah jika akan melakukan realisasi kredit maupun peluncuran produk baru dan memantau pencapaian total kredit dari target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya jika program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Regulator dan pihak eksternal lainnya yang berlaku.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan ini termasuk mereview hasil temuan audit internal maupun eksternal yang belum terselesaikan serta mengukur frekuensi dan besaran nominal denda/penalti. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan APU PPT secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar.

Sampai bulan Desember 2023, pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jatim yang tercermin dari penilaian profil risiko kepatuhan adalah berpredikat *Low to Moderate* untuk risiko inheren dan *Fair* untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2 untuk risiko kepatuhan.

Potensi Risiko

Ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan regulator maupun peraturan internal lainnya Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Sanksi kewajiban membayar denda.
3. Penurunan peringkat tingkat kesehatan Bank.
4. Larangan pembukaan jaringan kantor.
5. Pembekuan usaha tertentu.
6. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau Pemegang Saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan

dan kepatutan atau dalam catatan administrasi OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

7. Pemberhentian pengurus Bank.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

Untuk meminimalisir risiko kepatuhan bank melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun ketentuan eksternal baik dari Bank Indonesia, OJK dan peraturan yang berlaku lainnya. Di samping itu Bank juga melakukan analisa kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dengan cara:

1. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan peraturan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi.
2. Melakukan *compliance checklist* pada aktivitas operasional tertentu.
3. Melakukan kajian terhadap peraturan internal.
4. Melakukan sosialisasi peraturan eksternal Kepada Divisi dan Kantor Cabang.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank.

Pengukuran risiko reputasi bulan Desember 2023 memiliki peringkat *Low to Moderate* untuk risiko inheren. Sedangkan upaya penerapan manajemen risiko reputasi sendiri berpredikat *Satisfactory* dengan melakukan upaya dalam meningkatkan reputasi Bank sehingga didapatkan peringkat komposit 2.

Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim dilakukan secara berkesinambungan dan berfokus pada 4 (empat) aspek diantaranya aspek pendidikan dan edukasi perbankan, kebudayaan, kesehatan serta aspek sosial termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan



nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

Potensi Risiko

Risiko Reputasi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Pelanggaran etika bisnis, kualitas pemberitaan suatu Bank dan pengaduan nasabah. Pada parameter pelanggaran etika bisnis dapat dilihat dari berbagai kriteria transparansi informasi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran produk dan jasa, kerjasama bisnis dengan *stakeholder* lainnya yang berpotensi mengalami kerugian terhadap risiko reputasi.
2. Dalam suatu Bank ujung tombak perusahaan adalah sumber daya manusia yang handal, dimana dalam pelayanan terhadap nasabah harus melibatkan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak berkualitas maka berpotensi kerugian risiko reputasi terhadap nasabah, terutama terhadap pelayanan nasabah harus sesuai dengan standar layanan yang telah ketentuan yang berlaku.
3. Potensi Risiko yang paling krusial adalah pemberitaan negatif di media massa yang sudah diketahui oleh Nasabah dan pengaduan dari nasabah yang mengalami permasalahan di Bank yang tidak dapat ditangani dengan baik.

Mitigasi Risiko Reputasi

Selalu menjaga kredibilitas Bank dihadapan *shareholder* dan *stakeholder*, tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank, memenuhi semua ketentuan yang berlaku serta senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap *service level* yang dilakukan oleh *frontliner* di setiap kantor cabang.

Pada setiap pengaduan nasabah seminimal mungkin dapat diselesaikan sesegera mungkin, dengan cara diinformasikan kepada nasabah agar tidak melakukan komplain melalui media sosial.

Proses Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu 3 (tiga) bulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk membahas hasil pemeriksaan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko untuk dilakukan mitigasi sesuai dengan 8 (delapan) risiko.



Upaya Untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 23 mengatur kewajiban Bank menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan).

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, peringkat risiko Bank Umum Konvensional dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu 1 (*low*), 2 (*low to moderate*), 3 (*moderate*), 4 (*moderate to high*) dan 5 (*high*) untuk tingkat risiko inheren. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (*strong*), 2 (*satisfactory*), 3 (*fair*), 4 (*marginal*) dan 5 (*unsatisfactory*).

Hasil *self assessment* profil risiko Bank per Desember 2023 adalah peringkat 2 (PK-2) dengan peringkat risiko inheren *Low to Moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yaitu *Satisfactory*.

Jenis risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Komposit
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam

pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko Bank Jatim selama tahun 2023 cukup memadai. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan ke berbagai jenjang manajemen serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

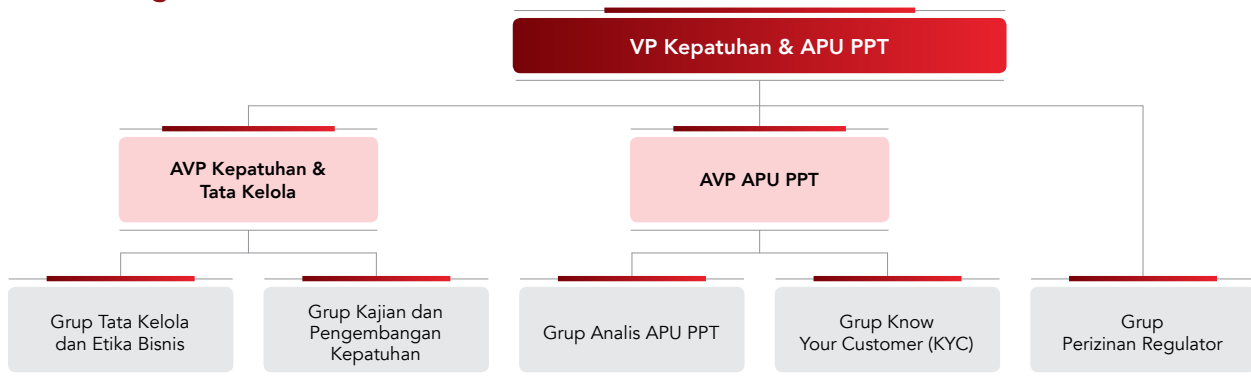
Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
 - a. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko

- b. penentuan dan penetapan limit Risiko
 - c. penetapan penilaian peringkat Risiko
 - d. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
 - e. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Profil Vice President Kepatuhan dan APU PPT



Putu Denny H.

Vice President Kepatuhan & APU PPT

Domisili	: Surabaya
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Denpasar, 28 Juni 1977/Usia 46 tahun per Desember 2023
Riwayat Pendidikan	: S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (2001)
Sertifikasi	: Sertifikasi Manajemen Risiko Level-4
Riwayat Jabatan	: • Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan Dana Jasa (2018) • Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2022) • Pjs. Vice President Kepatuhan & APU PPT
Dasar Pengangkatan	: SK No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juni 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sepanjang tahun 2023 Bank Jatim telah mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1	<i>Corporate Value Internalization for Culture Leaders</i>	14 Januari 2023
2	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	22 Januari 2023
3	Penyempurnaan Fungsi Kepatuhan, Perbaikan Kerangka Prosedur dan Identifikasi Kinerja	15 Februari 2023
4	Pelatihan APU PPT	21 Februari 2023
5	Pemahaman Proses Kredit	27 Februari 2023
6	Program Penerapan Pelaporan Transaksi Keuangan	08 Maret 2023
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	15 Maret 2023
8	Layanan Refinitiv	16 Maret 2023
9	Proses Laporan Transaksi Luar Negeri serta Mitigasi Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	17 Maret 2023
10	Transaksi DNDF, OIS dan IRS	19 Maret 2023
11	<i>English Course Elementary Level</i>	28 Maret 2023
12	<i>Financial Integrity Rating (FIR) on Money Laundering and Terrorist Financing</i>	09 Juni 2023
13	Review Kredit dari Aspek Kepatuhan dan Manajemen Risiko	16 Juni 2023
14	Kepatuhan pada Digital Banking	13 Juli 2023

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
15	<i>Video Learning Production</i>	23 Juli 2023
16	Konsultan Hukum Perbankan	25 Agustus 2023
17	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	27 Agustus 2023
18	Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan	14 September 2023
19	<i>Facilitating Techniques and Customer Engagement</i>	15 September 2023
20	Strategi dan Implementasi Penguatan Industri Perbankan	13 Oktober 2023
21	<i>Culture Transformation with Growth Mindset</i>	18 Oktober 2023
22	Implementasi Pengawasan dan Mitigasi Risiko Transaksi Keuangan Mencurigakan – POJK No 8 Tahun 2023	20 Oktober 2023

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program perwujudan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan unit kerja terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
5. Pengembangan aplikasi *monitoring* laporan (monilap) khususnya untuk fitur pemantauan temuan Audit Internal dan Eksternal.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU, PPT & PPPSPM dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Penguatan *Know Your Customer* (KYC) dengan memanfaatkan layanan verifikasi data EKTU dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Ditjen Dukcapil.
3. Optimalisasi penerapan APU, PPT & PPPSPM pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU, PPT & PPPSPM, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU, PPT & PPPSPM.
5. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, GRIPS serta Laporan terkait Pemilu.
6. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating* on ML/TF yang diselenggarakan oleh PPATK dengan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.



Perkara Hukum

Selama tahun 2023 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara penting berupa permasalahan hukum perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	18	-	1
2.	Pencabutan Gugatan	5	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	19	1	-

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara Perdata Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 atas gugatan PT Hikmah Surya Jaya	Dimenangkan oleh Bank Jatim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.	Tidak Ada	Rp.3.000,-
2.	Perkara Kepailitan Nomor 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama (dalam pailit)	Proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim telah melakukan verifikasi hutang terhadap PT Citra Gading Asritama/debitur Bank Jatim (dalam pailit).	Tidak Ada	Rp31.103,-
3.	Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Bna tanggal 18 April 2023 atas gugatan PT Rudi Jaya	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra memori banding untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.3.218,-
4.	Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023 atas gugatan Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Ngatemoen Harijono	Proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti di persidangan untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.3.100,-
5.	Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023 atas gugatan PT Toya Indo Manunggal	Proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti di persidangan untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.5.732,-

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Tuntutan Ganti rugi Materiil (dalam jutaan rupiah)
6.	Perkara Perdata Nomor 888/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 29 Agustus 2023 atas gugatan PT Anugerah Bersama Berkah Abadi	Proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti di persidangan untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.15.000,-
7.	Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023 atas gugatan Yon Permadian Tesna	Proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab dan bukti di persidangan untuk menguatkan posisi Bank Jatim	Tidak Ada	Rp.27.988,-

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2023, Bank Jatim belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sanksi administratif Bank Jatim selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Sanksi	Instansi
1.	Pengenaan Sanksi Administratif atas Temuan Posisi Pemeriksaan 30 Juni 2022	Otoritas Jasa Keuangan
2.	Pengenaan Sanksi Administratif atas Ketidapatuhan Pelaporan Berkala Open API SNAP	Bank Indonesia
3.	Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
4.	Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas Hasil Pemeriksaan Umum 2022	Otoritas Jasa Keuangan
5.	Sanksi Kesalahan Pelaporan SLIK atas Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan
6.	Keterlambatan Penyampaian Laporan RBB Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan
7.	Keterlambatan Laporan RPPB Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan
8.	Denda Pelaporan Antasena Transaksi pln01	Bank Indonesia
9.	Denda Pelaporan Antasena Bulanan LBUT	Bank Indonesia
10.	Kekurangan Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah	Bank Indonesia
11.	Penyampaian Laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melebihi Cut Off Time	Bank Indonesia
12.	Kesalahan pelaporan Informasi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan



No.	Nama Sanksi	Instansi
13.	Keterlambatan Tindak Lanjut Pengaduan	Otoritas Jasa Keuangan
14.	Pelanggaran Koreksi Penyampaian Laporan	Bank Indonesia
15.	Penyelenggaraan Produk tanpa Memperoleh Perizinan	Otoritas Jasa Keuangan
16.	Tidak Melakukan Penyampaian Laporan	Bank Indonesia
17.	Tidak Melakukan Penyampaian Laporan	Bank Indonesia
18.	Keterlambatan Penyampaian Laporan	Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2023 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi intern antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki corporate *website* yang dapat diakses melalui **www.bankjatim.co.id** yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah.

Selain itu, dalam website juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti event yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim

Twitter : @bank_jatim

Instagram : bankjatim

Youtube : bank jatim

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact Investor Relation* Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta

Corporate Secretary Kantor Pusat

Bank Jatim

Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya

Email: iru@bankjatim.co.id

Telp : (6231) 5310090-99 ext 440

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.



- b. *Analyst Meeting*
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
- c. *Conference Call*
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
- d. *Site Visit*
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
- e. *Roadshow*
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
- 4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, tahun 2023 dilangsungkan 4 (empat) kali dalam setahun

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	7 Maret 2023	Alila Hotel, Jakarta	Analyst Meeting FY 2022 Audited
2	28 April 2023	Bank Jatim Headquarter	Analyst Meeting 3M23
3	25 Juli 2023	Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta	Analyst Meeting 1H23
4	30 Oktober 2023	Alila Hotel, Jakarta	Analyst Meeting 9M23

2. Komunikasi dengan para analis dan investor yakni sebagai berikut:

No	Tanggal	Investor/Sekuritas	Kegiatan
1	20 Maret 2023	Bahana Sekuritas	One On One Meeting
2	12 Mei 2023	Panin Sekuritas	One On One Meeting
3	16 Juni 2023	Bahana Sekuritas	One On One Meeting
4	12 Juli 2023	PT Taspen	One On One Meeting
5	24 Juli 2023	PT Taspen	One On One Meeting
6	25 Juli 2023	Bahana Sekuritas	One On One Meeting
7	7 Agustus 2023	Sinarmas Sekuritas	Site Visit
8	16 Agustus 2023	Toccat Capital	One On One Meeting
9	28-30 Agustus 2023	Ciptadana Asset Management Semesta Asset Management Wanteg Asset Management GAP Capital BNI Life BCA Sekuritas	One On One Meeting
10	22 September 2023	BRI Danareksa	Site Visit
11	5-6 Oktober 2023	BPJS Edgbaston Investment Partner	One On One Meeting
12	31 Oktober 2023	BRI Danareksa	One On One Meeting
13	24 November 2023	Binaartha Sekuritas Waterfront Sekuritas	One On One Meeting

3. Tanggal 14 Januari 2023 turut serta berpartisipasi dalam kegiatan Townhall Meeting Bank Jatim Kantor Pusat.
4. Tanggal 23 Juni 2023 Bank Jatim masuk dalam Indeks Tempo-IDN Financial52.
5. Tanggal 18 September 2023 Bank Jatim masuk dalam Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russel untuk kategori Micro Cap.
6. Tanggal 20 September 2023 Bank Jatim meraih penghargaan dalam ajang IDX Channel Anugrah Inovasi Indonesia (ICAI) 2023 dengan kategori Inovasi Produk & Model Bisnis dengan menerapkan Inovasi 5 (lima) Pilar Transformasi.
7. Bank Jatim masuk dalam 10 besar Peringkat KCSI (Katadata Corporate Sustainability Index) Periode September 2023 di sektor Finance.
8. Menyelenggarakan Public Expose Live yang diadakan pada tanggal 2 November 2023 bertempat di Bank Jatim Kantor Pusat.
9. Tanggal 23 November 2023 Bank Jatim meraih penghargaan dalam ajang CSA Award-The Best Innovation Regional Banks.

Siaran Pers

No	Bulan	Siaran Pers
1	19 Januari 2023	Bank Jatim dan RSU Brimadika Jalin Kerjasama Layanan Kesehatan Pegawai
2	20 Januari 2023	Bank Jatim Awali Tahun 2023 dengan Penyerahan CSR Bank Jatim peduli
3	27 Januari 2023	Bank Jatim Serahkan CSR Kepada RSUD Husada Prima Surabaya
4	30 Januari 2023	Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR kepada Pemerintah Kota Probolinggo
5	01 Februari 2023	Konsisten Terapkan GCG, Bank Jatim Raih Penghargaan Asean Asset Class PLCs
6	02 Februari 2023	Bank Jatim Dukung Program Kemenkeu Melalui Bantuan UMKM & KUR
7	06 Februari 2023	Support UMKM Kabupaten Kediri, Bank Jatim Serahkan CSR kepada Pemkab Kediri
8	08 Februari 2023	Bank Jatim Peduli Bantu Pembangunan Landmark Simpang 4 Kota Pasuruan
9	10 Februari 2023	Total Hadiah 3 Miliar, Undian Nasional SIMPEDA Berlangsung Meriah
10	05 Maret 2023	Bank Jatim Hadirkan E-Retribusi (SI RATRI) di Pasar Perak Jombang
11	08 Maret 2023	Dukung Pembayaran Uang Kuliah Lebih Mudah, Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan Universitas Trunojoyo Madura
12	08 Maret 2023	Perkuat Layanan Syariah, Bank Jatim Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Bisnis dengan Bank NTB Syariah
13	09 Maret 2023	Bank Jatim Sabet Penghargaan Obsession Awards 2023 Kategori Best Companies
14	13 Maret 2023	Bank Jatim Raih Peringkat A Dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2021
15	14 Maret 2023	Ciptakan SDM Siap Kerja, Bank Jatim dan Disnakertrans Jatim Tekan Mou Penyediaan Tenaga Magang
16	14 Maret 2023	Bank Jatim dan Pemkab Tuban Saling Bersinergi Launching Agen Jatim
17	17 Maret 2023	Garap Potensi Ekonomi Syariah, Bank Jatim Launching Tabungan Santri
18	20 Maret 2023	Bank Jatim Dukung Misi Dagang Pemprov Jatim di Kalimantan Timur
19	21 Maret 2023	Bank Jatim Peduli Berikan Bantuan CSR Pembangunan Gapura Perbatasan Kabupaten Magetan
20	05 April 2023	Bank Jatim Boyong Penghargaan Dalam Ajang TOP BUMD Awards 2023
21	07 April 2023	Dorong Literasi Keuangan Digital, Bank Jatim Gelar JConnect Ramadhan Festival Bersama Pelaku UMKM
22	12 April 2023	Kinerja Meningkat, Bank Jatim Bagikan Dividen Rp797 Miliar
23	14 April 2023	QRIS Bank Jatim Mudahkan Pembayaran Bus Tran Jatim
24	15 April 2023	Festival Ramadhan Jembatan Suroboyo Bantu UMKM Naik Kelas
25	28 April 2023	Canangkan Transformasi Digital Lima Pilar, Kinerja Kredit Bank Jatim Tumbuh Lampau Target
26	30 April 2023	Jconnect Ramadhan Festival 2023 Catatkan Transaksi Ratusan Juta Rupiah Selama Pameran Berlangsung
27	08 Mei 2023	Perluas Pasar Bank Jatim Ikut Sertakan 3 UMKM Binaannya dalam Misi Dagang Lampung
28	15 Mei 2023	Gedung Baru Diresmikan Bank Jatim Capem Porong Siap Berikan layanan Optimal
29	15 Mei 2023	Dukung Misi Dagang & Investasi Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim Perkenalkan JConnect Ramadhan di Hongkong



No	Bulan	Siaran Pers
30	17 Mei 2023	Saling Support, Bank Jatim dan UNESA Tanda Tangan MoU di Bidang Bisnis & Akademis
31	21 Mei 2023	Dapat Dukungan Penuh dari Bank Jatim, PT Enha Sentosa Indonesia Sukses Ekspor Jahe ke Empat Negara
32	25 Mei 2023	Terangkan Pulau Kangean Lewat CSR PJU Solar Cell dari Bank Jatim
33	26 Mei 2023	Bank Jatim Fasilitasi PT Astana Shoga Asia untuk Tembus Pasar Ekspor
34	28 Mei 2023	Wujudkan Kemandirian Ekonomi Bank Jatim Serahkan Dua CSR Sekaligus di Lamongan dan Lumajang
35	29 Mei 2023	Dukung Percepatan Digitalisasi Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR 120 Unit PC Kepada Pemkot Surabaya
36	30 Mei 2023	Gubernur Jawa Timur Resmikan Desa Pendulum Devisa Binaan Bank Jatim
37	1 Juni 2023	Bank Jatim Salurkan Kredit Jatim Ritel dalam Kegiatan Kampoeng Kreasi
38	5 Juni 2023	Perkuat Kolaborasi dengan PT SIER, Bank Jatim Lakukan Penandatanganan MoU dan Resmikan Kantor Baru
39	7 Juni 2023	Bentuk <i>Trust Management</i> ke Kinerja Perusahaan, Sejumlah Direksi Bank Jatim Borong Saham BJTM
40	9 Juni 2023	Bank Jatim Raih Penghargaan dalam Ajang Indonesia Financial Top Leader Awards 2023
41	10 Juni 2023	Terapkan Performance Management System, 99,8% Karyawan Bank Jatim Merasa Engaged
42	11 Juni 2023	Terapkan Work Life Balance, Bank Jatim Ikuti Pertandingan Persahabatan Bulu Tangkis
43	12 Juni 2023	Ikuti Misi Dagang, Bank Jatim Berikan Fasilitas Promosi dan Akses Pasar untuk UMKM Binaannya
44	19 Juni 2023	Percepat Layanan Kesehatan, Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR Ambulans Kepada RSJ Menur
45	20 Juni 2023	Media Sosial Bank Jatim Raih Penghargaan dalam Ajang 20th Infobank-MRI BSE Awards 2023
46	23 Juni 2023	Terima Apresiasi High Dividen, Bukti Nyata Bank Jatim Berkontribusi Untuk Negeri
47	27 Juni 2023	Bank Jatim Menjadi Bank Pertama dalam Pelaksanaan IKD For Banking di Indonesia
48	3 Juli 2023	Komitmen Bank Jatim Terhadap UMKM Binaan dalam Kegiatan Misi Dagang
49	14 Juli 2023	Kantor Operasional Perusahaan Afiliasi Bank Jatim Resmi Pindah Gedung Karet
50	15 Juli 2023	Perkuat Kinerja Syariah, Bank Jatim Selenggarakan Town Hall Meeting Syariah 2023
51	17 Juli 2023	Wujudkan Kepedulian Terhadap Masyarakat Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR & Launching Elektronifikasi Keuangan Daerah
52	17 Juli 2023	Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan PLN Insurance Terkait Kontra Bank Garansi
53	25 Juli 2023	Penyaluran Kredit Bank Jatim Tumbuh Signifikan
54	28 Juli 2023	Kinerja Optimal, Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2023
55	31 Juli 2023	Dukung Kemajuan Desa & Perdesaan, Bank Jatim & Kemendes PTT Lakukan Kerja Sama dalam Asean SOMRDPE Indonesia 2023
56	9 Agustus 2023	Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
57	10 Agustus 2023	Bank Jatim Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
58	20 Agustus 2023	Semarak Ulang Tahun Ke 62, Bank Jatim Launching JConnect Pro
59	20 Agustus 2023	Bank Jatim Fasilitasi UMKM Terminal dan Pembayaran QRIS Bus Trans Jatim
60	21 Agustus 2023	Bank Jatim Dukung Penyerahan SK PPPK Formasi Tahun 2022 oleh Gubernur
61	22 Agustus 2023	Pemprov Jatim Bersama Bank Jatim Salurkan Bantuan Sosial ke Bangkalan
62	23 Agustus 2023	Pemprov Jatim dan Bank Jatim Sapa Ratusan ASN Sekaligus Serahkan Bantuan Sosial di Pamekasan
63	23 Agustus 2023	Bank Jatim Sinergi dengan Pemkot Malang untuk Revitalisasi Alun-Alun
64	24 Agustus 2023	Peduli Buruh Rokok, Pemprov Jatim Kolaborasi dengan Bank Jatim Salurkan Bantuan Ke 5.030 Buruh
65	25 Agustus 2023	Kinerja Terus Positif, Bank Jatim Raih Penghargaan Infobank Award 2023
66	31 Agustus 2023	Bank Jatim Sabet Penghargaan Best BUMD Digital Innovation
67	31 Agustus 2023	Bank Jatim Jadi Penghimpun Dana Terbesar di Tabungan Simpeda
68	4 September 2023	Dorong Inklusi Keuangan, Pencapaian Tabungan Simpel Bank Jatim Tertinggi di Jawa Timur
69	5 September 2023	Sinergi dengan PT Pabrik Gula Rajawali I & PKPTR Malang, Bank Jatim Dukung Pembiayaan Petani Tebu
70	6 September 2023	Tingkatkan Minat Olahraga Generasi Muda, Bank Jatim Serahkan CSR Lapangan Basket Ke Pemkab Tuban

No	Bulan	Siaran Pers
71	6 September 2023	Bank Jatim Boyong Dua Penghargaan Sekaligus Dalam Ajang TOP GRC Awards 2023
72	7 September 2023	Dorong Gerakan Haji Muda Lewat Bani Fest 2023
73	11 September 2023	Dukung Kegiatan Pemprov Jawa Timur Dalam Misi Dagang & Investasi di Banten, Bank Jatim Fasilitas Produk Lokal
74	11 September 2023	Dukung Petani Tebu Madiun, Bank Jatim Kembali Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT PG Rajawali I
75	16 September 2023	Tingkatkan Nilai GCG, Bank Jatim Selenggarakan Executive Summit 2023
76	17 September 2023	Sinergi Bersama Pemprov Jawa Timur, Bank Jatim Fasilitas Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif
77	18 September 2023	Bank Jatim Raih Top 50 Emiten Terbaik
78	18 September 2023	Bank Jatim Dukung Pembayaran E-Parkir di Kabupaten Jember
79	18 September 2023	Bank Jatim Serahkan CSR Pembangunan Anjungan Dukcapil Mandiri dan Peralatan UMKM ke Pamekasan
80	19 September 2023	Dorong Pertumbuhan Investasi Jawa Timur, Bank Jatim Tandatangani Nota Kesepahaman dengan SIER
81	19 September 2023	Bank Jatim Bersama Pemkab Madiun Launching E-Retribsi Pasar & Siskeudes
82	19 September 2023	Dukung Gerakan Merdeka Berkarir, Bank Jatim Salurkan CSR ke Disnakertrans Jawa Timur
83	20 September 2023	Terapkan Lima Pilar Transformasi, Bank Jatim Raih Penghargaan ICAII 2023
84	20 September 2023	Bank Jatim Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pendukung Startup Jawa Timur
85	22 September 2023	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jatim Serahkan CSR Rehabilitasi RTLH kepada Pemkab Bondowoso
86	22 September 2023	Konsisten Cetak Atlet Berprestasi, Bank Jatim Raih Penghargaan sebagai Badan Usaha Peduli Olahraga
87	23 September 2023	Bank Jatim Serahkan CSR Kendaraan Operasional Kepada BPBD Jawa Timur
88	23 September 2023	Bermain dengan Sepenuh Hati, Bank Jatim Raih Juara Umum PORMI
89	29 September 2023	Bank Jatim Raih Penghargaan dari Kemendagri RI
90	4 Oktober 2023	Bank Jatim Sabet Penghargaan Indonesia Best CFO 2023
91	6 Oktober 2023	Tingkatkan Kinerja UUS, Bank Jatim Launching Dual Bankingn Leveraging Model
92	14 Oktober 2023	Dukung Ketahanan Pangan, Bank Jatim Kucurkan Kredit untuk Gapoktan Tebu Tulungagung
93	17 Oktober 2023	Peringati Hari Jadi Kota Batu ke-22 Tahun, Bank Jatim Serahkan CSR dan Branding Pasar Induk Among Tani
94	18 Oktober 2023	Trans Jatim Koridor III Diresmikan, Bank Jatim Raih Piagam Apresiasi
95	18 Oktober 2023	Dukung Pemulihan Dampak Pandemi, Bank Jatim Terima Penghargaan Jatim Bangkit Awards
96	25 Oktober 2023	Komitmen Bantu UMKM Naik Kelas, Bank Jatim Serahkan CSR Tenda Kerucut Kepada Pemkab Jember
97	25 Oktober 2023	Dorong Peningkatan Transaksi Non Tunai, Pemkab Kediri bersama Bank Jatim Launching KKPD
98	26 Oktober 2023	Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, JIFest 2023 Resmi Digelar
99	27 Oktober 2023	UUS Bank Jatim Dukung Penguatan Pasar Uang Antarbank Syariah
100	30 Oktober 2023	Bank Jatim Agresif Salurkan Kredit, Pertumbuhannya Melejit 12,61% di Atas Rata-Rata Perbankan
101	3 November 2023	Bank Jatim Serahkan CSR Mobil Ambulans Jenazah ke RSUD Dr. Soetomo
102	6 November 2023	Bank Jatim Berhasil Raih Gold Rank ASRRAT 2023
103	9 November 2023	OPOP Expo 2023, Bank Jatim Launching KUR Syariah
104	9 November 2023	Tingkatkan Sinergi Antar BPD, Bank Jatim Selenggarakan Treasury Talk 2023
105	10 November 2023	Kinerja Moncer, Bank Jatim Sabet Penghargaan Road To CNBC Indonesia Awards 2023 Best Regional Banks
106	16 November 2023	Dorong Peningkatan Transaksi Ekspor, Bank Jatim dan LPEI Lakukan MoU
107	16 November 2023	Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Alun-Alun Jombang
108	16 November 2023	Bahas Perkembangan Ekonomi Digital, FKDK BPDSI Sukses Digelar
109	18 November 2023	Berlari Sambil Berdonasi, Bank Jatim Gelar Jatimers Run To Care
110	18 November 2023	Peduli Dunia Kesehatan, Bank Jatim Serahkan CSR Sepeda Ambulans ke RSUD Kanjuruhan
111	21 November 2023	Dukung Pekerja Migran Jawa Timur, Bank Jatim Berikan Bantuan Ambulans Hingga Fasilitas Transaksi Keuangan di Luar Negeri
112	22 November 2023	Bank Jatim Bersama Pemprov Jawa Timur Dorong Pengembangan Ekspor Lewat Gebyar Ekspor Jatim Berdaya 2023



No	Bulan	Siaran Pers
113	23 November 2023	Bank Jatim Terima Penghargaan CSA Awards 2023
114	24 November 2023	Wujud Sinergi dengan Pemkab Trenggalek, Bank Jatim Serahkan CSR Mobil Ambulans dan Launching KKPD
115	24 November 2023	Peduli Pajak, Bank Jatim Terima Penghargaan dari Bapenda Jawa Timur
116	27 November 2023	Tambah Koleksi Penghargaan, Bank Jatim Raih Juara Satu ARA 2022
117	30 November 2023	Lebarkan Sayap Bisnis, Bank Jatim MoU KUB dengan Bank Lampung
118	4 Desember 2023	Konsisten Lakukan Transformasi Digital, Bank Jatim Boyong Dua Penghargaan Sekaligus dalam TOP Digital Awards 2023
119	9 Desember 2023	Dukung Dunia Pendidikan, Pariwisata, Hingga UMKM, Bank Jatim Salurkan Bantuan CSR ke Pemkot Mojokerto dan Pemkab Sumenep
120	12 Desember 2023	Pertama di Indonesia, Bank Jatim Pecahkan Rekor MURI 2.312 Debitur Tanda Tangan Akad Massal Kredit Konsumer
121	13 Desember 2023	Perkuat KUB, Bank Jatim Teken NDA dan PKS Sinergitas Bisnis dengan Bank Lampung
122	14 Desember 2023	Jokowi Meriahkan Peresmian Pasar Induk Among Tani dengan Dukungan Optimal dari Bank Jatim
123	15 Desember 2023	Bank Jatim Pimpin Inovasi dengan Menjadi Pionir di Indonesia dalam Penerapan IKD, Dikunjungi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Bank Dunia
124	16 Desember 2023	Sukses Besar! 17 Ribu Peserta Jalan Sehat Situbondo dengan Dukungan Bank Jatim
125	15 Desember 2023	Unit Usaha Syariah Bank Jatim Diganjar Tiga Penghargaan Sekaligus dalam BPKH Award 2023
126	19 Desember 2023	Telah Berpulang ke Rahmatullah Komisaris Utama Bank Jatim

Buletin

Volume	Tema Buletin
Edisi 26	2023, Kinerja Perbankan Moncer di Triwulan I
Edisi 27	Digitalisasi Perbankan Makin Kencang

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI dan OJK	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	BEI dan OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1.	27/2/2023	062/056/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2.	6/3/2023	062/091/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
3.	6/3/2023	062/4/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
4.	8/3/2023	062/169/AMK/AKP/GPL/SRT	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
5.	13/3/2023	062/102/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJK (Permintaan Penjelasan Mata Acara RUPS)

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
6.	21/3/2023	062/107/DIR/CSE/Srt	OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
7.	21/3/2023	062/05/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
8.	21/3/2023	062/114/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya (RUPS - Tunda Unggah CV)
9.	21/3/2023	062/110/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Berkelanjutan
10.	21/3/2023	062/109/DIR/CSE/Srt	SIPENA – OJK	Penyampaian Buku Laporan Keberlanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2022
11.	14/4/2023	062/149/DIR/CSE/Srt	OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
12.	14/4/2023	062/08/CSE/IVR/Srt	OJK	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai
13.	14/4/2023	062/07/CSE/IVR/Srt	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
14.	28/4/2023	062/344/AMK/AKP/GPL/SRT	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
15.	28/4/2023	062/158/DIR/CSE/Srt	SIPENA-OJK	Penyampaian Laporan Penggantian Sementara Direktur PT Bank Jatim
16.	2/5/2023	062/226/DIR/CSE/Srt	OJK	Perubahan Corporate Secretary
17.	10/5/2023	062/190/DIR/CSE/Srt	OJK	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
18.	22/5/2023	062/220/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
19.	22/5/2023	062/221/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
20.	30/5/2023	062/224/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
21.	6/6/2023	062/228/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
22.	6/6/2023	062/287/DIR/CSE/Srt	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
23.	6/6/2023	062/232/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
24.	6/6/2023	062/231/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
25.	6/6/2023	062/230/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
26.	6/6/2023	062/227/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
27.	6/6/2023	062/111/DKM/SDK/SRT	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
28.	6/6/2023	062/10/CSE/IVR/Srt	OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
29.	6/6/2023	062/229/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
30.	9/6/2023	062/240/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
31.	9/6/2023	062/238/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
32.	9/6/2023	062/236/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
33.	7/7/2023	062/367/CSE/CMAI/Srt	OJK	Perubahan Internal Audit
34.	18/7/2023	062/396/CSE/CMAI/Srt	OJK	Perubahan Corporate Secretary
35.	26/7/2023	062/624/AMK/AKP/GPL/SRT	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
36.	23/8/2023	062/456/DIR/CSE/Srt	OJK	Perubahan Internal Audit
37.	25/8/2023	062/332/DIR/CSE/Srt	SIPENA-OJK	Laporan Terkait Penggantian Sementara Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Jatim
38.	19/10/2023	062/730/CSE/CMAI/Srt	BEI	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
39.	23/10/2023	062/378/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
40.	30/10/2023	062/15/CSE/CMAI/Srt	BEI	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
41.	31/10/2023	062/940/AMK/AAPK/SRT	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
42.	6/11/2023	062/17/CSE/CMAI/Srt	OJK	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
43.	23/11/2023	062/894/AMK/AAPK/Surat	OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya (Penelaah Atas Laporan Keuangan)
44.	29/11/2023	062/807/CSE/CMAI/Srt	SIPENA-OJK	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk Tahun Buku 2023
45.	5/12/2023	062/435/DIR/CSE/Srt	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
46.	29/12/2023	062/450.2/DIR/CSE/Srt	OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Penggunaan Buku Pedoman buku pedoman Surat Keputusan Direksi Nomor 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. untuk diganti mengingat ketentuan ini telah dicabut. Selanjutnya untuk Kode Etik dapat menggunakan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26 Januari 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

Etika Kerja	
Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.



Etika Kerja

Pengendalian Gratifikasi	a. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; b. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; c. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; d. Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Politik	a. Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; b. Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Aktivitas yang dilarang: 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. d. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislatif diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.

Etika Bisnis

Etika Bank Dengan Pegawai	Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut: a. Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; c. Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; d. Kedisiplinan Pegawai; e. Lingkungan Kerja; f. Saluran Aspirasi Pegawai;
Etika Bank Dengan Nasabah	a. Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank Dengan Penyedia Barang dan Jasa	a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>; g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun non <i>financial</i> untuk kepentingan pribadi; i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak eksternal; j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.

Etika Bisnis

Etika Bank Dengan Pesaing	a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; b. Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing; c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
Etika Bank Dengan Mitra Kerja	a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
Etika Bank Dengan Pemerintah dan Regulator	a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; e. Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.
Etika Bank Dengan Masyarakat	a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan; c. Pengembangan ekonomi masyarakat; d. Kegiatan yang bersifat insidental.
Etika Bank Dengan Media Massa	a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. Corporate Secretary; 3. Pimpinan Cabang. c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference</i>, <i>press release</i>, <i>interview</i> dan <i>media inquiry</i>; d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank Dengan Organisasi Profesi	a. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; b. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai. Bank mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal Human Capital
2. Portal Kepatuhan

3. Pakta Integritas
4. Campaign Program, meliputi:
 - a. *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
 - b. Campaign lainnya berupa agenda, mouse pad, flashdisk, kipas kertas, payung, tumbler, powerbank, dan pin baju



Pic 1.1

- 1.1 Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- c. Portal dan Identitas Perusahaan
- d. Kuis
- e. Media Sosial
 - *Employee Involvement Campaign* diantaranya Lomba cipta lagu Ekspresi
 - *Leaders Talks Values*



Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Bank Jatim secara berkala melakukan pemantauan kepatuhan terhadap Code of Conduct Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Buku Pedoman No. 059/197/DIR/HCP/KEP tentang Pedoman Pelaksanaan *Reward and Punishment System* tanggal 7 Agustus 2020. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
 - a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
 - Teguran Lisan
 - Surat Peringatan
 - b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
 - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
 - Sanksi Atas Indisipliner
 - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
 - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
 - b. Kesengajaan
 - c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - Penundaan Kenaikan Gaji
 - Penurunan Personal Grade

- c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
 - Demosi 1 (satu) Tingkat
 - Demosi 2 (dua) Tingkat
 - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
 - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Selama tahun 2023 terdapat 24 (dua puluh empat) kasus yang terselesaikan dan telah diberikan sanksi yang mencakup:

1. Surat Peringatan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas
4. Penundaan Kenaikan Gaji
5. Penurunan Personal Grade
6. Demosi 1 (satu) Tingkat
7. Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
8. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja diberikan Bank dalam Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).
Remunerasi yang ditanggguhkan

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Management Employee Stock Option Plans (MESOP)*

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu



persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
 - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
 - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatikan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
 - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
 - Alokasi berdasarkan jabatan

- Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
- Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

2. Saham Jatah Pasti

- a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
- b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
- c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
- d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
 - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.

- Pejabat Struktural meliputi Vice President, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan / atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Tahap II	Tahap III
Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program Management and Employee Stock Option Plans (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2023, Bank Jatim tidak melakukan program Management and Employee Stock Option Plans (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.

4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
 - Website melalui <https://wbs.bankjatim.co.id/>
 - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.

6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

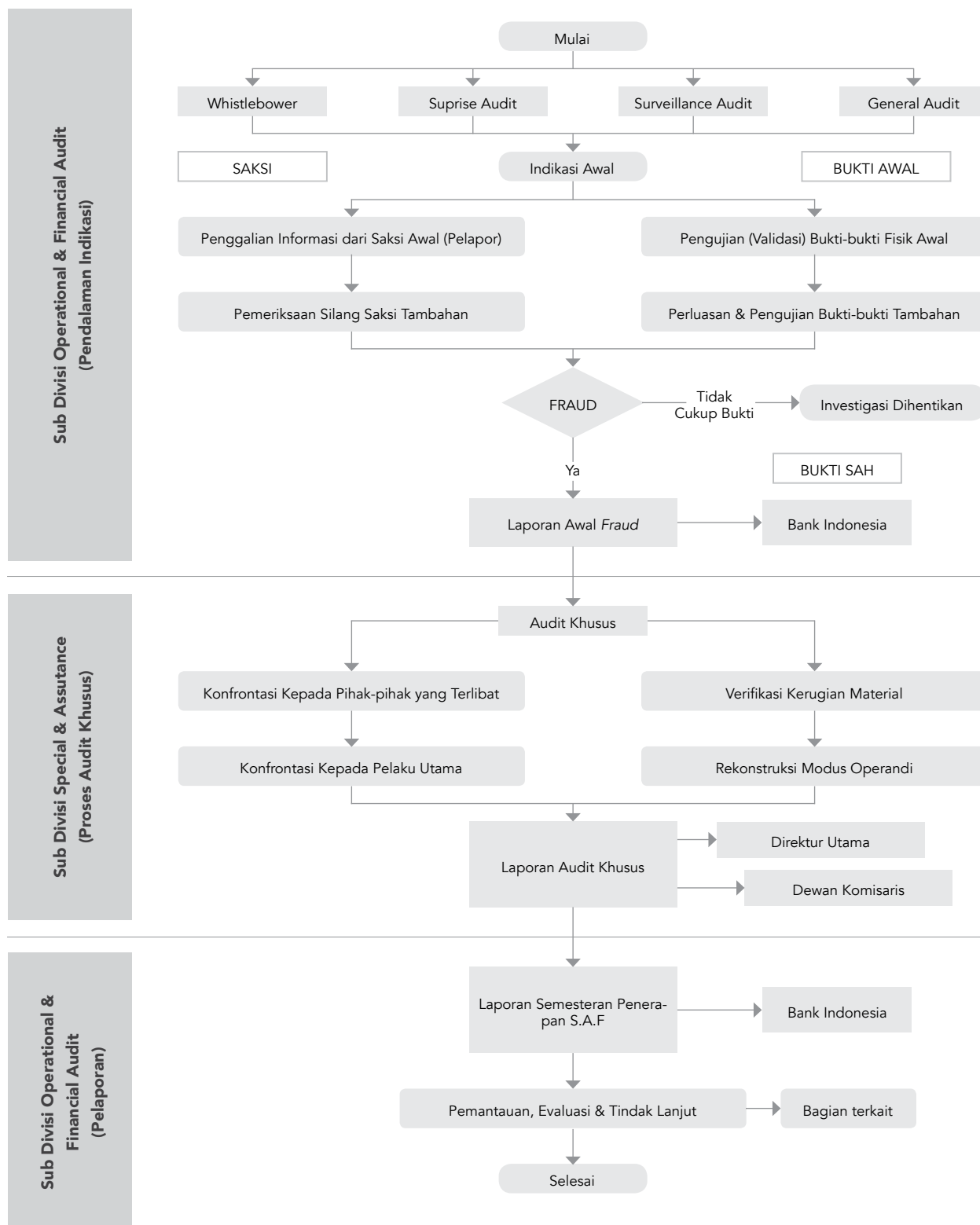
Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.



Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud





Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

sosialisasi *whistleblowing system*

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2023 terdapat 777 laporan melalui sarana *whistleblower*. Dari 777 laporan tersebut, 776 diantaranya tidak dilakukan penyelesaian lebih lanjut, karena:

1. Laporan tidak termasuk dalam *fraud*/memenuhi unsur *fraud*.
2. Laporan termasuk dalam kategori pengaduan layanan nasabah.
3. Laporan termasuk dalam kategori pertanyaan operasional bank.

Tedapat 1 laporan melalui sarana *whistleblower* yang ditindaklanjuti bersama dengan Divisi Human Capital dan saat ini telah berstatus "Selesai". Berikut adalah tabel jumlah pengaduan melalui sarana *whistleblower* selama 2023:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2023	777
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	1
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	1
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	-

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2023

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2023	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	1	1
Tidak Terbukti	-	-

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti Fraud

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*.

Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system*.

Investigasi Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat

langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penyuapan merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam suatu perbankan. Adanya penyuapan membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kinerja Bank. Atas hal tersebut, Bank Jatim memiliki komitmen melakukan upaya pencegahan penyuapan melalui pelaksanaan implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan oleh Bank Jatim melalui serangkaian langkah-langkah berikut:

1. penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi
2. penunjukan unit kerja yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan yang disebut Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
3. pelatihan *awareness* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diikuti oleh PIC dari unit kerja terkait
4. penetapan ketentuan internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
5. pelaksanaan sosialisasi anti suap dan gratifikasi kepada vendor Bank
6. penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai
7. pelaksanaan audit stage 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi



Atas langkah-langkah yang telah dilakukan, Bank Jatim memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan diperolehnya sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut, diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai akan adanya risiko penyuapan pada proses bisnis Bank Jatim.
2. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan Bank Jatim.
3. Meningkatkan kinerja bisnis Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan acuan pelaksanaan pengendalian serta pelaporan gratifikasi, Bank Jatim menetapkan kebijakan gratifikasi melalui:

1. Keputusan Direksi Nomor 062/03/41/DIR/KPT/KEP tanggal 21 Juli 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.
2. Surat Edaran Nomor 062/04/25/KPT/SE tanggal 4 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi.

Kebijakan tersebut mengatur mengenai jenis objek gratifikasi yang wajib dilaporkan, jenis objek gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), hak dan perlindungan pelapor, maupun mekanisme pelaporan gratifikasi.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya dalam pengendalian gratifikasi, Bank Jatim melaksanakan beberapa program yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

1. Diseminasi Gratifikasi
2. Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi dan Mitigasi Risiko
3. Inovasi Pengendalian Gratifikasi
4. Penanganan Pelaporan Gratifikasi.

Adapun sejumlah langkah-langkah yang telah dilakukan Bank Jatim dalam pengimplementasian program pengendalian gratifikasi antara lain:

1. Pemasangan wallpaper *active directory* "Cintai Profesi Untuk Berdedikasi Bersih Tanpa Gratifikasi".
2. Penyampaian Himbauan Larangan Pemberian Gratifikasi pada Momen Tahun Baru 2023 dan Hari Raya Idul Fitri 1444H yang dimuat pada Instagram Bank Jatim.
3. Penyampaian Himbauan Larangan Gratifikasi dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Memasuki Tahun Politik, kepada seluruh pengurus dan unit kerja.

4. Sosialisasi gratifikasi kepada seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, dan Penyelia Umum Cabang.
5. Sosialisasi dengan tema Sinergitas Wujudkan Bank Jatim Bersih Tanpa Suap dan Gratifikasi, kepada ± 250 vendor Bank Jatim dan tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melalui *zoom meeting*.
6. Pembekalan materi mengenai gratifikasi kepada pegawai baru.
7. Keikutsertaan Webinar Pengisian Realisasi Kinerja UPG 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *zoom meeting*.
8. Keikutsertaan Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui *zoom meeting*.
9. Keikutsertaan *E-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dengan peserta sebanyak 49 orang.
10. Diseminasi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) melalui instagram Bank Jatim dan Videotron.
11. Mengidentifikasi risiko/titik rawan gratifikasi yang berpotensi terjadi pada aktivitas perbankan Bank Jatim.
12. Melakukan mitigasi risiko atas hasil identifikasi risiko/titik rawan gratifikasi yang berpotensi terjadi pada aktivitas perbankan Bank Jatim.
13. Pelaksanaan Inovasi Pengendalian Gratifikasi, dalam bentuk:
 - a. *Executive Summit* Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, dengan tema *GCG as the Key to Healthy and Successful Company* dan menghadirkan narasumber dari pihak eksternal.
 - b. Pelaksanaan sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.
 - d. Penyusunan ketentuan internal terkait gratifikasi.
14. Pemantauan secara berkala atas penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang terjadi di seluruh unit kerja, melalui himbauan kepada seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan penerimaan dan/atau gratifikasi.
15. Penyampaian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh seluruh unit kerja.
16. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dilaporkan setiap semester kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui website www.gol.kpk.go.id.



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Bank Jatim menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan pada:

TEMA	PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN	MEDIA SOSIALISASI
Sinergi Wujudkan Bank Jatim Bersih Tanpa Suap & Gratifikasi	Seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Bidang Operasional, Pemimpin Cabang Pembantu, dan Penyelia Umum Cabang	7, 14, 16, 21 dan 23 Juni 2023	Offline
	Kurang Lebih 250 vendor Bank Jatim dan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)	24 Agustus 2023	Zoom Meeting

Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat 1 (satu) laporan penerimaan gratifikasi dan telah mendapatkan penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
DASAR HUKUM PERBANKAN, APU PPT DAN ANTI GRATIFIKASI	Jumat, 6 Januari 2023	33
DASAR HUKUM PERBANKAN, APU PPT DAN ANTI GRATIFIKASI	Sabtu, 7 Januari 2023	40
DASAR HUKUM PERBANKAN, APU PPT DAN ANTI GRATIFIKASI	Minggu, 8 Januari 2023	25
DASAR HUKUM PERBANKAN, APU PPT DAN ANTI GRATIFIKASI	Kamis, 12 Januari 2023	32
DASAR HUKUM PERBANKAN, APU PPT DAN ANTI GRATIFIKASI	Minggu, 15 Januari 2023	6
APU PPT, GRATIFIKASI & BUDAYA PATUH	Sabtu, 26 Agustus 2023	33
APU PPT, GRATIFIKASI & BUDAYA PATUH	Minggu, 10 September 2023	33
APU PPT, GRATIFIKASI & BUDAYA PATUH	Kamis, 21 September 2023	32
APU PPT, GRATIFIKASI & BUDAYA PATUH	Rabu, 4 Oktober 2023	31

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur pada SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ini mengatur tentang sebagai berikut:

1. Organisasi
 - a. Kerjasama antara KPK dengan Bank
 - b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)
 - c. Wajib Lapor LHKPN
2. Prosedur Pelaksanaan
 - a. Pendaftaran
 - b. Proses Pelaporan
 - c. Mekanisme Perbaikan LHKPN
 - d. Pengumuman Wajib Lapor LHKPN
 - e. Surat Kuasa

3. Administrasi dan Sanksi
 - a. Administrasi
 - b. Sanksi

Wajib Lapor LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Lapor di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Direksi
4. SEVP
5. Vice President
6. Pemimpin Cabang



Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan SK Direksi No. 059/258/DIR/KPT/KEP tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelolaan Aplikasi E-LHKPN di Lingkungan Bank Jatim sebagai berikut:

1. Admin Instansi

Dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan organ:

1. Pembina adalah Vice President Kepatuhan dan Tata Kelola;
2. Penanggung Jawab adalah Pemimpin Sub Divisi Kepatuhan;
3. Pelaksana adalah Grup Tata Kelola dan Etika Bisnis.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-lhkpn di lingkungan Bank;
2. Melakukan sosialisasi kepada PN/WL atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
3. Mengelola aplikasi *e-registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:
 - a. Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN/WL yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu *e-registration*);
 - b. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu *e-registration*);
 - c. Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PN/WL LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
4. Memfasilitasi PN/WL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-lhkpn;
5. Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;

6. Melakukan *monitoring* tingkat kepatuhan PN/WL dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
7. Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PN/WL yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Admin Unit Kerja

Dikelola oleh unit kerja yang berwenang menangani *human capital* dengan organ:

1. Pembina adalah Vice President *Human Capital*;
2. Penanggung Jawab adalah Pemimpin Sub Divisi Operasional;
3. Pelaksana adalah Grup Data Rekrutmen, *Assessment Center* dan Data Kepegawaian.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Mengelola aplikasi e-lhkpn (menu *e-registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:

1. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu *e-registration*);
2. Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2023, sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan telah disampaikan kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Januari 2023 s.d Maret 2023). Atas hal tersebut, Bank Jatim memperoleh penghargaan dari KPK dalam hal pengelolaan LHKPN dengan kategori keaktifan dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Sedangkan untuk pelaporan LHKPN khusus awal menjabat periode 2023 sebanyak 16 (enam belas) orang dan telah disampaikan kepada KPK pada bulan September dan Oktober 2023.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total Fraud	-		15	12	3	1
Telah Diselesaikan	-		15	12	3	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-		-		-	-



Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Belum Diupayakan Penyelesaian	-		-		-	
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-		5	-	1	-

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2023. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2023 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi
2. Penyalagunaan Aset
3. Penyalagunaan informasi rahasia/penting
4. Perangkapan Jabatan
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur
6. Pengawasan yang tidak profesional
7. Penilaian subjektif dan tidak independen
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi
9. Penentuan rekanan (*procurement*)
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja
11. Penggunaan informasi
12. Komersialisasi pelayanan Publik

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen
3. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:

1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2023, tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam SOP Manajemen Investor *Corporate Secretary* Bab II yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Praktik ini terjadi apabila pihak diluar bank membeli atau menjual Efek Bank berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak dipublikasi sifatnya. Prosedur kerja ini melarang adanya tindakan orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain.

a. Kriteria *Insider Trading*

1. Orang dalam Bank, yaitu:

- a. Komisaris, Direktur atau Pegawai Bank;
- b. Pemegang saham utama Bank;
- c. Orang perorangan/pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.

2. Mempunyai informasi orang dalam, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum. Orang dalam dilarang:

1. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek yang dimaksud;
2. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Kedua unsur tersebut di atas harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading*.

b. Sanksi Bagi Pelaku *Insider Trading*

- Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

Pemberian Sanksi administratif berupa:

- Peringatan Tertulis;
- Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha;
- Pembatalan persetujuan; dan
- Pembatalan pendaftaran.

- Pasal 104 Undang-Undang No.8 Tahun 1995

Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat(1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).



Selama tahun 2023 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.

3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - a. Visi dan Misi Perseroan
 - b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dijelaskan pada *Sustainability Report* Bank Jatim Tahun 2023.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	ASPEK 1 : HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.	
A.1.	PRINSIP 1 : MENINGKATKAN NILAI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).	
A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Comply Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 15 tanggal 09 Mei 2023. Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme “mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara”.



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Comply Pada RUPS Tahun Buku 2022, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.
A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Comply Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2022.
A.2.	PRINSIP 2 : MENINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR.	
A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Comply Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau <i>investor</i> sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tentang SOP <i>Investor Management</i>.
A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Comply Kebijakan Komunikasi dengan <i>Investor</i> seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui <i>website</i> Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.	ASPEK 2 : FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
B.1.	PRINSIP 3 : MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS.	
B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Comply Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Comply Mengacu pada Akta Nomor 22 tanggal 20 Februari 2018 tentang Berita acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017, "Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan penjurangan calon internal Bank Jatim, serta dari pihak eksternal dengan menggunakan penilaian kriteria sebagai berikut: Integritas, Kompetensi, Pemahaman perbankan dan ekonomi makro, Pemahaman tentang Ekonomi Jawa Timur, Ketentuan internal dan eksternal perbankan.
B.2.	PRINSIP 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.	
B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Comply Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 059/005/DK/KEP tanggal 29 April 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Comply Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.
B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Explain Kebijakan pengunduran diri bagi Dewan Komisaris hanya jika ybs adalah seorang pejabat negara yang menjadi anggota Dewan Komisaris, maka Ybs diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Comply Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris nomor 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai SK Dewan Komisaris Nomor 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021.
C.	ASPEK 3 : FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
C.1.	PRINSIP 5 : MEMPERKUAT KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI DIREKSI.	
C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Comply Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) Direksi dengan komposisi saat ini berjumlah 5 (lima) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank yang berjumlah 6 (enam) Dewan Komisaris dengan komposisi saat ini berjumlah 3 (tiga) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Comply Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Anggota Direksi yang diangkat pada RUPS telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diantaranya yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Anggota Direksi juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan.
C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Comply Profil Direktur Keuangan Nama: Edi Masrianto (2022-saat ini) Pendidikan: - S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Jember, 1989 - S2 Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gajah Mada, 2004 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
C.2.	PRINSIP 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.	
C.2.1.	Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Comply Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 059/128/DIR/PRS/KEP tanggal 11 Mei 2020 tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.2.	Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.	Comply Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. diungkapkan dalam laporan tahunan.
C.2.3.	Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Explain Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi. Kebijakan Budaya Beretika telah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
D.	ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
D.1.	PRINSIP 7 : MENINGKATKAN ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN MELALUI PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN.	
D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Comply Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam SK Direksi Nomor 057/008/DIR/KEP/TRE tanggal 11 Januari 2018 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri.
D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Comply Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (Code Of Conduct), Pedoman Benturan Kepentingan, Corporate Culture, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.	Comply Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.
D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Explain Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah; 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Comply Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Comply Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
E.	ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI	
E.1.	PRINSIP 8 : MENINGKATKAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI.	
E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Comply Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut: • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Comply Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



Governance Principles for Banks

yang Diterbitkan oleh Basel Committee In Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada: - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris - SK Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Salah satunya yakni Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim telah memenuhi kualifikasi dan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan internal Bank SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Salah satu komponen yang telah dipenuhi yakni Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Hal ini juga telah terkomodir dalam ketentuan internal Bank Jatim SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercermin pada Struktur Tata Kelola Bank Jatim SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut diatur pada ketentuan internal Bank Jatim: - SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.



Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control</i> , <i>risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng-update website Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi <i>stakeholder</i> seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank Jatim mengacu pada ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016, POJK No. 17 Tahun 2023, SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala paling sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris dan unit kerja yang membidangi guna menghasilkan penilaian komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG Assessment

Parameter	Bobot (%)	Jun 2022	Des 2022	Jun 2023
		Skor x Bobot		
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10	0.2	0.2	0.2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20	0.6	0.6	0.4
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10	0.3	0.2	0.2
Penanganan Benturan Kepentingan	10	0.3	0.21	0.2
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5	0.1	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Intern	5	0.15	0.15	0.15
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5	0.1	0.1	0.1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.5	0.19	0.225	0.16
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	7.5	0.15	0.225	0.225
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15	0.23	0.3	0.2
Rencana Strategis Bank	5	0.15	0.15	0.15
Total Skor		2.47	2.51	2.14
Peringkat		2	3	2

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2023, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

Asean Corporate Governance Scorecard

Penilaian atas penerapan good corporate governance (GCG) juga dilaksanakan berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara.

Skor Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian ACGS Bank Jatim Tahun 2021, Bank Jatim memperoleh penghargaan **ASEAN Asset Class** dalam pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola di Bank Jatim. Rekomendasi perbaikan tersebut menjadi dasar dalam melakukan *continues improvement*.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL Perusahaan







Bank Jatim menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Bank Jatim senantiasa mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan dan kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan alam melalui perilaku yang transparan dan beretika.

Bank Jatim berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis dalam proses dan pada tingkat pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dapat mendorong keberhasilan Bank dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk memastikan integritas lingkungan serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Jatim mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Indeks

OJK

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	22	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	22	
	3. Laba Operasional.	22	SEOJK 9
	4. Laba sebelum pajak.	22	
	5. Laba bersih.	22	
	6. Laba (rugi).	22	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	23	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	N/A	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	23	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	N/A	
	11. Laba (rugi) per saham.	23	SEOJK 9
	12. Jumlah aset.	20	SEOJK 16
	13. Jumlah liabilitas.	21	
	14. Jumlah ekuitas.	22	
	15. Dana pihak ketiga.	21	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	21	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	24	SEOJK 16
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	24	
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	24	
	20. Rasio lancar.	24	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	24	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	24	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	23. Rasio KPMM.	24	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	24	
	25. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	24	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	24	
	27. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	24	
	28. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	24	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	24	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	24	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	24	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	24	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	25-27	
	a. Jumlah saham yang beredar.		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan Efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	27	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah Efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	d. Jumlah Efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	27	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	27	SEOJK 16
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	44	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	44	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	44	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	44-45	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	45	
	f. Struktur organisasi.	38	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	37	
	h. Teknologi informasi.	38	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	37-39	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	39-43	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	39	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	38	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	38	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	N/A	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	N/A	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	45-46	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	38	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	45-46	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	46-49	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi. 2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi. 3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	53-56 56-57 57-60 62 53	SEOJK 16 SEOJK 9 SEOJK 9
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	63-64	SEOJK 16 POJK 29
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: 1. Alamat 2. Nomor telepon 3. Alamat surat elektronik 4. Alamat situs web	68	SEOJK 9 SEOJK 16
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi: a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	69-70	SEOJK 9 SEOJK 16
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.	72-73	SEOJK 9 SEOJK 16
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi Perusahaan 2. Misi Perusahaan 3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	74 74 76-78	SEOJK 9 SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	79	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	80	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	80-92	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	94-97	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	98-99	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	97	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	100-108	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	109-116	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.		
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi.		
	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.		
	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	121-140	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	141-142	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	143-148	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
Pemegang saham utama dan pengendali	d. Kepemilikan individu asing.	148	SEOJK 9 SEOJK 16
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.		
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	148	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:	N/A	SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> .		
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
Kronologis pencatatan saham	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	149-150	SEOJK 16
	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan Efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Informasi pencatatan Efek lainnya	Informasi pencatatan Efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	151	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi:	152	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	152-153	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	154-160	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	171-172	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	177-209	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	178-209	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	178-209	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	198, 209	
	d. Profitabilitas.	198, 209	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	211-221	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	221-225	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	218, 214	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	222	
	5. Ekuitas.	225-226	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	227-233	SEOJK 9
	7. Arus kas.	233-235	
	8. Suku bunga dasar kredit.	243	
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		242-249	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	235-237	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	237-238	
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal	250-251	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>).	250	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	250	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	264	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.		
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.		
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.		
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.		
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	264	
	2. Tujuan investasi barang modal.	265	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	264	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	266-268	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	269	
	2. Laba (rugi).	269	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	270	
	4. Pemasaran.	270-271	
	5. Pengembangan SDM.	271	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	269	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	272	
	2. Laba (rugi).	272	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	272	
	4. Kebijakan dividen.	273	
	5. Pemasaran.	273	
	6. Pengembangan SDM.	273	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	272	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	174-177	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	274	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	274	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	274	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	274	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	275	
	2. Rencana penggunaan dana.	275	
	3. Rincian penggunaan dana.	275	
	4. Saldo dana.	275	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	275	
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.		
	b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	275-280	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: 1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>). 2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>). g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut. i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		SEOJK 16 SEOJK 13
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. 279-280 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. 279-280 Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		SEOJK 16
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi. 280-281 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. 280 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. 281 Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		SEOJK 16
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	251-264	SEOJK 9

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku. b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	325-333	SEOJK 16
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	337	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi.	336	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	338-342	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada). b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).	343-344	SEOJK 16
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: a. Prosedur penilaian kinerja. b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	346-347	SEOJK 16
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	390	SEOJK 13 POJK 17

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	348-349	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.	351	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	355-363	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	363-365	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	366-376	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	376-382	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	386	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	386-388	SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	382-386	SEOJK 16
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.		
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	394-396	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	393-394	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	397	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	399	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	397-398	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	399-401	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:	403-404	
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	405	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	406-407	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	401-402	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).	401	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	405-406	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	407-408	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	409-410	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	411	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	413	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	408	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.	408	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	411-412	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	413-414	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	416	SEOJK 16
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	416	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	416-417	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	418	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	420	
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	419	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	419-420	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	417	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	419	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.	418-419	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	421	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	448-449	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	450-451	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	452-453	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	453	
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	453-457	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	458-462	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	463	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	464	
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	464-466	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	467-468	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		SEOJK 13
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		468-469	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	476-478	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	478-479	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	479	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi	444-445	POJK 45
	a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab.		
	b. Jumlah rapat yang dilakukan.		
	c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.		
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi:	444	
	a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi.		
	b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.		
	c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.		
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	445	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:	445	
	a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi.		
	b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.		
	c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.		
	d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.		
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:	445	
	a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.		
	b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu.		
	c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>).	445	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	446	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	446	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	446	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	446	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i> .	446	
	12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	446	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	446	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	447	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	447	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	447	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	447	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	447	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	447	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ESOP</i>).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: 1. Jumlah saham dan/atau opsi. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	479-481	SEOJK 16
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	391-392	SEOJK 16
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran. 2. Perlindungan bagi pelapor. 3. Penanganan pengaduan. 4. Pihak yang mengelola pengaduan. 5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku. b. Tindak lanjut pengaduan. Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	481 481-482 482-483 484 484	SEOJK 16
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i>, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.	484-487 487	SEOJK 16 POJK 17
Penanganan benturan kepentingan		489-490	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	489	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		491	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		490	SEOJK 13

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	488-489	SEOJK 13
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	489	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	489	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		491	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	491-498	SEOJK 16
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) Penjelasan strategi keberlanjutan. b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup). c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik. d) Penjelasan Direksi. e) Tata kelola keberlanjutan. f) Kinerja keberlanjutan. g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada. h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada. i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. 2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:		SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik. 4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. 5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. 7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

KETERANGAN

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- POJK 17** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum



Laporan Keuangan
31 Desember 2023 dan 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial Statements
as of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended with independent auditor's report*

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022
beserta laporan auditor independen
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2023 and 2022
with independent auditor's report
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/
Page

Surat Pernyataan Direksi		Board of Director's Statement
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5 - 6	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 209	Notes to the Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL - TANGGAL TERSEBUT**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Busrul Iman
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Puncak Cengkeh No. 10
Malang
Nomor telepon : (031) 5310090 ext.206
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Edi Masrianto
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28
Surabaya
Nomor telepon : (031) 5310090 ext. 208
Jabatan : Direktur Keuangan, Treasury dan Global
Services

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

We, the undersigned :

1. Name : Busrul Iman
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Puncak Cengkeh No. 10
Malang
Telephone : (031) 5310090 ext.206
Position : President Director
2. Name : Edi Masrianto
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Manyar Tirtoyoso Utara 8 No. 28
Surabaya
Telephone : (031) 5310090 ext. 208
Position : Finance, Treasury and Global
Services Director

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk internal control system.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya, 15 Januari 2024 / January 15, 2024

Busrul Iman

Direktur Utama/ President Director

Edi Masrianto

Direktur Keuangan, Treasury dan Global
Services/ Finance, Treasury and Global Services
Director

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

No : 00006/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/I/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi

**PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

*The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors*

**PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk**

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as at December 31, 2023 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan dibawah ini.

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2m (informasi kebijakan akuntansi material – identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai) dan Catatan 12 (kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah) atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan Bank adalah sebesar Rp1.311.513 juta. Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 71").

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan, yang mewakili 50,62% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas kredit tersebut yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut penentuan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subyektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans

As described in Note 2m (information of material accounting policies – identification and measurement of impairment losses) and Note 12 (loans and sharia financing) to the financial statements, as at December 31, 2023, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp1,311,513 million. These allowance for impairment losses for loans measured at amortised cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 71, "Financial Instruments" ("PSAK 71").

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans, which represented 50.62% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans measured at amortised cost, which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgement and is subject to high degree of estimation uncertainty.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Bank menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasi dari kredit yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

The Bank calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Bank assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortised cost.

The significant judgements involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining the models;*
- *Identification of loans measured at amortised cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, debitur di industri berisiko tinggi yang terkena dampak COVID-19 dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.
- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan menggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.
- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap pesyaratan PSAK 71, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.

How our audit addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, debtors in high-risk industries impacted by COVID-19 and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.
- Where objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.
- We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 71, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
 - Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.
- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*
 - *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama.

Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS

Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No.AP.0354

15 Januari 2024 / *January 15, 2024*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2023 and 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
Kas	2b, 2d, 2f, 3, 44, 45	2.652.775	1.988.262	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2b, 2d, 2g, 4, 43, 44, 45	7.971.412	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2b, 2c, 2d, 2g, 5, 43, 44, 45	491.330	303.129	Current accounts with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 5, 43e	(1.077)	(441)	Allowance for impairment losses
		<u>490.253</u>	<u>302.688</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2b, 2c, 2d, 2h, 6, 43, 44, 45	5.234.721	6.916.329	Placements with Bank Indonesia and other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 6, 43e	(5.026)	(3.154)	Allowance for impairment losses
		<u>5.229.695</u>	<u>6.913.175</u>	
Tagihan spot dan derivatif	7	-	361	Receivables of spot and derivative
Surat berharga	2b, 2c, 2d, 2i, 8, 43, 44, 45	16.323.831	23.217.671	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 8, 43e	(511)	(400)	Allowance for impairment losses
		<u>16.323.320</u>	<u>23.217.271</u>	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2d, 2j, 9, 43, 44, 45	8.303.663	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d, 10, 43, 44, 45	6.247.318	7.822.847	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	2d, 2k, 11, 43, 44, 45	223.138	286.147	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				Loans, and sharia financing
- Pihak berelasi	2c, 2d, 2e, 12, 40, 43, 44	184.848	134.871	Related parties -
- Pihak ketiga		54.576.055	46.061.786	Third parties -
Jumlah		<u>54.760.903</u>	<u>46.196.657</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	2m, 12, 43e	(1.364.905)	(1.318.612)	Allowance for impairment losses
		<u>53.395.998</u>	<u>44.878.045</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2b, 2d, 13, 43, 44, 45	685.734	646.125	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	2n, 14	207.452	166.661	Prepaid expenses
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	2o, 15	2.230.878	2.109.260	Cost
Akumulasi penyusutan		(953.165)	(825.010)	Accumulated depreciation
Nilai buku		<u>1.277.713</u>	<u>1.284.250</u>	Net book value
Aset pajak tangguhan, neto	2x, 22g	472.123	502.238	Deferred tax assets, net
Piutang pajak	22a	777	493	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	16	373.402	140.998	Other assets, net
JUMLAH ASET		<u>103.854.773</u>	<u>103.031.367</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2023 and 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2q, 17, 44, 45	987.604	872.514	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah				Deposits from customers
- Pihak berelasi	2b, 2d, 2e	12.644.538	15.295.405	Related parties -
- Pihak ketiga	2r, 18, 40, 44, 45	63.205.317	64.630.285	Third parties -
		<u>75.849.855</u>	<u>79.925.690</u>	
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
- Pihak berelasi	2d, 2e, 2s	56.694	141.996	Related parties -
- Pihak ketiga	19, 40, 44, 45	<u>2.503.627</u>	<u>3.168.842</u>	Third parties -
		<u>2.560.321</u>	<u>3.310.838</u>	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	20	7.915.163	3.891.346	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	2d, 2t, 21, 44, 45	596.977	631.464	Borrowings
Utang pajak	2x, 22b	143.245	90.783	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	2d, 23, 44, 45	504.748	520.840	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	2b, 2d, 2z, 2ac, 24, 44, 45	779.314	472.054	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>89.337.227</u>	<u>89.715.529</u>	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Simpanan dari nasabah				Deposits from customers
- Pihak berelasi	25	3.764	2.302	Related parties -
- Pihak ketiga	25	<u>2.343.291</u>	<u>1.839.390</u>	Third parties -
		<u>2.347.055</u>	<u>1.841.692</u>	
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
- Pihak ketiga	25	<u>19.422</u>	<u>28.285</u>	Third parties -
		<u>19.422</u>	<u>28.285</u>	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>2.366.477</u>	<u>1.869.977</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham:				Share capital:
- Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series A : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
- Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series B : Rp250 (full Rupiah) - par value per share
Modal dasar:				Authorized:
- Seri A : 24.000.000.000 saham				Series A : 24,000,000,000 shares -
- Seri B : 12.000.000.000 saham				Series B : 12,000,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A - 11.934.147.982 saham				Series A - 11,934,147,982 shares -
- Seri B - 3.081.350.100 saham				Series B - 3,081,350,100 shares -
	26	3.753.875	3.753.875	
Tambahan modal disetor - neto	2aa, 27	532.734	532.734	Paid-in capital - net
Surplus revaluasi aset tetap		788.049	789.998	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan		(117.777)	(100.912)	Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	8	(63.958)	(115.048)	Unrealized loss financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum		5.788.041	5.042.390	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya		<u>1.470.105</u>	<u>1.542.824</u>	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		<u>12.151.069</u>	<u>11.445.861</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>103.854.773</u>	<u>103.031.367</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the years then ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan bunga dan syariah	2e, 2v, 2w, 30, 40	7.357.284	6.882.651	Interest and sharia income
Beban bunga dan syariah	2e, 40, 31	(2.316.184)	(1.965.595)	Interest and sharia expense
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH, NETO		5.041.100	4.917.056	INTEREST AND SHARIA INCOME, NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Administrasi giro, tabungan dan deposito	32	193.996	184.480	Current accounts, savings and deposits administration fees
Penerimaan kembali kredit hapus buku	32	127.264	56.653	Collection of loans written-off
Administrasi kredit	32	30.880	42.511	Loan administration fees
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	2w, 32	22.093	11.105	Fees and commissions from other than loans
Lainnya	32	274.187	238.820	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		648.420	533.569	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	2z, 34	(1.762.643)	(1.674.698)	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	35	(1.182.987)	(1.229.388)	General and administrative
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	2m, 33	(694.136)	(404.659)	Provision for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	36	(194.713)	(201.054)	Other expenses
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		(3.834.479)	(3.509.799)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		1.855.041	1.940.826	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Fee jasa pelayanan pajak	37	6.444	6.084	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap	37	5.608	5.274	Gain on sale of fixed asset - net
Keuntungan selisih kurs	2b, 37	2.390	-	Gain on foreign exchange
Keuntungan penjualan efek-efek neto	37	8.698	2.757	Gain on sale of securities - net
Beban non-operasional	38	(19.339)	(83.405)	Non-operating expenses
Lainnya	37	33.901	158.513	Others
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		37.702	89.223	TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.892.743	2.030.049	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK:				TAX EXPENSES:
Kini	2x, 22c, 22e	(399.474)	(307.452)	Current
Tangguhan		(23.164)	(179.773)	Deferred
		(422.638)	(487.225)	
LABA TAHUN BERJALAN		1.470.105	1.542.824	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap		(1.949)	40.281	Revaluation surplus (deficit) of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(21.898)	100.163	Remeasurement of employee benefit liability
Penyesuaian saldo awal		-	(19.678)	Beginning balance adjustment
Pajak penghasilan terkait		5.033	(17.586)	Related income taxes
		(18.814)	103.180	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		63.074	(400.611)	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Penyesuaian saldo awal		-	(3.730)	Beginning balance adjustment
Pajak penghasilan terkait		(11.984)	76.116	Related income taxes
		51.090	(328.225)	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO SETELAH PAJAK		32.276	(225.045)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.502.381	1.317.779	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (DALAM NILAI PENUH)	2y, 39	97,91	102,75	BASIC EARNINGS PER SHARE (IN FULL AMOUNT)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years then ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor- neto/ Other paid-in capital-net	Surplus revaluasi aset tetap/ Revaluation surplus of fixed asset	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan/ Remeasurement of defined employee benefit liability - net of deferred tax	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Saldo laba/ Retained earnings		Total ekuitas/ Total equity	
							Cadangan umum/ General reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
31 Desember 2021		3.753.875	532.734	749.717	(163.811)	213.177	4.301.777	1.523.070	10.910.539	December 31, 2021
Pembentukan cadangan umum	26e	-	-	-	-	-	740.613	(740.613)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ab, 26e	-	-	-	-	-	-	(782.457)	(782.457)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	40.281	62.899	(328.225)	-	1.542.824	1.317.779	Total comprehensive income for the year
31 Desember 2022		3.753.875	532.734	789.998	(100.912)	(115.048)	5.042.390	1.542.824	11.445.861	December 31, 2022
Pembentukan cadangan umum	26e	-	-	-	-	-	745.651	(745.651)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	2ab, 26e	-	-	-	-	-	-	(797.173)	(797.173)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		-	-	(1.949)	(16.865)	51.090	-	1.470.105	1.502.381	Total comprehensive income for the year
31 Desember 2023		3.753.875	532.734	788.049	(117.777)	(63.958)	5.788.041	1.470.105	12.151.069	December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years then ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	December 31, 2023	December 31, 2022	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan bunga, syariah, provisi dan komisi		7.324.150	7.030.426	Receipts of interest, sharia, fees and commissions
Pembayaran bunga, syariah, provisi dan komisi		(2.310.264)	(1.931.344)	Payments of interest, sharia, fees and commissions
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		521.156	476.364	Receipts of other operating income
Penerimaan kembali dari kredit hapus buku		127.264	56.653	Collection of loans written-off
Penerimaan dari pendapatan non-operasional		60.386	172.136	Receipts from non-operating income
Pembayaran untuk biaya non-operasional		(19.337)	(82.913)	Payments for non-operating expenses
Pembayaran beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan		(1.763.167)	(1.659.597)	Payments of salaries and employee benefits
Pembayaran beban umum dan administrasi		(1.283.327)	(1.296.665)	Payments of general and administrative expenses
Pembayaran pajak		(368.455)	(389.372)	Payment of taxes
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		2.288.406	2.375.688	Cash flow from operating activities before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(1.500)	(7.000)	Placement with Bank Indonesia and other bank
Kredit yang diberikan		(9.193.797)	(4.347.656)	Loans
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(4.208.597)	(4.095.066)	Marketable securities sold under repurchase agreement
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		1.575.529	(4.402.162)	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset lain-lain dan tagihan lainnya		(166.678)	(117.044)	Other assets and other receivables
Liabilitas segera		115.091	278.638	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		(3.570.473)	(1.434.484)	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(759.380)	(848.777)	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		4.023.817	3.891.346	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain		200.981	(39.476)	Other liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(9.696.601)	(8.745.993)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penjualan surat berharga		6.948.323	8.846.760	Proceeds of marketable securities
Perolehan aset tetap	15	(149.298)	(248.269)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	15	5.608	5.274	Fixed asset sold
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		6.804.633	8.603.765	Net cash provided from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima		43.578	(23.825)	Proceeds (payments of) from borrowings
Penerimaan (pembayaran) liabilitas sewa		6.316	(21.111)	Proceeds (payments of) lease liability
Pembayaran dividen kas	26e	(797.173)	(782.457)	Payments of cash dividends
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(747.279)	(827.393)	Net cash used in financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the years then ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Penurunan neto kas dan setara kas		(3.639.247)	(969.621)	Decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		19.988.131	20.957.752	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun		<u>16.348.884</u>	<u>19.988.131</u>	Cash and cash equivalents at end of year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	3	2.652.775	1.988.262	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4	7.971.412	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	491.330	303.129	Current accounts with other bank s
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan)	6	5.233.367	6.910.000	Placements with Bank Indonesia and other banks (maturity within three months or less since the acquisition date)
Jumlah kas dan setara kas		<u>16.348.884</u>	<u>19.988.131</u>	Total cash and cash equivalents

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

1. GENERAL

a. Establishment of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (the "Bank") was established under the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur based on the notarial deed No.91 dated August 17, 1961 of Anwar Mahajudin. Pursuant to Law No.13 year 1962 regarding the Basic Terms for Regional Development Banks, which require that the establishment of Regional Development Banks be based on Municipal District Regulations, therefore the Municipal District I of East Java issued Municipal District Regulation No.2 year 1976. Based on such Municipal District Regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Such Municipal District Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs under Decision Letter No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Municipal Gazette District I Province of East Java Year 1977 Series C No.I/c dated February 1, 1977. This Regulation has been amended several times, with the latest amendment being Municipal District Regulation No.11 year 1996, dated December 30, 1996, which was approved by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-280 dated April 21, 1997. Pursuant to the approval of Municipal District Regulation No.1 year 1999 by the Regional Legislative Assembly of East Java dated March 20, 1999 and by the Minister of Domestic Affairs in Decision Letter No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal status of the Bank was changed from a Regional Corporation to a Limited Liability Company.

This change in status of legal form was based on the notarial deed No.1 dated May 1, 1999 of R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2.8227.HT.01.01. TH.99 dated May 5, 1999 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.42, dated May 25, 1999 in Supplement of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) *Regional Champion* yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami perubahan melalui akta No.23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Bambang Heru Djuwito, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 tanggal 27 April 2015. Perubahan selanjutnya melalui akta No.55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020. Perubahan terakhir melalui akta No.95 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 tanggal 21 Juni 2021.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

In line with the economic growth and to comply with the requirement to be Regional Champion BPD, with one of the indicators is to strengthen the capital structure, an amendment of Article of Associations was taken based on Extraordinary General Meetings of Shareholders Decision Deeds No.89 dated April 25, 2012 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and granted approval from Ministry of Law and Human Rights based on decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, registered on the Company list according to Limited Company Law with registration No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012, as well as by Decision Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 that declared effective registration statement to become a public company and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hereinafter, the Articles of Associations has been amended No.23 dated April 8, 2015 made by Bambang Heru Djuwito, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0927646 dated April 27, 2015. The next deed No.55 dated April 22, 2020 made by Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0197642 dated April 23, 2020. The latest deed No.95 dated May 31, 2021 made by Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notary in Surabaya and has been registered on the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387989 dated June 21, 2021.

The Bank started its commercial operations in accordance with the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. The Sharia Operating Unit started its commercial operations on August 21, 2007 in accordance with the approval letter from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007 for the establishment of the Bank's Sharia Operating Unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran umum perdana saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank akan mengimplementasikan program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Bank and general information (continued)

The ultimate parent of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the decision letter No.23/28/KEP/DIR of the Board of Director of Bank Indonesia (BI) dated August 2, 1990.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services, including banking activities based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The main role of the Bank is to participate in developing regional economic growth by providing facilities to small and medium scale businesses to achieve appropriate profit levels. Its main activities involve collecting and lending funds and rendering other banking services.

b. Initial public offering (IPO)

Based on letter No.S-8143/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares at Rp250 (full Rupiah) per share with selling price of Rp430 (full Rupiah) per share became effective on November 29, 2012. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the share offer price over the par value per share was recognized as "Other paid-in capital - net of share issuance cost", which is presented under the Equity section of the Statement of Financial Position.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank will implement *Employee Stock Allocation* (ESA) program by allocating maximum of 10% of the newly issued shares and issued *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) program with maximum of 0.71% of the issued and paid-up shares after Initial Public Offering.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum perdana saham (lanjutan)

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 November 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II Periode Tahun 2017 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 November 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

c. Manajemen eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 12 April 2023 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.23 tanggal 7 Desember 2022 dari notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Initial public offering (IPO) (continued)

The MESOP Program Period 2016 Phase I has been implemented from August 1, 2016 to November 13, 2016, February 1, 2017 to March 13, 2017, August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Period 2017 Phase II has been implemented from August 1, 2017 to November 13, 2017, February 1, 2018 to March 15, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 to September 14, 2018, February 1, 2019 to March 18, 2019, August 1, 2019 to September 11, 2019.

c. Executive management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.25 dated April 12, 2023 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.23 dated December 7, 2022 of notary Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. are as follows:

2023

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Suprajarto *)
Adhy Karyono
Candra Fajri Ananda
Muhammad Mas'ud
Sumaryono

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah
Direktur Teknologi Informasi dan Digital
Direktur Kepatuhan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Keuangan, Treasury dan Global Service

Busrul Iman
Arif Suhirman
R. Arief Wicaksono
Zulhelfi Abidin
Tonny Prasetyo
Eko Susetyono
Edi Masrianto

Board of Directors

President Director
Operation Director
Micro, Retail and Medium Director
Information Technology and Digital Director
Compliance Director
Risk Management Director
Finance, Treasury and Global Service Director

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Suprajarto
Heru Tjahjono
Muhammad Mas'ud
Candra Fajri Ananda
Sumaryono

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasi
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah
Direktur Teknologi Informasi dan *Digital*
Direktur Kepatuhan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Service*

Busrul Iman
Tonny Prasetyo **)
R. Arief Wicaksono
Zulhelfi Abidin ***)
-
Eko Susetyono
Edi Masrianto

*) meninggal dunia tanggal 19 Desember 2023.

**) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi.

***) ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.061/10/DKM/KEP tanggal 13 Desember 2022 dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No.S-4/KR.0413/2023 tanggal 4 Januari 2023.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	2023
Ketua	Sumaryono
Anggota	Muhammad Mas'ud
Anggota	Kusnadi
Anggota	Moch. Arifin

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

	2023
Ketua	Sumaryono
Anggota	Muhammad Mas'ud
Anggota	Sulam Andjar Rochim
Anggota	-
Anggota	-

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

	2023
Ketua	Muhammad Mas'ud
Anggota	Adhy Karyono
Anggota	Sumaryono
Anggota	Slamet Purwanto
Anggota	-
Anggota	-

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan No.062/105/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Desember 2023.

1. GENERAL (continued)

c. Executive management (continued)

2022

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Operation Director
Micro, Retail and Medium Director
Information Technology and Digital Director
Compliance Director
Risk Management Director
Finance, Treasury and Global Service Director

*) passed away December 19, 2023.

**) appointed as a temporary substitute Compliance Director, so that the position of Operation Director was temporarily released to fulfill the independence aspect.

***) appointed concurrently as the Operation Director.

This is in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No.061/10/DKM/KEP dated December 13, 2022 and has been recorded in the OJK supervision administration based on letter No.S-4/KR.0413/2023 dated January 4, 2023.

The composition of the Audit Committee are as follows:

	2022	
	Sumaryono	Chairman
	Muhammad Mas'ud	Member
	Candra Fajri Ananda	Member
	Kusnadi	Member

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

	2022	
	Candra Fajri Ananda	Chairman
	Muhammad Mas'ud	Member
	Sumaryono	Member
	Sulam Andjar Rochim	Member
	Moch. Arifin	Member

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

	2022	
	Muhammad Mas'ud	Chairman
	Suprajarto	Member
	Candra Fajri Ananda	Member
	Sumaryono	Member
	Heru Tjahyono	Member
	Revi Adiana S.	Member

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee accordance to Decision Letter No.062/105/DIR/HCP/KEP dated December 29, 2023.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Pemimpin Divisi	Wardhana Suryaatmaja
Pemimpin Sub Divisi	R. Sonny Soelaksono
Pemimpin Sub Divisi	Agung Setya Nugroho
Pemimpin Sub Divisi	-

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Pemimpin Divisi	Wioga Adhiarma Aji
Pemimpin Sub Divisi	Bambang Supriadi
Pemimpin Sub Divisi	Derry Widya Ariyata
Pemimpin Sub Divisi	Lestari Nur Imani

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Ketua	Afifuddin Muhajir
Anggota	-

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.219 dan 4.385 orang (tidak diaudit).

d. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 163 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 212 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 196 kantor layanan Syariah, 828 ATM (Automated Teller Machine), 26 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 84 CRM (Cash Recycling Machine) konvensional, 10 CRM (Cash Recycling Machine) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 162 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 212 kantor fungsional konvensional, 3 kantor fungsional Syariah, 195 kantor layanan Syariah, 815 ATM (Automated Teller Machine), 26 ATM Syariah (Sharia Automated Teller Machine), 58 CRM (Cash Recycling Machine) konvensional, 7 CRM (Cash Recycling Machine) Syariah di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Executive management (continued)

The composition of the Internal Audit as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	
Ratna Hastutik		Division Head
M. Muad		Sub Division Head
R. Sonny Soelaksono		Sub Division Head
-		Sub Division Head

The Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	
Budi Sumarsono		Division Head
Bambang Supriadi		Sub Division Head
Derry Widya Ariyata		Sub Division Head
Lestari Nur Imani		Sub Division Head

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	
Afifuddin Muhajir		Division Head
Sa'ad Ibrahim		Sub Division Head

As of December 31, 2023 and, 2022, the Bank has 4,219 and 4,385 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Office network

As of December 31, 2023, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 163 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 212 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 196 Sharia service offices, 828 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 84 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 10 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2022, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 162 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 212 conventional functional offices, 3 Sharia functional office, 195 Sharia service offices, 815 ATMs (Automated Teller Machines), 26 ATMs Sharia (Sharia Automated Teller Machines), 58 CRM (Cash Recycling Machines) conventional, 7 CRM (Cash Recycling Machines) Sharia located in Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Jaringan kantor (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau payment point.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Basis penyusunan laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Informasi keuangan UUS Bank disajikan sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 103, "Akuntansi Salam", PSAK 104, "Akuntansi Istishna", PSAK 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107, "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK 110 "Akuntansi Sukuk", PSAK 111 "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan IAI.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

1. GENERAL (continued)

d. Office network (continued)

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Statement of compliance

The financial statements as of December 31 2023 and 2022 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company".

The financial information of UUS have been prepared in conformity with PSAK 101, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 102, "Accounting for Murabahah", PSAK 103, "Accounting for Salam", PSAK 104, "Accounting for Istishna", PSAK 105, "Accounting for Mudharabah", PSAK 106, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 107, "Accounting for Ijarah" which replaces PSAK 59, "Accounting for Sharia Banking", associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, PSAK 110 "Accounting for Sukuk", PSAK 111 "Accounting for Wa'd" and other PSAK, as long as not contradict with sharia principles and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) issued by Bank Indonesia and IAI.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

a. Basis penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

Statement of compliance (continued)

The statements of cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

b. Transaction and balances in foreign currency

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

	2023	2022
1 Poundsterling Inggris Raya	19.626	18.786
1 Euro	17.038	16.582
1 Dolar Amerika Serikat	15.397	15.568
1 Dolar Singapura	11.676	11.593
1 Dolar Australia	10.521	10.558
1 Riyal Saudi Arabia	4.106	4.139
1 Ringgit Malaysia	3.355	3.534
1 Yuan China Renminbi	2.170	2.239
1 Dolar Hong Kong	1.970	1.997
100 Yen Jepang	10.888	11.800

c. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 25 memberi definisi baru dari estimasi akuntansi dan penjelasannya.
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal, penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen PSAK 46 ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Transaction and balances in foreign currency (continued)

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of December 31, 2023 and 2022 using the middle rates based on Reuters (at 16.00 hours Western Indonesian Time) (in full amount).

	2023	2022	
1 Poundsterling Inggris Raya	19.626	18.786	Great Britain Poundsterling 1/Rp
1 Euro	17.038	16.582	Euro 1/Rp
1 Dolar Amerika Serikat	15.397	15.568	United States Dollar 1/Rp
1 Dolar Singapura	11.676	11.593	Singapore Dollar 1/Rp
1 Dolar Australia	10.521	10.558	Australian Dollar 1/Rp
1 Riyal Saudi Arabia	4.106	4.139	Saudi Arabian Riyal 1/Rp
1 Ringgit Malaysia	3.355	3.534	Malaysian Ringgit 1/Rp
1 Yuan China Renminbi	2.170	2.239	Chinese Yuan Renminbi 1/Rp
1 Dolar Hong Kong	1.970	1.997	Hong Kong Dollar 1/Rp
100 Yen Jepang	10.888	11.800	Japanese Yen 100/Rp

c. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard

On 1 January, 2023 there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements concerning Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term", earlier application is permitted. The amendments specify the requirement to classify liabilities as current or non-current.
- Amendment to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error", earlier application is permitted. Amendments to PSAK 25 provide a new definition of accounting estimate and an explanation.
- Amendments to PSAK 46, "Income Taxes" regarding Deferred Tax on Assets and Liabilities arising from a Single Transaction, earlier application is permitted. This amendment to PSAK 46 proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities upon initial recognition, for example from lease transactions, to eliminate differences in practice in the field for such transactions and similar transactions.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 71, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard (continued)

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial periods.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under repurchased agreement, marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), other receivables, loans and sharia financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 71, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

1) Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and
- Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and
- Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada; (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

2) Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities. After initial recognition, the Bank measures financial assets, according to the classification of financial assets at (i) amortized cost; (ii) Fair value through other comprehensive income; or (iii) Fair value through profit or loss.

Financial assets at amortized cost are measured by adding up the financial assets measured at initial recognition minus principal payments, added or reduced by cumulative amortization using the effective interest method calculated from the difference between the initial value and the maturity value and adjusted for the allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a) aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b) aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Bank menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

3) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

2) Recognition and initial measurement (continued)

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

- a) financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.
- b) financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Bank applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

After initial recognition, the Bank measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

3) Derecognition

The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

3) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Bank yang ditentukan dengan seberapa jauh Bank terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

4) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

3) Derecognition (continued)

Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that those financial assets are uncollectible. The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

4) Offsetting

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

5) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

5) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

6) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

6) Fair value measurement (continued)

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
- b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
- c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
- f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (i);

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

6) Fair value measurement (continued)

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

e. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- a) has control or joint control over the reporting entity;
- b) has significant influence over the reporting entity; or
- c) a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

ii. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- a) The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiaries (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiaries of which the other entity is a member);
- c) Both entities are joint ventures of the same third party;
- d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
- f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

- g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 40).

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Transactions with related parties (continued)

- g) A person identified in (a). (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- h) The entity or any members of a Bank and its subsidiaries of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in (Note 40).

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

g. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), *call money* and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Surat utang negara, obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sertifikat investasi mudharabah antar bank, NCD, sukuk, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat utang negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset Keuangan Sukuk

Bank menerapkan PSAK No.110 "Investasi Sukuk" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Government bonds, corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, interbank mudharabah investment certificate, NCD, sukuk, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

- 1) Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
- 2) Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.
- 3) Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Sukuk Financial Assets

The Bank applies PSAK No.110 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of sukuk ijarah and sukuk mudharabah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Surat berharga (lanjutan)

1) Diukur pada biaya perolehan

- a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- b) Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- c) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- d) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.

2) Diukur pada nilai wajar

- a) Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
- b) Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- c) Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Marketable securities (continued)

1) Measured at cost

- a) The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
- b) Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
- c) The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight line basis over the period of the sukuk.
- d) Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.

2) Measured at fair value

- a) The fair value is determined with reference to the following order:
 - Price quotation in active market.
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
- b) Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
- c) The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (*repo*) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements (*reverse repo*) are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

j. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) (lanjutan)

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

k. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) (continued)

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

k. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction. This account is classified as amortized cost.

l. Loans and sharia financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, *mudharabah* and *musyarakah* financing and *qardh* receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on *murabahah* agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. *Murabahah* receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah
(lanjutan)**

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang *mudharabah* pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

1. Loans and sharia financing (continued)

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. *Mudharabah* receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musarakah is an agreement between the investors (*musarakah* partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss ECL*) 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities sold under purchased agreement (repo), marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo), loans, other receivable and commitments and contingencies.

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12 month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:

- *Financial assets that are debt instruments;*
- *Financial guarantee contracts issued; and*
- *Loan commitments issued.*

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- *The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 71 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari ECL yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari ECL 12 bulan disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 1".

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 2".

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment
losses (continued)**

Impairment of financial assets (continued)

The impairment requirements of PSAK 71 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);
- Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran ECL (lanjutan)

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut (lanjutan):

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan tahap 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Measurement of ECL (continued)

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows (continued):

- Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and
- Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- A breach of contract such as a default or past due event;
- The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or
- The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Penyajian cadangan ECL dalam laporan posisi
keuangan

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam
laporan posisi keuangan sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan
diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai
tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen
yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan
Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada
komponen komitmen pinjaman secara terpisah
dari komponen yang telah ditarik: Bank
menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk
kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan
kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai
tercatat bruto komponen yang telah ditarik.
Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai
tercatat komponen yang telah ditarik disajikan
sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada
cadangan kerugian diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat
dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar.
Namun, cadangan kerugian kredit diakui
sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam
penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik
sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada
harapan yang wajar untuk memulihkan aset
keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal
ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan
bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber
pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas
yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman
yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini
dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang
sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam
"pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih
diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank
untuk pemulihan jumlah yang terutang.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment
losses (continued)**

Presentation of allowance for ECL in the statement
of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the
statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a
deduction from the gross carrying amount of the
assets;
- Loan commitments and financial guarantee
contracts: generally, as a provision;
- Where a financial instrument includes both a
drawn and an undrawn component, and the Bank
cannot identify the ECL on the loan commitment
component separately from those on the drawn
component: the Bank presents a combined loss
allowance for both components. The combined
amount is presented as a deduction from the
gross carrying amount of the drawn component.
Any excess of the loss allowance over the gross
carrying amount of the drawn component is
presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss
allowance is recognized as deduction to the
carrying amount of the financial asset due to the
carrying amount of these assets is their fair value.
However, the credit loss allowance is recognized
as part of fair value reserve in other
comprehensive income.

Write-off

Loans and debt securities are written off (either
partially or in full) when there is no reasonable
expectation of recovering a financial asset in its
entirety or a portion thereof. This is generally the
case when the Bank determines that the borrower
does not have assets or sources of income that
could generate sufficient cash flows to repay the
amounts subject to the write-off. This assessment is
carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are
included in "other income" in the statement of profit
or loss and other comprehensive income.

Financial assets that are written-off could still be
subject to enforcement activities in order to comply
with the Bank's procedures for recovery of amounts
due.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 71, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 71, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default (PD)*;
- *Loss Given Default (LGD)*; dan
- *Exposure At Default (EAD)*.

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eskposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Significant increase in credit risk

Under PSAK 71, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a limit, and as required by PSAK 71, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default (PD)*;
- *Loss Given Default (LGD)*; and
- *Exposure At Default (EAD)*.

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL (lanjutan)

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (SLIK *checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Input into measurement of ECLs (continued)

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product

The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Financial Services Authority audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank (SLIK *checking*) and availability of debtor's audited financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 (revisi 2013) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 (revisi 2013) dan PAPSİ 2013. Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang *murabahah* dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang *murabahah* yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang *murabahah* yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan marjin) yang didiskonto menggunakan marjin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default* (LGD).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 102 (revised 2013) and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 102 (revised 2013) and PAPSİ 2013. The Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of *murabahah* receivables is done periodically on every financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. *Murabahah* receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (*discounted value*) and not based on net book value, because the amount of *murabahah* receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**m. Identifikasi dan pengukuran kerugian
penurunan nilai (lanjutan)**

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-
produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan Bank Wide pembiayaan *murabahah* dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah*) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Percentase minimum penyisihan kerugian/
Minimum percentage of allowance for impairment losses

Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

*) Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Identification and measurement of impairment
losses (continued)**

Allowance for possible losses of earning assets and
non-earning assets - Sharia banking product
(continued)

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide *murabahah* financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except *murabahah* receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

Lancar *)	Minimum 1%	Current *)
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

*) Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis/ Classification	Metode/ Method
Bangunan/ Buildings	Garis lurus/ Straight-line
Kendaraan/ Vehicles	Saldo menurun ganda/ Double declining balance
Peralatan kantor/ Office equipment	Saldo menurun ganda/ Double declining balance

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 15).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Fixed assets, except land are depreciated using the methods and over their estimated useful lives of fixed assets as follows:

Taksiran masa manfaat/ Estimated useful lives Tahun/Years	Tarif penyusutan/ Depreciation rate
20	5%
4-8	25%-50%
4-8	25%-50%

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 15).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Fixed assets (continued)

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
 - Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
- a) Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - b) Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Right of use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Short term lease; and
- Low value asset.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
 - The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
- a) The Bank has the right to operate the asset;
 - b) The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Right of use assets and lease liabilities
(continued)**

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Leases modification

The Bank account for a leases modification as a separate leases if both:

- the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;
- the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Bank dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito *on call* merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Bank measured at their amortized cost.

r. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Bank that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Bank.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- 1) Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan
- 2) Investasi tidak terikat syariah, berupa:
 - a) Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah; dan
 - b) Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah.

s. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Deposits from customers (continued)

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

- 1) *Sharia deposits in the form of wadiah yad-adhamanah, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Bank's policy; and*
- 2) *Sharia non-binding investments in the form of:*
 - a) *Mudharabah mutlaqah savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and*
 - b) *Mudharabah mutlaqah deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Bank's Sharia Unit's income (nisbah) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.*

s. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

t. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

u. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan dengan kewajiban. Hal ini karena bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

u. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds grant freedom to the fund manager in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current account, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposits balance in bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the bank.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was because bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to bank management's negligence or when default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investmet account.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

u. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

v. Pendapatan dan beban bunga

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Temporary *syirkah* funds (continued)

The owner of temporary *syirkah* funds receives a return from the profit sharing based on predetermined ratio.

Third parties' share on return of temporary *syirkah* funds represents customer's share on the bank's income derived from the management of their funds by the bank under *mudharabah* principles. Income that will be distributed is the cash received (*cash basis*) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to fund owners are then distributed to fund owners and depositors as *shahibul maal* and the bank as *mudharib* based on a predetermined ratio (*nisbah*). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the bank's funds, are entirely shared for the bank, including income from the bank's fee-based transactions.

v. Interest income and expenses

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Konvensional (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (*margin* efektif). *Margin* efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Interest income and expenses (continued)

Conventional (continued)

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Sharia

The main operating income consists of income from *murabahah* transactions, income from profit sharing of *mudharabah* and *musyarakah* financing and others.

Income from *murabahah* receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing is recognized upon collection (*cash basis*). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

v. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Syariah (lanjutan)

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan *margin* dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan *margin* dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

w. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

x. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Interest income and expenses (continued)

Sharia (continued)

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for *margin* and profit sharing income on loans and sharia financing and other earning assets classified as *non-performing*, which is recognized only when such interest is received in cash. *Margin* and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as *non-performing*, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

w. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

x. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 46, "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

x. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Bank menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Bank mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

y. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

z. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Corporate income tax (continued)

The Bank applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

y. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

z. Employee benefit plan

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee benefit", effective January 1, 2015, change of PSAK 24 (revised 2010): "Employee Benefit". The applied PSAK 24 (revised 2013), Bank which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti

Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti

Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee benefit plan (continued)

Defined benefits plans

The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No.11 year 2020 dated 2 November 2020. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan

In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HPC/KEP dated on March 12, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2019 dated on June 14, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Program asuransi tunjangan hari tua

- 1) Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Employee benefit plan (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated November 8, 2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

Defined contribution pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

Pension insurance plan

- 1) Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 for insurance under a program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2023 dan 2022 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022

and for the years then ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua (lanjutan)

1) Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

2) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

3) Sesuai dengan persetujuan melalui Keputusan Direksi No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP tanggal 18 Juli 2022, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan hormat dan mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bakti pegawai.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Employee benefit plan (continued)

Pension insurance plan (continued)

1) Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for aggrement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

2) Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan. Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

3) Pursuant to the the approval through the Decree of the Board of Directors No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP dated July 18, 2022, the Bank also organizes a defined benefit program in the form of pension benefits through the pension Benefit Insurance Program for all employees through a cooperation agreement held on June 13, 2022 with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, regarding the Management of the endowment Insurance Program. Based on this program, when entering retirement age, he dies, resigns with honor and resigns due to participating in the employee service termination program.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

z. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa jabatannya secara proporsional.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Employee benefit plan (continued)

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Bonuses

The Bank also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No. 55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Darnosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya.

Premiums paid are charged proportionally to statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

aa. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Neto" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan.

ab. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ac. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ad. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ae. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

aa. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the statements of financial position.

ab. Dividend

Dividend distribution to the Bank's shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

ac. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ad. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

ae. Segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

- 1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Informasi segmen (lanjutan)

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas (lanjutan):

- 2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Jawa Timur dan selain Jawa Timur.

af. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Segment information (continued)

The Bank defines an operating segment as a component of an entity (continued):

- 2) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- 3) for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are East Java and other than East Java.

af. Subsequent event

Any post-year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (*adjusting event*) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not *adjusting events*, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ag. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi signifikan (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada (Catatan 2d).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and
judgments (continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in (Note 2d).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- Level 1: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan
akuntansi signifikan (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan
diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat *judgment* ini, Bank mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

Kontinjensi

Bank saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Bank dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Bank saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

**2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**ag. Use of significant accounting estimates and
judgments (continued)**

Judgments (continued)

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

Bank is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Bank's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Bank currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian mata uang fungsional

Manajemen telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- 2) mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- 3) mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Sewa operasi

Bank, sebagai *lessee*, telah mengadakan perjanjian sewa untuk bangunan yang digunakannya untuk operasi. Bank telah menentukan bahwa semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan properti yang disewa dalam sewa operasi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Bank. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Assessment of functional currency

The management has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank has considered the following:

- 1) the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- 2) the currency in which funds from financing activities are generated; and
- 3) the currency in which funds from operating are usually retained.

Operating leases

The Bank, as a lessee, has entered into lease on premises used for its operations. The Bank has determined that all significant risk and rewards of ownership of the properties it leases on operating lease are not transferrable to the Bank.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 22g).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 54).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Bank mereview surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 8 dan 43e).

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut (Catatan 43e):

- 1) Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;
- 2) Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- 3) Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies (Note 22g).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 54).

Impairment of amortized cost marketable securities

Bank reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 8 and 43e).

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings (Note 43e):

- 1) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- 2) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- 3) Significant negative industry or economic trends.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2m), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 12).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 15).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2m), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 12).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 15).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KAS

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		2.593.983
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	1.731.887	26.668
Riyal Saudi Arabia	3.759.449	15.436
Dolar Singapura	663.426	7.746
Euro	182.730	3.113
Ringgit Malaysia	591.322	1.984
Dolar Australia	134.405	1.414
Poundsterling Inggris Raya	57.475	1.128
Yen Jepang	5.606.000	610
Dolar Hong Kong	186.580	368
Yuan China Renminbi	150.105	325
Jumlah mata uang asing		58.792
Jumlah kas		2.652.775

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Cash Recycle Machine* (CRM) sejumlah Rp300.802 dan Rp295.380.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>
Rupiah		7.940.618
Dolar Amerika Serikat	2.000.000	30.794
Jumlah		7.971.412

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp188.268 dan Rp184.549 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

3. CASH

	2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
		1.946.513	Rupiah
			Foreign currencies
	1.338.167	20.832	United States Dollar
	1.749.592	7.242	Saudi Arabian Riyal
	967.717	3.420	Malaysian Ringgit
	536.709	6.222	Singapore Dollar
	122.970	2.039	Euro
	84.290	890	Australian Dollar
	5.100	96	Great Britain Poundsterling
	2.560.000	302	Japanese Yen
	215.120	429	Hong Kong Dollar
	124.248	277	Chinese Yuan Renminbi
		41.749	Total foreign currencies
		1.988.262	Total cash

Cash in Rupiah as of December 31, 2023 and 2022, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp300,802 and Rp295,380, respectively.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	2022		
	Jumlah nosional mata uang asing / <i>Notional amount foreign currencies</i> (Dalam angka penuh/ <i>In full amount</i>)	Ekuivalen Rupiah/ <i>Rupiah equivalent</i>	
		10.774.286	Rupiah
	800.000	12.454	United States Dollar
		10.786.740	Total

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp188,268 and Rp 184,549 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	2023
<u>Konvensional</u>	
Rupiah	
GWM Primer	
Harian	2,49%
Rata-rata	6,36%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	30,50%
Mata uang asing	6,62%
<u>Syariah</u>	
Rupiah	5,81%

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.2 tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B tanggal 5 Desember 2023 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022, untuk periode tanggal 1 Desember 2023 s/d 29 Februari 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 2,8% untuk konvensional dan 2,0% untuk syariah.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 18 tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The statutory reserve of the Bank was as follows:

	2022	<u>Conventional</u>
Rupiah		Rupiah
Primary Statutory Reserve		Daily
Average		Average
Macroprudential Liquidity Buffer		Macroprudential Liquidity Buffer
Foreign currencies		Foreign currencies
<u>Sharia</u>		<u>Sharia</u>
Rupiah		Rupiah

The statutory reserves ratio as of December 31, 2023 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.2 year 2023 dated March 24, 2023 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B dated December 5, 2023 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 24/5/PBI/2022, from December 1, 2023 to February 29, 2024, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 2.8% for conventional and 2.0% for sharia respectively.

The statutory reserves ratio as of December 31, 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The PLM ratio as of December 31, 2023 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 with PADG No.18 year 2023 dated November 29, 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/15/PBI/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 9%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 4%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) masing-masing sebesar 6% dan 5% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,5%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 45).

4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The PLM ratio as of December 31, 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 with PADG No.24/14/PADG/2022 dated October 31, 2022 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the above Bank Indonesia regulations, The Bank is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 9%, while statutory reserve for foreign currency amounting to 4%. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 6% and 5% in Rupiah as of December 31, 2023 and 2022 respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah amounting 7.5%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2023 and 2022.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than 1 (one) month (Note 45).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan bank

	2023	2022
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	248.110	146.357
PT Bank Central Asia Tbk	74.098	37.005
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.873	4.440
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.990	2.150
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	417	505
	<u>336.488</u>	<u>190.457</u>
Mata uang asing		
DBS Singapore Ltd	64.172	6.241
PT Bank Central Asia Tbk	54.323	26.777
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18.428	70.647
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.584	5.748
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.987	2.365
PT Bank ICBC Indonesia	4.348	894
	<u>154.842</u>	<u>112.672</u>
Jumlah	<u>491.330</u>	<u>303.129</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	(441)
Neto	<u>490.253</u>	<u>302.688</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp209 dan Rp228.

b. Berdasarkan mata uang

	2023		2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		336.488		190.456
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	5.074.571	78.132	5.665.585	96.313
Dolar Singapura	5.495.878	64.172	538.334	6.241
Yuan China Renminbi	2.003.450	4.348	399.403	894
Dolar Australia	335.609	3.531	493.256	5.208
Euro	182.202	3.104	141.924	2.353
Poundsterling Inggris Raya	56.643	1.112	52.645	989
Dolar Hong Kong	195.940	386	208.023	415
Yen Jepang	521.168	57	2.205.651	260
		<u>154.842</u>		<u>112.673</u>
Jumlah mata uang asing		<u>491.330</u>		<u>303.129</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.077)		(441)
Neto		<u>490.253</u>		<u>302.688</u>

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By bank

Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Foreign currencies
DBS Singapore Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
Total
Allowance for impairment losses
Net

As of December 31, 2023 and 2022, current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp209 and Rp228 respectively.

b. By currency

Rupiah
Foreign currencies
United States Dollar
Singapore Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Australian Dollar
Euro
Great Britain Poundsterling
Hong Kong Dollar
Japanese Yen
Total foreign currencies
Allowance for impairment losses
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Tingkat suku bunga per tahun

	2023
Rupiah	0,10%
Mata uang asing	0,89%

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

f. Nilai tercatat bruto

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	336.488	-	-	336.488	Rupiah
Mata uang asing	154.842	-	-	154.842	Foreign currencies
Jumlah	491.330	-	-	491.330	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	-	-	(1.077)	Allowance for impairment losses
Neto	490.253	-	-	490.253	Net

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah	190.456	-	-	190.456	Rupiah
Mata uang asing	112.673	-	-	112.673	Foreign currencies
Jumlah	303.129	-	-	303.129	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(441)	-	-	(441)	Allowance for impairment losses
Neto	302.688	-	-	302.688	Net

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

	2023	2022
Saldo awal tahun	441	238
Penyisihan tahun berjalan	636	203
Saldo akhir tahun	1.077	441

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya giro pada bank lain adalah memadai.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Interest rates per annum

	2023	2022	
Rupiah	0,16%	0,16%	Rupiah
Foreign Currencies	0,29%	0,29%	Foreign Currencies

d. By relationship

As of December 31, 2023 and 2022, no current accounts in related parties.

e. By collectability

Current accounts with other banks as of December 31, 2023 and 2022 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

f. Gross carrying amount

g. Allowance for impairment losses

	2023	2022	
Balance at beginning of year	441	238	Balance at beginning of year
Provision during the year	636	203	Provision during the year
Balance at end of year	1.077	441	Balance at end of year

Management believes that the allowance for impairment losses on current accounts with other banks is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 43e).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

g. Allowance for impairment losses (continued)

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current accounts with other bank are disclosed in (Note 43e).

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2023	2022
Rupiah		
Deposito berjangka:		
Lain-lain (Bank Perkreditan Rakyat)	1.500	7.000
	<u>1.500</u>	<u>7.000</u>
Pasar Uang Antar Bank:		
PT Bank DKI	400.000	-
PT Bank BTPN Tbk	400.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	346.985	300.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	308.000	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	295.000	240.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	288.000	50.000
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	200.000	400.000
PT Bank CTBC Indonesia	190.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	180.000	175.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	174.000	75.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	170.000	150.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	160.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	135.000	140.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	135.000	140.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	105.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	100.000	125.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	100.000	115.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	70.000	50.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	46.191	200.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	46.191	-
PT Bank Allo Bank Indonesia Tbk	45.000	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	45.000	-
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	22.000	-
PT Bank Victoria International Tbk	22.000	120.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	600.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	400.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	-	110.000
PT Bank Mestika Dharma Tbk	-	100.000
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	-	75.000
	<u>4.083.367</u>	<u>4.165.000</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	1.150.000	745.000
Term Deposit	-	2.000.000
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(146)	(671)
	<u>1.149.854</u>	<u>2.744.329</u>
Jumlah	5.234.721	6.916.329
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	(3.154)
Neto	<u>5.229.695</u>	<u>6.913.175</u>

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type and currency

Rupiah	
Time deposits:	
Others (Rural Bank)	
Interbank call money:	
PT Bank DKI	
PT Bank BTPN Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	
PT Bank Ina Perdana Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Allo Bank Indonesia Tbk	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Nationalnobu Tbk	
PT Bank Mestika Dharma Tbk	
PT Bank Sahabat Sampoerna	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	
Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)	
Term Deposit	
Less: Unamortized interest	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp150.209 dan Rp145.228.

b. Berdasarkan jangka waktu

	December 31, 2023
Kurang dari 1 bulan	5.233.221
1 - 3 bulan	-
3 - 6 bulan	1.500
	5.234.721

c. Berdasarkan kolektibilitas

Semua penempatan Bank pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digolongkan lancar.

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

e. Tingkat suku bunga per tahun

	December 31, 2023
Rupiah	
Interbank call money	5,92%
Term deposit	5,64%
Deposit Facility	5,10%
Deposito berjangka	6,02%
Mata uang asing	
Term deposit	5,29%
Interbank call money	5,17%

f. Nilai tercatat bruto

	2023			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	1.149.854	-	-	1.149.854
Pasar uang antar Bank	4.083.367	-	-	4.083.367
Deposito berjangka	1.500	-	-	1.500
Jumlah	5.234.721	-	-	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	-	-	(5.026)
Neto	5.229.695	-	-	5.229.695

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. By type and currency (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp150,209 and Rp145,228 respectively.

b. By maturity

	December 31, 2022	
	6.309.329	Less than 1 month
	600.000	1 - 3 months
	7.000	3 - 6 months
	6.916.329	

c. By collectability

All placements with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2023 and December 2022 were classified as current.

d. By relationship

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank had no funds placed with related parties.

e. Interest rates per annum

	December 31, 2022	
	3,55%	Rupiah
	3,25%	Interbank call money
	3,08%	Term deposit
	3,49%	Deposit Facility
		Deposito berjangka
		Foreign Currencies
	0,00%	Term deposit
	1,47%	Interbank call money

f. Gross carrying amount

		Rupiah:
		Placements with Bank Indonesia
		Interbank call money
		Time deposits
		Total
		Allowance for impairment losses
		Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

f. Nilai tercatat bruto (lanjutan)

	2022			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah:				
Penempatan pada Bank Indonesia	2.744.329	-	-	2.744.329
Pasar uang antar Bank	4.165.000	-	-	4.165.000
Deposito berjangka	7.000	-	-	7.000
Jumlah	6.916.329	-	-	6.916.329
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.154)	-	-	(3.154)
Neto	6.913.175	-	-	6.913.175

Rupiah:
Placements with Bank Indonesia
Interbank call money
Time deposits
Total
Allowance for impairment losses
Net

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

	December 31, 2023
Saldo awal tahun	3.154
Penyisihan tahun berjalan	1.872
Saldo akhir tahun	5.026

g. Allowance for impairment losses

	December 31, 2022
Saldo awal tahun	1.763
Provision during the year	1.391
Saldo akhir tahun	3.154

Balance at beginning of year
Provision during the year
Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on placements with Bank Indonesia and other banks is adequate.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan dan mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi *staging* cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain diungkapkan pada (Catatan 43e).

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placement with other bank are disclosed in (Note 43e).

h. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

h. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN SPOT DAN DERIVATIF

Tagihan spot dan derivatif per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

7. SPOT AND DERIVATIVE RECEIVABLES

Spot and derivative receivables as of December 31, 2022 are as follows:

2022					
Instrumen	Jenis valuta/ Currency	Jumlah nosional mata uang asing/ National amount foreign currencies (dalam angka penuh/in full amount)	Nilai wajar/ Fair values		Instruments
			Tagihan derivatif/ Derivative receivables	Liabilitas derivatif/ Derivative payable	
			dalam Rupiah/ in Rupiah		
Terkait nilai tukar					Exchange rate related
Kontrak swap - jual	USD	10.000.000	361	-	Swap contract - sell
			361	-	

8. SURAT-SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

8. MARKETABLE SECURITIES

a. By type and currency

	2023		2022		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah:					Rupiah:
Biaya perolehan dimortisasi					Amortised cost
Surat Utang Negara	4.784.487	4.848.046	11.798.009	12.025.332	Government bonds
Obligasi	2.084.021	2.089.300	1.841.700	1.851.074	Bonds
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	603.488	592.400	-	-	Bank Indonesia Rupiah Securities
Sukuk Bank Indonesia	450.000	450.000	400.000	400.000	Sukuk of Bank Indonesia
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	450.000	450.000	325.000	325.000	Interbank Mudharabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	30.000	28.500	50.000	47.237	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
Reksadana	90.000	90.000	90.000	90.000	Reksadana
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	12.913	2.056	2.056	Domestic L/C
	8.504.909	8.561.159	14.506.765	14.740.700	
Mata uang asing:					Foreign currencies:
Wesel	112	112	362	362	Bill
	112	112	362	362	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(511)	-	(400)	Allowance for impairment losses
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	8.505.021	8.560.760	14.507.127	14.740.662	Total amortized cost
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	7.727.329	7.762.560	8.574.841	8.476.609	Government bonds
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7.727.329	7.762.560	8.574.841	8.476.609	Total fair value through other comprehensive income
Jumlah biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	16.232.350	16.323.320	23.081.968	23.217.271	Total amortized cost and fair value through other comprehensive income
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah surat berharga	16.232.350	16.323.320	23.081.968	23.217.271	Total marketable securities

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

b. By relationship

As of December 31, 2023 and 2022, there were no marketable securities transactions with related parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan penerbit

	2023	2022
Pemerintah Republik Indonesia	1.042.400	20.501.941
Bank Indonesia	12.610.606	400.000
Perbankan :		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	181.055	146.035
PT Bank Aceh Syariah	150.000	225.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	114.000	27.343
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100.000	-
PT Bank NTB Syariah	100.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.000	127.610
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	70.000	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	55.500	32.003
PT Bank Syariah Mega Indonesia	30.000	-
PT Bank Mandiri Taspen	29.021	24.011
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	23.000	33.032
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	11.538
PT Bank Sinarmas Tbk	-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	12.219
	932.576	738.790
Korporasi		
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	244.970	135.454
PT Astra Sedaya Finance	197.862	152.966
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	194.218	140.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	192.203	192.250
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	133.308	26.000
PT Federal International Finance	112.190	99.615
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	90.877	91.519
PT XL Axiata Tbk	85.097	60.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	83.628	69.861
PT Pegadaian (Persero)	80.000	480.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	74.888	24.803
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	69.338	-
PT Mandiri Tunas Finance	58.174	5.265
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	33.158	63.243
PT BCA Finance	30.000	-
PT Toyota Astra Financial Services	25.000	-
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	15.036	-
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.279	5.454
Wesel	112	362
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	30.148
	1.738.249	1.576.940
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(511)	(400)
Jumlah surat-surat berharga	16.323.320	23.217.271

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c. By issuers

Government of the Republic of Indonesia
Bank Indonesia
Banking:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank NTB Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Corporate:
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra Sedaya Finance
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Federal International Finance
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT XL Axiata Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pegadaian (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Mandiri Tunas Finance
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT BCA Finance
PT Toyota Astra Financial Services
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Domestic L/C
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Bill
PT Indonesia Infrastructure Finance

Allowance for impairment losses
Total marketable securities

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat

Peringkat surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	12.610.606
Bank Indonesia	-	-	1.042.400
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	244.970
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	197.862
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	194.218
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	192.203
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	181.055
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	idA	150.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	133.308
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	114.000
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	112.190
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	100.000
PT Bank NTB Syariah	-	-	100.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	90.877
PT XL Axiata	Fitch Indonesia	AAA(idn)	85.097
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	83.628
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	80.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	80.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	74.888
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	70.000
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia	AA+(idn)	69.338
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	58.174
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia	AA+(idn)	55.500
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	33.158
PT Bank Syariah Mega Indonesia	-	-	30.000
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	30.000
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAAA	29.021
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	25.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Fitch indonesia	AA(idn)	15.036
Surat kredit berdokumen dalam negeri	-	-	12.913
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.279
Jumlah Rupiah			16.323.719
Mata uang asing:			
Wesel ekspor			112
			16.323.831
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(511)
Jumlah surat-surat berharga			16.323.320

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating

The ratings of marketable securities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Rupiah:	
Government Bonds	
Certificates of Bank Indonesia	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	
PT Astra Sedaya Finance	
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Aceh Syariah	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Federal International Finance	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank NTB Syariah	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT XL Axiata	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Pegadaian (Persero)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Tower Bersama Infrastructure	
PT Mandiri Tunas Finance	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Mega Indonesia	
PT BCA Finance	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Toyota Astra Financial Services	
PT Maybank Indonesia Tbk	
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	
Domestic L/C	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
Total Rupiah	
Foreign currency:	
Export bill	
	112
	16.323.831
Allowance for impairment losses	(511)
Total marketable securities	16.323.320

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	2022		
	Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value
Rupiah:			
Surat Utang Negara	-	-	20.501.941
Bank Indonesia	-	-	400.000
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	480.000
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	A	225.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia	AAA(idn)	192.250
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	152.966
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	146.035
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	140.000
PT Semen Indonesia (Persero)	Pefindo	idAA+	135.454
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	127.610
PT Bank Sinarmas Tbk	Fitch Indonesia	A-	100.000
PT Federal International Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	99.615
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	91.519
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	69.861
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA-	63.243
PT XL Axiata Tbk	Fitch Indonesia	AAA(idn)	60.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	33.032
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pefindo	idAA+	32.003
PT Indonesia Infrastructure Finance	Pefindo	idAAA	30.148
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	27.343
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	26.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	24.803
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	24.011
PT Bank Pembangunan Daerah			
Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo	idAA-	12.219
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	11.538
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.454
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAA+	5.265
Jumlah Rupiah			23.217.309
Mata uang asing:			
Wesel ekspor			362
			23.217.671
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(400)
Jumlah surat-surat berharga			23.217.271

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By rating (continued)

Rupiah:	
Government Bonds	
Certificates of Bank Indonesia	
PT Pegadaian (Persero)	
PT Bank Aceh Syariah	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	
PT Astra Sedaya Finance	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	
PT Semen Indonesia (Persero)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Sinarmas Tbk	
PT Federal International Finance	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT XL Axiata Tbk	
PT Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Indonesia Infrastructure Finance	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
PT Mandiri Tunas Finance	
Total Rupiah	
Foreign currency:	
Export bill	
Allowance for impairment losses	
Total marketable securities	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

e. Jangka waktu dan tingkat bunga

	2023
Kurang dari 1 tahun	11.668.277
1 - 5 tahun	4.655.554
	16.323.831
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(511)
Jumlah surat-surat berharga	16.323.320
Tingkat bunga per tahun:	

	2023
Rupiah	
Surat Utang Negara	5,72%
Obligasi	6,40%
Sukuk Bank Indonesia	6,19%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	6,24%
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	6,53%
Reksadana	8,90%

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	(142.034)
Penambahan laba (rugi) yang belum direalisasi selama tahun berjalan	63.074
Jumlah sebelum pajak tangguhan	(78.960)
Pajak tangguhan	15.002
Saldo akhir bersih	(63.958)

g. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

h. Nilai tercatat bruto

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

e. By maturity and interest rates

	2022	
	986.769	Less than 1 year
	22.230.902	1 - 5 years
	23.217.671	
	(400)	Less: Allowance for impairment losses
Total marketable securities	23.217.271	
Interest rates per annum:		

	2022	
Rupiah		Rupiah
Government Bonds	6,01%	Government Bonds
Bond	7,11%	Bond
Bank Indonesia Sukuk	3,85%	Bank Indonesia Sukuk
Interbank Mudharabah investment Certificate	3,56%	Interbank Mudharabah investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	5,15%	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
Mutual Funds	4,94%	Mutual Funds

f. The movement of unrealized gains (losses)

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

	2022	
Beginning balance	258.577	Beginning balance
Addition of unrealized gains (loss) during the year	(400.611)	Addition of unrealized gains (loss) during the year
Total before deferred tax	(142.034)	Total before deferred tax
Deferred tax	26.986	Deferred tax
Ending balance net	(115.048)	Ending balance net

g. Collectibility

As of December 31, 2023 and 2022, the collectibility of securities are classified as current.

h. Gross carrying amount

	2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Rupiah:					Rupiah:
Surat Utang Negara	12.753.006	-	-	12.753.006	Government bonds
Obligasi	2.089.300	-	-	2.089.300	Bonds
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	450.000	-	-	450.000	Bank Indonesia Rupiah Securities
Sukuk Bank Indonesia	450.000	-	-	450.000	Bank Indonesia Sukuk
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	450.000	-	-	450.000	Interbank Mudharabah Investment Certificate
Negotiable Certificate of Deposit	28.500	-	-	28.500	Negotiable Certificate of Deposit
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	-	-	12.913	Domestic L/C
Reksadana	90.000	-	-	90.000	Mutual funds
Mata uang asing:					Foreign currencies:
Wesel	112	-	-	112	Bill
Jumlah surat berharga	16.323.831	-	-	16.323.831	Total marketable securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(511)	-	-	(511)	Allowance for impairment losses
Neto	16.323.320	-	-	16.323.320	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

h. Nilai tercatat bruto (lanjutan)

	2022			
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Rupiah:				
Surat Utang Negara	20.501.941	-	-	20.501.941
Obligasi	1.851.074	-	-	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	400.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	325.000
Reksadana	90.000	-	-	90.000
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	47.237
Surat kredit berdokumen dalam negeri	2.056	-	-	2.056
Mata uang asing:				
Wesel	362	-	-	362
Surat berharga yang dijual dengan Penyisihan kerugian penurunan nilai	(400)	-	-	(400)
Neto	23.217.271	-	-	23.217.271

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

h. Gross carrying amount (continued)

Rupiah:	
Government bonds	
Bonds	
Bank Indonesia Sukuk	
Interbank Mudharabah	
Investment Certificate	
Mutual funds	
Negotiable Certificate of Deposit	
Domestic L/C	
Foreign currencies:	
Bill	
Marketable securities sold	
Allowance for impairment losses	
Net	

i. Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga

	2023
Saldo awal tahun	400
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	111
Saldo akhir tahun	511

i. Allowance for impairment losses for marketable securities

	2022
Balance at beginning of year	5.944
Provision (recovery) during the year	(5.544)
Balance at end of year	400

Cadangan kerugian penurunan nilai atas surat berharga adalah sebagai berikut:

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.708 dan Rp23.157.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

Allowance for impairment losses for marketable securities are as follows:

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp26,708 and Rp23,157, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah Rp8.303.663 dan Rp4.095.066.

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT**

As of December 31, 2023 and 2022, marketable securities for sale with reverse repurchase agreement amount of Rp8,303,663 and Rp 4,095,066.

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost						
PBS003	25.000	18 Januari/ January 18, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(254)	-	24.746
PBS003	50.000	18 Januari/ January 18, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(509)	-	49.491
PBS003	10.000	25 Januari/ January 25, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(113)	-	9.887
PBS003	50.000	25 Januari/ January 25, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(629)	-	49.371
PBS003	50.000	25 Januari/ January 25, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(629)	-	49.371
PBS003	15.000	26 Januari/ January 26, 2023	15 Januari/ January 15, 2027	(177)	-	14.823
PBS017	100.000	14 Januari/ January 14, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	1.207	-	101.207
PBS017	100.000	14 Januari/ January 14, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	1.220	-	101.220
PBS017	93.226	14 Januari/ January 14, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	976	-	94.202
PBS017	50.000	11 Februari/ February 11, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	564	-	50.564
PBS017	50.000	11 Februari/ February 11, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	564	-	50.564
PBS017	100.000	11 Februari/ February 11, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	1.167	-	101.167
PBS017	30.000	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	166	-	30.166
PBS017	50.000	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	268	-	50.268
PBS017	20.000	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	111	-	20.111
PBS017	20.000	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	91	-	20.091
PBS017	50.000	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	272	-	50.272
PBS017	30.000	9 April/ April 9, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	165	-	30.165
PBS017	1.450	8 April/ April 8, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	8	-	1.458
Dipindahkan/Brought forward				4.470	-	899.146

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT
(continued)**

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				4.470	-	899.146
PBS017	25.000	22 April/ April 22, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	154	-	25.154
PBS017	25.000	22 April/ April 22, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	178	-	25.178
PBS017	10.000	23 April/ April 23, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	74	-	10.074
PBS017	50.000	6 Mei/ May 6, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	356	-	50.356
PBS017	40.000	14 Juni/ June 14, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	500	-	40.500
PBS017	10.000	17 Juni/ June 17, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	124	-	10.124
PBS017	10.000	17 Juni/ June 17, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	124	-	10.124
PBS017	10.000	17 Juni/ June 17, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	124	-	10.124
PBS017	20.000	13 Agustus/ August 13, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	351	-	20.351
PBS017	55.324	13 Agustus/ August 13, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	991	-	56.315
PBS017	50.000	4 Oktober/ October 4, 2021	15 Oktober/ October 15, 2025	887	-	50.887
PBS026	50.000	28 Mei/ May 28, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	478	-	50.478
PBS026	25.000	28 Mei/ May 28, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	255	-	25.255
Subjumlah/Subtotal				9.065	-	1.284.065

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT
(continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				9.065	-	1.284.065
PBS026	30.000	31 Mei/ May 31, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	296	-	30.296
PBS026	30.000	31 Mei/ May 31, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	316	-	30.316
PBS026	25.000	31 Mei/ May 31, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	247	-	25.247
PBS026	35.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	456	-	35.456
PBS026	20.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	260	-	20.260
PBS026	30.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	390	-	30.390
PBS026	25.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	322	-	25.322
PBS026	20.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	258	-	20.258
PBS026	50.000	15 September/ September 15, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	748	-	50.748
PBS026	10.000	15 September/ September 15, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	150	-	10.150
PBS026	50.000	4 Oktober/ October 4, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	741	-	50.741
PBS026	25.000	4 Oktober/ October 4, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	367	-	25.367
PBS026	50.000	4 Oktober/ October 4, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	735	-	50.735
PBS026	25.000	4 Oktober/ October 4, 2021	15 Oktober/ October 15, 2024	385	-	25.385
PBS030	50.000	19 Januari/ January 19, 2023	15 Juli/ October 15, 2028	(1.404)	-	48.596
PBS030	20.000	24 Januari/ January 24, 2023	15 Juli/ October 15, 2028	(537)	-	19.463
PBS030	3.000	27 Januari/ January 27, 2023	15 Juli/ October 15, 2028	(84)	-	2.916
PBS030	13.000	6 Februari/ February 6, 2023	15 Juli/ October 15, 2028	(317)	-	12.683
Subjumlah/Subtotal				12.396	-	1.798.396

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT
(continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost						
Pindahan/Carry forward				12.396	-	1.798.396
PBS030	14.000	6 Februari/ February 6, 2023	15 Juli/ Juli 15, 2028	(339)	-	13.661
PBS031	20.000	7 April/ April 7, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(66)	-	19.934
PBS031	20.000	7 April/ April 7, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(66)	-	19.934
PBS031	13.000	1 Juli/ July 1, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(89)	-	12.911
PBS031	30.000	28 Juli/ July 28, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(292)	-	29.708
PBS031	7.000	10 Agustus/ August 10, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(64)	-	6.936
PBS031	10.000	22 Agustus/ August 22, 2022	15 Juli/ Juli 15, 2024	(73)	-	9.927
PBS036	50.000	18 Januari/ January 18, 2023	15 Agustus/ August 15, 2025	(613)	-	49.387
PBS036	10.000	19 Januari/ January 19, 2023	15 Agustus/ August 15, 2025	(136)	-	9.864
PBS036	20.000	20 Januari/ January 20, 2023	15 Agustus/ August 15, 2025	(259)	-	19.741
PBS036	20.000	20 Januari/ January 20, 2023	15 Agustus/ August 15, 2025	(259)	-	19.741
FR0059	50.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.951	-	51.951
FR0059	50.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.921	-	51.921
FR0059	15.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	534	-	15.534
FR0059	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	356	-	10.356
Subjumlah/Subtotal				14.900	-	2.139.900

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT
(continued)**

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				14.900	-	2.139.900
FR0059	25.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	889	-	25.889
FR0059	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	344	-	10.344
FR0059	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	344	-	10.344
FR0059	20.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	738	-	20.738
FR0059	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	344	-	10.344
FR0059	20.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	793	-	20.793
FR0059	30.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.206	-	31.206
FR0059	10.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	430	-	10.430
FR0059	20.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	859	-	20.859
FR0059	10.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	402	-	10.402
FR0059	10.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	430	-	10.430
FR0059	25.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	967	-	25.967
FR0059	25.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	967	-	25.967
FR0059	50.000	30 Juli/ July 30, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.065	-	52.065
FR0059	30.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.367	-	31.367
FR0059	20.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	912	-	20.912
FR0059	50.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.264	-	52.264
FR0059	10.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	456	-	10.456
FR0059	20.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	971	-	20.971
FR0059	20.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	900	-	20.900
FR0059	30.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.438	-	31.438
FR0059	20.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	947	-	20.947
FR0059	10.000	13 Agustus/ August 13, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	422	-	10.422
FR0059	20.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	843	-	20.843
FR0059	20.000	18 Agustus/ August 18, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	839	-	20.839
Subjumlah/Subtotal				37.037	-	2.687.037

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				37.037	-	2.687.037
FR0059	40.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.706	-	41.706
FR0059	30.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.279	-	31.279
FR0059	20.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	853	-	20.853
FR0059	10.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	426	-	10.426
FR0059	50.000	17 November/ November 17, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.300	-	52.300
FR0059	40.000	19 November/ November 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.957	-	41.957
FR0059	30.000	19 November/ November 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.391	-	31.391
FR0059	25.000	12 Januari/ January 12, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	1.041	-	26.041
FR0059	25.000	12 Januari/ January 12, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	1.041	-	26.041
FR0059	10.000	20 Januari/ January 20, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	402	-	10.402
FR0059	50.000	20 Januari/ January 20, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	2.012	-	52.012
FR0059	20.000	20 Januari/ January 20, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	444	-	20.444
FR0081	10.000	9 Juni/ June 9, 2022	15 Mei/ May 15, 2027	75	-	10.075
FR0081	10.000	23 Maret/ March 23, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	75	-	10.075
FR0081	10.000	23 Maret/ March 23, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	75	-	10.075
FR0081	20.000	23 Maret/ March 23, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	209	-	20.209
FR0081	10.000	15 April/ April 15, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	101	-	10.101
FR0081	20.000	15 April/ April 15, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	202	-	20.202
FR0081	50.000	15 April/ April 15, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	929	-	50.929
FR0081	25.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	446	-	25.446
FR0081	50.000	17 Juni/ June 17, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	892	-	50.892
Subjumlah/Subtotal				54.895	-	3.259.895

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				54.895	-	3.259.895
FR0081	25.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	477	-	25.477
FR0081	20.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	385	-	20.385
FR0081	30.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	614	-	30.614
FR0081	50.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	963	-	50.963
FR0081	10.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	193	-	10.193
FR0081	10.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	197	-	10.197
FR0081	10.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	186	-	10.186
FR0081	30.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	557	-	30.557
FR0081	50.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	919	-	50.919
FR0081	13.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	257	-	13.257
FR0081	37.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	687	-	37.687
FR0081	10.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	184	-	10.184
FR0081	20.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	368	-	20.368
FR0081	10.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	184	-	10.184
FR0081	10.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	184	-	10.184
FR0081	50.000	13 Juli/ July 13, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	954	-	50.954
FR0081	20.000	30 Juli/ July 30, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	416	-	20.416
FR0081	10.000	30 Juli/ July 30, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	223	-	10.223
FR0081	30.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	637	-	30.637
FR0081	50.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.062	-	51.062
FR0081	10.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	212	-	10.212
FR0081	40.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	849	-	40.849
FR0081	50.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.062	-	51.062
FR0081	20.000	02 Agustus/ August 02, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	425	-	20.425
Subjumlah/Subtotal				67.089	-	3.887.089

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				67.089	-	3.887.089
FR0081	50.000	03 Agustus/ August 03, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.062	-	51.062
FR0081	10.000	05 Agustus/ August 05, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	217	-	10.217
FR0081	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	423	-	20.423
FR0081	50.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.058	-	51.058
FR0081	30.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	635	-	30.635
FR0081	50.000	12 Januari/ January 12, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.069	-	51.069
FR0084	20.000	31 Maret/ March 31, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	435	-	20.435
FR0084	10.000	31 Maret/ March 31, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	236	-	10.236
FR0084	50.000	13 April/ April 13, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.239	-	51.239
FR0084	20.000	15 April/ April 15, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	483	-	20.483
FR0084	20.000	30 April/ April 30, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	509	-	20.509
FR0084	40.000	11 Juni/ June 11, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.361	-	41.361
FR0084	10.000	11 Juni/ June 11, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	340	-	10.340
FR0084	10.000	11 Juni/ June 11, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	340	-	10.340
FR0084	10.000	11 Juni/ June 11, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	340	-	10.340
FR0084	30.000	11 Juni/ June 11, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.021	-	31.021
FR0084	10.000	14 Juni/ June 14, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	348	-	10.348
FR0084	20.000	06 Agustus/ August 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	765	-	20.765
FR0084	30.000	06 Agustus/ August 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.217	-	31.217
FR0084	20.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	767	-	20.767
FR0084	30.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.147	-	31.147
FR0084	30.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2026	1.147	-	31.147
FR0084	30.000	25 Mei/ May 25, 2022	15 Februari/ February 15, 2026	380	-	30.380
FR0084	10.000	25 Mei/ May 25, 2022	15 Februari/ February 15, 2026	127	-	10.127
Subjumlah/Subtotal				83.757	-	4.513.757

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				83.757	-	4.513.757
FR0084	20.000	13 Juni/ June 13, 2022	15 Februari/ February 15, 2026	395	-	20.395
FR0084	45.000	01 Juli/ July 01, 2022	15 Februari/ February 15, 2026	816	-	45.816
FR0084	35.000	01 Juli/ July 01, 2022	15 Februari/ February 15, 2026	635	-	35.635
FR0040	30.000	30 April/ April 30, 2021	15 September/ September 15, 2025	2.514	-	32.514
FR0040	50.000	07 Juni/ June 07, 2021	15 September/ September 15, 2025	4.051	-	54.051
FR0040	20.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 September/ September 15, 2025	1.918	-	21.918
FR0040	100.000	31 Mei/ May 31, 2022	15 September/ September 15, 2025	7.916	-	107.916
FR0056	50.000	12 November/ November 12, 2021	15 September/ September 15, 2026	3.719	-	53.719
FR0056	50.000	15 November/ November 15, 2021	15 September/ September 15, 2026	3.722	-	53.722
FR0056	50.000	15 November/ November 15, 2021	15 September/ September 15, 2026	3.722	-	53.722
FR0056	50.000	21 Januari/ January 21, 2022	15 September/ September 15, 2026	3.578	-	53.578
FR0056	50.000	05 Juli/ July 05, 2022	15 September/ September 15, 2026	2.663	-	52.663
FR0056	50.000	26 September/ September 26, 2023	15 September/ September 15, 2026	2.500	-	52.500
ORI019	20.000	19 April/ April 19, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	3	-	20.003
ORI019	30.000	19 April/ April 19, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	6	-	30.006
ORI019	10.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	50.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	9	-	50.009
ORI019	10.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	10.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	10.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	50.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	9	-	50.009
ORI019	10.000	20 April/ April 20, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	70.000	21 April/ April 21, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	70.014
ORI019	10.000	21 April/ April 21, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	2	-	10.002
ORI019	20.000	28 April/ April 28, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	5	-	20.005
Subjumlah/Subtotal				121.962	-	5.451.962

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				121.962	-	5.451.962
ORI019	20.000	29 April/ April 29, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	5	-	20.005
ORI019	20.000	29 April/ April 29, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	5	-	20.005
ORI019	20.000	29 April/ April 29, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	5	-	20.005
ORI019	30.000	30 April/ April 30, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	7	-	30.007
ORI019	10.000	06 Mei/ May 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	4	-	10.004
ORI019	50.000	10 Mei/ May 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	20	-	50.020
ORI019	10.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	20.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	29	-	20.029
ORI019	20.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	29	-	20.029
ORI019	15.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	21	-	15.021
ORI019	10.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	15.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	21	-	15.021
ORI019	10.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	10.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	20.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	28	-	20.028
ORI019	20.000	18 Agustus/ August 18, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	28	-	20.028
ORI019	30.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	42	-	30.042
ORI019	30.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	41	-	30.041
ORI019	8.000	24 Agustus/ August 24, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	11	-	8.011
ORI019	12.000	24 Agustus/ August 24, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	16	-	12.016
ORI019	10.000	24 Agustus/ August 24, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	50.000	03 September/ September 03, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	70	-	50.070
ORI019	30.000	03 September/ September 03, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	41	-	30.041
ORI019	10.000	06 September/ September 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	20.000	06 September/ September 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	27	-	20.027
Subjumlah/Subtotal				122.496	-	5.952.496

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				122.496	-	5.952.496
ORI019	10.000	06 September/ September 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	14	-	10.014
ORI019	30.000	06 September/ September 06, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	41	-	30.041
ORI019	25.000	09 September/ September 09, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	34	-	25.034
ORI019	25.000	09 September/ September 09, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	35	-	25.035
ORI019	10.000	13 September/ September 13, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	13	-	10.013
ORI019	20.000	23 September/ September 23, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	27	-	20.027
ORI019	20.000	27 September/ September 27, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	27	-	20.027
ORI019	50.000	27 September/ September 27, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	71	-	50.071
ORI019	10.000	01 Oktober/ October 01, 2021	15 Februari/ February 15, 2024	13	-	10.013
FR0086	50.000	01 April/ April 01, 2021	15 April/ April 15, 2026	(382)	-	49.618
FR0086	50.000	01 April/ April 01, 2021	15 April/ April 15, 2026	(390)	-	49.610
FR0086	50.000	01 April/ April 01, 2021	15 April/ April 15, 2026	(362)	-	49.638
FR0086	25.000	21 Januari/ January 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	160	584	24.575
FR0086	25.000	21 Januari/ January 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	160	584	24.575
FR0086	25.000	04 Februari/ February 04, 2021	15 April/ April 15, 2026	186	611	24.575
FR0086	50.000	04 Februari/ February 04, 2021	15 April/ April 15, 2026	351	1.201	49.150
FR0086	50.000	18 Februari/ February 18, 2021	15 April/ April 15, 2026	234	1.083	49.151
FR0086	25.000	18 Februari/ February 18, 2021	15 April/ April 15, 2026	106	531	24.575
FR0086	25.000	18 Februari/ February 18, 2021	15 April/ April 15, 2026	106	531	24.575
FR0086	30.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	51	561	29.491
FR0086	20.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	34	374	19.660
FR0086	10.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	17	187	9.830
FR0086	10.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	17	187	9.830
FR0086	10.000	22 Februari/ February 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	-	170	9.830
FR0086	10.000	22 Februari/ February 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	-	170	9.830
Subjumlah/Subtotal				123.061	6.774	6.611.287

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				123.061	6.774	6.611.287
FR0086	10.000	22 Februari/ February 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	-	170	9.830
FR0086	50.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	32	881	49.151
FR0086	50.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	53	902	49.151
FR0086	50.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	32	881	49.151
FR0086	50.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	32	881	49.151
FR0086	50.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	53	902	49.151
FR0086	20.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 April/ April 15, 2026	82	421	19.660
FR0086	20.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 April/ April 15, 2026	82	421	19.660
FR0086	10.000	17 Juni/ June 17, 2021	15 April/ April 15, 2026	38	208	9.830
FR0086	20.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	87	427	19.660
FR0086	20.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	87	427	19.660
FR0086	10.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	39	208	9.830
FR0086	20.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	77	417	19.660
FR0086	20.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	77	417	19.660
FR0086	20.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	77	417	19.660
FR0086	10.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	39	208	9.830
FR0086	10.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	36	206	9.830
Subjumlah/Subtotal				123.983	15.167	7.043.816

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				123.983	15.167	7.043.816
FR0086	20.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	72	412	19.660
FR0086	30.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	108	618	29.491
FR0086	30.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	108	618	29.491
FR0086	20.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	67	407	19.660
FR0086	10.000	01 Juli/ July 01, 2021	15 April/ April 15, 2026	28	198	9.830
FR0086	10.000	02 Juli/ July 02, 2021	15 April/ April 15, 2026	26	196	9.830
FR0086	20.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 April/ April 15, 2026	52	392	19.660
FR0086	30.000	05 Juli/ July 05, 2021	15 April/ April 15, 2026	78	587	29.491
FR0086	25.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	117	541	24.575
FR0086	20.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	88	428	19.660
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	45	214	9.830
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	44	214	9.830
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	44	214	9.830
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	44	214	9.830
FR0086	20.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	93	433	19.660
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	47	217	9.830
FR0086	10.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	47	217	9.830
FR0086	20.000	12 Oktober/ October 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	134	474	19.660
FR0086	20.000	12 Oktober/ October 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	134	474	19.660
FR0086	20.000	13 Oktober/ October 13, 2021	15 April/ April 15, 2026	123	463	19.660
FR0086	20.000	13 Oktober/ October 13, 2021	15 April/ April 15, 2026	123	463	19.660
FR0086	20.000	14 Oktober/ October 14, 2021	15 April/ April 15, 2026	134	474	19.660
FR0086	20.000	14 Oktober/ October 14, 2021	15 April/ April 15, 2026	134	474	19.660
FR0086	20.000	14 Oktober/ October 14, 2021	15 April/ April 15, 2026	134	474	19.660
FR0086	10.000	26 Oktober/ October 26, 2021	15 April/ April 15, 2026	89	259	9.830
Subjumlah/Subtotal				126.096	24.839	7.481.257

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				126.096	24.839	7.481.257
FR0086	25.000	29 Oktober/ October 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	237	661	24.575
FR0086	25.000	29 Oktober/ October 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	237	661	24.575
FR0090	30.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 April/ April 15, 2027	(247)	756	28.997
FR0090	20.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 April/ April 15, 2027	(164)	504	19.331
FR0090	20.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 April/ April 15, 2027	(163)	505	19.331
FR0090	10.000	22 Juli/ July 22, 2021	15 April/ April 15, 2027	(66)	268	9.666
FR0090	20.000	22 Juli/ July 22, 2021	15 April/ April 15, 2027	(139)	529	19.331
FR0090	10.000	05 Agustus/ August 05, 2021	15 April/ April 15, 2027	(36)	298	9.666
FR0090	50.000	05 Agustus/ August 05, 2021	15 April/ April 15, 2027	(142)	1.530	48.328
FR0090	10.000	06 Agustus/ August 06, 2021	15 April/ April 15, 2027	(18)	316	9.666
FR0090	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(30)	639	19.331
FR0090	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(30)	639	19.331
FR0090	10.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(15)	320	9.666
FR0090	10.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(15)	320	9.666
FR0090	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(42)	627	19.331
FR0090	30.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(63)	940	28.997
FR0090	30.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(72)	931	28.997
Subjumlah/Subtotal				125.328	35.285	7.830.042

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

2023				Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date			
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				125.328	35.285	7.830.042
FR0090	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(48)	621	19.331
FR0090	20.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(48)	621	19.331
FR0090	40.000	09 Agustus/ August 09, 2021	15 April/ April 15, 2027	(96)	1.241	38.663
FR0090	10.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 April/ April 15, 2027	(52)	282	9.666
FR0090	20.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 April/ April 15, 2027	(110)	559	19.331
FR0090	10.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 April/ April 15, 2027	(55)	279	9.666
FR0090	20.000	16 Agustus/ August 16, 2021	15 April/ April 15, 2027	(110)	559	19.331
FR0090	50.000	20 Agustus/ August 20, 2021	15 April/ April 15, 2027	(231)	1.441	48.328
FR0090	50.000	20 Agustus/ August 20, 2021	15 April/ April 15, 2027	(227)	1.445	48.328
FR0090	50.000	20 Agustus/ August 20, 2021	15 April/ April 15, 2027	(227)	1.445	48.328
FR0090	10.000	23 September/ September 23, 2021	15 April/ April 15, 2027	(6)	328	9.666
FR0090	20.000	11 Januari/ January 11, 2022	15 April/ April 15, 2027	(65)	604	19.331
FR0090	10.000	31 Januari/ January 31, 2022	15 April/ April 15, 2027	(33)	302	9.666
FR0090	10.000	31 Januari/ January 31, 2022	15 April/ April 15, 2027	(33)	302	9.666
FR0090	20.000	25 Februari/ February 25, 2022	15 April/ April 15, 2027	(127)	542	19.331
FR0090	30.000	07 Maret/ March 07, 2022	15 April/ April 15, 2027	(252)	751	28.997
FR0090	10.000	07 Maret/ March 07, 2022	15 April/ April 15, 2027	(84)	250	9.666
FR0090	10.000	17 Maret/ March 17, 2022	15 April/ April 15, 2027	(135)	199	9.666
FR0090	10.000	17 Maret/ March 17, 2022	15 April/ April 15, 2027	(135)	199	9.666
FR0090	50.000	17 Maret/ March 17, 2022	15 April/ April 15, 2027	(674)	997	48.329
FR0090	10.000	26 Juli/ July 26, 2022	15 April/ April 15, 2027	(491)	(157)	9.666
FR0090	10.000	26 Juli/ July 26, 2022	15 April/ April 15, 2027	(491)	(157)	9.666
Jumlah/Total				121.599	47.936	8.303.663

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember/ December 31, 2022						
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost						
FR0070	50.000	25 Februari/ February 25, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.724	-	51.724
FR0070	50.000	26 Februari/ February 26, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.726	-	51.726
FR0070	50.000	12 Maret/ March 12, 2021	15 September/ September 15, 2024	1.478	-	51.478
FR0070	50.000	15 Maret/ March 15, 2021	15 Maret/ March 15, 2024	1.586	-	51.586
FR0081	30.000	23 Maret/ March 23, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	368	-	30.368
FR0081	50.000	15 Juni/ June 15, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.529	-	51.529
FR0081	50.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.625	-	51.625
FR0059	100.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	4.885	-	104.885
FR0059	100.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	4.577	-	104.577
FR0081	50.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.581	-	51.581
FR0081	50.000	5 Juli/ July 5, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.554	-	51.554
FR0081	50.000	13 Juli/ July 13, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.610	-	51.610
FR0059	50.000	15 Juli/ July 15, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.509	-	52.509
FR0059	100.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	5.284	-	105.284
FR0081	20.000	30 Juli/ July 30, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	702	-	20.702
FR0081	200.000	2 Agustus/ August 2, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	7.165	-	207.165
FR0081	50.000	3 Agustus/ August 3, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	1.793	-	51.793
FR0059	50.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.984	-	52.984
FR0081	20.000	9 Agustus/ August 9, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	714	-	20.714
Dipindahkan/Brought forward				45.394	-	1.215.394

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember/
December 31,
2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Biaya perolehan diamortisasi/Amortised cost (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				45.394	-	1.215.394
FR0059	60.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	3.597	-	63.597
FR0081	80.000	10 Agustus/ August 10, 2021	15 Juni/ June 15, 2025	2.857	-	82.857
FR0059	30.000	13 Agustus/ August 13, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.640	-	31.640
FR0059	20.000	18 Agustus/ August 18, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	1.088	-	21.088
FR0059	130.000	23 Agustus/ August 23, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	7.189	-	137.189
FR0059	50.000	17 November/ November 17, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	2.983	-	52.983
FR0059	60.000	19 November/ November 19, 2021	15 Mei/ May 15, 2027	3.659	-	63.659
FR0081	50.000	12 Januari/ January 12, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.762	-	51.762
FR0081	50.000	21 Januari/ January 21, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.805	-	51.805
FR0081	40.000	28 April/ April 28, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	800	-	40.800
FR0081	50.000	11 Mei/ May 11, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	407	-	50.407
FR0081	25.000	25 Mei/ May 25, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	287	-	25.287
FR0081	65.000	27 Mei/ May 27, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	710	-	65.710
FR0081	90.000	13 Juni/ June 13, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.649	-	91.649
FR0081	60.000	20 Juni/ June 20, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	901	-	60.901
FR0081	20.000	22 Juni/ June 22, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	268	-	20.268
FR0081	50.000	29 Juni/ June 29, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	1.111	-	51.111
FR0081	10.000	18 Juli/ July 18, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	154	-	10.154
FR0081	50.000	19 Juli/ July 19, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	601	-	50.601
FR0081	40.000	20 Juli/ July 20, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	430	-	40.430
FR0081	50.000	26 Juli/ July 26, 2022	15 Juni/ June 15, 2025	154	-	50.154
Subjumlah/Subtotal				79.447	-	2.329.447

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember/
December 31,
2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair value through other comprehensive income						
FR0086	50.000	21 Januari/ January 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	448	(1.403)	49.045
FR0086	75.000	4 Februari/ February 4, 2021	15 April/ April 15, 2026	754	(2.187)	73.567
FR0086	75.000	18 Februari/ February 18, 2021	15 April/ April 15, 2026	477	(1.909)	73.568
FR0086	70.000	19 Februari/ February 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	168	(1.504)	68.663
FR0086	30.000	22 Februari/ February 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	-	(573)	29.427
FR0086	250.000	10 Juni/ June 10, 2021	15 April/ April 15, 2026	282	(5.056)	245.226
FR0086	40.000	16 Juni/ June 16, 2021	15 April/ April 15, 2026	229	(992)	39.236
FR0086	40.000	29 Juni/ June 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	244	(1.008)	39.236
FR0086	170.000	30 Juni/ June 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	879	(4.126)	166.753
FR0086	10.000	1 Juli/ July 1, 2021	15 April/ April 15, 2026	40	(231)	9.809
FR0086	10.000	2 Juli/ July 2, 2021	15 April/ April 15, 2026	36	(227)	9.809
FR0086	90.000	5 Juli/ July 5, 2021	15 April/ April 15, 2026	313	(2.032)	88.281
FR0086	10.000	6 Juli/ July 6, 2021	15 April/ April 15, 2026	29	(220)	9.809
FR0086	100.000	19 Juli/ July 19, 2021	15 April/ April 15, 2026	653	(2.563)	98.090
FR0086	40.000	21 Juli/ July 21, 2021	15 April/ April 15, 2026	262	(1.026)	39.236
FR0086	20.000	7 Oktober/ October 7, 2021	15 April/ April 15, 2026	195	(577)	19.618
FR0086	25.000	8 Oktober/ October 8, 2021	15 April/ April 15, 2026	244	(721)	24.522
FR0086	40.000	12 Oktober/ October 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	376	(1.140)	39.236
FR0086	40.000	13 Oktober/ October 13, 2021	15 April/ April 15, 2026	346	(1.110)	39.236
Dipindahkan/Brought forward				5.973	(28.604)	1.162.369

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES FOR SALE WITH
REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember/
December 31,
2022

Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Premium (diskonto) yang belum diamortisasi/ Unamortized premium (discount)	Laba (rugi) yang belum direalisasi/ Unrealised gain (loss)	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara/Government Debt (lanjutan)/(continued)						
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair value through other comprehensive income (lanjutan)/(continued)						
Pindahan/Carry forward				5.973	(28.604)	1.162.369
FR0086	60.000	14 Oktober/ October 14, 2021	15 April/ April 15, 2026	564	(1.710)	58.854
FR0086	20.000	26 Oktober/ October 26, 2021	15 April/ April 15, 2026	246	(628)	19.618
FR0086	80.000	29 Oktober/ October 29, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.062	(2.590)	78.472
FR0086	75.000	2 November/ November 2, 2021	15 April/ April 15, 2026	973	(2.406)	73.567
FR0086	70.000	11 November/ November 11, 2021	15 April/ April 15, 2026	961	(2.298)	68.663
FR0086	40.000	12 November/ November 12, 2021	15 April/ April 15, 2026	536	(1.300)	39.236
FR0086	70.000	22 November/ November 22, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.017	(2.354)	68.663
FR0086	40.000	23 November/ November 23, 2021	15 April/ April 15, 2026	585	(1.349)	39.236
FR0086	30.000	24 November/ November 24, 2021	15 April/ April 15, 2026	439	(1.012)	29.427
FR0086	70.000	25 November/ November 25, 2021	15 April/ April 15, 2026	1.025	(2.363)	68.663
FR0086	60.000	30 November/ November 30, 2021	15 April/ April 15, 2026	895	(2.042)	58.854
Subjumlah/Subtotal				14.276	(48.657)	1.765.619
Jumlah/Total				93.723	(48.657)	4.095.066

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI
DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank memiliki tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sejumlah Rp6.247.318 dan Rp7.822.847 dengan rincian sebagai berikut:

**10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER
RESALE AGREEMENT**

As of December 31, 2023 and 2022 Bank has a number of marketable securities purchased under resale agreement Rp6,247,318 and Rp7,822,847, with details as follows:

2023							
Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara							
FR0091	417.811	28 Desember December 28, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,25%	418.285	257	418.067
FR0084	347.288	28 Desember December 28, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,30%	347.676	241	347.529
FR0068	108.041	29 Desember December 2, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,30%	108.174	57	108.098
VR0068	23.321	20 Januari January 20, 2023	19 Januari January 19, 2024	6,70%	24.901	1.502	24.823
VR0073	70.194	20 Januari January 20, 2023	19 Januari January 19, 2024	6,71%	71.834	1.537	71.732
VR0070	23.851	27 Januari January 27, 2023	26 Januari January 26, 2024	6,71%	25.469	1.507	25.358
VR0083	46.810	3 Februari February 3, 2023	2 Februari February 2, 2024	6,71%	49.985	2.897	49.706
VR0063	380.065	19 Desember December 19, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,40%	380.872	724	380.789
VR0044	289.789	27 Desember December 27, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,28%	290.193	253	290.042
VR0045	48.298	27 Desember December 27, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,28%	48.366	42	48.340
VR0093	48.253	27 Desember December 27, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,28%	48.320	42	48.295
VR0072	75.260	27 Desember December 27, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,28%	75.365	66	75.325
FR0059	584.339	28 Desember December 28, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,23%	584.946	404	584.743
FR0082	483.291	28 Desember December 28, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,23%	483.793	335	483.626
FR0087	946.003	28 Desember December 28, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,27%	947.089	559	946.562
FR0076	591.529	21 Desember December 21, 2023	4 Januari January 4, 2024	6,40%	593.002	1.157	592.686
FR0080	494.498	22 Desember December 22, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,40%	495.350	557	495.055
FR0083	201.292	22 Desember December 22, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,40%	201.793	358	201.649
FR0085	200.400	28 Desember December 28, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,20%	200.607	138	200.538
FR0098	194.635	28 Desember December 28, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,20%	194.836	134	194.769
FR0081	286.008	28 Desember December 28, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,30%	286.357	182	286.191
FR0090	185.223	29 Desember December 29, 2023	5 Januari January 5, 2024	6,25%	185.448	96	185.319
VR0077	187.945	29 Desember December 29, 2023	3 Januari January 3, 2024	6,20%	188.139	129	188.074
Jumlah/Total	6.234.143,38				6.250.799	13.175	6.247.318

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**10. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI
DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)**

**10. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER
RESALE AGREEMENT (continued)**

2022							
Jenis surat berharga/ Securities	Harga beli/ Purchase price	Tanggal mulai/ Start date	Tanggal jual kembali/ Resale date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Harga jual kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum direalisasi/ Unrealized interest income	Nilai bersih/ Net value
Surat Utang Negara							
FR0087	367.130	1 Desember/ December 1, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,86%	369.043	60	368.983
FR0081	148.341	2 Desember/ December 2, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,88%	149.092	24	149.068
FR0084	99.477	2 Desember/ December 2, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,88%	99.981	16	99.964
FR0083	191.662	2 Desember/ December 2, 2022	1 Desember/ December 1, 2023	6,66%	204.569	11.843	192.726
FR0088	42.352	5 Desember/ December 5, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,90%	42.561	21	42.540
FR0065	115.692	5 Desember/ December 5, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,90%	116.261	57	116.204
VR0078	285.505	9 Desember/ December 9, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,79%	286.790	230	286.561
VR0037	139.585	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,95%	139.908	115	139.793
VR0072	46.831	23 Desember/ December 23, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,95%	46.939	39	46.900
VR0068	381.224	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	381.654	61	381.593
VR0077	140.534	27 Desember/ December 27, 2022	10 Januari/ January 10, 2023	6,00%	140.862	211	140.651
FR0096	28.650	27 Desember/ December 27, 2022	10 Januari/ January 10, 2023	6,00%	28.717	43	28.674
VR0053	116.745	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,80%	116.876	56	116.820
VR0037	931.166	28 Desember/ December 28, 2022	11 Januari/ January 11, 2023	6,00%	933.339	1.552	931.787
VR0046	192.083	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	192.288	117	192.171
VR0050	1.004.411	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	1.005.485	614	1.004.871
VR0062	906.457	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,50%	907.426	554	906.872
VR0075	234.299	29 Desember/ December 29, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,85%	234.604	190	234.413
VR0045	924.263	29 Desember/ December 29, 2022	12 Januari/ January 12, 2023	5,77%	926.337	1.630	924.708
VR0034	382.616	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	5,50%	383.025	292	382.733
VR0036	573.923	30 Desember/ December 30, 2022	13 Januari/ January 13, 2023	5,77%	575.211	1.104	574.107
VR0065	370.622	30 Desember/ December 30, 2022	27 Januari/ January 27, 2023	6,03%	372.361	1.614	370.747
VR0044	189.891	30 Desember/ December 30, 2022	29 Januari/ January 29, 2023	6,66%	202.678	12.717	189.961
Jumlah/Total					7.856.007	33.160	7.822.847

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

11. TAGIHAN LAINNYA

	<u>2023</u>
Tagihan transfer dan ATM	122.780
Lainnya	100.358
Jumlah	<u>223.138</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat bank garansi tidak tertagih adalah memadai.

11. OTHER RECEIVABLES

	<u>2022</u>	
	194.150	Transfer receivables and ATM
	91.997	Others
	<u>286.147</u>	Total

As of December 31, 2023 and 2022, there were no other receivables from related parties.

The collectibility of all other receivables as of December 31, 2023 and 2022 was classified as current.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible bank guarantee is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank adalah dalam Rupiah.

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

12. LOANS AND SHARIA FINANCING

All loans provided by the Bank are in Rupiah.

a. By type and collectibility of loans

2023							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Modal kerja	15.550.351	13.946.393	924.261	59.999	88.048	531.650	Working capital
Investasi	8.002.279	6.786.068	1.060.393	6.918	13.921	134.979	Investment
Konsumsi	31.208.273	30.301.188	378.777	30.496	36.134	461.678	Consumption
Jumlah	54.760.903	51.033.649	2.363.431	97.413	138.103	1.128.307	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	53.395.998	50.606.098	2.126.448	69.573	89.060	504.819	Total loans, net

2022							
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Modal kerja	10.968.010	9.802.144	457.228	20.906	37.479	650.253	Working capital
Investasi	6.570.658	6.296.351	151.931	3.855	3.343	115.178	Investment
Konsumsi	28.657.989	27.883.864	295.970	26.323	37.043	414.789	Consumption
Jumlah	46.196.657	43.982.359	905.129	51.084	77.865	1.180.220	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	44.878.045	43.586.406	826.579	32.105	49.370	383.585	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (lanjutan)**

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

b. By economic sector of loans and collectibility

	2023						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	31.178.711	30.271.804	378.644	30.495	36.136	461.632	Household
Perdagangan besar dan eceran	8.537.898	7.515.612	610.679	31.394	55.198	325.015	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.752.737	2.813.677	823.599	11.970	1.000	102.491	Construction
Industri pengolahan	3.098.925	2.944.123	69.337	5.798	7.948	71.719	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.894.090	1.812.244	41.529	2.047	15.773	22.497	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	2.702.863	2.311.400	297.926	6.783	15.767	70.987	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	2.007.568	1.954.823	12.849	5.588	36	34.272	Financial intermediaries
Akomodasi makanan dan minuman	426.174	401.010	14.936	1.087	1.879	7.262	Accommodation, food and beverage
Jasa pendidikan	265.951	265.137	514	300	-	-	Education services
Transportasi pergudangan dan komunikasi	211.356	192.494	11.262	1.173	393	6.034	Transportation, warehousing and communications
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	221.041	207.914	7.379	-	-	5.748	Health services and social activities
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	136.672	115.637	6.910	3	3	14.119	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	28.576	28.337	239	-	-	-	Electricity, gas and water
Perikanan	131.245	117.689	5.453	659	3.942	3.502	Fishery
Pertambangan dan penggalian	34.574	28.276	3.862	27	-	2.409	Mining and quarrying
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	21.543	19.674	1.179	89	28	573	Individual services which serve households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	4.091	4.091	-	-	-	-	Activity is still undefined
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	78.063	929	77.134	-	-	-	Government Administration, Defense and Mandatory Social Security
Lainnya	28.825	28.778	-	-	-	47	Other
Jumlah	54.760.903	51.033.649	2.363.431	97.413	138.103	1.128.307	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	53.395.998	50.606.098	2.126.448	69.573	89.060	504.819	Total loans, net

	2022						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Rumah tangga	28.626.074	27.853.074	294.934	26.323	37.043	414.700	Household
Perdagangan besar dan eceran	5.770.630	5.035.105	315.445	14.955	21.580	383.545	Wholesale and retail trade
Konstruksi	3.598.479	3.466.058	15.856	1.066	-	115.499	Construction
Industri pengolahan	2.319.103	2.198.171	40.870	2.073	3.118	74.871	Processing industry
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	1.901.379	1.853.941	18.868	345	2.635	25.590	Public and social culture services
Pertanian perburuan dan kehutanan	1.579.975	1.331.024	157.290	4.177	6.645	80.839	Agriculture, hunting and forestry
Perantara keuangan	1.187.332	1.127.892	27.999	1.359	5.764	24.318	Financial intermediaries
Akomodasi makanan dan minuman	321.695	296.561	12.186	692	49	12.207	Accommodation, food and beverage
Jasa pendidikan	104.662	104.475	-	-	-	187	Education services
Transportasi pergudangan dan komunikasi	173.033	160.565	3.563	-	-	8.905	Transportation, warehousing and communications
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	135.295	124.066	810	-	-	10.419	Health services and social activities
Real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan	123.042	98.683	3.336	91	41	20.891	Real estate, business services and business ownership
Listrik gas dan air	29.627	29.256	349	-	-	22	Electricity, gas and water
Perikanan	75.092	63.749	8.055	3	878	2.407	Fishery
Pertambangan dan penggalian	24.244	15.370	3.833	-	-	5.041	Mining and quarrying
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	13.872	12.374	697	-	112	689	Individual services which serve households
Kegiatan yang belum jelas batasannya	6.484	6.484	-	-	-	-	Activity is still undefined
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	174.195	174.195	-	-	-	-	Government Administration, Defense and Mandatory Social Security
Lainnya	32.444	31.316	1.038	-	-	90	Other
Jumlah	46.196.657	43.982.359	905.129	51.084	77.865	1.180.220	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	44.878.045	43.586.406	826.579	32.105	49.370	383.585	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

c. Berdasarkan sisa umur kredit

c. *Maturity of loans*

	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	8.818.032	5.289.294	Less than 1 year
1 - 2 tahun	3.306.375	3.476.781	1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	16.294.690	12.888.940	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	26.341.806	24.541.642	Over 5 years
	<u>54.760.903</u>	<u>46.196.657</u>	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.364.905)	(1.318.612)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>53.395.998</u>	<u>44.878.045</u>	Total loans, net

d. Berdasarkan hubungan

d. *By relationship*

	2023						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Pihak berelasi (Catatan 40)	184.848	107.371	77.134	-	343	-	Related party (Note 40)
Pihak ketiga	54.576.055	50.926.278	2.286.297	97.413	137.760	1.128.307	Third parties
Jumlah	54.760.903	51.033.649	2.363.431	97.413	138.103	1.128.307	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	(1.351)	(156)	(1.054)	-	(141)	-	Related parties
Pihak ketiga	(1.363.554)	(427.395)	(235.929)	(27.840)	(48.902)	(623.488)	Third parties
Jumlah	(1.364.905)	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>53.395.998</u>	<u>50.606.098</u>	<u>2.126.448</u>	<u>69.573</u>	<u>89.060</u>	<u>504.819</u>	Total loans, net

	2022						
	Jumlah/ Total	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub-standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	
Pihak berelasi (Catatan 40)	134.871	132.025	2.846	-	-	-	Related party (Note 40)
Pihak ketiga	46.061.786	43.850.334	902.283	51.084	77.865	1.180.220	Third parties
Jumlah	46.196.657	43.982.359	905.129	51.084	77.865	1.180.220	Total
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai							Less: Allowance for impairment losses
Pihak berelasi	(284)	(127)	(157)	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	(1.318.328)	(395.826)	(78.393)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	Third parties
Jumlah	(1.318.612)	(395.953)	(78.550)	(18.979)	(28.495)	(796.635)	Total
Jumlah kredit yang diberikan, neto	<u>44.878.045</u>	<u>43.586.406</u>	<u>826.579</u>	<u>32.105</u>	<u>49.370</u>	<u>383.585</u>	Total loans, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (lanjutan)**

d. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp100.611 dan Rp104.192 (Catatan 40) merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,60% per tahun.

e. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 10,50%-12,75%.

f. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing berkisar antara 2,64%-63,89% dari total pinjaman sindikasi.

g. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah masing-masing sebesar Rp3.901.204 dan Rp3.937.602.

	2023	2022
Perpanjangan waktu kredit	906.673	215.738
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	8.100	13.846
Perpanjangan waktu kredit dan skema lain	2.986.431	3.708.018
Jumlah	3.901.204	3.937.602

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

h. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan BMPK.

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

d. By relationship (continued)

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp100,611 and Rp104,192, respectively (Note 40), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4.60% per annum.

e. Annual interest rates

The annual interest rates of loans in Rupiah as of December 31, 2023 and 2022 are 10.50%-12.75% respectively.

f. Syndicated loans

The share of the Bank in syndicated loans as of December 31, 2023 and 2022 ranged from 2.64% - 63.89%, respectively, from total of syndication loan.

g. Restructured loans

The restructured loans as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp3,901,204 and to Rp3,937,602.

Exsistension of loan period
Exsistension of loan period and interest
rate adjusment
Exsistension of loan period and other schemes
Total

The Bank has restructured loan for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 regarding National Economic Stimulus as Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease Spread 2019.

h. Legal Lending Limits (BMPK)

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

- i. Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah dari unit usaha Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Murabahah	902.861	874.944
Musyarakah	1.130.521	767.912
Mudharabah	105.174	223.915
Qardh	49.062	36.423
Ijarah	241	277
Jumlah	2.187.859	1.903.471

- j. Kredit tidak lancar

	2023	2022
Jumlah NPL	1.363.823	1.309.169
Rasio NPL bruto	2,49%	2,83%
Rasio NPL neto	1,21%	1,01%

- k. Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dijamin pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp885.916 dan Rp303.930 dengan jaminan berupa deposito berjangka masing-masing sebesar Rp203.926 dan Rp127.942. (Catatan 18c).
- l. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar Rp629.551 dan Rp900.559.
- m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

- i. The amounts of loans including financing provided based on Sharia principles from Sharia unit as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Murabahah
Musyarakah
Mudharabah
Qardh
Ijarah
Total

- j. Non-performing loans (NPL)

Total NPL
Ratio of gross NPL
Ratio of net NPL

- k. Total loans and sharia financing pledged as collateral as of December 31, 2023 and 2022 were Rp885,916 and Rp303,930, respectively with collateral of time deposit amounting Rp203,926 and Rp127,942. (Note 18c).
- l. Loans and sharia financing written-off for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp629,551 and Rp900,559 respectively.
- m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

2023					
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	263.059	61.303	911.041	83.210	1.318.613
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	73.003	(22.860)	(50.143)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(5.661)	9.079	(3.418)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(18.452)	(24.104)	42.556	-	-
Penghapusbukuan/Writte-off	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	170.959	121.483	365.005	18.396	675.843
Saldo 31 Desember 2023/ Balance at December 31, 2023	367.710	74.072	869.731	53.392	1.364.905

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (lanjutan)**

- m. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):

2022					
Cadangan kerugian penurunan nilai - kredit yang diberikan/ Allowance for impairment losses - loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	15.807	73.110	1.659.071	83.429	1.831.417
Perubahan aset keuangan yang diakui pada laporan laba rugi/ Change due to financial assets recognize in the statement of profit or loss that have:					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	137.683	(22.598)	(115.085)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(1.493)	11.190	(9.697)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(2.649)	(34.464)	37.113	-	-
Penghapusbukuan/Write-off	(58.773)	(25.414)	(800.922)	(15.450)	(900.559)
Dibebankan ke laporan laba rugi/ Charge to statement of profit or loss	172.483	59.479	140.562	15.230	387.754
Saldo 31 Desember 2022/ Balance at December 31, 2022	263.058	61.303	911.042	83.209	1.318.612

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp732.824 (individual) dan Rp632.081 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp866.893 (individual) dan Rp451.719 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp675.843 dan Rp387.754 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 33).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah.

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

- m. The changes in the allowance for impairment losses are as follows (continued):

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia financing is adequate.

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp732,824 (individual) and Rp632,081 (collective) as of December 31, 2023 and Rp866,893 (individual) and Rp451,719 (collective) as of December 31, 2022.

Provision for impairment losses amounted to Rp675,843 and Rp387,754 as of December 31, 2023 and 2022 (Note 33).

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans and sharia financing.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH (lanjutan)**

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

n. Mutasi nilai tercatat bruto kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

n. Changes in the gross carrying amount of loans and sharia financing:

2023					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	42.094.584	598.657	1.599.946	1.903.471	46.196.658
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets				-	
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	218.473	(230.287)	11.814	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(453.664)	464.752	(11.088)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(785.024)	(222.195)	1.007.219	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	23.969.845	269.423	688.003	332.602	25.259.873
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(2.598.015)	(27.837)	(970.923)		(3.596.775)
Perubahan akrual bunga/Change in interest accrual	(12.613.817)	(111.726)	256.241	-	(12.469.302)
Penghapusbukuan/Writte-off	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)
Saldo 31 Desember 2023/ Balance at December 31, 2023	49.717.184	669.958	2.185.902	2.187.859	54.760.903
2022					
Nilai tercatat bruto kredit yang diberikan/ Gross carrying amount of the loans	Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Pembiayaan syariah/ Sharia financing	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun/ Beginning balance of year	38.319.178	549.722	2.118.291	1.762.368	42.749.559
Perubahan aset keuangan/ Change due to financial assets					
Transfer ke tahap 1/Transfer to stage 1	332.412	(192.277)	(140.135)	-	-
Transfer ke tahap 2/Transfer to stage 2	(473.300)	492.701	(19.401)	-	-
Transfer ke tahap 3/Transfer to stage 3	(539.528)	(216.055)	755.583	-	-
Aset keuangan yang baru atau dibeli/ New financial assets originated or purchased	19.942.656	170.525	65.829	-	20.179.010
Modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan/ Modification of contractual cashflow of financial assets	(3.169.533)	(34.190)	(380.246)	-	(3.583.968)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali/ Net change in exposure and remeasurement	(12.258.559)	(146.354)	976	156.553	(12.247.385)
Penghapusbukuan/Writte-off	(58.773)	(25.414)	(800.922)	(15.450)	(900.559)
Saldo 31 Desember 2022/ Balance at December 31, 2022	42.094.553	598.658	1.599.975	1.903.471	46.196.657

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2023 dan 2022 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022

and for the years then ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

- o. Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar 26,81% dan 22,81%.

- p. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No.85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
2. Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp2.778.

12. LOANS AND SHARIA FINANCING (continued)

- o. Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at December 31, 2023 and 2022 were 26.81% and 22.81% respectively.

- p. In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No. 70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which the Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No.85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

1. The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 ((three) months and 3% for the following three months.
2. The credit limit is more than Rp500 to Rp10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.

Until December 31, 2023, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp2,778.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Kredit yang diberikan		377.219
Lain-lain		308.346
Mata uang asing:		
Dolar Amerika Serikat	10.976	169
Jumlah pendapatan bunga yang masih akan diterima		685.734

13. ACCRUED INTEREST INCOME

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah:		
Loans		340.021
Others		306.091
Foreign currencies:		
United States Dollar	835	13
Total accrued interest income		646.125

14. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2023
Asuransi tunjangan hari tua	97.840
Asuransi lainnya	50.048
Sewa dibayar dimuka	22.372
Lainnya	37.192
Jumlah	207.452
Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.	

14. PREPAID EXPENSES

	2022	
Mutual aid pension insurance	88.765	
Other insurance	37.924	
Prepaid rent	6.216	
Others	33.756	
Total	166.661	
Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.		

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP**15. FIXED ASSETS**

2023						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
						Cost
Biaya perolehan						Land
Tanah	945.010	-	-	(1.950)	943.060	
Bangunan	203.402	320	-	-	203.722	Buildings
Peralatan kantor	678.419	58.338	-	-	736.757	Office equipment
Kendaraan bermotor	50.516	13.746	12.552	-	51.710	Motor vehicles
	1.877.347	72.404	12.552	(1.950)	1.935.249	
Aset dalam penyelesaian	681	115	-	-	796	Construction in progress
Aset hak guna	231.232	76.779	13.178	-	294.833	Right of use assets
	2.109.260	149.298	25.730	(1.950)	2.230.878	
						Accumulated depreciation
Akumulasi penyusutan						Buildings
Bangunan	116.296	9.179	-	-	125.475	
Peralatan kantor	574.638	67.928	-	-	642.566	Office equipment
Kendaraan bermotor	24.616	7.426	12.552	-	19.490	Motor vehicles
	715.550	84.533	12.552	-	787.531	
Aset hak guna	109.460	66.219	10.045	-	165.634	Right of use assets
	825.010	150.752	22.597	-	953.165	
Nilai buku neto	1.284.250				1.277.713	Net book value

2022						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Cost	
Tanah	856.993	47.736	-	-	945.010	Land
Bangunan	203.366	36	-	-	203.402	Buildings
Peralatan kantor	546.324	98.090	234	34.239	678.419	Office equipment
Kendaraan bermotor	33.754	28.840	12.078	-	50.516	Motor vehicles
	1.640.437	174.702	12.312	34.239	1.877.347	
Aset dalam penyelesaian	591	90	-	-	681	Construction in progress
Aset hak guna	265.235	73.477	107.480	-	231.232	Right of use assets
	1.906.263	248.269	119.792	34.239	2.109.260	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Bangunan	107.086	9.210	-	-	116.296	Buildings
Peralatan kantor	492.081	64.921	234	17.870	574.638	Office equipment
Kendaraan bermotor	33.090	3.604	12.078	-	24.616	Motor vehicles
	632.257	77.735	12.312	17.870	715.550	
Aset hak guna	129.795	87.145	107.480	-	109.460	Right of use assets
	762.052	164.880	119.792	17.870	825.010	
Nilai buku neto	1.144.211				1.284.250	Net book value

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset hak guna per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

15. FIXED ASSETS (continued)

Right of use assets as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

		2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan							Cost
Aset Hak Guna							Right of use assets
Bangunan	188.065	42.019	4.280	-	225.804		Buildings
Peralatan Kantor	10.737	34.672	7.938	-	37.471		Office Equipment
Kendaraan	32.430	88	960	-	31.558		Motor Vehicles
Total Biaya Perolehan	231.232	76.779	13.178	-	294.833		Total Cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Aset Hak Guna							Right of use assets
Bangunan	86.080	41.654	4.280	-	123.454		Buildings
Peralatan Kantor	5.990	12.178	4.805	-	13.363		Office Equipment
Kendaraan	17.390	12.387	960	-	28.817		Motor Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	109.460	66.219	10.045	-	165.634		Total Accumulated depreciation
Nilai buku	121.772				129.199		Net book value

		2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan							Cost
Aset Hak Guna							Right of use assets
Bangunan	159.663	53.474	25.072	-	188.065		Buildings
Peralatan Kantor	25.778	9.222	24.263	-	10.737		Office Equipment
Kendaraan	79.794	10.781	58.145	-	32.430		Motor Vehicles
Total Biaya Perolehan	265.235	73.477	107.480	-	231.232		Total Cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Aset Hak Guna							Right of use assets
Bangunan	69.492	41.660	25.072	-	86.080		Buildings
Peralatan Kantor	15.563	14.690	24.263	-	5.990		Office Equipment
Kendaraan	44.740	30.795	58.145	-	17.390		Motor Vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	129.795	87.145	107.480	-	109.460		Total Accumulated depreciation
Nilai buku	135.440				121.772		Net book value

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 106.820 m². SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp150.752 dan Rp164.880 (Catatan 35).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Bank telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Bank mencatat penurunan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp1.950 pada 2023 dan kenaikan sebesar Rp40.281 pada 2022. Kenaikan dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

15. FIXED ASSETS (continued)

Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 106,820 m². SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Depreciation expense for years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp150,752 and Rp164,880 respectively (Note 35).

On December 31, 2023, the Bank conducted a revaluation of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, the Bank has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The Bank recorded decrease from revaluation amounting to Rp1,950 in 2023 and increase amounting to Rp40,281 in 2022. The increase and decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income.

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No. VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan tanggal 12 Januari 2024 dan KJPP Hari Utomo & Rekan tanggal 5 Januari 2023 nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.496.366 dan Rp1.261.746.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp942.864

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.152.326 dan Rp1.113.426. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (Revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Jenis aset/ Type of asset	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated Cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion
31 Desember/ December 31, 2023	Bangunan/Buildings	3%	796	2025
31 Desember/ December 31, 2022	Bangunan/Buildings	11%	681	2024

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Bangunan	21.010	19.264	Buildings
Peralatan kantor	456.357	399.176	Office equipment
Kendaraan bermotor	7.006	31.539	Motor vehicle
Jumlah	484.373	449.980	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

15. FIXED ASSETS (continued)

Based on appraisal report of "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan and Partner dated January 12, 2024 and KJPP Hari Utomo and Partner dated January 5, 2023 the valuation of fixed assets owned by the Banks as of December 31, 2023 and 2022 amounted Rp1,496,366 and Rp1,261,746 respectively.

On December 31, 2023 and 2022, if land is measured by cost method, its carrying value is Rp942,864.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of December 31, 2023 and 2022 for insurance coverage amounting to Rp1,152,326 and Rp1,113,426, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in PSAK 48 (Revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The details of construction in progress are as follows:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

As of December 31, 2023 and 2022, there were no fixed assets pledged as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap yang telah dihapusbuku, kemudian dilakukan penjualan melalui lelang dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Harga jual	5.608	5.274
Nilai buku	-	-
Laba penjualan aset tetap	<u>5.608</u>	<u>5.274</u>

Proceed
Book Value
Gain from sale of fixed assets

16. ASET LAIN-LAIN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban yang ditangguhkan	126.337	110.112
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	22.263	19.812
Lainnya, neto	283.458	54.486
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(58.656)	(43.412)
Jumlah	<u>373.402</u>	<u>140.998</u>

Deferred charges
Office stationery and printed form
Others, net
Allowance for decline in net realizable value
Total

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Lainnya termasuk biaya perpanjangan hak atas tanah yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah dengan menggunakan metode garis lurus.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	43.412	25.460
Penyisihan selama tahun berjalan	15.244	17.952
Saldo akhir	<u>58.656</u>	<u>43.412</u>

Beginning balance
Provision for the current year
Ending balance

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Others included deferred cost related to the extension of the landright and amortized over the period of the related landright using the straight-line method.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS SEGERA

	2023
Transfer, inkaso, kliring	308.136
Penerimaan yang akan diperhitungkan	150.838
Beban sudah efektif harus dibayar	73.803
ATM Bersama	21.013
Lain-lain	433.814
Jumlah	987.604

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah dalam mata uang Rupiah.

17. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	2022	
	319.871	<i>Transfer and cheques pending collection and clearing</i>
	122.431	<i>Acceptance pending settlement</i>
	91.760	<i>Amount involving expenses payable</i>
	12.779	<i>ATM Bersama</i>
	325.673	<i>Others</i>
Jumlah	872.514	Total

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

Amounts involving expenses payable represent accrued expenses of electricity, telephone, social security ("BPJS") and others.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

All of obligations due immediately as of December 31, 2023 and 2022 are in Rupiah currency.

18. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan segmen

	2023
Rupiah Konvensional	
Tabungan	
- Simpeda	16.534.449
- Tabunganku	4.240.337
- Siklus	3.863.580
- Siklus Prioritas	3.206.551
- Simpanan Pelajar	102.555
- Haji	17.161
- Siklus Nelayan	414
	27.965.047
Giro	
- Pemerintah Daerah	11.971.999
- Umum	8.773.630
	20.745.629
Deposito berjangka	
- 1 bulan	13.528.703
- 2 bulan	217.270
- 3 bulan	5.393.406
- 6 bulan	432.388
- 12 bulan	6.963.367
- 18 bulan	38.837
- 24 bulan	17.795
- Jatuh tempo	760
- Deposito <i>on call</i>	164.700
	26.757.226
Jumlah konvensional	75.467.902

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Based on segment

	2022	
Rupiah Conventional		
Savings		
- Simpeda	16.468.574	
- Tabunganku	3.904.029	
- Siklus	2.606.393	
- Siklus Prioritas	2.563.553	
- Simpanan Pelajar	71.323	
- Haji	18.428	
- Siklus Nelayan	295	
	25.632.595	
Current accounts		
- Municipal District	14.593.208	
- Public	8.877.147	
	23.470.355	
Time deposits		
- 1 month	5.874.726	
- 2 months	271.709	
- 3 months	16.276.952	
- 6 months	325.605	
- 12 months	7.648.875	
- 18 months	25.594	
- 24 months	10.643	
- Due Date	560	
- Deposits on call	40.300	
	30.474.964	
Total conventional	79.577.914	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan segmen (lanjutan)

	2023	2022
Syariah		
Tabungan		
- Tabunganku	63.673	56.222
- Simpanan Pelajar	10.255	7.083
- Umroh Amanah	5.304	4.002
- Tabungan Santri	1.877	13
- Tabungan Laku Pandai	16	15
	<u>81.125</u>	<u>67.335</u>
 Giro		
- Wadiah swasta	167.742	152.820
- Wadiah Pemerintah	4.302	2.410
- Wadiah perorangan	2.382	860
	<u>174.426</u>	<u>156.090</u>
 Jumlah syariah	<u>255.551</u>	<u>223.425</u>
Jumlah Rupiah	<u>75.723.453</u>	<u>79.801.339</u>
 Mata uang asing		
Konvensional		
Giro		
- Umum	4.522	6.692
Tabungan		
- Siklus	51.253	49.288
	<u>55.775</u>	<u>55.980</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	66.064	62.703
- 3 bulan	3.725	4.627
- 6 bulan	721	697
- 12 bulan	117	344
	<u>70.627</u>	<u>68.371</u>
Jumlah mata uang asing	<u>126.402</u>	<u>124.351</u>
Jumlah	<u>75.849.855</u>	<u>79.925.690</u>

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Based on segment (continued)

Sharia
Savings
Tabunganku -
Simpanan Pelajar -
Umroh Amanah -
Santri Saving -
Laku Pandai Saving -
 Current accounts
Private wadiah -
Goverment wadiah -
Individual wadiah -
 Total sharia
Total Rupiah
 Foreign currencies
Conventional
Current accounts
Public -
Savings
Siklus -
Time deposits
1 month -
3 months -
6 months -
12 months -
 Total foreign currencies
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Pihak berelasi		
<u>Rupiah</u>		
Konvensional		
Giro		12.231.559
Tabungan		56.755
Deposito berjangka		351.680
 Syariah		
Tabungan		49
 <u>Mata uang asing</u>		
Konvensional		
Giro	43.093	666
Tabungan	78.033	1.206
Deposito berjangka dan deposito on call	169.719	2.623
Jumlah pihak berelasi (Catatan 40)		<u>12.644.538</u>
 Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Konvensional		
Giro		8.514.070
Tabungan		27.908.292
Deposito berjangka dan deposito on call		26.405.546
 Syariah		
Giro		174.377
Tabungan		81.125
Deposito berjangka dan deposito on call		-
 <u>Mata uang asing</u>		
Giro	257.187	3.856
Tabungan	3.338.024	50.047
Deposito berjangka dan deposito on call	4.535.717	68.004
Jumlah pihak ketiga		<u>63.205.317</u>
Total		<u><u>75.849.855</u></u>

Simpanan dari pihak berelasi tersebut merupakan simpanan dari Pemerintah Daerah dan manajemen kunci.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Based on relationship and currencies

	2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Related parties		
<u>Rupiah</u>		
Conventional		
Current accounts		14.897.111
Savings		55.619
Time deposits		339.868
 Sharia		
Savings		14
 <u>Foreign currencies</u>		
Conventional		
Current accounts	43.231	673
Saving accounts	81.709	1.272
Time deposits and deposits on call	54.472	848
Total related parties (Note 40)		<u>15.295.405</u>
 Third parties		
<u>Rupiah</u>		
Conventional		
Current accounts		8.573.244
Savings		25.576.976
Time deposits and deposits on call		30.135.096
 Sharia		
Current accounts		156.089
Savings		67.322
Time deposits and deposits on call		-
 <u>Foreign currencies</u>		
Current accounts	386.639	6.019
Savings	3.084.374	48.016
Time deposits and deposits on call	4.337.434	67.523
Total third parties		<u>64.630.285</u>
Total		<u><u>79.925.690</u></u>

These deposits from related parties represent deposits from Regional Governments and key management personnel.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)

- 1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro terdiri dari:

	2023	2022
Rupiah	0,91%	0,89%
Mata uang asing	0,13%	0,14%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dari adalah sama antara pihak berelasi dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

- 2) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun tabungan terdiri dari:

	2023	2022
Tabungan		
- Simpeda	0,97%	0,96%
- Siklus	1,58%	1,65%
- Haji	0,81%	0,76%
- Tabunganku	0,91%	0,91%

Tingkat bunga rata-rata per tahun tabungan untuk pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Based on relationship and currencies (continued)

- 1) The average interest rates per annum on current accounts consist of:

	2023	2022
Rupiah	0,91%	0,89%
Foreign currencies	0,13%	0,14%

The average interest rates per annum on current accounts with related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no current accounts held under liens and used as security.

- 2) The average interest rates per annum on savings consist of:

	2023	2022
Savings		
Simpeka -	0,97%	0,96%
Siklus -	1,58%	1,65%
Haji -	0,81%	0,76%
Tabunganku -	0,91%	0,91%

The average interest rates per annum on savings for related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no savings held under liens and used as collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

- b. Berdasarkan hubungan dan mata uang (lanjutan)
- 3). Rincian deposito berjangka dan deposito *on call*:

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

	2023	2022
Rupiah		
- 1 bulan	13.508.940	5.874.726
- 2 bulan	217.270	271.709
- 3 bulan	5.388.303	16.276.952
- 6 bulan	417.861	325.605
- 12 bulan	7.002.761	7.648.875
- 18 bulan	38.837	25.594
- 24 bulan	17.795	10.643
- Jatuh Tempo	760	560
- Deposito <i>on call</i>	164.700	40.300
	<u>26.757.227</u>	<u>30.474.964</u>
Mata uang asing		
- 1 bulan	66.064	62.703
- 3 bulan	3.725	4.627
- 6 bulan	721	697
- 12 bulan	117	344
	<u>70.627</u>	<u>68.371</u>
Jumlah	<u>26.827.854</u>	<u>30.543.335</u>

Klasifikasi deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	2023	2022
Rupiah		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	15.245.542	8.582.694
- Lebih dari 1 - 3 bulan	4.213.138	14.531.833
- Lebih dari 3 - 6 bulan	267.153	198.836
- Lebih dari 6 - 12 bulan	6.809.714	7.044.282
- Lebih dari 12 - 18 bulan	42.633	64.760
- Lebih dari 18 - 24 bulan	13.587	12.124
- Jatuh Tempo	760	135
- Deposito <i>on call</i>	164.700	40.300
	<u>26.757.227</u>	<u>30.474.964</u>
Mata uang asing		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	67.025	63.627
- Lebih dari 1 - 3 bulan	2.795	3.750
- Lebih dari 3 - 6 bulan	762	723
- Lebih dari 6 - 12 bulan	45	271
	<u>70.627</u>	<u>68.371</u>
Jumlah	<u>26.827.854</u>	<u>30.543.335</u>

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

- b. Based on relationship and currencies (continued)
- 3). Detail of time deposits and deposits *on call*:

The details of time deposits based on maturities are as follows:

	2023	2022
Rupiah		
- 1 month	13.508.940	5.874.726
- 2 months	217.270	271.709
- 3 months	5.388.303	16.276.952
- 6 months	417.861	325.605
- 12 months	7.002.761	7.648.875
- 18 months	38.837	25.594
- 24 months	17.795	10.643
- Matured	760	560
- Deposits <i>on call</i>	164.700	40.300
	<u>26.757.227</u>	<u>30.474.964</u>
Foreign currencies		
- 1 month	66.064	62.703
- 3 months	3.725	4.627
- 6 months	721	697
- 12 months	117	344
	<u>70.627</u>	<u>68.371</u>
Total	<u>26.827.854</u>	<u>30.543.335</u>

The details of time deposits based on remaining period until maturity:

	2023	2022
Rupiah		
- Less than or until 1 month	15.245.542	8.582.694
- More than 1 - 3 months	4.213.138	14.531.833
- More than 3 - 6 months	267.153	198.836
- More than 6 - 12 months	6.809.714	7.044.282
- More than 12 - 18 months	42.633	64.760
- More than 18 - 24 months	13.587	12.124
- Matured	760	135
- Deposits <i>on call</i>	164.700	40.300
	<u>26.757.227</u>	<u>30.474.964</u>
Foreign currencies		
- Less than or until 1 month	67.025	63.627
- More than 1 - 3 months	2.795	3.750
- More than 3 - 6 months	762	723
- More than 6 - 12 months	45	271
	<u>70.627</u>	<u>68.371</u>
Total	<u>26.827.854</u>	<u>30.543.335</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

c. Tingkat bunga rata-rata deposito per tahun:

	2023
Rupiah	
- 1 bulan	2,71%
- 2 bulan	2,80%
- 3 bulan	2,90%
- 6 bulan	3,00%
- 12 bulan	3,10%
- 18 bulan	3,06%
- 24 bulan	3,08%
- Deposito <i>on call</i>	3,51%
Mata uang asing:	
- 1 dan 3 bulan	0,62%

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit, masing-masing sebesar Rp203.926 dan Rp127.942 (Catatan 12k).

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

c. Average interest rates of deposits per annum:

	2022	
Rupiah		Rupiah
- 1 month	2,63%	1 month -
- 2 months	2,68%	2 months -
- 3 months	2,78%	3 months -
- 6 months	2,90%	6 months -
- 12 months	2,95%	12 months -
- 18 months	3,00%	18 months -
- 24 months	3,00%	24 months -
- Deposits <i>on call</i>	2,01%	Deposits on call -
Foreign currencies		Foreign currencies
- 1 and 3 months	0,18%	1 and 3 months -

The average interest rates per annum on time deposits from related parties are similar to those for third parties.

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits held under liens and used as security were Rp203,926 and Rp127,942, respectively (Note 12k).

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Berdasarkan segmen

	2023	2022
Konvensional		
Tabungan		
- Siklus	182.093	217.121
- Simpeda	363.554	307.176
	<u>545.647</u>	<u>524.297</u>
Giro		
- Giro Bank Swasta	62.166	49.982
- Giro BPD-SI	6.678	3.900
- Giro Bank Pemerintah	2.685	2.406
- Giro BPR	1.560	780
- Giro BPR Jets	31.126	30.887
	<u>104.215</u>	<u>87.955</u>
Deposito berjangka		
- 1 bulan	103.596	178.937
- 2 bulan	-	2.000
- 3 bulan	22.700	106.750
- 6 bulan	60	60
- 12 bulan	9.700	4.500
	<u>136.056</u>	<u>292.247</u>
Interbank call money	1.770.000	2.395.000
Total konvensional	<u>2.555.918</u>	<u>3.299.499</u>
Syariah		
- Giro wadiah	4.403	11.339
Total syariah	<u>4.403</u>	<u>11.339</u>
Total	<u>2.560.321</u>	<u>3.310.838</u>

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Based on segment

Conventional
Savings
Siklus -
Simpeda -
Current accounts
Private bank current accounts -
BPD-SI current accounts -
Government bank current accounts -
BPR current accounts -
BPR Jets current accounts -
Time deposits
1 month -
2 months -
3 months -
6 months -
12 months -
Interbank call money
Total conventional
Sharia
Wadiah current account -
Total sharia
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan hubungan

	2023	2022
Pihak berelasi		
- Giro	921	920
- Tabungan	55.743	64.046
- Deposito berjangka	30	77.030
	<u>56.694</u>	<u>141.996</u>
Pihak ketiga		
- Giro	107.697	98.374
- Tabungan	489.904	460.251
- Deposito berjangka	136.026	215.217
- Interbank call money	1.770.000	2.395.000
	<u>2.503.627</u>	<u>3.168.842</u>
Total	<u>2.560.321</u>	<u>3.310.838</u>

Seluruh simpanan dari bank lain adalah dalam mata uang Rupiah.

c. Deposito berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	2023	2022
Rupiah		
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	106.926	258.267
- Lebih dari 1 - 3 bulan	19.370	29.420
- Lebih dari 3 - 6 bulan	1.060	60
- Lebih dari 6 - 12 bulan	8.200	4.500
- Lebih dari 12 - 18 bulan	500	-
	<u>136.056</u>	<u>292.247</u>
- Interbank call money	1.770.000	2.395.000
Total	<u>1.906.056</u>	<u>2.687.247</u>

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	2023	2022
Konvensional		
Giro	0,62%	0,46%
Tabungan	1,43%	1,16%
Deposito	3,18%	4,00%
Interbank call money	3,43%	5,67%
Syariah		
Giro	0,04%	0,07%
Tabungan	0,65%	0,60%
Deposito	2,60%	2,40%

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Based on relationship

Related parties
Current accounts -
Savings -
Time deposits -

Third parties
Current accounts -
Savings -
Time deposits -
Interbank call money -

Total

All deposits from other banks are in Rupiah.

c. Deposits by remaining period to maturity

Rupiah

Less than or until 1 month -
More than 1 - 3 months -
More than 3 - 6 months -
More than 6 - 12 months -
More than 12 - 18 months -

Interbank call money -

Total

d. Average interest rates per annum

Conventional

Current accounts
Savings
Time deposits
Interbank call money

Sharia

Current accounts
Savings
Time deposits

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL
DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sejumlah Rp7.915.163 dan Rp3.891.346 dengan rincian sebagai berikut:

**20. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD
UNDER REPURCHASE AGREEMENT**

As of December 31, 2023 and 2022, Bank has a number of liability for repo securities Rp7,915,163 and Rp3,891,346 with details as follows:

2023							
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia							
FR0086	117.560	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	117.853	251	117.811
FR0086	117.560	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	117.853	251	117.811
FR0090	184.841	22 Desember/ December 22, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,30%	185.197	323	185.165
FR0090	184.841	22 Desember/ December 22, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,30%	185.197	323	185.165
FR0090	184.841	22 Desember/ December 22, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,30%	185.197	323	185.165
FR0090	184.841	22 Desember/ December 22, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,30%	185.197	323	185.165
FR0086	188.444	22 Desember/ December 22, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,30%	188.807	330	188.774
FR0086	187.736	15 Desember/ December 15, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,55%	188.351	581	188.317
FR0086	187.736	15 Desember/ December 15, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,55%	188.351	581	188.317
FR0086	187.736	15 Desember/ December 15, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,55%	188.351	581	188.317
FR0086	187.736	15 Desember/ December 15, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,55%	188.351	581	188.317
FR0081	190.222	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,48%	190.701	411	190.633
PBS017	186.102	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	187.072	901	187.003
PBS017	186.102	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	187.072	901	187.003
PBS017	186.102	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	187.072	901	187.003
PBS017	186.102	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	187.072	901	187.003
PBS017	186.102	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	187.072	901	187.003
PBS003	188.236	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	189.217	911	189.146
PBS026	198.049	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	199.081	958	199.007
PBS026	198.049	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	199.081	958	199.007
PBS026	99.024	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	99.540	479	99.503
PBS030	91.522	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	91.999	443	91.965
PBS031	97.924	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	98.434	474	98.398
PBS036	92.817	6 Desember/ December 6, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,70%	93.300	449	93.266
ORI019	195.800	22 Desember/ December 22, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	6,70%	196.310	364	196.164
ORI019	195.805	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,25%	196.043	170	195.975
ORI019	195.805	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,25%	196.043	170	195.975
ORI019	195.805	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,25%	196.043	170	195.975
ORI019	195.805	27 Desember/ December 27, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,25%	196.043	170	195.975
FR0081	190.293	21 Desember/ December 21, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,50%	190.774	378	190.671
FR0040	210.849	27 Desember/ December 27, 2023	2 Januari/ January 2, 2024	6,20%	211.067	182	211.031
FR0084	198.451	28 Desember/ December 28, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	6,28%	198.727	138	198.589
FR0084	198.451	28 Desember/ December 28, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	6,28%	198.727	138	198.589
FR0084	99.225	28 Desember/ December 28, 2023	5 Januari/ January 5, 2024	6,28%	99.364	69	99.295
FR0081	190.293	21 Desember/ December 21, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,50%	190.774	378	190.671
FR0081	190.293	21 Desember/ December 21, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,50%	190.774	378	190.671
FR0081	190.293	21 Desember/ December 21, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,50%	190.774	378	190.671
FR0081	29.459	14 Desember/ December 14, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,59%	29.567	97	29.556
FR0059	194.070	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	194.553	414	194.484
FR0059	194.070	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	194.553	414	194.484
FR0059	194.070	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	194.553	414	194.484
FR0059	194.070	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	194.553	414	194.484
FR0059	194.070	20 Desember/ December 20, 2023	3 Januari/ January 3, 2024	6,40%	194.553	414	194.484
FR0086	141.433	29 Desember/ December 29, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,20%	141.579	73	141.506
FR0056	153.504	29 Desember/ December 29, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,20%	153.663	79	153.584
FR0056	153.504	29 Desember/ December 29, 2023	4 Januari/ January 4, 2024	6,20%	153.663	79	153.584
Jumlah/Total	7.895.647				7.918.120	19.517	7.915.163

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL
DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**20. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES
SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT
(continued)**

2022							
Jenis surat berharga/ Securities	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal dimulai/ Start date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Nilai beli kembali/ Buy back value	Beban bunga yang belum diamortisasi/	Nilai bersih/ Net value
Sertifikat Bank Indonesia							
FR0081	400.000	15 November/ November 15, 2022	14 Februari/ February 14, 2023	5,73%	394.481	2.723	391.758
FR0070	200.000	29 November/ November 29, 2022	28 Februari/ February 28, 2023	6,23%	202.166	1.998	200.168
FR0081	200.000	19 Desember/ December 19, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	96.086	15	96.070
FR0086	500.000	20 Desember/ December 20, 2022	3 Januari/ January 3, 2023	5,80%	470.847	151	470.696
FR0059	350.000	22 Desember/ December 22, 2022	1 Februari/ February 1, 2023	5,65%	346.111	1.673	344.437
FR0059	200.000	23 Desember/ December 23, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	196.492	32	196.460
FR0086	550.000	23 Desember/ December 23, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,80%	471.288	76	471.212
FR0086	150.000	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	188.488	30	188.458
FR0059	200.000	26 Desember/ December 26, 2022	2 Januari/ January 2, 2023	5,75%	196.435	31	196.404
FR0081	700.000	28 Desember/ December 28, 2022	4 Januari/ January 4, 2023	5,80%	771.068	372	770.696
FR0086	600.000	29 Desember/ December 29, 2022	5 Januari/ January 5, 2023	5,75%	565.348	361	564.987
Jumlah/Total					3.898.809	7.463	3.891.346

21. PINJAMAN YANG DITERIMA

21. BORROWINGS

	2023	2022	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)			Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
Republik Indonesia	490.810	481.532	
PT Sarana Multigriya Financial	66.821	71.867	PT Sarana Multigriya Financial
Lembaga Pengelola Dana Bergulir			Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	39.253	76.698	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (pihak berelasi)	93	1.367	Government of East Java Province (related party)
Jumlah	596.977	631.464	Total
Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.			
All borrowings are from third parties and in Rupiah.			

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2023 dan 2022 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022

and for the years then ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Kementerian PUPR

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Atas kerjasama ini, Bank mengelola penyalurannya menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah. Dengan nomor PKS Syariah yaitu No. 71/PKS/BP-TPR/II/12/2022 dan No. 061/290/DIR/BIS/PKS. Sedangkan nomor PKS konvensional yaitu No. 82/PKS/BP-TPR/II/12/2022 dan No. 061/290/DIR/KKR/PKS. Atas kerjasama tersebut, Bank diwajibkan untuk menyampaikan rekening koran dana kelolaan dan rekening operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Bank telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp197.086 dan Rp194.934.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Sesuai Perjanjian Pinjaman No.26 tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola *executing* dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat yang dimiliki Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari *outstanding* pinjaman.

21. BORROWINGS (continued)

a. Ministry of Public Works and Housing

Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in collaboration with the Bank disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is starting from January 1, 2021 until December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended from December 31, 2023 until December 31, 2023.

For this collaboration, the Bank manages its distribution into two parts, namely conventional and sharia. With the Sharia PKS number, namely No. 71/PKS/BP-TPR/II/12/2022 and No. 061/290/DIR/BIS/PKS. While the conventional PKS number is No. 82/PKS/BP-TPR/II/12/2022 and No. 061/290/DIR/KKR/PKS. For this cooperation, the Bank are required to submit managed fund and operational account statements no later than the 5th and 16th of each month. As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Bank has disbursed FLPP loans amounting to Rp197,086 and Rp194,934.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

According to Credit Agreement No.26 dated September 13, 2019, Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000. to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small and medium bussines is a maximum 7% for annum.

The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

The Bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2023 dan 2022 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022

and for the years then ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) (lanjutan)

Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari *outstanding* pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Desember 2023 dan 2022 bank memiliki sisa pinjaman sebesar Rp38.250 dan Rp76.500. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminkan maka bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

- c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Financial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PKS No. 058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 dan No. 059/059/DIR/BIS/PKS.

Bank harus menyerahkan Laporan Keuangan Audited selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Bank tidak boleh mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

- d. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian awal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 518/2110.1/021/2016 dengan plafond sebesar Rp400.000. Bank bekerja sama dengan jangka waktu dua tahun. Pada tahun 2016, telah dilakukan addendum I terhadap kerja sama ini dengan nomor kerja sama yaitu No. 518/10501.1/021/2016 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Desember 2018. Lalu, pada tahun 2017 dilakukan addendum II atas kerja sama tersebut dengan nomor kerja sama yaitu No. 518/8104-1/021.3/2017 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Juli 2019.

Kerja sama ini ditujukan untuk kerja sama guna penyaluran dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Korporasi.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, bank telah melunasi utangnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini merujuk pada nota bank No. 058/180/KMP/KRP/GRK/SRT dengan jumlah pelunasan Rp331.006. Pelunasan ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019

21. BORROWINGS (continued)

- b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) (continued)

The Bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the outstanding loan which is a fiduciary guarantee. As of December 31, 2023 and 2022 the bank has outstanding loan of Rp38,250 and Rp76,500. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the bank is obliged to replace it with new, performing loans.

- c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Financial is a financing facility with a portion of 25% FLPP mortgages received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to be distributed in the context of housing procurement programs through Prosperous Home Ownership Financing (PPR) for low-income people with a margin rate of 4.45%. The term of the portion financing facility is from April 1, 2020 to December 31, 2020 in accordance with PKS No. 058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 and No. 059/059/DIR/BIS/PKS.

Banks must submit the Audited Financial Statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Bank may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

- d. Government of East Java Province

Based on the initial agreement with the East Java Provincial Government No. 518/2110.1/021/2016 with a ceiling of Rp400,000. The Bank cooperates with a period of two years. In 2016, an addendum I to this cooperation was carried out with the cooperation number No. 518/10501.1/021/2016 stating the extension of cooperation until December 2018. Then, in 2017, addendum II to the cooperation was carried out with the cooperation number No. 518/8104-1/021.3/2017 stating the extension of cooperation until July 2019.

This cooperation is intended for cooperation to distribute revolving funds as additional working capital for small, medium and cooperative businesses with the aim of succeeding the East Java Provincial Government Program in order to increase Productive Economic Business activities of Small and Medium Enterprises and Corporations.:

Based on the agreement, the bank has repaid its debt to the East Java Provincial Government. This refers to bank note No. 058/180/KMP/KRP/GRK/SRT with a repayment amount of Rp331,006. This repayment was made on July 25, 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang pajak atas pajak lainnya masing-masing sebesar Rp777 dan Rp493.
- b. Utang pajak:

	2023	2022
Pajak penghasilan pasal 25	59.450	43.577
Pajak penghasilan pasal 21	48.108	30.453
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 22f)	20.951	5.803
Pajak penghasilan pasal 23/4 (2)	14.321	10.489
Lain-lain	415	461
Total	143.245	90.783

Corporate income tax - article 25
Employees' income tax - article 21
Corporate income tax - article 29 (Note 22f)
Withholding income tax articles 23/4 (2)
Others
Total

- c. Beban pajak penghasilan badan:

	2023	2022
Pajak kini	399.474	412.330
Penyesuaian beban pajak		
Pajak kini tahun 2019	-	(104.878)
Total	399.474	307.452
Pajak tangguhan	3.662	36.036
Penyesuaian beban pajak tangguhan	19.502	-
Koreksi pajak tangguhan		
Pajak tangguhan 2019	-	102.543
Penyesuaian saldo awal aset pajak tangguhan	-	41.194
Total	23.164	179.773
Beban pajak	422.638	487.225

Corporate income tax expense:

Current tax
Adjustment on tax expense
Current tax year 2019
Total

Deferred Tax
Adjustment of deferred tax expense
Deferred Tax Correction
Deferred Tax year 2019
Beginning balance adjustment on deferred tax assets
Total
Income tax expense

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laba sebelum beban pajak	1.884.441	2.030.049
Perbedaan tetap:		
Pajak	857	87.828
Tanggung jawab sosial dan lingkungan, sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	54.818	98.188
Penyisihan kerugian penurunan nilai non kredit	61.282	51.173
Lain-lain	120.376	92.580
	<u>237.332</u>	<u>329.769</u>
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	36.741	(205.927)
Cadangan jasa produksi	367.526	385.706
Cadangan imbalan kerja	(8.342)	31.918
Cadangan lainnya	(29.595)	(5.900)
Sewa	99	(14.689)
Pembayaran jasa produksi	(385.706)	(380.767)
	<u>(19.278)</u>	<u>(189.659)</u>
Total	<u>218.054</u>	<u>140.110</u>
Taksiran laba kena pajak	<u><u>2.102.495</u></u>	<u><u>2.170.159</u></u>

22. TAXATION (continued)

- d. The reconciliation between income before tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

Income before tax expense
Permanent differences:
Taxes
Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others
Non loan provision for impairment losses
Others
Temporary differences:
Provision for impairment losses
Provision for employee bonuses
Provision for employee benefit
Other provision
Lease
Payment for employee bonuses
Total
Estimated taxable income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pajak kini (Pajak dengan tarif efektif atas taksiran laba kena pajak tahun berjalan)	399.474	412.330
	<u>399.474</u>	<u>412.330</u>
 Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan atas pengaruh beda temporer temporer pada tarif pajak maksimum:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(6.981)	39.126
Cadangan jasa produksi	(69.830)	(73.284)
Sewa	(19)	2.791
Cadangan imbalan kerja	1.585	(6.064)
Cadangan lainnya	5.623	1.121
Pembayaran jasa produksi	73.284	72.346
Beban manfaat pajak tangguhan	<u>3.662</u>	<u>36.036</u>
Jumlah pajak penghasilan tahun berjalan	395.812	376.294
 Laba sebelum beban pajak	1.884.441	1.999.662
Taksiran pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	358.043	385.710
Pengaruh pajak atas beda tetap	45.093	62.656
Pajak kini hasil pemeriksaan tahun 2019	-	(104.878)
Pajak penghasilan tahun berjalan	403.136	343.488
 Hasil Pemeriksaan Tahun 2019	-	102.543
Penyesuaian aset pajak tangguhan saldo awal	19.502	41.194
Beban pajak, neto	422.638	487.225

f. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Beban pajak tahun berjalan	399.474	412.330
Dikurangi: Pajak penghasilan badan dibayar dimuka - pajak penghasilan - pasal 25	378.523	406.527
Kurang bayar pajak penghasilan badan (Catatan 22b)	(20.951)	(5.803)

22. TAXATION (continued)

e. The computation of tax expense is as follows:

Current tax (At the effective tax rate on estimated taxable income for the current year)
 Deferred tax expense (benefit) of temporary differences at the maximum tax rate:
Provision for impairment losses
Provision for employee bonuses
Lease
Provision for employee benefit
Others provision
Payment for employee bonuses
Deferred tax benefit
Total corporate income tax current year

Income before tax expense
Estimated income tax at applicable tax rate
Tax effect on permanent differences
Inspection current tax year 2019
Corporate income tax current year
 Inspection result year 2019
Adjustment deferred tax assets beginning balance
Tax expense, net

f. The analysis of corporate income tax payable is as follows:

Current year tax expense
 Less: Prepaid corporate income tax - article 25
Under payment of corporate income tax (Note 22b)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset pajak tangguhan:

	31 Desember/ December 31, 2022	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment	31 Desember/ December 31, 2023	
Cadangan jasa produksi	73.284	-	(3.454)	-	69.830	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian						Provision for losses
aset produktif	340.736	-	6.981	(19.502)	328.215	on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan						Unrealized gain on financial assets measured
yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan						at fair value through
komprehensif lain	26.986	(11.984)	-	-	15.002	other comprehensive income
Cadangan lainnya	13.381	-	(5.623)	-	7.758	Others provision
Sewa	(1.014)	-	19	-	(995)	Lease
Cadangan imbalan kerja	48.865	5.033	(1.585)	-	52.313	or employee benefit
Aset pajak tangguhan	502.238	(6.951)	(3.662)	(19.502)	472.123	Deferred tax assets

	31 Desember/ December 31, 2021	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statement of profit or loss	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment	31 Desember/ December 31, 2022	
Cadangan jasa produksi	72.346	-	938	-	73.284	Provision for employee bonuses
Penyisihan kerugian						Provision for losses
aset produktif	523.599	-	(141.669)	(41.194)	340.736	on earning assets
Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan						Unrealized gain on financial assets measured
yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan						at fair value through
komprehensif lain	(45.400)	76.116	-	(3.730)	26.986	other comprehensive income
Cadangan lainnya	14.502	-	(1.121)	-	13.381	Others provision
Sewa	1.777	-	(2.791)	-	(1.014)	Lease
Cadangan imbalan kerja	60.387	(21.945)	6.064	4.359	48.865	or employee benefit
Aset pajak tangguhan	627.211	54.171	(138.579)	(40.565)	502.238	Deferred tax assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

22. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar (a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan (b) 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

22. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/ or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a tax rate for domestic entities and permanent establishments of 22% which will take effect in the 2022 fiscal year. Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) the total number of paid-up shares is traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate referred to. In this regard, it is regulated by Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Arrangements in the Income Tax Sector which states that the domestic income tax rate and permanent establishment is (a) 22% which applies in the 2020 and 2021 Fiscal Years and (b) 22% which will take effect in the 2022 tax year (in accordance with the provisions of Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**JAWA TIMUR Tbk****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)****31 Desember 2023 dan 2022 dan****untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut****(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH****JAWA TIMUR Tbk****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)****As of December 31, 2023 and 2022****and for the years then ended****(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)****22. PERPAJAKAN (lanjutan)****h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)**

Wajib pajak badan dalam negeri adalah berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud diatas. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (b) masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, (c) ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/II/2024-0195 tanggal 4 Januari 2024 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Lampiran POJK Nomor 10/POJK.04/2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2023, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah dipenuhi..

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Desember 2023 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

22. TAXATION (continued)**h. Changes in tax rate (continued)**

Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at a minimum of 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate stipulated as referred to above. The specific requirements referred to are (a) shares must be owned by at least 300 parties, (b) each party can only own shares of less than 5% of the total issued and fully paid shares, (c) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Based on Letter No.DE/II/2024-0195 dated January 4, 2024 regarding the monthly report of shares ownerships, form of Attachment to POJK Number 10/POJK.04/2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2023, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by Bank.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of December 31, 2023 has been calculated using a tax rate of 19%.

23. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2023
Cadangan jasa produksi	367.526
Bunga	137.222
Jumlah	504.748

23. ACCRUED EXPENSES

	2022
Employee bonuses	385.706
Interest	135.134
Total	520.840

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS LAIN-LAIN

24. OTHER LIABILITIES

	2023		2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	
Rupiah					Rupiah
Cadangan imbalan kerja		275.328		257.184	Provision of employee benefit
Setoran jaminan		119.135		132.236	Security deposits
Liabilitas sewa		29.538		23.322	Lease liabilities
Pokok kredit penerusan yang diterima		8.303		7.683	Principal - channeling loans received
Bunga kredit penerusan yang diterima		3.582		3.592	Interest - channeling loans received
Provisi dan administrasi kredit		15		-	Provision and credit administration
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		3.450		3.020	Estimated losses on commitments and contingencies
Lainnya		2.173		1.390	Others
		<u>441.524</u>		<u>428.427</u>	
Mata uang asing					Foreign currencies
Lainnya					Other
Dolar Amerika Serikat	17.813.275	274.271	2.526.096	39.325	United States Dollar
Dolar Singapore	557.049	62.209	305.187	3.538	Singapore Dollar
Dolar Hong Kong	-	-	10.017	20	Hong Kong Dollar
Yuan China	603.687	1.310			Chinese Yuan
Euro	-	-	44.869	744	Euro
		<u>337.790</u>		<u>43.627</u>	
Jumlah		<u><u>779.314</u></u>		<u><u>472.054</u></u>	Total

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	3.020	117	Balance at beginning of year
Pemulihan tahun berjalan	430	2.903	Recovery during the year
Saldo akhir tahun	<u><u>3.450</u></u>	<u><u>3.020</u></u>	Balance at end of year

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. DANA SYIRKAH TEMPORER

- a. Giro *Mudharabah*
1) Berdasarkan jenis produk

	2023	2022
Bukan Bank		
Giro iB Hasanah (Mudharabah)	1.786	1.637
	1.786	1.637
Bank		
Giro iB Hasanah (Mudharabah)	-	-
Jumlah	1.786	1.637

- 2) Berdasarkan hubungan

	2023	2022
Bukan Bank		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	1.786	1.637
	1.786	1.637
Bank		
Pihak ketiga	-	-
Total	1.786	1.637

- 3) *Nisbah* dan tingkat bagi hasil
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata giro *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit sharing rate	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit sharing rate
Giro Mudharabah	5,00%	0,51%	5,00%	0,47%

- b. Tabungan Mudharabah
1) Berdasarkan jenis produk

	2023	2022
Bukan Bank		
Tabungan iB Hasanah (Mudharabah)	718.471	594.597
	718.471	594.597
Bank		
Tabungan iB Hasanah (Mudharabah)	15.722	19.285
Jumlah	734.193	613.882

25. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

- a. *Mudharabah Current Accounts*
1) *By product*

Non-Bank
iB Hasanah (Mudharabah)
current accounts

Bank
iB Hasanah (Mudharabah)
current accounts

Total

- 2) *By relationship*

Non-Bank
Related parties
Third parties

Bank
Third parties

Total

- 3) *Ratio and profit sharing rate*
The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Mudharabah current accounts

- b. *Mudharabah Savings Deposits*
1) *By product*

Non-Bank
iB Hasanah (Mudharabah)
savings deposits

Bank
iB Hasanah (Mudharabah)
savings deposits

Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

- b. Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)
2) Berdasarkan jenis produk

	2023	2022
Bukan Bank		
Pihak berelasi	1.485	972
Pihak ketiga	716.986	593.625
	718.471	594.597
Bank		
Pihak ketiga	15.722	19.285
Jumlah	734.193	613.882

Non-Bank
Related parties
Third parties

Bank
Third parties

Total

- 3) *Nisbah* dan tingkat bagi hasil
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata tabungan *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit
Tabungan Barokah Sejahtera	4,00%	0,41%	4,00%	0,38%
Tabungan Pensiun IB Barokah	15,00%	1,52%	15,00%	1,42%
Tabungan Rencana IB Barokah	25,00%	2,54%	25,00%	2,37%
Tabungan Haji Amanah	10,00%	1,02%	10,00%	0,95%
Tabungan Mudh Bank Lain	8,00%	0,81%	8,00%	0,76%
Tabungan Barokah	12,50%	1,27%	12,50%	1,19%

Barokah Sejahtera savings deposits
Pensiun IB Barokah saving deposits
Rencana IB Barokah savings deposits
Haji Amanah savings deposits
Mudh Other Bank savings deposits
Barokah savings deposits

- c. Deposito *Mudharabah*
1) Berdasarkan hubungan

	2023	2022
Bukan Bank		
Pihak berelasi	2.279	1.330
Pihak ketiga	1.624.519	1.244.128
	1.626.798	1.245.458
Bank		
Pihak ketiga	3.700	9.000
Jumlah	1.630.498	1.254.458

Non-Bank
Related parties
Third parties

Bank
Third parties

Total

- 2) Berdasarkan jangka waktu kontrak

	2023	2022
Bukan Bank		
<1 bulan	-	1.057.791
1 - <3 bulan	1.433.382	75.331
3 - <6 bulan	55.712	18.479
6 - 12 bulan	137.704	93.857
	1.626.798	1.245.458
Bank		
<1 bulan	-	6.500
1 - <3 bulan	3.700	2.500
Jumlah	1.630.498	1.254.458

Non-Bank
<1 month
1 - <3 months
3 - <6 months
6 - 12 months

Bank
<1 month
1 - <3 months

Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

- c. Deposito *Mudharabah* (lanjutan)
- 3) Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	2023	2022
Bukan Bank		
<1 bulan	1.453.147	1.087.576
1 - <3 bulan	60.815	59.380
3 - <6 bulan	28.070	29.431
6 - 12 bulan	84.766	69.071
	<u>1.626.798</u>	<u>1.245.458</u>
Bank		
<1 bulan	2.500	6.500
1 - <3 bulan	1.200	2.500
Jumlah	<u>1.630.498</u>	<u>1.254.458</u>

- 4) *Nisbah* dan tingkat bagi hasil
Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata
deposito *mudharabah* untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
adalah sebagai berikut:

	2023	
	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit
1 bulan	36,00%	3,66%
3 bulan	38,00%	3,86%
6 bulan	41,00%	4,16%
12 bulan	42,50%	4,32%

25. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

- c. *Mudharabah* Time Deposits (continued)
- 3) By remaining period to maturity

	Non-Bank
<1 month	
1 - <3 months	
3 - <6 months	
6 - 12 months	
Bank	
<1 month	
1 - <3 months	
Total	

- 4) *Ratio and profit sharing rate*
The average rate of ratio and profit sharing for
mudharabah time deposits for the year ended
December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	
	Nisbah/Ratio	Tingkat bagi hasil/Profit
1 month	36,00%	3,42%
3 months	38,00%	3,61%
6 months	41,00%	3,89%
12 months	42,50%	4,03%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

26. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Number of shares	Rupiah/ Rupiah	
Saham Seri A	24.000.000.000	6.000.000	Series A Shares
Saham Seri B	12.000.000.000	3.000.000	Series B Shares
Jumlah	36.000.000.000	9.000.000	Total

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.

26. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No. 56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend the Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

a. Modal dasar

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

- b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut (Rupiah penuh):

Pemecahan nilai nominal dari
Rp1.000.000 per saham menjadi
Rp250 per saham

Konversi cadangan umum

Jumlah saham pada akhir tahun

6.694.148.000

5.239.999.982

11.934.147.982

- c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).

26. SHARE CAPITAL (continued)

a. Authorized capital

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- Based on minutes of Extraordinary Meeting Shareholders' No. 19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No. 19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares hold by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to each shareholders.

- On July 12, 2012 Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No.29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.

- b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of December 31, 2023 and December 31, 2022, are as follows (full Rupiah):

Stock split from Rp1,000,000
per share to be

Rp250 per saham

General reserve conversion

Shares at year end

- c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of December 31, 2023 and 2022 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

d. Susunan pemegang saham

26. SHARE CAPITAL (continued)

d. Composition of shareholders

	2023			
Pemegang saham	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	Shareholders
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioner:
- Suprajarto	191.000	0,00%	48	Suprajarto -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	2.958.900	0,02%	740	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	1.067.400	0,01%	267	Tonny Prasetyo -
- Edi Masrianto	327.600	0,00%	82	Edi Masrianto -
- R Arief Wicaksono	728.200	0,00%	182	R Arief Wicaksono -
- Zulhelfi Abidin	24.200	0,00%	6	Zulhelfi Abidin -
- Eko Susetyono	124.100	0,00%	31	Eko Susetyono -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.075.928.700	20,49%	768.982	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

d. Susunan pemegang saham (lanjutan)

Pemegang saham	2022			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital	
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioner:
- Heru Tjahjono	274.200	0,00%	69	Heru Tjahjono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	1.946.500	0,01%	487	Busrul Iman -
- Tonny Prasetyo	628.500	0,00%	157	Tonny Prasetyo -
- R Arief Wicaksono	126.300	0,00%	32	Ferdian Timur Satyagraha -
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5%)	3.078.374.600	20,50%	769.594	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam akta No. 51 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. dan akta No. 01 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun/ Net income year 2022
Dividen tunai	797.173
Cadangan umum	745.651

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

26. SHARE CAPITAL (continued)

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial deeds No.51 dated March 17, 2022 of Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. And No.01 dated May 03, 2021 of Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. the shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2021 and 2020 as follows:

	Laba tahun/ Net income year 2021	
	782.457	Cash dividends
	740.613	General reserve

Bank established the general reserve to strengthen capital.

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

	2023
Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369
Opsi saham untuk program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)	23.365
Jumlah	532.734

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037
Biaya emisi saham	(27.668)
Agio saham dari IPO	509.369

27. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET

Details of other paid in capital as of December 31, 2023 and December 31, 2022 as follows:

	2022	
	509.369	Share premium from Initial Public Offering (IPO)
	23.365	Stock option for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program
	532.734	Total

On July 12, 2012, the Bank has made it first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

		Share premium Rp180 (full Rupiah) per share
		Share issuance cost
		Share premium from IPO

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**JAWA TIMUR Tbk****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)****31 Desember 2023 dan 2022 dan****untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut****(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH****JAWA TIMUR Tbk****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)****As of December 31, 2023 and 2022****and for the years then ended****(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)****27. TAMBAHAN MODAL DISETOR – NETO (lanjutan)**

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I	
Rp200 (Rupiah penuh) per saham	6.355
Tereksekusi 31.774.500 lembar	
Agio saham Program MESOP Tahap II	
Rp159 (Rupiah penuh) per saham	5.052
Tereksekusi 31.774.500 lembar	
Agio saham Program MESOP Tahap III	
Rp349 (Rupiah penuh) per saham	11.958
Tereksekusi 34.264.100 lembar	
Agio saham dari Program MESOP	23.365

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

27. OTHER PAID-IN CAPITAL – NET (continued)

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Share Agio MESOP Program Phase I	
Rp200 (Rupiah) per share	
executed 31,774,500 shares.	
Share Agio MESOP Program Phase II	
Rp159 (Rupiah) per share	
executed 31,774,500 shares	
Share Agio MESOP Program Phase III	
Rp349 (Rupiah) per share	
executed 34,264,100 shares	
Share Agio MESOP Program	

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018- March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34.264.100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PENERUSAN KREDIT

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Bank Indonesia

Pada tanggal 26 November 1998, 21 November 1999 dan 11 Agustus 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia, masing-masing dalam bentuk "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) dan "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan amandemen perjanjian No.518/6533/021/2016 dan No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 18 April 2016, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu pinjaman.

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bank sebagai penyalur dana bergulir yang bersumber dari dana APBN mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil, melalui:

- Penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sektor agrobisnis untuk mensukseskan program Pemerintah yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha agrobisnis anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan perjanjian tanggal 19 Januari 2004 dengan jangka waktu 25 tahun.

28. CHANNELING LOANS

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. Bank Indonesia

On November 26, 1998, November 21, 1999 and August 11, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with Bank Indonesia to distribute liquidity credits on behalf of Bank Indonesia in the form of "Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan" (KUAUBP), "Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro" (KPKM) and "Kredit Usaha Tani" (KUT).

b. Government of East Java Province

Based on an amendment agreement No.518/6533/021/2016 and No.054/088/IV/2016/PKS/DIR/KRD.AGR.RTL, dated April 18, 2016, the Bank entered into a 5 (five) years cooperation agreement with the Government of East Java Province to distribute revolving funds for additional working capital for Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives in order to assist the Government of East Java Province's program involving the improvement of Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives and currently in processing for loan period extension.

c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises

Bank as a channeling of revolving funds sourced from APBN funds with Cooperation Agreement with Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises for Small and Micro Entrepreneur Development Program, through:

- Strengthening the capital of cooperatives in the agribusiness sector in order to successfully implement the improvement programs for the members of cooperatives and society based on agreement dated January 19, 2004 for a period of 25 years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (lanjutan)
- Program Penyediaan Modal dan Padanan (MAP) Awal bagi usaha kecil, menengah dan koperasi melalui KSP/USP koperasi dengan tujuan mengembangkan usaha UKM pada sentra yang belum tersedia pembiayaan secara memadai berdasarkan perjanjian tanggal 8 November 2003 dan perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Pada tanggal 4 Agustus 1993, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk meneruskan pinjaman Pemerintah dari *Islamic Development Bank* (IDB) dalam rangka membiayai proyek Rumah Sakit Islam Surabaya.
- e. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
- Pada tanggal 19 Juli 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan para pihak, yaitu:
- 1) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Pertanian dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha agribisnis dengan Kredit Taskin Agribisnis.
 - 2) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan Kredit Taskin UKMK.
 - 3) Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Yayasan Damandiri) - untuk menyelenggarakan kredit pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

28. CHANNELING LOANS (continued)

- c. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Scale Enterprises (continued)
- Initial capital and matching fund program for small and medium enterprise and cooperative through KSP/USP cooperative with the goal of developing UKM in the area that have not been adequately provided financing under the agreement dated November 8, 2003 and its expiration based on agreement of both parties.
- d. Finance Ministry of the Republic of Indonesia
- On August 4, 1993, the Bank entered into a cooperation agreement with the Finance Department of the Republic of Indonesia. Under this agreement, the Bank will distribute Government loans from the Islamic Development Bank (IDB) to finance the development of the Surabaya Islamic Hospital.
- e. Dana Sejahtera Mandiri Foundation
- On July 19, 1999, the Bank entered into cooperation agreements with the following parties:
- 1) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Agriculture Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through agribusiness development involving loans in the form of Kredit Taskin Agribisnis.
 - 2) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Cooperatives Department and Small and Medium Scale Enterprises Division and the Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through Small and Medium Scale Enterprises and Cooperatives (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi-UKMK) involving loans in the form of Kredit Taskin UKMK.
 - 3) The Coordinating Minister for People's Welfare and Poverty Eradication Division, the Industrial and Trading Department and Dana Sejahtera Mandiri Foundation (Yayasan Damandiri) - to manage loans for poverty eradication through small scale industry and home industry development involving loans in the form of Kredit Taskin Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Taskin Inkra).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 5 tahun dengan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur untuk menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran kredit dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan dan pengawasan, pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi. Berdasarkan amandemen perjanjian tanggal 6 Desember 2013, perjanjian jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2016. Pada tanggal 10 Agustus 2016, telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian No.518/15709/108.5/2016 dan No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

Pada tanggal 18 Oktober 2019 telah dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian No.518/19535/115.5/2019 dan 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 1999, Bank mengadakan kerjasama dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Hutan Rakyat yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Hutan Rakyat.

- h. Yayasan Abadi Karya Bhakti

Pada tanggal 9 Januari 1999, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Abadi Karya Bhakti dan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Taskin serta Departemen Pertanian untuk menyelenggarakan Kredit Taskin Agribisnis. Jangka waktu kerjasama terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani sampai dengan seluruh kredit yang disalurkan dilunasi.

28. CHANNELING LOANS (continued)

- f. Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province

Bank entered into a cooperation agreement for a period of 5 years with the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Department of East Java Province to distribute revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - APBD) of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province's programs for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds (dana bergulir) by cooperatives (Koperasi). Based on the amendment agreement on December 6, 2013, the agreement was matured on December 16, 2016. On August 10, 2016, the agreement has been extended for a period of 3 (three) years based on agreement No.518/15709/108.5/2016 and No.054/210/SP/DIR/KRD.AGR.RTL.

On October 18, 2019, the agreement has been extended for a period of 5 (five) years based on agreement No.518/19535/115.5/2019 and 058/245/PKS/DIR/KMRP.

- g. Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia

On July 23, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia for distribution of loans for the purpose of the People's Forestry Business Development activities.

- h. Abadi Karya Bhakti Foundation

On January 9, 1999, the Bank entered into a cooperation agreement with the Abadi Karya Bhakti Foundation and the Coordinating State Minister of People's Welfare and Poverty Eradication Division and the Agriculture Department to manage loans involving Kredit Taskin Agribisnis for the period from the signing of the agreement until repayment of all loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

i. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian No. 900/8176/122.5/2020 dan No.059/161/SP/DIR/KMRP tanggal 21 September 2020, Bank mengadakan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi penyaluran pinjaman dan penggunaan dana, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengembalian serta pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi Unit Desa (KUD) untuk Koperasi Persusuan dalam rangka pengadaan peralatan peternakan guna perbaikan kualitas susu sapi perah rakyat. Dalam perjanjian tersebut, Bank sebagai penyalur dana bergulir modal pengadaan peralatan peternakan untuk perbaikan kualitas susu bagi KUD untuk Koperasi Persusuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sub sektor peternakan.

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Bank Indonesia	402.524	402.524
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	122.698	129.443
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	54.451	55.301
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	12.826	13.031
Departemen Keuangan Republik Indonesia	8.512	8.606
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.038	6.038
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	2.098	2.108
Jumlah	640.415	648.319

28. CHANNELING LOANS (continued)

i. Livestock Division of East Java Province (Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur)

Based on an agreement No.900/8176/122.5/2020 and No.059/161/SP/DIR/KMRP dated September 21, 2020, the Bank entered into a cooperation agreement for a period of 3 (three) years with the Livestock Division of East Java Province in order to provide assistance to the Government of East Java Province in its program for loan distribution and utilization, directing, monitoring, supervising and repayment and utilization of revolving funds by Village Union - KUD for Milk Union in connection with the procurement of equipment to improve the quality of milk produced by farmers. In accordance with this agreement, the Bank acts as agent for revolving funds from the Regional Income and Expenditures Budget of the East Java Province Livestock Sector Division.

The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

Bank Indonesia
Government of East Java Province
The Ministry of Cooperatives
Small and Medium Scale Enterprises
Dana Sejahtera Mandiri Foundation
Forestry and Plantation Department of the Republic of Indonesia
Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises
Department of Finance of the Republic of Indonesia
Abadi Karya Bhakti Foundation
Livestock Division of East Java Province
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PENERUSAN KREDIT (lanjutan)

Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	524.334	526.533
Pertanian, perburuan dan kehutanan	42.669	44.020
Perdagangan besar dan eceran	35.283	36.861
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8.573	8.701
Penyediaan akomodasi makan dan minum	8.483	9.198
Industri pengolahan	5.965	6.679
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.896	5.941
Perikanan	5.404	6.367
Perantara keuangan	3.196	3.308
Jasa perorangan melayani rumah tangga	321	415
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	205	210
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51
Konstruksi	27	27
Pertambangan dan penggalian	8	8
Jumlah	640.415	648.319

28. CHANNELING LOANS (continued)

The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

Social culture and community services
Agriculture, hunting and forestry
Wholesale and retail
Health service and social activities
Provision of food and drink accommodation
Processing industry
Undefined activities
Fishery
Financial intermediary
Individual service which serve households
Transportation, trading and communication
Real estate, rental and business services
Construction
Mining and quarrying
Total

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities involving commitments and contingencies as follows:

	2023	2022
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
Rupiah:		
Pembelian spot & derivatif	-	156.070
Lainnya	874.645	909.159
	874.645	1.065.229
Liabilitas komitmen		
Rupiah		
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	3.770.265	3.399.512
Total liabilitas komitmen, neto	2.895.620	2.334.283
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
Rupiah:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	82.966	119.108
Lainnya	13	13
	82.979	119.121
Liabilitas kontinjensi		
Rupiah:		
Bank garansi yang diberikan	653.383	973.063
Mata uang asing:		
Bank garansi yang diberikan	46.191	46.703
	699.574	1.019.766
Total liabilitas kontinjensi, neto	616.595	900.645
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi, neto	3.512.215	3.234.928

COMMITMENTS
Commitment receivables
Rupiah:
Purchase of spot and derivative
Others
Commitment liability
Rupiah:
Unused loan commitments granted to debtors
Total commitment liabilities, net
CONTINGENCIES
Contingent receivables
Rupiah:
Interest income on past due accounts
Others
Contingent liabilities
Rupiah
Bank guarantees issued
Foreign currencies:
Bank guarantees issued
Total contingent liabilities, net
Total commitment and contingent liabilities, net

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	2023	2022
Pihak berelasi (Catatan 39)		
Kredit yang diberikan	13.961	7.926
Margin dan pendapatan bagi hasil	7	126
Pihak ketiga		
Kredit yang diberikan	4.837.915	4.261.412
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.806.519	932.818
Surat berharga		
Biaya perolehan diamortisasi	423.992	1.392.992
Margin dan pendapatan bagi hasil	157.455	135.829
Provisi	90.157	110.971
Sertifikat Bank Indonesia	23.226	17.442
Lainnya	4.052	23.135
Jumlah	7.357.284	6.882.651

30. INTEREST AND SHARIA INCOME

Related parties (Note 39)
Loans
Margin and profit-sharing revenue
Third parties
Loans
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Amortised cost
Margin and profit-sharing revenue
Provision
Certificates of Bank Indonesia
Others
Total

31. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	2023	2022
Deposito berjangka	1.669.282	1.432.248
Tabungan	280.153	264.782
Giro	200.924	221.779
Repo	117.839	30.291
Simpanan dari bank lain	38.680	4.589
Pinjaman yang diterima	8.543	10.357
Beban bunga kredit	763	1.549
Jumlah	2.316.184	1.965.595

31. INTEREST AND SHARIA EXPENSE

Time deposits
Savings accounts
Current accounts
Premium on marketable securities
Deposits from other banks
Borrowings
Loan interest expense
Total

Beban bunga kepada pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 40).

Interest expense involving related parties is disclosed in (Note 40).

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2023	2022
Administrasi giro, tabungan dan deposito	193.996	184.480
Penerimaan kembali kredit hapus buku	127.264	56.653
Administrasi kredit	30.880	42.511
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	22.093	11.105
Lainnya	274.187	238.820
Jumlah	648.420	533.569

32. OTHER OPERATING INCOME

Current accounts, savings and deposits administration fees
Collection of loans written-off
Loan administration fees
Fees and commissions from other than loans
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
ATAS ASET KEUANGAN**

	2023	2022
Kredit yang diberikan		
Modal kerja	349.480	267.675
Konsumsi	144.776	52.364
Investasi	181.587	67.715
	675.843	387.754
Aset keuangan lainnya		
Penempatan pada Bank Indonesia		
dan bank lain	1.872	1.391
Giro pada bank lain	636	203
Surat berharga	111	(5.544)
Estimasi kerugian komitmen		
dan kontinjensi	430	2.903
Aset lain-lain	15.244	17.952
Jumlah	694.136	404.659

**33. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON
FINANCIAL ASSETS**

Loans
Working capital
Consumption
Investment
Other financial assets
Placement with Bank Indonesia
and other banks
Current accounts with other banks
Marketable securities
Estimated losses on commitments
and contingencies
Other assets
Total

**34. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN
KARYAWAN**

	2023	2022
Gaji pegawai	547.842	496.631
Bonus pegawai	367.526	385.706
Tambahan penghasilan pegawai	234.683	220.933
Sewa tenaga kerja	132.028	139.896
Asuransi dan iuran dana pensiun	130.390	143.663
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	127.005	85.344
Pendidikan dan latihan	94.913	76.883
Imbalan kerja	38.721	55.532
Pengobatan	35.560	26.241
Gaji Direksi	13.556	8.894
Honorarium Dewan Komisaris	9.218	6.098
Rekreasi dan olahraga	8.303	5.808
Tambahan penghasilan Direksi	3.877	4.171
Perumahan Direksi	2.220	1.976
Tambahan penghasilan Komisaris	1.146	2.217
Lainnya	15.655	14.705
Jumlah	1.762.643	1.674.698

**34. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS
EXPENSES**

Employee salaries
Employee bonuses
Additional income for employees
Outsourcing
Insurance and pension fund contributions
Tax allowances - employees' salaries
Education and training
Employee benefit
Medical
Directors' salaries
Commissioners' honoraria
Recreation and sport
Additional compensation for Directors
Housing for Directors
Additional compensation for Commissioners
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2023	2022
Premi asuransi pertanggungan lainnya	207.924	220.083
Amortisasi beban ditangguhkan	180.989	239.247
Jasa otomasi	157.885	142.764
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	150.752	164.880
Sewa	81.652	77.950
Promosi	75.260	49.292
Perjalanan dinas	57.632	62.796
Pemeliharaan	55.911	56.922
Alat tulis dan barang cetak	54.360	48.889
Listrik, air dan telekomunikasi	37.932	35.337
Sumbangan	25.828	31.568
Pajak lainnya	22.101	18.126
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	19.498	20.273
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	17.663	20.135
Keamanan	8.538	9.610
Surat Dinas	4.464	3.599
Penagihan	1.281	1.329
Pajak Reklame	1.251	1.531
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.168	1.169
Pajak kendaraan bermotor	679	656
Koran dan Majalah	387	430
Bursa Efek	278	275
Pajak Penghasilan	15	112
Lainnya	19.539	22.415
Jumlah	1.182.987	1.229.388

Other insurance premiums
Amortization of deferred charges
Automation services
Depreciation of fixed assets (Note 15)
Rental
Promotion
Official/business travel
Maintenance
Stationery and printed materials
Electrical, water and telecommunications
Donations
Other taxes
Supervision, audit and professional services
Social and environment responsibility
Security
Mail Service
Collection
Advertising tax
Land and building tax fees (PBB)
Motor Vehicle Tax
Newspaper and Magazine
Stock Exchange
Income Tax
Others
Total

36. BEBAN LAINNYA

	2023	2022
Tanda mata, hadiah dan umum	97.460	86.316
Kliring dan transfer	53.656	59.476
Rapat dan jamuan tamu	24.394	15.423
Penelitian dan pengembangan	7.901	9.833
Kegiatan keagamaan	3.904	3.009
Provisi, komisi dan fee	32	10
Lainnya	7.366	26.987
Jumlah	194.713	201.054

36. OTHER EXPENSES

Souvenirs, gifts and general
Clearing and transfers
Meetings and entertainment
Research and development
Religious activities
Provision, commission and fee
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	2023
Fee jasa pelayanan pajak	6.444
Keuntungan atas penjualan aset tetap	5.608
Keuntungan selisih kurs	2.390
Keuntungan penjualan efek-efek neto	8.698
Lainnya	33.901
	57.041

37. NON OPERATING INCOME

	2022	
	6.084	Tax service fees
	5.274	Gain on sale of fixed asset - net
	-	Gain on foreign exchange
	2.757	Gain on sale of securities - net
	158.513	Others
	172.628	

38. BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo beban non operasional lainnya masing-masing sebesar Rp19.339 dan Rp83.405.

38. NON OPERATING EXPENSE

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of non operating expense amounted Rp19,339 and Rp83,405, respectively

39. LABA PER SAHAM DASAR

	2023
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	1.470.105
Rata-rata tertimbang jumlah saham	15.015.498.082
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	97,91

39. BASIC EARNINGS PER SHARE

	2022	
	1.542.824	Income for computation of basic earnings per share
	15.015.498.082	Weighted average number of shares
	102,75	Basic earnings per share (in full Rupiah)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Surabaya	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Jember	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Tuban	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Situbondo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Kediri	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lumajang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sampang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Malang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Gresik	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Mojokerto	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pacitan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Batu	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Ngawi	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Jombang	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Madiun	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Blitar	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Magetan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Probolinggo	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Blitar	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Madiun	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kota Kediri	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Sumenep	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemegang saham/Shareholder
Pemerintah Kabupaten Malang	Pemegang saham/Shareholder
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/Key management personnel Pengurus/Management
RKUD Kabupaten Lamongan	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder
Pemda Kabupaten Lamongan	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Penempatan dana/Fund placement	Government of East Java Province
Penempatan dana/Fund placement	Government of Surabaya City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Jember Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Banyuwangi Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Bondowoso Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Sidoarjo Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Tuban Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Situbondo Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Lumajang Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Lamongan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Nganjuk Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Sampang Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Malang City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Pasuruan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Bangkalan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Gresik Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Mojokerto City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Pacitan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Batu City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Ngawi Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Jombang Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Pamekasan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Tulungagung Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Ponorogo Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Trenggalek Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Magetan Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Bojonegoro Regency
Penempatan dana/Fund placement	Government of Probolinggo City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Blitar City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Madiun City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Kediri City
Penempatan dana/Fund placement	Government of Sumenep Regency
Kredit yang diberikan/Loans	Government of Bojonegoro Regency
Kredit yang diberikan/Loans	Government of Lamongan Regency
Kredit yang diberikan/Loans	Government of Malang Regency

Kredit yang diberikan/Loans
Penempatan dana/Fund placement

PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur

Simpanan nasabah/Deposits from customers
Beban tenaga kerja/Personnel expenses

Board of Commissioners.
Board of Directors
and executive officers

Kredit yang diberikan/Loans
Penempatan dana/Fund placement

RKUD Kabupaten Lamongan

Kredit yang diberikan/Loans
Penempatan dana/Fund placement

Pemda Kabupaten Lamongan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
ASET		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 11)		
Pinjaman manajemen kunci	100.611	104.192
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	-	24.851
RKUD Kabupaten Lamongan	30.914	-
Pemda Kabupaten Lamongan	46.220	-
Lain-lain	7.103	5.828
Jumlah	184.848	134.871
Persentase terhadap jumlah aset	0,18%	0,13%
LIABILITAS		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18)	12.644.538	15.295.405
Persentase terhadap jumlah liabilitas	14,15%	17,05%
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)		
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	12.648.302	141.996
Jumlah	12.648.302	141.996
Persentase terhadap jumlah liabilitas	14,16%	0,16%
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pendapatan bunga (Catatan 30)	13.968	8.052
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,19%	0,12%
Beban bunga dan syariah (Catatan 31)	459.124	471.882
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	19,82%	24,01%

Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

ASSETS
Loans and sharia financing (Note 11)
Loans to key managements
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
RKUD Kabupaten Lamongan
Pemda Kabupaten Lamongan
Others
Total
Percentage to total assets
LIABILITIES
Deposits from customers (Note 18)
Percentage to total liabilities
Deposits from other banks (Note 19)
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Total
Percentage to total liabilities
PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Interest income (Note 30)
Percentage to total interest and sharia income
Interest and sharia expenses (Note 31)
Percentage to total interest and sharia expenses

Commitments and contingencies

There were no commitments and contingencies involving related parties as of December 31, 2023 and 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi manajemen kunci

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Bank (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

	2023
Gaji	17.656
Jasa produksi	12.009
Tunjangan	7.458
Jumlah	37.123

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp15.130 dan Rp12.990 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp33.962 dan Rp39.310.

40. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Compensation of key management personnel

The compensation of key management personnel of the Bank (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	2022	
	22.995	Salary
	12.053	Production bonus
	10.520	Allowance
Total	45.569	Total

Total remuneration paid and payable for the years ended December 31, 2023 and 2022 to the Board of Commissioners were Rp15,130 and Rp12,990, respectively, and to the Board of Directors were Rp33,962 and Rp39,310 respectively.

41. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

41. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below:

	2023				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen	8.655.645	203.424	1.501.785	7.357.284	Segment income
Beban segmen	(3.754.671)	(63.298)	(1.501.785)	(2.316.184)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4.900.974	140.126	-	5.041.100	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	621.079	27.341	-	648.420	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(664.369)	(29.767)	-	(694.136)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(3.036.456)	(103.887)	-	(3.140.343)	Other operating expenses
Laba operasional	1.821.228	33.813	-	1.855.041	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	37.270	432	-	37.702	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(422.638)	-	-	(422.638)	Tax expense - net
Laba (rugi) periode berjalan	1.435.860	34.245	-	1.470.105	Profit (loss) for the period
Jumlah aset	100.761.038	3.620.590	(526.855)	103.854.773	Total assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini (lanjutan):

	2022				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen	8.361.576	175.839	1.654.764	6.882.651	Segment income
Beban segmen	(3.565.277)	(55.082)	(1.654.764)	(1.965.595)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	4.796.299	120.757	-	4.917.056	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	512.531	21.038	-	533.569	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(381.864)	(22.795)	-	(404.659)	Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
Beban operasional lainnya	(3.024.930)	(80.210)	-	(3.105.140)	Other operating expenses
Laba operasional	1.902.036	38.790	-	1.940.826	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	87.343	1.880	-	89.223	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak - neto	(487.225)	-	-	(487.225)	Tax expense - net
Laba (rugi) periode berjalan	1.502.154	40.670	-	1.542.824	Profit (loss) for the period
Jumlah aset	100.470.606	3.071.458	(510.697)	103.031.367	Total assets

42. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Bank selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

41. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the operating segment information of the Bank is set out in the table below (continued):

42. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Implementation of Bank risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Bank continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

43. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework

The Bank's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Bank. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Bank. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Bank melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Bank terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analisis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Bank telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

43. CREDIT RISK (continued)

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Bank. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Bank separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Bank has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Bank continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Bank identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank has to pay if the obligations under the bank guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian master netting adalah sebagai berikut:

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

43. CREDIT RISK (continued)

b. Credit concentration risk

As of December 31, 2023 and 2022, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

Concentration of credit risk by geography

2023							
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Posisi keuangan						Financial position	
Giro pada Bank Indonesia	-	7.971.412	-	-	-	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	490.253	-	-	-	490.253	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	842.093	2.281.988	1.000.000	290.000	815.614	5.229.695	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	8.560.761	-	-	-	8.560.761	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	7.762.560	-	-	-	7.762.560	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	8.303.663	-	-	-	8.303.663	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	6.247.318	-	-	-	6.247.318	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138	Other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	11.440.125	2.842.481	604.895	-	2.973	14.890.474	Working capital
Investasi	4.236.832	2.670.923	282.259	472.895	-	7.662.909	Investment
Konsumsi	30.059.320	734.680	48.538	-	77	30.842.615	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	665.717	16.610	2.458	730	219	685.734	Interest receivables
Jumlah	47.467.225	47.882.649	1.938.150	763.625	818.883	98.870.532	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	2.875.686	872.815	6.195	15.569	-	3.770.265	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	699.574	-	-	-	-	699.574	Bank guarantees issued
Jumlah	3.575.260	872.815	6.195	15.569	-	4.469.839	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis (lanjutan)

	2022				
	Jawa Timur/ East Java	Jawa selain Jawa Timur/ Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Lain-lain/ Others
Posisi keuangan					
Giro pada Bank Indonesia	-	10.786.740	-	-	-
Giro pada bank lain	-	302.688	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.152.000	2.702.379	538.000	449.000	2.071.796
Tagihan spot dan derivatif	361	-	-	-	-
Surat berharga					
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.740.662	-	-	-
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	8.476.609	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	4.095.066	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	7.822.847	-	-	-
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Modal kerja	8.483.137	1.014.245	677.316	-	-
Investasi	3.359.791	2.161.406	370.368	479.607	-
Konsumsi	28.151.362	143.306	37.289	70	148
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	629.389	13.694	2.288	752	2
Jumlah	42.062.187	52.259.642	1.625.261	929.429	2.071.946
Rekening administratif					
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan Bank garansi yang diterbitkan	2.412.262	971.071	610	15.569	-
	1.019.766	-	-	-	-
Jumlah	3.432.028	971.071	610	15.569	-

43. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by geography (continued)

Financial position

Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Spot and derivative receivables
Marketable securities
Amortized cost
Fair value through other comprehensive income
Marketable securities sold under repurchased agreement
Marketable securities purchased under resale agreement
Other receivables

Loans and sharia financing
Working capital
Investment
Consumption

Interest receivables

Total

Administrative accounts

Unused loans
commitments granted to customers
Bank guarantees issued

Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

	2023					
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Banks	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
<u>Posisi keuangan</u>						
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412
Giro pada bank lain	-	-	490.253	-	-	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	5.890.446	-	463.025	2.207.290	-	8.560.761
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	-	-	-	-	8.303.663
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	6.247.318	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	-	-	-	-	223.138	223.138
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	105.418	351.676	1.219.950	3.516.283	9.697.147	14.890.474
Investasi	1.111	6.137	-	5.088.634	2.567.027	7.662.909
Konsumsi	-	2.671	7.376	608.137	30.224.431	30.842.615
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	275	2.389	2.281	33.110	647.679	685.734
Jumlah	35.264.580	362.873	8.430.203	11.453.454	43.359.422	98.870.532
<u>Rekening administratif</u>						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	65.971	-	3.704.294	3.770.265
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	699.574	699.574
Jumlah	-	-	65.971	-	4.403.868	4.469.839

43. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector

Financial position

Current accounts with Bank Indonesia

Current accounts with other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks

Marketable securities

Amortized cost

Fair value through other comprehensive income

Marketable securities sold under repurchased agreement

Marketable securities purchased under resale agreement

Other receivables

Loans and sharia financing

Working capital

Investment

Consumption

Interest receivables

Total

Administrative accounts

Unused loans

commitments granted to customers

Bank guarantees issued

Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri (lanjutan)

	2022					
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total
Posisi keuangan						
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	-	10.786.740
Giro pada bank lain	-	-	302.688	-	-	302.688
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	-	6.913.175
Tagihan spot derivatif	-	-	361	-	-	361
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	12.425.335	-	327.018	1.988.309	-	14.740.662
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	7.822.847	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	-	-	-	-	286.147	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						
Modal kerja	177.813	327.211	315.826	2.937.209	6.416.639	10.174.698
Investasi	5.662	1.436	-	4.828.916	1.535.158	6.371.172
Konsumsi	-	1.000	3.897	14.773	28.312.505	28.332.175
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	433	2.025	535	41.024	602.108	646.125
Jumlah	42.880.833	331.672	8.773.172	9.810.231	37.152.557	98.948.465
Rekening administratif						
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	-	132.932	-	3.266.580	3.399.512
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.019.766	1.019.766
Jumlah	-	-	132.932	-	4.286.346	4.419.278

Financial position

Current accounts with

Bank Indonesia

Current accounts with

other banks

Placements with

Bank Indonesia

and other banks

Spot derivative receivables

Marketable securities

Amortized cost

Fair value through

other comprehensive

income

Marketable securities sold under

repurchased agreement

Marketable securities purchased

under resale agreement

Other receivables

Loans and sharia financing

Working capital

Investment

Consumption

Interest receivables

Total

Administrative accounts

Unused loans

commitments granted

to customers

Bank guarantees

issued

Total

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Bank also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Bank mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 71.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

PSAK 71 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Bank.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

43. CREDIT RISK (continued)

d. Quality of financial assets

The Bank has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance.

e. Impairment assessment

Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Bank measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 71.

Expected credit loss measurement

PSAK 71 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Bank.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".
- Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

PSAK 71 mengikhtisarkan model “tiga tahap” untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini (lanjutan):

- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 71 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Bank mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Bank mendefinisikan instrumen keuangan sebagai gagal bayar, yang sepenuhnya sesuai dengan definisi kredit yang mengalami penurunan nilai, ketika memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2m.

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Bank dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Bank.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Expected credit loss measurement (continued)

PSAK 71 outlines a “three-stage” model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below (continued):

- A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 71 is that it should consider forward-looking information.
- Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).

Significant increase in credit risk (SICR)

The Bank consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Definition of default and credit-impaired assets

The Bank defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit-impaired, when it meets one or more of the following criteria:

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in (Note 2m).

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Bank and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss given Default* (LGD) throughout the Bank’s expected loss calculations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)

Kriteria kualitatif (lanjutan)

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi default dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Definition of default and credit-impaired assets (continued)

Qualitative criteria (continued)

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Bank evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Bank determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Bank pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (*lifetime EAD*). Misalnya, untuk komitmen *revolving*, Bank memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Bank tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

PD sepanjang umurnya dikembangkan dengan menerapkan profil jatuh tempo ke PD 12 bulan saat ini. Profil jatuh tempo melihat bagaimana gagal bayar muncul pada portofolio dari titik pengakuan awal sepanjang masa umur pinjaman. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama pada semua aset dalam portofolio dan peringkat kredit. Hal ini telah didukung oleh analisis historis.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

- EAD is based on the amounts the Bank expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (*lifetime EAD*). For example, for a revolving commitment, the Bank includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.
- (LGD) represents the Bank's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The Lifetime PD is developed by applying a maturity profile to the current 12 months PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit grade band. This is supported by historical analysis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi (lanjutan)

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk *revolving*, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Bank telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques (continued)

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Bank's recent default data.

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation- such as how the maturities profile of the PDs and others – are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Bank has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

**Informasi perkiraan masa depan yang
tergabung dalam model ECL (lanjutan)**

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Bank setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Bank juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Bank mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

**Forward-looking information incorporated in
the ECL models (continued)**

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Bank on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Bank's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Bank measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Asumsi variabel ekonomi

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Bank menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Bank yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

Penyisihan kerugian

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Economic variable assumptions

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Bank's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

Loss allowance

The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;
- Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;
- Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;
- Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and
- Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kebijakan penghapusbukuan

Bank menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Bank adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Bank dapat menghapusbukuan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp629.551. Bank masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Modifikasi aset keuangan

Bank dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Write-off policy

The Bank writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Bank's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Bank may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the year ended December 31, 2023 was Rp629,551. The Bank still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

Modification of financial assets

The Bank sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Modifikasi aset keuangan (lanjutan)

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Bank memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Bank dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan).

Bank terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

Pemetaan risiko kredit – Treasury

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Metode pemeringkatan Bank terdiri dari 25 tingkat peringkat. Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Modification of financial assets (continued)

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL).

The Bank continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

Credit risk grading – Treasury

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The Bank's rating method comprises 25 rating levels. The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
Kredit multiguna	24.949.921	48.361	192.741	25.191.023
Kredit modal kerja	3.178.492	121.848	177.899	3.478.239
Perdagangan besar dan eceran	2.729.943	148.116	437.951	3.316.010
Kredit pegawai	2.005.146	2.612	15.745	2.023.503
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	2.723.010	25.530	558.974	3.307.514
Kredit kepemilikan rumah	1.496.088	125.008	231.420	1.852.516
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.719.947	15.764	48.080	1.783.791
Pertanian, perburuan dan kehutanan	1.510.630	42.059	203.509	1.756.198
Industri pengolahan	2.343.498	22.053	103.913	2.469.464
Kredit usaha rakyat	3.709.273	90.788	54.695	3.854.756
Perantara keuangan	1.631.661	10.586	32.259	1.674.506
Linkage program	173.634	-	-	173.634
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	185.464	5.604	48.670	239.738
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	1.231.176	9.719	63.579	1.304.474
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	36.424	1.649	15.294	53.367
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	641	641
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	15.744	263	528	16.535
Lain-lain	77.134	-	-	77.134
	49.717.185	669.960	2.185.898	52.573.043
Cadangan kerugian penurunan nilai	(367.710)	(74.072)	(869.731)	(1.311.513)
Konvensional - Neto	49.349.475	595.888	1.316.167	51.261.530
		Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Individu/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Syariah	1.986.968	200.892	-	2.187.860
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.395)	(35.997)	-	(53.392)
Syariah - Neto	1.969.573	164.895	-	2.134.468
Jumlah, neto	51.319.048	760.783	1.316.167	53.395.998

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)**

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

43. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assessment (continued)**

Loans and sharia financing (continued)

	2022				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total	
Kredit multiguna	23.578.636	37.542	181.718	23.797.896	Multiguna loan
Kredit modal kerja	2.400.068	104.398	293.573	2.798.039	Working capital loan
Restrukturisasi Covid	3.160.896	33.974	337.404	3.532.274	Covid Restructurisation
Perdagangan besar dan eceran	1.654.813	91.337	200.612	1.946.762	Wholesale and retail
Kredit pegawai	2.050.789	3.144	23.193	2.077.126	Employee loans
Pertambangan, konstruksi, listrik dan transportasi	1.220.386	11.991	119.168	1.351.545	Mining, quarrying, electricity and transportation
Kredit kepemilikan rumah	1.222.011	116.132	241.184	1.579.327	Housing loan
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	747.574	8.375	25.022	780.971	Public, social culture, entertainment and other individual services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	748.259	117.445	67.375	933.079	Agriculture, hunting and forestry
Industri pengolahan	1.614.145	20.003	51.057	1.685.205	Processing industry
Kredit usaha rakyat	2.393.551	29.099	12.857	2.435.507	People's business credit
Perantara keuangan	604.442	18.758	24.849	648.049	Financial intermediaries
Linkage program	216.994	-	-	216.994	Linkage program
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	129.987	4.617	8.080	142.684	Accommodation, food and beverages
Bukan usaha lainnya dan rumah tangga	147.980	914	328	149.222	Other business and households
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	18.096	635	10.566	29.297	Real estate, business rental and services
Kredit Usaha Pembibitan Sapi	-	-	2.142	2.142	Cattle Breeding Business Loan
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	8.773	294	499	9.566	Individual service which serve households
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	-	-	317	317	Energy and Food Stability Loan
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.989	-	-	2.989	Limit activities that are not yet clear
Lain-lain	174.194	-	-	174.194	Others
	42.094.583	598.658	1.599.944	44.293.185	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(263.059)	(61.303)	(911.041)	(1.235.403)	Allowance for impairment losses
Konvensional - Neto	41.831.524	537.355	688.903	43.057.782	Conventional - Net
	Mengalami penurunan nilai/ Impaired				
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not-impaired	Individu/ Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total	
Syariah	1.986.967	200.892	-	2.187.859	Sharia
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.395)	(35.997)	-	(53.392)	Allowance for impairment losses
Syariah - Neto	1.969.572	164.895	-	2.134.467	Sharia - Net
Jumlah, neto	43.801.096	702.250	688.903	45.192.249	Total, net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan jenis kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah:

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

Loans and sharia financing (continued)

Movement of allowance for impairment losses by type of loans and sharia financing:

	2023				
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	793.315	199.485	325.812	1.318.612	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	349.480	144.856	181.587	675.923	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(482.918)	(4.969)	(141.743)	(629.630)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2023	<u>659.877</u>	<u>339.372</u>	<u>365.656</u>	<u>1.364.905</u>	Balance at December 31, 2023
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	411.873	90.939	230.012	732.824	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	248.004	248.433	135.644	632.081	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2023	<u>659.877</u>	<u>339.372</u>	<u>365.656</u>	<u>1.364.905</u>	Balance at December 31, 2023
	2022				
	Modal kerja/ Working capital	Investasi/ Investment	Konsumsi/ Consumption	Jumlah/ Total	
Saldo awal tahun	1.192.221	257.879	381.317	1.831.417	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	267.676	52.363	67.715	387.754	Provision during the year
Penghapusan tahun berjalan	(666.582)	(110.757)	(123.220)	(900.559)	Written-off during the year
Saldo 31 Desember 2022	<u>793.315</u>	<u>199.485</u>	<u>325.812</u>	<u>1.318.612</u>	Balance at December 31, 2022
Penyisihan kerugian atas kredit yang mengalami penurunan nilai secara individual	570.537	92.889	203.467	866.893	Individual impairment
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	222.778	106.596	122.345	451.719	Collective impairment for non impaired loans
Saldo 31 Desember 2022	<u>793.315</u>	<u>199.485</u>	<u>325.812</u>	<u>1.318.612</u>	Balance at December 31, 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (di luar cadangan kerugian penurunan nilai):

	2023			
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>			Jumlah/ <i>Total</i>
Biaya perolehan diamortisasi				
Surat Utang Negara	5.440.446	-	-	5.440.446
Reksadana	90.000	-	-	90.000
Obligasi	2.089.300	-	-	2.089.300
Sukuk Bank Indonesia	450.000	-	-	450.000
Negotiable Certificate of Deposit	28.500	-	-	28.500
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	450.000	-	-	450.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	-	-	12.913
Wesel	112	-	-	112
	8.561.271	-	-	8.561.271
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	7.762.560	-	-	7.762.560
Biaya perolehan diamortisasi				
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	7.971.412
Giro pada Bank lain	491.330	-	-	491.330
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	-	-	5.234.721
Tagihan reverse repo	6.247.318	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	223.138	-	-	223.138
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah				
Modal kerja	-	14.870.654	-	679.697
Investasi	-	7.846.461	-	155.818
Konsumsi	-	30.679.965	-	528.308
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	685.734	-	685.734
Jumlah	36.491.750	54.082.814	-	1.363.823
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(697.350)	-	(674.168)
Neto	36.491.750	53.385.464	-	689.655

The table below shows credit quality per class of financial assets (gross of allowance for impairment losses):

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Loans and sharia financing (continued)

Amortized cost
Government's bonds
Mutual Funds
Bonds
Sukuk of Bank Indonesia
Negotiable Certificate of Deposit
Interbank Mudharabah
Investment Certificate
Domestic L/C
Bill

Fair value through other comprehensive income
Government's bonds

Amortized cost
Currents account with Bank Indonesia
Currents account with other bank
Placement with Bank Indonesia and other bank
Reverse repo receivables
Other receivables
Loans and sharia financing
Working capital
Investment
Consumption
Interest receivables
Total
Allowances for impairment losses
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	2022				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither st due nor impaired</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>				
Biaya perolehan diamortisasi					
Surat Utang Negara	12.025.332	-	-	-	12.025.332
Reksadana	90.000	-	-	-	90.000
Obligasi	1.851.074	-	-	-	1.851.074
Sukuk Bank Indonesia	400.000	-	-	-	400.000
Negotiable Certificate of Deposit	47.237	-	-	-	47.237
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	325.000	-	-	-	325.000
Wesel	2.418	-	-	-	2.418
	14.741.062	-	-	-	14.741.062
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain					
Surat Utang Negara	8.476.609	-	-	-	8.476.609
Biaya perolehan diamortisasi					
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	10.786.740
Giro pada Bank lain	303.129	-	-	-	303.129
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.916.329	-	-	-	6.916.329
Tagihan spot derivatif	361	-	-	-	361
Tagihan reverse repo	7.822.847	-	-	-	7.822.847
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah					
Modal kerja	-	10.259.372	-	708.638	10.968.010
Investasi	-	6.448.282	-	122.376	6.570.658
Konsumsi	-	28.179.834	-	478.155	28.657.989
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	646.125	-	-	646.125
Jumlah	49.333.224	45.533.613	-	1.309.169	96.176.006
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(499.126)	-	(823.481)	(1.322.607)
Neto	49.333.224	45.034.487	-	485.688	94.853.399

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Loans and sharia financing (continued)

Amortized cost
Government's bonds
Mutual Funds
Bonds
Sukuk of Bank Indonesia
Negotiable Certificate of Deposit
Interbank Mudharabah
Investment Certificate
Bill

Fair value through other comprehensive income
Government's bonds

Amortized cost
Currents account with
Bank Indonesia
Currents account with other bank
Placement with Bank Indonesia
and other bank
Spot and derivative receivables
Reverse repo receivables
Other receivables
Loans and sharia financing
Working capital
Investment
Consumption
Interest receivables
Total
Allowances for impairment losses
Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

43. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pemetaan risiko kredit – Treasury (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit, debitur dengan stabilitas dan keragaman yang tinggi; memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka; memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio posisi keuangan yang konservatif.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baaa3 (Moody's).

Tingkat standar

- i. Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih; akses terbatas ke pasar modal atau ke pasar keuangan lainnya; tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil; memiliki kemampuan membayar yang cukup.
- iii. Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

43. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assessment (continued)

Credit risk grading – Treasury (continued)

The credit quality are defined as follows:

High grade

- i. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the governmental institutions, transacted with reputable banks with low probability of insolvency.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivables and third party receivables are borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan; borrowers with high degree of stability and diversity; has access to raise substantial amounts of funds through public market at any time; very strong debt service capacity and has conservative financial position ratios.
- iii. Securities and Government bonds are Sovereign securities; investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baaa3 (Moody's).

Standard grade

- i. Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- ii. Loans and sharia financing, interest receivable and third party receivables who are borrowers with an average track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due for 90 days and over, small corporations with limited access to public capital markets or to alternative financial market; volatility of earnings and overall performance; debt service capacity is adequate.
- iii. Securities and Government bonds are securities and bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,10%	0,89%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,06%	5,70%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	5,63%	0,00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,46%	0,00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,32%	0,00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.50%-12.75%	0,00%	Loans and sharia financing
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah	0.00% - 3.51%	0.00% - 1.65%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00% - 3.43%	-	Deposits from other banks

44. MARKET RISK

Market risk is the risks on the statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Bank's operational activities involving the banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Bank's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on the banking book exposure by considering the gap position of the Bank's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Bank's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. RISIKO PASAR (lanjutan)**44. MARKET RISK (continued)**

	2022		
	Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,02%	0,04%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,33%	0,47%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	7,99%	0,00%	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,38%	0,00%	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,80%	0,00%	Marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	10.50%-12.75%	0,00%	Loans and sharia financing
Liabilitas			Liabilities
Simpanan dari nasabah	0.00% - 2.74%	0.00% - 0.16%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	0.00% - 2.27%	-	Deposits from other banks

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2023 and 2022:

2023							
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate							
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total		
Aset keuangan						Financial assets	
Kas	2.652.775	-	-	-	2.652.775	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	490.253	-	-	-	490.253	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	-	-	-	5.229.695	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat-surat berharga						Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	2.334.459	1.481.901	4.744.401	-	-	8.560.761	Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	-	-	-	-	7.762.560	Fair value through other comprehensive income
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	-	-	-	-	6.948.304	Marketable securities sold under repurchased agreement
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	-	-	-	-	6.247.318	Marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	223.138	-	-	-	-	223.138	Other receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah							Loans and sharia financing
Modal kerja	-	-	-	15.550.351	-	15.550.351	Working capital
Investasi	-	-	-	8.002.279	-	8.002.279	Investment
Konsumsi	-	-	-	31.208.273	-	31.208.273	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	287.221	14.280	384.233	-	-	685.734	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	40.147.135	1.496.181	5.128.634	54.760.903	-	101.532.853	Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities	
Liabilitas segera	987.604	-	-	-	-	987.604	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	20.926.363	-	-	-	-	20.926.363	Current accounts
Tabungan	28.815.896	-	-	-	-	28.815.896	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	28.454.651	-	28.454.651	Time deposits
Simpanan dari bank lain	2.570.985	8.260	500	-	-	2.579.745	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	530.156	-	-	66.821	596.977	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	504.748	-	-	-	-	504.748	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	779.314	-	-	-	-	779.314	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	54.584.910	538.416	500	28.454.651	66.821	83.645.298	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(14.437.775)	957.765	5.128.134	26.306.252	(66.821)	17.887.555	Net interest repricing gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

44. MARKET RISK (continued)

The table below summarizes the Bank's exposure to interest rate risk (*gross*) which may affect the future cash flows as of December 31, 2023 and 2022 (continued):

2022							
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate							
Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ 3 months but less than 1 year	1 tahun dan lebih/ 1 year and up	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Total / Total		
Aset keuangan						Financial assets	
Kas	1.988.262	-	-	-	1.988.262	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	-	-	-	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	302.688	-	-	-	302.688	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	-	-	-	6.913.175	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat-surat berharga						Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	1.578.463	4.995.096	8.167.102	-	14.740.661	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	8.476.609	-	8.476.609	Fair value through other comprehensive income	
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	-	-	-	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement	
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	-	-	-	7.822.847	Marketable securities purchased under resale agreement	
Tagihan lainnya	286.147	-	-	-	286.147	Other receivable	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah						Loans and sharia financing	
Modal kerja	-	-	-	10.968.010	-	10.968.010	Working capital
Investasi	-	-	-	6.570.658	-	6.570.658	Investment
Konsumsi	-	-	-	28.657.989	-	28.657.989	Consumption
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	74.213	14.396	557.516	-	-	646.125	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	33.847.601	5.009.492	17.201.227	46.196.657	-	102.254.977	Total financial assets
Liabilitas keuangan						Financial liabilities	
Liabilitas segera	872.514	-	-	-	-	872.514	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	23.634.773	-	-	-	-	23.634.773	Current accounts
Tabungan	26.343.817	-	-	-	-	26.343.817	Savings accounts
Deposito berjangka	-	-	-	31.788.793	-	31.788.793	Time deposits
Simpanan dari bank lain	3.334.563	4.560	-	-	-	3.339.123	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	481.532	-	-	71.867	553.399	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	520.840	-	-	-	-	520.840	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	550.119	-	-	-	-	550.119	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	55.256.626	486.092	-	31.788.793	71.867	87.603.378	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga, neto	(21.409.025)	4.523.400	17.201.227	14.407.864	(71.867)	14.651.599	Net interest repricing gap

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan satu poin presentase suku bunga yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank. Sensitivitas laporan laba rugi komprehensif adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel pada kurva hasil.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change one percentage point in interest rates, with all other variables held constant, of the Bank's statements of profit or loss and other comprehensive income. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the statement of comprehensive income for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

	2023		
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	62.414	(62.414)	Impact to statement of profit or loss and other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

44. RISIKO PASAR (lanjutan)

Bank memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola *exposure* terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Bank.

45. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit Treasury dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

44. MARKET RISK (continued)

The Bank has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

As of December 31, 2023 and 2022, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Bank.

45. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk which is caused by the Bank's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Bank's activities and financial condition.

The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	2023
Kas dan setara kas	16.350.238
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663
Tagihan reverse repo	6.247.318
Simpanan dari bank lain	(2.540.889)
Jumlah	28.360.330
Simpanan dari nasabah	78.196.910
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	36,27%

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months
Aset keuangan						
Kas	2.652.775	2.652.775	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	7.073.597	-	-	-	897.815
Giro pada bank lain	490.253	490.253	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.229.695	5.228.200	1.495	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	8.560.761	830.243	1.504.216	783.350	698.551	4.744.401
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	7.762.560	7.732.011	30.549	-	-	-
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	6.948.304	6.948.304	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	6.197.612	49.706	-	-	-
Tagihan lainnya	223.138	223.138	-	-	-	-
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah						
Modal kerja	14.890.474	271.543	832.593	2.530.760	2.766.875	8.488.703
Investasi	7.662.909	30.414	7.589	15.135	225.659	7.384.112
Konsumsi	30.842.615	17.031	144.205	119.894	513.914	30.047.571
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	251.395	35.826	8.246	6.034	384.233
Jumlah	100.167.948	37.946.516	2.606.179	3.457.385	4.211.033	51.946.835
Liabilitas keuangan						
Liabilitas segera	987.605	987.605	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	78.196.910	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350
Simpanan dari bank lain	2.579.744	2.541.704	29.280	60	8.200	500
Pinjaman yang diterima	596.978	189.984	-	-	-	406.994
Beban yang masih harus dibayar	504.748	504.748	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	779.314	779.314	-	-	-	-
Jumlah	83.645.299	27.461.330	5.491.393	2.436.795	7.352.937	40.902.844
Perbedaan jatuh tempo	16.522.649	10.485.186	(2.885.214)	1.020.590	(3.141.904)	11.043.991

45. LIQUIDITY RISK (continued)

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

	2023	
Cash and cash equivalent	19.994.460	
Marketable securities sold under purchased agreement	4.095.066	
Reverse repo receivables	7.822.847	
Deposits from other banks	(3.282.553)	
Total	28.629.820	
Deposits from customers	81.767.383	
Ratio of net liquid assets to deposit from customers	35,01%	

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities (principal only) as of December 31, 2023 and 2022:

Financial assets
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Amortized cost
Fair value through other comprehensive income
Marketable securities sold under repurchased agreement
Marketable securities purchased under resale agreement
Other receivable
Loans and sharia financing
Working capital
Investment
Consumption
Interest receivable
Total
Financial liabilities
Obligations due immediately
Deposits from customers
Deposits from other banks
Borrowings
Accrued expenses
Other liabilities
Total
Maturity gap

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (pokok saja) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	2022					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1- 3 bulan/ months	3 - 6 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months
Aset keuangan						
Kas	1.988.262	1.988.262	-	-	-	
Giro pada Bank Indonesia	10.786.740	230.541	-	-	-	10.556.199
Giro pada bank lain	302.688	302.688	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6.913.175	6.306.518	606.657	-	-	-
Surat-surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	14.740.661	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	8.476.609	-	-	-	-	8.476.609
Surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	4.095.066	4.095.066	-	-	-	-
Surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	7.822.847	7.440.160	-	-	192.726	189.961
Tagihan lainnya	286.147	286.147	-	-	-	-
Kredit yang diberikan pembiayaan syariah						
Modal kerja	10.174.698	474.092	591.709	1.027.046	1.904.233	6.177.618
Investasi	6.371.172	35.082	2.414	7.284	32.541	6.293.851
Konsumsi	28.332.175	16.380	25.106	68.179	320.447	27.902.063
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	646.125	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516
Jumlah	100.936.365	21.926.246	2.127.252	3.480.204	5.081.744	68.320.919
Liabilitas keuangan						
Liabilitas segera	916.091	916.091	-	-	-	-
Simpanan dari nasabah	81.767.383	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905
Simpanan dari bank lain	3.339.123	3.287.933	46.630	60	4.500	-
Pinjaman yang diterima	553.399	150.517	-	-	-	402.882
Beban yang masih harus dibayar	520.840	520.840	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	550.119	550.119	-	-	-	-
Jumlah	87.646.955	16.639.972	16.247.508	1.699.848	10.882.840	42.176.787
Perbedaan jatuh tempo	13.289.410	5.286.274	(14.120.256)	1.780.356	(5.801.096)	26.144.132

46. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

46. OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Bank's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Bank's overall policies and operational procedures in each unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

46. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- i. Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- ii. Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- iii. Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit; dan
- iv. Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Bank.

47. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

48. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

46. OPERATIONAL RISK (continued)

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

- i. Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;*
- ii. Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external potential loss events;*
- iii. Implementing corrective actions based on audit results; and*
- iv. Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Bank's activities.*

47. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

48. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Bank.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2023 dan 2022 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TIMUR Tbk

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022

and for the years then ended

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- i. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- ii. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
- iii. Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

50. RISIKO STRATEJIK

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko stratejik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

51. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

49. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Bank has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Bank's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

- i. Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- ii. Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and*
- iii. Other risks related to external and internal regulations.*

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

50. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

51. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank has a strong capital to support the Bank's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Bank's capital structure.

Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank's capital and liquidity requirements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 November 2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua *tier* sebagai berikut:

- Modal inti (*tier* 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.

51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with POJK No.34/POJK.03/2016 dated November 22, 2016 about "Changes of Financial Service Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 about Minimum Capital Reserve for Commercial Bank" and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

- Modal pelengkap (*tier 2*) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal *tier 1*, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier 2*, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal *tier 3* sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier 1*; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal *tier 1*; dan modal *tier 2* tidak boleh melebihi modal *tier 1*. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier 2*.

ATMR Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan BI, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

- *Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.*

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiary.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on BI regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Modal inti (Tier 1)			Core capital (Tier 1)
Modal inti utama (CET 1)	11.025.184	10.346.392	Common equity tier (CET 1)
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	Additional equity tier (AT 1)
	11.025.184	10.346.392	
Modal pelengkap (Tier 2)	516.010	437.563	Supplementary capital (Tier 2)
Jumlah modal	11.541.194	10.783.955	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko			Risk Weighted Asset
Risiko kredit	40.764.771	34.567.488	Credit risk
Risiko operasional	4.083.746	8.917.841	Operational risk
Risiko pasar	49.106	108.144	Market risk
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	44.897.623	43.593.473	Total Risk Weighted Asset
Rasio kecukupan modal			Capital Adequacy Ratio
Rasio CET 1	24,56%	23,73%	CET 1 ratio
Rasio tier 1	24,56%	23,73%	Tier 1 ratio
Rasio tier 2	1,15%	1,00%	Tier 2 ratio
Rasio modal terhadap ATMR	25,71%	24,74%	Ratio of capital to ATMR
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	25,73%	24,80%	Capital adequacy ratio with credit and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	25,71%	24,74%	Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	Minimum capital adequacy ratio required

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**JAWA TIMUR Tbk****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)****31 Desember 2023 dan 2022 dan****untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut****(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH****JAWA TIMUR Tbk****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)****As of December 31, 2023 and 2022****and for the years then ended****(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)****51. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)**

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, pada tanggal 31 Desember 2023 profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 25.71%.

52. POSISI DEvisa NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Mata uang	2023			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value
POSISI KEUANGAN				
Dolar Amerika Serikat	434.208	394.155	40.053	40.053
Riyal Saudi Arabia	15.436	-	15.436	15.436
Dolar Singapura	71.918	68.077	3.841	3.841
Euro	6.365	763	5.602	5.602
Ringgit Malaysia	1.984	-	1.984	1.984
Poundsterling Inggris Raya	2.553	-	2.553	2.553
Dolar Australia	6.676	1	6.675	6.675
Yuan China Renminbi	4.673	1.310	3.363	3.363
Yen Jepang	1.072	33	1.039	1.039
Dolar Hong Kong	762	-	762	762
	545.647	464.339	81.308	81.308
REKENING ADMINISTRATIF				
Dolar Amerika Serikat	-	47.915	(47.915)	47.915
Jumlah	545.647	512.254	33.393	49.117
Total modal (Catatan 51)				11.541.194
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				0,70%
Rasio Posisi Devisa Neto				0,43%

51. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2023 the Bank risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat* (PK-2). Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Bank Capital Adequate Ratio was 25,71%, which was higher than the required minimum provision of capital.

52. NET OPEN POSITION

The Net Open Position (NOP) was calculated based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Currencies
FINANCIAL POSITION
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
ADMINISTRATIVE ACCOUNTS
United States Dollar
Total
Total capital (Note 51)
Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

52. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)

52. NET OPEN POSITION (continued)

Mata uang	2022			
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai neto/ Net value	Nilai absolut neto/ Net absolute value
POSISI KEUANGAN				
Dolar Amerika Serikat	278.741	157.121	121.620	121.620
Riyal Saudi Arabia	7.242	-	7.242	7.242
Dolar Singapura	12.463	9.240	3.223	3.223
Euro	4.392	1.609	2.783	2.783
Ringgit Malaysia	3.420	-	3.420	3.420
Poundsterling Inggris Raya	1.464	-	1.464	1.464
Dolar Australia	6.176	-	6.176	6.176
Yuan China Renminbi	1.375	-	1.375	1.375
Yen Jepang	563	15	548	548
Dolar Hong Kong	845	20	825	825
	316.681	168.005	148.676	148.676
REKENING ADMINISTRATIF				
Dolar Amerika Serikat	-	202.378	(202.378)	202.378
Jumlah	316.681	370.383	(53.702)	351.054
Total modal (Catatan 51)				10.783.955
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)				1,38%
Rasio Posisi Devisa Neto				3,26%

Currencies
FINANCIAL POSITION
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
ADMINISTRATIVE ACCOUNTS
United States Dollar
Total
Total capital (Note 51)
Net Open Position as a percentage of capital (Financial position)
Net Open Position as a percentage of capital

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023		2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset Keuangan				
Kas	2.652.775	2.652.775	1.988.262	1.988.262
Surat Berharga				
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain				
Surat Utang Negara	7.762.560	7.762.560	8.476.609	8.476.609
Biaya perolehan diamortisasi				
Surat Utang Negara	4.848.046	4.848.046	12.025.332	12.025.332
Obligasi:				
PT BCA Finance	30.000	30.000	-	-
PT Pegadaian (Persero)	80.000	80.000	480.000	480.000
PT Bank Aceh Syariah	-	-	225.000	225.000
PT Pupuk Indonesia (Persero)	192.203	192.203	192.250	192.250
PT Astra Sedaya Finance	197.862	197.862	152.966	152.966
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	181.055	181.055	146.035	146.035
PT Semen Indonesia Persero	244.970	244.970	135.454	135.454
PT Sinarmas Tbk	-	-	100.000	100.000
PT Federal International Finance Tbk	112.190	112.190	99.615	99.615
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	90.877	90.877	91.519	91.519
PT Bank Negara Indonesia Tbk	80.000	80.000	80.000	80.000
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	69.338	69.338	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	83.628	83.628	69.861	69.861
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	33.158	33.158	63.243	63.243
PT XL Axiata Tbk	85.097	85.097	60.000	60.000
PT Permodalan Nasional Madani	104.218	104.218	50.000	50.000
PT Maybank Indonesia Tbk	23.000	23.000	33.032	33.032
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	27.000	27.000	32.003	32.003
PT Toyota Astra Financial Services	25.000	25.000	-	-
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	-	30.148	30.148
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	114.000	114.000	27.189	27.189
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	133.308	133.308	26.000	26.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	74.888	74.888	24.803	24.803
PT Bank Mandiri Taspen	29.021	29.021	24.011	24.011
PT Bank Pembangunan Daerah				
Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	12.219	12.219
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	10.008	10.008
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	5.279	5.279	5.454	5.454
PT Mandiri Tunas Finance Tbk	58.174	58.174	5.265	5.265
PT Hutama Karya (Persero)	-	-	-	-
PT WOM Finance	15.036	15.036	-	-
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	592.400	592.400	-	-
Sukuk Bank Indonesia	450.000	450.000	400.000	400.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA):				
PT Bank Syariah Mega Indonesia	30.000	30.000	-	-
PT Bank Sinarmas Tbk	-	-	100.000	100.000
PT Bank Aceh Syariah	150.000	150.000	225.000	225.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100.000	100.000	-	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	70.000	70.000	-	-
PT Bank NTB Syariah	100.000	100.000	-	-
Negotiable Certificate of Deposit (NCD):				
PT Bank Negara Indonesia Tbk	28.500	28.500	47.237	47.237
Reksadana:				
PT Permodalan Nasional Madani	90.000	90.000	90.000	90.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	12.913	-	-
Wesel	112	112	2.418	2.418
	16.323.831	16.323.831	23.542.670	23.542.670
	18.976.606	18.976.606	25.530.932	25.530.932

53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

Financial Assets
Cash
Securities
Fair value through other comprehensive income
Government bonds
Amortized cost
Government bonds
Bonds:
PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Aceh Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Astra Sedaya Finance
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Persero
PT Sinarmas Tbk
PT Federal International Finance Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Permodalan Nasional Madani
PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Toyota Astra Financial Services
PT Indonesia Infrastructure Finance
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Mandiri Tunas Finance Tbk
PT Hutama Karya (Persero)
PT WOM Finance
Bank Indonesia Rupiah Securities
Bank Indonesia Sukuk
Interbank Mudharabah Investment Certificates:
PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank NTB Syariah
Negotiable Certificate of Deposit:
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Reksadana:
PT Permodalan Nasional Madani
Domestic L/C
Bill

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

	2023	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Biaya perolehan diamortisasi		
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	7.971.412
Giro pada Bank lain	491.330	491.330
Penempatan pada Bank Indonesia		
dan bank lain	5.234.721	5.234.721
Surat berharga	16.323.831	16.323.831
Surat berharga yang dijual untuk dijual kembali	8.303.663	8.303.663
Tagihan reverse repo	6.247.318	6.247.318
Tagihan lainnya	223.138	223.138
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		
Modal kerja	15.550.351	15.550.351
Investasi	8.002.279	8.002.279
Konsumsi	31.208.273	31.208.273
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	685.734
	<u>100.242.050</u>	<u>100.242.050</u>
Jumlah	<u>116.565.881</u>	<u>116.565.881</u>
Liabilitas keuangan		
Liabilitas lain-lain		
Liabilitas segera	987.605	987.605
Simpanan nasabah	75.849.855	75.849.855
Simpanan dari bank lain	2.560.321	2.560.321
Pinjaman yang diterima	596.977	596.977
Beban yang masih harus dibayar	504.748	504.748
Liabilitas lain-lain	779.314	779.314
Jumlah	<u>81.278.820</u>	<u>81.278.820</u>

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
			Amortised cost
	10.786.740	10.786.740	Current accounts with Bank Indonesia
	303.129	303.129	Current accounts with other banks
			Placement with Bank Indonesia
	6.916.329	6.916.329	and other banks
	23.217.671	23.217.671	Marketable securities
	4.095.066	4.095.066	Marketable securities sold under repurchased agreement
	7.822.847	7.822.847	Reverse repo receivables
	286.147	286.147	Other receivables
			Loans and sharia financing
	10.968.010	10.968.010	Working capital
	6.570.658	6.570.658	Investment
	28.657.989	28.657.989	Consumption
	646.125	646.125	Interest receivables
	<u>100.270.711</u>	<u>100.270.711</u>	
	<u>123.813.381</u>	<u>123.813.381</u>	Total
			Financial liabilities
			Other liabilities
	872.514	872.514	Obligations due immediately
	81.767.383	81.767.383	Deposits from customers
	3.339.123	3.339.123	Deposits from other banks
	553.399	553.399	Borrowings
	520.840	520.840	Accrued expenses
	550.119	550.119	Other liabilities
	<u>87.603.378</u>	<u>87.603.378</u>	Total

- i. Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

53. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

ii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Portofolio kredit Bank terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

iv. Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

v. Pinjaman yang diterima

Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

53. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

ii. Loans and sharia financing

The Bank credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.

iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

iv. Marketable securities

The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (*brokers*)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.

v. Borrowings

The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pension sebesar 5% dari penghasilan dasar pension pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

- i. Penilaian aktuaria atas beban pensiun per 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 4 Januari 2024 dan 24 Januari 2023 telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim).. Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

- i. The actuarial valuation of pension expense as of December 31, 2023 and 2022 were made by Konsultan Aktuaria Agus Susanto, an independent actuarial firm, based on their report dated January 4, 2024 and January 24, 2023 conform with the PSAK 24 (revised 2013) with use calculated method *Projected Unit Credit* also considers assumptions are as follows :

	2023	2022	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,00%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,00%	7,40%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year		46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	2023	2022	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	Corporate Bonds
Properti	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	Others

iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini kewajiban	961.785	912.082	986.872	868.937	738.556	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(839.753)	(800.814)	(763.453)	(662.634)	(533.439)	Fair value of assets program
Status pendanaan	122.032	111.268	223.419	206.303	205.117	Funded status
Liabilitas (aset) imbalan pasti - neto	122.032	111.268	223.419	206.303	205.117	Liabilities (Assets) defined benefit - net

iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Aset imbalan pasti neto awal tahun	111.268	223.419	Asset defined benefit net at beginning of year
Biaya imbalan pasti:			Expenses for the year:
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	19.156	31.586	Amount recognized in the profit and losses
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	6.367	(95.354)	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	(14.759)	(48.383)	Paid of contribution from employee
Liabilitas imbalan pasti neto	122.032	111.268	Liabilities defined benefit - net

v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	10.922	14.830	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested			Past service cost - vested
Keuntungan/kerugian atas penyelesaian			Gain/losses on settlement
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:			Net interest on liabilities (asset) defined:
Biaya bunga	67.494	74.015	Interest cost
Pendapatan bunga dari aset	(59.260)	(57.259)	Interest income from assets
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	19.156	31.586	Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

Defined benefit pension plan (continued)

ii. Pension plan assets primarily consists of:

iii. The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the statement of financial position are as follows:

iv. The calculation movement of defined benefit pension plan obligations are as follows:

v. The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the statement of profit or loss are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

- vi. Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	800.814
Hasil pengembangan riil	59.260
Imbalan hasil atas aset program	5.516
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	14.759
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	3.209
Pembayaran imbalan kerja	(43.805)
Saldo akhir	839.753

- vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	11.883
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	(5.516)
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	6.367

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

- vi. The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	2022	
	763.453	Beginning balance
	57.259	Actual investment result
	(22.775)	Return on plan assets
	44.919	Contribution paid – employer's
	3.463	Contribution paid – employee plan
	(45.505)	Actual benefit paid
	800.814	Ending balance

- vii. The calculation of defined benefit pension plan expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	2022	
	(118.130)	Actuarial gain (losses) on obligation
	22.775	Actuarial gain (losses) on asset
	(95.355)	Recognized cost in other comprehensive income

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, the Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

- i. Penilaian aktuarial atas beban pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto untuk tanggal valuasi per 31 Desember 2023 dan 2022. Penilaian aktuarial telah sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2016) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2023	2022
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7.00%	7.40%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0.00%	0.00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7.00%	7.40%

Asumsi lainnya

Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year

- ii. Komposisi aset dana pensiun, terdiri dari:

	2023	2022
Deposito berjangka	13,70%	13,70%
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%
Properti	7,00%	7,00%
Lainnya	6,70%	6,70%

- iii. Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat lain yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai kini kewajiban	228.754	204.612
Nilai wajar aset program	(271.404)	(259.207)
Biaya dibayar dimuka	(42.650)	(54.595)

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

- i. Actuarial valuation on pension expense is calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto for the valuation date as of December 31, 2023 and 2022. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 24 (revised 2016) using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

Economic assumptions

Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Other assumptions

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

- ii. Composition of pension fund assets, consisting of:

Time deposits
Corporate Bonds
Property
Others

- iii. Calculation of other benefit pension plan obligations recognized in the financial position report are as follows:

Present value of liabilities
Fair value of assets program
Prepaid expenses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

- iv. Mutasi atas kewajiban program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2023
Liabilitas (aset) imbalan pasti neto awal tahun	54.595
Biaya imbalan pasti:	
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4.591)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(7.354)
Pembayaran iuran dari pendiri	-
Liabilitas imbalan pasti neto	42.650

- v. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

	2023
Biaya jasa kini	4.591
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan:	
Biaya bunga	15.141
Pendapatan bunga dari aset	(19.181)
Bunga atas dampak batasan aset	4.040
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	4.591

- vi. Mutasi atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	259.207
Hasil yang diharapkan dari aset	19.181
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	-
Pembayaran imbalan kerja	(7.738)
Laba (rugi) aktuarial pada aset	754
Saldo akhir	271.404

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES
(continued)**

Defined benefit pension plan (continued)

- iv. The mutations of the defined benefit pension plan obligations are as follows:

	2022	
Liabilities (asset) defined benefit net at beginning of year	22.940	
Expenses for the year:		
Amount recognized in the profit and losses	(4.433)	
Remeasurement of liabilities (assets) in the current year	16.317	
Paid of contribution from employee	19.771	
Liabilities defined benefit - net	54.595	

- v. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in the Income Statement is as follows:

	2022	
Current service cost	4.433	
Net interest on liabilities (asset) defined:		
Interest cost	14.891	
Interest income from assets	(16.611)	
Interest of the asset ceiling	1.720	
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss	4.434	

- vi. The movement in the fair value of a defined benefit pension asset are as follows:

	2022	
Beginning balance	221.492	
Results expected from assets	16.611	
Payment of contributions - employers	19.772	
Payment of employee benefits	(6.777)	
Actuarial gain (loss) on assets	8.109	
Ending balance	259.207	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

- vii. Perhitungan biaya program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	12.149
Keuntungan aktuarial pada aset	(754)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	(15.985)
Diakui di penghasilan komprehensif lain	(4.590)

- viii. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	(1.830)
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada kewajiban	12.149
(Keuntungan) kerugian aktuarial pada aset	(754)
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	(15.986)
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti neto	(6.421)

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined benefit pension plan (continued)

- vii. The calculation of the cost of a defined benefit pension plan recognized in other comprehensive income is as follows:

	2022	
	(6.487)	Actuarial gains (losses) on liabilities
	(8.109)	Actuarial gains on assets
	29.935	Changes to the impact of asset limits exclude interest
Recognised in other comprehensive income	15.339	

- viii. Measurement of return on liabilities (assets) defined benefit pension plans is as follows:

	2022	
	(17.169)	Beginning balance
	(6.487)	Actuarial (gains) losses on liabilities
	(8.109)	Actuarial (gains) losses on assets
	29.935	Changes to the impact of asset limits exclude interest
Amount of re-measurement of net defined benefit assets	(1.830)	

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

- i. Penilaian aktuaria atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaris pada tanggal 4 Januari 2024 dan 24 Januari 2023 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2023	2022
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,10%	7,40%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%
Asumsi lainnya		
Tingkat mortalita	GAM-1971	
Usia pensiun normal	58 tahun/years	
Tingkat cacat	10% Mortalita	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	

- ii. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya jasa kini	2.649	2.653
Biaya bunga neto	3.731	4.348
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	6.380	7.001

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

In year 2016, the Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

- i. The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended December 31, 2023 and 2022, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as discussed an independent actuary report dated January 4, 2024 and January 24, 2023, are as follows:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

Economic assumptions
Discount rate
Annual salary growth rate
Investment yield of plan asset
Other assumptions
Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

- ii. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

Current service cost
Interest cost net
Expense recognized in statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

- iii. Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	50.411
Beban tahun berjalan	6.380
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	17.402
Pembayaran imbalan	(22.895)
Saldo akhir	51.298

- iv. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	50.411
Biaya jasa kini	2.649
Biaya bunga	3.731
Pembayaran imbalan	(22.895)
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	17.402
Saldo akhir	51.298

- v. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	2023
Saldo pada awal tahun	44.627
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	17.401
Saldo akhir	62.028

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

- iii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	2022	
	57.968	Beginning balance
	7.001	Current service cost
	(14.558)	Remeasurement of employee benefit - net
	-	Actual benefit paid
	50.411	Ending balance

- iv. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2022	
	57.968	Beginning balance
	2.653	Current service cost
	4.348	Interest cost
	-	Actual benefit paid
	(14.558)	Actuarial gain on obligation
	50.411	Ending balance

- v. Remeasurement of net employee benefit (aset) liabilities:

	2022	
	59.185	Balance at beginning of year
	(14.558)	Actuarial gain on obligation
	44.627	Ending balance

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Death Benefit To Employees Service Devotion

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 4 Januari 2024 dan 24 Januari 2023.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2023	2022	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	6,90%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age years old		18-45 years old
Usia 18-45 tahun			
	5% per tahun/per year		46-55 years old
Usia 46-55 tahun			

i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2023		2022		
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service	Program penghargaan masa kerja/ Gratuity for service program	
Biaya jasa kini	275	4.902	265	4.358	Current service cost
Biaya bunga neto	177	3.962	162	3.104	Oterest cost net
Rugi aktuarial	-	5.287	-	11.355	Actuarial loss
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	452	14.151	427	18.817	Expenses recognized in statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan)

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(2.401)	(53.546)
Beban tahun berjalan	(452)	(14.151)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	91	-
Pembayaran imbalan kerja	87	7.195
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>(2.675)</u>	<u>(60.502)</u>

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2023	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(2.401)	(53.546)
Biaya jasa kini	(275)	(4.902)
Biaya bunga	(177)	(3.962)
Biaya jasa lalu	-	-
Pembayaran imbalan	87	7.195
Kerugian aktuarial pada kewajiban	91	(5.287)
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>(2.675)</u>	<u>(60.502)</u>

- iv. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	2023	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo pada awal tahun	501	-
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(91)	-
Pendapatan komprehensif lain	<u>410</u>	<u>-</u>

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)

- ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(2.164)	(41.384)
Beban tahun berjalan	(427)	(18.817)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	28	-
Pembayaran imbalan kerja	162	6.655
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>(2.401)</u>	<u>(53.546)</u>

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo awal	(2.164)	(41.384)
Biaya jasa kini	(265)	(4.358)
Biaya bunga	(162)	(3.104)
Biaya jasa lalu	-	-
Pembayaran imbalan	162	6.655
Kerugian aktuarial pada kewajiban	28	(11.355)
Liabilitas imbalan pasti neto	<u>(2.401)</u>	<u>(53.546)</u>

- i. Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	2022	
	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program
Saldo pada awal tahun	529	-
Kerugian aktuarial pada kewajiban	(28)	-
Pendapatan komprehensif lain	<u>501</u>	<u>-</u>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program penghargaan purna tugas

Penilaian aktuarial atas program penghargaan purna tugas untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 4 Januari 2024 dan 24 Januari 2023.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	2023	2022	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,00%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old	18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	46-55 years old

- i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	4.097	3.810	Current service cost
Biaya bunga neto	1.131	1.203	Interest cost net
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	5.228	5.013	Expense recognized in statement of profit or loss

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal	15.284	15.832	Beginning balance
Beban tahun berjalan	5.228	5.013	Current service cost
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(2.774)	(5.561)	Actuarial gain on obligation
Pembayaran imbalan	(897)	-	Actual benefit paid
Saldo akhir	16.841	15.284	Ending balance

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

After duty award program

The actuarial valuation of afterduty award program for the years ended December 31, 2023 and 2022, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 4, 2024 and January 24, 2023.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

- i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

- ii. Following are the reconciliation of the movements of employee benefit liabilities during the years:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

Program penghargaan purna tugas (lanjutan)

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	15.284	15.832
Biaya jasa kini	4.097	3.810
Biaya jasa lalu	-	-
Biaya bunga neto	1.131	1.203
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(2.774)	(5.561)
Pembayaran imbalan	(897)	-
Saldo akhir	16.841	15.284

- iv. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto:

	2023	2022
Saldo awal	5.561	-
Laba aktuarial	2.774	5.561
Saldo akhir	8.335	5.561

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar

Penilaian aktuarial atas program pensiun dwiguna dan cuti besar untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 4 Januari 2024 dan 24 Januari 2023.

Program Imbalan cuti besar adalah program penggantian hak cuti karyawan. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja selama 6 tahun berturut – turut dan kelipatannya sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Penggantian hak cuti besar diberikan sebesar 2 (dua) kali upah pokok.

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

After duty award program (continued)

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

Beginning balance
Current service cost
Past service cost
Interest cost net
Actuarial gain on obligation
Actual benefit paid
Ending balance

- iv. Remeasurement of net employee benefit liabilities:

Beginning balance
Actuarial gain
Ending balance

Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program

The actuarial valuation of endowment insurance pension program and long service leave program for the year ended December 31, 2023 and 2022, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its report dated January 4, 2024 and January 24, 2023.

Long service leave program are employee leave entitlement replacement programs. The benefits are given to permanent employees who have worked for 6 consecutive years and multiples since being appointed as permanent employees. Replacement for grand leave is given at 2 (two) times the basic salary

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program
Cuti Besar**

	2023		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	6,90%	6,90%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	46-55 years old
	2022		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Asumsi ekonomi			Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,40%	7,40%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	Annual salary growth rate
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan aset
Asumsi lainnya			Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita	10% Mortalita	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	18-45 years old
Usia 46-55 tahun	5% per tahun/per year	5% per tahun/per year	46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program
Cuti Besar (lanjutan)**

- i. Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program (continued)

- i. The employee benefit expenses recognized in profit or loss, are as follows:

	2023		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Biaya jasa kini	726	5.977	Current service cost
Biaya bunga neto	458	1.338	Oterest cost net
Rugi aktuarial	-	(582)	Actuarial loss
Biaya jasa lalu - vested	-	-	Past service cost - vested
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	1.184	6.733	Expenses recognized in statement of profit or loss
	2022		
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Biaya jasa kini	568	5.729	Current service cost
Biaya bunga neto	-	-	Oterest cost net
Rugi aktuarial	-	-	Actuarial loss
Biaya jasa lalu - vested	5.618	12.359	Past service cost - vested
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	6.186	18.088	Expenses recognized in statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

- ii. Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

2023			
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Saldo awal	6.186	18.088	Beginning balance
Beban tahun berjalan	1.184	6.733	Current year expenses
Kerugian aktuarial pada kewajiban	5.583	-	Actuarial losses on obligation
Pembayaran imbalan kerja	(5.620)	(10.175)	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	7.333	14.646	Liabilities defined benefit - net
2022			
	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Beban tahun berjalan	6.186	18.088	Current year expenses
Kerugian aktuarial pada kewajiban	-	-	Actuarial losses on obligation
Pembayaran imbalan kerja	-	-	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	6.186	18.088	Liabilities defined benefit - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

54. LIABILITAS IMBALAN KERJA PASTI (lanjutan)

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program
Cuti Besar (lanjutan)**

- iii. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program
Saldo awal	6.186	18.087
Biaya jasa kini	726	5.977
Biaya bunga	457	1.338
Biaya jasa lalu	-	(582)
Pembayaran imbalan	(5.619)	(10.175)
Kerugian aktuarial pada kewajiban	5.583	-
Liabilitas imbalan pasti neto	7.333	14.645

2022

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program	Program Cuti besar/ Long service leave program
Saldo awal	-	-
Biaya jasa kini	568	5.729
Biaya jasa lalu	5.618	12.358
Liabilitas imbalan pasti neto	6.186	18.087

**54. DEFINED EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES
(continued)**

**Endowment Insurance Pension Program and
Long Service Leave Program (continued)**

- iii. The movements in the present value of employee benefit are as follows:

Beginning balance
Current service cost
Interest cost net
Past service cost
Actual benefit paid
Actuarial losses on obligation
Liabilities defined benefit - net

Beginning balance
Current service cost
Past service cost
Liabilities defined benefit - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**55. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN
BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin LPS, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 3,75% dan 1,75% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan sama dengan atau di bawah 3,50% dan 0,25% dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp167.677 dan Rp188.454.

**55. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS
OF PRIVATE BANKS**

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposits Guaranteed by LPS, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank. Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 3.75% and 1.75% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2022 and equal to or below 3.50% and 0.25% in Rupiah and foreign currency as of December 31, 2023.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Bank for years ended December 31, 2023 and 2022, amounted to Rp167,677 and Rp188,454 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. PELAPORAN JATUH TEMPO

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

56. MATURITY PROFILE

- a. The maturity of the Bank's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

	2023						
	Tidak ada tanggal jatuh tempo	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months up to 6 months	Lebih dari 6 bulan/ More than 6 months up to 12 months	Lebih dari 12 bulan/ More than 12 months	
	No Contractual Maturity						Total
ASET							ASSETS
Kas	-	2.652.775	-	-	-	-	2.652.775
Giro pada Bank Indonesia	-	7.073.597	-	-	-	897.815	7.971.412
Giro pada bank lain	-	491.330	-	-	-	-	491.330
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	5.233.226	1.495	-	-	-	5.234.721
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	830.243	1.504.216	783.350	698.551	4.744.401	8.560.761
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	7.732.011	30.549	-	-	-	7.762.560
Surat berharga Repo	-	-	1.000.865	-	605.755	6.697.043	8.303.663
Tagihan reverse repo	-	6.197.612	49.706	-	-	-	6.247.318
Tagihan lainnya	-	223.138	-	-	-	-	223.138
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	383.350	993.507	2.681.738	3.472.562	47.229.746	54.760.903
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	251.395	35.826	8.246	6.034	384.233	685.734
Beban dibayar dimuka	207.452	-	-	-	-	-	207.452
Aset tetap - neto	1.277.714	-	-	-	-	-	1.277.714
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	472.122	472.122
Aset lain-lain	373.402	-	-	-	-	-	373.402
Jumlah	1.858.568	31.068.677	3.616.164	3.473.334	4.782.902	60.425.360	105.225.005
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	-	987.605	-	-	-	-	987.605
Simpanan dari nasabah	-	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350	78.196.910
Simpanan dari bank lain	-	2.541.703	29.280	60	8.200	500	2.579.743
Pinjaman yang diterima	-	150.638	-	-	-	406.994	557.632
Utang pajak	143.245	-	-	-	-	-	143.245
Beban yang masih harus dibayar	-	504.748	-	-	-	-	504.748
Liabilitas lain-lain	-	779.314	-	-	-	-	779.314
Jumlah	143.245	27.421.983	5.491.393	2.436.795	7.352.937	40.902.844	83.749.197
Perbedaan jatuh tempo	1.715.323	3.646.694	(1.875.229)	1.036.539	(2.570.035)	19.522.516	21.475.808

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)

- a. Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2022						
	Tidak ada tanggal jatuh tempo		Lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan/	Lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan/	Lebih dari 12 bulan/	
	kontraktual/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	More than 1 month up to 3 months	More than 3 months up to 6 months	More than 6 months up to 12 months	More than 12 months	Total/ Total
ASET							
Kas	-	1.988.262	-	-	-	-	1.988.262
Giro pada Bank Indonesia	-	230.541	-	-	-	10.556.199	10.786.740
Giro pada bank lain	-	303.129	-	-	-	-	303.129
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	4.628.064	606.657	-	-	-	5.234.721
Surat berharga							
Biaya perolehan diamortisasi	-	725.515	852.948	2.367.794	2.627.302	8.167.102	14.740.661
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	8.476.609	8.476.609
Surat berharga Repo	-	4.095.066	-	-	-	-	4.095.066
Tagihan reverse repo	-	7.440.160	-	-	192.726	189.961	7.822.847
Tagihan lainnya	-	286.147	-	-	-	-	286.147
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-	900.723	886.002	933.711	2.436.591	41.039.630	46.196.657
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	25.795	48.418	9.901	4.495	557.516	646.125
Beban dibayar dimuka	166.661	-	-	-	-	-	166.661
Aset tetap - neto	1.284.250	-	-	-	-	-	1.284.250
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	502.238	502.238
Aset lain-lain	141.492	-	-	-	-	-	141.492
Jumlah	1.592.403	20.623.402	2.394.025	3.311.406	5.261.114	69.489.255	102.671.605
LIABILITAS							
Liabilitas segera	-	872.514	-	-	-	-	872.514
Simpanan dari nasabah	-	11.214.472	16.200.878	1.699.788	10.878.340	41.773.905	81.767.383
Simpanan dari bank lain	-	3.287.933	46.630	60	4.500	-	3.339.123
Pinjaman yang diterima	-	150.517	-	-	-	402.882	553.399
Utang pajak	47.205	-	-	-	-	-	47.205
Beban yang masih harus dibayar	-	520.840	-	-	-	-	520.840
Liabilitas lain-lain	-	550.119	-	-	-	-	550.119
Jumlah	47.205	16.596.395	16.247.508	1.699.848	10.882.840	42.176.787	87.650.583
Perbedaan jatuh tempo	1.545.198	4.027.007	(13.853.483)	1.611.558	(5.621.726)	27.312.468	15.021.022

- b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing adalah sebesar 3,34% dan 2,55%

- b. The ratio of classified earning assets to total productive assets as of December 31, 2023 and 2022 is 3.34% and 2.55% respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

57. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION

	2023	2022
ASET		
Kas	35.681	24.827
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	338.477	329.777
Surat berharga	1.066.406	852.935
Piutang:		
- Murabahah	902.861	874.944
- Qardh	49.062	36.423
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(25.963)	(55.246)
Piutang, neto	925.960	856.121
Pembiayaan:		
- Musyarakah	1.130.521	767.912
- Mudharabah	105.174	223.915
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(27.429)	(27.963)
Pembiayaan, neto	1.208.266	963.864
Aset ijarah	241	277
Aset tetap	66.882	62.414
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(34.884)	(28.450)
Nilai buku neto	31.998	33.964
Aset lain-lain	13.561	9.693
JUMLAH ASET	3.620.590	3.071.458
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Giro wadiah	174.426	156.090
Tabungan wadiah	81.125	-
Liabilitas segera	21.029	8.889
Liabilitas lainnya	943.288	1.024.117
JUMLAH LIABILITAS	1.219.868	1.189.096
INVESTASI TIDAK TERIKAT		
Giro mudharabah	1.786	1.637
Tabungan mudharabah	734.193	594.597
Deposito berjangka mudharabah	1.630.498	1.245.458
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	2.366.477	1.841.692
Laba neto	34.245	40.670
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	3.620.590	3.071.458

ASSETS
Cash
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Receivables:
Murahabah -
Qardh -
Less: Allowance for impairment losses
Receivables, net
Financing:
Musyarakah -
Mudharabah -
Less: Allowance for impairment losses
Financing, net
Ijarah assets
Fixed assets
Less: Accumulated depreciation
Net book value
Other assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY
LIABILITIES
Wadiah current accounts
Wadiah savings
Obligations due immediately
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
UNCOMMITTED INVESTMENT
Mudharabah current account
Mudharabah savings
Mudharabah time deposits
TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT
Net income
TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**57. INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH
(lanjutan)**

	2023	2022
LAPORAN LABA RUGI		
Pendapatan operasional		
- Margin	62.234	59.747
- Bagi hasil	95.101	75.242
- Sewa	128	44
- Operasional Lainnya	61.931	61.845
Pendapatan operasional	219.394	196.878
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat		
- Bank	(338)	(578)
- Bukan bank	(62.870)	(54.338)
Bagi hasil	(63.208)	(54.916)
Beban operasional lainnya		
- Bonus	(90)	(166)
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(18.396)	(22.794)
- Beban administrasi dan umum	(40.849)	(40.456)
- Beban personalia	(51.021)	(28.022)
- Beban lainnya	(12.017)	(11.734)
	(122.373)	(103.172)
Pendapatan operasional bersih	33.813	38.790
Pendapatan non operasional bersih	432	1.880
Laba tahun berjalan	34.245	40.670

58. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

1. Perkara perdata No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007 tentang gugatan PT Hikmah Surya Jaya kepada Bank untuk memenuhi ganti rugi materiil atas kredit dana bergulir sebesar Rp3.000. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) memutuskan pihak Bank menang. Bank telah mengirimkan surat No.057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT tanggal 3 Juli 2018 dan diterima PN tanggal 6 Juli 2018. Masih menunggu jawaban surat dari PN untuk kepastian inkracht putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
2. Perkara Kepailitan No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby dengan pemohon PT Fatma Lestari Abadi Mix dan CV. Azka Pelangi Bersaudara terhadap PT Citra Gading Asritama. Bank sebagai kreditur mengajukan tagihan kepada Kurator atas kredit PT Citra Gading Asritama (dalam pailit) sebesar Rp31.103 saat ini dalam proses verifikasi berkas kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**57. SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS

Operating income
Margin -
Profit sharing -
Rents -
Other operating -
Operating income
Profit sharing expenses to non-restricted investors fund
Bank -
Non bank -
Profit sharing
Other operating expenses
Bonuses -
Allowance for impairment losses -
General and administratif expenses -
Personnel expenses -
Others -
Net operating income
Non-operating income - net
Profit during the year

58. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

1. Case No.584/Pdt.G/2007/PN.Sby dated November 21, 2007 about the lawsuit of PT Hikmah Surya Jaya towards Bank, demanding compensation to the amount of Rp3,000 regarding revolving credit. The District Court's and the Appellate Court's decide that Bank won. Bank Jatim has sent a letter number 057/0865/HKM/LIT/LEGAL/SRT on July 3rd, 2018 and received by the District Court on July 6th, 2018. Still waiting for a response from the District Court's for the inkracht decision of the High Court.
2. Bankruptcy Case No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Sby with the pleader PT Fatma Lestari Abadi Mix and CV. Azka Pelangi Bersaudara towards PT Citra Gading Asritama. Bank as a creditor submits a bill to the Curator for the credit of PT Citra Gading Asritama (in bankruptcy) of Rp31,103 currently in the process of creditor file verification at the Surabaya Commercial Court at the Surabaya District Court.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

58. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

3. Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Bna tanggal 18 April 2023 dengan Penggugat PT Rudi Jaya, potensi kerugian materiil sebesar Rp.3.218, Penggugat sebagai debitur Bank Jatim yang menerima pola keppres mengajukan gugatan kepada Bank agar tidak dianggap wanprestasi dikarenakan Penggugat diputus kontrak oleh Kementerian PUPR. Saat ini dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
4. Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023 dengan Penggugat Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Ngatemoen Harijono, potensi kerugian materiil sebesar Rp.3.100, Para Penggugat sebagai Penjamin mengajukan gugatan kepada Bank agar mengembalikan objek jaminan kepada Penggugat karena kredit dianggap tidak sah. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang.
5. Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023 dengan Penggugat PT Toya Indo Manunggal, potensi kerugian materiil sebesar Rp.5.732, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank agar menyerahkan seluruh termijn yang diterima oleh PT Acretia Inti Shosha Persada/Tergugat 2 atas pengerjaan proyek dari PT Indonesia Power. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Perkara Perdata Nomor 888/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 29 Agustus 2023 dengan Penggugat PT Anugerah Bersama Berkah Abadi, potensi kerugian materiil sebesar Rp.15.000, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank agar menyerahkan kembali sertipikat hak atas tanah kepada Penggugat. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023 dengan Penggugat Yon Permadian Tesna, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp.27.988, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank proses kredit Bank Jatim mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen.
8. Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp9.853.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank.

58. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)

3. Civil Case Number 16/Pdt.G/2023/PN.Bna dated 18 April 2023 with the Plaintiff PT Rudi Jaya, potential material loss amounting to IDR 3,218, the Plaintiff as a debtor of Bank Jatim who received the presidential decree filed a lawsuit against the Bank so that it would not be considered in default due to The plaintiff's contract was terminated by the PUPR Ministry. Currently in the appeal process at the Banda Aceh High Court.
4. Civil Case Number 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg dated 30 May 2023 with Plaintiffs Galuh Nalibronto Prabaningrum and Ngatemoen Harijono, potential material loss amounting to Rp. 3,100, The Plaintiffs as Guarantor filed a lawsuit against the Bank to return the collateral object to the Plaintiff because the credit was considered invalid. Currently in the trial process at the Malang District Court.
5. Civil Case Number 746/Pdt.G/2023/PN.Sby dated 26 July 2023 with the Plaintiff PT Toya Indo Manunggal, potential material loss amounting to IDR 5,732, The Plaintiff filed a lawsuit against the Bank to hand over all terms received by PT Acretia Inti Shosha Persada/Defendant 2 for project work from PT Indonesia Power. Currently in trial at the Surabaya District Court.
6. Civil Case Number 888/Pdt.G/2023/PN.Sby dated 29 August 2023 with the Plaintiff PT Anugerah Bersama Berkah Abadi, potential material loss amounting to IDR 15,000, The Plaintiff filed a lawsuit against the Bank to hand over the land title certificate back to the Plaintiff. Currently in trial at the Surabaya District Court.
7. Civil Case Number 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn dated 6 September 2023 with Plaintiff Yon Permadian Tesna, against the Bank with potential material losses amounting to Rp. 27,988, The plaintiff filed a lawsuit against the Bank. Bank Jatim's credit process contained unlawful acts. civil judgment. Currently in the trial process at the Kepanjen District Court.
8. Other civil cases with a value of each lawsuit demands under Rp3,000 amount to Rp9,853.

The Bank's management believes that the above cases doesn't interfere to the Bank performances.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2023 dan 2022 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of December 31, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

59. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK nomor: S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi *Priority Banking & Kustodian*, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

1. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
2. Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
3. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
4. Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
5. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
6. Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Jatim Kustodian.

60. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

61. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 15 Januari 2024.

59. BANK CUSTODY

Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK number: S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

1. *Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*
2. *Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*
3. *Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*
4. *Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*
5. *Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and*
6. *Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank Jatim's Custodian Unit.*

60. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Financial Accounting Standards Board and are relevant to the Bank, but is not yet effective for financial statements ended December 31, 2023:

Effective on or after January 1, 2025:

- *PSAK 74, "Insurance Contracts", adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 71 and PSAK 72.*

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the financial statement of the Bank.

61. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on January 15, 2024.

2023

Laporan Tahunan



Alamat Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmad 98 – 104,
Surabaya 60271

Telp : (62-31) 5310090-5310099

Fax : (62-31) 5310838

Email : info@bankjatim.co.id